



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2027;

- b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2027.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

- a. bab i berisi pendahuluan;
- b. bab ii berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab iii berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab iv berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab v berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab vi berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. bab vii berisi penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN), pada Pasal 5, menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Dengan demikian RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Pemalang menjabarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Pemalang yang dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai Tahun 2025 dan realisasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akan ditargetkan pada tahun 2027.

Mendasari Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, Program Strategis Nasional (ProSN) serta pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 menggunakan 5 (lima) pendekatan proses, yaitu

pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) serta menggunakan pendekatan substansi secara THIS yaitu tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan tersebut, proses penyusunan RKPD melibatkan pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media, yang dikenal dengan sebutan pentahelix. Pelibatan pentahelix dimaksudkan agar terbangun kebersamaan, kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan serta rasa memiliki. Dengan melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RKPD, mempertimbangkan seluruh unsur yang saling berkaitan, proses yang sinergi dari beberapa sektor, fokus pembangunan yang jelas dan berdasar pada pembangunan kewilayahan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat berkualitas.

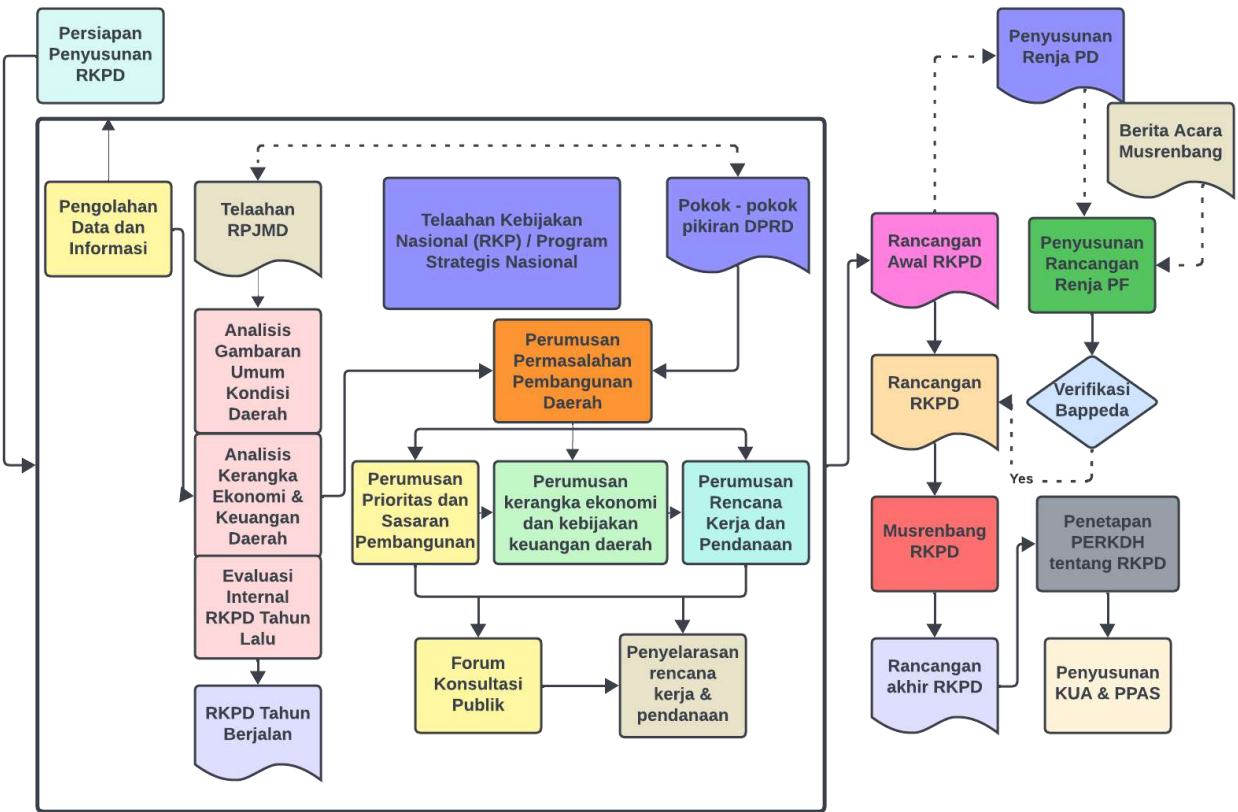
RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, ProSN, dan pedoman penyusunan RKPD;
 - b. Mendasari hasil Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan;
 - c. Dibahas bersama pentahelix pemangku kepentingan pembangunan dalam forum konsultasi publik;
 - d. Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
 - a. Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan ProSN;
 - b. Mendasari hasil forum Perangkat Daerah dan forum pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - a. Proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
 - b. Reviu oleh APIP;

c. Fasilitasi oleh Bappeda Provinsi.

6. Penetapan RKPD

Selanjutnya tahapan penyusunan RKPD disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. dengan tema, "Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM"

Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 juga diarahkan pada dukungan Kabupaten Pemalang terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, ProSN, serta prioritas dan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di kawasan Provinsi Jawa Tengah utamanya kawasan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang).

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027. Selanjutnya RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 juga akan dijadikan

acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Dengan demikian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 akan ditindaklanjuti dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

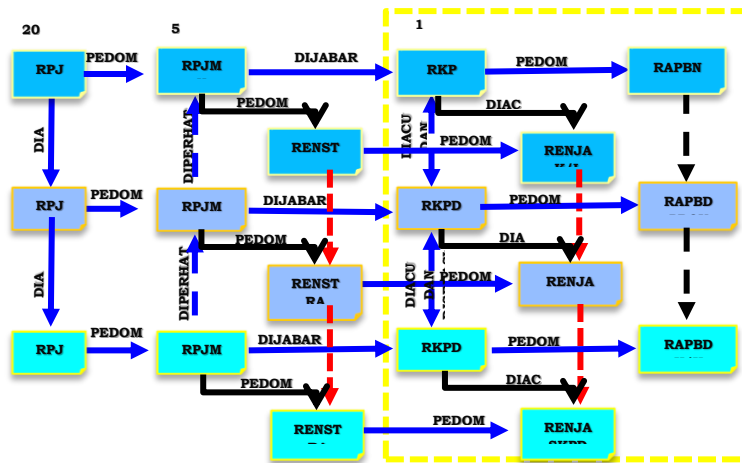
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027, dimana isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dijadikan acuan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang. Melalui sistem aplikasi Krisna, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengusulkan

prioritas pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan pusat dan prioritas kewenangan Daerah yang mendukung prioritas nasional.

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

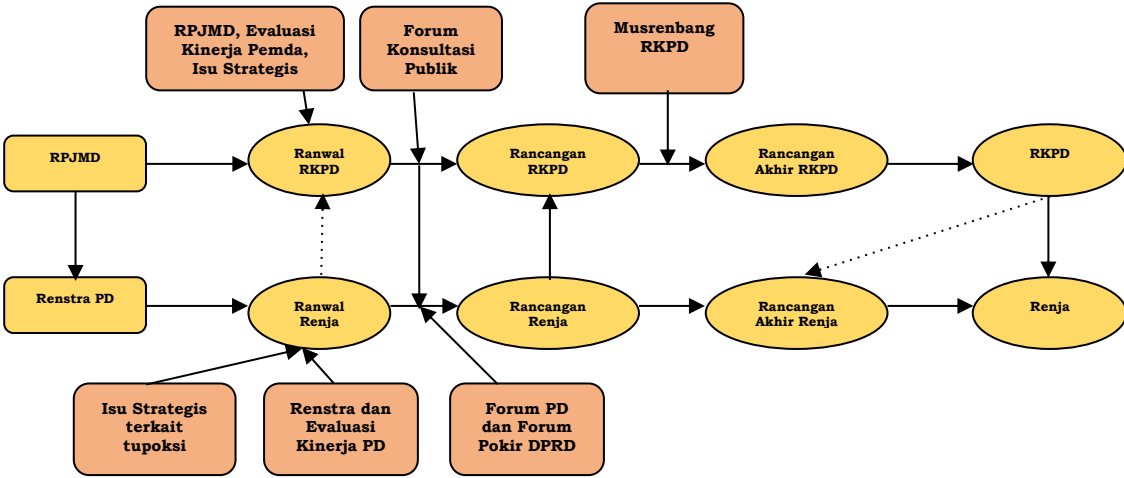
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027, dimana isu-isu strategis dan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah, termasuk rencana pengembangan kewilayahan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) menjadi salah satu acuan penentuan isu strategis dan prioritas pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027, yang juga diselaraskan dengan rencana pembangunan dalam penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program prioritas pembangunan Daerah Tahun 2027 merupakan program-program yang prioritas dari RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan pada RKPD dan disesuaikan dengan isu-isu strategis yang dirumuskan berdasar permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang ada. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD yang dijabarkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah guna mewujudkan visi **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

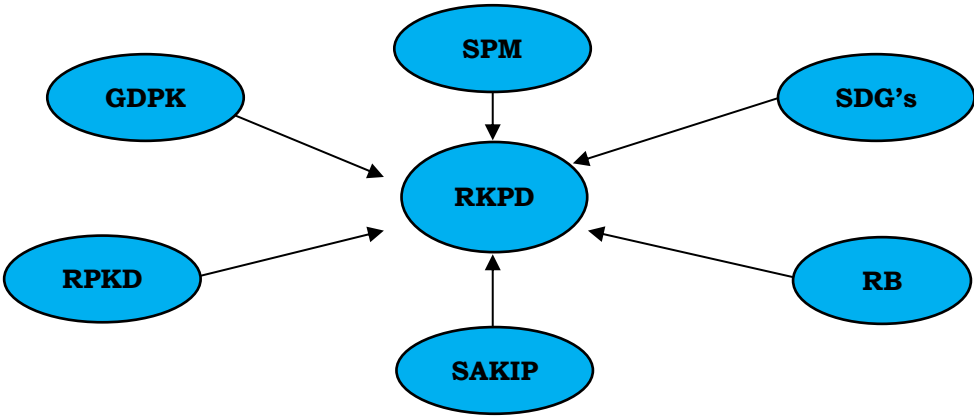
Prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 selain merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 juga berasal dari identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan sektoral Tahun 2025 dan 2026 yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Selanjutnya permasalahan sektoral tersebut dirumuskan menjadi isu-isu strategis pembangunan Daerah Tahun 2027. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Proses Iteratif Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan Dokumen Sektoral Lainnya

Beberapa dokumen sektoral yang menjadi bahan masukan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Pemalang Tahun 2025, Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2045. Indikator kinerja SPM dan SDGs dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 menjadi bahan masukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2027. Target RPKD dan GDPK Kabupaten Pemalang Tahun 2027 menjadi target yang akan dicapai untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kependudukan pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027.



Gambar 1.4.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Sektor lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.2. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah untuk menyiapkan rencana pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan memedomani RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, memperhatikan arah kebijakan Pusat dan Provinsi serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4.3. Tujuan

- Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah:
1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun dengan sistematika:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan analisis terhadap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat Daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diuraikan sesuai urusan.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

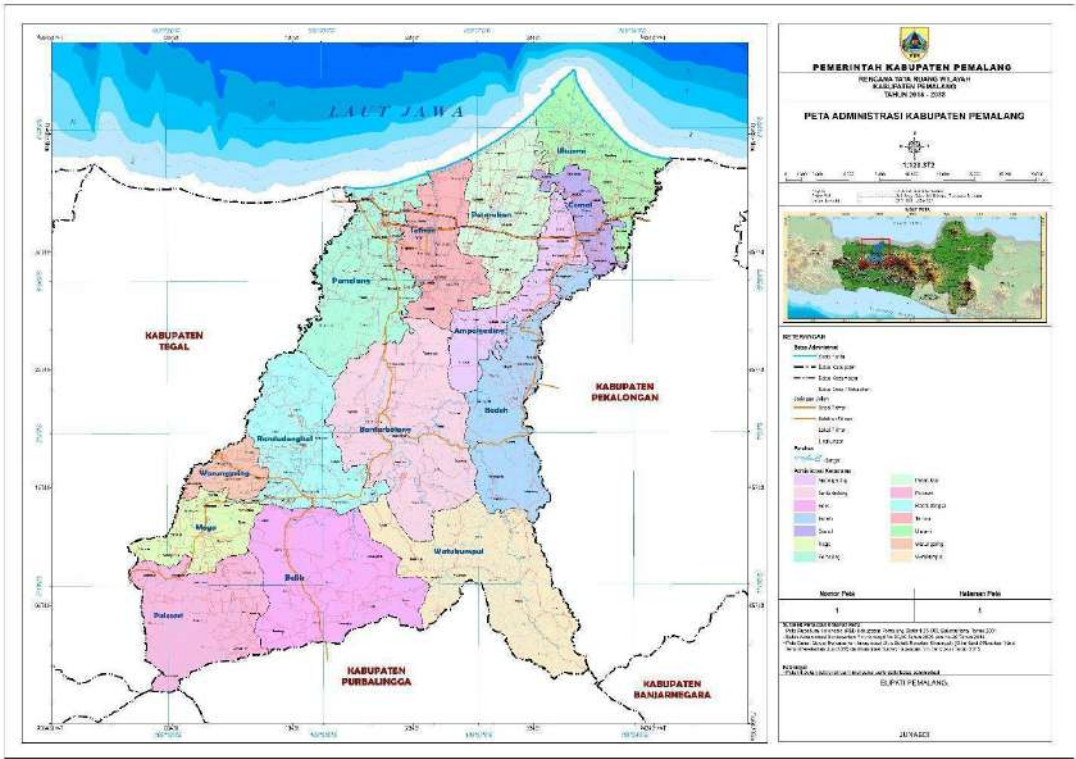
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Kondisi Geografi dan Administrasi

Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah 1.115,30 Km² atau sebesar 3,40 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Pemalang berada di Wilayah Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa dan wilayah pegunungan di sekitar Gunung Slamet Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Secara astronomis letak Kabupaten Pemalang berada di antara 109°11'13.452"–109°35'45.969" Bujur Timur (BT) dan di antara 6°46'22.17"–7°14'55.879" Lintang Selatan (LS).

Wilayah Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan pada bagian timur, Kabupaten Tegal pada bagian barat, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas pada sebelah selatan, dan Laut Jawa pada bagian utara.

Untuk melihat secara menyeluruh batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 - 2038

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036, Kabupaten Pemalang masuk dalam Kawasan Perkotaan Inti II yang merupakan pusat pengembangan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan, jasa pemasaran buah-buahan dan kawasan industri. Kegiatan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan dan jasa pemasaran buah-buahan

dipusatkan di Kecamatan Pemalang, sedangkan kegiatan industri dipusatkan di Kecamatan Comal.

Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 35 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, selain itu juga sangat strategis karena berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya. Kabupaten Pemalang dilintasi oleh jalur transportasi utama, meliputi:

- Jalan Tol Trans Jawa (Trans Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang)
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Cirebon
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Purwokerto – Jogjakarta – Surabaya

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 212 desa, 11 kelurahan dan, 1.307 RW serta 6.526 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang seluas 139,19 Km² (12,48%) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring seluas 26,31 Km² (2,36%).

Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Moga	41,40	3,71	10	-	60	305
2	Pulosari	87,52	7,85	12	-	55	292
3	Belik	124,54	11,17	13	-	85	393
4	Watukumpul	129,02	11,57	15	-	77	349
5	Bodeh	85,98	7,71	19	-	78	310
6	Bantarbolang	139,19	12,48	17	-	79	361
7	Randudongkal	90,32	8,10	18	-	74	494
8	Pemalang	101,93	9,14	13	7	186	840
9	Taman	67,41	6,04	19	2	182	823
10	Petarukan	81,29	7,29	19	1	101	812
11	Ampelgading	53,30	4,78	16	-	92	412
12	Comal	26,54	2,38	17	1	101	439
13	Ulujami	60,55	5,43	18	-	106	504
14	Warungpring	26,31	2,36	6	-	31	192
Jumlah		1.115,30	100	212	11	1.307	6.526

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

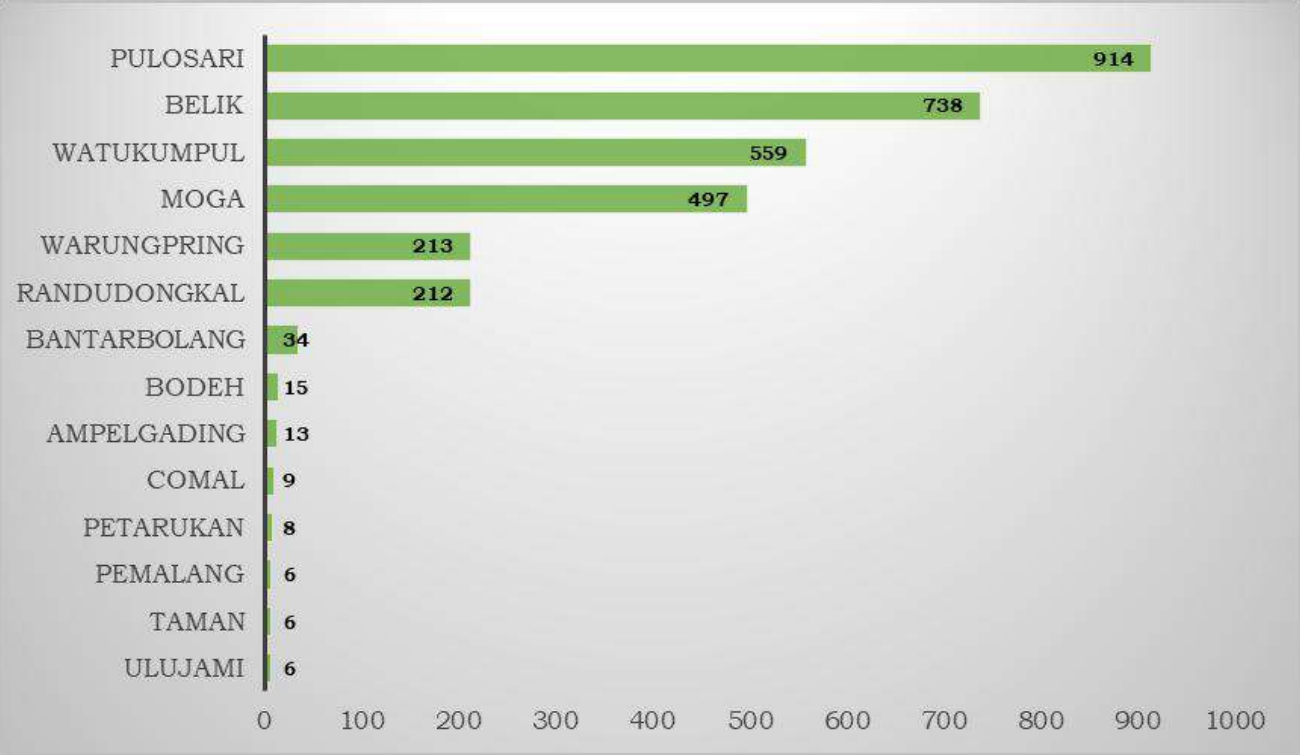
b. Topografi

Secara topografis Kabupaten Pemalang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Daerah Dataran Pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter diatas permukaan air laut (dpl); meliputi 17 desa dan 2 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.

- 2. Daerah Dataran Rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 9 kelurahan di bagian selatan dari Daerah Dataran Pantai.
- 3. Daerah Dataran Tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 77 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
- 4. Daerah Pegunungan yang terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter dpl, meliputi 39 desa yang terletak di bagian selatan.
 - b) Daerah berketinggian 925 meter dpl, meliputi 10 desa yang terletak di bagian selatan.

Secara rinci ketinggian wilayah di Kabupaten Pemalang berdasarkan letak ibu kota kecamatan adalah sebagai berikut:



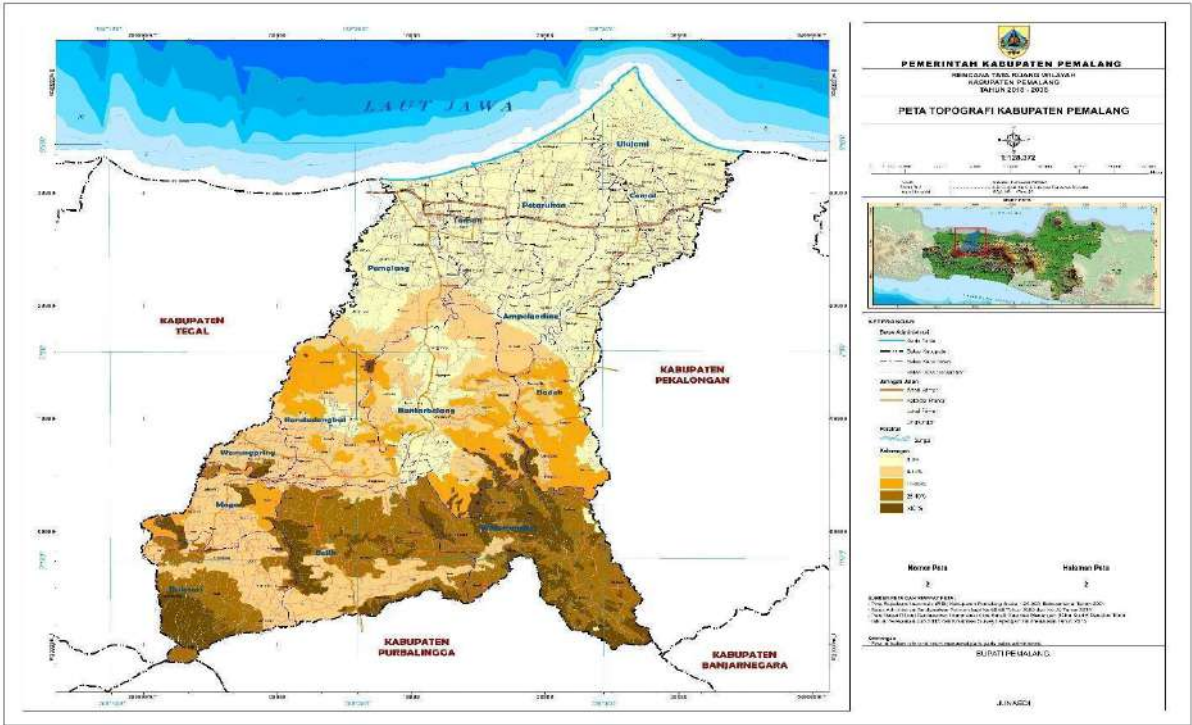
Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

Gambar 2.2.
Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan (mdpl)

Ketampakan Bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0% sampai lebih dari 40% dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Kemiringan 0 – 8%
Berpotensi untuk pengembangan tanaman lahan basah, pertanian lahan kering dan permukiman. Berada di seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Ulujami dan Comal, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
- 2. Kemiringan 8 – 15%
Berpotensi untuk dikembangkan lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering. Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang, sebagian di wilayah

- Kecamatan Pulosari dan Belik, sebagian kecil di Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Ampelgading, Taman dan Pemalang.
- 3. Kemiringan 15 – 25%
Berpotensi untuk pembudidayaan tanaman keras (tahunan) baik sebagai tanaman produksi maupun sebagai tanaman *buffer*. Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh dan Moga, sebagian kecil di Kecamatan Pemalang dan Ampelgading.
 - 4. Kemiringan 25 – 40%
Berpotensi untuk pengembangan tanaman keras (tahunan) baik sebagai tanaman produksi maupun sebagai tanaman *buffer*. Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Warungpring.
 - 5. Lebih dari 40%
Berpotensi longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung. Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Bantarbolang, Moga dan Warungpring.
- Peta kemiringan lahan Kabupaten Pemalang terlihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pemalang

c. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Pemalang meliputi gambaran jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang mempengaruhi lingkungan fisik.

1. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik, dengan rincian:

- a) Jenis tanah aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Taman Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.
- b) Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- c) Jenis tanah latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

2. Struktur Geologi

Struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, formasi tapak, formasi rambatan, lava Gunung Slamet dan formasi haling dengan rincian:

- a) Struktur aluvium terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, bagian utara dan Bodeh.
- b) Formasi tapak terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang.
- c) Formasi rambatan terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh, dan sebagian Kecamatan Randudongkal.
- d) Struktur batuan produk gunung api – tak terpisahkan terdapat di sebagian besar Kecamatan Randudongkal.
- e) Struktur batuan produk gunung api – lava terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Pulosari.
- f) Formasi halang terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.

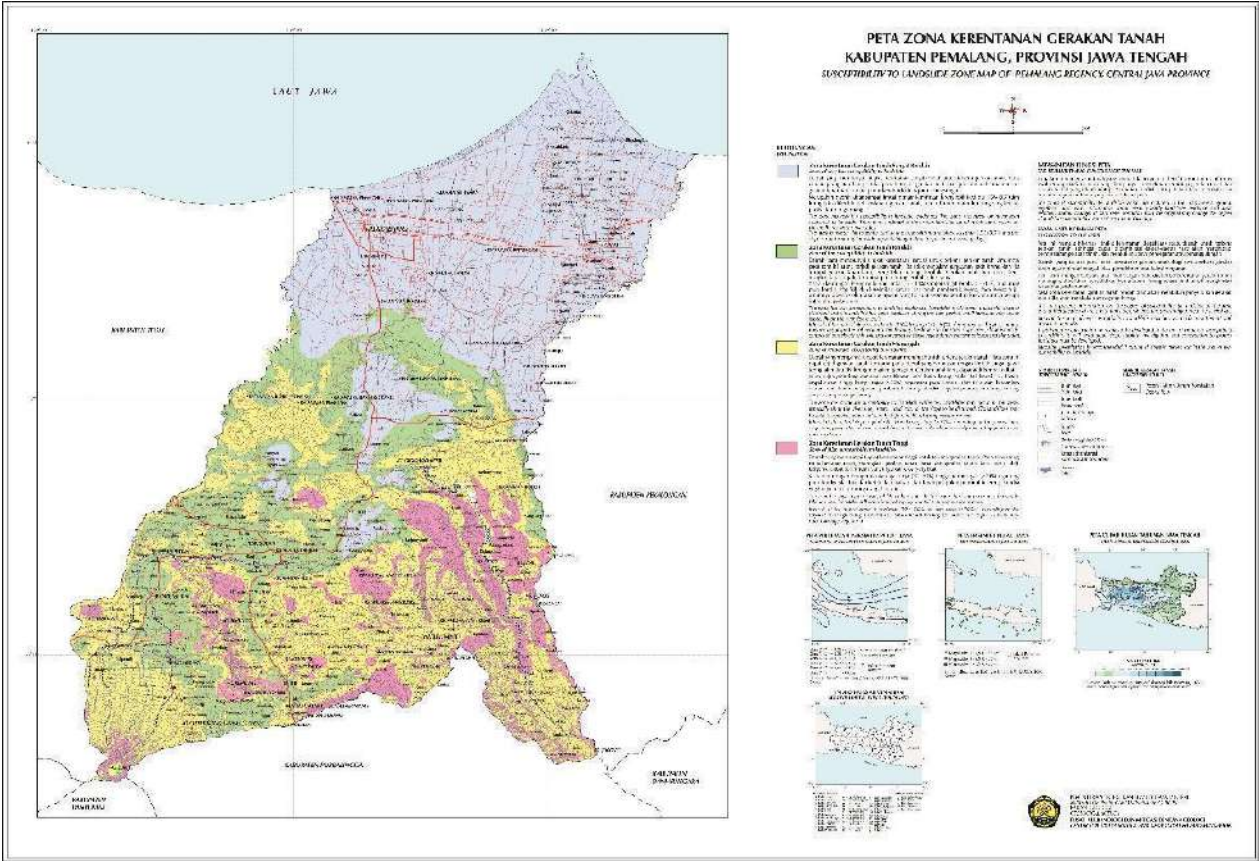
Kabupaten Pemalang mempunyai kandungan mineral cukup besar sehingga berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan kegiatan pertambangan mineral. Namun pengembangan kawasan pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan karena eksploitasi bahan tambang yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam.

3. Gerakan Tanah

Wilayah Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi gerakan tanah, yaitu:

- a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah, terdapat di:
Seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Comal dan Ulujami, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman dan Ampelgading, sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
- b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, terdapat di Sebagian besar di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring dan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pulosari, Belik, Pemalang, Taman dan Ampelgading.

- c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah, terdapat di:
Sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, sebagian di wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan Moga, sebagian kecil di wilayah Kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Warungpring.
- d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, terdapat di:
Sebagian di wilayah Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Belik dan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Moga.
Hal tersebut diatas disebabkan oleh struktur batuan/geologi, jenis tanah, gerakan vulkanis/aktivitas gunung berapi dan sesar. Sesar terdapat di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Disamping itu terdapat Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal.
Berikut adalah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang:



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Gambar 2.4.

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang

d. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sumber air, yaitu:

1. Air Permukaan

Wilayah Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Comal yang memiliki anak sungai sekitar 85 buah yang mengalir dari hulu sungai di kaki Gunung Slamet sampai hilir bermuara di Laut Jawa. Sungai Comal merupakan sungai yang paling besar pengaruhnya di Kabupaten Pemalang dengan lebar lebih dari 15 meter dan panjang sekitar 91

Km. Wilayah yang dialiri Kecamatan Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Comal dan Ulujami.

Sedangkan sungai besar lainnya yang cukup berpengaruh adalah:

- a) Sungai Waluh: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 56,1 Km di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Taman
- b) Sungai Layangan: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 8,9 Km di Kecamatan Bodeh
- c) Sungai Polaga: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 33,3 Km di Kecamatan Belik, Watukumpul dan Bantarbolang
- d) Sungai Lumeneng: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 20,4 Km di Kecamatan Watukumpul dan Bantarbolang
- e) Terdapat sekitar 85 sungai dengan lebar kurang dari 10 meter yang tersebar dari daerah hulu sampai hilir
- f) Disamping itu terdapat Sungai Rambut yang sebagian besar alirannya menjadi perbatasan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal.

2. Mata Air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber air berupa mata air yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa sumber mata air yang selama ini telah dimanfaatkan oleh PDAM, antara lain:

- a) Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur/ Desa Sodong Basari Kecamatan Belik. debit 250 Lt/detik, dimanfaatkan 250 Lt/detik kondisi tidak terpengaruh musim.
- b) Mata Air Bulakan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 20 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- c) Mata Air Kemiri Dukuh Sodong Desa Sikasur Kec Belik debit maksimal 18 Lt/detik dimanfaatkan 18 Lt/detik
- d) Mata Air Cipanas Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 42 Lt/detik dimanfaatkan 42 lt
- e) Mata Air Cipete di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 20 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- f) Mata Air Moga lokasi di Desa Moga Kecamatan Moga dengan debit maksimal 120 Lt/detik dimanfaatkan 120 Lt/detik.
- g) Mata Air Pucung di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal debit maksimal 12 Lt/detik dimanfaatkan 12 Lt/detik.
- h) Mata Air Sumur Wadon Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal debit maksimal 200 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/ detik.
- i) Mata Air Suci di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 10 Lt/detik dimanfaatkan 10 Lt/detik.
- j) Mata Air Si Cipluk Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 11 Lt/detik dimanfaatkan 11 Lt/detik
- k) Mata Air Ketuk di Desa Kebanggan Kecamatan Moga debit Maksimal 60 Lt/detik dimanfaatkan 60 Lt/detik
- l) Mata Air Santen di Kecamatan Moga debit Maksimal 100 Lt / detik dimanfaatkan 100 Lt/detik
- m)

3. Air Tanah

Sumber air tanah di Kabupaten Pemalang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Air Tanah Dangkal
Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, pada daerah dekat pantai kualitas kurang baik karena bersifat payau. Ketersediaan air tanah dangkal sangat dipengaruhi air hujan.
- b) Air Tanah Dalam berupa Cekungan Air Tanah (CAT)
Terdapat 2 (dua) CAT yaitu CAT Bumiayu meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal dan CAT Pekalongan – Pemalang meliputi daerah Pantura Pemalang sampai dengan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh dan Bantarbolang.

e. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau, dengan suhu rerata tahun 2025 berkisar antara 28,6°C dengan suhu terendah 23,9°C di bulan Juli dan tertinggi 33,8°C di bulan Oktober. Jumlah hari hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 mencapai rata – rata 171 yang terpantau dari 17 Stasiun pemantau hujan. Jumlah hari hujan terendah pada bulan Juli dengan rata-rata 5 hari hujan, sedangkan tertinggi pada bulan Januari dengan rata-rata 23 hari hujan. Jumlah rata – rata curah hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 mencapai 326,50mm yang terpantau dari rata – rata 17 stasiun pemantau. Adapun bulan dengan curah hujan paling rendah adalah bulan Juli sebesar 69,2mm. Sedangkan curah hujan paling tinggi pada bulan Desember sebesar 730,3mm. Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan di Kabupaten Pemalang dirinci berdasarkan masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Hari Hujan Per Bulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (hari)

No	Stasiun	Hari Hujan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Kejene	21	19	18	16	16	10	3	8	11	12	21	20	175
2	Warungpring	23	24	26	28	8	10	10	3	9	8	22	28	199
3	Kecepit	27	22	17	17	18	8	2	10	12	12	21	17	183
4	Randudongkal	27	23	21	20	19	10	1	11	12	14	20	19	197
5	Nambo	26	25	18	17	16	7	2	10	12	8	17	19	177
6	Moga	21	13	9	11	17	20	5	4	14	21	19	22	176
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0
8	Belik	30	25	29	24	27	20	13	21	19	23	23	24	278
9	Banjardawa	17	21	18	10	10	8	2	8	6	10	17	15	142
10	Sungapan	19	19	20	12	11	9	5	11	7	11	18	16	158
11	Karangsuci	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0
12	Klareyan	18	14	15	7	8	6	4	7	5	12	16	16	128

No	Stasiun	Hari Hujan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
13	Karangtengah	16	14	14	5	8	5	2	5	5	9	15	15	113
14	Sokawati	26	22	17	10	16	7	5	8	8	12	17	16	164
15	Bantarbolang	20	21	18	15	15	7	2	7	9	9	17	17	157
16	Pedagung	18	23	18	14	14	6	1	13	11	8	17	18	164
17	Watukumpul	29	27	28	27	27	21	10	18	17	21	21	25	271
18	Sipedang	30	27	28	26	26	21	11	19	19	22	22	25	277
19	Bongas	30	27	28	27	27	21	13	21	17	23	22	26	282
Rata - Rata		23	22	20	17	17	12	5	11	11	14	19	20	146

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

Tabel 2.3.
Curah Hujan Perbulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (mm)

No	Stasiun	Curah Hujan (mm)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kejene	543	287	377	281	183	118	21	94	267	187	313	219
2	Warungpring	522	776	487	384	52	166	65	21	106	63	348	534
3	Kecepit	891	561	480	308	351	166	17	246	235	366	345	381
4	Randudongkal	1.127	605	498	228	438	258	32	334	235	403	384	189
5	Nambo	790	493	525	242	297	64	84	338	235	210	278	329
6	Moga	1.229	301	241	283	364	649	354	156	294	486	637	526
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8	Belik	1.189	586	647	711	451	300	115	356	396	622	644	1049
9	Banjardawa	344	306	311	87	202	87	7	55	30	82	211	244
10	Sungapan	327	302	338	109	227	105	14	71	38	109	252	276
11	Karangsuci	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
12	Klareyan	195	215	92	22	39	40	8	50	22	119	168	226
13	Karangtengah	360	390	198	143	133	25	8	24	40	55	264	461
14	Sokawati	514	283	319	115	145	45	45	100	51	136	301	329
15	Bantarbolang	632	397	482	105	136	122	31	109	238	133	337	337
16	Pedagung	464	359	447	133	156	80	17	116	156	108	355	338
17	Watukumpul	1.168	728	744	731	700	297	124	227	181	569	407	338
18	Sipedang	1.065	686	849	455	610	298	103	356	266	410	396	729
19	Bongas	1.010	713	740	445	603	242	131	344	252	413	373	757
Rata - Rata		730,3	469,9	457,4	281,3	119,0	125,5	39,4	176,3	178,9	263,0	353,7	458,8

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, BPS 2026

Dalam kurun waktu tahun 2020-2025, rata-rata curah hujan terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 218,00 mm dan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada Tahun 2024 dan 2025 sebesar 323,45 mm.

Tabel 2.4.
Rata-rata curah hujan per bulan (mm²) Kabupaten Pemalang tahun 2021-2025

No	Bulan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	738	681	260,70	499,4	499,4
2	Februari	846	551	257,10	593,8	593,8
3	Maret	501	370	191,30	499,2	499,2
4	April	292	375	123,90	678,8	678,8
5	Mei	145	340	56,60	119	119
6	Juni	170	305	94,10	125,5	125,5
7	Juli	63	212	32,70	39,4	39,4
8	Agustus	112	102	3,50	13,6	13,6
9	September	177	244	-	126,3	126,3
10	Oktober	238	448	0,60	96,4	96,4
11	November	518	384	72,90	400,1	400,1
12	Desember	452	474	158,70	689,9	689,9
Rata-rata		254,00	218,00	297,00	323,45	323,45

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026 (diolah)

f. Penggunaan Lahan

Sekitar 31,51% lahan di Kabupaten Pemalang digunakan untuk sawah, dimana sekitar 80,40% berupa sawah irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian lahan sawah menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang dominan dan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Sedangkan penggunaan lahan untuk bangunan dan sekitarnya sekitar 23,53%. Disamping itu, terdapat penggunaan lahan berupa tambak di kawasan pesisir yang secara ekonomi cukup berpengaruh. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.5.
Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Luas Lahan (Km²)								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangun an & Sekitar nya	Tegalan / Kebun	Kehutan an + Hutan Rakyat	Ladang/ Huma	Tambak / Kolam	Perkebu nan	Lain- Lain	
Moga	11,69	11,78	7,00	0,55	0,00	0,00	1,90	2,48	23,71
Warungpring	9,98	9,02	2,72	1,96	0,00	0,00	0,50	0,88	15,08
Pulosari	2,40	10,12	41,29	1,24	0,00	0,00	0,75	0,68	54,08
Belik	24,73	23,98	23,44	8,05	0,00	0,00	1,11	0,02	56,60
Watukumpul	33,26	16,98	18,62	6,27	0,00	0,00	0,00	0,05	41,91
Bodeh	26,50	15,23	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	25,09
Bantarbolang	28,91	30,11	8,43	0,00	0,23	0,00	2,92	0,00	41,69
Randudongkal	33,63	13,79	9,83	0,94	0,00	0,00	1,01	0,00	25,57
Pemalang	40,34	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	23,27
Taman	36,72	21,58	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
Petarukan	52,54	26,94	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	28,75
Ampelgading	31,18	17,48	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
Comal	12,15	13,26	0,76	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39

Kecamatan	Luas Lahan (Km²)								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangun an & Sekitar nya	Tegalan / Kebun	Kehutan an + Hutan Rakyat	Ladang/ Huma	Tambak / Kolam	Perkebu nan	Lain- Lain	
Ulujami	19,10	29,31	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
Jumlah	354,44	262,42	134,43	19,37	0,23	0,00	8,19	7,88	432,51

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, BPS 2026

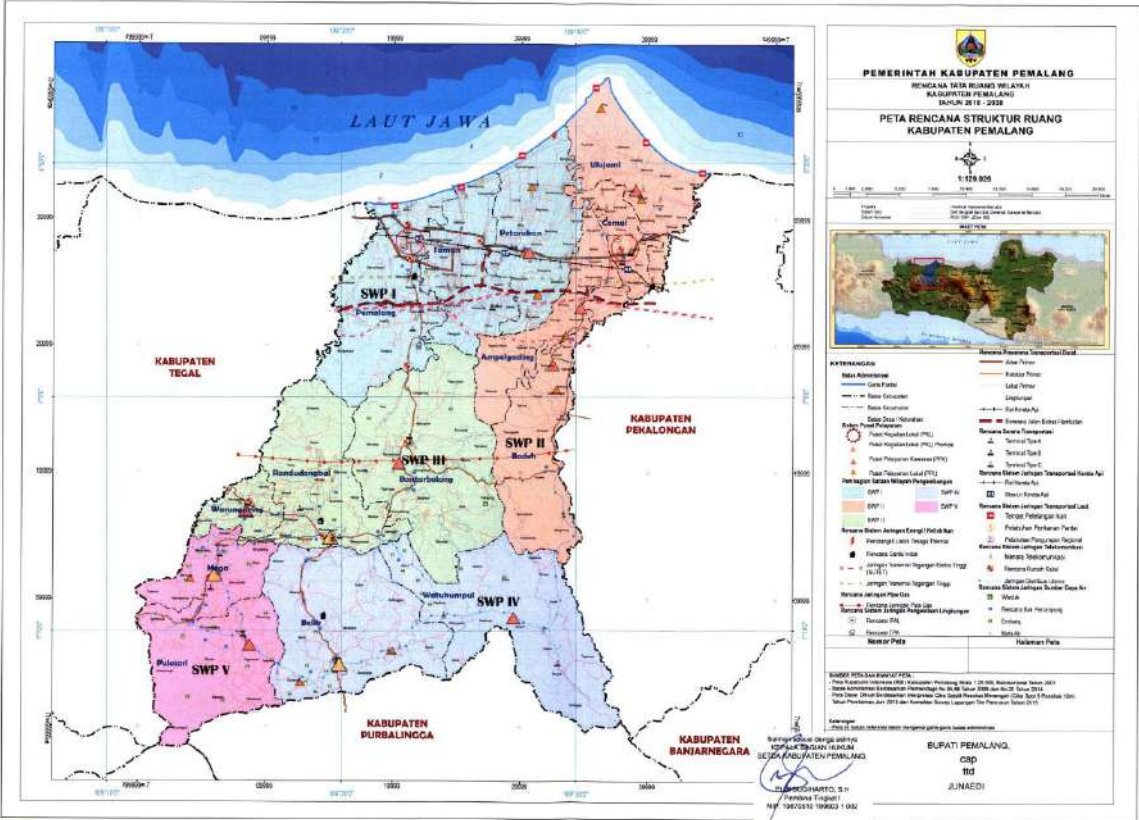
g. Potensi Pengembangan Wilayah

Setiap wilayah di Kabupaten Pemalang memiliki potensi dan karakter yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, selain itu beberapa wilayah harus tetap dilindungi dan dipertahankan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, antara lain:

1. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
2. pembangunan prasarana daerah;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
4. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah;
6. pengembangan industri; pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dan pengembangan kawasan strategis daerah.

Berikut adalah gambaran peta rencana struktur ruang di Kabupaten Pemalang,

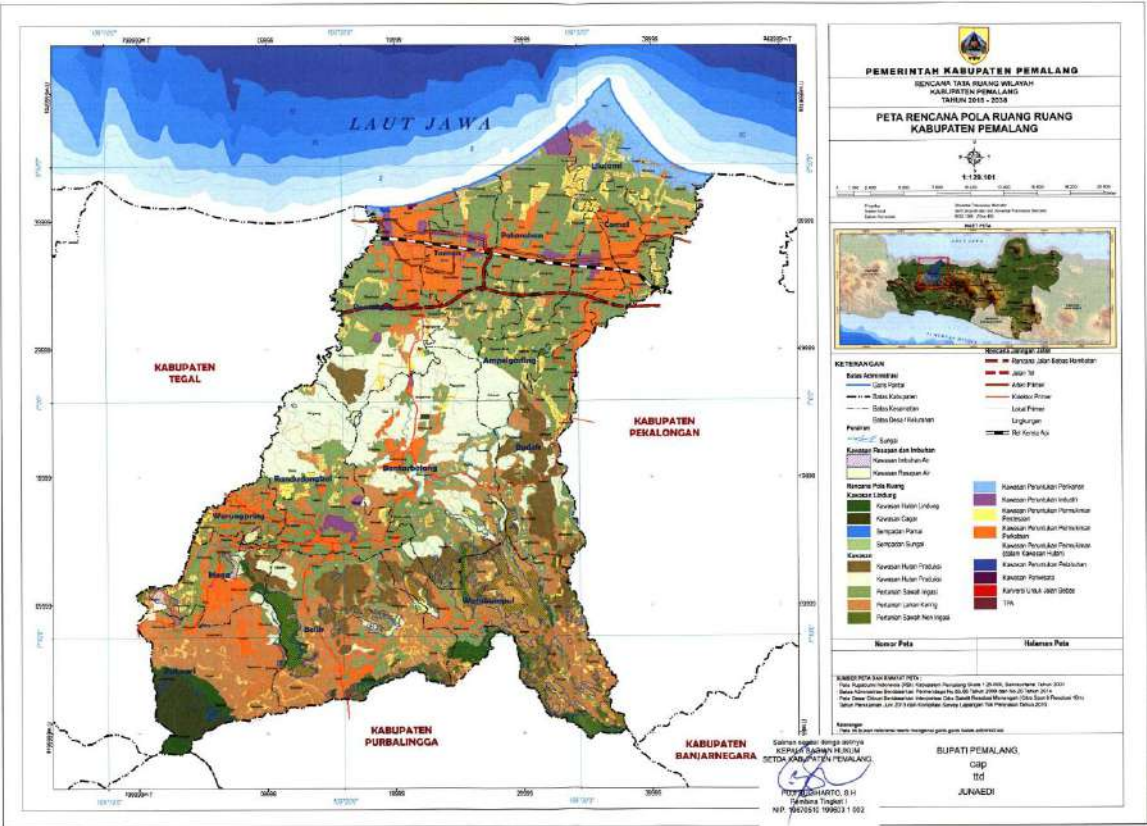


Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.5.

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Berikut ini disampaikan peta pola ruang Kabupaten Pemalang



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.6.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Wilayah Kabupaten Pemalang secara umum terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang dimaksud berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung, dengan luas $\pm$ 5.395 hektar. Tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Moga, Pulosari, dan Watukumpul.
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan ini berupa kawasan resapan air, direncanakan luas $\pm$ 7.589 hektar. Tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, dan Watukumpul.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan yang dimaksud terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi, dan ruang terbuka hijau perkotaan.
 - Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari garis pantai, tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.
 - Sempadan sungai meliputi sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, dan sungai yang terpengaruh pasang air laut. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang dilalui Sungai Waluh beserta 45 anak sungai, Sungai Rambut beserta 15 anak sungai, Sungai Comal beserta 85 anak sungai.
 - Sempadan saluran irigasi meliputi saluran irigasi bertanggung, saluran irigasi tidak bertanggung, saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, saluran pembuangan irigasi, dan bangunan irigasi. Baik kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan meliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu. Rencana pengembangan seluas $\pm$ 4.563 hektar di seluruh kawasan perkotaan yang berada pada 14 kecamatan.
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Cagar alam meliputi Cagar Alam Bantarbolang di Desa Kebon Gede dengan luas 24,1968 hektar, Cagar Alam Moga di Desa Banyumudal dengan luas 3,8824 hektar, dan Cagar Alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur dengan luas 2,4867 hektar. Sedangkan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi:
 - Situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang;

- Gedung Badan Kesbangpol (Gedung Landraad), gedung SMA Negeri 3 Pemalang (Gedung MULO), gedung Dinas Perikanan, bekas Gedung Badan Kepegawaian Daerah (Gedung ELS), Kompleks Makam Masjid Agung Pemalang dan Kompleks Makam Yudanegara di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Makam Belanda di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Pabrik Gula Sumberharjo di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Dinas Kesehatan dan Kompleks Stasiun Kereta Api Pemalang di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang;
 - Gedung Pegadaian Pemalang di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang;
 - Gedung eks Koramil Taman di Kelurahan Beji Kecamatan Taman;
 - Kompleks Stasiun Kereta Api Petarukan di Desa Serang Kecamatan Petarukan;
 - Gedung UPPU Wilayah V dan Gedung eks Koramil Petarukan (eks Pabrik Gula Petarukan) di Kelurahan Petarukan;
 - Gedung Pegadaian Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal;
 - Kompleks Stasiun Kereta Api Comal di Desa Purwosari Kecamatan Comal;
 - Kolam Renang Comal Baru di Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading;
 - Situs Watu Tumpeng di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;
 - Pos Penjagaan Kebun Kakao di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal;
 - Watu Tugu (Menhir) di Desa Pepedan Kecamatan Moga;
 - Kompleks PTPN IX Kebun Semugih, Gedung Polsek, Gereja Kristen Jawa Pendopo Kecamatan Moga dan Arca Ganesha di Pemandian Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga;
 - Pendopo Kemantren di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring;
 - Kubur Batu Prasejarah (Candi Arca) di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul;
 - Situs Gunung Jimat (Sigogok) di Desa Mendelem Kecamatan Belik;
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan yang dimaksud antara lain :
- Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan Ulujami, Petarukan, Taman dan Pemalang;
 - Kawasan rawan banjir dan genangan di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Belik, Watukumpul, Pulosari, Moga, Randudongkal, Warungpring, Bantarbolang, Bodeh Ampelgading dan Pemalang;
 - Kawasan rawan kekeringan yang terdiri dari rawan kekeringan air bersih dan rawan kekeringan pertanian;
 - Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Belik, Watukumpul, Pulosari, Moga dan Randudongkal;
 - Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Belik, Watukumpul, Pulosari, Moga, Randudongkal, Warungpring, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Taman dan Pemalang

- Kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- f. Kawasan Lindung Geologi
Kawasan ini mencakup kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Pulosari dan Belik yang berada di kaki Gunung Slamet. Serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah direncanakan dengan luas ± 2.376 hektar tersebar di 5 (lima) kecamatan antara lain Randudongkal, Warungpring, Moga, Pulosari, dan Belik. Sedangkan kawasan sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- g. Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan yang dimaksud berupa kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dan perairan yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

2. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya-guna dan berhasil-guna bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan yang dimaksud direncanakan tetap seluas ± 27.373 hektar meliputi kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas 10.530 hektar yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Pemalang, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul. Serta kawasan hutan produksi tetap direncanakan dengan luas ± 16.843 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, Belik, dan Watukumpul.
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan ini mencakup kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering, dengan rincian:
 - Kawasan lahan basah terdiri dari kawasan sawah irigasi direncanakan dengan luas ± 30.301 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kawasan sawah bukan irigasi direncanakan dengan luas ± 841 hektar meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Ampelgading, Bodeh, Warungpring, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul;
 - Kawasan lahan kering direncanakan dengan luas ± 22.114 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Pemanfaatannya dapat berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat, peternakan, perikanan, dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Sebagai upaya untuk melindungi kawasan peruntukan pertanian, maka ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit seluas ± 34.299 hektar meliputi:

- 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Paling sedikit ditetapkan seluas ± 30.299 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
 - 2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Paling sedikit ditetapkan ± 4.000 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan yang dimaksud adalah budidaya tambak, budidaya air tawar, fasilitas perikanan tangkap, dan pengolahan perikanan, meliputi:
- Budidaya tambak direncanakan seluas ± 2.288 hektar meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami;
 - Budidaya air tawar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
 - Fasilitas perikanan tangkap berupa pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan TPI di Kecamatan Taman, dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarana TPI yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pemalang, Petarukan, dan Ulujami;
 - Pengolahan perikanan meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan ini meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan pengusahaan panas bumi, meliputi:
- Pertambangan minyak dan gas bumi berupa daerah terbuka meliputi 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Bantarbolang, dan, Kecamatan Randudongkal;
 - Pertambangan mineral meliputi:
 - 1) mineral logam berada di Kecamatan Bodeh dan kecamatan lainnya
 - 2) mineral bukan logam dan bantuan:
 - a) pasir-batu, tanah urug dan tanah liat terdapat di seluruh wilayah kecamatan;
 - b) tanah lempung meliputi Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Watukumpul; dan Kecamatan Belik;
 - c) Batu gamping meliputi Kecamatan Bodeh, dan Kecamatan Bantarbolang;
 - d) Batu sabak berada di Kecamatan Belik;
 - e) Kaolin meliputi Kecamatan Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul;
 - f) Tras meliputi Kecamatan Pulosari, dan Kecamatan Belik;
 - g) Diorit meliputi Kecamatan Belik, dan Kecamatan Watukumpul;

- h) Marmer berada di Kecamatan Bantarbolang;
 - i) Oker berada di Kecamatan Warungpring;
 - j) Kalsit berada di Kecamatan Bantarbolang;
 - k) Potensi mineral bukan logam dan batuan lainnya di seluruh wilayah daerah.
- Pengusahaan panas bumi berupa Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Panas Bumi Baturaden dan WKP Panas Bumi Guci berlokasi di kawasan sekitar Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari.
- e. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan ini merupakan tempat pemusatan kegiatan industri meliputi industri besar, menengah, dan kecil/mikro. Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana prasarana baik infrastruktur pendukung dan lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI). Sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 pasal 72 ayat (1), Rencana Pengembangan KPI dengan luas sekitar 1.909 hektar tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring, Moga, dan Belik. Sedangkan, untuk rencana pengembangan KI berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, dan Randudongkal.
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan yang dimaksud terdiri dari pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan, dengan rincian:
- Pariwisata alam, meliputi:
 - 1) Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang;
 - 2) Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir dan Sumur Pandan di Kecamatan Petarukan;
 - 3) Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami;
 - 4) Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantarbolang;
 - 5) Kawasan Wisata Gunung Gajah dan kawasan arung jeram di Kecamatan Randudongkal;
 - 6) Kawasan Wisata Telaga Silating, kawasan Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, Curug Lawang dan Wanawisata Candi Batur di Kecamatan Belik;
 - 7) Kawasan Wisata Wana wisata Cempaka Wulung dan Curug Sibedil di Kecamatan Moga;
 - 8) Kawasan Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul;
 - 9) Kawasan perbukitan dan jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari;
 - 10) Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami.
 - Pariwisata budaya, meliputi:
 - 1) gelar prosesi hari jadi Kabupaten;
 - 2) upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syekh Pandanjati di Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang;

- 3) Makam Syekh Maulana Syamsudin di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang;
- 4) Makam Pangeran Benowo Di Desa Penggarit Kecamatan Taman;
- 5) Makam Mbah Palintaran di Desa Bantarbolang;
- 6) Makam Syekh Jambu Karang (Sigeseng) di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan;
- 7) Makam Syekh Maulana Maghribi di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
- 8) Baritan/ sedekah laut tersebar di kawasan pesisir.
- 9) Seni Kerangkeng, sintren, lais, jaran Kepang dan kuntulan.

● Pariwisata buatan meliputi:

- 1) Taman Wisata Air Pantai Widuri;
- 2) Kawasan Wisata Moga;
- 3) Desa - desa Wisata.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan ini meliputi kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Berupa fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meliputi markas Komando Distrik Militer (Kodim) di Perkotaan Pemalang, markas Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan, dan pangkalan satuan Angkatan laut di Kecamatan Pemalang.

Juga fasilitas Kepolisian Republik Indonesia meliputi Kantor Kepolisian Resor (Polres) di Perkotaan Pemalang, Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan, dan Kantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Ulujami.

i. Kawasan Peruntukan Pelabuhan

Kawasan ini diarahkan pada pengembangan pelabuhan perikanan sebagai simpul pendukung aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan daerah. Kabupaten Pemalang memiliki 1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong dan 4 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Mojo, PPI Ketapang, PPI Tasikrejo, dan PPI Tanjungsari. Keberadaan pelabuhan perikanan tersebut menjadi infrastruktur strategis dalam mendukung sektor perikanan tangkap sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi pengembangan adalah Pelabuhan Perikanan Tanjungsari di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang. Selain sebagai pusat aktivitas perikanan, kawasan ini berpotensi dikembangkan menjadi wisata kreatif berbasis kelautan dan perikanan melalui edukasi perikanan, pengolahan hasil laut, wisata kuliner, serta pengenalan budaya pesisir. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan, membuka peluang usaha masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir, sehingga

memerlukan dukungan infrastruktur, peningkatan kualitas kawasan, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

h.Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Pemalang

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Sebagian besar pemanfaatan EBT adalah untuk pembangkit listrik, namun bioenergi berupa CPO juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar sektor transportasi untuk subsidi solar. Berikut data potensi EBT di Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.6.

Data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Pemalang

No	Jenis EBT	Potensi	Keterangan
1	Potensi Angin (MW)	398,92	Kecepatan angin relatif sedang, potensial untuk turbin kecil
2	Potensi Hydro (MW)	3,42	Cocok untuk pembangkit listrik mikrohidro skala desa
3	Potensi Surya (GWp)	3,84	Potensi tinggi karena wilayah tropis dengan penyinaran matahari sepanjang tahun
4	Potensi Biomassa (sampah kota) (MWa)	15,37	Banyak digunakan pada peternakan dan rumah tangga pedesaan
5	Potensi Biomassa Pengembangan (Hutan Produksi Kritis) (Ha)	239	Dapat dimanfaatkan untuk biogas atau pembangkit biomassa

Sumber: Peta Potensi EBT Jawa Tengah, Kementerian ESDM 2023

Secara umum di Kabupaten Pemalang, potensi energi terbarukan yang paling besar berasal dari energi surya, angin, dan mikrohidro. Dengan wilayah dataran luas dan iklim tropis, PLTS menjadi sumber EBT paling realistis untuk dikembangkan di Kabupaten Pemalang dengan radiasi matahari sekitar 3,5–4,7 kWh/m²/hari sangat mendukung pengembangan PLTS.

Peta sebaran potensi EBT di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Wilayah Selatan (Pegunungan):

- Kecamatan Belik
- Kecamatan Pulosari
- Kecamatan Watukumpul

Karakter wilayah:

- banyak sungai
- topografi berbukit

Potensi utama:

- **Mikrohidro (PLTMH)** dari aliran sungai
- **Biomassa** dari hasil pertanian dan perkebunan

2. Wilayah Tengah (Pertanian):

- Kecamatan Randudongkal
- Kecamatan Bantarbolang

- Kecamatan Moga
- Potensi utama:
- Biomassa pertanian (sekam padi, jerami)
 - biogas peternakan
 - PLTS skala rumah tangga
3. Wilayah Utara (Pesisir):
- Kecamatan Randudongkal
 - Kecamatan Bantarbolang
 - Kecamatan Moga
- Karakter wilayah:
- dataran rendah
 - paparan sinar matahari tinggi
 - angin laut.
- Potensi utama:
- Energi surya (PLTS)
 - Energi angin skala kecil

i. Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis Kabupaten Pemalang beserta kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis yang melingkupinya menyebabkan terdapat kawasan yang berpotensi bencana. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB Tahun 2025 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Pemalang sebesar 97,49 masuk pada kelas resiko Sedang. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) kawasan, yaitu:

1. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, yaitu kawasan pantai Kecamatan Pemalang (Desa Lawang Rejo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Desa Danasari), Kecamatan Taman (Desa Asemdayong), Kecamatan Petarukan (Desa Nyamplung Sari, Desa Klareyan, Desa Kendalrejo, dan Kecamatan Ulujami meliputi Desa Pesantren, Mojo, Limbangan, Ketapang, Blendung, Kaliprau, Kertosari, dan Tasikrejo).
2. Kawasan rawan banjir dan genangan, yaitu kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Bantarbolang, Watukumpul, dan Belik. Sedangkan kawasan rawan genangan meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami.
3. Kawasan rawan kekeringan yang dibedakan kekeringan air bersih dan kekeringan pertanian, dimana kekeringan air bersih meliputi Kecamatan Pulosari dan Belik sedangkan kekeringan pertanian meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ampelgading, Ulujami, dan Bodeh.
4. Kawasan rawan angin topan, yaitu meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Warungpring, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Belik, dan Watukumpul.
5. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi Kecamatan Randudongkal, Moga, Pulosari, Watukumpul, Belik, serta meliputi kawasan sepanjang alur Sungai

Comal, Sungai Waluh, Sungai Polaga, Sungai Lumeneng, Sungai Layangan, dan Sungai Rambut.

- 6. Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi kawasan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik.
- 7. Kawasan rawan bencana lainnya, meliputi kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang tersebar di daerah.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2024-2028 yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, potensi ancaman bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Pemalang antara lain:

- 1. Bahaya tanah longsor, daerah dengan tingkat bahaya tanah longsor tinggi yaitu Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Randudongkal, Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul yang didominasi oleh jenis tanah Andosol dan Fluviosoil.
- 2. Bahaya gelombang pasang dan abrasi, kecamatan yang sering dilanda abrasi adalah Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Ulujami dengan tingkat bahaya rendah
- 3. Bahaya banjir, Kabupaten Pemalang memiliki 14 Kecamatan dan semuanya memiliki tingkat bahaya yang tinggi
- 4. Bahaya banjir bandang, daerah dengan tingkat bahaya banjir bandang tinggi yaitu Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul yang merupakan dataran rendah dari Gunung Gajah, Gunung Mendelem, dan Gunung Slamet.
- 5. Bahaya kekeringan, daerah dengan tingkat bahaya kekeringan Tinggi yaitu kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Comal, Kecamatan Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Taman, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul
- 6. Bahaya cuaca ekstrim, Kabupaten Pemalang. 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Pemalang memiliki tingkat bahaya Tinggi terhadap cuaca ekstrem
- 7. Bahaya gempa bumi, yaitu 4 (empat) kecamatan memiliki resiko sedang (Pemalang, Taman dan Ulujami) dan 11 (sepuluh) kecamatan lainnya memiliki resiko rendah.
- 8. Bahaya erupsi gunung api, Kabupaten Pemalang memiliki salah satu gunung api dari 129 gunung api aktif di Indonesia, yaitu gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan gunung aktif tipe A di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di 7o14'30" LS dan 109o12'30" BT

Frekuensi kejadian bencana alam di Kabupaten Pemalang yang cukup tinggi setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.
Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025

No	Jenis Kejadian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjir	16	24	12	13	14
2	Banjir Bandang	2	0	1	0	0
3	Tanah Longsor	46	42	48	31	18
4	Puting Beliung	3	15	13	1	0
5	Kebakaran	55	38	69	53	49
6	Kekeringan	0	0	16	0	4
7	Hujan dan Angin	22	22	34	32	33
8	Angin Kencang	12	16	28	54	45
9	Tersambar Petir	0	1	1	1	0
10	Orang Tenggelam	5	8	13	9	15
11	Gempa	0	0	1	0	0
12	Bencana Lainnya	12	1	0	0	0
Jumlah		173	167	236	194	178
Perkiraan kerugian akibat bencana (juta Rp.)		7.299,2	7.570,3	8.685,8	10.013,24	8.507,23

Sumber: BPBD Kabupaten Pemalang, 2026
Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana di Tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Secara perkiraan jumlah kerugian akibat kejadian bencana yang terjadi sebesar Rp.1.506.012.800. Kebakaran menjadi bencana yang paling banyak terjadi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 49 kejadian. Mendasarkan hal tersebut pemenuhan kebutuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menjadi hal yang perlu direalisasikan untuk menanggulangi besarnya potensi bencana kebakaran, dimana WMK yang tersedia baru sejumlah 3 WMK dari kebutuhan 6 WMK. Selain itu bencana tanah longsor utamanya di daerah Pemalang selatan hal ini disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun 2025 dan disertai kondisi lahan lereng yang mengalami degradasi.

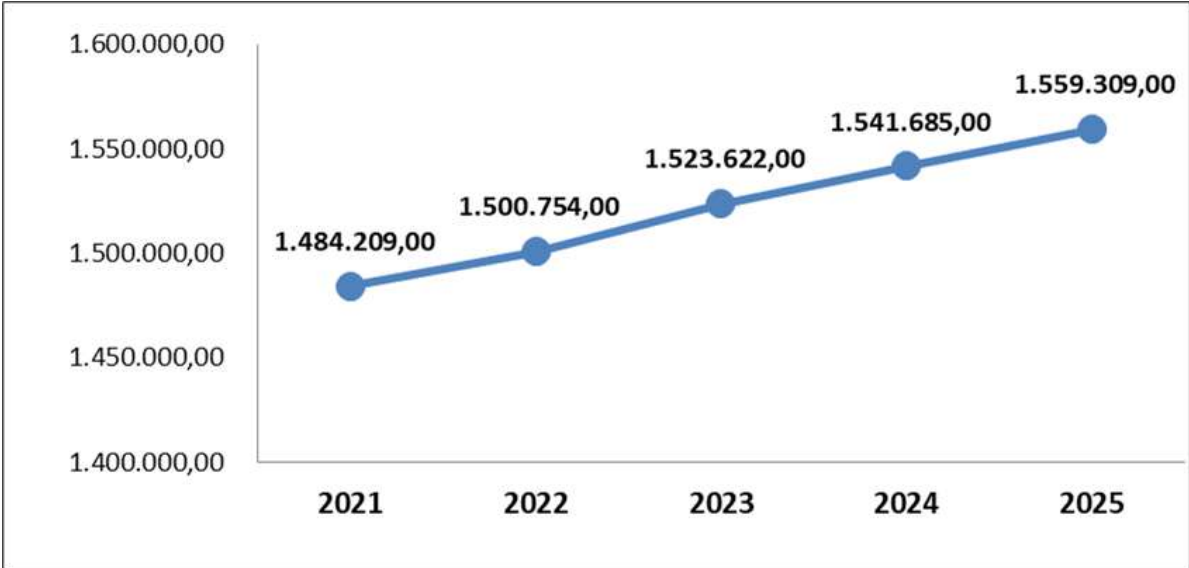
g. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2021 – 2025 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan *release* BPS (Kabupaten Pemalang Dalam Angka Tahun 2026), jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 1.559.306 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,23%.

Tabel 2.8.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025

Tahun	Luas (KM²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
Moga	41,4	77.139	1.863,26
Warungpring	26,31	46.186	1.755,45
Pulosari	87,52	64.655	738,75
Belik	124,54	125.291	1.006,03
Watukumpul	129,02	81.303	630,16
Bodeh	85,98	65.196	766,64
Bantarbolang	139,19	92.122	661,84
Randudongkal	90,32	117.189	1.297,49
Pemalang	101,93	212.386	2.083,65
Taman	67,41	200.052	2.974,37
Petarukan	81,29	180.359	2.218,71
Ampelgading	53,3	78.814	1.478,71
Comal	26,54	97.070	3.657,50
Ulujami	60,55	120.374	1.988,01
Jumlah	1.115,3	1.559.306	1.398,10

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, BPS 2026

Gambar 2.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Dari sisi komposisi penduduk Kabupaten Pemalang didominasi penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,57%. Tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki sebesar 789.560 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 769.746 jiwa. Berdasarkan rasio jenis kelamin, wilayah dengan selisih gender terbesar adalah Kecamatan Watukumpul dengan rasio 106,54%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1.398,10 jiwa/km² di tahun 2025. Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata, yaitu terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Jumlah penduduk pada ketiga

kecamatan tersebut mencapai 593.247 jiwa atau sebesar 38,05% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Warungpring sebesar 2,96% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang. Secara terinci, persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang di tiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

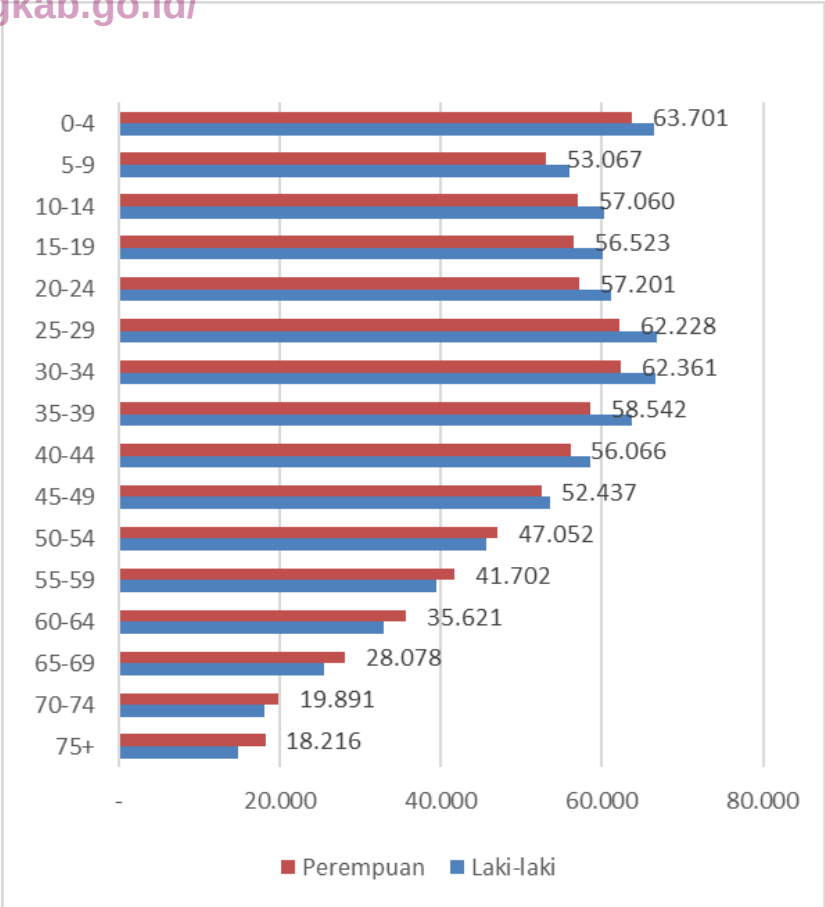
Tabel 2.9.
Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas (KM²)	Penduduk Tahun 2025					Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Sex Rasio	
1	Moga	41,4	39.151	37.988	77.139	4,95	103,06	1.863,26
2	Warungpring	26,31	23.636	22.550	46.186	2,96	104,82	1.755,45
3	Pulosari	87,52	32.638	32.017	64.655	4,15	101,94	738,75
4	Belik	124,54	63.836	61.455	125.291	8,04	103,87	1.006,03
5	Watukumpul	129,02	41.938	39.365	81.303	5,21	106,54	630,16
6	Bodeh	85,98	33.274	32.642	65.916	4,23	101,94	766,64
7	Bantarbolang	139,12	47.016	45.106	92.122	5,91	104,23	662,18
8	Randudongkal	90,32	59.188	58.001	117.189	7,52	102,05	1.297,49
9	Pemalang	101,93	107.312	105.074	212.386	13,62	102,13	2.083,65
10	Taman	67,41	101.473	99.029	200.502	12,86	102,47	2.974,37
11	Petarukan	81,29	91.156	89.203	180.359	11,57	102,19	2.218,71
12	Ampelgading	53,3	39.281	39533	78.814	5,05	99,36	1.478,69
13	Comal	26,54	48.739	48.331	97.070	6,23	100,84	3.657,50
14	Ulujami	60,55	60.922	59.452	120.374	7,72	102,47	1.988,01
PEMALANG		1115,23	789.560	769.746	1.559.306	100,00	102,57	1.398,10

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, BPS 2026

Mendasarkan pada kondisi luas wilayah dan sebaran penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025, paling besar berada di kecamatan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, yaitu di Kecamatan Comal yang mencapai 3.657,50 jiwa/km2 dan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul sebesar 630,16 jiwa/km2. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk berfokus pada daerah industri dan perdagangan. Tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bagaimana mewujudkan persebaran penduduk yang merata melalui dukungan pembangunan/pusat pertumbuhan yang merata pula.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pemalang dibedakan menjadi kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan usia nonproduktif (di dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Tingginya jumlah usia produktif dibandingkan usia non produktif menjadi modal besar bagi Kabupaten Pemalang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Piramida Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin sebagai berikut:



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, BPS 2026

Gambar 2.8.

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Komposisi penduduk usia produktif dan usia nonproduktif juga menunjukkan rasio ketergantungan yaitu perbandingan jumlah penduduk yang dianggap “bergantung” dengan penduduk usia produktif dalam suatu wilayah untuk melihat beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja. Persebaran penduduk usia produktif, usia non produktif, dan rasio ketergantungan di setiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10.

Persebaran Penduduk Usia Nonproduktif, Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Kecamatan	Usia Nonproduktif	Usia Produktif	Rasio Ketergantungan
Moga	25.811	54.060	47,75
Pulosari	21.885	45.127	48,50
Belik	42.953	85.956	49,97
Watukumpul	25.864	55.021	47,01
Bodeh	20.852	45.516	45,81
Bantarbolang	28.427	63.080	45,06
Randudongkal	37.172	82.301	45,17
Pemalang	66.558	147.613	45,09
Taman	62.857	136.815	45,94
Petarukan	57.607	123.957	46,47
Ampelgading	25.362	54.218	46,78
Comal	30.893	69.098	44,71
Ulujami	38.766	82.438	47,02

Kecamatan	Usia Nonproduktif	Usia Produktif	Rasio Ketergantungan
Warungpring	15.252	32.559	46,84
Pemalang	500.259	1.077.759	46,80

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel diatas, rasio ketergantungan di Kabupaten Pemalang sebesar 46,80, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47; orang usia nonproduktif. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Pemalang sudah memasuki periode bonus demografi. Berdasarkan wilayah, kecamatan dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kecamatan Belik dengan rasio 49,97%. Selain Belik, wilayah dengan rasio ketergantungan tinggi juga ditemukan di Kecamatan Pulosari (48,50) dan Moga (47,75). Sementara itu, wilayah dengan rasio ketergantungan terendah berada di Kecamatan Comal (44,71), Kecamatan Bantarbolang (45,06), dan Kecamatan Pemalang (45,09).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan dukungan data beberapa tahun terakhir pada subbab ini.

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang memberikan gambaran terkait dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro kondisi ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam satu tahun.

Kinerja ekonomi Kabupaten Pemalang hingga tahun selama beberapa tahun terakhir cukup baik. DI tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang mencapai 5,80% naik sebesar 0,69% dari tahun 2024 dan secara umum berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,31% dan Nasional 5,01%. Sebagai perbandingan, berikut gambar pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.9.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun (%) 2021-2025

Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang menunjukkan tren perbaikan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Walaupun di tahun 2023 sempat terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan faktor – faktor jangka pendek seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal dampak invasi Rusia dan Ukraina, lemahnya pertumbuhan namun hingga tahun 2025 Kabupaten Pemalang mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang didukung kombinasi sektor primer (pertanian dan perikanan), sekunder (industri/kerajinan), dan tersier (perdagangan, jasa, pariwisata). Sektor jasa dan industri kreatif menunjukkan tren pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang tahun 2025 didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,51%, Industri Pengolahan sebesar 22,14%, dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,33%. Berikut gambaran secara detail pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar.

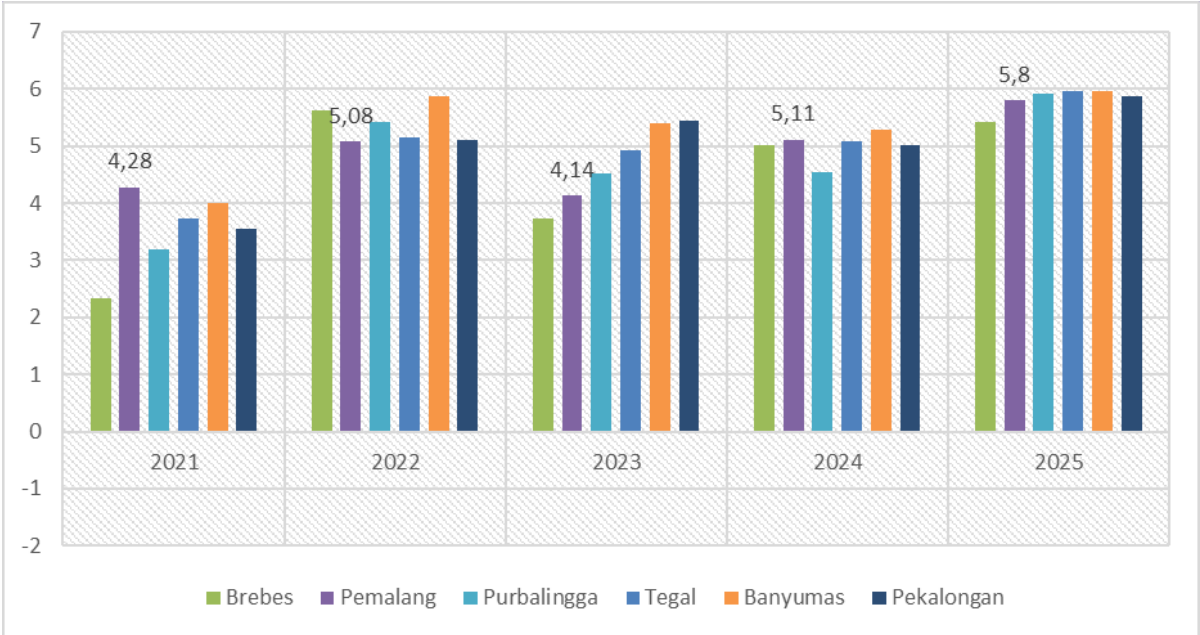
Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Kab. Brebes	Kab. Pemalang	Kab. Purbalingga	Kab. Tegal	Kab. Banyumas	Kab. Pekalongan
2021	2,33	4,28	3,19	3,72	4,00	3,54
2022	5,61	5,08	5,41	5,14	5,86	5,11
2023	3,74	4.14	4,51	4,93	5,40	5.14
2024	5,02	5,11	4,55	5,07	5,29	5,02
2025	5,42	5,80	5,92	5,97	5,97	5,88

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Tabel 2.11 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dengan kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas mencapai tingkat kontribusi tertinggi yaitu sebesar 5,97% diikuti Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pekalongan masing-masing sebesar 5,92% dan 5,88%. Sementara capaian kabupaten Pemalang sebesar 5,80%, diatas Kabupaten Brebes sebesar 5,42%.

Dari Tahun 2021 sampai tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi baik dan meningkat di enam kabupaten maupun provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi enam kabupaten lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Hanya pada Tahun 2023 di 5 (lima) Kabupaten maupun provinsi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan kembali menguat pada tahun 2024 hingga 2025. Perbandingan pertumbuhan ekonomi kewilayahan tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Tahun 2021-2025

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap komponen pengeluaran dan Kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian daerah (PDRB-ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Perkembangan Kontribusi PDRB menurut Jenis Pengeluaran dan Lapangan Usaha dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang 2021-2025

Komponen PDRB		Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jenis Pengeluaran						
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,54	63,25	69,00	74,17	78,92
B	Pengeluaran Konsumsi LNRT	0,13	1,44	1,62	1,96	2,09

Komponen PDRB		Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,83	5,89	6,25	6,50	6,65
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,04	10,70	11,32	12,26	13,81
E	Perubahan Inventori	0,33	0,40	0,44	0,30	0,42
F	Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,26	-1,89	-2,37	-2,06	-1,88
	PDRB	100	100	100	100	100
Lapangan Usaha						
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	27,04	26,57	25,94	25,82	25,51
B	Pertambangan dan Penggalian	3,98	3,77	3,66	3,56	3,61
C	Industri Pengolahan	21,96	21,99	22,39	22,51	22,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,1	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	4,67	4,47	4,63	4,61	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,29	15,33	15,36	15,3	15,33
H	Transportasi dan Pergudangan	1,85	2,98	3,18	3,19	3,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,14	5,42	5,62	5,78	6,28
J	Informasi dan Komunikasi	2,55	2,42	2,42	2,47	2,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,1	3,13	3,01	2,85	2,72
L	Real Estate	1,66	1,62	1,62	1,57	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,79	2,67	2,6	2,66	2,57
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,4	5,32	5,4	5,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,06	1,05	1,06	1,07
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,53	2,64	2,68	2,67	2,81
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2026, BPS 2026

Berdasarkan tabel di atas, dari 2021 hingga tahun 2025 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2025 kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 25,51%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,14%; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,33%, sedangkan lapangan usaha lainnya yang berkontribusi kurang dari 6,5%. Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, terjadi penurunan perkembangan kontribusi di tahun 2025 yaitu sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan sektor lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan selama 5 (lima) tahun kebelakang struktur perekonomian Kabupaten Pemalang terindikasi mulai bergeser, dilihat dari menurunnya

kontribusi sektor lapangan usaha Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan meningkatnya kontribusi sektor lapangan usaha Industri Pengolahan.

Adapun data nominal PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2021-2025 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
PDRB menurut Jenis Pengeluaran dan Lapangan Usaha dalam PDRB (ADHB)
Kabupaten Pemalang 2021-2025

Komponen PDRB		PDRB ADHB (Rp.Ribu)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jenis Pengeluaran						
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21.575.730	23.715.080	25.871.600	27.810.720	29.590.650
B	Pengeluaran Konsumsi LNRT	48.920	541.030	607.270	735.260	783.810
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.185.980	2.207.560	2.343.200	2.436.290	2.492.720
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	391.616	4.011.090	4.245.740	4.598.820	5.178.360
E	Perubahan Inventori	124.920	148.470	165.160	113.760	157.330
F	Net Ekspor Barang dan Jasa	- 848.090	- 707.820	889.750	- 772.080	706.330
	PDRB	3.479.076	29.915.410	32.343.220	34.922.770	37.496.540
Komponen PDRB		PDRB ADHB (Rp.Ribu)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lapangan Usaha						
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	7.421.436,79	7.949.248,40	8.388.878,71	9.009.222,75	9.565.760
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.091.793,34	1.127.204,48	1.184.505,17	1.243.118,75	1.352.580
C	Industri Pengolahan	6.025.481,15	6.578.010,51	7.242.394,1	7.853.651,32	8.300.290
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.541,93	31.840,63	34.450,25	36.622,08	38.300
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.267,73	19742,16	20.426,39	21.709,78	22.120
F	Konstruksi	1.280.473,84	1.337.825,01	1.498.581,59	1.608.407,77	1.7866.200
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.197.519,45	4.586.563,68	4.969.182,89	5.338.267,97	5.747.900
H	Transportasi dan Pergudangan	506.574,60	891.554,00	1.028.779,03	1.112.655,61	1.179.000
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.409.914,04	1.621.730,25	1.822.944,23	2.018.340,22	2.353.710
J	Informasi dan Komunikasi	700.950,07	722.594,11	783.625,37	860.928,33	939.210

Komponen PDRB		PDRB ADHB (Rp.Ribu)				
		2021	2022	2023	2024	2025
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	851.668,69	937.484,14	973.894,49	996.060,45	1.037.970
L	Real Estate	456.410,80	484.660,90	523.585,53	548.205,51	563.980
M,N	Jasa Perusahaan	95.368,28	104.741,71	114.380,78	126.762,59	139.490
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	766.380,20	798.760,02	841.745,25	926.625,94	962.270
P	Jasa Pendidikan	1.587.455,60	1.616.168,04	1.721.170,15	1.885.549,17	2.054.280
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308.990,75	317.305,56	339.275,67	370.027,93	399.890
R,S,T,U	Jasa Lainnya	693.665,47	789.979,08	867.204,22	933.061,24	1.052.940
PDRB ADHB		27.443.892,73	29.915.412,68	32.353.050,68	34.889.217,41	37.496.540

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2026, BPS 2026

Dilihat dari lapangan usaha, PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang memiliki produktivitas hasil pertanian yang besar dan dijadikan lumbung pangan terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.613,44	4,40	4.735,80	2.65	4.735,72	0.00	4.895,65	3,38	5.095,38	4,08
B	Pertambangan dan Penggalian	798,959	3,03	800,67	0.22	817,06	2.05	858,61	5,09	916,20	6,71
C	Industri Pengolahan	3.918,97	3,52	4.095,76	4.51	4.280,64	4.51	4.466,53	4,34	4.676,34	4,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,96	6,22	26,93	3.72	28,75	6.78	30,5	6,07	31,61	3,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,3	5,57	16,47	1.06	16,89	2.51	17,03	0,82	16,82	-1,22
F	Konstruksi	850,37	7,51	834,85	-1.83	896,8	7.42	948,53	5,77	1.043,12	9,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.23,05	7,33	3.381,39	4.62	3.538,33	4.64	3.72095	5,16	3.918,51	5,31
H	Transportasi dan Pergudangan	396,87	1,96	659,79	66.25	703,49	6.62	748,18	6,35	781,93	4,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.107.854,84	6,80	1.254.851,53	13.27	1.394.150,01	11.10	1.517.895,60	8,88	1.742,07	14,77

No	Lapangan Usaha	2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)	Rp (miliar)	Pert (%)
J	Informasi dan Komunikasi	685.738,75	5,66	705.173,91	2.83	762.551,69	8.14	834.922,59	9,49	907,55	8,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	552.736,57	2,43	556.193,32	0.63	565.856,81	1.74	575.553,79	1,71	587,77	2,12
L	Real Estate	365.618,82	4,17	382.194,05	4.53	408.458,00	6.87	426.099,34	4,32	434,60	2,00
M,N	Jasa Perusahaan	67.995,07	3,16	71.623,84	5.34	75.761,27	5.78	81.845,38	8,03	88,20	7,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	542.683,52	-0,84	550.480,71	1.44	567.841,00	3.15	610.534,42	7,52	623,19	2,07
P	Jasa Pendidikan	1.016.132,06	0,12	1.029.424,35	1.31	1.085.634,50	5.46	1.162.566,10	7,09	1.236,19	6,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217.054,94	0,51	219.566,08	1.16	229.912,12	4.71	246.851,89	7,37	262,52	6,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	524.468,98	0,26	574.064,41	9.46	611.695,31	6.56	635.837,90	3,95	690,08	8,53
PDRB ADHK		18,933,194.65	4,28	19,895,335.20	5,08	20.719.581,53	4.14	21.778.063,76	5,11	23.052,08	5,67

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, sebagian jenis lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 14,77%, kemudian disusul Konstruksi tumbuh sebesar 9,97%, dan kemudian Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 8,70%. Tren pertumbuhan kenaikan ke 3 sektor lapangan usaha di Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi berkisar 5–7 persen terhadap PDRB. Peningkatan kontribusi pasca pandemi menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya sektor jasa konsumsi. Ke depan, sektor ini memiliki potensi strategis dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah menuju sektor jasa berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang sebesar 11,60% di tahun 2024. Investasi yang masuk tidak hanya pada sektor manufaktur tetapi juga yang bergerak di bidang makanan dan minuman seperti, Cafe Take It, Kopi Kenangan, Mie Gacoan, Cafe Jagongan Pemalang dan lain-lain.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus mulai fokus untuk mendorong dunia usaha (mengarah pada sektor tersier) yang berbasis teknologi informasi melalui platform bisnis *e-business*, *marketplace* maupun *e-commerce* agar dapat memiliki daya saing dan daya ungkit bagi kemajuan perekonomian daerah, khususnya bagi mereka para pelaku usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha mikro dan kecil di sektor primer dan sekunder pun juga harus diberikan fasilitasi agar bisa memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, akan memperkuat strategi bisnis, perluasan jejaring bisnis untuk menjaga suplai bahan baku, transformasi pengetahuan/teknologi dan perluasan pasar, serta menjalin hubungan dengan pelanggan. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung para pelaku usaha mikro dan kecil akan memacu mereka menjadi pelaku usaha mandiri yang memiliki jiwa wirausaha kuat sehingga akan mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Digitalisasi sektor riil saat ini sudah menjadi suatu keharusan di tengah persaingan global yang semakin ketat sehingga daerah harus mulai berbenah menuju kesana, melalui instrumen kebijakannya. Hal ini sesuai dengan program unggulan Bupati Pemalang yaitu WiFi gratis tiap desa, bantuan modal usaha UMKM, dan perluasan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi lokal.

b. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk selama per tahun yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya menunjukkan kenaikan taraf hidup masyarakat, karena : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi juga non ekonomi, dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu merata di kalangan penerima pendapatan, karena tidak semua faktor produksi, khususnya tenaga kerja, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Berikut adalah perbandingan

antara target dan realisasi PDRB (ADHB) perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025.

Tabel 2.15.
PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Tahun	ADHB (Rp.)	
		Target RKPD	Realisasi
1	2021	15.156.018	18.491.000
2	2022	14.600.000	19.956.000
3	2023	14.900.000	21.235.598
4	2024	14.800.000	22.630.000
5	2025	14.900.000	24.050.000

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

PDRB perkapita di daerah yang semakin meningkat, akan mendorong peningkatan PDRB perkapita nasional. Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai PDRB ADHB perkapita Kabupaten Pemalang tahun 2021-2025 menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Pemalang periode 2021–2025 dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi, meningkatnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa akomodasi makan minum, serta stabilitas sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali turut mendorong peningkatan nilai ekonomi per penduduk. Selanjutnya, pengukuran kinerja peningkatan PDRB perkapita dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Kabupaten Sekitar						Pemalang
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-Rata	
1	2021	2,90%	4,08%	4,45%	4,99%	3,56%	4,00%	4,93%
2	2022	8,29%	8,06%	7,80%	9,19%	6,72%	8,01%	7,64%
3	2023	5,99%	7,17%	7,64%	8,35%	7,21%	7,27%	6,80%
4	2024	6,73%	6,09%	6,35%	6,98%	6,53%	6,54%	6,71%
5	2025	5,75%	6,81%	6,27%	6,33%	6,57%	6,35%	6,16%
Rata-rata		5,93%	6,44%	6,50%	7,17%	6,12%	6,43%	6,45%

Sumber: Data BPS, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel Selama periode 2021–2025, PDRB per kapita Kabupaten Pemalang atas dasar harga konstan menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian di masyarakat membaik dan terus menggeliat di semua sektor usaha. Meskipun demikian, dibandingkan kabupaten sekitar, capaian Pemalang masih berada pada kelompok menengah bawah akibat dominasi sektor primer dengan nilai tambah relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi struktur ekonomi menuju sektor industri

pengolahan dan jasa produktif guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara menyeluruh yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Perubahan harga barang dan jasa tersebut akan berdampak pada turunnya nilai mata uang, dengan kata lain inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Dampak positif dari laju inflasi yang relatif stabil adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan menjadi indikasi kesejahteraan masyarakat membaik. Laju inflasi juga dapat menggambarkan bagaimana kondisi permintaan dan penawaran dari barang dan jasa atau pun kondisi distribusi barang dan jasa untuk Masyarakat.

Angka laju inflasi Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021 mengindikasikan kepada angka mengindikasikan kepada pengukuran laju inflasi Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survei Biaya Hidup (SBH) pada 6 kota di Jawa Tengah. Mulai tahun 2024, inflasi tahunan (Y-on-Y) digunakan tahun dasar 2022, IHK dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 38 Provinsi tahun 2022 (2022=100).

Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2025 fluktuatif namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Khususnya pada tahun 2022 perkembangan laju inflasi Kabupaten Pemalang cukup tinggi tercatat hingga menembus angka 6,31 yang diakibatkan permintaan akan barang dan jasa terutama kebutuhan pokok di pasar meningkat signifikan, di sisi lain jumlah pasokan masih terbatas karena kelangkaan tenaga kerja maupun faktor lainnya seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Permintaan yang lebih tinggi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan atau kelangkaan produk, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya inflasi tinggi di tahun 2022.

Pada tahun 2025 laju Inflasi Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan sebesar 0,64 dari 2,19 pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,83. Angka laju inflasi Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka laju inflasi Jawa Tengah dan Nasional. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2025 (*y-on-y*) adalah lonjakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini didorong oleh musim liburan akhir tahun dan kendala pasokan pangan akibat perubahan cuaca. Hal ini didorong oleh musim liburan akhir tahun dan kendala pasokan pangan akibat perubahan cuaca.

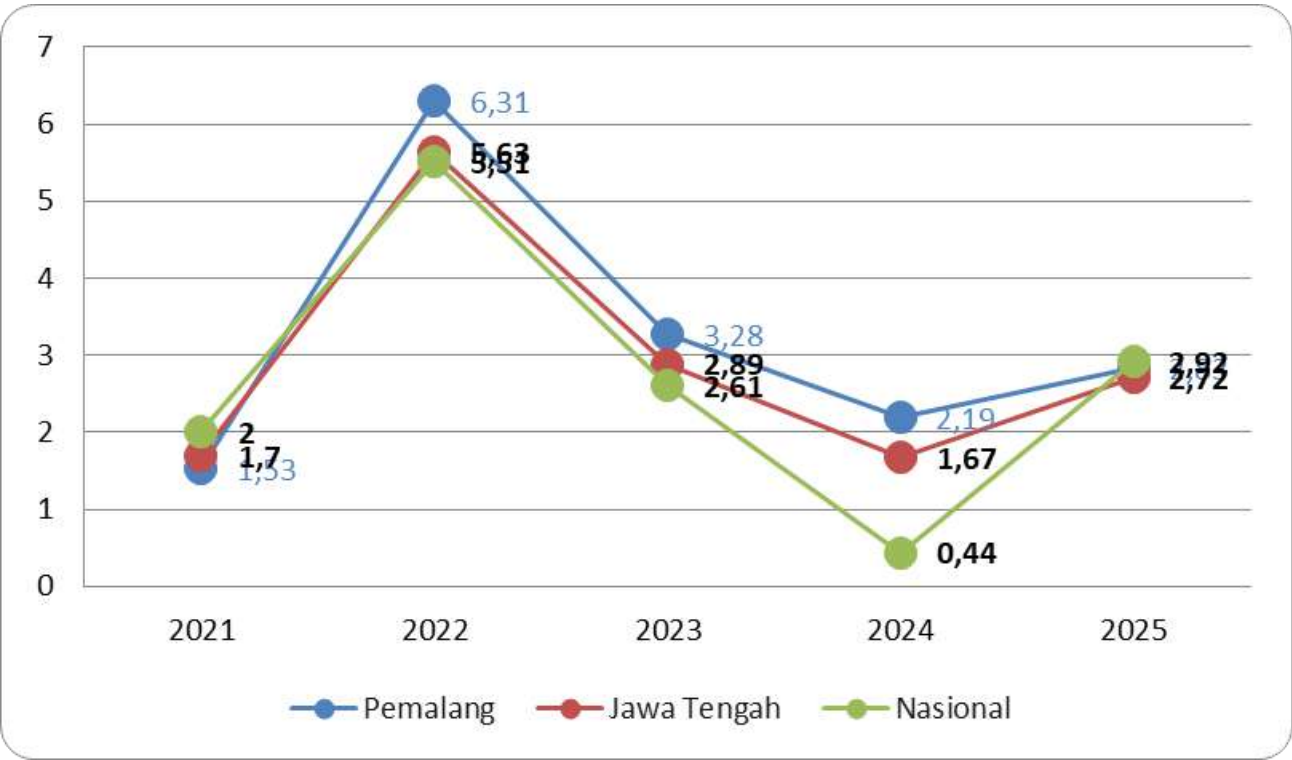
Berkaca pada capaian inflasi tahun 2022 yang tinggi, Tim Pengendali Inflasi secara komprehensif (pusat dan daerah) rutin mengadakan rakor pengendalian inflasi untuk memastikan upaya kestabilan harga di daerah yang dilakukan secara optimal. Selain itu upaya yang dilakukan untuk pengendalian inflasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang seperti Operasi Pasar, Pemberian Bantuan dan Pasar Murah.

Gambaran secara lengkap perbandingan inflasi di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar berikut.

Tabel 2.17.
Laju Inflasi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
2021	1,53	1,70	2,00
2022	6,31	5,63	5,51
2023	3,28	2,89	2,61
2024	2,19	1,67	0,44
2025	2,83	2,72	2,92

Sumber: BPS, 2026



Sumber: BPS Kab. Pemalang, 2026 (diolah)

Gambar 2.11.
Laju Inflasi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021-2025

Selama periode 2021–2025, laju inflasi Kabupaten Pemalang (Kota Tegal) menunjukkan pola yang sejalan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Inflasi meningkat tajam pada tahun 2022 akibat tekanan harga energi sebagai akibat gejolak geopolitik di Rusia dan Ukraina, kemudian kembali stabil pada periode 2023–2025 dalam kisaran 2–3 persen. Kondisi inflasi yang terkendali tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi harga serta mendukung pemulihan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan RPJPD Kab. Pemalang Tahun 2025 – 2045, untuk Indikator Inflasi dilakukan pendekatan dengan penggunaan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Disparitas Harga yaitu perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Adapun 13 komoditas bahan/ barang pokok yang meliputi: Beras Medium; Gula Pasir; Minyak Goreng Kemasan Sederhana; Daging Sapi Paha Belakang; Daging Ayam Ras; Telur Ayam Ras; Tepung Terigu; Kedelai Impor; Cabe

Merah Keriting; Cabe Rawit Merah; Bawang Merah; Bawang Putih Impor Kating; dan Ikan Kembung. Penggunaan indikator ini dikarenakan pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada pengukuran laju inflasi Kota Tegal.

d. Kesenjangan

Menurut Bank Dunia, analisis kesenjangan diukur berdasarkan pengeluaran kelompok pendapatan. Penduduk terbagi dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Analisis kesenjangan didasarkan pada persentase pengeluaran oleh kelompok pendapatan 40% terbawah dengan kategori: <12% kesenjangan tinggi, 12% s/d 17% kesenjangan menengah, dan >17% termasuk kesenjangan rendah. Nilai kesenjangan Kabupaten Pemalang dan Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



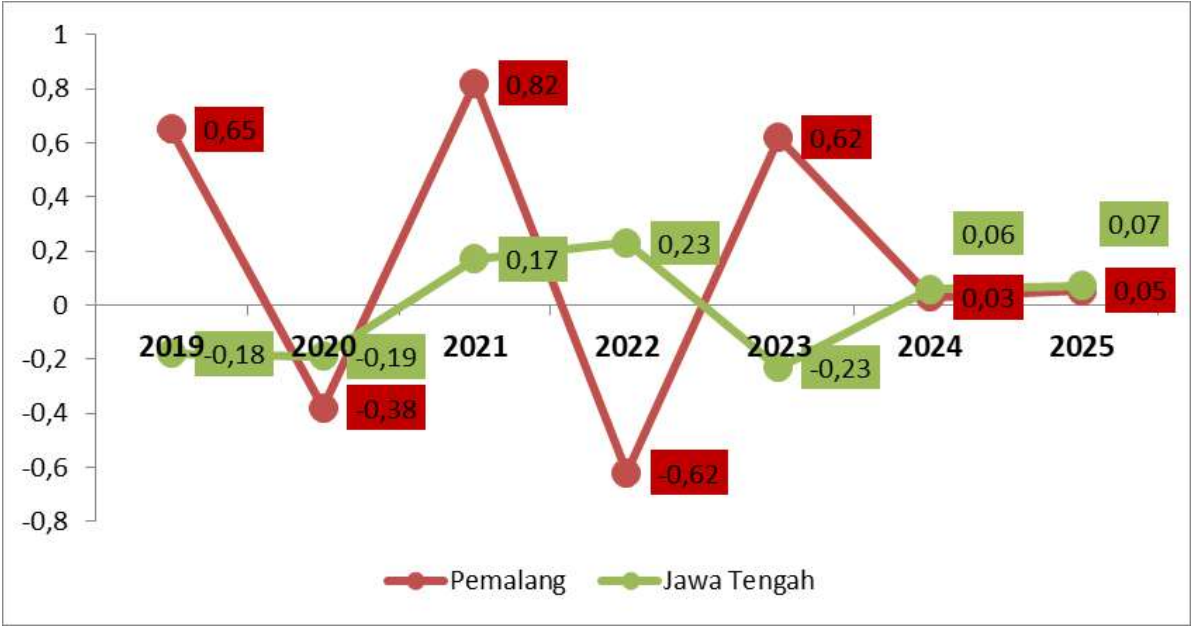
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.12.
Perbandingan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar di atas, dalam lima tahun terakhir tingkat kesenjangan di Kabupaten Pemalang dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya proporsi pengeluaran kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terbawah, di mana pada Tahun 2021 proporsi pengeluaran kelompok ini masih sekitar 20,06% kemudian meningkat menjadi 20,93 di Tahun 2024. Namun mengalami penurunan di Tahun 2025 menjadi 14,9.

Sementara itu trend tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada kurun 2021 s.d. 2025 data distribusi pengeluaran berdasarkan kelompok pendapatan di atas mengindikasikan ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori rendah. Secara Umum selama periode 2021 s.d. 2025, tingkat kesenjangan di Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan masuk pada kategori tingkat ketimpangan yang rendah.

Perubahan proporsi pengeluaran kelompok masyarakat dengan pendapatan 40% terbawah di Kabupaten Pemalang, mengacu pada gambar di bawah, juga lebih signifikan dibanding tingkat Provinsi Jawa Tengah. Proporsi pengeluaran kelompok masyarakat dengan pendapatan 40% terbawah di Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 0,07% pada tahun 2025.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.13.
Peningkatan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2025

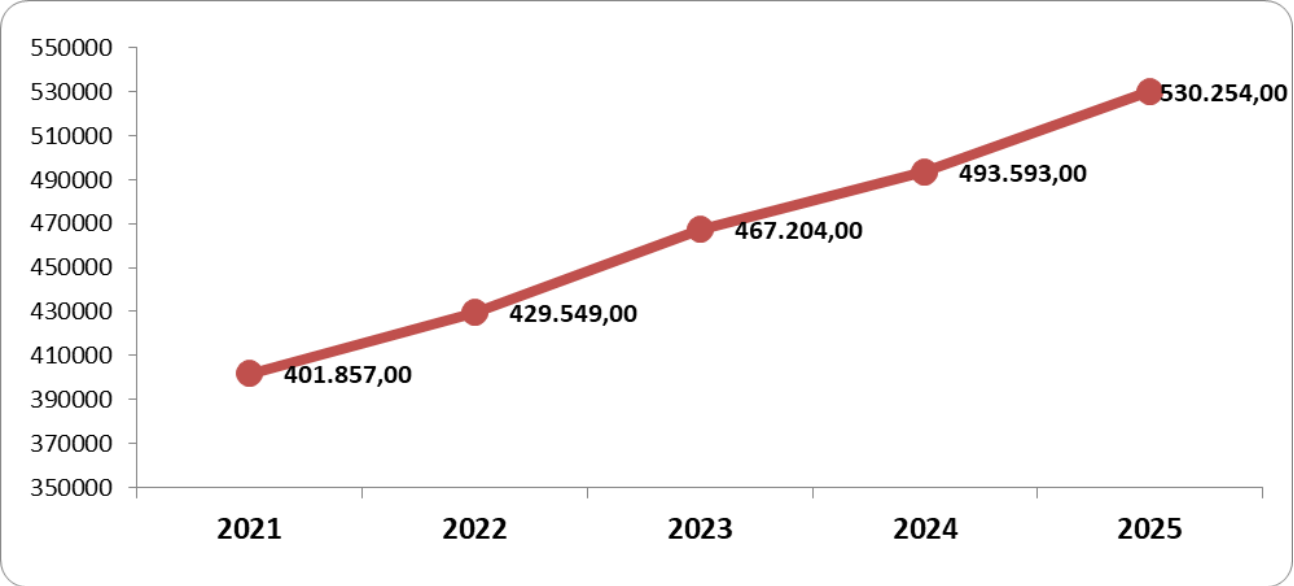
Penurunan tingkat ketimpangan di Kabupaten Pemalang tersebut agaknya berkorelasi dengan gencarnya berbagai bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu, baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun pemerintah desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial, melalui kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam rangka menekan prosentase kejadian pemberian bantuan-bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di samping itu, upaya pemerataan pembangunan juga terus dilakukan, khususnya melalui upaya pemerataan lokasi pembangunan sarana dan prasarana fisik.

e. Kemiskinan

1) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (≈ 2.100 kkal/hari) dan kebutuhan non makanan. yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin atau tidak miskin. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan.

Selama periode 2021–2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang cenderung meningkat sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pemalang, 2026 (diolah).

Gambar 2.14.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, garis kemiskinan di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren meningkat secara konsisten dan cukup tajam dari tahun 2021 sebesar Rp401.857 menjadi Rp530.254 pada tahun 2025. Secara kumulatif terjadi kenaikan sekitar Rp128 ribu atau ±31,9% dalam kurun waktu lima tahun.

Kenaikan ini mencerminkan bahwa biaya kebutuhan dasar masyarakat (baik makanan maupun non-makanan) terus mengalami peningkatan, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh inflasi, khususnya pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan kata lain, standar minimum pengeluaran untuk dapat hidup layak semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Implikasi penting dari kondisi ini adalah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan menjadi semakin menantang. Kondisi ini juga berkorelasi dengan isu stunting, karena meningkatnya biaya hidup dapat berdampak pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak.

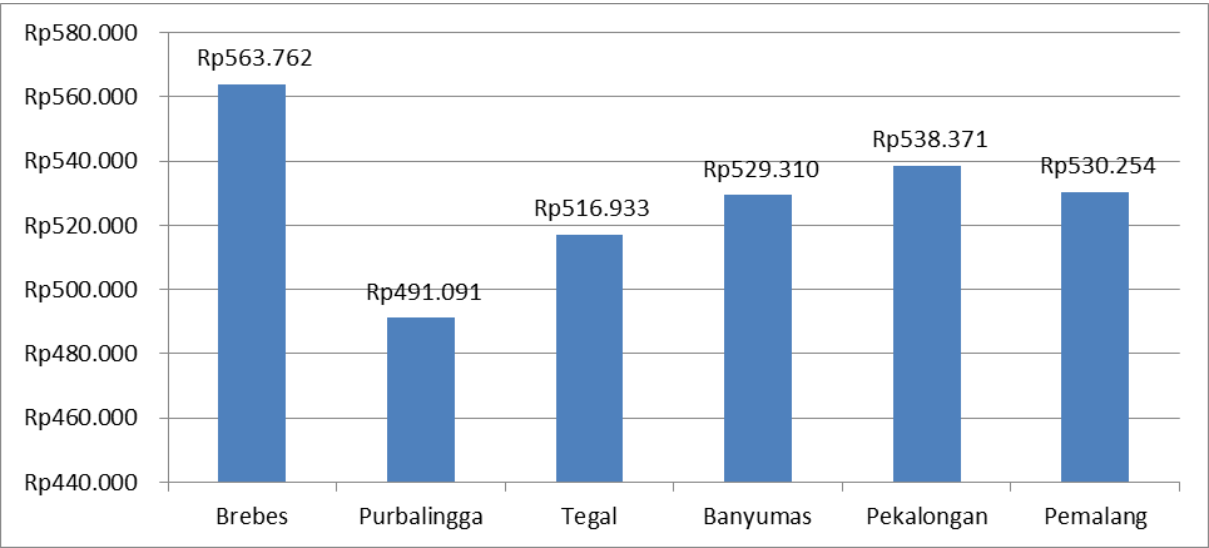
Sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang tidak cukup hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga harus diarahkan pada Pengendalian inflasi, terutama bahan pangan, Peningkatan pendapatan masyarakat, Perlindungan sosial yang adaptif, serta intervensi terpadu lintas sektor untuk menjaga daya beli dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Keseluruhan kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan ekonomi dan sosial agar penanganan kemiskinan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Program unggulan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang perlu difokuskan pada pendekatan terpadu antara stabilisasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian inflasi pangan lewat penguatan cadangan dan operasi pasar, serta program peningkatan pendapatan berbasis potensi lokal seperti pengembangan UMKM, digitalisasi

usaha, dan pelatihan keterampilan kerja. Upaya ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, penguatan perlindungan sosial adaptif dan intervensi kesehatan menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup, terutama dalam mencegah stunting. Program bantuan berbasis data terpadu, subsidi bagi kelompok rentan, serta intervensi gizi dan layanan kesehatan ibu-anak perlu diintegrasikan dengan sistem data kemiskinan yang akurat hingga tingkat desa. Dengan demikian, kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi peningkatan biaya hidup.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, garis kemiskinan Kabupaten Pemalang merupakan yang tertinggi ketiga sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.15.

Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Sebagaimana gambar diatas, garis kemiskinan Kabupaten Pemalang di tahun 2025 merupakan nomor 3 tertinggi dari lima kabupaten sekitar namun masih lebih rendah dari rata-rata Garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.537.812/kapita/bulan. Hal tersebut mengindikasikan Kabupaten Pemalang berada pada kategori biaya hidup menengah. Selanjutnya, garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran dibawah garis kemiskinan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena upaya penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus mampu mengimbangi kenaikan standar kebutuhan hidup masyarakat.

2) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 berjumlah 173,40 ribu jiwa, berkurang sekitar 10,71% dibandingkan Tahun 2024 sebesar 194,20 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pemalang, melainkan juga Jawa Tengah dan Nasional. Penurunan jumlah penduduk pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan baik di

tingkat Jawa Tengah maupun Nasional. Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

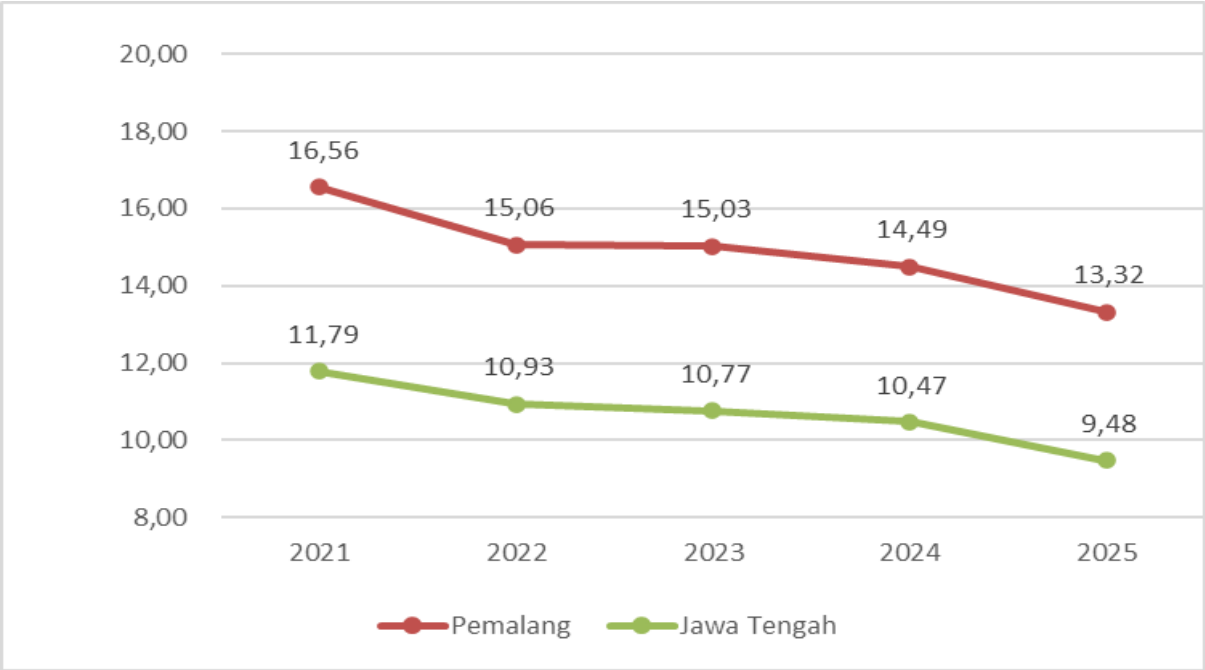
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
2021	215,08	3.934,01	26.503,65
2022	195,84	3.831,44	26.160,00
2023	195,57	3.791,50	25.900,00
2024	194,20	3.704,30	24.054,00
2025	173,40	3.366,69	23.359,71

Sumber: BPS, 2026

Secara keseluruhan, Kabupaten Pemalang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan dan lebih cepat dibandingkan rata-rata Jawa Tengah dan nasional selama periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang positif dan progres dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, tren yang sempat melambat di tengah periode serta potensi tekanan ekonomi ke depan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus tetap dilanjutkan secara konsisten, terintegrasi, dan lebih tepat sasaran, dengan fokus tidak hanya pada penurunan jumlah, tetapi juga pada ketahanan ekonomi masyarakat agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama tahun 2021 – 2025, dapat dilihat dari perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2025

Kabupaten Pemalang berhasil menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten dan cukup signifikan selama periode 2021–2025 sebesar 3,24 poin, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, tingkat kemiskinan Pemalang masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah, sehingga menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di daerah ini masih relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan dengan tingkat provinsi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kemiskinan selain menggunakan pendekatan data yang bersifat makro dari BPS, sesuai arahan Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS berperan penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Harapannya melalui DTKS mampu mengakselerasi informasi data masyarakat yang kurang mampu agar selanjutnya ditindaklanjuti kesejahteraannya. Pada tahun 2025, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi data pedoman untuk menangani kemiskinan. Jumlah penduduk berdasarkan DTKS dan DTSEN disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Berkesejahteraan Rendah Berdasarkan DTKS dan DTSEN Tiap Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berkesejahteraan Rendah	
		2024 (DTKS)	2025 (DTSEN)
		Jiwa	Jiwa
1	Moga	51.606	52.094
2	Pulosari	40.480	47.047
3	Belik	90.259	94.067
4	Watukumpul	54.731	58.198
5	Bodeh	45.050	40.320
6	Bantarbolang	54.638	54.034
7	Randudongkal	54.615	61.532
8	Pemalang	96.019	97.523
9	Taman	109.911	105.215
10	Petarukan	116.278	100.043
11	Ampelgading	52.112	43.775
12	Comal	64.358	54.094
13	Ulujami	70.253	57.164
14	Warungpring	23.845	28.944
	Total	924.155	894.050

Sumber: DTKS 2024 dan DTSEN 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk berkesejahteraan rendah yang mengalami kenaikan yaitu di Kecamatan Moga, Pulosari, Belik, Watukumpul, Randudongkal, Pemalang dan Warungpring. Kecamatan yang turun jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Bodeh, Bantarbolang, Taman, Petarukan,

Ampelgading, Comal dan Ulujami. Jumlahnya fluktuatif karena sumber data yang berbeda dan masih ada yang belum diidentifikasi desilnya serta faktor spesifik lainnya (ketimpangan antar wilayah, ketergantungan sektor pertanian dan lainnya)

Kondisi perekonomian nasional yang membaik memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota. Sehingga jumlah penduduk miskin menjadi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/ kota. Membaiknya perekonomian nasional perlu diikuti dengan penguatan intervensi di tingkat daerah agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan merata di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025. Salah satu program yang dapat didorong adalah penguatan ekonomi inklusif berbasis lokal, melalui pemberdayaan UMKM, akses permodalan yang lebih mudah, serta digitalisasi pemasaran produk unggulan daerah. Selain itu, perlu dikembangkan program padat karya produktif dan perluasan kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat langsung dirasakan oleh kelompok rentan.

Di sisi lain, intervensi kemiskinan juga perlu diperkuat melalui perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, seperti bantuan sosial berbasis data terpadu, subsidi kebutuhan pokok, serta dukungan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Pemerintah daerah juga dapat mengintegrasikan program penurunan kemiskinan dengan penanganan stunting dan peningkatan kualitas SDM, sehingga tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan daya saing jangka panjang. Dengan sinergi antara program ekonomi dan sosial tersebut, penurunan kemiskinan di Kabupaten Pemalang tahun 2025 dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

Disamping itu juga untuk proses pendataan perlu dilakukan verifikasi dan validasi Data Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk dipadankan dengan berbagai data yang ada ditingkat daerah baik DTKS, SDGs serta data lainnya. Perlu juga dilakukan optimalisasi untuk menuntaskan verifikasi dan validasi Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) sehingga intervensi penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tepat sasaran.

Selanjutnya, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dengan membandingkan jumlah penurunan penduduk miskin di kabupaten sekitar sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

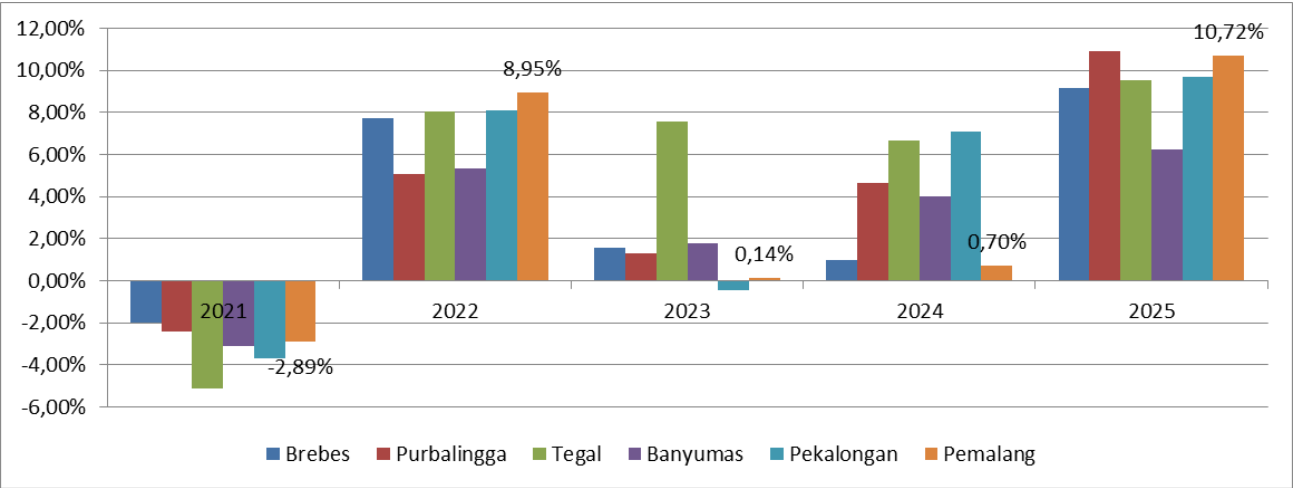
Tabel 2.20.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	314,95	153,08	123,52	232,91	95,26	183,94	215,08
2	2022	290,66	145,33	113,62	220,47	87,53	171,52	195,84
3	2023	286,14	143,41	105,03	216,50	87,93	167,80	195,57
4	2024	283,28	136,72	98,02	207,78	81,72	166,95	194,20
5	2025	257,29	121,8	88,7	194,87	73,8	147,292	173,38

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja positif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara konsisten selama 2021–2025, dengan penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun terakhir. Namun demikian, secara komparatif, jumlah penduduk miskin di Pemalang masih relatif tinggi dan berada di atas rata-rata kabupaten sekitar, bahkan termasuk dalam kelompok daerah dengan beban kemiskinan besar. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di Pemalang masih cukup kompleks. Selain itu, Pemalang dapat memperkuat program integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban peningkatan kapasitas, seperti pelatihan kerja, kewirausahaan, dan akses ke pasar.

Oleh karena itu, diperlukan percepatan dan penguatan intervensi, Pendekatan yang lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan Sinergi lintas sektor (ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan), agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengejar ketertinggalan dibanding wilayah sekitar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perbandingan kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17.
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021–2025

Grafik menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di wilayah kabupaten sekitar, termasuk Pemalang, bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan efektivitas program intervensi.

Secara khusus, Kabupaten Pemalang mengalami perlambatan pada 2023–2024, namun berhasil melakukan akselerasi yang sangat kuat pada tahun 2025, bahkan menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten lain. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kebijakan dan intervensi yang mulai efektif pada periode akhir.

Namun demikian, fluktuasi yang terjadi menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dijaga konsistensinya, diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan difokuskan pada program yang berkelanjutan dan tepat sasaran, agar penurunan kemiskinan tidak hanya tinggi di satu periode, tetapi juga

stabil dan berkesinambungan dan mempercepat konvergensi kesejahteraan regional.

2) **Tingkat Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan secara bertahap dari 16,96% pada tahun 2021 menjadi 14,97% pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan adanya kinerja positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, tingkat kemiskinan di Pemalang masih jauh lebih tinggi. Provinsi Jawa Tengah berada di kisaran 10–11% dan nasional terus menurun hingga 8,25% pada 2025, Pemalang masih berada di kisaran hampir 15%, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

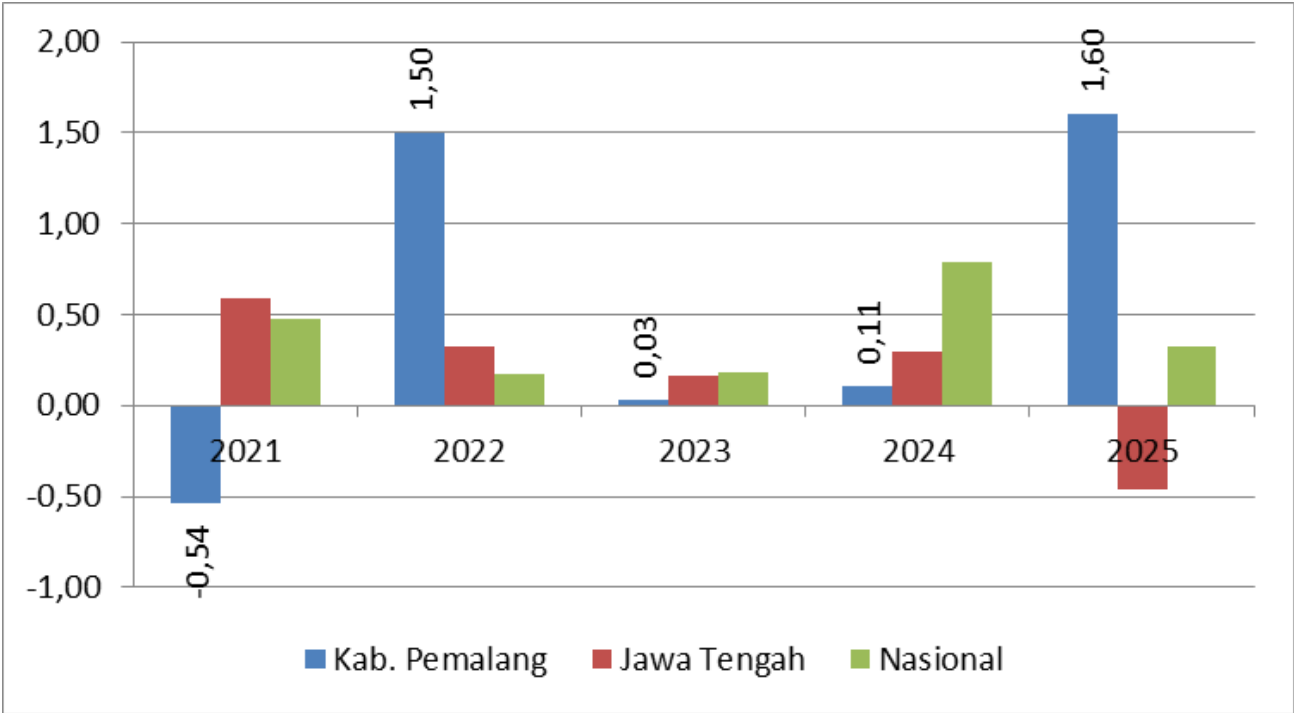
Tabel 2.21.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2020-2025

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	16,96	16,56	11,25	9,71
2	2022	15,60	15,06	10,93	9,54
3	2023	15,39	15,03	10,77	9,36
4	2024	15,18	14,92	10,47	8,57
5	2025	14,97	13,22	10,93	8,25

Sumber: BPS, 2026

Dari data tersebut diatas, menunjukan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Pemalang menunjukkan arah yang positif, laju penurunannya relatif lebih lambat dibandingkan target daerah maupun capaian provinsi dan nasional. Hal ini menandakan bahwa tantangan kemiskinan di Pemalang masih bersifat struktural dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif, terarah, dan inovatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan, terutama melalui pendekatan berbasis data, peningkatan pendapatan masyarakat, serta integrasi kebijakan sosial dan ekonomi agar penurunan kemiskinan tidak hanya berlanjut, tetapi juga mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lain.

Analisis selanjutnya adalah melihat kinerja penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang dengan membandingkannya dengan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2.18.
Perubahan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Periode 2021 – 2025

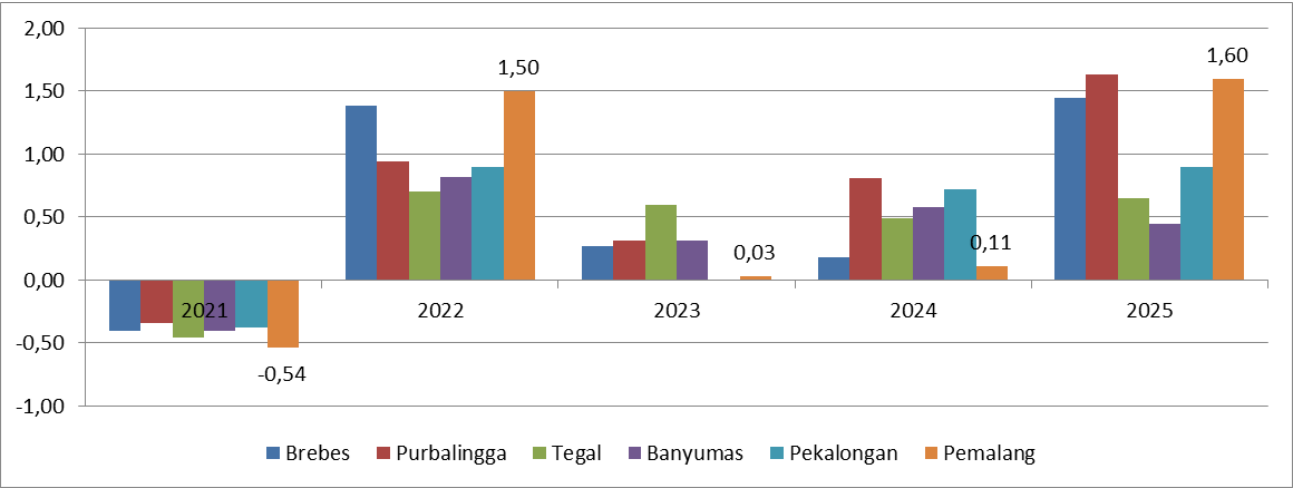
Pada Tahun 2025, persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebesar 1,60 persen poin, yang menunjukkan capaian penurunan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang turun sebesar 0,46 persen poin serta nasional sebesar 0,32 persen poin. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mulai menunjukkan hasil positif. Capaian tersebut memberikan optimisme bahwa Kabupaten Pemalang memiliki peluang yang semakin besar untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mengoptimalkan berbagai intervensi pembangunan dan penguatan program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi guna mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan hingga mencapai kategori daerah dengan tingkat kemiskinan rendah. Selanjutnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	17,43	16,24	8,60	13,66	10,57	13,30	16,56
2	2022	16,05	15,30	7,91	12,84	9,67	12,35	15,06
3	2023	15,78	14,99	7,30	12,53	9,67	12,05	15,03
4	2024	15,6	14,18	6,81	11,95	8,95	12,06	14,92
5	2025	14,15	12,55	6,16	11,5	8,05	10,48	13,32

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama periode Tahun 2021 – 2025, persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase penduduk miskin di 5 kabupaten sekitar. Pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang sebesar 13,32% sementara rata-rata persentase kemiskinan wilayah sekitar sebesar 10,42%. Perbandingan persentase penduduk miskin dengan setiap kabupaten menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 masih dibawah Kabupaten Purbalingga, Tegal, Banyumas, Pekalongan namun lebih baik dibanding Kabupaten Brebes. Perbandingan upaya penanggulangan kemiskinan antar Kabupaten sekitar dilakukan dengan membandingkan perubahan persentase kemiskinan di setiap wilayah seperti ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2.19.
Perubahan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Periode 2021 – 2025

Jika dikomparasikan dengan kabupaten sekitar, kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 menunjukkan percepatan yang signifikan dan relatif lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan kemiskinan wilayah sekitar. Kondisi ini mencerminkan mulai efektifnya berbagai intervensi pembangunan dan program perlindungan sosial dalam mendorong penurunan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat secara berkelanjutan mengingat tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang secara regional di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong dalam kategori kemiskinan tinggi, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah untuk mempercepat konvergensi kesejahteraan antarwilayah.

3) Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan penurunan nilai P1 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik karena jarak pengeluaran terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Oleh karena itu, indikator ini menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas penurunan kemiskinan,

tidak hanya dari sisi jumlah penduduk miskin tetapi juga tingkat kesejahteraan kelompok miskin. Selama periode 2021–2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang menunjukkan tren menurun yang mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai tertinggi kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2021 sebesar 2,92% terus menurun secara stabil hingga tahun 2025 kedalaman kemiskinan turun mencapai 2,39.

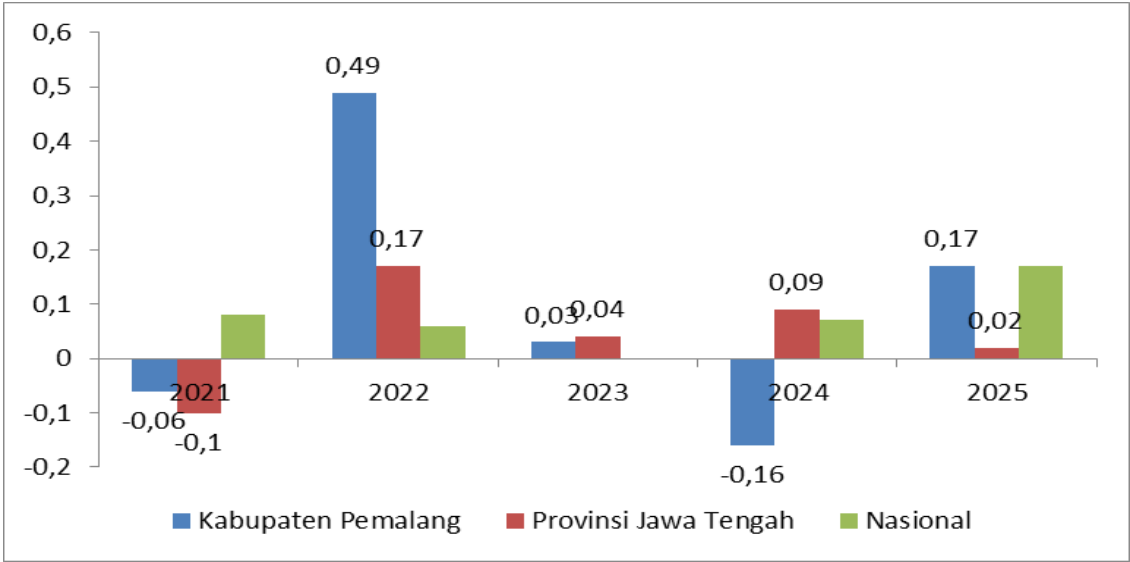
Adapun capaian kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)		
	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2021	2,92	1,94	1,67
2022	2,43	1,77	1,59
2023	2,40	1,73	1,53
2024	2,56	1,64	1,46
2025	2,39	1,62	1,29
Rata-rata	2,54	1,74	1,48

Sumber: BPS, 2026

Selama periode Tahun 2021 – 2025, rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang (2,54%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah (1,74%) dan Nasional (1,48%). Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Pemalang masih berupaya untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Secara rinci, perbandingan kinerja penurunan kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.20.
Penurunan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021 - 2025

Kinerja perbaikan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif, sebagaimana juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Meskipun demikian, Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Hal ini tercermin dari rata-rata penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang yang mencapai 0,094 persen poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,044 persen poin dan nasional sebesar 0,076 persen poin.

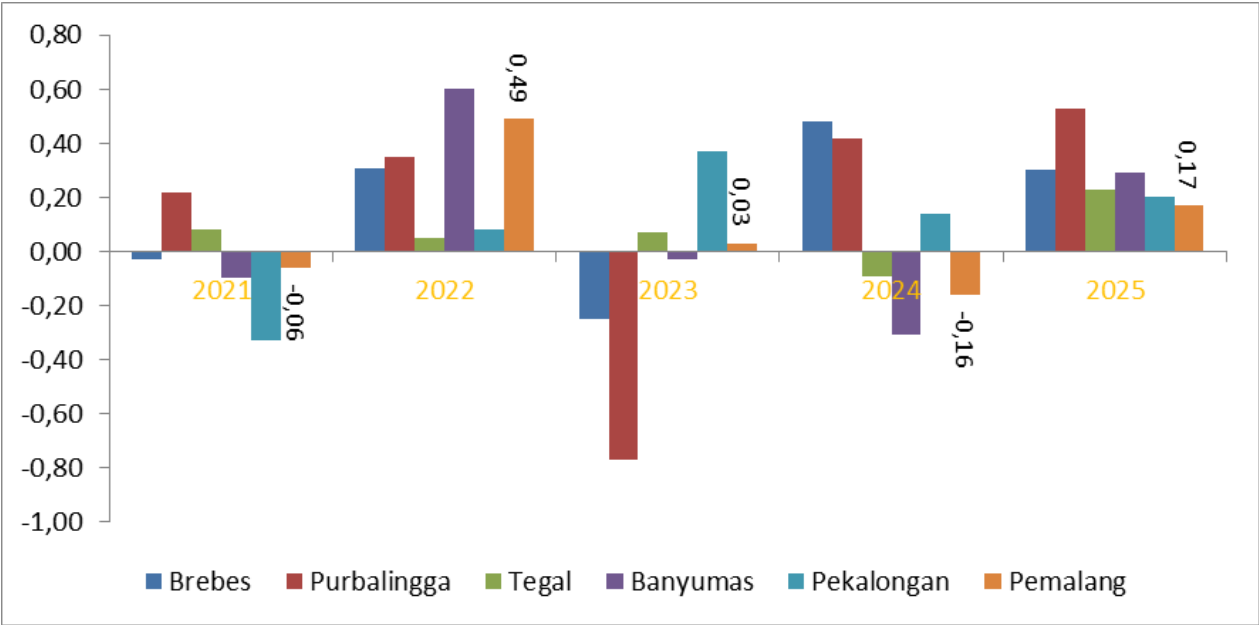
Selanjutnya, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pemalang
dan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Kedalaman Kemiskinan (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	3,04	2,1	1	2,35	1,75	-0,03	-0,31
2	2022	2,73	1,75	0,95	1,75	1,67	0,28	-0,06
3	2023	2,98	2,52	0,88	1,78	1,3	-0,12	0,49
4	2024	2,50	2,10	0,97	2,09	1,16	0,13	0,03
5	2025	2,20	1,57	0,74	1,80	0,96	1,61	2,39
Rata-rata		2,69	2,01	0,91	1,95	1,37	1,91	2,54

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 2,92 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,40 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan kembali meningkat hingga mencapai 2,56 persen, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di wilayah sekitar. Selanjutnya, pada tahun 2025 indeks kedalaman kemiskinan kembali menunjukkan perbaikan dengan menurun menjadi 2,39 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pemalang terus berjalan meskipun menghadapi dinamika kondisi sosial ekonomi. Kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan dapat dilihat lebih lanjut melalui tren penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.21.

Pertumbuhan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021–2025

4) Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin besar tingkat ketimpangan pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin. Sejalan dengan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan, kondisi keparahan kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,77 persen, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,57 persen. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 menjadi sebesar 0,62 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin, sehingga sebagian kelompok miskin masih berada pada tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok miskin lainnya.

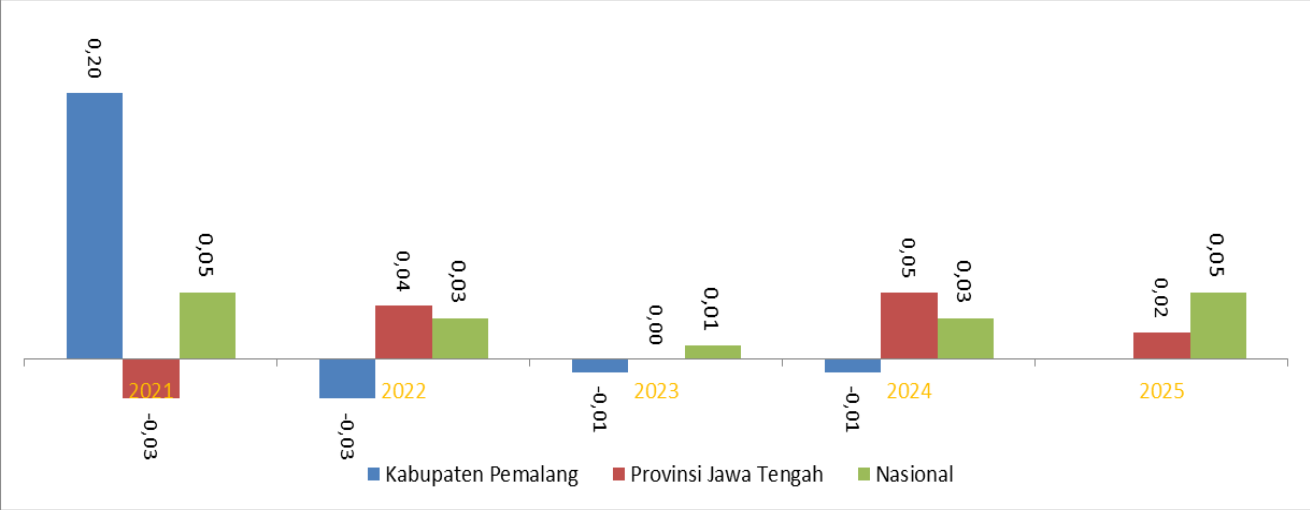
Tabel 2.25.

Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional Periode 2021-2025

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)		
	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2021	0,77	0,46	0,42
2022	0,57	0,42	0,39
2023	0,60	0,42	0,38
2024	0,61	0,37	0,38
2025	0,62	0,35	0,3
Rata-rata	0,63	0,40	0,37

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di Tahun 2025, Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,62% dengan kinerja lebih rendah dibandingkan provinsi. Perubahan keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.22.

Perubahan Keparahen Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025

Selanjutnya keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2025

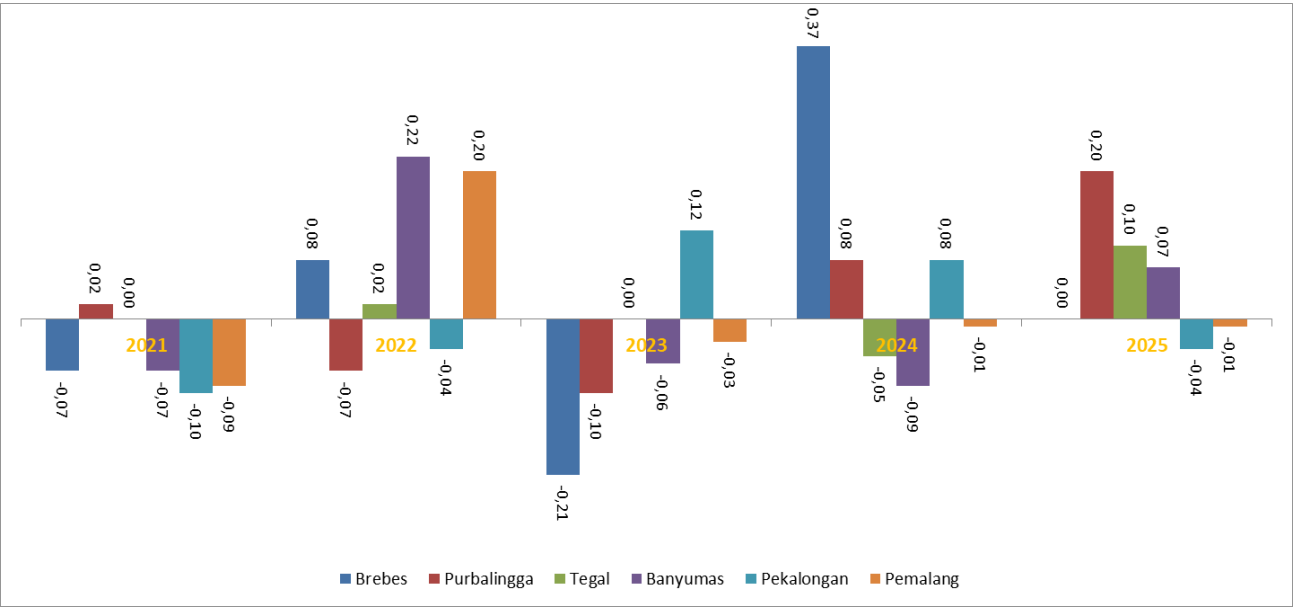
Tahun	Indeks Keparahen Kemiskinan (%)						
	Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
2021	0,74	0,41	0,19	0,57	0,39	0,51	0,77
2022	0,66	0,48	0,17	0,35	0,43	0,44	0,57
2023	0,87	0,58	0,17	0,41	0,31	0,49	0,6
2024	0,5	0,5	0,22	0,5	0,23	0,43	0,61
2025	0,5	0,3	0,12	0,43	0,27	0,37	0,62
Rata-rata	0,65	0,45	0,17	0,45	0,33	0,45	0,63

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan tabel diatas keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata keparahan kemiskinan kabupaten sekitar namun masih lebih rendah dari Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2025, keparahan kemiskinan di Kabupaten Pemalang angkanya sebesar 0,62, sedangkan keparahan kemiskinan kabupaten sekitar bervariasi, ada

yang mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Pekalongan dan mengalami penurunan yaitu Kabupaten Purbalingga, Tegal dan Banyumas. Selanjutnya kinerja Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar untuk menurunkan keparahan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.23.
Perubahan Keparahen Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021–2025

Kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2025, perubahan indeks keparahan kemiskinan sebesar -0,01 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan keparahan kemiskinan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Namun demikian, kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan keparahan kemiskinan masih tercatat lebih baik dibandingkan Kabupaten Pekalongan.

5) Kemiskinan Ekstrem

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) adalah penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2030. Namun, Pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem nihil pada tahun 2025, sehingga diperlukan akselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penduduk dinyatakan miskin ekstrem apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perhari dibawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Garis kemiskinan ekstrem sebesar 1,99 dollar PPP atau setara dengan Rp12.000,00 artinya, penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per hari kurang dari Rp12.000,00 tergolong penduduk miskin ekstrem. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2021 sebesar 4%.

Pada tahun 2025, telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya DTSEN diatur melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan

Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengatur tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial. Peraturan ini berlaku efektif mulai 12 Juni 2025, menggantikan Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data terpadu yang memuat informasi sosial ekonomi penduduk sebagai rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. DTSEN dikembangkan untuk mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program pemerintah. Pemanfaatan DTSEN mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 serta regulasi penanganan fakir miskin, dengan pemerintah daerah berperan aktif dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data agar intervensi pembangunan sosial ekonomi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berdasarkan DTSEN Desember 2025 Sebaran jumlah keluarga miskin dan individu miskin desil 1-3 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27.
Sebaran Jumlah Keluarga Miskin Desil 1 – 3
berdasarkan DTSEN Desember 2025

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3
1	Ampelgading	3.272	2.880	2.608
2	Bantarbolang	4.445	3.918	3.191
3	Belik	11.764	6.455	4.418
4	Bodeh	3.007	2.828	2.461
5	Comal	4.098	3.656	3.073
6	Moga	5.336	3.511	2.548
7	Pemalang	7.230	6.589	5.705
8	Petarukan	7.579	6.851	5.975
9	Pulosari	5.521	3.608	2.314
10	Randudongkal	5.282	4.370	3.629
11	Taman	8.044	7.189	6.054
12	Ulujami	4.365	4.453	3.784
13	Warungpring	3.122	2.019	1.532
14	Watukumpul	6.775	4.270	2.829
Total		79.840	62.597	50.121

Sedangkan Sebaran jumlah individu miskin desil 1 – 3 berdasarkan DTSEN tahun 2025 adalah sebagai berikut:

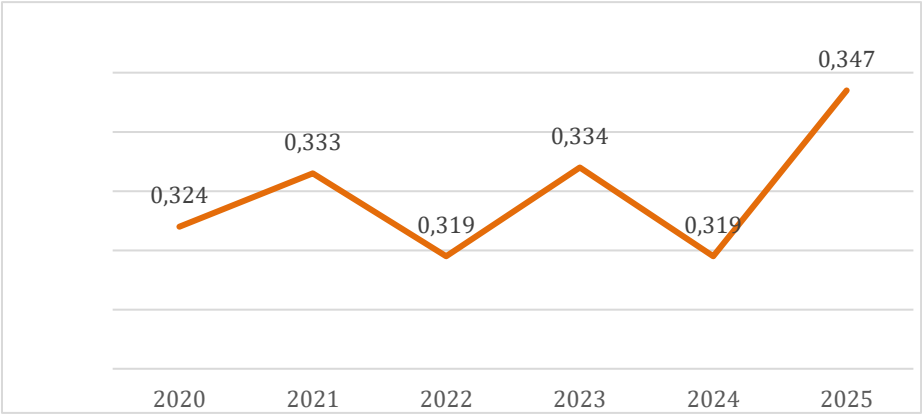
Tabel 2.28.
Sebaran Jumlah Individu Miskin Desil 1 – 3
berdasarkan DTSEN Desember 2025

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3
1	Ampelgading	10.821	10.093	8.491
2	Bantarbolang	14.888	13.163	10.322
3	Belik	39.188	21.511	14.030
4	Bodeh	10.177	9.566	7.972
5	Comal	14.054	12.838	10.087
6	Moga	18.736	12.247	8.473
7	Pemalang	24.403	22.648	18.417
8	Petarukan	25.004	23.222	19.252
9	Pulosari	18.138	11.599	7.022
10	Randudongkal	16.672	14.193	11.334
11	Taman	27.283	24.817	19.981
12	Ulujami	14.901	15.857	12.479
13	Warungpring	9.948	6.759	4.755
14	Watukumpul	22.506	13.899	8.966
Total		266.719	212.412	161.581

f. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan pemerataan yang sempurna.

Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga kategori diantaranya rendah ($\text{Indeks Gini} < 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$), dan tinggi ($\text{Indeks Gini} > 0,4$). Indeks gini Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir tersaji pada gambar berikut ini



Gambar 2.24.
Indeks Gini Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025

Selama tahun 2020 sampai tahun 2024, indeks gini di Kabupaten Pemalang capaiannya bersifat fluktuatif. Sedangkan data untuk Tahun 2025 belum rilis. Naiknya indeks gini menunjukkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan di suatu wilayah yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Penurunan indeks gini menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Artinya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin berkurang, yang dapat berdampak positif pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya yaitu indeks gini idealnya mendekati nilai 0 karena hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang lebih baik. Semakin dekat nilai indeks gini dengan 0, semakin merata distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dan semakin kecil ketimpangan yang terjadi. Indeks gini Kabupaten Pemalang selama empat tahun terakhir masuk kategori sedang.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi kebijakan fiskal seperti pajak progresif, program bantuan sosial, peningkatan akses terhadap layanan publik dan pengembangan ekonomi inklusif.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Pemalang yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran kualitas SDM dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 tercatat sebesar 69,47, meningkat sebesar 0,82 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 68,65. Perhitungan IPM tersebut telah menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang. Namun demikian, capaian IPM tahun 2025 masih berada di bawah target RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70,13, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak masyarakat.

Upaya mendorong peningkatan IPM pada tahun 2025, Kabupaten Pemalang perlu memperkuat tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pada aspek kesehatan, dapat dikembangkan layanan Pemalang Sehat Terintegrasi melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan gizi masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta perluasan akses jaminan kesehatan. Di aspek pendidikan, pemerintah daerah dapat mengakselerasi Pendidikan Berkualitas dan Inklusif, seperti peningkatan akses pendidikan menengah, penurunan angka putus sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta disabilitas.

Selain itu, untuk meningkatkan IPM melalui kerjasama Pendidikan tingkat tinggi dengan Perguruan Tinggi Negeri melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Upaya ini penting untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama IPM.

Sementara itu, pada aspek standar hidup layak, perlu diperkuat peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan perlindungan sosial adaptif. Langkah ini juga didukung dengan pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga antara lain melalui pemberian bantuan modal bagi UMKM. Upaya di bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui peningkatan investasi serta penguatan kerja sama dengan dunia industri untuk memperluas peluang kerja, antara lain melalui pelaksanaan job fair dan berbagai program penempatan kerja lainnya. Dengan sinergi program yang terintegrasi dan berkelanjutan tersebut, peningkatan IPM di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

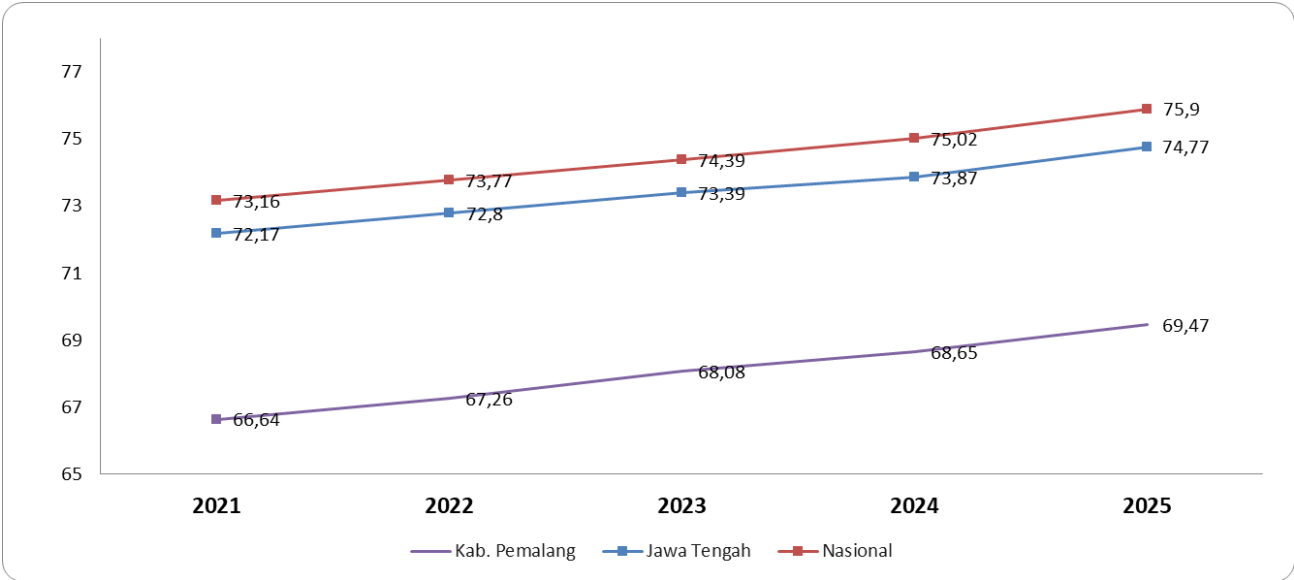
Apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPM Kabupaten Pemalang masih sangat rendah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (AHH hasil Long Form SP2020) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	66,7	66,64	72,17	73,16
2	2022	66,35	67,26	72,80	73,77
3	2023	66,60	68,08	73,39	74,39
4	2024	68,95	68,56	73,87	75,02
5	2025	70,13	69,47	74,77	75,90

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama Tahun 2021-2025, Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan IPM sebagaimana Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Pemalang masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.25.
Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

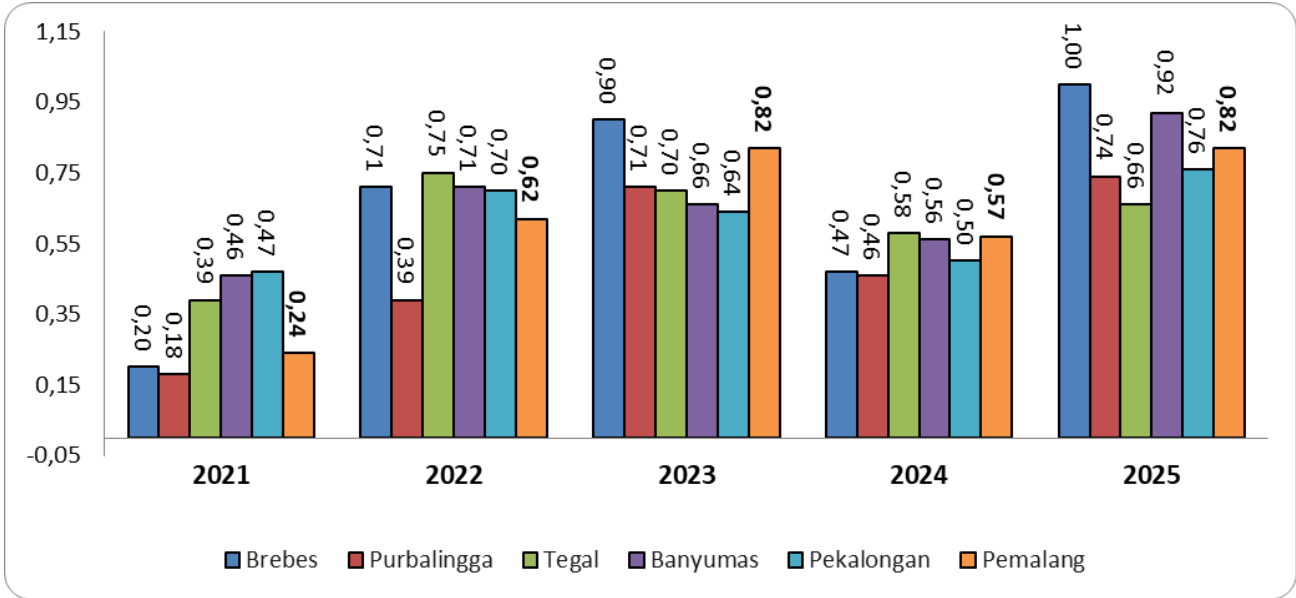
Selama Tahun 2021-2025, IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan. Peningkatan IPM untuk Kabupaten Pemalang di Tahun 2024 dan 2025 yaitu sebesar 0,82 poin. Di Tahun 2025, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi pembangunan manusia Kabupaten Pemalang dibandingkan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
IPM (menggunakan UHH hasil Long Form SP2020) Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	68,10	69,41	69,67	72,59	70,11	69,36	66,64
2	2022	68,81	69,80	70,42	73,3	70,81	70,02	67,26
3	2023	69,71	70,51	71,12	73,96	71,45	71,55	68,08
4	2024	70,18	70,97	71,70	74,52	71,95	71,55	68,65
5	2025	71,18	71,71	72,36	75,44	72,71	72,68	69,47
Rata-rata		69,60	70,48	71,05	73,96	71,41	70,86	67,66

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama Tahun 2021-2025 Nilai IPM Kabupaten Pemalang berada pada posisi lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar, dan berada di peringkat ke-35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Berikut perubahan IPM Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitar.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.26.

Perubahan IPM Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Selama kurun waktu Tahun 2021-2025 semua kabupaten cenderung mengalami peningkatan IPM. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang tahun sebesar 1,35 lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan IPM kabupaten sekitar sebesar 0,82.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Selama Tahun 2021-2025 AHH Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Tahun 2024, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 74,23 meningkat menjadi 74,55 pada tahun 2025, namun lebih rendah dibandingkan provinsi sebesar 75,24. Sedangkan angka harapan hidup Kabupaten Pemalang lebih rendah dari nasional sebesar 75,90, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
AHH Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Angka Harapan Hidup			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	73,35	73,72	74,49	73,16
2	2022	73,65	73,82	74,58	73,77
3	2023	73,85	73,98	74,69	74,39
4	2024	73,8	74,23	74,91	75,02
5	2025	73,8	74,55	75,24	75,90

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama periode 2021–2025, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 0,83 point dari 73,72 pada tahun 2021 menjadi 74,55 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik dan terus meningkat namun untuk mencapai kondisi yang lebih optimal, masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi

terutama dalam peningkatan gizi, pelayanan kesehatan dan kualitas lingkungan. Di satu sisi, peningkatan AHH mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan penduduk, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut serta kebutuhan pembiayaan di sektor kesehatan.

Untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2025, Kabupaten Pemalang telah melaksanakan sejumlah program yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Antara lain, pengadaan mobil ambulan di setiap desa, Penguatan Layanan Kesehatan Primer Terintegrasi, melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu dengan layanan promotif dan preventif, termasuk skrining kesehatan rutin, deteksi dini penyakit tidak menular, serta peningkatan cakupan imunisasi dan pelayanan ibu-anak. Program ini juga didukung dengan digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan upaya kesehatan berbasis keluarga, yang menitikberatkan pada perbaikan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lansia, melalui pemberian makanan tambahan, edukasi pola hidup sehat, serta intervensi penurunan stunting. Untuk menjawab tantangan meningkatnya usia harapan hidup, juga perlu diperkuat Layanan kesehatan Lansia, seperti pemeriksaan kesehatan berkala, posyandu lansia, serta jaminan akses pembiayaan kesehatan. Di sisi lingkungan, melalui upaya pemenuhan Sanitasi dan Air Bersih Berkelanjutan menjadi penting untuk menekan penyakit berbasis lingkungan. Keseluruhan program ini menunjukkan upaya terintegrasi Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan peningkatan AHH.

Kinerja perbaikan kualitas manusia pada dimensi kesehatan di Kabupaten Pemalang dibandingkan tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat melalui perkembangan perubahan AHH sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.27.
Peningkatan UHH Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Di Tahun 2025, laju peningkatan AHH Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,32 sejalan dengan capaian provinsi Jawa Tengah sebesar 0,33 yang menandakan kinerja pembangunan manusia di Pemalang relatif stabil dan tidak tertinggal dengan nasional dan namun demikian terjadi kesenjangan laju peningkatan AHH dengan nasional sebesar 0,88 tahun yang mengindikasikan pembangunan manusia di tingkat daerah masih belum mampu berakselerasi secara optimal. Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
AHH Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Pemalang	Rata-Rata
1	2021	63,74	73,82	73,74	74,13	74,44	73,72	73,97
2	2022	73,8	73,89	73,87	74,16	74,51	73,82	74,05
3	2023	73,95	73,98	74,01	74,2	74,6	73,98	74,15
4	2024	74,18	74,19	74,25	74,34	74,79	74,23	74,35
5	2025	76,45	77,07	76,61	77,46	76,48	74,55	76,81
Rata-rata		74,42	74,59	74,50	74,86	74,96	74,06	74,67

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama tahun 2021-2025 semua kabupaten mengalami peningkatan UHH. Pada Tahun 2025, Peningkatan UHH Kabupaten Pemalang sebesar 0,32. Tercapainya target UHH tahun 2025 tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi di bidang kesehatan, antara lain:

- inovasi KOPI TUBRUK (Kolaborasi Pemeriksaan Terintegrasi Tuberkulosis; Fokus pada Anak Stunting dan Gangguan Gizi). Inovasi ini mencakup kolaborasi lintas program, dalam hal ini Program Gizi dan Program P2PM. Apabila petugas gizi menemukan kasus anak dengan gangguan gizi, maka akan dilaporkan kepada petugas P2PM. Selanjutnya, petugas menggali gejala TB anak, melakukan tes mantoux, serta skoring TB anak. Pasien yang ditemukan hasil terindikasi TB anak akan dilakukan penanganan sesuai standar.
- Petualangan si bolang plus-plus meliputi pemantauan bayi dalam kandungan. Cek stunting sampai sibuah hati lahir pulang membawa akta kelahiran plus JKN-KIS dan sertifikat imunisasi.
- Putri buah hati merupakan persiapan untuk remaja putri menjadi ibu hamil sehat tanpa anemia.
- Pelayanan one stop service; satu layanan cepat dan profesional untuk lansia dan penyandang disabilitas.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pertumbuhan HLS Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 12,03 tahun meningkat dari HLS Tahun 2024 sebesar 12,02 tahun. HLS Kabupaten Pemalang

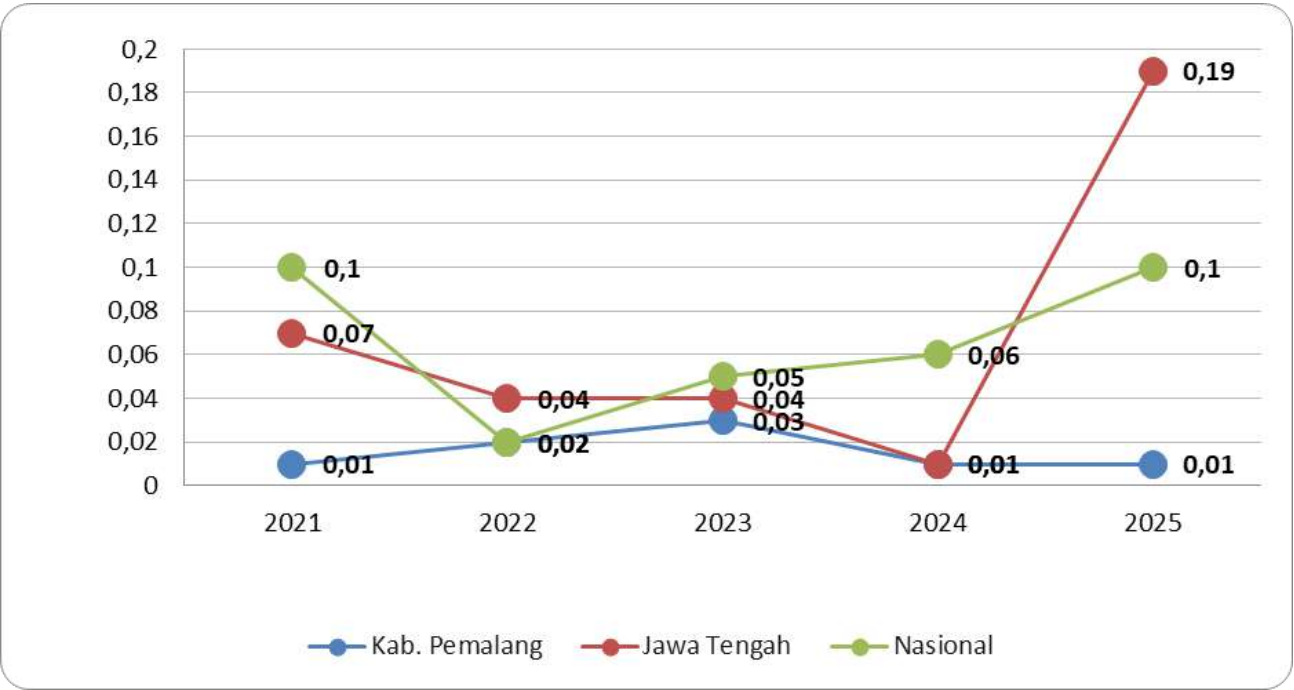
lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan HLS Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.33.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	12,16	11,96	12,77	13,08
2	2022	12,10	11,98	12,81	13,10
3	2023	12,20	12,01	12,85	13,15
4	2024	12,30	12,02	12,86	13,21
5	2025	12,40	12,03	13,05	13,31

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Peningkatan HLS di Kabupaten Pemalang mengindikasikan semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan. Perbandingan kinerja peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.28.
Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik, selama periode 2021–2025 peningkatan HLS Kabupaten Pemalang menunjukkan kondisi tren stabil dengan nilai berkisar 0,01–0,03, bahkan kembali turun dan bertahan di angka 0,01 pada tahun 2024–2025. Sebaliknya, Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi cukup tajam dengan lonjakan signifikan pada tahun 2025 menjadi 0,19 setelah sebelumnya sempat turun hingga 0,01 pada tahun 2024. Di tingkat nasional, tren sempat menurun pada 2022 namun kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,10 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, kinerja Kabupaten Pemalang lebih baik dan

stabil dibandingkan provinsi dan nasional, meskipun tetap perlu diantisipasi terhadap dinamika peningkatan yang terjadi di tingkat yang lebih luas.

Tantangan atau hambatan dalam pencapaian HLS adalah belum tertampungnya seluruh lulusan SD di SMP dan lulusan SMP di SMA/SMK karena minat lulusan SD dan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri (karena jumlahnya terbatas) tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah swasta karena keterbatasan ekonomi, dimana jika mereka melanjutkan ke sekolah swasta mereka tidak mampu untuk membayar SPP dan uang pembangunan. Program yang sudah dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas sekolah swasta dengan memberikan skema bantuan ke sekolah swasta agar sekolah tersebut tidak memungut uang pembangunan maupun SPP dan biaya-biaya lainnya. Inovasi lainnya adalah dengan memberikan Bantuan Sosial Pendidikan berupa Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu untuk melanjutkan pendidikan, pemberian seragam sekolah gratis tingkat SD dan SMP sederajat.

Untuk melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi pendidikan, HLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan HLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	12,05	11,99	12,89	13,03	12,42	12,39	11,96
2	2022	12,15	12,01	12,91	13,21	12,43	12,45	11,98
3	2023	12,44	12,02	12,92	13,26	12,44	12,52	12,01
4	2024	12,45	12,03	12,96	13,34	12,46	12,54	12,02
5	2025	12,68	12,18	13,09	13,55	12,74	12,73	12,03
Rata-rata		12,35	12,05	12,95	13,28	12,50	12,52	12,00

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data tersebut, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang membaik dari 11,96 tahun pada 2021 menjadi 12,03 tahun pada 2025. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah kabupaten sekitar. Meskipun seluruh daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kesenjangan antara Pemalang dengan daerah lain masih cukup terlihat, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang menengah.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 adalah 6,69 tahun lebih rendah dibandingkan dengan RLS Jawa Tengah (8,15 tahun) dan Nasional (9,07 tahun). Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2025

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	5,92	6,45	7,75	8,54
2	2022	6,70	6,50	7,93	8,69
3	2023	6,90	6,55	8,01	8,77
4	2024	7,10	6,65	8,02	8,85
5	2025	7,30	6,69	8,15	9,07

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Rendahnya RLS Kabupaten Pemalang disebabkan banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). Dewasa Tidak Sekolah (usia di atas 25 tahun) didominasi oleh usia tua sehingga upaya peningkatan peserta pendidikan kesetaraan menjadi tidak optimal. Tingkat pendidikan penduduk usia di atas 25 tahun mayoritas tamat SD (lama sekolah 6 tahun). Gambaran tingkat pendidikan penduduk berdasar kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Pendidikan					
		TIDAK/ BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SED ERAJAT	TAMAT SD/SED ERAJAT	TAMAT SLTP/S EDERA JAT	TAMAT SLTA/SE DERAJAT	>/DIPLOM A
1	Moga	19.653	8.730	33.358	11.025	7.729	1.852
2	Pulosari	17.739	5.297	30.855	9.875	4.446	1.077
3	Belik	35.772	19.157	54.010	13.132	9.558	2.066
4	Watukumpul	23.514	6.238	37.498	9.950	4.747	1.331
5	Bodeh	11.614	8.595	25.990	11.652	8.092	1.693
6	Bantarbolang	25.738	7.852	36.096	13.303	8.702	2.014
7	Randudongkal	28.519	11.531	43.423	18.903	15.500	4.053
8	Pemalang	59.103	24.912	55.576	30.451	36.572	11.274
9	Taman	53.614	24.466	55.999	30.571	30.842	8.676
10	Petarukan	45.191	19.301	56.454	31.550	26.136	6.320
11	Ampelgading	16.783	8.981	23.334	15.113	13.955	2.875
12	Comal	22.639	11.088	28.490	17.845	17.377	4.328
13	Ulujami	24.571	16.869	42.024	20.106	16.348	3.670
14	Warungpring	12.367	4.916	18.829	7.211	4.800	1.023
Total		396.817	177.933	541.936	240.687	204.804	52.252

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pemalang, struktur pendidikan masyarakat masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Jumlah penduduk terbesar berada pada kategori tamat

SD/ sederajat sebanyak 541.936 jiwa, diikuti oleh tamat SLTP/ sederajat sebanyak 240.687 jiwa, serta tamat SLTA/ sederajat sebanyak 204.804 jiwa. Sementara itu, penduduk dengan pendidikan tinggi (Diploma ke atas) masih relatif kecil yaitu 52.252 jiwa, yang menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, jumlah penduduk yang tidak/ belum sekolah dan belum tamat SD masih cukup besar, masing-masing sebanyak 396.817 jiwa dan 177.933 jiwa, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penuntasan wajib belajar.

Secara kewilayahan, kecamatan perkotaan seperti Pemalang, Taman, dan Petarukan memiliki jumlah penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Kecamatan yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan di bawah 9 tahun tertinggi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu Kecamatan Petarukan, Taman dan Pemalang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah memiliki keterbatasan untuk mengakses lapangan pekerjaan, sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya, dengan pendapatan yang rendah tersebut mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program peningkatan akses pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta pengembangan pendidikan kesetaraan dan pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang. Ujung tombak penanganan ATS ada di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) karena hampir 90% anak tidak sekolah masuk di pendidikan non formal (PKBM). Perbandingan kinerja Kabupaten Pemalang dalam peningkatan RLS dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.29.
Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil namun berada di bawah Jawa Tengah dan nasional sepanjang periode 2021–2025. Nilai RLS Pemalang meningkat

dari sekitar 0,03 pada 2021 menjadi 0,05 pada 2022–2023, kemudian turun ke 0,01 pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 sebesar 0,13. Peningkatan ini sama dengan peningkatan pada Rata-rata Lama Sekolah Provinsi pada tahun 2025. Secara keseluruhan, meskipun tren Pemalang cenderung lebih stabil, capaian RLS-nya masih tertinggal dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2.37.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						
		Kab.Brebes	Kab. Purbalingga	Kab. Tegal	Kab. Banyumas	Kab. Pekalongan	Rata-rata	Kab. Pemalang
3	2021	6,22	7,25	6,99	7,63	7,17	6,95	6,45
4	2022	6,35	7,33	7,25	7,78	7,46	7,11	6,50
5	2023	6.40	7.34	7.34	7.87	7.47	7.16	6.55
6	2024	6,41	7,36	7,36	7,91	7,48	7,18	6,56
5	2025	6,61	7,37	7,37	8,10	7,50	7,39	6,69
Rata-rata		6,40	7,33	7,26	7,86	7,42	7,25	6,55

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data tersebut, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat secara bertahap dari 6,45 tahun menjadi 6,69 tahun. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata kabupaten sekitar yang mencapai 7,25 tahun, serta lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar seperti Banyumas (7,86 tahun), Pekalongan (7,42 tahun), dan Tegal (7,26 tahun). Seluruh daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun kesenjangan RLS antara Kabupaten Pemalang dengan wilayah lain masih cukup terlihat, yang mengindikasikan perlunya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan terutama pada jenjang menengah agar lama sekolah penduduk dapat semakin meningkat.

Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pemalang antara lain dipengaruhi oleh masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Penanganan ATS dinilai belum optimal, terutama karena belum kuatnya kolaborasi antar pemangku kepentingan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong anak kembali bersekolah. Selain itu, pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan peran sekolah swasta juga belum maksimal, ditambah oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan peran pendidikan kesetaraan, serta gerakan kolaboratif melalui masyarakat seperti pengajian, PKK, dan forum desa untuk mendorong motivasi melanjutkan pendidikan. Pemerintah desa juga didorong berperan aktif dengan target pengembalian ATS ke sekolah. Di sisi lain, keterbatasan akses pendidikan tinggi akibat ketiadaan perguruan tinggi di daerah dan tingginya biaya hidup di luar daerah menjadi kendala lanjutan, sehingga inisiatif pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan

akses pendidikan dan pada akhirnya mendorong peningkatan RLS dan HLS di Kabupaten Pemalang.

4) **Pengeluaran Perkapita**

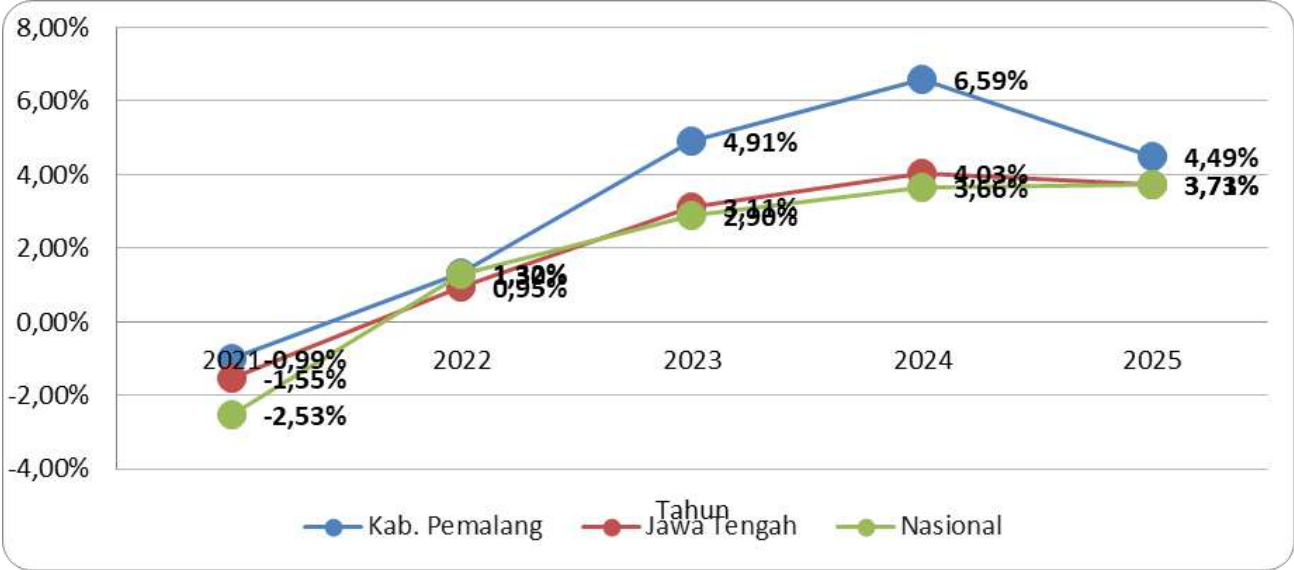
Pengeluaran Per Kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini digunakan sebagai pendekatan kesejahteraan karena pengeluaran dianggap lebih stabil dibandingkan pendapatan, terutama pada masyarakat dengan sektor informal yang dominan. Selama 2021-2025 pengeluaran perkapita meningkat. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Pengeluaran Perkapita per tahun Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	9.003	8.573	11.034	11.156
2	2022	-	8.994	11.377	11.479
3	2023	-	9.587	11.835	11.899
4	2024	-	10.017	12.276	12.341
5	2025	-	10.521	12.746	12.802

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada tahun 2025 pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang sebesar Rp.10.521.000,- naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.10.017.000,-, namun, capaian tersebut masih dibawah capaian provinsi dan nasional. Pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.30.
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita (%) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Pada tahun 2025 pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Pemalang meningkat hingga mencapai 5,03 persen, melampaui pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,83 persen dan nasional sebesar 3,74 persen. Peningkatan pertumbuhan pengeluaran per kapita tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi jasa sebagai sektor pendukung. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Untuk mendukung peningkatan daya beli masyarakat pada tahun 2025, Kabupaten Pemalang melaksanakan berbagai program unggulan yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat secara langsung, antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa dengan fasilitasi permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pasar produk lokal agar pendapatan masyarakat meningkat. Selain itu, dilakukan pula penguatan stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah melalui operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan, serta kemitraan dengan petani dan pelaku distribusi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Upaya ini dilengkapi dengan program padat karya dan peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi jasa, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengeluaran perkapita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan (beras, lauk pauk, sayur, dll) dan non makanan (pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, pakaian, komunikasi dan kebutuhan lainnya). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase pengeluaran non makanan, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka pola konsumsi penduduk akan bergeser ke konsumsi non makanan. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun 2021-2025

No	Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)									
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
	Kelompok Makanan	536.748	56,43	589.393	59,18	660.525	55,47	678.898	57,13	702.905	54,59
1	Padi- padian	56.225	5,91	56.231	5,65	69.309	5,82	84.778	12,49	76.549	5,95
2	Umbi- Umbian	4.303	0,45	3.462	0,35	5.173	0,43	4.087	0,60	6.113	0,47
3	Ikan	22.600	2,38	22.875	2,30	26.198	2,20	24.826	3,66	27.313	2,12
4	Daging	16.865	1,77	22.149	2,22	25.408	2,13	25.812	3,80	30.093	2,34
5	Telur dan Susu	24.056	2,53	24.591	2,47	27.673	2,32	29.061	4,28	30.980	2,41
6	Sayur-sayuran	46.094	4,85	38.261	3,84	49.178	4,13	48.905	7,20	53.743	4,17
7	Kacang- kacang	16.302	1,71	15.140	1,52	18.780	1,58	17.948	2,64	20.579	1,60
8	Buah-buahan	22.632	2,38	25.232	2,53	28.485	2,39	31.676	4,67	39.510	3,07
9	Minyak dan kelapa	12.225	1,29	14.490	1,45	15.870	1,33	14.426	2,12	17.510	1,36

No	Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)									
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
10	Bahan Minuman	18.727	1,97	18.699	1,88	22.150	1,86	21.373	3,15	23.537	1,83
11	Bumbu-bumbuan	14.000	1,47	13.953	1,40	15.430	1,30	14.097	2,08	17.149	1,33
12	Konsumsi lainnya	11.233	1,18	10.854	1,09	13.455	1,13	11.664	1,72	13.367	1,04
13	Makanan dan minuman jadi	198.632	20,88	234.516	23,55	255.194	21,43	254.585	37,50	261.204	20,29
14	Rokok	72.855	7,66	88.940	8,93	88.223	7,41	95.680	14,09	85.264	6,62
	Kelompok Bukan Makanan	414.491	43,57	406.942	40,82	530.151	44,53	509.468	42,87	584.648	45,41
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah	195.380	20,54	193.590	19,44	245.497	20,62	231.966	45,53	257.967	20,04
16	Barang dan Jasa	110.635	11,63	102.147	10,26	130.032	10,92	141.551	27,78	148.287	11,52
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	22.397	2,35	23.367	2,35	30.104	2,53	27.423	5,38	32.043	2,49
18	Barang tahan lama	44.272	4,65	40.205	4,04	64.658	5,43	45.544	8,94	78.440	6,09
19	Pajak, pungutan dan asuransi	28.008	2,94	34.005	3,41	35.543	2,99	36.825	7,23	39.516	3,07
20	Keperluan pesta dan kenduri	13.800	1,45	13.235	1,33	24.317	2,04	26.159	5,13	28.395	2,21
	Jumlah	951.240	100	995.942	100	1.190.676	100	1.188.367	100,00	1.287.552	100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026 (diolah)

Selama periode tahun 2021–2025, pola konsumsi per kapita masyarakat Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh kelompok makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih terbatas, dimana pengeluaran rumah tangga sebagian besar masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar, khususnya makanan. Pada kelompok konsumsi makanan, komoditas Makanan dan minuman jadi menjadi komponen yang dominan dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Dari sisi ekonomi, meningkatnya konsumsi makanan dan minuman jadi juga memiliki dua sisi dampak. Di satu sisi, hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha kuliner, UMKM, serta membuka lapangan kerja baru di bidang jasa makanan dan minuman. Namun di sisi lain, tingginya ketergantungan pada makanan jadi dapat mengurangi konsumsi bahan pangan mentah lokal seperti beras, ikan, dan hasil pertanian lainnya, sehingga berpotensi melemahkan sektor produksi primer dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, pengeluaran untuk makanan jadi umumnya lebih tinggi dibandingkan memasak sendiri, sehingga dapat mengurangi kemampuan rumah tangga dalam menabung atau berinvestasi, serta meningkatkan kerentanan ekonomi terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Distribusi pengeluaran tertinggi untuk konsumsi non makanan selama tahun 2021-2025 yang paling tinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah yang meningkat tiap tahunnya.

Perbandingan pengeluaran perkapita per tahun Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.40.
Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	10.152	10.032	9.700	11.546	10.409	8,976.67	8.573
2	2022	10.514	10.277	10.202	11.905	10.707	9,271.17	8.994
3	2023	10.993	10.964	10.537	12.492	11.297	9,717.67	9.587
4	2024	11.389	11.343	10.972	12.960	11.701	9,717.67	10.017
5	2025	11.853	11.949	11.498	13.301	12.185	12.157	10.521

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama kurun waktu Tahun 2021-2025, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten sekitar dan lebih rendah juga diantara 5 kabupaten sekitar. Hal ini dikarenakan struktur perekonomian Kabupaten pemalang masih didominasi oleh pertanian tradisional, perdagangan kecil, dan sektor informal. Sektor-sektor tersebut umumnya menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang relatif lebih rendah, sehingga kemampuan konsumsi masyarakat juga terbatas dibandingkan daerah dengan industri dan jasa modern yang lebih berkembang serta masih rendahnya Upah Minimum Regional (UMR).

h. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2025, IPG Kabupaten Pemalang sebesar 87,71 dimana nilai IPG tersebut lebih rendah dibandingkan capaian IPG provinsi (93,73) dan nasional (91,85). Capaian IPG tahun 2025 sampai saat ini belum dipublikasikan oleh BPS. Perbandingan capaian IPG Kabupaten Pemalang dengan Jawa Tengah dan nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
2	2021	85,89	86,49	92,48	91,27
3	2022	86,03	86,72	92,83	91,63
4	2023	86,13	87,14	92,87	91,85
5	2024	86,23	87,37	93	91,85
5	2025	86,33	87,71	93,73	

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama Tahun 2021-2025, IPG Kabupaten Pemalang meningkat setiap tahunnya. Namun IPG Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di tahun 2024, kinerja Kabupaten Pemalang berhasil meningkatkan IPG sebesar 0,34; IPG Provinsi Jawa Tengah juga meningkat sebesar 0,73; sedangkan IPG Nasional tidak ada kenaikan/penurunan.

Perbandingan capaian IPG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2021	86,65	93,08	87,53	88,54	92,56	89,67	86,49
2	2022	87,19	93,21	88,22	89,15	92,72	90,10	86,72
3	2023	87,13	93,51	88,64	89,14	92,88	90,26	87.14
4	2024	87,16	93,74	88,85	89,27	92,96	90,40	87.37
5	2025	87,97	94,34	89,17	90,01	93,21	90,40	87,71
Rata-rata		86,90	93,26	88,01	88,87	92,72	89,95	86,71

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Selama Tahun 2021-2025, IPG Kabupaten Pemalang sebesar 86,71 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata IPG kabupaten sekitar sebesar 89,95.

i. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

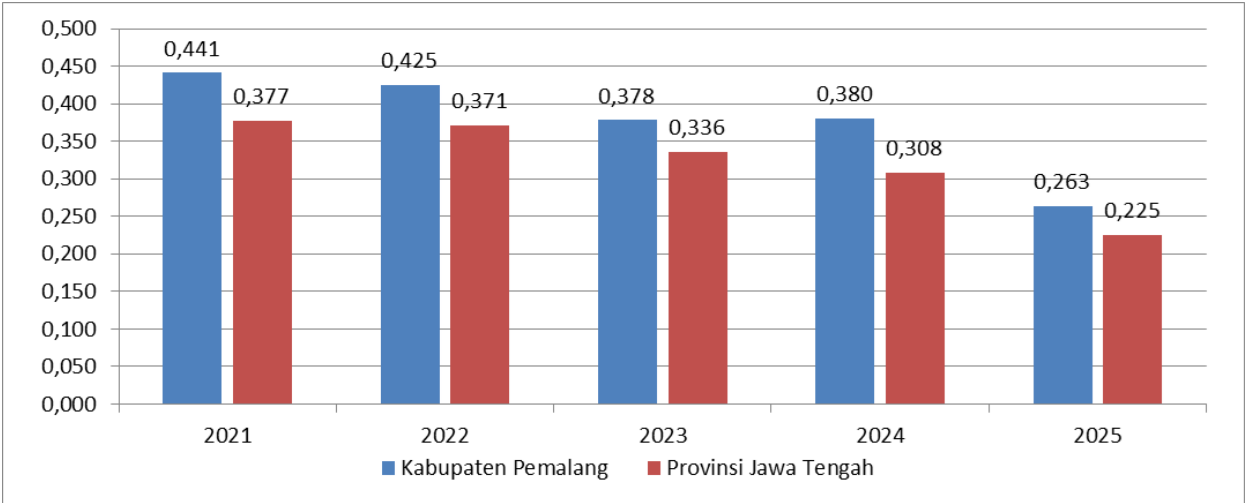
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;

Variabel pembentuk IKG antara lain:

- a. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
- b. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
- c. Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin;
- d. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
- e. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Pemalang yang ditunjukkan dengan IKG menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tercatat IKG Tahun 2025 menunjukkan penurunan dari tahun 2024 yang memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Kabupaten Pemalang semakin rendah.

Data capaian IKG Kabupaten Pemalang terhadap capaian Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.31.
Capaian IKG Kabupaten Pemalang terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Capaian IKG Kabupaten Pemalang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,117 poin dibanding tahun 2024. Sedangkan IKG Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,083 poin di tahun yang sama. Penurunan IKG mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Selanjutnya capaian IKG Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Capaian IKG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Ketimpangan Gender						
	Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
2021	0,426	0,458	0,233	0,250	0,195	0,334	0,441
2022	0,453	0,381	0,312	0,198	0,195	0,327	0,425
2023	0,435	0,311	0,184	0,193	0,351	0,309	0,378
2024	0,423	0,213	0,315	0,211	0,215	0,275	0,380
2025	0,255	0,321	0,202	0,193	0,201	0,240	0,263

j. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT 2025 di Kabupaten Pemalang sebesar 6,61%. Atau turun sebesar 0,02 persen poin. TPT di Kabupaten Pemalang juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

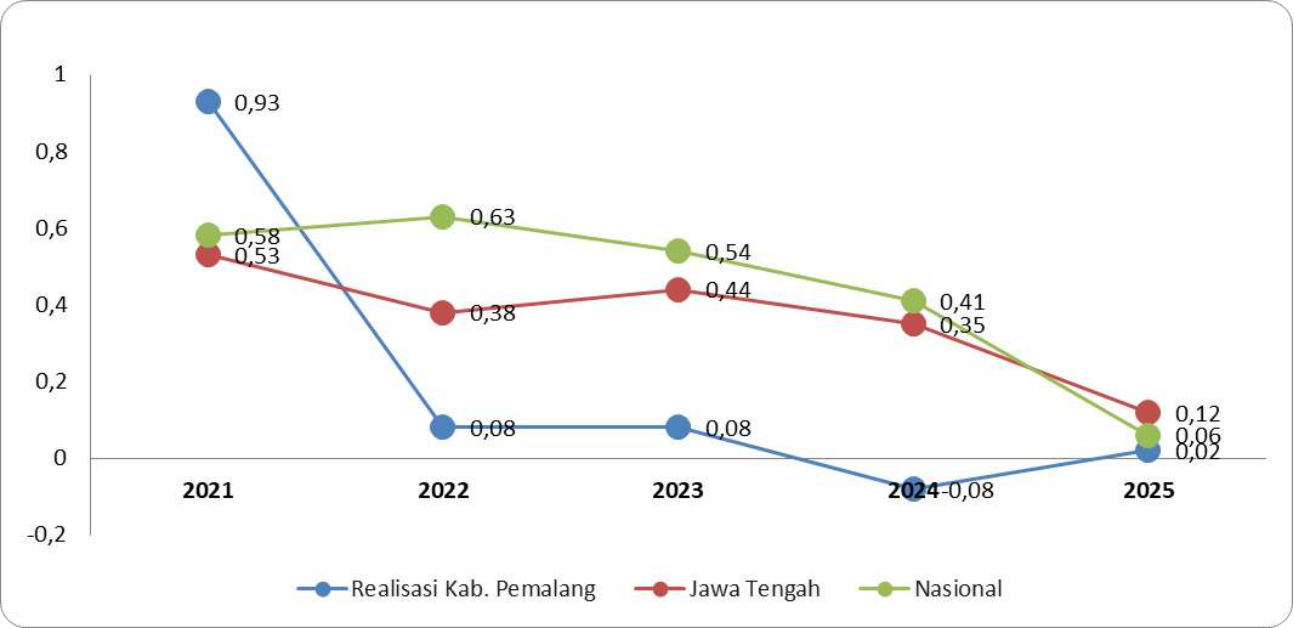
Tabel 2.44.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	8,04	6,71	5,95	6,49
2	2022	7,30	6,63	5,57	5,86

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
3	2023	7,20	6,55	5,13	5,32
4	2024	6,75	6,63	4,78	4,91
5	2025	6,89	6,61	4,66	4,85

Sumber: BPS, 2026

Selama periode tahun 2021-2025 TPT di Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Di tahun 2021-2023 capaian TPT di Kabupaten Pemalang menurun hingga 6,55% di tahun, namun di tahun 2024 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,08% menjadi sebesar 6,63%. Dari 1,02 juta penduduk usia produktif di Pemalang, kurang lebih ada 6,63 persen atau 67.626 orang berstatus tidak bekerja atau pengangguran. Dalam hal ini, rata-rata usia produktif rentang 15-59 tahun. Walaupun ada beberapa perusahaan besar yang mendirikan pabrik di Kabupaten Pemalang, namun belum mulai melakukan kegiatan produksi karena masih dalam tahap pembangunan pabrik dan direncanakan memulainya di 2025. TPT Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 6,61%, angka pengangguran ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adanya beberapa perusahaan besar yang baru beroperasi tidak otomatis langsung menurunkan pengangguran dikarenakan banyak penduduk usia kerja baru masuk pasar kerja setiap tahun. Kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan pengangguran dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.32.

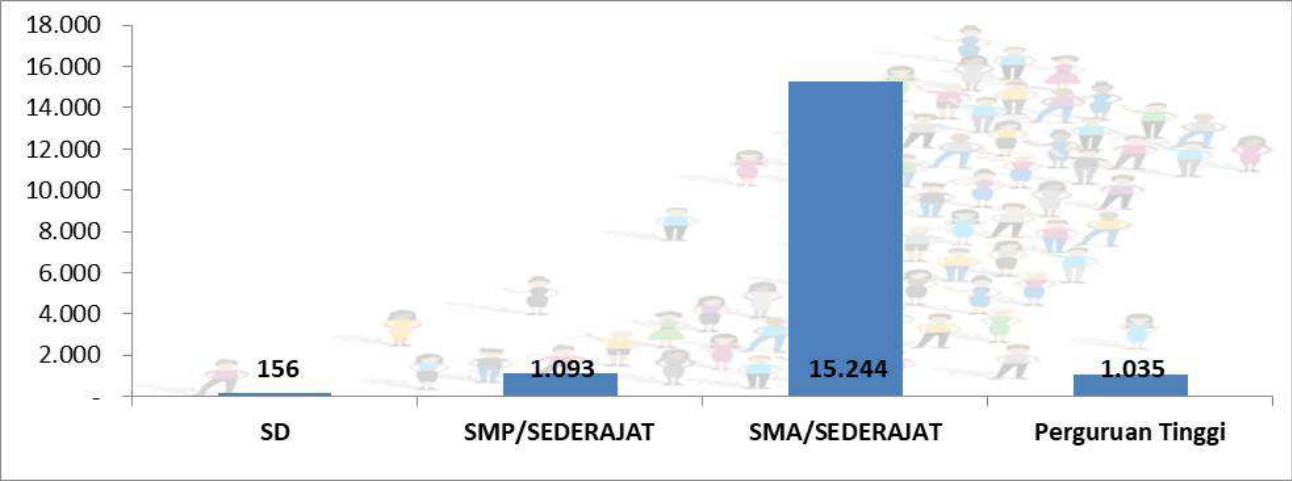
Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Selama periode 2021–2025, penurunan TPT Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan nasional. Penurunan paling signifikan terjadi pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi (2021–2022), kemudian berlanjut dengan percepatan penyerapan tenaga kerja hingga 2024. Pada tahun 2025, laju penurunan mulai melambat seiring tercapainya kondisi pasar kerja yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Pemalang sedang berada pada fase transisi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja memiliki tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat sebanyak 15.244 orang (84,67%) dari 18.005 Pencari Kerja di Kabupaten Pemalang.

Gambaran Banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tersaji gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

Gambar 2.33.

Banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 18.005 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat sebesar 84,67%, diikuti lulusan perguruan tinggi sebesar 6,79%, SMP/ sederajat sebesar 6,07%, serta SD dan di bawahnya sebesar 0,87%. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas pencari kerja berasal dari kelompok pendidikan menengah yang umumnya memiliki keterampilan kerja terbatas dan memerlukan peningkatan kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

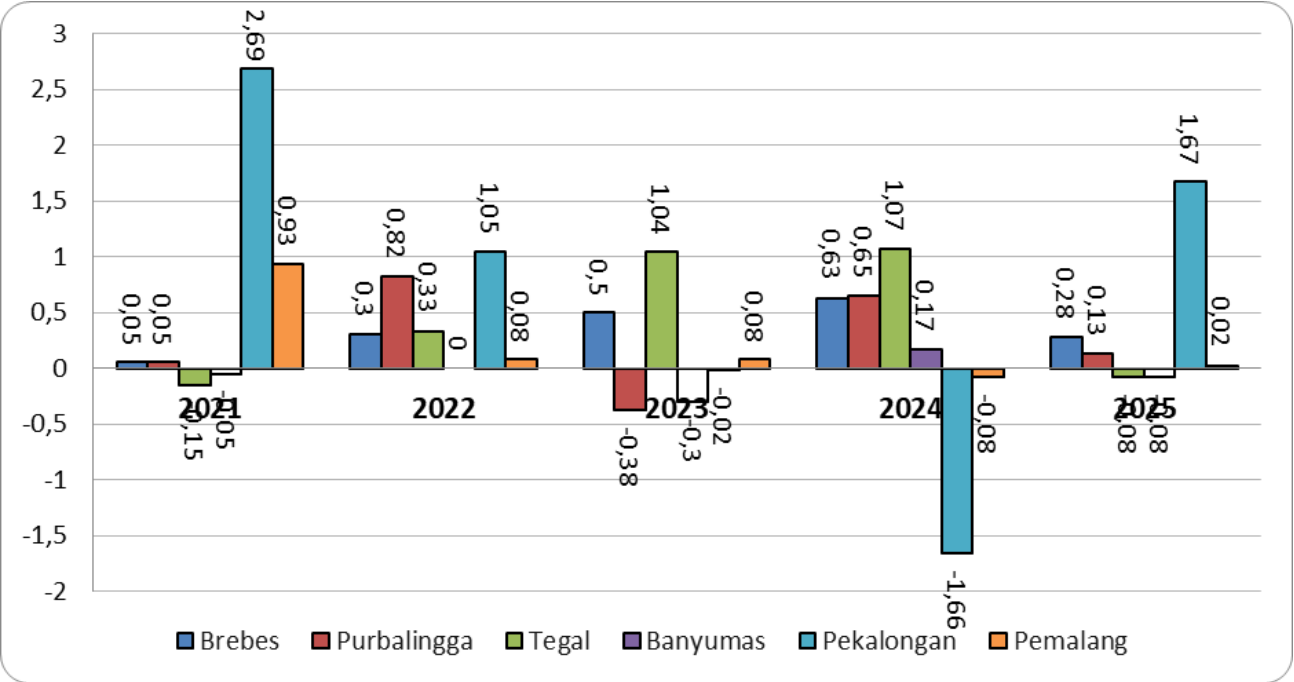
Meningkatnya jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengindikasikan bahwa perluasan kesempatan dan penempatan kerja di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya optimal dalam menyerap tambahan angkatan kerja baru. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, khususnya melalui fasilitasi peningkatan kompetensi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja (link and match), serta penguatan kerja sama dengan sektor industri guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata2	Pemalang
1	2021	9,78	6,05	9,97	6,05	4,28	7,23	6,71
2	2022	9,48	5,23	9,64	6,05	3,23	6,73	6,63
3	2023	8,98	5,61	8,60	6,35	3,25	6,56	6,55
4	2024	8,35	4,96	7,53	6,18	3,30	6,06	6,63
5	2025	8,07	4,83	7,61	6,26	3,24	6,10	6,61
	Rata-rata	8,93	5,34	8,67	6,18	3,78	6,59	6,63

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Tahun 2025, TPT sebesar 6,61% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata TPT Kabupaten sekitar yaitu sebesar 6.10%. Jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, TPT Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas, dan Pekalongan namun masih lebih rendah dari Kabupaten Brebes dan Tegal. Kinerja pengurangan TPT Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama tahun 2021-2025 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Gambar 2.34.
Pengurangan TPT Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Perkembangan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif antarwilayah. Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 mencatat penurunan TPT sebesar 0,93 poin, yang merupakan penurunan cukup signifikan dibandingkan sebagian kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, penurunan TPT masih berlanjut meskipun melambat menjadi 0,08 poin, kemudian relatif stabil pada tahun 2023 dengan perubahan sebesar 0,08 poin.

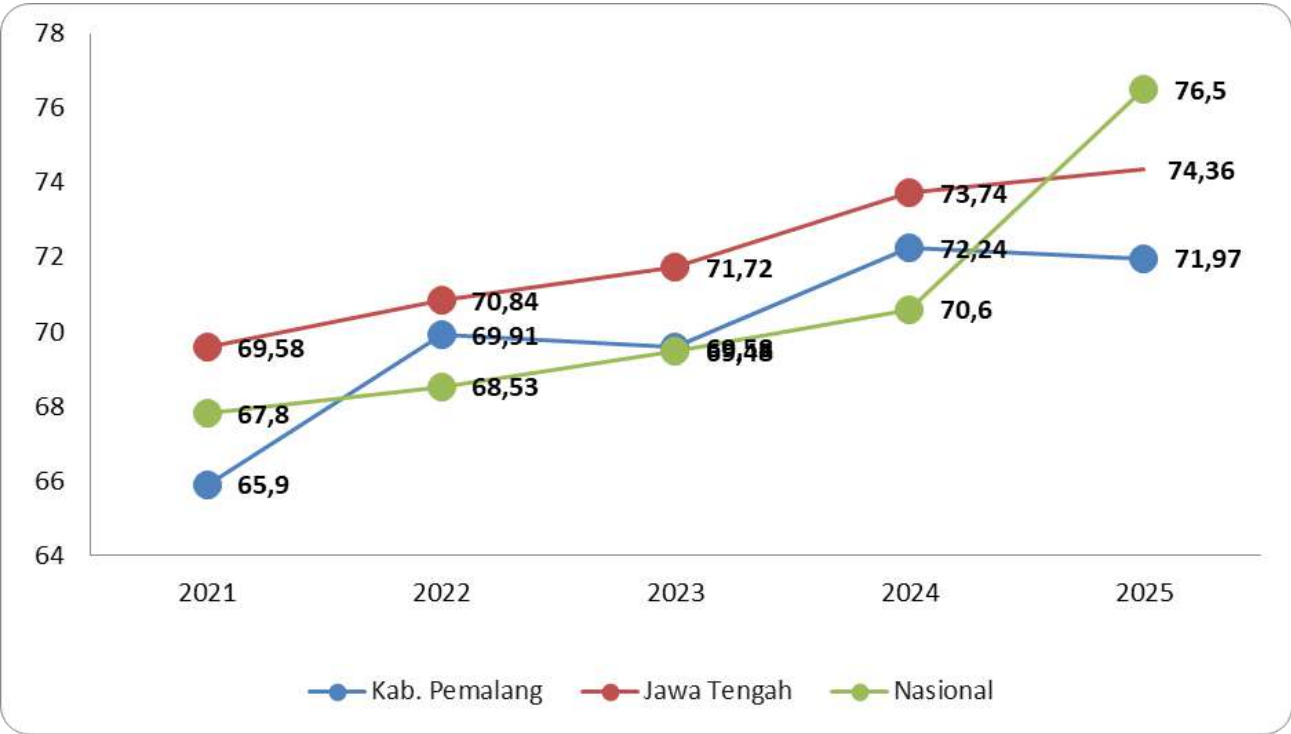
Pada tahun 2024, Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan TPT sebesar 0,08 poin, yang menunjukkan adanya tekanan di pasar kerja, berbeda dengan

beberapa kabupaten sekitar yang justru mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2025 kondisi kembali membaik dengan penurunan TPT sebesar 0,02 poin, meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan periode awal pemulihan.

Dibandingkan kabupaten sekitar, dinamika TPT Kabupaten Pemalang cenderung lebih stabil tanpa perubahan ekstrim seperti yang terjadi di Kabupaten Pekalongan yang mengalami fluktuasi tajam, termasuk penurunan signifikan pada tahun 2024 dan kenaikan kembali pada tahun 2025. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa proses penyerapan tenaga kerja di wilayah eks karesidenan Pekalongan masih berada dalam fase penyesuaian struktur ekonomi dan pasar kerja, seiring pertumbuhan sektor industri dan jasa di masing-masing daerah.

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, terhadap seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 71,97% masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 74,36% dan nasional tahun sebesar 76,50%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.35.
TPAK Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2021-2025

Capaian TPAK Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal periode, dari 65,90% (2021) menjadi 69,91% (2022) sebagai dampak pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pascapandemi. Pada tahun 2023, TPAK relatif stagnan di kisaran 69,5%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 72,24%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Namun pada tahun 2025, TPAK Kabupaten Pemalang sedikit menurun menjadi 71,97%, mengindikasikan adanya sebagian penduduk usia kerja yang keluar sementara dari pasar kerja, seperti

melanjutkan pendidikan, menjadi pekerja informal tidak aktif, atau discouraged worker akibat keterbatasan kesempatan kerja.

Sepanjang periode tersebut gap TPAK Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan partisipasi tenaga kerja Pemalang relatif lebih rendah. sepanjang periode 2021-2025, posisi TPAK Jawa Tengah selalu berada di atas Kabupaten Pemalang, menandakan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi provinsi relatif lebih baik. Secara nasional TPAK nasional juga mengalami peningkatan dari 67,8% (2021) menjadi 76,5% (2025). Bahkan pada tahun 2025, capaian nasional melampaui Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan bertambahnya angkatan kerja sebagaimana hasil Sakernas BPS yang mencatat kenaikan partisipasi angkatan kerja pada 2025.

Secara lebih dalam lagi, dari capaian TPAK Kab. Pemalang tahun 2025 dapat diketahui jumlah angkatan kerja sebesar 867.489 jiwa, yang terdiri dari status bekerja sebesar 810.133 jiwa dan pengangguran sebesar 57.356.

Selama Tahun 2021-2025, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pemalang meningkat tiap tahunnya. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Pemalang per tahun.

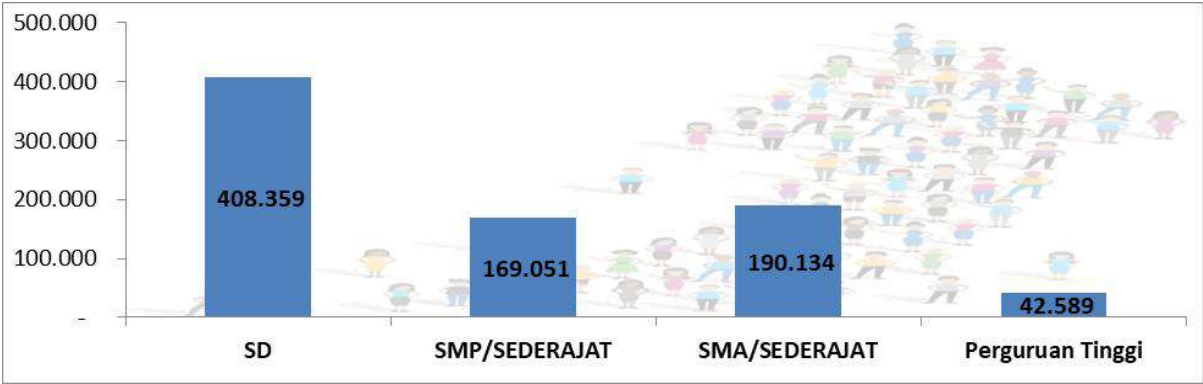
Tabel 2.46.
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	978.908	983.608	817.491	1.190.198	1.205.414
Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	645.103	687.625	763.905	802.832	810.133
Rasio Penduduk Bekerja	0,659	0,699	0,934	0,674	0,672

Sumber: BPS Kab. Pemalang, 2026

Selama periode tahun 2021-2025, Jumlah Penduduk Bekerja di Kab. Pemalang terus meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi tenaga kerja semakin baik. Selain itu kondisi ini juga disebabkan karena pada tahun tersebut semakin banyak investor yang melanjutkan investasi maupun investasi baru yang mendirikan pabrik di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2025 jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki yang bekerja di Kabupaten Pemalang masih mendominasi dibandingkan dengan Perempuan. Tercatat pada tahun 2025 terdapat 479.643 jiwa penduduk laki-laki yang bekerja sedangkan penduduk Perempuan yang bekerja sebanyak 330.490 jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang memiliki tingkat pendidikan SD atau lebih rendah. Gambaran penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pemalang tahun 2025 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

Gambar 2.36.

Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (jiwa)

Pada Tahun 2024, penduduk usia bekerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh penduduk usia kerja dengan kualifikasi pendidikan tamat SD sekitar 50,41%. Untuk penduduk usia kerja dengan kualifikasi pendidikan tamat SMP sebesar 20,87% dan penduduk usia kerja dengan kualifikasi pendidikan tamat SMA/K sebesar 23,47%. Sedangkan untuk jumlah penduduk usia kerja dengan kualifikasi tamat pendidikan tinggi (S1, S2 dan lebih tinggi) hanya 5,26%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan dasar, artinya kualitas penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang relatif rendah, sehingga sebagian besar penduduk bekerja melakukan pekerjaan di sektor informal. Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini di Kab. Pemalang masih sangat terbatas untuk penduduk dengan pendidikan perguruan tinggi.

Untuk melihat gambaran penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut berikut.

Tabel 2.47.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2025

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian (primer)	186.299	23,00
2	Industri Pengolahan (sekunder)	278.460	34,37
3	Jasa (tersier)	345.374	42,63
	Jumlah	810.133	100

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025, Kabupaten Pemalang memiliki komposisi penduduk bekerja di sektor pertanian (primer) sebesar 23,00%; sektor industri pengolahan (sekunder) sebesar 34,37%; dan sektor jasa (tersier) sebesar 42,63%. Hal ini dapat dilihat bahwa penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang masih didominasi penduduk bekerja di sektor tersier. Hal ini menunjukkan minimnya penduduk Kab. Pemalang yang bekerja pada sektor primer/ pertanian yang menjadi sektor unggulan Kab. Pemalang. Penduduk Kab. Pemalang saat ini tidak melihat sektor pertanian menjadi sektor yang menjanjikan untuk menjadi pilihan.

k. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat.

Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 (Road Map RB 2020-2024 Nasional) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025.

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan sehingga dapat menciptakan hasil/ dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/ permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020 – 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

● **REFORMASI BIROKRASI GENERAL**

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Pada pelaksanaan RB General, terdapat 24 (dua puluh empat) Kegiatan Utama yang telah ditentukan oleh Kementerian PANRB yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

● **REFORMASI BIROKRASI TEMATIK**

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi.

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional. Untuk tahun ini digitalisasi administrasi pemerintahan difokuskan pada penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Dalam upaya pencapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di pemerintah daerah.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arah Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2025, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 83,16 (kategori A), meningkat 5,83 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 77,33. Adapun perkembangan IRB Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	I. Pemenuhan	20,00	11,27	11,29
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,34	5,06
	III. Reform	30,00	15,16	13,54
Total Komponen Pengungkit		60,00	31,77	29,89
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,74	7,83
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,20	9,11
3.	Pemerintahan Yang Baik dan Bebas KKN	10,00	7,98	7,94
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,22	6,99
Total Komponen Hasil		40,00	31,14	31,87
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	62,91	61,76

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2023

Adapun Hasil Antara Area Perubahan sebanyak 8 (delapan) hasil telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.49.
Hasil Antara Area Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	ASN yang Profesional	0-100	64,29	51,63	BKN
2.	Implementasi SPBE	0-5	2,49	2,23	Kementerian PAN RB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,31	27,30	LKPP
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,94	4,01	Kementerian PAN RB
5.	Maturitas SPIP	0-5	3	2	BPKP
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3	2	BPKP
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	85,57	91,32	Ombudsman Republik Indonesia
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	38,88	19,81	ANRI

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2023

Dibandingkan tahun sebelumnya,terdapat penurunan beberapa kualitas hasil antara, yaitu: 1.Indeks Profesionalitas ASN; 2.Implementasi SPBE; 3.Maturitas SPIP; 4.Kapabilitas APIP; dan 4.Kualitas Pengelolaan arsip.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022

No.	Komponen Penilaian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Komponen Pengungkit	Na	23,91	29,07	28,11	31,77	29,89
2.	Komponen Hasil	Na	31,12	31,13	32,99	31,14	31,87
IRB		Na	55,03	60,20	61,09	62,91	61,76

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2023

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan IRB Kabupaten Pemalang tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51.
Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2025

No	Penilaian	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1. RB GENERAL				
A.	Strategi Pelaksanaan RB General			
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	1.83	2.08	2,08
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	3.02	4.84	4,85
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)			
	KEBIJAKAN PERCEPATAN			
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1.88	-	-
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0.8	2.4	2,4
3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.94	3.35	2,34

No	Penilaian	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0.5	0	0,5
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2.76	2.74	2,76
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SPBE)	0.5	0	0
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	0.57	1.38	2,26
9.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2	1.5	2
10.	Indeks Reformasi Hukum	1.42	2.42	2,48
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0.84	-	-
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0.84	1.78	2,23
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			
	KEBIJAKAN PERCEPATAN			
1.	Indeks Sistem Merit	2.33	2.56	2,56
2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)			
	a. Indeks Pelayanan Publik	1.32	1.82	1,86
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.43	1.97	1,97
C.	Capaian Sasaran Strategis RB			
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)			
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5.29	5.47	6,08
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
	a. Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	1.72	3.42	3,57
	a. Capaian Indikator Kinerja Non Makro	3.64	3.29	3,96
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan			
	a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	3.33	5	5
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	3.83	3.94	3,96
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			
1.	Indeks BerAKHLAK	2.46	2.83	2,83
2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	6.83	6.91	69,39
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	6.68	6.75	6,81
	Nilai RB General sebelum koefisien			
	Koefisien	10		
	TOTAL RB GENERAL	58.68	68.52	72,73
2.	RB TEMATIK			

No	Penilaian	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
A.	Capaian RB Tematik			
1.	Pengentasan Kemiskinan (Rencana) Aksi	0.32	0.5	0,5
2.	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.37	0.34	0,38
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.35	0.55	0,55
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.62	0,62
5.	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.18	0.71	0,71
6.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	-	-	-
7.	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.55	1.5	-
9.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	-	-	-
10.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	-	-	-
11.	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.27	0	0
12.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	0.53	0.6	1,68
13.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	2.04	1.5	2
14.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1.69	1.13	1,13
15.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak))	2.83	2.86	2,86
16.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	0.76	0	0
	TOTAL RB TEMATIK	10.29	8,81	10,43
	TOTAL NILAI RB	68.97	77,33	83,16

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2026

Secara umum, nilai Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan tren meningkat dari 68,97 (2023) menjadi 77,33 (2024) dan 83,16 (2025). Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan RB General, yang naik konsisten dari 58,68 menjadi 72,73.

Pada aspek RB General, perbaikan terlihat pada implementasi rencana aksi, digitalisasi (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta opini keuangan yang mencapai nilai maksimal. Indikator seperti indeks pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan integritas juga mengalami peningkatan bertahap. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti inkonsistensi pada SPIP, rendahnya pembangunan zona integritas, serta belum optimalnya implementasi SPBE dan beberapa indikator yang stagnan atau tidak tersedia.

Sementara itu, RB Tematik berfluktuasi. Beberapa aspek seperti pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri menunjukkan peningkatan pada rencana aksi, namun capaian output masih terbatas. Dampaknya relatif baik pada

beberapa sektor seperti pengentasan kemiskinan dan investasi, meskipun belum merata.

Kinerja reformasi birokrasi secara keseluruhan menunjukkan kemajuan positif dan konsisten, terutama pada aspek tata kelola umum. Namun, masih diperlukan penguatan pada implementasi program tematik, konsistensi capaian indikator, serta optimalisasi area yang masih lemah agar hasil reformasi lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.52.
Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	22,56	22,58	22,68	22,35	22,61
Pengukuran Kinerja	17,32	20,60	20,66	20,34	20,43
Pelaporan Kinerja	10,76	10,88	10,74	10,36	10,46
Evaluasi Internal	6,68	-	-	15,37	15,40
Capaian Kinerja	11,56	-	-	-	-
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	14,87	14,93	-	-
Nilai hasil Evaluasi	68,88	68,93	69,01	68,42	68,88
Total	B	B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2026

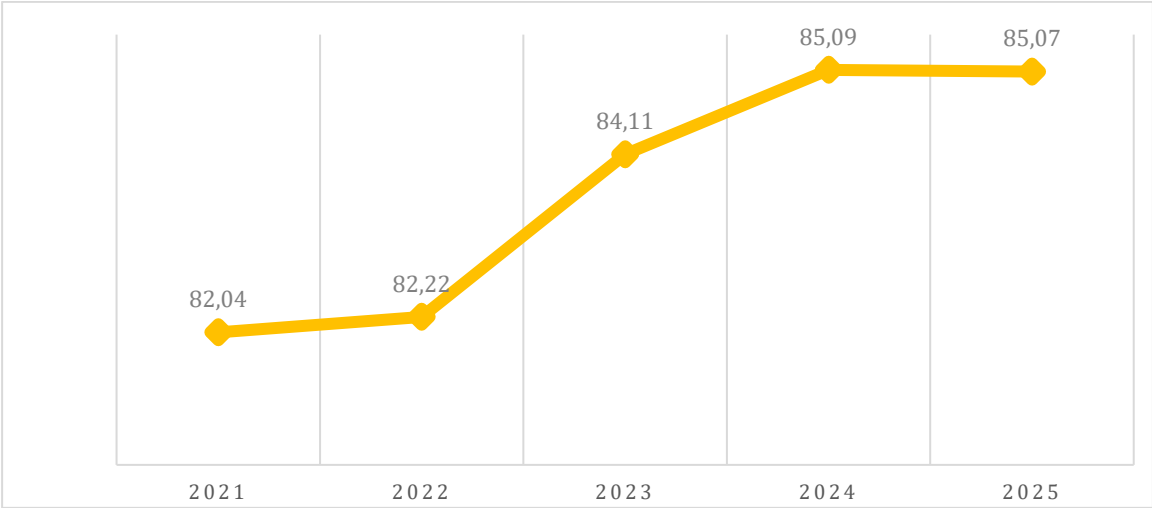
Berdasarkan data tersebut, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 relatif stabil pada kategori B, dengan nilai evaluasi yang berada pada kisaran 68–69. Komponen perencanaan kinerja menunjukkan konsistensi dengan capaian yang cenderung stabil, sementara komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan cukup signifikan sejak tahun 2022 dan kemudian relatif terjaga hingga tahun 2025. Di sisi lain, pelaporan kinerja cenderung stagnan bahkan sedikit menurun, sehingga masih memerlukan penguatan dalam kualitas penyajian informasi kinerja. Komponen evaluasi internal menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2024, menggantikan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pemalang sudah berjalan cukup baik dan konsisten, namun masih diperlukan upaya peningkatan, terutama pada aspek kualitas pelaporan, penguatan evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Penilaian evaluasi AKIP pada tahun 2024 dan 2025 memiliki empat komponen. Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. Untuk Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang dari 2024 - 2025 cenderung meningkat, dengan penilaian tertinggi pada komponen Perencanaan Kinerja sebesar 22,61

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan dua indikator yang saling berkaitan dalam menggambarkan kualitas kinerja pemerintahan. AKIP mencerminkan sejauh mana tata kelola, perencanaan, dan pertanggungjawaban kinerja instansi dilaksanakan secara efektif, sedangkan IKM menggambarkan persepsi dan tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, peningkatan nilai AKIP diharapkan sejalan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan IKM.

Perkembangan IKM Pemerintah Kabupaten Pemalang selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2026

Gambar 2.37.
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, nilai IKM tercatat sebesar 82,04 dan mengalami kenaikan menjadi 82,22 pada tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 84,11, kemudian kembali naik menjadi 85,09 pada tahun 2024, dan 85,07 pada tahun 2025.

Secara umum, tren ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Meskipun peningkatannya relatif lambat pada beberapa tahun terakhir, arah pergerakan yang stabil dan positif mencerminkan bahwa upaya peningkatan kepuasan masyarakat terus dilakukan secara konsisten.

Reformasi birokrasi juga mencakup kinerja pelaporan keuangan. Capaian kinerja pelaporan keuangan Kabupaten Pemalang selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Status Pelaporan Keuangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025

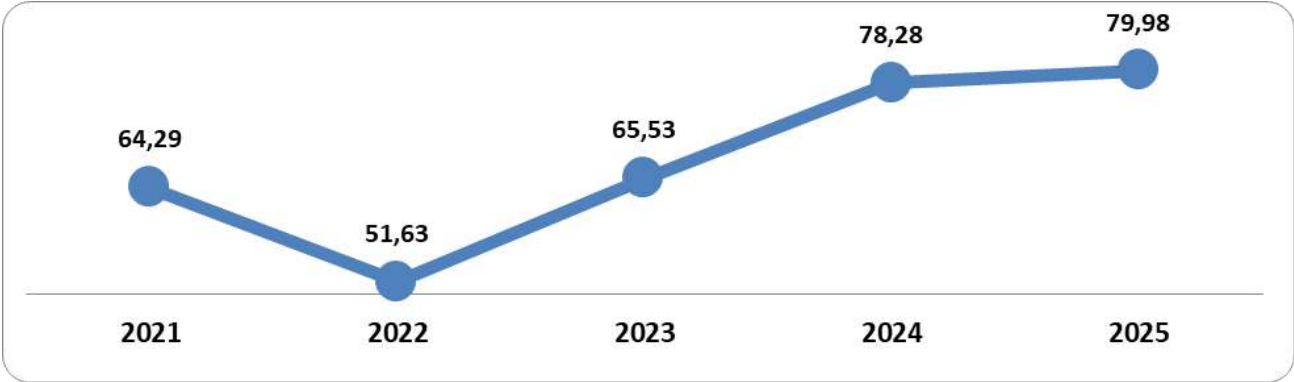
Status Laporan Keuangan					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Pemalang mampu menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang cukup memuaskan selama Tahun 2020-2024 terlihat dari status Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan RI, walaupun masih terdapat beberapa proses yang masih memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan.

Reformasi birokrasi tidak dapat terwujud tanpa dukungan ASN yang berkualitas. Kualitas ASN dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN, yang memiliki empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Peningkatan profesionalitas ASN selama Tahun 2021-2025 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BKD Kabupaten Pemalang, 2026

Gambar 2.2.
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada tahun 2021 nilai indeks sebesar 64,29, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 51,63. Namun demikian, sejak tahun 2023 hingga 2025 terjadi peningkatan yang konsisten, yaitu menjadi 65,53 pada tahun 2023, meningkat tajam menjadi 78,28 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 79,98 pada tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur, baik dari aspek kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, maupun disiplin ASN. Selain itu, hal ini juga menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan SDM aparatur melalui penguatan sistem merit, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta penataan manajemen kepegawaian. Dari sisi kuantitas, peningkatan indeks ini juga mengindikasikan semakin proporsionalnya pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan beban kerja organisasi. Secara keseluruhan, tren positif Indeks Profesionalisme ASN ini menjadi indikator bahwa kualitas dan kuantitas SDM aparatur di Kabupaten Pemalang semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih profesional.

Inovasi untuk meningkatkan profesionalitas ASN yaitu “BKD Menyapa” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi baru penggunaan aplikasi digital, wadah aspirasi dan konsultasi yang menampung kendala yang dihadapi ASN dan memberikan solusi langsung terhadap masalah kepegawaian.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) yaitu pada tujuan keempat, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Indikator untuk mengukur cakupan layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pemalang di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pemalang
2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,45	6,50	6,55	6,56	6,69
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	11,98	12,01	12,02	12,03
Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	%	76,75	64,58	84,39	84,53	74,84
Angka Partisipasi Sekolah (7-15) SD/SMP	%	96,09	96,73	97,13	95,75	95,77
Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Kesetaraan	%	3,42	6,68	12,01	16,51	18,25
Literasi Membaca SD/Sederajat	%	46,63	52,28	58,28	62,24	57,81
Literasi Membaca SMP /Sederat	%	57,62	63,26	67,9	55,89	72,62
Prosentase Pengembangan Kurikulum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
Prosesntase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Raport Pendidikan Daerah 2026

Selama periode 2021–2025, kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian.

Dari sisi rata-rata lama sekolah (RLS), terjadi peningkatan secara bertahap dari 6,45 tahun pada 2021 menjadi 6,69 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk. Hal serupa juga terlihat pada harapan lama sekolah (HLS) yang meningkat dari 11,96 tahun menjadi 12,03 tahun, meskipun kenaikannya relatif lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mulai membaik, namun masih perlu percepatan.

Pada aspek akses pendidikan, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan tren yang bervariasi. APS usia 7–15 tahun (SD/SMP) relatif stabil yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan dasar telah menjangkau sebagian

besar penduduk usia sekolah. Sementara itu, APS usia 5–6 tahun (PAUD) mengalami fluktuatif, namun demikian kembali menurun dari 84,53 persen pada tahun 2024 menjadi 74,84 persen pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan anak usia dini belum stabil dan masih memerlukan perhatian khusus.

Di sisi lain, APS pendidikan kesetaraan (usia 7–18 tahun) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 3,42 persen pada 2021 menjadi 18,25 persen pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program nonformal atau PKBM dalam penanganan ATS.

Dari aspek kualitas pendidikan, indikator literasi membaca menunjukkan tren yang berbeda antar jenjang. Literasi membaca pada tingkat SD/ sederajat meningkat hingga 62,24 persen pada 2024, namun menurun menjadi 57,81 persen pada 2025, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi mutu pembelajaran. Sementara itu, literasi membaca pada jenjang SMP/ sederajat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 72,62 persen, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2024.

Adapun indikator tata kelola pendidikan, seperti persentase pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dan persentase pendidik serta tenaga kependidikan yang terakreditasi, telah mencapai 100 persen secara konsisten selama periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemenuhan standar dan regulasi, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pemalang sudah berjalan optimal.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar sudah relatif baik dan beberapa indikator kualitas mengalami peningkatan. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada peningkatan partisipasi PAUD serta konsistensi kualitas pembelajaran, khususnya pada literasi membaca di jenjang dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Pemalang.

Hampir seluruh ATS yang kembali ke sekolah masuk ke PKBM sehingga PKBM menjadi ujung tombak pengembalian ATS. PKBM yang ada di Kabupaten Pemalang, ada sejumlah 15 yang berada di setiap kecamatan. Selain itu ada 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang ada di Kecamatan Comal. 15 PKBM dan 1 SKB tersebut semuanya berakreditasi B. Namun demikian, jumlah tersebut jauh dari kata cukup karena jumlah ATS yang dikembalikan sampai dengan 2025 sejumlah 3.637 siswa, sehingga banyak terobosan yang perlu dilakukan dinas pendidikan terkait ini, diantaranya: (1) merevisi Peraturan Bupati tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (2) Membentuk Pokja yang menginduk di PKBM. Disamping itu, koordinasi dengan 15 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menangani ATS juga ditingkatkan dengan mengembalikan ATS untuk bersekolah di PKBM. Kerjasama dengan unsur non-pemerintah seperti Bank, BAZNas dan *stakeholder* swasta lainnya ditingkatkan untuk ikut menangani ATS. Untuk ATS yang kembali ke sekolah diberikan fasilitas belajar dan beasiswa.

Jumlah ATS secara akumulasi sampai dengan 2025 sebanyak 23.325 anak, dan yang sudah kembali bersekolah baik pendidikan formal dan non formal sebanyak 3.637 anak sehingga siswa ATS yang masih belum tertampung 19.688

anak.

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, perlu didukung oleh fasilitas ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan bangunan sekolah kondisi baik. Capaian ketersediaan ruang kelas yang sudah sesuai SNP dan bangunan sekolah kondisi baik selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55.
Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase bangunan TK kondisi baik	%	57,03	50,02	96,83	45,77	44,09
Persentase bangunan SD kondisi baik	%	59,97	64,50	97,87	31,76	31,76
Persentase bangunan SMP kondisi baik	%	66,99	67,81	88,70	37,37	36,08

Sumber: Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel 2.54 tersebut diatas, persentase ruang kelas yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang TK, capaian mengalami penurunan dari 57,03% pada tahun 2021 menjadi 50,02% pada tahun 2022, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 96,83%, namun kembali menurun hingga 44,09% pada tahun 2025. Pola serupa juga terjadi pada jenjang SD, yang sempat meningkat signifikan hingga 97,87% pada tahun 2023, tetapi turun drastis menjadi 31,76% pada tahun 2024 dan bertahan pada angka tersebut di tahun 2025. Sementara itu, pada jenjang SMP, capaian relatif lebih stabil meskipun tetap mengalami penurunan, dari 66,99% pada tahun 2021 menjadi 36,08% pada tahun 2025 setelah sempat mencapai 88,70% pada tahun 2023.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk sektor pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas kondisi bangunan pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum optimalnya perencanaan dan penentuan prioritas rehabilitasi, meningkatnya jumlah bangunan yang mengalami kerusakan, serta keterbatasan dalam pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam perencanaan berbasis kebutuhan riil, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta sistem pemeliharaan berkelanjutan agar intervensi yang dilakukan dapat lebih berdampak terhadap peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan secara konsisten.

Akreditasi merupakan salah satu indikator penilaian dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan memadai apabila mempunyai akreditasi minimal B. Selama Tahun 2021-2025, sekolah yang mempunyai akreditasi minimal B mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi B Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	%	75,37	75,31	71,85	74,22%	71,66
2.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	55,51	78,57	84,64	86,14%	87,12
3.	Persentase SD/MI Yang Terakreditasi Minimal B	%	96,06	96,49	96.49	96.49	97,44
4.	Persentase SMP/MTS Yang Terakreditasi Minimal B	%	83,23	96,49	96.49	96.49	90,98

Sumber: Raport Pendidikan, 2024 dan Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2026

Capaian indikator mutu pendidikan di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang beragam pada setiap jenjang dan aspek penilaian. Pada indikator proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B, capaian cenderung fluktuatif. Namun demikian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 74,22 persen dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 71,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan PAUD masih belum stabil dan memerlukan penguatan berkelanjutan. Sebaliknya, proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 55,51 persen pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 87,12 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik pada jenjang PAUD.

Untuk jenjang pendidikan dasar, persentase SD/MI terakreditasi minimal B relatif stabil dari 96,06 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 97,44 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SD/MI telah memenuhi standar mutu pendidikan. Sementara itu, persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B mengalami fluktuasi dari 83,23 persen pada tahun 2021 menjadi 96,49 persen pada tahun 2022 dan terdapat penurunan dari tahun 2024 sebesar 96,49 persen menjadi 90,98 persen di tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan mutu pada jenjang pendidikan menengah pertama. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas sekolah telah memenuhi standar nasional, meskipun masih diperlukan pembaruan data dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, indikator mutu pendidikan di Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan positif terutama pada aspek akreditasi sekolah dasar dan peningkatan kualifikasi guru PAUD. Namun demikian, masih terdapat fluktuasi pada akreditasi PAUD dan penurunan pada jenjang SMP/MTs di tahun terakhir, yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pendidikan ke depan.

Selain penyediaan fasilitas sarana fisik, agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan optimal, perlu dicukupi pula ketersediaan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik dan Persentase Tenaga Pendidik
Berkompeten Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio siswa dengan tenaga pendidik						
	TK	rasio	1:12	1:17	1:13	1:16	1:17
	SD	rasio	1:21	1:21	1:19	1:19	1:21
	SMP	rasio	1:17	1:17	1:17	1:17	1:18
2	Persentase tenaga pendidik bersertifikasi						
	TK	%	12,51	16,89	26,14	32,6	35,20
	SD	%	44,17	47,43	50,41	96,29	93,63
	SMP	%	49,59	41,72	56,55	99,62	99,36
3	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1 / DIV	%	55,51	78,57	84,64	84,65	87,12
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan minimal DIV/Sarjana	%	97,23	86,44	97,01	Na	98,29
5	Persentase Kepala Satuan Pendidikan yang telah lulus Pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan	%	71,55	3,5	0	0	26,65

Sumber: Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2026

Capaian indikator tenaga pendidik di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang beragam, baik dari aspek rasio, sertifikasi, maupun kualifikasi tenaga pendidik.

Selama periode 2021–2025, rasio siswa dengan tenaga pendidik di Kabupaten Pemalang relatif stabil pada seluruh jenjang pendidikan, yang menunjukkan bahwa ketersediaan guru secara kuantitas cukup memadai. Pada jenjang TK, rasio berada pada kisaran 1:12 hingga 1:17, meskipun sempat mengalami fluktuasi, namun masih dalam batas yang wajar. Pada jenjang SD, rasio cenderung stabil di angka 1:19 hingga 1:21, sedangkan pada jenjang SMP relatif konstan di kisaran 1:17 hingga 1:18. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi tenaga pendidik sudah cukup seimbang dengan jumlah peserta didik. Dari sisi kualitas, persentase tenaga pendidik bersertifikasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada jenjang SD dan SMP. Pada jenjang SD, peningkatan terjadi dari 44,17% pada tahun 2021 menjadi 93,63% pada tahun 2025, sementara pada jenjang SMP meningkat dari 49,59% menjadi 99,36% pada periode yang sama. Pada jenjang TK, meskipun mengalami peningkatan dari 12,51% menjadi 35,20%, capaian ini masih relatif rendah dibandingkan jenjang lainnya sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun rasio guru dan siswa sudah cukup ideal, perlu peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik agar terus mengalami kemajuan, terutama melalui sertifikasi, namun masih perlu penguatan khususnya pada pendidikan anak usia dini.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.58.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Pendidikan Dasar/Menengah	Skor Kemampuan Literasi SD	61,73	179.552 -	179.552 -	62,24
		Skor Kemampuan Literasi SMP	74,84			70,83
		Skor Kemampuan Numerasi SD	48,91			55,89
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	67,33			62,31
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP)	100			93,945
		Iklim Inklusivitas SD	62,92			59,23
		Iklim Inklusivitas SMP	63,12			57,02
		Iklim Keamanan SD	78,23			76,13
		Iklim Keamanan SMP	75,66			69,97
		Iklim Kebhinekaan SD	79,15			73,44
		Iklim Kebhinekaan SMP	76,3			69,69
2	Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Kesetaraan)	100	5.463	5.463	16,51
3	Pendidikan Anak Usia dini	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	100	34.410	34.410	84,53
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (PAUD)	75,37			71,75
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	86,54			84,65

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025, 2026

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kinerja layanan pendidikan di Kabupaten Pemalang tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa indikator telah mendekati target namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Pada aspek kualitas pembelajaran, capaian literasi dan numerasi menunjukkan hasil yang relatif baik, terutama pada numerasi SD dan SMP yang telah melampaui atau mendekati target, sementara literasi masih sedikit di bawah target. Dari sisi partisipasi pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang dasar maupun kesetaraan masih belum mencapai target, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk Anak Tidak Sekolah (ATS).

Selain itu, indikator iklim pendidikan seperti inklusivitas, keamanan, dan kebhinekaan pada jenjang SD dan SMP umumnya berada di bawah target, yang menunjukkan perlunya penguatan lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, dan kondusif. Pada pendidikan anak usia dini (PAUD), capaian APS dan proporsi satuan PAUD terakreditasi serta kualifikasi guru juga masih di bawah target, meskipun nilainya sudah mendekati. Secara keseluruhan, capaian SPM pendidikan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pembelajaran mulai membaik, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek akses, pemerataan layanan, serta kualitas lingkungan pendidikan untuk memastikan seluruh anak

mendapatkan layanan pendidikan yang optimal dan sesuai standar.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) yaitu pada tujuan ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan balita stunting. Gambaran kondisi AKI, AKB, AKBa dan Balita Stunting stunting dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	129,34	47,48	45,14	49,95	43,3
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	4,4	6,5	6,18	5,94	6,43
3	AKBa	Per 1.000 KH	4,85	6,9	7,09	6,14	7,02
4	Persentase balita stunting (E-PPGBM)	%	12,68	10,35	9,84	10,3	10,09
5	Indeks SPM Kesehatan	Indeks	-	-	91,27	98,15	98,24
6	Persentase Fasyankes sesuai Standar	%	86,7	93,28	93,63	94,68	91,01
7	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	84,93	88,14	96,59	98,8	99,48
8	SSGI (Survei Status Gizi Masyarakat)	%	NA	24,7	19,8	Belum Rilis	18,80
9	Cakupan Kepesertaan Aktif	%	67,42	68,67	76,39	75,96	80,66
10	Persentase Desa / Kelurahan STBM	%	11,26	56,95	57,4	53,81	53,81
11	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	86,49	100	100	96,86	100
12	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Per 100.000 Penduduk	0,9	7,7	3,3	4,9	7,6
13	Rasio Tenaga Kesehatan	Per 100.000 Penduduk	-	-	-	255	338
14	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	64,44	66,67	69,23	76,2	100
15	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang	%	58,33	58,75	58,82	65	70

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Memenuhi Standar Keamanan Pangan						
16	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	84,3	86	87,58	89,14	93,81
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,17	0,17	0,19	0.24	0,24
18	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,53	73,65	73,98	74,23	74,55
19	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	32	11	10	10	8
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	59	91,2	113	76,50	93
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	89,5	91,4	66	90,70	100

Sumber: Dinkes Kabupaten Pemalang, 2026

Selama periode 2021–2025, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 AKI melonjak karena dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, AKI menurun menjadi 45,13 per 100.000 KH (11 kasus). Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 49,95 per 100.000 KH, dan kembali membaik pada tahun 2025 menjadi 43,3 per 100.000 KH. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan layanan kesehatan ibu, meskipun fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam aspek deteksi dini risiko kehamilan, akses layanan persalinan yang aman, serta kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan.

Selama periode 2021–2025, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021-2024 mengalami penurunan, kemudian di tahun 2024 AKB naik dari 5,94 per 1.000 KH menjadi 6,43 per 1.000 KH (119 kasus) pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian bayi masih menghadapi tantangan. Secara umum, perkembangan AKB ini mengalami perbaikan. Faktor risiko seperti status gizi ibu, kualitas pelayanan kesehatan neonatal, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat masih perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi yang terintegrasi, terutama dalam peningkatan gizi ibu hamil, deteksi dini risiko kehamilan, serta pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkualitas.

Pada periode yang sama, Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021-2023 angka AKB mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 AKBa mengalami penurunan menjadi sebesar 4,85 per 1.000 kelahiran hidup (KH). Pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 7,02 per 1.000 KH. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian balita masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Peningkatan

AKBa tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya angka kematian bayi, yang merupakan kontributor terbesar terhadap kematian balita, yaitu hampir 90 persen dari total kematian balita. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor risiko pada periode neonatal (bayi baru lahir usia 0–28 hari setelah kelahiran) dan bayi, seperti kondisi kesehatan ibu, status gizi, serta kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir, masih menjadi isu utama. Dengan demikian, penanganan kematian balita perlu difokuskan pada intervensi yang lebih intensif pada fase bayi, melalui peningkatan pelayanan kesehatan neonatal, perbaikan gizi ibu dan bayi, serta penguatan sistem rujukan dan deteksi dini risiko kesehatan.

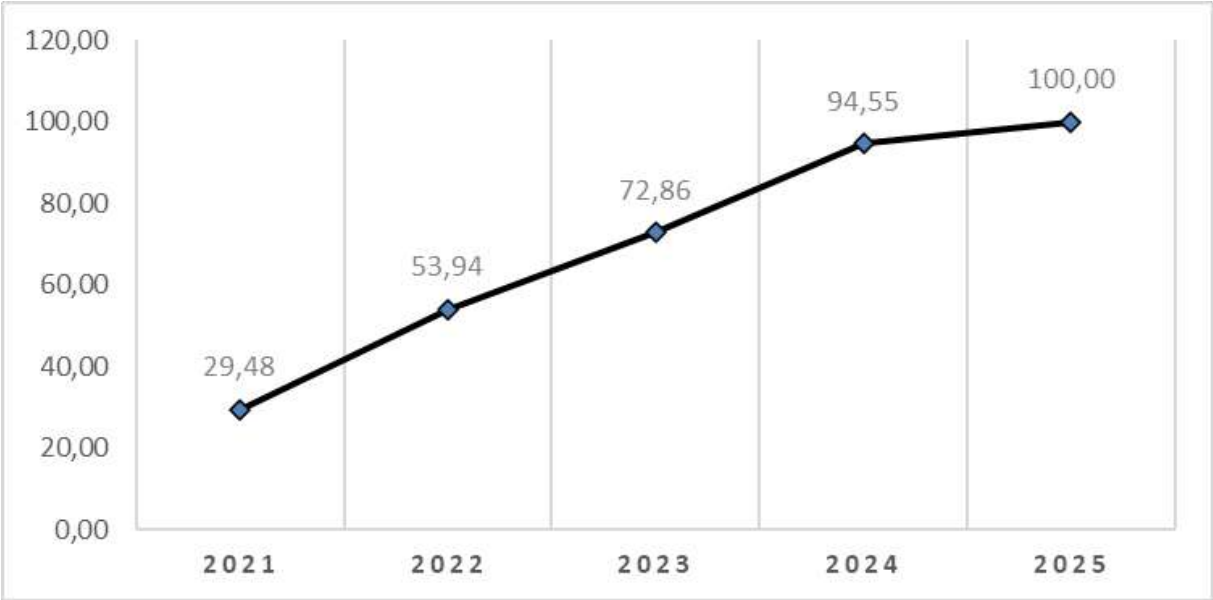
Selanjutnya selama periode 2021 sampai 2023 Prevalensi Balita stunting terus mengalami penurunan positif. Tercatat dari Tahun 2021 Prevalensi Balita Stunting sebesar 12,68% berturut turut menurun positif menjadi sebesar 10,09% di tahun 2025. Cakupan pengukuran dan pelaporan melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sudah mencapai 100%. Data E-PPGBM digunakan sebagai data sasaran intervensi Spesifik dan Sensitif dalam percepatan penurunan stunting, sedangkan data SSGI digunakan untuk perencanaan makro. Dimana data SSGI pada periode yang sama terus mengalami penurunan yaitu sebesar 24,70 persen di tahun 2021 menjadi 18,80% di tahun 2025. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh konvergensi lintas sektor yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Cakupan kepesertaan aktif JKN di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021–2025. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan aktif tercatat sebesar 67,42% dan meningkat menjadi 68,67% pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 76,39%, namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 75,96%. Selanjutnya, pada tahun 2025 kembali meningkat dan mencapai 80,66%.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting, antara lain: pelaksanaan aksi konvergensi hingga tingkat desa/kelurahan; pemberian makanan tambahan (PMT); pendampingan dan pendataan status gizi, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat; penguatan peran PKK dalam perubahan perilaku; serta pembinaan dan pemantauan aksi konvergensi penurunan stunting hingga tingkat desa/kelurahan dengan sasaran remaja, calon pengantin/pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan keluarga berisiko. Yang dimaksud dengan aksi konvergensi stunting adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas. Tidak hanya dari sisi makanan dan gizi saja yang diintervensi, tapi juga pemberian bantuan sosial baik tunai maupun pangan non tunai, rehab RTLH, jambanisasi, kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), promosi gemar makan ikan (Gemari) serta penyediaan akses air minum layak dan sanitasi layak.

Selama tahun 2021-2025 capaian pelayanan kesehatan masyarakat masih terus dioptimalkan, hal ini ditandai oleh Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2025 sebesar 0,24 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat (0,80).

Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Dari angka capaian di tahun 2021 sebesar 29,48 meningkat di akhir tahun 2025 menjadi 100%. Angka capaian ini telah sesuai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan peran aktif masyarakat terutama kader kesehatan dalam membantu penemuan penderita TBC dan orang terduga TBC. Data capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 2.38.
Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Beberapa permasalahan terkait dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Pemalang yaitu:

Penyakit Menular:

1. Masih ditemukannya kasus baru Tuberkulosis (TB) termasuk TB MDR akibat ketidakpatuhan dalam pengobatan.
2. Kasus ISPA/pneumonia dan diare masih menjadi penyakit terbanyak pada anak balita.
3. Kasus kusta baru masih ditemukan setiap tahun.
4. Upaya penemuan dan pengobatan HIV/AIDS belum optimal.
5. Eliminasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) belum berjalan baik karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Penyakit Tidak Menular:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan kesehatan jiwa.
2. Masyarakat usia produktif dan lansia masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemanfaatan layanan Posbindu dan Posyandu Lansia belum optimal.

Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang adalah Persentase balita gizi buruk, persentase desa/ kelurahan yang *open defecation free* (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (SBS), persentase desa/ kelurahan STBM, cakupan desa/ kelurahan *universal child immunization* (UCI), persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta persentase desa siaga yang aktif yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.60.
Indikator Pendukung Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase desa/ kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	68,92	100	100	100	100
2.	Persentase desa/ kelurahan STBM	%	13,51	20,27	20,27	53,8	53,81
3.	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	96,9	100
4.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	88,70	86	100	89,1	93,81
5.	Persentase desa siaga aktif	%	4,95	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2026

Indikator yang menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain persentase Desa ODF (Open Defecation Free), persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI), serta persentase rumah tangga berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selama periode 2021–2025, kelima indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Persentase Desa ODF mengalami peningkatan signifikan dari 68,92 persen pada tahun 2021 menjadi 100 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya penghapusan praktik buang air besar sembarangan di seluruh desa. Selanjutnya, persentase desa/kelurahan yang menerapkan STBM juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari 13,51 persen pada tahun 2021 menjadi 53,81 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami kemajuan, capaian ini masih menunjukkan bahwa implementasi STBM belum merata di seluruh wilayah. Pada indikator cakupan Desa UCI, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen, setelah sebelumnya pada tahun 2024 berada di angka 96,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa telah mencapai status imunisasi dasar lengkap bagi bayi, yang merupakan capaian penting dalam upaya pencegahan penyakit. Sementara itu, persentase rumah tangga ber-PHBS juga menunjukkan peningkatan dari 88,70 persen pada tahun 2021 menjadi 93,81 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin baiknya perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

Secara umum, peningkatan kelima indikator tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, upaya

pendampingan dan penguatan intervensi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini penting mengingat sektor kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus terus dijaga kualitasnya, khususnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang optimal harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka	0,692	0,69	0,75	0,58	0,56
2	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	angka	0,017	0,019	0,08	0,016	0,016
3	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	83,53	Belum Rilis	97,45	99,97	99,48
5	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) terakreditasi	%	92	92	100	100	100
6	Persentase rumah sakit terakreditasi	%	77,78	100	100	100	100
7	Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar	%	98	98	100	100	100
8	Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	80	82	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2023 capaian rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 0,75, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,56 pada tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, yang menurun dari 0,08 pada tahun 2023 menjadi 0,016 pada tahun 2025. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan fasilitas layanan kesehatan belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga berpotensi mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan rasio tersebut, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan rumah sakit umum di Kecamatan Randudongkal. Pembangunan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan rujukan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain, dari aspek ketersediaan layanan, indikator ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas selama periode 2021–2025 telah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap telah terpenuhi dengan baik, sehingga mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan dasar.

Lebih lanjut, mutu pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian akreditasi dan pemenuhan standar pada berbagai jenis fasilitas kesehatan. Puskesmas terakreditasi meningkat dari 92 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada 2025 yang mengindikasikan terpenuhinya standar sarana penunjang layanan kesehatan.

Pada aspek keamanan pangan, persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memenuhi syarat meningkat dari 98 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin baiknya pengawasan dan pembinaan terhadap produk pangan rumah tangga. Sementara itu, rumah sakit terakreditasi juga mengalami peningkatan dari 77,78 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2025, yang menandakan seluruh rumah sakit di Kabupaten Pemalang telah memenuhi standar akreditasi, baik dari aspek pelayanan, manajemen, maupun keselamatan pasien.

Inovasi yang telah dikembangkan pada Dinas Kesehatan antara lain inovasi **KOPI TUBRUK** (Kolaborasi Pemeriksaan Terintegrasi Tuberkulosis; Fokus pada Anak Stunting dan Gangguan Gizi). Inovasi ini mencakup kolaborasi lintas program, dalam hal ini Program Gizi dan Program P2PM. Apabila petugas gizi menemukan kasus anak dengan gangguan gizi, maka akan dilaporkan kepada petugas P2PM. Selanjutnya, petugas menggali gejala TB anak, melakukan tes mantoux, serta skoring TB anak. Pasien yang ditemukan hasil terindikasi TB anak akan dilakukan penanganan sesuai standar. **“Petualangan si bolang plus-plus”** pemantauan bayi dalam kandungan, cek stunting sampai sibuah hati lahir pulang membawa akta kelahiran plus JKN-KIS dan sertifikat imunisasi. **“gelang anting”** aplikasi deteksi balita stunting, **“Putri buah hati”**; persiapan untuk remaja putri menjadi ibu hamil sehat tanpa anemia, dan **“Pelayanan one stop service”**; satu layanan cepat dan profesional untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mutu pelayanan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek ketersediaan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sarana prasarana yang didalamnya meliputi juga SDM kesehatan, Obat dan Alkes, serta menjaga konsistensi kualitas pelayanan guna menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.62.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (ibu hamil)	100	21.654	21.172	99,77
2	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (ibu hamil)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (ibu hamil)	100	20.669	20.453	98,95

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar (neonatal)	100	19.685	19.628	99,71
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	96.189	96.189	100
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (anak)	100	193.587	193.185	99,79
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar (orang)	100	804.093	804.093	100
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali (warga negara)	100	190.516	170.576	89,53
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >=15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	100	138.847	138.847	100
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	100	18.699	18.699	100
10	Pengelolaan Pelayanan kesehatan untuk Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (orang)	100	1.159	1.159	100
11	Pengelolaan Pelayanan kesehatan untuk Warga Negara terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang (orang)	100	15.960	15.960	100
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	100	33.403	29.332	100

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2025, 2026

Berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Tahun 2025, secara umum sebagian besar indikator telah mendekati bahkan mencapai target 100%, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal. Pada layanan kesehatan ibu dan anak, capaian pelayanan kesehatan ibu

hamil (antenatal) mencapai 99,77% dan 98,95%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu hamil telah mendapatkan pelayanan sesuai standar, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Sementara itu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal) telah mencapai 99,71%, dan pelayanan kesehatan balita telah mencapai 100%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik pada layanan dasar ini.

Pada kelompok usia pendidikan dasar, capaian pelayanan kesehatan mencapai 99,79%, sedangkan pada usia produktif (15–59 tahun) telah mencapai 100%. Namun demikian, pada kelompok usia lanjut, capaian masih sebesar 89,53%, sehingga menjadi salah satu indikator yang masih memerlukan perhatian.

Untuk layanan kesehatan berbasis penyakit, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik. Pelayanan penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat (ODGJ), serta pemeriksaan terduga tuberkulosis (TBC) masing-masing telah mencapai 100 persen. Sementara itu, pada layanan orang berisiko terinfeksi HIV, meskipun jumlah yang dilayani belum sepenuhnya mencakup target sasaran, capaian indikator tetap tercatat 100% sesuai metode penghitungan SPM.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator SPM telah mencapai target, terutama pada layanan kesehatan dasar dan pengendalian penyakit. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalnya peran layanan kesehatan berbasis masyarakat, khususnya Posyandu, yang telah mengintegrasikan enam layanan dasar SPM secara terpadu dan menjangkau sasaran secara luas.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	68,28	73	69,43	75,05	79,08
2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	50,37	52,45	53,95	54,13	54,18
3.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	52,32	53,06	52,97	51,77	55,33

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,63	21,95	23,66	23,95	36,47
5.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	57,62	63,03	59,3	65,38	60,19
6.	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik	%	25,59	25,84	28,30	28,74	25,7
7.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	6,51	7	14,93	14,93	4,5
8.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0,1	0	0,45	0
9.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	70,26	70,42	69,96	70,84	72,60
10	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		Na	Na	Na	Na	Na
11	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	%	86,69	87,12	88	88,48	91,04

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,61	95,49	95,72	97,27	95,72
13	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	72	76,05	76,55	76,62	80,01
14	rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	0,23	0,25	0,95	1	1,11
15	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	1,48	1,81	4,04	4,99	5,39
16	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100
17	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,35	0,65	1,32	1,32	1,32
18	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data tersebut, kinerja infrastruktur dasar di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang menurun capaiannya. Indikator yang mengalami peningkatan capaian pada tahun 2025 diantaranya adalah indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota dengan peningkatan signifikan dari 68,66%

pada tahun 2020 menjadi 78,09% (597,92 Km) pada tahun 2025, menunjukkan perbaikan kualitas jaringan jalan. Peningkatan ini tidak terlepas dari pelaksanaan program unggulan Bupati Pemalang “Jalan Halus Merata”, yang mendorong percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara lebih masif. Melalui program tersebut, alokasi anggaran infrastruktur jalan ditingkatkan sehingga memungkinkan penanganan lebih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak maupun peningkatan kualitas jalan eksisting. Dampaknya, konektivitas antar wilayah semakin baik, mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Selain indikator panjang jalan kondisi permukaan mantap, indikator akses sanitasi aman dan layanan air minum capaiannya juga terus meningkat, dengan akses air minum perpipaan melonjak cukup tinggi pada tahun 2025 menjadi 36,47% serta cakupan akses air minum keseluruhan mencapai 91,04%. Peningkatan ini merupakan dampak dari pelaksanaan program unggulan Bupati “Revitalisasi Penyediaan Air Bersih dari Hulu sampai Hilir”, yang berfokus pada perbaikan sistem penyediaan air secara menyeluruh mulai dari sumber air, jaringan distribusi, hingga pelayanan kepada masyarakat. Melalui program ini, dilakukan penguatan infrastruktur SPAM, penguatan kelembagaan pada 189 BPSPAM/KPSAM, optimalisasi dan perluasan jaringan perpipaan ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Selain itu, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan juga mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 36,47% pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan air minum berkualitas di kawasan perkotaan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
- 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.62, kinerja infrastruktur dasar di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Namun, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diantaranya adalah indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota. Capaian indikator tersebut pada tahun 2025 hanya sebesar 4,5% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 14,93%. Hal ini disebabkan karena realisasi diawal menggunakan panjang talud yang dikerjakan tetapi realisasi di lapangan terdapat bangunan seperti pintu air yang dikerjakan. Indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik capaiannya pada

tahun 2025 sebesar 60,19% turun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 65,38%. Penurunan capaian disebabkan karena banyak turun menjadi kondisi sedang, sedangkan secara keseluruhan jalan kondisi mantap mengalami kenaikan. Kemudian terdapat indikator yang capaiannya pada tahun 2025 masih 0 yaitu indikator Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai. Capaian tahun 2025 masih 0 disebabkan karena bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan Provinsi.

Tabel 2.64.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	100	3.045	3.045	100,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	1.080	1.080	100,00

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, seluruh indikator layanan pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen. Pencapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci:

- 1) Jumlah sasaran (penerima layanan) relatif terukur dan telah teridentifikasi dengan baik, sehingga seluruh target dapat dijangkau secara penuh;
- 2) Adanya dukungan program prioritas daerah—termasuk revitalisasi penyediaan air bersih dan peningkatan sanitasi—yang diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- 3) Koordinasi antar perangkat daerah dan dukungan pemerintah pusat juga mempercepat pencapaian target.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman melalui pendekatan peningkatan kualitas hunian dan penyediaan infrastruktur dasar. Upaya tersebut meliputi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penataan dan pengurangan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi. Pendekatan kolaboratif turut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan lingkungan. Selain itu, peran dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan filantropi juga menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas permukiman, khususnya dalam membantu pembiayaan RTLH, penyediaan sarana sanitasi, serta penataan lingkungan berbasis komunitas. Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat kapasitas

pembiayaan dan memperluas jangkauan intervensi pembangunan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat, sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	313,72	317,59	317,59	198,258	192,700
2.	Backlog Rumah	unit	NA	NA	NA	17.174	12.673
3.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	60,90	60,66	63,15	65,25	51,62
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	74,49	70,09	69,34	67,87	72,98
5.	Indeks pencapaian SPM PRKP	indeks	NA	NA	NA	100	100
6.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	100
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	25,68	26,04	30,85	31,2	31,20
9.	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	NA	75,2	63,2	62,85	0,61
10.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani	%	25,51	29,01	30,66	32,13	69,48
11.	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	3129	2611	1356	1039	329
12.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	NA	22,94	26,61	27,52	34,86

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh terdapat pembagian kewenangan, yaitu luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, 10-15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi dan lebih dari 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat. Pada tahun 2025 kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani sebesar 32,20%. Dari 313,72 hektar luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar, di Tahun 2025 telah tertangani seluas 4,458 Ha.

Pemerintah Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kawasan dan permukiman kumuh melalui pendekatan terpadu berbasis infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas hunian tidak layak huni (RTLH), pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi, serta pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Selain itu, penanganan kawasan kumuh juga didukung melalui program kolaboratif dengan pemerintah pusat dan provinsi, seperti penataan kawasan berbasis skala lingkungan dan peningkatan akses layanan dasar. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pemeliharaan lingkungan. Hasilnya, terjadi perbaikan kualitas lingkungan permukiman serta penurunan luasan kawasan kumuh secara bertahap.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, dimana di Tahun 2024 luas kawasan kumuh sebesar 198,258 Ha dan turun di tahun 2025 menjadi 192,800 Ha. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait keterbatasan anggaran, pertumbuhan kawasan baru, serta perlunya konsistensi dalam menjaga keberlanjutan hasil penanganan yang telah dicapai. Adapun capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani di Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 69,48% meningkat dari Tahun 2024 sebesar yang hanya sebesar 32,13%.

Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 34,86%. Adapun yang dimaksud fasilitas PSU berupa akses air minum, jalan lingkungan, akses sanitasi, dan akses PJU (penerangan jalan umum).

Tabel 2.66.
Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
1	Moga	82.347	22.656	303
2	Warungpring	49.146	15.031	141
3	Pulosari	69.289	19.709	147
4	Belik	133.695	36.688	351
5	Watukumpul	83.278	25.321	158
6	Bodeh	67.636	22.114	208
7	Bantarbolang	93.705	25.588	456
8	Randudongkal	121.929	38.338	555
9	Pemalang	217.888	72.074	2.363

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
10	Taman	204.168	58.032	2.574
11	Petarukan	184.952	52.974	2.067
12	Ampelgading	81.041	24.510	777
13	Comal	101.767	31.154	1.482
14	Ulujami	123.588	37.340	1.091
	Jumlah	1.614.429	481.529	12.673

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Backlog juga menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. Sampai Tahun 2025, Kabupaten Pemalang masih menyisakan 12.673 backlog rumah, sehingga diperlukan peningkatan fasilitasi kepemilikan rumah dan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

- 1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Berikut Data dasar capaian Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak (Persen) yang bersumber dari data Susenas BPS tahun sebelumnya:

Tabel 2.67.

Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

No	Tahun	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak (Persen)
1	2020	59,54
2	2021	60,90
3	2022	60,66
4	2023	63,15
5	2024	65,25
6	2025	51,62

Sumber: BPS-RI, Susenas 2016-2025

Dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, namun menurun pada tahun 2025 menjadi 51,62 %. Hal ini dikarenakan keterbatasan ketersediaan lahan di perkotaan karena semakin tingginya harga lahan serta masih tingginya angka ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang membuat masyarakat tidak mampu memperbaiki kerusakan rumah atau mengakses sanitasi yang layak.

Tabel 2.68.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah/KK yang dibangun/rehabilitasi bagi korban bencana	100	68	68	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	0	0	0	0

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman, pada tahun 2025 indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana telah mencapai target 100%, di mana seluruh 68 rumah tangga terdampak telah mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Capaian ini menunjukkan respons pemerintah daerah yang cepat dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa layanan dasar bidang perumahan telah berjalan optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam penanganan korban bencana.

4. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusifitas wilayah dapat diukur melalui penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,66	0,76	0,79	0,8	0,8
2.	Persentase desa tangguh bencana	%	5,19	6,6	8,02	11,32	13,45
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	68,75	100	100	100
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
5.	Tingkat Respon time penanganan kebakaran	%	64,41	66,66	64,44	74,53	77,42
6.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100	100	100	100
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	64,41	66,66	64,44	100	100
9.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	92	94	96	100	100
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	95	100	100	100	100
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
12.	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi	%	0	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2026
BPBD Kabupaten Pemalang, 2026

Secara umum, capaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik. Ada 6 indikator yang diampu oleh Satpol PP dan 6 indikator diampu oleh BPBD. Dari 12 indikator yang diampu oleh Satpol PP dan BPBD, 8 indikator capaiannya 100% di tahun 2025. Beberapa indikator mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, diantaranya yaitu Persentase desa tangguh bencana, Tingkat Respon time penanganan kebakaran. Selanjutnya, ada indikator yang perlu mendapat perhatian besar yaitu adanya peningkatan Rasio kejadian kebakaran dan penurunan Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah meningkat dari 0,66 pada tahun 2021 menjadi 0,80 pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana dan gangguan ketenteraman. Peningkatan ini tidak terlepas dari pembentukan dan penguatan Kecamatan Tangguh Bencana dan Desa Tangguh Bencana, yang berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan mitigasi, serta respons cepat masyarakat terhadap potensi bencana. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya persentase desa tangguh bencana dari 5,19% menjadi 13,45%, serta optimalnya penegakan Perda dan Perkada yang kembali mencapai 100% pada tahun-tahun terakhir, sehingga secara keseluruhan memperkuat sistem perlindungan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif.

Kabupaten Pemalang secara tipologi wilayah terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi risiko bencana yang dihadapi berupa tanah longsor. Sedangkan di dataran rendah ancaman bencana yang ada berupa banjir dan rob, dan juga abrasi di daerah pesisir pantai. Selain itu ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Pemalang adalah bencana letusan gunung berapi. Hal ini karena letak Kabupaten Pemalang yang berada di kaki Gunung Slamet, gunung berapi yang masih dalam kategori aktif. IRBI Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebesar 97.49 (kategori sedang).

Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2025 = 11 (Sedang), Indeks Bencana Gempa Bumi = 2 (Rendah), Indeks Bencana Letusan Gunung Api = 11 (Tinggi), Indeks Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan = 9 (Sedang), Indeks Bencana Tanah Longsor = 9 (Sedang), Indeks Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi = 10 (Sedang), Indeks Risiko Bencana Kekeringan = 12 (Sedang), Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim = 12 (Sedang).

Adapun sistem peringatan dini bencana yang dimiliki sampai dengan tahun 2024, meliputi: 21 sistem peringatan dini longsor (21 tradisional/manual), 1 sistem peringatan dini gunung meletus elektronik/digital, 2 sistem peringatan dini banjir (2 elektronik/digital), dan 1 sistem peringatan dini gempa elektronik/digital.

Untuk kinerja sub urusan kebakaran selama Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu (1) belum terpenuhinya kebutuhan WMK di Kabupaten Pemalang, dimana WMK yang tersedia hanya sejumlah 3 WMK dari kebutuhan 6 WMK; (2) banyaknya kejadian kebakaran yang tidak imbang dengan fasilitas pemadam kebakaran, meliputi personil, mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapannya; (3) belum tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan

APD yang sesuai standar; (4) masih kurangnya kemampuan petugas pemadam kebakaran; (5) belum optimalnya kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan kebakaran; (6) belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sehingga tidak maksimal ketika digunakan; (6) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran; (7) belum terbentuknya desa/kelurahan tanggap kebakaran.

Tabel 2.70.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	1.200	1.200	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	1.800	1.800	100
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	100	600	600	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	630	630	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	12.260	12.260	100

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kabupaten Pemalang 2025, 2026

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan kebakaran, seluruh indikator pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen. Pada pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh warga negara yang menjadi sasaran layanan akibat penegakan Perda dan Perkada telah terlayani secara penuh sebanyak 1.200 orang. Demikian pula pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, seluruh sasaran layanan sebanyak 1.800 warga telah mendapatkan pelayanan secara optimal.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memberikan layanan dasar pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan responsif. Hal ini juga mencerminkan kesiapsiagaan aparat serta efektivitas sistem pelayanan dalam menangani kejadian yang membutuhkan penanganan cepat, seperti kebakaran

dan penegakan ketertiban umum. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas layanan, kesiapsiagaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan di masa mendatang.

5. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Gambaran penanganan PPKS di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase PPKS yang tertangani	%	38,11	44,58	74,22	66,60	72,90
2.	Persentase PPKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	37,81	100	100	100	100
3.	Persentase PPKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	68,18	71,59	100	100	100
4.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	83,83	100	100	100	100
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	26,48	100	100	100	100
6.	Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	%	5,5	100	100	100	100
8.	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	20,24	28,74	6,62	NA	36,12
9.	Persentase penanganan warga Negara migran korban	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	kekerasan yang tertangani						
10.	Persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di tingkat KS 1 dan KS 2	%	65,96	64,29	27,53	NA	NA
11.	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan sosial Tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase PPKS yang tertangani, dari 38,11 persen pada tahun 2021 menjadi 72,90 persen pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Peningkatan penanganan tersebut didukung oleh optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS skala kabupaten yang mencapai 100 persen sejak tahun 2022, serta keberhasilan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan kelompok sosial ekonomi sejenis yang juga mencapai 100 persen sejak tahun 2023.

Pada aspek perlindungan sosial, pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang konsisten melalui pemberian bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten selama masa tanggap darurat, pemberian jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, penyandang gangguan mental, dan lanjut usia tidak potensial, serta penanganan warga negara migran korban kekerasan yang seluruhnya mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial skala kabupaten juga berada dalam kondisi baik dengan capaian tetap 100 persen selama periode tersebut.

Di sisi lain, pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial mengalami peningkatan sangat signifikan dari 5,5 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen sejak tahun 2022. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang capaiannya masih fluktuatif dan belum stabil, serta pemberian jaminan perlindungan sosial bagi penduduk pada tingkat KS 1 dan KS 2 yang menunjukkan kecenderungan menurun hingga tahun 2023 dan belum tersedia data pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan sosial telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek pelayanan dasar dan perlindungan kelompok rentan, meskipun penguatan pada aspek pemberdayaan sosial dan keberlanjutan data masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.72.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Penerima Layanan Dasar		Capaian SPM (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	1.232	1.232	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	1.152	1.152	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	1.202	1.202	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	100	1.182	1.182	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	489	489	100

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2025, 2026

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, seluruh indikator layanan pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial dasar di Kabupaten Pemalang telah berjalan secara optimal dan mampu menjangkau seluruh sasaran penerima layanan. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan layanan sosial dasar, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta kelompok masyarakat terdampak bencana. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial di daerah. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian tersebut, diperlukan upaya penguatan yang berkesinambungan.

Salah satu aspek penting adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Dalam hal ini, pemanfaatan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan dan intervensi program sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73.
Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,71	6,63	6,55	6,63	6,61
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,9	69,91	69,58	72,24	71,97
3.	TPAK Laki-laki	%	80,14	84,56	86,5	85,15	85,79
4.	TPAK Perempuan	%	52,14	55,78	52,33	59,09	57,88
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	31,43	30,98	27,1	76,47	63,18
6.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	53,55	63,09	55,02	64,58	72,04
7.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	%	66,96	87,26	62,76	71,74	71,66
8.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	47,05	47,47	86,07	100	80
9.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	63,02	3,55	4,27	5,49	6,4
10.	Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	-	81,63	83,54	83,12	78,14

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026

Pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja, produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara umum mengalami tren peningkatan dibandingkan awal periode. Pada tahun 2025, TPAK tercatat sebesar 71,97%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 65,9%. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki relatif stabil pada kisaran di atas 80%, sedangkan TPAK perempuan menunjukkan peningkatan yang

cukup berarti, sebagai indikasi semakin terbukanya kesempatan kerja dan partisipasi ekonomi perempuan.

Dari sisi produktivitas tenaga kerja, capaian menunjukkan tren yang cenderung membaik pada akhir periode. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Upaya peningkatan keterampilan juga tercermin dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami perkembangan yang cukup positif. Setelah berada pada kisaran 53,55% pada awal pengukuran, cakupan meningkat hingga mencapai 72,04% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan akses pekerja terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan, meskipun masih diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi kepesertaan. Sebagaimana yang telah disepakati dalam Desk Pelaksanaan Percepatan Capaian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada bulan April 2026, bahwa target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang pada tahun 2027 adalah sebesar 49,94%. Penyesuaian target tersebut khususnya perlu memprioritaskan perluasan cakupan bagi kelompok pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan, sehingga kebijakan kepesertaan Jamsostek lebih inklusif, terarah, serta mendukung percepatan perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Dalam hal penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja, persentase tenaga kerja yang ditempatkan menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat pada akhir periode, mencerminkan perbaikan fungsi layanan ketenagakerjaan daerah. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi meningkat, sehingga pada tahun 2025 sebesar 6,4%.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan urusan ketenagakerjaan periode 2021–2025 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Namun demikian, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pemalang saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mengadakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi. Melalui itu, pencari kerja dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) terakreditasi.

Dinas Tenaga Kerja juga harus memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap aturan ketenagakerjaan, menjembatani apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan dan memastikan perusahaan sudah mengikuti Jamsostek sebagai proteksi keselamatan tenaga kerja. Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan berbasis komunitas. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Pemalang berpeluang meningkatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu,

sertifikasi keahlian diperlukan agar tenaga kerja dapat masuk lingkungan kerja industri serta bersaing di pasar kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pemalang selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	49,50	66,34	70,23	72,73	74,00
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,35	2,28	2,32	44,95	2,22
3.	Rasio KDRT	angka	0,007	0,007	0,005	0,003	0,004
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
6.	Kasus kekerasan perempuan	org	(0,10)45	0,07(36)	42	22	31
7.	Kasus kekerasan anak	org	(0,15)62	(0,09)42	46	39	68
8.	Nilai Kabupaten layak anak	Nilai	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
9.	Persentase Desa layak anak	%	(59,01)131	(58,74)131	(58,74)131	(58,74)131	(72,19)161
10.	Persentase Kecamatan layak anak	%	(92,86)13	(100)14	(100)14	(100)14	(100)14
11.	Kasus perceraian	Jumlah	4.716	4.716	4.022	3.725	4.701
12.	Persentase pernikahan anak	%	5,32	3,32	5,6	4,5	3,79
13.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
14.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,62	2,52	2,73	4,5	2,68
15.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase OPD yang memiliki data Gender dan anak	%	74,07	77,70	81,47	85,18	88,88
17.	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	%	100	0,011	100	100	100

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Data menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender periode 2021–2025 cenderung membaik, meskipun masih terdapat beberapa fluktuasi. Kelembagaan PUG dan ketersediaan data gender di OPD meningkat secara konsisten. Status Kabupaten Layak Anak juga naik dari “Madya” menjadi “Nindya”, didukung peningkatan desa dan kecamatan layak anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berfluktuasi, dengan tren sempat menurun namun kembali meningkat di 2025. Meski demikian, seluruh korban telah mendapatkan layanan, penanganan, dan penegakan hukum secara optimal (100%). Rasio KDRT menurun, dan angka pernikahan anak cenderung turun meski tidak stabil. Sementara itu, kasus perceraian sempat menurun tetapi kembali naik di 2025.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah relatif rendah dan tidak stabil, serta terdapat anomali data pada 2024. Dukungan anggaran responsif gender meningkat hingga 2024, namun menurun kembali di 2025. Secara umum, capaian sudah baik terutama dalam layanan dan kelembagaan, tetapi masih perlu peningkatan pada konsistensi data, partisipasi perempuan, dan stabilitas anggaran serta dukungan dalam mewujudkan kecamatan berdaya.

3. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan menjadi fokus kinerja urusan pangan. Kondisi pangan di Kabupaten Pemalang relatif aman tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masm kategori baik. Gambaran kinerja urusan pangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,35	78,51	80,84	81,81	71,10
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	93,5	95,5	96,3	95,49	97,95
3.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,59	11,54	9,47	6,31	6,77
4.	Persentase cadangan pangan	%	NA	NA	3,02	11,91	14,25
5.	Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/kapita/hari	2408,8	2260,2	2263	2263	2217,9
6.	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/kapita/hari	72,7	67	68,6	66,5	68,83
7.	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	49,55	28,83	29,73	9,42	13,45
8.	Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	95	94,7	95

Sumber: Dispartan Kabupaten Pemalang, 2026

Salah satu indikator capaian pada Urusan Pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan daerah. IKP menggambarkan kondisi ketahanan pangan melalui aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan serta intervensi program pembangunan pangan. Skor IKP Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, pada tahun 2025, capaian IKP Kabupaten Pemalang mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan memburuknya kondisi ketahanan pangan daerah, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan metode perhitungan indikator IKP tersebut.

Dalam mendukung penguatan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, mengantisipasi kondisi kerawanan pangan, keadaan darurat, bencana, maupun gejolak pasokan dan harga pangan di daerah. Keberadaan kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten

Pemalang dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan melalui pengelolaan cadangan pangan yang terencana dan responsif terhadap berbagai potensi risiko pangan.

Berdasarkan capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik terutama pada indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 93,5 pada tahun 2021 menjadi 97,95 pada tahun 2025. Peningkatan skor tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Ketersediaan energi dan protein per kapita selama periode tersebut menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 hingga 2022 ketersediaan energi dan protein per kapita cenderung meningkat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Sementara itu, data tahun 2025 belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi pangan, distribusi, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan tren yang relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah berada pada 10,59% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 11,54% pada tahun 2022, angka tersebut menurun menjadi 9,47% pada tahun 2023 dan 6,31% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 kembali sedikit meningkat menjadi 6,77%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat.

Dari sisi konsumsi pangan, rata-rata konsumsi energi masyarakat mengalami penurunan dari 2408,8 kkal/kapita/hari pada tahun 2021 menjadi 2217,9 kkal/kapita/hari pada tahun 2025. Sementara itu, konsumsi protein per kapita per hari juga menunjukkan fluktuasi dari 72,7 gram/kapita/hari pada tahun 2020 menjadi 68,83 gram/kapita/hari pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas konsumsi pangan meningkat, jumlah konsumsi energi dan protein masih perlu diperhatikan agar sesuai dengan standar kebutuhan gizi masyarakat.

Selain itu, persentase daerah rentan rawan pangan menunjukkan kecenderungan menurun setelah sempat meningkat pada tahun 2021. Persentase tersebut tercatat 49,55% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 9,42% pada tahun 2024 dan 13,45% pada tahun 2025. Di sisi lain, persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan relatif tinggi dan stabil, yaitu berada pada kisaran 94,7%–100% selama periode 2021–2025.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan urusan pangan menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan serta penguatan aspek keamanan pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah harus terus diupayakan melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan keamanannya sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkesinambungan. Disamping itu, promosi konsumsi pangan beragam dan bergizi

kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan untuk menggugah kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Penguatan kelembagaan pangan daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.

4. **Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama dalam menjamin kepastian hukum atas pemanfaatan ruang dan tanah. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan tata kelola pertanahan melalui pengendalian pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, penyediaan lahan untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa secara efektif, serta penguatan koordinasi perencanaan penggunaan tanah.

Upaya ini dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meminimalkan konflik, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Secara umum, kinerja urusan pertanahan menunjukkan perkembangan yang positif, seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Adapun capaian urusan pertanahan Kabupaten Pemalang selama 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	30	74,82	78,5	78,5	0
2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	30	74,82	78,5	78,5	80
4.	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kab/Kota	%	60	71,51	71,51	91,51	100

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026
BPN Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data tersebut, kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukan mengalami peningkatan signifikan dari 30% pada tahun 2021 menjadi 78,5% pada tahun 2023–2024, meskipun pada tahun 2025 tercatat 0% yang mengindikasikan kemungkinan belum tersedianya data. Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum secara konsisten mencapai 100% setiap tahun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan lahan bagi kepentingan publik. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi juga meningkat hingga mencapai 80% pada tahun 2025, menunjukkan efektivitas pendekatan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, fasilitasi pengadaan tanah dan koordinasi perencanaan penggunaan tanah mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2025, yang menandakan semakin baiknya tata kelola pertanahan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga berperan aktif dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di eks Pabrik Gula Sumberharjo. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan lahan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus memperkuat pemanfaatan aset lahan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan semakin baiknya pengelolaan pertanahan yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pemalang terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pelestarian sumber daya alam. Selain itu, penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan juga dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan secara bijak dan berkelanjutan.

Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk melalui gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penerapan perilaku ramah lingkungan. Seluruh upaya ini sejalan dengan Misi Bupati Pemalang RHAPSODI, khususnya misi Resik, Hijau, Apik (RHA) yang menekankan pada terciptanya lingkungan yang bersih, lestari, dan tertata. Implementasi misi RHA diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, salah satunya melalui gerakan Jumat Bersih yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan dan ruang publik.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengembangkan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui skema Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dilakukan secara kolaboratif dengan wilayah aglomerasi Pekalongan Raya (Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang). Kerja

sama ini bertujuan mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi listrik, sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi. Implementasinya didukung penguatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk pemilahan sampah dan pengembangan bank sampah.

Tabel 2.77.
Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	64,37	62,89	66,15	66,81	72,49
2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,26	84,16	85,49	92,83	75,11
3.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,00	48,33	53,33	48,33	75,14
4.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	48,54	48,54	52,40	50,39	63,08
5.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	80,33	85,38	84,84	85,97	60,82
6.	Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun	%	100	100	100	66,67	100
7.	Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	43,75	82,29	88,54	84,38	84,38
9.	Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	%	16	16	18	18	18
10.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	27	28	28	29	25
11.	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya	unit	NA	21	45	48	34

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	lingkungan hidup						
12.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	buah	17	NA	NA	3	4
13.	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel di atas, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Tahun 2025 sebesar 72,49 (sedang). Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang masih berada dalam kondisi yang cukup terjaga, meskipun tetap membutuhkan upaya peningkatan secara berkelanjutan. Adapun capaian masing-masing komponen: indeks kualitas air sebesar 75,14 (sedang), indeks kualitas udara sebesar 75,11 (sedang) dan indeks kualitas lahan sebesar 63,08 (sedang). Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air dan udara di Kabupaten Pemalang berada pada nilai yang relatif lebih baik, sedangkan kualitas lahan masih menjadi komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depan.

Selain capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam analisis kondisi lingkungan hidup daerah. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menggambarkan kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas pembangunan serta kemampuan lingkungan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks Kabupaten Pemalang, aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu mendapat perhatian khusus terutama pada aspek air dan pangan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kualitas lahan, perubahan iklim, serta keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Pada aspek air, kondisi kualitas air Kabupaten Pemalang Tahun 2025 menunjukkan capaian Indeks Kualitas Air sebesar 75,14 dengan kategori sedang. Meskipun menunjukkan kondisi yang relatif baik, keberlanjutan sumber daya air tetap menghadapi berbagai tantangan seperti potensi pencemaran lingkungan, peningkatan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta ancaman perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dan meningkatkan risiko banjir maupun kekeringan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan melalui

pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

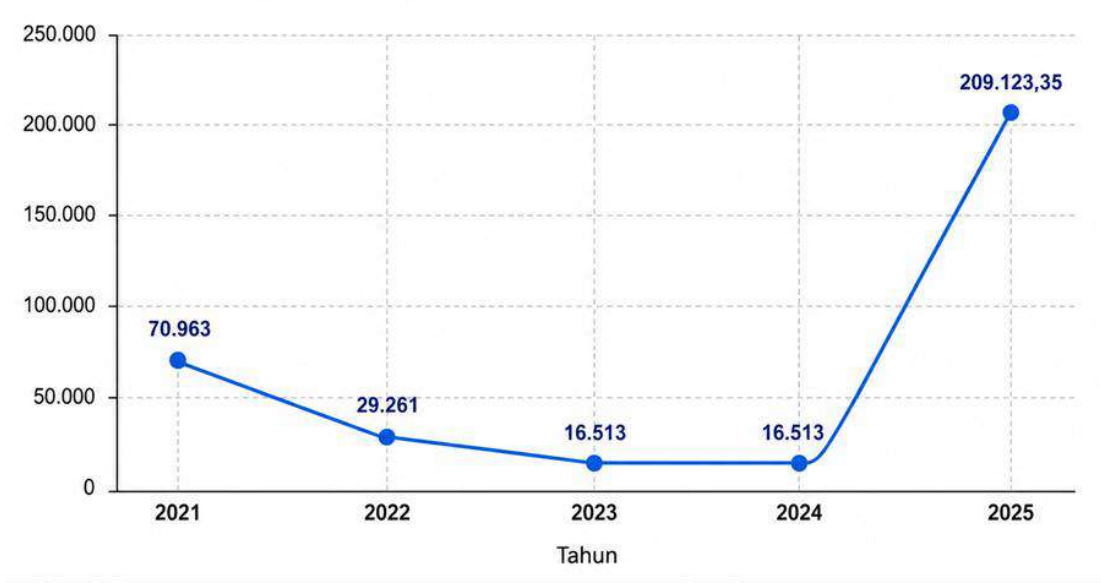
Pada aspek pangan, Kabupaten Pemalang memiliki potensi besar pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Namun demikian, kondisi kualitas lahan yang masih menjadi komponen terendah dalam penyusun IKLH dengan capaian sebesar 63,08 menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan pada sektor pangan masih perlu diperkuat. Perubahan penggunaan lahan, tekanan lingkungan, serta dampak perubahan iklim berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan guna menjaga produktivitas lahan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam rangka mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator komposit kualitas lingkungan daerah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Pemalang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan di Kab. Pemalang. Pada tahun berjalan, masing-masing Kabupaten/Kota menginput data penyusun IKLH mulai dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan pada website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, data tersebut kemudian diverifikasi oleh Ditjen PPKL KLHK. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat data pendukung Indeks Kualitas Lahan yang tidak terverifikasi yakni Data Ruang terbuka Hijau (RTH) dikarenakan tidak dilengkapi dengan peta delineasi dalam bentuk KMS/KML. Hal tersebut yang membuat nilai IKLH hasil perhitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang berbeda dengan data pada ppkl.KLHK.

- a. Perubahan metode perhitungan IKLH dan komponennya masih menjadi diskusi Pemerintah Pusat yakni KLHK dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan sosialisasi awal dari KLHK, terdapat beberapa perubahan pada komponen penyusun IKLH yakni: Indeks Kualitas Udara, terdapat penambahan 1 (satu) parameter pencemar udara yakni PM2.5 atau Particulate Matter 2.5 yang mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan serta konstruksi. Penambahan parameter PM2.5 masih menjadi polemik dikarenakan terbatasnya laboratorium yang dapat melakukan uji parameter PM2.5 dan mahalnya alat pengujian parameter PM2.5. Oleh sebab itu, penambahan parameter PM2.5 ke dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara diberlakukan pada Tahun 2029 dengan menggunakan data parameter PM2.5 dari Kabupaten/Kota terdekat yang memiliki AQMS (Air Quality Monitoring Station).
- b. Indeks Kualitas Air, terdapat faktor pembobot masing-masing parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, T-P dan Fecal Coli) untuk perhitungan Indeks Kualitas Air.
- c. Indeks Kualitas Lahan, terdapat penambahan kelas tutupan lahan menjadi 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan lahan untuk perhitungan Indeks Kualitas Lahan dengan koefisien kelas tutupan yang berbeda pada masing-masing kelas tutupan lahan

Berdasarkan rapat kerja teknis Ditjen PPKL Tahun 2024, nilai konversi terhadap capaian IKLH baru diberlakukan pada Tahun 2025.

Selain peningkatan kualitas lingkungan hidup, Kabupaten Pemalang juga menunjukkan komitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan data pada aplikasi AKSARA (Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim), capaian penurunan emisi GRK dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: DLH Kabupaten Pemalang (AKSARA), 2026

Gambar 2.39.
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Berdasarkan data Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian penurunan emisi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

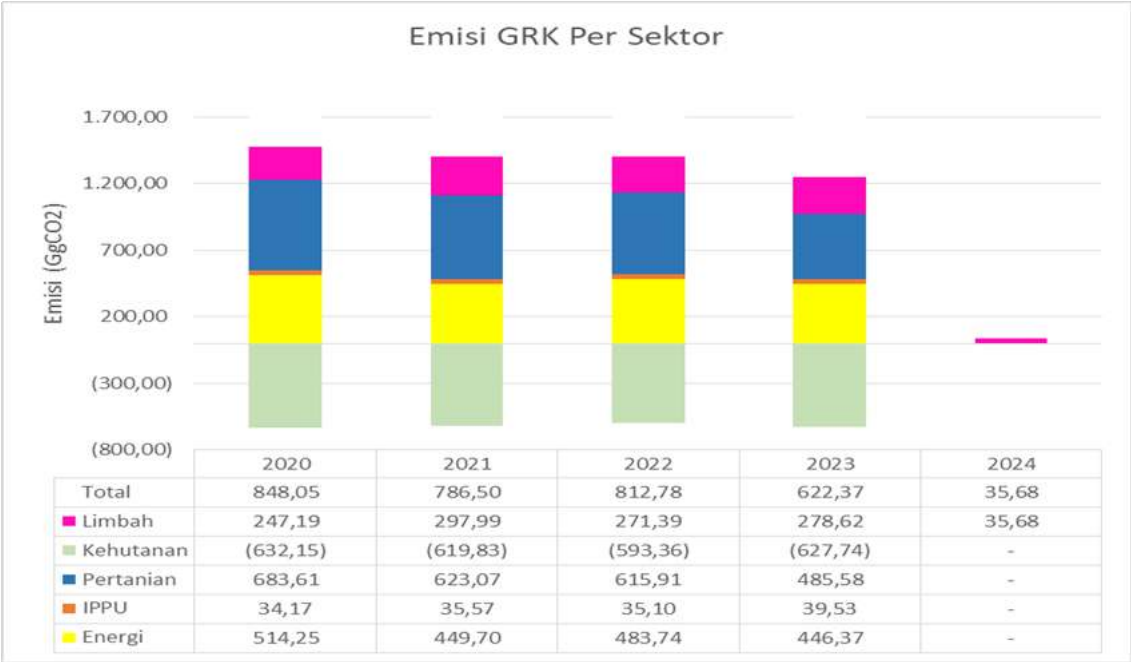
Pada tahun 2021, potensi penurunan emisi GRK tercatat sebesar 70.963 ton CO₂e. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi 29.261 ton CO₂e pada tahun 2022 atau turun sekitar 58,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 hingga mencapai 16.513 ton CO₂e, dan nilainya relatif stagnan pada tahun 2024 dengan capaian yang sama.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dimana potensi penurunan emisi GRK mencapai 209.123,35 ton CO₂e. Capaian tersebut meningkat sekitar 1.166,5 persen dibandingkan tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan kontribusi aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, baik melalui sektor pengelolaan sampah, energi, pertanian, kehutanan, maupun sektor lainnya yang tercatat dalam aplikasi AKSARA.

Secara umum, tren penurunan emisi GRK Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2022–2024, berbagai upaya mitigasi yang dilakukan berhasil meningkatkan potensi penurunan emisi secara signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam

mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun daerah.

Adapun data capaian total pengurangan emisi persektor di Kabupaten Pemalang pada sistem aplikasi *SIGN-SMART* yaitu Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan adalah sebagai berikut:



Sumber: Sign Smart KLHK, 2025

Gambar 2.40.

Emisi dari sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah
Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pemalang adalah sektor persampahan. Pengelolaan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah tidak hanya mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berperan dalam menekan emisi gas rumah kaca dari timbulan sampah.

Pada tahun 2025 timbulan sampah mencapai 174.441,66 ton/tahun, dengan pengurangan sampah sebesar 1.898,00 ton/tahun, penanganan sampah 61.621,95 ton/tahun, sampah terkelola sebesar 63.519,95 ton/tahun, dan sampah tidak terkelola 110.921,71 ton/tahun. Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 1 unit dan kapasitasnya sudah penuh sehingga sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada. Namun berkat berbagai upaya yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Pemalang TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih dapat menerima pembuangan sampah dari berbagai TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada. Akan tetapi perlu segera dilaksanakan upaya penambahan lahan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau pengelolaan sampah yang lain, misalnya dengan mengadakan pelatihan pembuatan pupuk dari sampah organik, pelatihan ecobrick, pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi

berbagai kerajinan tangan, aspal dan sebagainya. Untuk capaian pengelolaan sampah tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Capaian Pengelolaan Sampah per tahun (Ton) Tahun 2021-2025

No	Uraian		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/Tahun)		214.837,00	216.695,00	219.110,00	219.250,00	174.441,66
2.	Jumlah Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)		51.628,34	56.081,45	55.301,27	57.333,00	1.898,00
	2a	Persentase pengurangan sampah	24,03	25,88	25,24	26,15	1.09
	2b	Jumlah pembatasan timbunan sampah	25.659,50	0,00	0,00	0,00	0.00
	2c	Jumlah pemanfaatan kembali sampah	158,40	0,00	0,00	0,00	0.00
	2d	Jumlah pendauran ulang sampah	25.810,44	56.081,45	55.301,27	57.333,00	1.898,00
3.	Jumlah Penanganan Sampah (Ton/Tahun)		120.961,00	128.936,62	130.625,00	131.155,00	61.621,95
	3a	Persentase penanganan sampah	56,30	59,50	59,60	59,82	60,82
	3b	Pengolahan	511,00	8.486,62	1.465,84	507,00	61,621.95
	3c	Pemrosesan akhir	120.450,00	120.450,00	129.115,10	130.648,00	0.00
4.	Sampah Yang Dikelola (Ton/Tahun)		172.589,34	185.018,07	185.882,21	188.488,00	63.519,95
	4a	Persentase sampah terkelola	80,33	85,38	84,84	85,97	36.41
5.	Sampah Tidak Dikelola (Ton/Tahun)		42.248,05	31.676,44	33.227,87	30.762,00	110.921,71

Sumber: SIPSN, 2026

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2021 s/d 2025 bisa dilihat berdasarkan capaian kinerjanya sebagai berikut.

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	89,27	89,09	91,64	93,26	94,73
1.	Nilai SKM	%	80,49	82,50	87,06	92,64	91,32

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,45	99,89	99,95	99,95	99,23
3.	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	37,52	40,24	51,38	60,88	70,44
4.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	99,18	99,18	99,93	99,51	99,53
5.	Persentase Kepemilikan KTP	%	99,45	99,40	99,95	99,95	97,72
6.	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,18	99,18	99,93	99,51	99,539
7.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,23	93,69	98,12	99,69	99,15
8.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	25,64	41,03	56,41	71,79	76,92
12.	Persentase data profil kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	50
13.	Aktivasi IKD	%	NA	NA	NA	NA	6,85

Sumber: Disducatpil Kabupaten Pemalang, 2026

Capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang umumnya positif, baik dari aspek kepemilikan dokumen kependudukan maupun kualitas pelayanan. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (akta, Kartu Keluarga, KTP, dan KIA) meningkat secara konsisten dari 89,27 persen pada tahun 2021 menjadi 94,73 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dari sisi kualitas pelayanan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga mengalami peningkatan signifikan dari 80,49 pada tahun 2021 menjadi 92,64

pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 91,32 pada tahun 2025. Hal ini tetap mencerminkan kualitas pelayanan yang baik.

Untuk indikator spesifik, perekaman KTP elektronik dan kepemilikan KTP relatif stabil pada angka sangat tinggi, yaitu di atas 99 persen sepanjang periode tersebut. Demikian pula cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga yang konsisten berada pada kisaran 99 persen, menunjukkan hampir seluruh penduduk telah terlayani dokumen dasar kependudukan. Pada indikator kepemilikan akta kelahiran, capaian sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 93,69 persen, namun kembali meningkat hingga mencapai 99,15 persen pada tahun 2025. Sementara itu, cakupan penerbitan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian secara konsisten mencapai 100 persen, yang menunjukkan pelayanan pencatatan sipil telah berjalan optimal. Indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 37,52 persen pada tahun 2021 menjadi 70,44 persen pada tahun 2025, meskipun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah (OPD) juga mengalami peningkatan dari 25,64 persen pada tahun 2021 menjadi 76,92 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin optimalnya integrasi data kependudukan dalam perencanaan dan pelayanan publik. Sementara itu, penyusunan data profil kependudukan telah mencapai 100 persen secara konsisten setiap tahunnya.

IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebagai bagian transformasi layanan publik menuju era pemerintah digital (*digital goverment*) merupakan terobosan yang menghadirkan dokumen kependudukan dalam genggam tangan masyarakat melalui telepon pintar diharapkan pelayanan adminduk semakin cepat, mudah efektif dan efisien. Tahun 2025 target aktivasi IKD 30% dari wajib perekaman KTP.

Pencapaian indikator tersebut karena upaya yang dilakukan Disdukcapil berupa: sosialisasi, pelayanan jemput bola, termasuk *home visit* bagi lansia, difabel (masyarakat rentan adminduk), . pelayanan adminduk di desa melalui FAD/FAK, pelayanan inovasi, pelayanan dalam jaringan, kerjasama dengan fasilitas kesehatan (faskes) seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik bersalin ,juga kerjasama dengan PKK dan sekolah-sekolah. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan kapan saja dan dimana saja. Namun demikian masih ada penduduk yang kurang memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga baru mengurus jika ada kepentingan.

Secara keseluruhan, capaian administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya pada kepemilikan dokumen dasar dan pelayanan pencatatan sipil. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada cakupan KIA, pemanfaatan data lintas sektor, pemutakhiran data admindukcapil serta percepatan implementasi identitas kependudukan digital untuk mendukung transformasi layanan berbasis digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,7364	0,7361	0,7555	0,7719	0,7541
2.	Persentase desa mandiri	%	4,265	7,109	7,333	24,53	32,55
3.	Persentase desa berdaya	%	0,95	2,83	4,25	7,08	10,85
4.	Persentase desa tertata	%	1,90	11,79	30,17	23,58	35,28
5.	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	%	37,44	46,45	64,91	63,98	72,04
6.	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	1,42	11,79	18,87	23,58	35,28
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya	%	16,09	23,33	34,07	34,83	41,33

Sumber: Dinpermades Kabupaten Pemalang, 2026

Secara keseluruhan, indikator pembangunan desa di Kabupaten Pemalang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ini dapat dilihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami peningkatan dari 0,7364 pada tahun 2021 menjadi 0,7719 pada tahun 2024, namun sedikit menurun menjadi 0,7541 pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan, capaian ini masih menunjukkan bahwa status desa di Kabupaten Pemalang berada pada kategori berkembang menuju maju. Sejalan dengan itu, persentase desa mandiri menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 4,265 persen pada tahun 2021 menjadi 32,55 persen atau sebanyak 69 desa di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan semakin banyak desa yang telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi.

Suatu desa dinyatakan Desa Berdaya apabila desa tersebut merupakan desa tertata, telah melakukan kerjasama desa dan telah mendapatkan keuntungan yang dimasukkan ke dalam PADesa, telah mendigitalisasikan data pemerintahan desa dan telah melaksanakan pelayanan secara digitalisasi, serta LKD dan LEM desa tersebut merupakan lembaga yang aktif. Capaian Persentase desa berdaya meningkat dari 0,95 persen pada tahun 2021 menjadi 10,85 persen atau sebanyak 23 desa pada tahun 2025 dinyatakan sebagai desa berdaya.

Suatu desa dinyatakan tertata apabila memenuhi minimal salah satu unsur dari: (1) merupakan hasil pemekaran desa, (2) mempunyai batas desa, (3) mempunyai rencana tata ruang wilayah desa, dan (4) mempunyai sarana dan prasarana desa dalam kondisi baik. Persentase desa tertata juga mengalami peningkatan secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 35,28 persen atau sebanyak 75 desa ditahun 2025.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah dengan melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa yang dapat dilakukan berupa : (1) kerjasama antar desa, (2) kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, dan (3) kerjasama dalam kawasan perdesaan. Dari sisi ekonomi desa, persentase desa yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil kerja sama desa meningkat dari 37,44 persen pada tahun 2021 menjadi 72,04 persen atau sebanyak 152 desa pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penguatan kerja sama dan pemanfaatan potensi ekonomi desa. Belum semua kerjasama desa yang dilaksanakan mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga dibutuhkan dukungan dari stakeholders terkait untuk meningkatkan hasil capaian kerjasama desa. Selain itu juga disebabkan masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kerjasama desa, masih banyak desa yang memilih memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada hanya untuk lingkup desanya saja.

Salah satu keberhasilan Desa dalam meningkatkan PADes-nya adalah Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari dimana Desa Nyalembeng mampu mengembangkan usaha wisata di Desa yang dikelola melalui BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Nyalembeng yang berdiri mulai tahun 2017 dengan Sertifikat Badan Hukum AHU-09128.AH.01.33.TAHUN 2022. Unit Usaha BUM Desa Mandiri Sejahtera Desa Nyalembeng antara lain pengembangan Wisata Bukit Tangkeban, dan Persewaan kios. Dalam pengembangan unit usaha wisata sudah banyak melakukan kerjasama baik dengan Bank BRI (Qris dan penggajian pegawai BUM Desa, Branding Cafe nomor meja, agen BRILink), Perusahaan Djarum, Kerjasama dengan Jasa Raharja terkait asuransi pengunjung. Pengembangan usaha wisata yang dibangun mampu meningkatkan PADes Desa Nyalembeng dimana tahun 2025 mencapai Rp 854.774.816,-, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 21 orang pengelola unit wisata desa. Hal ini menjadi motivasi bagi Desa lainnya untuk memajukan Desa menjadi Desa Berdaya maupun Desa Mandiri melalui pengembangan kerjasama di Desa, serta meningkatkan pengelolaan BUMDes.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, desa dinyatakan beradministrasi pemerintahan baik apabila buku administrasi pemerintahan desa-nya terisi lengkap, dokumen-dokumen pemerintahan desa-nya tersusun tepat waktu, layanan pemerintahan desa-nya dilaksanakan secara digital dan data desa tersaji secara digital. Tahun 2025 persentase desa dengan administrasi pemerintahan yang baik meningkat menjadi 35,28 persen atau sebanyak 75 desa. Kendala yang ada yaitu tidak adanya perangkat desa atau personil yang menguasai IT sehingga kesulitan untuk mendigitalisasi data serta melaksanakan pelayanan secara digital. Perlu upaya lebih lanjut dari Dinpermades Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan fasilitasi kepada desa dan meningkatkan kompetensi perangkat desa.

Pembangunan desa akan terlaksana secara optimal apabila didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Di tingkat desa terdapat TP PKK yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa. TP PKK sangat besar peranannya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting; kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan AKB, AKI, AKBa; penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga. Tahun 2025 capaian persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 34,83% menjadi 41,33 persen pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, indikator pembangunan desa di Kabupaten Pemalang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama pada aspek kemandirian desa, penguatan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan desa. Namun demikian, fluktuasi pada nilai IDM menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang konsisten dan terarah untuk menjaga keberlanjutan peningkatan status desa menuju desa maju dan mandiri secara merata.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	55,37	58,34	62,8	62,77	66,90
2.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,31	2,32	2,19	2,18	2,14
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun	39,1	21,2	21,8	17,5	20,30
4.	Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	38,05	37,19	36,55	33,7	21,00
5.	Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,26	69,48	70,11	70,75	71,05
7.	Persentase kelompok masyarakat di bidang	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKA, BKL, BKR, BKB)						
8.	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga ak	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) aktif	%	100	100	100	100	100
10.	persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Data menunjukkan bahwa kinerja pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk periode 2021–2025 secara umum mengalami perbaikan yang konsisten. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meningkat dari 55,37 pada 2021 menjadi 66,90 pada 2025, menunjukkan peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan itu, Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,31 menjadi 2,14, yang mencerminkan pengendalian angka kelahiran yang semakin baik.

Indikator kesehatan reproduksi remaja juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan penurunan Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19) meskipun sempat berfluktuasi, serta penurunan signifikan persentase perkawinan usia di bawah 20 tahun dari 38,05% menjadi 21,00%. Cakupan program pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil, dengan sebagian besar indikator seperti kelembagaan Kampung KB, PIK-R aktif, kelompok ketahanan keluarga, serta pembinaan keluarga sejahtera mencapai 100% setiap tahun. Partisipasi dalam program KB (mCPR) juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 70,26% menjadi 71,05%, meskipun relatif kecil.

Secara keseluruhan, kinerja menunjukkan tren positif dengan penguatan kualitas keluarga, penurunan angka kelahiran dan perkawinan usia dini, serta keberhasilan pelaksanaan program ketahanan keluarga yang sudah merata.

9. Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Pemalang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perhubungan melalui penguatan regulasi, optimalisasi pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong konektivitas wilayah serta menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan. Gambaran kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Konektivitas	Indeks	77,86	87,3	87,3	71,42	73,64
2.	Indeks Layanan Perhubungan	Indeks	78,4	78,7	77,71	81,97	82,17
3.	VC Rasio		0,34	0,34	0,36	0,38	0,37
4.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	63	65,38	66,33	66,34	69,76
5.	Rasio Ijin Trayek	Rasio	1	1	1	1	0,87
6.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	37,5	50,46	59,15	65,36	69,49
7.	Persentase Prasarana Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Prasarana Jalan Yang dibutuhkan	%	73%	76%	80%	76%	76%
8.	Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR	%	71,86	73,6	73,2	76,4	100

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan difokuskan untuk menurunkan angka kinerja lalu lintas kabupaten (V/C ratio) dan meningkatkan rasio konektivitas wilayah. Pada tahun 2025, capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 0,37, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,38. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi lalu lintas yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kepadatan arus kendaraan di wilayah Kabupaten Pemalang. Rasio Ijin Trayek mengalami penurunan menjadi 0,87 pada tahun 2025, hal tersebut dikarenakan tidak adanya penambahan armada pada trayek-trayek yang tersedia, disamping itu untuk trayek yang ada armadanya mengalami penurunan jumlah armada karena tidak adanya peremajaan. Namun demikian, rasio konektivitas meningkat dari 71,42% pada tahun 2024 menjadi 73,64% pada tahun 2025, yang menandakan semakin baiknya keterhubungan antar wilayah. Secara umum, seluruh wilayah di Kabupaten Pemalang telah terlayani oleh sarana dan prasarana perhubungan.

Peningkatan kinerja tersebut juga didukung oleh upaya inovatif melalui inisiasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama ini berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, terutama dalam aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan adanya penerangan jalan yang memadai, mobilitas masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman.

Dalam rangka peningkatan pelayanan penerangan jalan umum di Pemalang, terdapat usulan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan skema pemrakarsa badan usaha (unsolicited) yang diajukan oleh Konsorsium Mitra Nusantara Terang melalui penyampaian Letter of Intent (LoI) sebagai bentuk komitmen awal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan pendalaman dan evaluasi awal terhadap usulan proyek dimaksud, termasuk melalui klarifikasi teknis, pengecekan lapangan, serta koordinasi dengan Tim Sekretariat Bersama (Sekber) KPBU guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi, proses KPBU APJ Kabupaten Pemalang saat ini telah memasuki tahap penerbitan Surat Izin Lanjut (Letter to Proceed/LTP) kepada calon pemrakarsa sebagai dasar untuk melanjutkan penyusunan dokumen Feasibility Study (FS) beserta dokumen pendukung lainnya. Dalam proses penyusunan FS tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama Konsorsium Mitra Nusantara Terang terus melakukan koordinasi, survei lapangan, serta perpadupadanan data kondisi eksisting APJ pada ruas prioritas.

Selain itu, saat ini juga tengah dilakukan pembahasan skema Availability Payment (AP) sebagai bagian dari penyusunan struktur pembiayaan proyek. Penentuan nilai AP dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan layanan penerangan jalan, serta keberlanjutan pelaksanaan proyek dalam jangka panjang sesuai ketentuan KPBU yang berlaku.

Melalui skema KPBU APJ ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan secara lebih merata, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.83.
Data V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten

No	Nama Jalan	Tipe	Fungsi Jalan	Status Jalan	Kapasitas Jalan (C)	Volume Ruas	V/C Ratio
1	Jl. Raya Pantura(A)	4/2 D	Arteri	Nasional	3157,44	1780	0,58
2	Jl. Raya Pantura(B)	4/2 D	Arteri	Nasional	3157,44	1790	0,57
3	Jl. Raya Petarukan(A)	4/2 D	Arteri	Nasional	3500,64	1950	0,61
4	Jl. Raya Petarukan(B)	4/2 D	Arteri	Nasional	3432	1987	0,63
5	Jl. Raya Ulujami(A)	4/2 D	Arteri	Nasional	3635,28	1989	0,62
6	Jl. Raya Ulujami(B)	4/2 D	Arteri	Nasional	3366	1899	0,62
7	Jl.Raya Karangsari-Guci	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2321,16	675	0,29
8	Jl. Raya Moga-Guci	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2668	885	0,33
9	Jl. Raya Moga	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2378	833	0,35
10	Jl. Raya Moga-	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2668	935	0,35

No	Nama Jalan	Tipe	Fungsi Jalan	Status Jalan	Kapasitas Jalan (C)	Volume Ruas	V/C Ratio
	Pulosari						
11	Jl.Guci-Randudongkal	2/2ud	Kolektor	Provinsi	1494,08	435	0,29
12	Jl. Raya Mejagong	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2270,7	682	0,30
13	Jl.Pancasila	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2668	557	0,21
14	Jl. Raya Randudongkal	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2245,47	741	0,33
15	Jl. Pemalang-Purbalingga	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2581	904	0,35
16	Jl.Randudongkal-Pemalang	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2726	928	0,34
17	Jl.Raya Pegirangan	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2726	954	0,35
18	Jl.Raya Bantarbolang	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2726	1012	0,37
19	Jl.Pemalang-Bantarbolang	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2726	1004	0,37
20	Jl.Warungpring	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2068,86	643	0,31
21	Jl.Randudongkal-Belik	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2581	903	0,35
22	Jl.Karang Suru	2/2ud	Kokektor	Provinsi	2668	907	0,34
23	Jl.Kesesi Rejo	2/2ud	Kolektor	Provinsi	2068,86	745	0,36
24	Jl. Jendral Sudirman	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2668	1190	0,45
25	Jl.Kh.Ahmad Dahlan	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3041,52	427	0,14
26	Jl.Hoscokro Aminoto Pemalang	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3041,52	477	0,16
27	Jl.Ahmad Yani	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3140,7	1225	0,39
28	Jl.Kolonel Sugiyono	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3329,49	1202	0,36
29	Jl.Urip Sumoharjo	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3341,96	1036	0,31
30	Jl.Penusupan	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2321,16	743	0,32
31	Jl.Gembyang	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2245,47	741	0,33
32	Jl. Mochtar Alun Alun	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3067,62	1015	0,33
33	Jl.Dr.Wahidin	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2068,86	724	0,35
34	Jl.Re. Martadinata	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2710,92	1220	0,45
35	Jl.Laksda Yos Sudarso	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2581	724	0,28
36	Jl.Cipto Mangunkusumo	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	3186,52	1083	0,34
37	Jl.Pemuda	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	2972,5	1070	0,36
38	Jl.Raya Pendowo Bodeh	2/2ud	Kolektor	Kabupaten	1445,36	608	0,42
TOTAL V/C RATIO KAB PEMALANG							0.37

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jalan yang mempunyai kepadatan tinggi dan berpotensi menjadi lokasi kemacetan adalah Jalan Raya Petarukan B. Agar kemacetan yang terjadi tidak membawa dampak negatif, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya preventif, misalnya dengan menetapkan jalur alternatif sehingga tidak semua kendaraan melewati jalur rawan macet tersebut.

Selain kondisi kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan transportasi juga dipengaruhi oleh keberadaan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan. Perlintasan sebidang memiliki tingkat risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan perlintasan tidak sebidang karena adanya persinggungan langsung antara kendaraan dan perjalanan kereta api. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengamanan, penyediaan rambu, serta pengembangan perlintasan tidak sebidang pada titik-titik prioritas. Berikut data perlintasan sebidang dan tidak sebidang wilayah Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.84.
Perlintasan Sebidang Wilayah Kabupaten Pemalang

Antar a	Teregister	Penjagaan	Status Jalan	Lokasi				
				Nama Jalan	Desa	Kecamatan	Kota/ Kab	Titik Koordinat
Sri - Co	teregister	Tidak Dijaga	Kabupaten /Kota	Desa Tumbal	Comal	Comal	Pemalang	6°55'19"S 109°33'33" E
Sri - Co	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Sukorejo Tumbal	Tumbal	Comal	Pemalang	6°55'15"S 109°33'20" E
Sri - Co	teregister	Dijaga Swadaya	Kabupaten /Kota	JL. Dusun IV, Purwosari	Purwosari	Comal	Pemalang	6°54'47"S 109°32'43" E
Sri - Co	teregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL.Raya Comal	Purwoharjo	Comal	Pemalang	6°54'35"S 109°32'21" E
Co - Pta	teregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL. Raya Ahmad Yani	Purwoharjo	Comal	Pemalang	6°54'31"S 109°32'00" E
Co - Pta	teregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL. Raya Ujunggede	Ujunggede	Ampelgading	Pemalang	6°54'27"S 109°31'26" E
Co - Pta	teregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL.Comal Baru	Ujunggede	Ampelgading	Pemalang	6°54'22"S 109°30'47" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Alternatif Comal- Petarukan	Cibiyuk	Ampelgading	Pemalang	6°54'14"S 109°29'47" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Raya Desa Widodaren	Widodaren	Petarukan	Pemalang	6°54'13"S 109°29'27" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Raya Desa Sirangkang	Sirangkang	Petarukan	Pemalang	6°54'08"S 109°28'51" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Swadaya	Kabupaten /Kota	JL.Dusun Rowopanggang	Iser	Petarukan	Pemalang	6°54'06"S 109°28'27" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Raya Petanjungan	Iser	Petarukan	Pemalang	6°54'01"S 109°27'54" E
Co - Pta	teregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Raya Desa Serang	Serang	Petarukan	Pemalang	6°53'53"S 109°27'07" E

Antar a	Teregister	Penjagaan	Status Jalan	Lokasi				
				Nama Jalan	Desa	Kecamatan	Kota/ Kab	Titik Koordinat
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Swadaya	Kabupaten /Kota	JL. Gotong Royong	Pedurunga n	Taman	Pemalang	6°53'41"S 109°26'03" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL. Perintis Kemerdekaan	Beji	Taman	Pemalang	6°53'38"S 109°25'48" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Swadaya	Kabupaten /Kota	JL. Pancabakti	Beji	Taman	Pemalang	6°53'32"S 109°25'07" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Seroja	Beji	Taman	Pemalang	6°53'26"S 109°24'36" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Swadaya	Kabupaten /Kota	JL. Asparagus	Wanarejan Utara	Taman	Pemalang	6°53'22"S 109°24'09" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Manggar	Wanarejan Utara	Taman	Pemalang	6°53'21"S 109°24'02" E
Pta - Pml	tereregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. Slamet Riyadi	Mulyoharjo	Pemalang	Pemalang	6°53'17"S 109°23'33" E
Pml - Sd	tereregister	Dijaga PT KAI	Kabupaten /Kota	JL. RE. Martadinata	Pelutan	Pemalang	Pemalang	6°53'10"S 109°22'49" E
Pml - Sd	tereregister	Dijaga PT KAI	Provinsi	JL. Urip Sumoharjo	Pelutan	Pemalang	Pemalang	6°53'10"S 109°22'45" E
Pml - Sd	tereregister	Dijaga Dishub	Kabupaten /Kota	JL. KH. Ahmad Dahlan	Lawangrejo	Pemalang	Pemalang	6°53'06"S 109°22'01" E

Tabel 2.85.
Perlindungan Tidak Sebidang Wilayah Kabupaten Pemalang

NO	DAOP	Nomor JPL	KM-HM	Lintas	Antara	Teregister	Penjagaan	Status Jalan	Lokasi				
									Nama Jalan	Desa	Kecamatan	Kota/Kab	Titik Koordinat
1	4	Underpass	104+089	Sm - Cn	Co - Pta	-	-	-	Gg. Irawan	Ujunggede	Ampelgading	Pemalang	-6.90801620213366, 109.52917997934148
2	4	Overpass	114+375	Sm - Cn	Pta - Pml	-	-	-	Jl. Tol Pejagan - Pemalang	Serang	Petarukan	Pemalang	-6.895598431203817, 109.43918230066065
3	4	Underpass	117+030	Sm - Cn	Pta - Pml	-	-	-	Jl. Wora Wari Raya	Beji	Taman	Pemalang	-6.891612641456002, 109.41531160732059

Keberadaan Perlindungan Sebidang dan Tidak Sebidang Kabupaten Pemalang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keselamatan transportasi dan kelancaran lalu lintas. Perlindungan sebidang yang masih berpotensi menimbulkan konflik antara perjalanan kereta api dan kendaraan bermotor memerlukan perhatian khusus, terutama pada titik-titik dengan volume lalu lintas tinggi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi tingkat risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pemalang.

Di tahun 2025 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 765 kasus, meningkat dari tahun 2024 sebanyak 712 kasus. Beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia, kondisi jalan rusak, kondisi kendaraan tidak baik, minimnya sarana perlengkapan jalan, faktor alam dan lingkungan. Berikut rincian data kecelakaan lalu lintas tahun 2025:

Tabel 2.86.
Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas dan kerugiannya tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIAL (Rp)	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	69	9	1	70	76.300.000	
2	PEBRUARI	50	10	1	56	82.300.000	
3	MARET	64	19	0	63	91.900.000	
4	APRIL	71	23	0	74	138.100.000	
5	MEI	61	13	1	66	87.600.000	
6	JUNI	54	13	4	58	67.400.000	
7	JULI	53	9	0	56	100.300.000	
8	AGUSTUS	71	9	1	83	63.400.000	
9	SEPTEMBER	74	10	1	81	116.900.000	
10	OKTOBER	76	19	1	80	47.100.000	
11	NOVEMBER	45	10	0	45	24.300.000	
12	DESEMBER	77	10	0	82	49.600.000	
	TOTAL	765	154	10	814	945.200.000	

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Sesuai SK Bupati Nomor 188.4/108/Tahun 2021 tentang Penetapan tipe dan lokasi terminal penumpang di Kabupaten Pemalang, terdapat 8 terminal penumpang tipe C yaitu terminal Randudongkal, terminal Belik, terminal Moga, terminal Angkutan Kota, terminal Petarukan, terminal Warungpring, terminal Grosir Comal dan terminal Pasar Comal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas terminal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Kondisi fasilitas utama pada terminal tipe C di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87.
Kondisi Fasilitas Utama Pada Terminal Tipe C

No	Fasilitas	Terminal							
		Randudongkal Baru	Randudongkal Lama	Moga	Belik	Angkot Pemalang	Petarukan	Grosir Comal	Comal
Keselamatan									
1	Lajur Pejalan Kaki	✓							

No	Fasilitas	Terminal							
		Randudongkal Baru	Randudongkal Lama	Moga	Belik	Angkot Pemalang	Petarukan	Grosir Comal	Comal
2	Rambu	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	Penerangan Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pagar	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
5	Marka								
6	Titik Kumpul	✓		✓	✓	✓			
7	Jalur Evakuasi	✓			✓				
8	Alat Pemadam Kebakaran	✓		✓	✓	✓		✓	✓
9	Pos Kesehatan	✓			✓				
10	Petugas Kesehatan	✓			✓				
11	Pos pemeriksa kelaikan kendaraan umum	✓			✓				
12	Petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	✓			✓				
Keamanan									
13	Pos Kemanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Petugas Keamanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kehandalan/ Keteraturan									
15	Pusat Informasi Pelayanan	✓			✓				
16	Kantor Terminal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Petugas Operasional Terminal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kenyamanan									
18	Ruang Tunggu	✓			✓	✓	✓		✓
19	Toilet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Fasilitas Peribadatan	✓		✓	✓			✓	
21	RTH	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
22	Rumah Makan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Gerobak Sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Tong Sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Tempat Cuci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Fasilitas	Terminal							
		Randudongkal Baru	Randudongkal Lama	Moga	Belik	Angkot Pemalang	Petarukan	Grosir Comal	Comal
	Tangan								
26	Petugas Kebersihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	✓			✓		✓	✓	✓
28	Area Tanpa Rokok	✓			✓		✓		✓
29	Drainase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Agen	✓		✓	✓	✓		✓	
Kemudahan/ Keterjangkauan									
31	Jalur Pemberangkatan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Jalur Kedatangan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Tempat naik/turun penumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Tempat Parkir kendaraan umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:

✓ Ada

X Tidak ada

Data kondisi terminal tersebut menunjukkan bahwa secara umum 9 terminal telah memiliki fasilitas utama dengan kondisi layak. Namun kondisi “layak” tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Kondisi kelengkapan terminal tipe C yang lengkap hanya terdapat pada Terminal Randudongkal Baru. Sehingga masih diperlukan upaya yang optimal guna melengkapi fasilitas terminal yang lainnya utamanya Terminal Randudongkal lama dan Comal. Salah satu alasan belum diprioritaskan pemenuhan fasilitas kelengkapan terminal tipe C dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe C oleh masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pemenuhan fasilitas utama dan penunjang terminal.

10. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan informasi publik menjadi fokus urusan komunikasi dan informatika untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan. Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan program unggulan Bupati Pemalang “Wifi Gratis Tiap Desa” yang bertujuan memperluas akses internet bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Program tersebut tidak

hanya meningkatkan konektivitas dan pemerataan akses informasi, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur jaringan yang semakin merata, kinerja urusan komunikasi dan informatika diharapkan semakin optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks	70	74	80	94	80
2.	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%	5,00	15	28	28	81
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	41,18	75	80	100	83
4.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah ah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	51,30	79	80	81	81
5.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	50	50	100	100	100
6.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	40	70	91	92	92
7.	Persentase <i>Network</i> terintegrasi	%	70,73	72	73	88	88
8.	Persentase Organisasi Perangkat	%	70,73	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
9.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	Na	Na	72,70	75,01	NA

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasar tabel di atas, terlihat capaian indikator urusan komunikasi dan informatika. Pada Tahun 2025, proporsi penduduk yang mengakses informasi publik meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 28% menjadi 81%. kemudian terdapat 2 indikator yang mengalami penurunan tingkat capaian dari tahun sebelumnya yaitu indikator persentase ketersediaan informasi publik dengan capaian 80 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 14, kemudian indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang pada tahun 2025 capaiannya hanya sebesar 83% dan turun sebanyak 17% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, sebanyak 5 indikator berhasil mempertahankan capaian kinerjanya seperti indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, indikator informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah, indikator persentase Network terintegrasi, dan indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menerapkan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	0,93	0,28	-0,04	0,2	-9,67
2.	Rasio kewirausahaan daerah	%	2,43	2,41	2,13	2,41	2,29
3.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk	%	6,37	6,31	9,23	12,22	6,56

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota						
4.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	33,61	42,02	43,7	47,95	38,57
5.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	4,78	4,73	8,76	21,29	36,82
6.	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	32,21	13,84	-4	228,29	1,19
7.	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	%	NA	NA	NA	NA	4,36
8.	Persentase pertumbuhan UMKM	%	7,75	12,38	270,62	69,49	54,4

Sumber: Diskumdag Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan capaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup beragam. Pertumbuhan volume usaha koperasi mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,93%, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,28%, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar -0,04%. Pada tahun 2024 pertumbuhan kembali positif sebesar 0,2%, namun pada tahun 2025 tercatat menurun cukup signifikan menjadi -9,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan usaha. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang paling ideal, harus terus didorong menuju koperasi yang mandiri dan memiliki daya saing usaha, diantaranya melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis kewirausahaan dan teknologi serta inovasi. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi yang ada sehingga koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Urusan Koperasi dan UKM mengampu dua IUP yaitu Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan Rasio kewirausahaan daerah. Rasio kewirausahaan

daerah menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada kisaran 2,13%–2,43% selama periode 2021–2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa jumlah wirausaha di daerah cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga masih diperlukan upaya penguatan kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan inovasi usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.

Dari sisi pengawasan dan pembinaan koperasi, persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi menunjukkan tren yang meningkat hingga tahun 2024, yaitu dari 6,37% pada tahun 2021 menjadi 12,22% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 tercatat menurun menjadi 6,56%. Sementara itu, persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya menunjukkan peningkatan dari 33,61% pada tahun 2021 menjadi 38,57% pada tahun 2025, kemudian menurun menjadi 38,57% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan tata kelola dan kesehatan koperasi telah dilakukan, meskipun masih perlu terus diperkuat.

Indikator pemberdayaan usaha mikro menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan meningkat secara signifikan dari 0% pada tahun 2020 menjadi 36,82% pada tahun 2025. Selain itu, persentase usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan mulai tercatat pada tahun 2025 sebesar 4,36%, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro.

Di sisi lain, persentase koperasi yang berkualitas menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi selama periode tersebut, dengan capaian -33,99% pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 32,21% dan 13,84%, kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar -4%, meningkat tajam pada tahun 2024 sebesar 228,29%, dan kembali stabil pada tahun 2025 sebesar 1,19%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam proses pembinaan, penilaian, serta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menunjukkan adanya upaya peningkatan melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan pelaku usaha. Perlu dilakukannya pendataan pelaku UMKM untuk membantu efektivitas intervensi, baik melalui fasilitasi, pendampingan, pelatihan keterampilan maupun pemberian bantuan (teknis maupun permodalan) serta pemetaan kondisi UMKM (termasuk stratifikasi UMKM) di Kabupaten Pemalang. Harapannya koperasi dan usaha mikro dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

12. Penanaman Modal Daerah

Perkembangan penanaman modal daerah selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	3,13	4,64	9,73	11,67	14,67
2.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar/ tahun	171.698.900. 267	179.666.691. 621	197.152.213. 713	220.159.341. 867	252.451.320 .096
3.	Realisasi total terhadap target investasi	%	102,11	102,59	106,54	107,37	102,38
4.	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	0	0	0	83,33	100
7.	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	%	0	100	100	100	100

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan Tabel 2.88 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, secara umum kinerja penanaman modal menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai investasi, tercapainya target investasi setiap tahun, serta semakin baiknya pelayanan perizinan dan penyelesaian permasalahan investasi.

Persentase peningkatan investasi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten selama periode 2021–2025. Setelah tumbuh sebesar 3,13% pada tahun 2021, persentase peningkatan investasi terus meningkat menjadi 4,64% pada tahun 2022, 9,73% pada tahun 2023, 11,67% pada tahun 2024, dan mencapai 14,67% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan semakin membaiknya iklim investasi daerah, meningkatnya minat investor untuk berinvestasi, serta efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi.

Selanjutnya pada nilai realisasi penanaman modal juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi investasi meningkat

dari sekitar Rp171,70 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp179,67 miliar pada tahun 2022, Rp197,15 miliar pada tahun 2023, Rp220,16 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp252,45 miliar pada tahun 2025. Secara kumulatif, nilai investasi meningkat sekitar 47% selama lima tahun, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas usaha dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kabupaten Pemalang. Sektor unggulan penunjang realisasi investasi di Kabupaten Pemalang tahun 2025 antara lain:

- a. Sektor industri pakaian jadi
 - PT. PHOENIX ASIA PEMALANG dengan nilai investasi Rp.40.795.694.000
 - PT. SHINSUNG GRAND INDONESIA dengan nilai investasi Rp. 40.795.694.000
 - PT. SHINSUNG GRAND INDONESIA dengan nilai investasi Rp. 43.427.223.734
- b. Sektor industri
 - PT. GOLDEN VICTORY MANUFACTURES dengan nilai investasi Rp.30.000.000.000
- c. Industri peralatan listrik
 - PT. SELIM ELEKTRO dengan nilai realisasi investasi Rp. 22.000.000.000

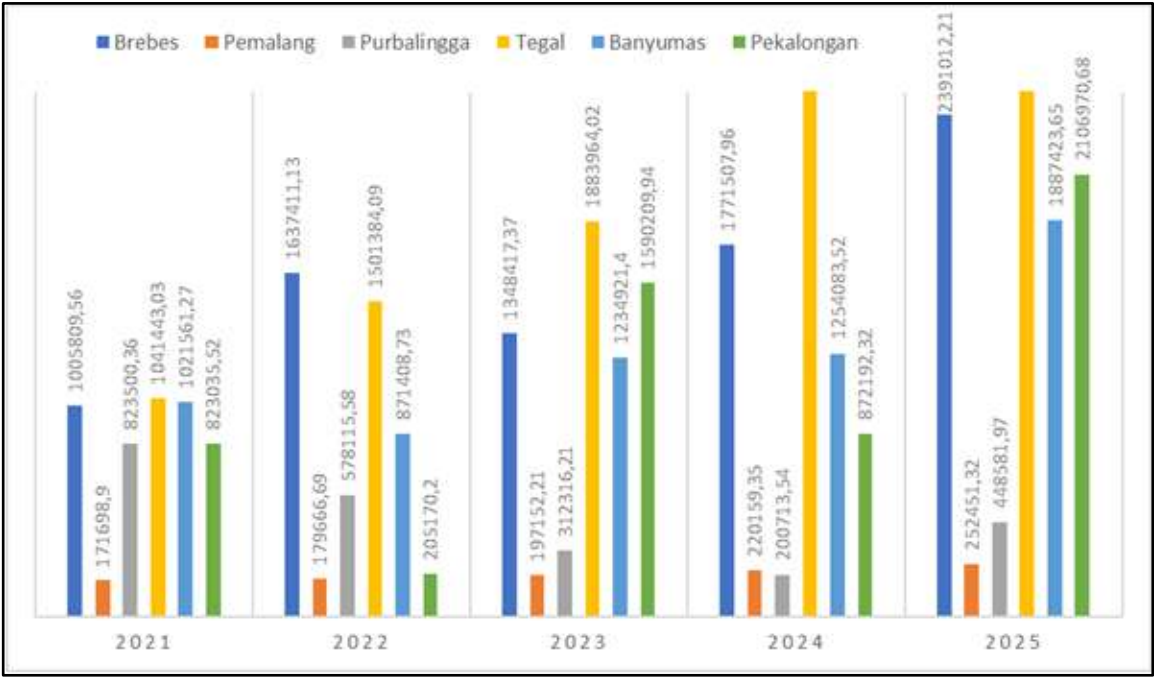
Demikian pula halnya pada kinerja pencapaian target investasi selama periode 2021–2025 tergolong sangat baik karena selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi investasi mencapai 102,11% pada tahun 2021, 102,59% pada tahun 2022, 106,54% pada tahun 2023, 107,37% pada tahun 2024, dan 102,38% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa target investasi daerah telah tercapai bahkan terlampaui setiap tahun, mencerminkan perencanaan yang realistis serta keberhasilan strategi promosi dan fasilitasi investasi.

Selain itu, realisasi investasi di Kabupaten Pemalang menunjukkan korelasi yang cukup tinggi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka, terutama karena karakteristik investasi yang masuk didominasi oleh sektor-sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, investasi baru pada tahun 2024 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14.560 orang, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 7.923 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja masyarakat yang secara strategis mendukung pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada indikator persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional menunjukkan capaian 100% pada seluruh periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan promosi investasi yang direncanakan dapat dilaksanakan secara penuh sesuai target, sehingga mendukung peningkatan daya tarik investasi daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan berbagai upaya untuk menarik investor, antara lain dengan melakukan promosi (*roadshow*)

dan keikutsertaan dalam event-event pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor dan mempermudah perizinan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan dan dukungan kondusifitas sosial kemasyarakatan.

Gambaran posisi daya saing investasi kabupaten pemalang secara regional, dapat ditunjukkan dengan grafik berikut.



Gambar 2.41.
Grafik Tren Pertumbuhan Investasi Kabupaten Pemalang Dibandingkan Daerah Sekitar Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik, realisasi investasi Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2025 dan mencerminkan daya saing investasi daerah yang semakin menguat di tingkat regional, meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten sekitar. Dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, dan Pekalongan, nilai investasi Kabupaten Pemalang memang masih relatif lebih rendah, namun menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki daya tarik investasi yang terus berkembang, didukung oleh potensi sektor unggulan, kemudahan perizinan, serta pengembangan iklim investasi daerah. Di sisi lain, tingginya capaian investasi pada beberapa daerah pembanding menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan daya saing investasi melalui penguatan promosi potensi daerah, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, penyediaan tenaga kerja yang kompeten, serta penguatan kepastian berusaha.

Dalam hal pelayanan perizinan, persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan juga konsisten mencapai 100%. Selain itu, persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha menunjukkan perbaikan signifikan, dari 0% pada periode awal

menjadi 83,33% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin responsifnya layanan fasilitasi dan pendampingan investasi.

Sementara itu, ketersediaan profil investasi sektor unggulan daerah sebagian besar telah terpenuhi dengan capaian 100%, meskipun sempat mengalami kekosongan pada tahun 2021. Secara umum, penyediaan informasi investasi yang lengkap dan terbaru menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan calon investor.

Untuk memudahkan investor ataupun masyarakat dalam pengurusan perijinan, DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga mengembangkan inovasi sebagai berikut:

a. SAMBATSUNG (www.izinonline.pemalangkab.go.id) tahun 2020

Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Teknologi langSUNG (SAMBATSUNG) merupakan inovasi penanganan pengaduan secara online berbasis website. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait permasalahan perizinan. Penyampaian pengaduan cukup dilakukan dengan mengakses Aplikasi SAMBATSUNG tanpa harus datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sehingga lebih efektif dan efisien karena disamping menghemat waktu dan biaya penanganannya juga menjadi lebih cepat.

b. SIJEMPOL (Sistem Jemput Perizinan Online) tahun 2022

Sistem Jemput Perizinan Online (SIJEMPOL) merupakan inovasi untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan menggunakan mobil pelayanan yang sudah dimodifikasi dan di branding sedemikian rupa agar lebih menarik yang dilaksanakan di lokasi – lokasi strategis, seperti di Kecamatan, Balai Desa dan pusat-pusat keramaian (PAMERAN, CAR FREE DAY) dan lain – lain.

Dampaknya dengan meningkatkan nilai SKM/IKM dari 87,97 pada tahun 2022 menjadi 88,95 pada tahun 2023.

c. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu)

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMDU) merupakan aplikasi perizinan Non berusaha secara Online yang menjadi alat bantu dalam pemrosesan perizinan yang meliputi proses pendaftaran, pendataan, entry data, verifikasi, penetapan dan cetak secara terintegrasi. Aplikasi ini dikelola untuk melayani pemakaian aset (Stadion Sirandu, Lapangan Mulyoharjo, Alun-alun), izin reklame, dan izin LKS/Panti, yang seringkali mencakup pemeliharaan database.

d. Website Gerai Investasi

Gerai Investasi adalah sebuah website yang berisikan peluang investasi yang bisa dilakukan, termasuk permohonan pengajuan perizinan, potensi daerah di berbagai bidang seperti pertanian, pariwisata, dan industri yang dilengkapi dengan analisis ekonominya. Harapannya dengan meningkatnya

investasi, maka meningkat pula pertumbuhan ekonomi yang menunjang dalam pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Pemalang.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan untuk menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada dalam satu tempat dan tersistem. Saat ini terdapat 16 instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam Mal Pelayanan Publik.

Dengan adanya berbagai inovasi yang dikembangkan, jumlah pengaduan pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 62,5%. Jumlah pengaduan pada tahun 2024 sebanyak 8 pengaduan sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 3 pengaduan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Prestasi Pemuda	%	0,009	0,037	0,021	0,020	0,015
2.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0	53,34	52,75	52,62	3,99
3.	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralympic.)	Medali	9	48	48	59	48
4.	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	25,71	37,14	68,57	64,05	78,26
6.	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	atlet	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikpora Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang beragam. Pada aspek prestasi pemuda, terlihat fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 0,009 pada tahun 2021 menjadi 0,015 pada tahun 2025, setelah sempat

meningkat pada 2022. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi 3,99% setelah sebelumnya berada di atas 50% pada periode 2022–2024, Hal ini terjadi karena ada metode penghitungan yang berbeda di tahun 2025, dengan mengeluarkan anak usia SD dan SMP pada penghitungan indikator tersebut. Sementara itu, prestasi olahraga menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian medali yang sempat meningkat pada 2024 menjadi 59 medali, meskipun kembali turun menjadi 48 medali pada 2025.

Di sisi lain, indikator pembinaan dan kelembagaan kepemudaan menunjukkan capaian yang sangat baik, ditandai dengan persentase organisasi pemuda aktif serta pembinaan pramuka tingkat kabupaten yang konsisten mencapai 100% setiap tahun. Cakupan pembinaan olahraga juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 25,71% pada 2021 menjadi 78,26% pada 2025, meskipun sempat menurun pada 2024.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun pembinaan kelembagaan sudah berjalan, masih terdapat tantangan pada peningkatan partisipasi aktif pemuda dan konsistensi prestasi, sehingga diperlukan penguatan program kepemudaan yang lebih inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

14. Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pemalang (*Single Data System* dan *Open Data*) belum terlaksana secara optimal disebabkan belum adanya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan belum lengkapnya data sektoral yang tersedia. Kebijakan Satu Data Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Jaringan Informasi Geospasial (Kebijakan Satu Peta) mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi maupun pengelolaan satu data. Regulasi pemanfaatan satu data di level kabupaten sudah ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan kinerja urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						
3.	Indeks SDI	Angka	-	-	73,36	86,28	NA

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang dapat akurat dan tepat sasaran. Pada tahun 2025, Sekretariat SDI Tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI tahun 2024 di Kabupaten Pemalang dengan nilai Indeks SDI Kabupaten Pemalang sebesar 86,28 (Kategori Baik). Dengan rincian Nilai Domain Kebijakan dan Kelembagaan 89,38; Domain penyelenggaraan SDI sebesar 85,93; dan Domain Data Leadership 84,52.

15. Persandian

Capaian urusan persandian di Kabupaten Pemalang menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung keamanan informasi pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase konten informasi yang telah diamankan, yang menandakan bahwa berbagai dokumen, data, dan komunikasi strategis pemerintah telah melalui proses pengamanan sesuai standar persandian. Selain itu, tingkat keamanan informasi pemerintah juga menunjukkan kondisi yang semakin baik, seiring dengan penerapan sistem keamanan informasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian. Gambaran capaian urusan persandian Kabupaten Pemalang 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%	41	40	96,3	100	100
2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	20	40	32,5	34	35

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Urusan persandian dapat dilihat dari indikator persentase konten informasi yang telah diamankan dan tingkat keamanan informasi pemerintah. Persentase konten informasi yang telah diamankan di Tahun 2025 telah mencapai sebesar 100% sama dengan capaian di tahun 2024. Selanjutnya, tingkat keamanan

informasi pemerintah pada tahun 2025 sebesar 35% meningkat dari tahun 2024 sebesar 34%.

Upaya peningkatan persentase konten informasi yang diamankan dan tingkat keamanan informasi pemerintah dilakukan melalui penguatan tata kelola dan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta penerapan teknologi pengamanan seperti enkripsi dan sistem keamanan jaringan. Selain itu, dilakukan juga monitoring dan audit secara berkala, penguatan koordinasi antar OPD, peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya keamanan informasi, serta penyediaan sistem backup data untuk menjamin keandalan dan keberlanjutan layanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan

Berikut disajikan gambaran perkembangan urusan kebudayaan di Kabupaten Pemalang selama Tahun 2021-2025.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	84.856	177.321	84.069	85.762	85.964
2.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	6,14	12,11	15,35	17,59	21,14
3.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	8,95	11,94	16,42	19,4	25,45
4.	Persentase kesenian tradisional yang dibina	%	Na	36	48	53	40
5.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	Na	31	35	38	27
6.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	Na	Na	0,03	0,07	0,04
7.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	Na	31	35	38	26
8.	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100	100	100	50

Sumber: Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup positif terutama dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, yaitu dari 6,14% pada tahun 2021 menjadi 21,14% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Selain itu, persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan juga mengalami peningkatan secara bertahap dari 8,95% pada tahun 2021 menjadi 25,45% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan program pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian, pembinaan, serta pemanfaatan potensi budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya lokal.

Urusan Kebudayaan mengampu satu IUP yaitu Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah. Termasuk dalam kategori tempat bersejarah adalah Situs Plawangan, Situs Watu Tumpeng Desa Kecepit Kec. Randudongkal, Ndalem Notonegoro, Makam Syekh Maulana Syamsudin, Makam Syech Pandan Jati, Makam Pangeran Benowo Penggarit, Situs Watu Lumpang Desa Cikendung Kec. Pulosari. Jumlah pengunjung tempat bersejarah selama periode tersebut cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian kembali berada pada kisaran sekitar 84–86 ribu pengunjung pada tahun 2023 hingga 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kunjungan ke situs sejarah masih cukup baik, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kegiatan pariwisata, promosi budaya, serta penyelenggaraan event kebudayaan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan juga menunjukkan dinamika perkembangan. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat dalam pertunjukan kesenian mengalami peningkatan dari 31% pada tahun 2022 menjadi 38% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 tercatat menurun menjadi 27%. Demikian pula persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku atau pendukung kegiatan seni menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi kreatif berbasis seni budaya masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan kelompok seni, fasilitasi ruang pertunjukan, serta peningkatan akses pasar bagi pelaku seni budaya.

Di sisi lain, persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai 100% pada periode 2021–2025, meskipun pada tahun 2025 tercatat sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian kesenian tradisional telah menjadi perhatian pemerintah daerah, namun tetap memerlukan penguatan program agar keberlanjutan pelestarian budaya dapat terus terjaga.

Secara umum, capaian pembangunan urusan kebudayaan selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan upaya pelestarian dan

pengembangan kebudayaan daerah. Namun, dalam konteks kesenian mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh menurunnya tingkat keaktifan sanggar dan kelompok kesenian di masyarakat. Sebagian sanggar kesenian tidak lagi aktif beroperasi serta belum menyentuh kesenian kuntulan dan ronggeng karena berfokus di karawitan, pewayangan, sintren, dan brendung. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pelaksanaan pembinaan, keterlibatan dalam pertunjukan kesenian, maupun upaya pelestarian kesenian tradisional. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku budaya, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan kebudayaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.95.

Data 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

No	Data Objek Pemajuan Kebudayaan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Manuskrip	1	2	2	3	3
2	Bahasa	1	1	1	1	1
3	Adat Istiadat	11	11	11	11	21
4	Ritus	13	13	13	13	30
5	Tradisi Lisan	19	19	19	19	64
6	Pengetahuan Tradisional	21	21	21	21	45
7	Teknologi Tradisional	5	5	5	5	7
8	Seni	12	12	12	12	22
9	Permainan Rakyat	22	22	22	22	22
10	Olahraga Tradisional	4	4	4	4	5
11	Cagar Budaya	86	86	86	86	82
	Jumlah	154	154	196	197	302

Sumber: Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026

Dari tahun 2021 sampai tahun 2025, terjadi kenaikan jumlah obyek pemajuan kebudayaan sebesar 148 objek. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah manuskrip, adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, olahraga tradisional. Sedangkan jumlah cagar budaya mengalami penurunan. Mendasari hasil pemutakhiran data Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bahwa beberapa ODCB berlokasi di dalam hutan, sehingga mengalami perubahan fisik.

Permasalahan dan rekomendasi pada Pokok Pikiran Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Manuskrip

Permasalahan:

- Belum lengkapnya data inventarisasi manuskrip, baik dari jumlah, maupun kondisi fisik manuskrip.
- Terdapat manuskrip yang belum dilakukan proses filologi manuskrip secara tradisional sehingga belum dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan.

- Minimnya SDM dengan kompetensi filologi dan konservasi manuskrip.
- Rekomendasi:
- Melakukan upaya pendataan menyeluruh keberadaan manuskrip.
 - Melakukan kajian filologi terhadap manuskrip.
 - Merekrut SDM dengan kompetensi Filolog.
- b. Bahasa
- Permasalahan:
- Belum optimalnya upaya pemeliharaan penggunaan bahasa daerah (kromo inggil) pada kalangan muda.
 - Minimnya publikasi pentingnya penggunaan bahasa daerah (kromo inggil) kepada masyarakat.
- Rekomendasi:
- Mewujudkan pemeliharaan penggunaan bahasa daerah (kromo inggil) pada kalangan muda agar tidak hilang dan musnah.
 - Mempublikasikan penggunaan bahasa daerah (kromo inggil) kepada masyarakat melalui media massa.
- c. Adat Istiadat
- Permasalahan:
- Pemutakhiran OPK adat istiadat belum maksimal.
 - Minimnya publikasi nilai-nilai makna simbolik yang terkandung dalam kegiatan adat istiadat kepada masyarakat.
- Rekomendasi:
- Melakukan pemutakhiran data OPK adat istiadat.
 - Mempublikasikan nilai-nilai makna simbolik yang terkandung dalam kegiatan adat istiadat melalui media massa dan Pekan Kebudayaan Daerah.
- d. Ritus
- Permasalahan:
- Belum optimalnya pemutakhiran data OPK Ritus.
- Rekomendasi:
- Melakukan pemutakhiran data OPK Ritus.
- e. Tradisi Lisan
- Permasalahan:
- Berkurangnya penutur tradisi lisan.
 - Minimnya pemutakhiran data tradisi lisan.
- Rekomendasi:
- Melakukan inventarisasi penutur tradisi lisan dan mendokumentasikannya dalam bentuk digital.
 - Pemutakhiran tradisi ke dalam sistem pendataan terpadu.
- f. Pengetahuan Tradisional
- Permasalahan:
- Pendataan Pengetahuan Tradisional masih minim.
 - Minat mempelajari pengetahuan tradisional di kalangan generasi muda masih minim.
- Rekomendasi:
- Inventarisasi pengetahuan tradisional yang masih dilestarikan.
 - Mengenalkan jenis teknologi tradisional kepada semua generasi.

g. Teknologi Tradisional

Permasalahan:

- Minat mempelajari teknologi tradisional di kalangan generasi muda masih minim.

Rekomendasi:

- Memperkenalkan jenis teknologi tradisional kepada semua generasi.

h. Seni

Permasalahan:

- Objek seni wayang golek cepak/menak dan objek seni lainnya yang belum terdata dengan baik.

Rekomendasi:

- Inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan wayang golek cepak/menak dan objek seni lainnya.

i. Permainan Rakyat

Permasalahan:

- Belum ada penetapan permainan rakyat sebagai warisan budaya.

Rekomendasi:

- Mengusulkan permainan rakyat sebagai warisan budaya.

j. Olahraga Tradisional

Permasalahan:

- Minim generasi muda mengenal olahraga tradisional.
- Generasi muda lebih tertarik pada permainan digital, sehingga olahraga tradisional mulai terpinggirkan.

Rekomendasi:

- Memperkenalkan jenis olahraga tradisional di satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
- Menjadikan olahraga tradisional bagian dari ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah.

k. Cagar Budaya

Permasalahan:

- Kesulitan akses cagar budaya yang dimiliki pribadi maupun swasta.
- Pemeliharaan cagar budaya di area terbuka belum dilakukan secara intensif.

Rekomendasi:

- Pendekatan kepada pemilik bangunan cagar budaya.
- Melakukan giat kebersihan di lokasi cagar budaya bersama masyarakat.

17. Perpustakaan

Gambaran kinerja urusan perpustakaan selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	2,24	4,23	2,4	2,5	4,6
2.	Indeks Pembangunan	%	9,96	15,47	14,70	45,12	14,88

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Literasi Masyarakat (IPLM)						
3.	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%	1,69	2,03	0,76	5,96	10,75
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	54,32	49,68	55,55	65,25	61,67
5.	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	%	2,24	4,85	2,4	10,2	10,78
6.	Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia	%	69,11	71,21	17,32	18,4	22,8
7.	Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital i-Pemalang	%	1,7	3,5	96 (0,076)	1,043	0,4
8.	Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%	0	61,11	61,11	0	4,7

Sumber: Dinperpuska Kabupaten Pemalang, 2026

Secara umum, perkembangan urusan perpustakaan di Kabupaten Pemalang selama 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tingkat pemanfaatan perpustakaan naik turun, dari 2,24% (2021) menjadi 4,6% (2025), yang menandakan minat masyarakat belum stabil. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga mengalami perubahan signifikan, dari 9,96% (2021) naik hingga 45,12% (2024), kemudian turun menjadi 14,88% (2025). Penurunan ini terjadi karena perubahan metode dan indikator pengukuran yang lebih komprehensif pada tahun 2025, yang mencakup aspek koleksi, SDM, layanan, dan pengelolaan perpustakaan.

Dari sisi kelembagaan, perpustakaan terstandarisasi meningkat dari 5,96% (2024) menjadi 10,75% (2025), menunjukkan perbaikan tata kelola. Kunjungan perpustakaan juga meningkat, terutama pada 2024–2025, meskipun perpustakaan umum sempat terdampak pembangunan gedung. Layanan digital i-Pemalang mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2025 akibat kurangnya sosialisasi. Sementara itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2025 tercatat 61,67 dan menurun 3,73% karena perubahan indikator survei. Di sisi lain, upaya pelestarian naskah kuno tetap berjalan dengan capaian 4,7% melalui kegiatan alih media, menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga warisan budaya literasi daerah.

Secara keseluruhan, pembangunan urusan perpustakaan di Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang masih belum sepenuhnya stabil, ditandai dengan fluktuasi pada pemanfaatan layanan, literasi masyarakat, dan kunjungan perpustakaan. Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa aspek seperti standarisasi perpustakaan, penguatan layanan, serta peningkatan kunjungan pada periode tertentu, capaian literasi dan pemanfaatan layanan digital masih mengalami ketidakstabilan, terutama akibat perubahan indikator pengukuran serta belum optimalnya sosialisasi layanan perpustakaan digital.

Namun demikian, berbagai capaian tersebut menunjukkan adanya fondasi yang mulai terbentuk dalam pengembangan budaya literasi di daerah. Ke depan, diperlukan penguatan yang lebih konsisten pada aspek promosi literasi, optimalisasi layanan perpustakaan digital, serta peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perpustakaan hingga ke tingkat masyarakat luas. Dengan upaya tersebut, diharapkan perpustakaan dapat berperan lebih optimal sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang.

18. Kearsipan

Gambaran urusan kearsipan Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks kearsipan	%	38,88	19,31	53,42	50,94	74,27
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	74	70,44	88,85	67,82	74,63
3.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	4,16	33,33	33,33	33,34	33,74
4.	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	60,98	77,08	74,07	100	100
5.	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	%	0	0	0	0	0

Sumber: *Dinpusarda Kabupaten Pemalang, 2026*

Capaian kinerja urusan kearsipan merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan urusan kearsipan menunjukkan capaian yang relatif baik, ditandai dengan meningkatnya tertib pengelolaan arsip, implementasi sistem kearsipan elektronik, serta meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pada perangkat daerah. Capaian kinerja urusan kearsipan merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, efektif, dan akuntabel. Diukur dengan indikator indeks kearsipan yang mencapai 74,27 di tahun 2025 dari tahun 2024 yang sebesar 50,94. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditentukan, dengan pencapaian tersebut kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Tinggi”, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.98.
Nilai Indeks Kearsipan Kabupaten Pemalang

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	73,72	60%	44,23
Internal	75,09	40%	30,03
Nilai Akumulasi			74,27

Sumbe: Dinperpuska Kabupaten Pemalang, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Hasil Pengawasan Eksternal rendah, hal ini dikarenakan:

- 1. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas (Sarpras Kearsipan)
- 2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai
- 3. Manajemen arsip yang belum efektif.

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Kearsipan maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan Infrastruktur dan Sarpras Kearsipan
- Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM
- Mengoptimalkan pengelolaan arsip konvensional dan elektronik.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dihitung berdasarkan persentase arsip aktif dan arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu kembali serta persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam aplikasi SIKN/JIKN. Di tahun 2025, capaian tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan sebesar 6,81% dari tahun 2024 yang capaiannya sebesar 67,82 menjadi sebesar 74,63 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan telah dilaksanakan secara optimal, menjamin tersedianya arsip yang autentik, andal, dan utuh sebagai dasar akuntabilitas kinerja serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas penerapan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan kearsipan secara berkelanjutan.

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban terdiri dari kegiatan pemusnahan, penciptaan dan penggunaan arsip dinamis. Pengawasan kearsipan internal dan eksternal, capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,4% dari capaian tahun 2024 sebesar 33,34 menjadi sebesar 33,74 pada tahun 2025. Dari keenam unsur tersebut ada capaian yang nilainya masih rendah yaitu, tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK. Hal ini karena bersifat situasional, kemudian tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK, sehingga belum tersedia arsip tertutup yang ada di dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten pemalang.

Kinerja untuk sasaran strategis “meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan” yang diukur dengan indikator Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik mencapai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Pemalang melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kearsipan yang merupakan bagian dari Pembinaan Pengelolaan Kearsipan dengan target Pengawasan sebanyak 41 (empat puluh satu) OPD dan target kegiatan pembinaan kearsipan sebanyak 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

c. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Gambaran Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Total Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Ton/ Tahun	37.125	40.630	41.641	36.951	39.448
2.	Total produksi hasil olahan	Ton/ Tahun	11.372	12.013	12.346	13.212	13.204
3.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita /Th	30,27	34,62	35,24	35,00	17,37
4.	Produksi perikanan tangkap	Ton/ Tahun	18.396	21.804	22.367	17.026	19.321
5.	Produksi perikanan budidaya	Ton/ Tahun	18.730	18.826	19.274	19.925	20.126
6.	Cakupan kelompok usaha yang diawasi	%	2,92	3,29	3,14	3,07	2,9
7.	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	%	73,33	77,14	80	82,22	89,58

Sumber: Distanparik Kabupaten Pemalang, 2026

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pemalang selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif positif, khususnya dalam peningkatan produksi perikanan, pengolahan hasil perikanan, serta pembinaan kelompok usaha perikanan. Peningkatan kinerja perikanan ini merupakan hasil dari upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Disperik Kabupaten Pemalang yang berkontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Pemalang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Pemalang.

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 produksi tercatat sebesar 37.125 ton, meningkat menjadi 37.125 ton pada tahun 2021 dan 40.630 ton pada tahun 2022. Produksi terus meningkat hingga mencapai 41.641 ton pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 36.951 ton, pada tahun 2025 produksi

kembali meningkat menjadi sekitar 39.448 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tetap menjadi salah satu sektor potensial dalam mendukung perekonomian daerah.

Jika dilihat secara lebih rinci, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 18.396 ton pada tahun 2021 menjadi 22.367 ton pada tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi mengalami penurunan menjadi 17.026 ton, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi sekitar 19.321 ton. Sementara itu, produksi perikanan budidaya menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dari 18.730 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 20.126 ton pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin berkembangnya usaha budidaya perikanan sebagai salah satu penopang utama produksi perikanan daerah.

Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu dan daya saing hasil perikanan budidaya, sekaligus menjamin keamanan pangan serta keberlanjutan usaha perikanan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pelatihan, pembinaan teknis, pendampingan penerapan standar budidaya, serta fasilitasi pengajuan sertifikasi CBIB bagi kelompok maupun pelaku usaha perikanan budidaya. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pembudidaya memahami serta mampu menerapkan tata cara budidaya ikan yang sesuai standar, mulai dari pemilihan lokasi, pengelolaan kualitas air, penggunaan pakan dan obat ikan yang aman, penerapan biosekuriti, pengendalian penyakit ikan, hingga penanganan hasil panen yang higienis.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan CBIB sebagai upaya mendukung penerapan standar budidaya dan persiapan pengajuan sertifikasi CBIB. Kegiatan tersebut meliputi persiapan lapangan (farm), fasilitasi pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan sertifikat, serta pendampingan pada saat pelaksanaan audit oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pada Tahun 2026 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi CBIB di Tambak Dinas Asemdayong yang diikuti oleh para pembudidaya ikan, kelompok perikanan budidaya, dan penyuluh perikanan sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesiapan dalam penerapan standar CBIB di lapangan.

Penerapan prinsip CBIB merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembudidaya ikan untuk menjamin keamanan pangan hasil perikanan, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ikan yang dipelihara, serta mendukung keberlanjutan usaha budidaya perikanan. Selain itu, sertifikasi CBIB juga menjadi nilai tambah bagi produk perikanan budidaya karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk perikanan Kabupaten Pemalang di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Melalui implementasi CBIB, diharapkan pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Pemalang dapat menghasilkan produk perikanan yang aman

dikonsumsi, bermutu, berdaya saing, serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ikan.

Dalam aspek hilirisasi, total produksi hasil olahan perikanan juga mengalami peningkatan dari 11.372 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 13.204 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya aktivitas pengolahan hasil perikanan yang memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Konsumsi ikan masyarakat menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 konsumsi ikan tercatat sebesar 30,27 kg/kapita/tahun, dan kembali meningkat hingga mencapai 35,24 kg/kapita/tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2024 relatif stabil pada angka 35,00 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 17,37 kg/kapita/tahun.

Sementara itu, cakupan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 73,33% pada tahun 2021 menjadi 89,58% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin intensifnya upaya pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan.

2. Pariwisata

Gambaran Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100. Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025							
No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	Na	1,23	1,25	1,39	0,17
2.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-8,42	91,29	-24,20	0,78	-9,6
3.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	793.330	1.517.556	1.150.278	1.159.242	1.047.902
4.	Persentase media yang dipergunakan untuk promosi	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftaran HAKI	%	Na	20	20	40	0
6.	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan	%	Na	36	46	63	33,89
7.	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Milyar	1.409,91	1.621,74	1.818,62	2.018,34	2.353,71
8.	Jumlah Daya Tarik Wisata	Unit	44	48	49	52	53

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Jumlah Desa Wisata	Desa	27	27	36	36	36

Sumber: Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026

Secara geografis, Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang cukup banyak dan beraneka ragam, sehingga menjadi modal bagi pengembangan kepariwisataan daerah.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, terutama sebagai dampak dari proses pemulihan pasca pandemi serta perubahan pola kunjungan wisatawan.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan pada periode 2022–2024, dari 1,23% pada tahun 2022 menjadi 1,39% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,17%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sektor pariwisata terhadap PAD belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Kontribusi PDRB khususnya penyediaan akomodasi dan makan minum juga meningkat selama periode tahun 2021-2025, hingga mencapai 2.353,71 Milyar pada tahun 2025.

Dari sisi pertumbuhan kunjungan wisatawan, terjadi fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mengalami kontraksi sebesar -8,42% pada tahun 2021, pertumbuhan melonjak signifikan menjadi 91,29% pada tahun 2022 seiring dengan mulai pulihnya aktivitas pariwisata. Namun demikian, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar -24,20%, kemudian relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 0,78%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar -9,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tren kunjungan wisatawan masih belum konsisten.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara juga menunjukkan pola yang serupa, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencapai sekitar 1,5 juta kunjungan, kemudian menurun pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024, sebelum kembali menurun pada tahun 2025 menjadi sekitar 1,04 juta kunjungan. Pada Tahun 2025, Jumlah Daya Tarik Wisata mencapai 53 unit, sedangkan Desa Wisata berjumlah 36 desa.

Pada aspek pengembangan ekonomi kreatif, persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menunjukkan peningkatan dari 20% pada tahun 2022–2023 menjadi 40% pada tahun 2024, namun menurun menjadi 0% pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya penurunan dukungan atau pelaksanaan program pada tahun tersebut.

Sementara itu, persentase media promosi pariwisata yang digunakan tetap konsisten pada angka 100% sepanjang periode 2021–2025, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan promosi pariwisata. Di sisi lain, persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina atau dilatih keterampilannya mengalami penurunan dari 36% pada tahun 2022 menjadi 33,89% pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2025 sebesar 63%.

Secara keseluruhan, perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Pemalang menunjukkan adanya pemulihan yang cukup signifikan pascapandemi, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan strategi promosi, peningkatan kualitas destinasi wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan guna mendorong kinerja sektor pariwisata ke depan.

3. Pertanian

Gambaran Urusan Pertanian Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	27,04	26,49	25,93	25,82	25,51
2.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar / Tahun					
	padi		60,64	63,32	62,31	62,09	61,84
	kopi		1,486	1,112	1,248	1,331	1,146
3.	Produktivitas hortikultura	kw/Ha					
	nanas		752,32	675,68	741,35	1.320,21	1.120,55
4.	Produksi daging ternak besar	kg	1.821.038	1.831.971	1.836.566	1.530.332	1.840.120
	produksi daging sapi		915.840	926.640	931.140	962.460	934.200
	produksi daging kambing		905.198	905.331	905.426	567.872	905.920
	produksi daging unggas		2.166.118	2.197.141	2.197.043	2.800.100	2.197.250
5.	Produksi telur	kg	173.946	190.564	190.564	337.316	1.931.300
6.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	656.682	670.584	624.021	587.968	597460
	produksi padi		591.584	590.412	561.995	530.673	539.713
	produksi jagung		62.143	77.485	60.033	54.397	54.963
	produksi kacang tanah		262,9	68	47,1	51,1	56
	produksi Ubi Kayu		929,4	1.367,9	991	878,6	918
	produksi Ubi Jalar		1.762,8	1.251,6	954,4	1.968,0	1.810
7.	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	155.829	157.139	164.031	294.502	306419
	produksi cabe		3.240	3.724	4.369	4.369	3.738
	produksi durian		1.116	984	2.538	1.808	1.055
	produksi		20.536	19.517	20.242	19.175	50.222

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	mangga						
	produksi pepaya		609	697	672	1.103	1.510
	produksi rambutan		1.270	1.082	3.519	5.378	1.590
	produksi nanas		76.648	74.769	77.339	187.010	94.397
	produksi alpukat		5.367	5.900	6.012	5.027	15.467
	produksi pisang		44.610	47.706	46.570	68.895	137.926
	produksi bawang merah		2.432	2.760	2.770	1.738	514
8.	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	947	893	876	963	1402,39
	kopi		548,01	479,95	444,27	508,00	660,161
	tembakau		398,64	413,27	431,90	455,00	516,00
9.	Populasi ternak	Ekor	3.157.598	3.164.394	3.120.843	3.923.107	3.591.221
	populasi ternak besar		18.019	16.003	15.809	7.925	6.569
	populasi ternak kecil		214.343	216.437	179.798	181.744	182.852
	populasi ternak unggas		2.925.236	2.931.954	2.925.236	3.733.438	3.401.800
10.	Jumlah Rumah Potong Hewan	Unit	5	5	5	5	5
11.	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT, DAM PARIT)	%	20	21	21	33	22,75
10.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	10,96	10,35	10,96	10,64	10,98
11.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman pangan	%	20	33	33	54	57,02
12.	Persentase kelompok tani utama	%	-	-	-	0,07	0,07

Sumber: Distanparik Kabupaten Pemalang, 2026

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Pemalang serta menjadi tumpuan mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang pada periode 2021–2024 relatif stabil meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 27,04% pada tahun 2021 menjadi 25,82% pada tahun 2024 dan 25,51% pada tahun 2025. Penurunan ini

dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sektor ekonomi lainnya serta perubahan struktur ekonomi daerah.

Dari sisi produktivitas komoditas pertanian, produktivitas padi selama periode 2021–2025 relatif stabil pada kisaran 60–63 ton per hektar per tahun. Pada tahun 2020 produktivitas padi mencapai 63,2 ton/hektar, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 60,64 ton/hektar pada tahun 2021, meningkat kembali menjadi 63,32 ton/hektar pada tahun 2022, dan selanjutnya berada pada kisaran 62 ton/hektar hingga tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya upaya untuk meningkatkan produktivitas agar optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan, penurunan kualitas lahan dan alih fungsi lahan pertanian.

Pada Tahun 2025, kegiatan Demplot Padi Organik di Kabupaten Pemalang dilaksanakan di beberapa lokasi sebagai upaya pengembangan budidaya padi ramah lingkungan serta peningkatan pemahaman petani terhadap penerapan sistem pertanian organik. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan meliputi Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, Desa Bulakan Kecamatan Belik, Desa Asemdayong Kecamatan Taman, dan Desa Widodaren Kecamatan Petarukan. Luasan demplot pada masing-masing lokasi kurang lebih 1.000 m². Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan percontohan bagi petani dalam menerapkan budidaya padi organik yang berkelanjutan, efisien, dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sementara itu, produktivitas kopi menunjukkan fluktuasi dari 1,486 ton/hektar pada tahun 2021 menjadi 1,146 ton/hektar pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh faktor iklim, kondisi tanaman, serta teknik budidaya yang diterapkan oleh petani.

Produksi komoditas peternakan juga menunjukkan dinamika selama periode tersebut. Produksi daging ternak besar dan unggas mengalami peningkatan dari sekitar 3,9 juta kg pada tahun 2021 menjadi lebih dari 4 juta kg pada tahun 2025. Produksi telur juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dengan peningkatan dari sekitar 173 ribu kg pada tahun 2021 menjadi lebih dari 1,9 juta kg pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha peternakan yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

Selain itu, dalam mendukung penguatan tematik ekonomi syariah di Kabupaten Pemalang, ketersediaan Rumah Potong Hewan (RPH), baik yang belum maupun telah tersertifikasi halal menjadi dasar untuk menggambarkan kesiapan infrastruktur pendukung rantai halal (*halal value chain*), khususnya pada sektor peternakan dan pangan olahan. Pada rentang tahun 2021-2025, Kabupaten Pemalang memiliki 5 RPH yang berlokasi di Kecamatan Comal, Moga, Pemalang, Petarukan, dan Randudongkal. Dari kelima RPH tersebut hanya 1 RPH yang belum tersertifikasi halal, yakni RPH Petarukan.

Pada subsektor tanaman pangan, produksi tercatat sebesar 656.682 ton pada tahun 2021 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai sekitar 597 ribu ton pada tahun 2025. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, ketersediaan lahan, serta dinamika produksi komoditas utama. Sementara itu,

produksi tanaman hortikultura menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan dari 155.829 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 306 ribu ton pada tahun 2025, yang menunjukkan berkembangnya komoditas hortikultura sebagai alternatif usaha pertanian bernilai ekonomi tinggi.

Produksi komoditas perkebunan juga mengalami peningkatan dari 947 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 1.402 ton pada tahun 2025. Di sisi lain, populasi ternak secara umum mengalami peningkatan dari sekitar 3,15 juta ekor pada tahun 2021 menjadi sekitar 3,59 juta ekor pada tahun 2025, yang mencerminkan berkembangnya usaha peternakan di daerah.

Dalam hal dukungan sarana dan prasarana, persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, jaringan usaha tani, dan dam parit) meningkat dari 20% pada tahun 2021 menjadi 33% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 tercatat sebesar 22,75%. Selain itu, persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pada tanaman pangan meningkat cukup signifikan dari 20% pada tahun 2021 menjadi 57,02% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mitigasi risiko terhadap bencana pertanian.

Secara umum, capaian kinerja urusan pertanian selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang penting perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain keterbatasan lahan pertanian, alih fungsi lahan, fluktuasi produksi akibat perubahan iklim, serta perlunya peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani.

4. Perdagangan

Gambaran Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	9,58	9,26	8,35	7,42	5,07
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,07	16,99	17,07	17,08	15,33
3	Nilai Ekspor	\$	55.132.982	67.526.495	48.297.925	407.812.073	83.637.313
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	80
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
6	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	%	6,25	6,25	5,88	5,88	0,00
7	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yag Dibina	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	6,25	6,25	5,88	5,88	0
9	Persentase sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pemeliharaannya	%	50,0	75,0	50,0	68,8	47,06
10	Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100
11	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	95,58
12	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	33,33	40,74	40,74	40,74	40,74
13	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	11,25	15,55	9,49	7,87	4,88
14	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	-	-	77	-	-
15	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	74	70	70	70	65,22

Sumber: Diskumdag Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2025, sektor perdagangan menunjukkan peran yang cukup penting dalam mendukung perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif stabil selama periode tersebut, bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk, yaitu berada pada kisaran sekitar 17%. Stabilitas kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan, khususnya perdagangan besar dan eceran masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Dalam konteks perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pemilik pasar daerah menghadapi persaingan dalam pengelolaan pasar yang mulai bergeser pada pasar virtual. Perlunya penerapan pasar berbasis konvensional-modern-digital, yaitu pengelolaan pasar (pasar daerah dan pasar desa) yang mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin merebak.

Selain pasar daerah, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang juga mengawasi perkembangan pasar modern/pasar swalayan/pusat perbelanjaan, salah satunya adalah terkait pemberian dan pengawasan izin usaha. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk beradaptasi terhadap digitalisasi. Perlu

dilakukan fasilitasi/pendampingan bagi pelaku usaha agar bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya.

Pertumbuhan sektor perdagangan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi, namun pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren pemulihan dengan pertumbuhan positif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan pada tahun 2023 hingga 2025 cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perubahan pola konsumsi masyarakat, dinamika distribusi barang, serta persaingan usaha yang semakin meningkat.

Dari sisi fasilitasi dan pembinaan usaha perdagangan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang cukup baik. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha perdagangan serta persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi menunjukkan capaian yang tinggi. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong tertib administrasi usaha serta meningkatkan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha perdagangan. Selain itu, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan juga menunjukkan capaian optimal dengan tingkat pembinaan mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, antara lain terkait peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi, serta peningkatan cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor. Di samping itu, persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah masih menunjukkan fluktuasi sehingga perlu terus ditingkatkan guna menjamin perlindungan konsumen dan kepastian transaksi perdagangan.

Ke depan, penguatan sektor perdagangan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, penguatan kapasitas pelaku usaha khususnya UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas, serta peningkatan tertib ukur dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, sektor perdagangan diharapkan dapat terus berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urusan Perdagangan mengampu satu IUP, yaitu Disparitas Harga. Indikator ini merupakan proksi atau pendekatan dari indikator inflasi yang sudah menggunakan perhitungan Kota Tegal. Pengertian Disparitas Harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Terdapat 13 komoditas bahan pokok yaitu Beras Medium; Gula Pasir; Minyak Goreng Kemasan Sederhana; Daging Sapi Paha Belakang; Daging Ayam Ras; Telor Ayam Ras; Tepung Terigu; Kedelai Impor; Cabe Merah Keriting; Cabe Rawit Merah; Bawang Merah; Bawang Putih Impor Kating dan Ikan Kembung. Hasil capaian disparitas harga di Kabupaten Pemalang cukup baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan harga bahan pokok ini adalah Monitoring harga bahan pokok; Operasi Pasar dan Kegiatan Pasar Murah.

5. Perindustrian

Gambaran Urusan Perindustrian Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	4,2	5,5	5	6,43	6,4
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	115	100	125	125	100

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026

Pada urusan perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi memiliki fokus kinerja untuk meningkatkan dan mengembangkan industri dengan skala kecil dan menengah. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, pertumbuhan IKM tercatat sebesar 4,2%, kemudian meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2021 dan terus menguat hingga mencapai 6,43% pada tahun 2024, meskipun menurun di angka 6,4 pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan mulai pulih dan berkembangnya sektor IKM yang didukung oleh adanya fasilitasi akses permodalan, fasilitasi pemasaran produk IKM, serta peningkatan kapasitas SDM IKM. Secara umum, peningkatan IKM ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Pemalang, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya pengembangan dan dukungan yang berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait menunjukkan capaian konsisten sebesar 100% sepanjang periode 2021–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan industri telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mampu menjaga kepatuhan pelaku usaha serta menjamin tertib administrasi perizinan industri.

Namun demikian, dari aspek pengembangan usaha, pembinaan terhadap IKM masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, inovasi, akses pasar, dan daya saing IKM secara menyeluruh. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan sebagian pelaku IKM dalam

pemenuhan standar produk, penguasaan teknologi produksi, pengemasan, pemasaran digital, serta akses terhadap pembiayaan dan jejaring usaha.

Dengan demikian, meskipun capaian kinerja program pembinaan dan pengawasan industri telah memenuhi target, masih terdapat kesenjangan (*gap*) dalam penguatan kapasitas dan pengembangan daya saing IKM yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang diperlukan penguatan pembinaan yang lebih substantif melalui peningkatan kompetensi pelaku IKM, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk, penguatan akses pasar, serta pengembangan inovasi industri berbasis potensi lokal.

Sementara itu, indikator ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2020 capaian sebesar 75%, kemudian meningkat melampaui target pada tahun 2021 (115%), stabil pada 100% di tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 125%. Pada tahun 2025 capaian berada pada angka 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan sistem pendataan dan penyediaan informasi industri yang semakin baik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri daerah dan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen penting bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama untuk memperluas akses pasar pada pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun rantai pasok industri yang lebih besar. Namun demikian, kondisi aktual di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa jumlah IKM yang telah memiliki sertifikat TKDN masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi IKM yang ada. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebutuhan dari IKM itu sendiri untuk memiliki sertifikasi TKDN sebab produk-produk IKM tersebut belum masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Sebagai upaya peningkatan capaian TKDN IKM, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya berupa penyelenggaraan sosialisasi TKDN IKM.

6. Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	0	0	0	20	20

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026

Pelaksanaan urusan transmigrasi di Kabupaten Pemalang selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang sangat terbatas. Berdasarkan indikator persentase transmigran yang ditempatkan, pada tahun 2021 hingga 2023 tidak terdapat penempatan transmigran (0%). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada masa pemulihan pasca pandemi, keterbatasan kuota penempatan dari pemerintah pusat, serta penyesuaian kebijakan nasional di bidang ketransmigrasian.

Pada tahun 2024 mulai terdapat realisasi penempatan transmigran dengan capaian sebesar 20% sampai dengan tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya upaya reaktivasi program transmigrasi serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Meskipun masih relatif rendah, capaian tersebut menjadi indikasi awal kembali Bergeraknya program transmigrasi sebagai salah satu alternatif pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan urusan transmigrasi dalam periode ini masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya minat masyarakat, kesiapan calon transmigran, serta ketergantungan terhadap kebijakan dan kuota dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlunya peningkatan sosialisasi dan pembinaan calon transmigran, penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta peningkatan kualitas data dan kesiapan administrasi guna mendukung optimalisasi peluang penempatan transmigran di masa mendatang.

d. Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025							
No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kecamatan dan kelurahan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian materi dokumen LPPD (desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, kelengkapan laporan)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase kerja sama dan sinergi yang ditindaklanjuti	%	20	100	100	170	170
4	Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum	%	125	89	95,09	97,91	98
5	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	%	0 (tidak ada perkara yang diadukan dan diselesaikan)	100	0 (penanganan perkara masih dalam proses perdidangan)	100	100
6	Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan	%	100	92	83,2	80,32	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	perundangan yang berlaku						
7	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	%	100	100	100	100	100
8	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100	100	100
9	Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100
10	Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	%	5,025	2,25	4,065	8.70	4.4
11	Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat	%	100	50	100	75	100
12	Nilai RB Setda	Nilai	53,72	53,2	Tidak ada nilai	Tidak ada Nilai	Tidak ada Nilai
13	Nilai SAKIP Setda	NILAI	61,79	62,4	62,4*)	67,22*)	72.21
14	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan	Nilai	94,33	95,36	92,47	96.42	93,69
15	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan	Nilai	67,4	90,43	82,57	84.97	100
16	Level maturitas PBJ	LEVEL	0/9	5/9	8/9	8/9	9/9
17	Nilai penguatan dan penataan organisasi	Nilai	Tersedia triwulan II	1,33	1,33*)	1.88	2.83
18	Nilai peningkatan kualitas pelayanan public	Nilai	Tersedia triwulan II	0,99	1,33*)	1.375	1.97
19	Nilai penataan tata laksana	Nilai	Tersedia triwulan II	1,47	1,47*)	0.88	2.4
20	Nilai penguatan akuntabilitas	Nilai	Tersedia triwulan II	1,74	1,74*)	2.76	2.74
21	Nilai manajemen perubahan	Nilai	Tersedia triwulan II	1,88	1,88*)	2.46	2.5
22	Persentase kualitas layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	%	85,34	85,66	85,98	86.42	85.90
23	Tingkat kepuasan layanan keprotokolan	Nilai	NA	84,9	86,91	85.18	85.81
24	Indeks Dokumentasi KDH/WKDH	Nilai	NA	100	100	100	100

Sumber: Setda Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan data tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik dan cenderung meningkat pada beberapa indikator kunci. Aspek tata kelola administrasi pemerintahan telah berjalan optimal, tercermin dari persentase kecamatan dan kelurahan tertib administrasi serta kesesuaian materi dokumen LPPD yang konsisten mencapai 100% setiap tahun. Sinergi dan kerja sama juga mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 170% pada tahun 2024–2025, menunjukkan semakin kuatnya koordinasi lintas sektor.

Dari sisi regulasi, persentase rancangan produk hukum yang menjadi produk hukum terus meningkat hingga 98% pada tahun 2025, serta kesesuaian produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan kembali mencapai 100% setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara hukum juga menunjukkan kinerja baik dengan capaian 100% pada tahun 2025. Di sisi kelembagaan sosial dan keagamaan, seluruh indikator menunjukkan capaian optimal sebesar 100%, termasuk dalam integrasi program penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, beberapa indikator masih menunjukkan fluktuasi, seperti kontribusi laba BUMD terhadap PAD yang tidak stabil, serta kesehatan lembaga keuangan mikro yang sempat menurun pada beberapa tahun tertentu. Pada aspek reformasi birokrasi dan akuntabilitas, nilai SAKIP Setda menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 72,21 pada tahun 2025, didukung oleh peningkatan maturitas pengadaan barang/jasa yang telah mencapai level tertinggi (level 9). Selain itu, komponen reformasi birokrasi seperti penguatan organisasi, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas, dan manajemen perubahan juga menunjukkan perbaikan bertahap.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menunjukkan capaian yang solid dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek kinerja ekonomi daerah, stabilitas kelembagaan keuangan, serta konsistensi peningkatan kualitas pelayanan guna mendorong kinerja pemerintahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Sekretariat DPRD

Gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106.
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	78,84	80,14	81,24	84,87	85,64
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	76,72	65,81	77,52	79,52	78,79

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia	%	89,68	92,97	95,74	96,14	94,83
4.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	82,83	91,34	95,10	98,34	96,20
5.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	43,00	94,74	96,97	77,36	98,80
6.	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	84,27	122,73	100	100	83,33
7.	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu	%	68,72	100	100	100	100
8.	Persentase hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	%	87,25	100	100	100	100
9.	Persentase anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	%	91,73	100	92,86	94,12	97,41
10.	Persentase jenis aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	%	86,00	85,71	100	100	100
11.	Persentase kode etik DPRD yang diimplementasikan	%	78,59	86,67	100	100	100
12.	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang tersedia	%	95,34	97,67	96,88	100	100
13.	Persentase kerjasama daerah yang disetujui	%	0	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, 2026

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum positif, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD terus mengalami peningkatan dari 78,84% pada tahun 2021 menjadi 85,64% pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan. Cakupan layanan juga relatif meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi, dengan capaian 78,79% pada tahun 2025. Selain itu, persentase layanan yang tersedia bagi DPRD serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan mendekati atau mencapai 100% pada beberapa indikator di tahun 2025.

Dari sisi fungsi legislasi, persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 83,33% pada tahun 2025. Sementara itu, pembahasan

kebijakan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penanganan aspirasi masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kapasitas anggota DPRD juga menunjukkan tren positif, mencapai 97,41% pada tahun 2025. Implementasi kode etik DPRD serta fasilitasi tugas DPRD juga telah berjalan optimal dengan capaian 100%.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum optimal, seperti kerja sama daerah yang belum terealisasi serta beberapa fluktuasi pada cakupan layanan dan ketepatan waktu penetapan Perda. Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang baik dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, meskipun tetap diperlukan upaya peningkatan konsistensi dan optimalisasi pada beberapa aspek layanan.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja utama urusan perencanaan pembangunan mencerminkan kualitas proses perencanaan yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP pada komponen perencanaan serta persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas. Kedua indikator ini menunjukkan sejauh mana perencanaan telah disusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, capaian pada indikator tersebut menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kinerja Bapperida, sebagaimana disajikan pada tabel capaian kinerja berikut.

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai sakip komponen perencanaan	%	22,56	22,58	22,68	22,35	24,05
2.	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	%	24,39	60,97	63,41	63,40	85,40
3.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100
4.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah						
6.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2026

Kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin baik, terutama pada aspek kualitas dokumen perencanaan dan konsistensi antar dokumen pembangunan.

Indikator nilai SAKIP komponen perencanaan mengalami peningkatan secara bertahap, dari 22,56% pada 2021 menjadi 24,05% pada 2025, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan perencanaan berbasis kinerja, namun masih memerlukan penguatan agar lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik mengalami peningkatan signifikan, dari 24,39% pada 2021 menjadi 85,40% pada 2025. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan OPD yang semakin sesuai dengan standar dan kaidah perencanaan pembangunan.

Dari sisi konsistensi perencanaan, tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD telah mencapai 100% secara konsisten selama periode 2021–2025, yang menunjukkan bahwa perencanaan tahunan telah sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan jangka menengah daerah. Hal ini juga diperkuat dengan capaian keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah pada seluruh rumpun bidang, baik Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EkoSDA), maupun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), yang seluruhnya mencapai 100% sepanjang periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor telah berjalan sangat baik. Selain itu, persentase prioritas usulan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD juga menunjukkan capaian optimal sebesar 100% pada tahun 2021–2025, yang mencerminkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang telah menunjukkan kualitas yang semakin baik, terintegrasi, dan partisipatif. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi perencanaan berbasis kinerja, khususnya dalam peningkatan nilai SAKIP, agar perencanaan tidak hanya selaras secara dokumen, tetapi juga efektif dalam menghasilkan capaian pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD, dimana terjadi kenaikan dari sebesar 14,166% di tahun 2024 menjadi sebesar 18,26% di tahun 2025. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan penurunan dari sebesar 0,35% di tahun 2024 menjadi 0,6% pada tahun 2025. Secara rinci kinerja unsur keuangan daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108.
Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,04	62,50	65,71	70,13	65,89
2.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks	NA	NA	NA	2,6	2,6
3.	Rasio PAD terhadap APBD (indeks kemandirian keuangan daerah)	%	14,026	14,002	14,136	14,166	18,26
4.	Persentase <i>Mandatory Spending</i> yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	66,67	55,56
5.	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	%	94,34	97,83	99,13	99,13	99,15
6.	Rasio pajak terhadap PDRB	%	0,32	0,33	0,36	0,35	0,6
7.	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	50	100	50	100	100
8.	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
10.	Persentase tanah milik pemda yang bersertifikat	%	34,8	32,98	36,96	45,53	50,17
11.	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru	%	14	36	26	21	5,7
12.	Persentase Piutang yang terbayarkan	%	3	4	5	8	5,58
13.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

Selaras dengan penyusunan RPJPD Kab. Pemalang Tahun 2025 – 2045, urusan Keuangan mengampu satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB. Pengertian Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2019 – 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan karena terdampak Covid-19. Kemudian dari tahun 2020 – 2023 meningkat landai seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang pasca pandemi covid-19. Terlihat dari capaian pada tahun 2021 sebesar 0,32% dan terus meningkat hingga sebesar 0,35% di tahun 2025. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah terkendalanya ekstensifikasi pendapatan daerah oleh kewenangan dan kebijakan pusat.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) hingga tahun 2025 sebagai berikut:

a. **Layanan Pajak Desa Digital** (Lapak Dedi)

Adalah aplikasi pelayanan pengajuan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara online yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tujuan Lapak Dedi:
 - 1) Tersedianya sistem layanan yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah;
 - 2) Terciptanya sistem layanan yang lebih transparan
 - 3) Meningkatkan kemudahan pengendalian layanan agar sesuai mutu baku;
 - 4) Peningkatan PAD dari penerimaan Pajak PBB-P2
 - 5) Terbangunnya modal pelayanan yang terintegrasi antara pemerintah desa dengan OPD secara online
- Manfaat Lapak Dedi:
 - 1) Bagi Masyarakat
 - Masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih dekat, mudah dan murah
 - Masyarakat dapat mengetahui progres proses layanan.
 - 2) Bagi OPD
 - Kemudahan pengendalian layanan agar sesuai mutu baku

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
 - Optimalisasi pengelolaan Pajak PBB-P2
 - Tercapainya target PBB-P2
- 3) Bagi Pemkab Pemalang
- Inovasi ini mendukung pencapaian misi kedua ‘Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih’
 - Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor PAD;
 - Meningkatkan akurasi/kesesuaian basis data dengan fakta di lapangan

Lapak Dedi dibuat pada tahun 2020 dan baru tahap awal tahun 2023 diimplementasikan untuk desa/kelurahan pilot project sebanyak 15 Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Mulyoharjo
- 2) Kelurahan Purwoharjo
- 3) Desa Bulu
- 4) Desa Penggarit
- 5) Desa Pener
- 6) Desa Ambo Wetan
- 7) Desa Blimbing
- 8) Desa Keadaran
- 9) Desa Sumurkidang
- 10) Desa Rembul
- 11) Desa Warungpring
- 12) Desa Pepedan
- 13) Desa Nyalembeng
- 14) Desa Bulakan
- 15) Desa Watukumpul

Pada tahun 2025, layanan pembayaran pajak sudah ada (EPBB dan Laku Pandai) namun untuk layanan administrasi seperti pendaftaran, mutasi dan lainnya belum ada karena masih dalam proses studi tiru. Dengan adanya Lapak Dedi tagihan pajak Bumi dan Bangunan menjadi meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp. 26.305.780.261,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 27.842.500.120,-.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 65,89 pada tahun 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, kepatuhan terhadap mandatory spending, rendahnya realisasi belanja tidak terduga, ketidaktepatan waktu publikasi dokumen pengelolaan keuangan pada website pemda, rendahnya kondisi keuangan daerah dan Hasil Opini BPK.

Persentase pemenuhan *mandatory spending* mulai tercatat pada tahun 2024 sebesar 66,67% dan menurun menjadi 55,56% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa alokasi belanja wajib sesuai ketentuan masih belum optimal dan perlu penguatan perencanaan serta penganggaran. Dari sisi tata kelola penganggaran, persentase penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan menunjukkan fluktuasi dari 50% pada tahun 2021, meningkat menjadi 100% pada tahun 2022, kembali menurun pada tahun 2023, dan kembali mencapai 100% pada tahun 2024–2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran. Selain itu, persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan serta penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercatat konsisten pada angka 100%, yang mencerminkan kinerja administrasi keuangan daerah yang sangat baik.

Indeks Pengelolaan Aset Daerah menunjukkan capaian sebesar 2,6% pada tahun 2024 dan 2025. Persentase aset daerah khususnya aset berupa tanah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau aset daerah berupa tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 50,17%. Hasil Monitoring Fisik di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aset tanah yang tercatat milik Pemda tetapi dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain atau masyarakat tanpa ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam upaya pembuatan sertifikat tanah, selain kemampuan anggaran Pemerintah Daerah dalam mencukupi biaya yang diperlukan untuk pensertifikatan tanah milik Pemda yang jumlahnya tidak sedikit. Selanjutnya, perlu peningkatan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD secara optimal.

Sementara itu, persentase pertumbuhan wajib pajak baru mengalami fluktuasi, dari 14% pada tahun 2021 meningkat menjadi 36% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 21% pada tahun 2024, dan 5,7% di tahun 2025. Di sisi lain, persentase piutang yang terbayarkan menunjukkan tren meningkat dari 3% pada tahun 2021 menjadi 5,58% pada tahun 2025, yang menandakan adanya perbaikan dalam upaya penagihan piutang daerah.

Terakhir, penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital telah mencapai 100% pada periode 2021–2024, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi sistem.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan capaian yang baik terutama pada aspek tata kelola dan digitalisasi, namun masih diperlukan peningkatan pada pemenuhan *mandatory spending*, optimalisasi pendapatan daerah, serta percepatan sertifikasi aset guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kepegawaian

Gambaran urusan kepegawaian Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109.
Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,35	64,29	51,63	78,28	79,98
2.	Persentase kompetensi ASN	%	22,88	9,7	19,98	68	73,78
3.	Persentase kinerja ASN	%	24,09	21,59	25,00	83,36	83,40
4.	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	12,4	11,92	13,9	84,46	81,80
5.	Persentase tingkat disiplin ASN	%	4,99	5	4,99	99,17	100

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2026

Di tahun 2025, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 79,98 masuk kategori tinggi. Capaian tersebut terdiri atas capaian komponen pembentuk Persentase kompetensi ASN sebesar 73,78 persen, kinerja ASN sebesar 83% (konversi dari indeks = 24,9), tingkat pendidikan ASN sebesar 84,46% (konversi dari indeks = 20,87) dan tingkat disiplin ASN sebesar 99,17% (konversi dari indeks = 5). Komponen pembentuk IP ASN yang capaiannya rendah dan perlu upaya peningkatan adalah dimensi kompetensi. BKPSDM Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya peningkatan dengan mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi ASN, berupa pelatihan klasikal (pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural dan lain-lain) dan non klasikal (magang, studi banding, detasering, *coaching*, mentoring, pelatihan jarak jauh, *e-learning*, belajar mandiri, dan lain-lain).

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pemalang memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan inovasi. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan fungsi kelitbangan melalui penyusunan kajian strategis, penelitian terapan, serta pengembangan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Hasil-hasil penelitian dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, serta evaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Gambaran capaian kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks kepuasan layanan kelitbangan	Indeks	82,91	83,34	83,35	86,13	85,39
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	%	81	84,61	90,00	93,10	84
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	%	81	84,61	90,00	93,10	84
4	Indeks Inovasi daerah	Indeks	30,32	48	40,36	48,61	60,65

Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2026

Kualitas pelayanan kinerja yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Pemalang pada unsur penelitian dan pengembangan dapat dinilai dari dua layanan kegiatan yaitu Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tahun 2025 indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan pada Bappeda sebesar 85,39% yang dihitung dari layanan umum, perencanaan, kelitbangan dan umum (UMKM, TJSLP dll). Angka ini masuk dalam kategori Baik, sedangkan untuk persentase hasil kelitbangan yang dapat dimanfaatkan sebesar 84%. Urusan penelitian dan pengembangan ditujukan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk meningkatkan budaya inovasi dan kesejahteraan di masyarakat, setiap tahun diselenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Diharapkan melalui lomba ini masyarakat semakin terpacu dan termotivasi untuk menghasilkan inovasi di berbagai bidang sesuai dengan yang dikategorikan. Rentang tahun 2022-2025, peserta lomba krenova tingkat Kabupaten Pemalang terus mengalami kenaikan setelah tahun 2021 pasca pandemi Covid 19 mengalami penurunan drastis.

Sedangkan untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melaporkan beberapa inovasi yang dikelola oleh perangkat daerah/unit kerja dilingkungan pemerintahan dengan menghasilkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025, berada di kategori inovatif sebesar 60,65. Mengalami kenaikan sebesar 12,04 dibanding tahun 2024, tingginya kenaikan dikarenakan adanya tambahan indikator penilaian pada tahun 2025 sehingga secara keseluruhan nilai menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Kinerja Inspektorat pada Tahun 2025 menunjukkan adanya sedikit penurunan. Hal ini terlihat dari capaian Manajemen Risiko Indeks tahun 2025 dengan skor 2,734 menurun dari tahun sebelumnya dengan skor 0,010. Penurunan juga ditunjukkan oleh skor Maturitas SPIP yang capaiannya pada tahun 2025 hanya sebesar 2,930 menurun sebesar 0,005 dari tahun sebelumnya. Capaian dari indikator Kapabilitas APIP pada tahun 2025 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.

Pada indikator lainnya menunjukkan capaian yang sudah sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra/RPJMD. Indikator tersebut yaitu Cakupan penyelenggaraan pengawasan, Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan Cakupan pendampingan dan asistensi.

Kinerja fungsi pengawasan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Manajemen Risiko Indeks	Angka	2,081	1,378	2,40	2,744	2,734
2.	Maturitas SPIP	Level	3,0375	2,066	2,430	2,935	2,930
3.	Kapabilitas APIP	Level	3	2	2	3	3
4.	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	85	80	85,00	82	99,28
5.	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan	%	100	80	99	100	97
6.	Cakupan pendampingan dan asistensi	%	80	80	85,00	89	100
7.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	79,78	3,93	3,92	3,85	3,88

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pemalang, 2026

Data tersebut menunjukkan kinerja pengawasan internal yang secara umum cukup baik, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada periode 2021–2025. Indeks Manajemen Risiko dan maturitas SPIP cenderung meningkat hingga 2024, namun sedikit menurun di 2025, yang menunjukkan penguatan tata kelola risiko dan pengendalian intern meski belum sepenuhnya stabil. Kapabilitas APIP juga sempat menurun pada 2022–2023, tetapi kembali meningkat ke level 3 pada 2024–2025.

Cakupan penyelenggaraan pengawasan relatif stabil dan meningkat signifikan menjadi 99,28% pada 2025. Tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan sebagian besar tinggi, meskipun sempat turun di 2022 dan sedikit menurun kembali di 2025. Selain itu, cakupan pendampingan dan asistensi menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 100% pada 2025, menandakan peran pembinaan yang semakin optimal. Sementara itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan skala nilai antara tahun 2021 dan tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pengawasan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, terutama dalam cakupan layanan dan penguatan fungsi pengawasan, meskipun masih perlu peningkatan konsistensi pada beberapa indikator.

g. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kinerja kecamatan di Kabupaten Pemalang secara umum ditunjukkan oleh 8 (delapan) indikator. Namun untuk 4 (empat) kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan dan Comal ditunjukkan oleh 9 (sembilan) indikator, dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani

Pengaduan masyarakat bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan kekurangan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 2.112.
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%) Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	100	100	100	100	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	100	100	100	100	100
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	100	100	100	100	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	100	100	100	100	100
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	100	100	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan, 2026

b. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Adapun capaian indikator ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113.
Persentase Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan (%) Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
2	Warungpring	23,33	23,33	23,33	23,33	37,5
3	Pulosari	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4	Belik	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Watukumpul	80	100	100	70	70
6	Bodeh	70	70	70	70	70
7	Bantarbolang	76,67	74,00	100	100	100
8	Randudongkal	70	83,33	90	90	90
9	Pemalang	43,33	46,67	46,67	66,67	70
10	Taman	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
11	Petarukan	73,33	73,33	73,33	80	82
12	Ampelgading	63,33	70,73	87,72	87,72	87,74
13	Comal	50	100	100	100	100
14	Ulujami	66,67	66,67	100	100	88,86
	Rata-rata	57,97	71,05	74.36	74,12	74,72

Sumber: Kecamatan, 2026

c. Persentase pelayanan publik yang tersedia

Pelayanan publik yang tersedia di Kecamatan adalah penyediaan data dan informasi pemerintahan, pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pelayanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terhadap Camat.

d. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam musrenbang, agar aspirasinya dapat terserap dan pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.114.
Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (%)
Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	68,18	86,67	100	100	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	95	54	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	90	90	91	91	91
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	98	100	100	100	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	96	100	100	100	100
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	92,5	92,5	100	100	100
	Rata-rata	95,69	94,51	99.36	99.35	99.35

Sumber: Kecamatan, 2026

e. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi

Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui berbagai bentuk fasilitasi, seperti pembinaan, pendampingan, serta dukungan program dan kegiatan pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif dan berdaya dalam mendukung pembangunan di tingkat

kecamatan. Upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat. Adapun bentuk kelembagaan yang difasilitasi meliputi RT, RW, PKK, karang taruna, Posyandu, dan LPMD/K. Berikut Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi:

Tabel 2.115.
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi
Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	100	100	100	94	94,09
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	83,33	83,33	83,33	100	100
5	Watukumpul	80	100	100	100	100
6	Bodeh	83,33	83,33	83,33	93,67	93,67
7	Bantarbolang	16,67	16,67	16,67	94	100
8	Randudongkal	66,67	90	100	97	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	83,33	100	100	84	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	83,33	83,33	83,33	96	96
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	50	50	100	86	88
	Rata-rata	75,47	86,19	90.48	96,05	97,98

Sumber: Kecamatan, 2026

f. Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik

Indikator Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik menggambarkan tingkat kualitas infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dalam kondisi layak pakai. Indikator ini dihitung dengan membandingkan panjang jalan kelurahan yang berada dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan kelurahan secara keseluruhan, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di wilayah perkotaan. Perbaikan dan pemeliharaan jalan kelurahan terus dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas jalan lingkungan, rehabilitasi, serta penanganan titik-titik kerusakan secara bertahap.

Kondisi jalan yang semakin baik tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih layak, nyaman, dan produktif.

Tabel 2.116.
Persentase Jalan Kewenangan Kelurahan Kondisi Baik (%) Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pemalang	38,52	50,95	59	60	63
2	Taman	68	72	74	78	82
3	Petarukan	25	25	25	30	65
4	Comal	85	15	10	9	25
	Rata-rata	54,13	40,74	42	44,25	58,75

Sumber: Kecamatan 2026

Capaian indikator Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik tahun 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung membaik di akhir periode, dengan rata-rata yang sempat turun dari 54,13% (2021) menjadi 40,74% (2022), lalu meningkat bertahap hingga 58,75% pada 2025. Kecamatan Taman dan Pemalang menunjukkan peningkatan yang konsisten, sementara Petarukan mengalami lonjakan signifikan pada 2025 setelah sebelumnya stagnan. Sebaliknya, Comal mengalami penurunan tajam sejak 2022 meski mulai pulih di 2025. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur jalan di tingkat kelurahan, namun masih terdapat ketimpangan antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian ke depan.

g. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya ketentraman umum.

Tabel 2.117.
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	98	100	100	100	100	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100	100
6	Bodeh	97	100	100	100	100	100
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	98	100	100	100	100	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	95	100	100	100	100	100
13	Comal	100	100	100	100	100	100
14	Ulujami	100	100	100	100	100	100

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rata-rata	99,14	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan 2026

h. Jumlah potensi konflik

Konflik adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar, antar umat beragama) dan unjuk rasa (politik, ekonomi, agama) yang terjadi akibat perbedaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kecamatan.

Tabel 2.118.
Jumlah Potensi Konflik (kasus) Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	0	0	0	0	0	0
2	Warungpring	0	0	0	0	0	0
3	Pulosari	3	0	0	0	0	0
4	Belik	6	2	1	0	0	0
5	Watukumpul	0	0	0	0	0	0
6	Bodeh	0	0	0	0	0	0
7	Bantarbolang	0	0	4	0	0	0
8	Randudongkal	2	0	0	0	0	0
9	Pemalang	0	0	2	0	0	0
10	Taman	0	0	0	0	0	0
11	Petarukan	3	2	1	0	0	0
12	Ampelgading	0	0	0	0	0	0
13	Comal	0	0	6	0	0	0
14	Ulujami	0	2	2	0	2	0
	Jumlah	14	6	1,14	0	2	0

Sumber: Kecamatan, 2026

i. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik

Suatu desa dikategorikan bertata kelola pemerintahan baik apabila: (1) penetapan dokumen perencanaan desa tepat waktu, (2) ketersediaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (3) keterisian buku administrasi pemerintahan desa, (4) laporan keuangan desa yang tepat waktu, (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas sesuai ketentuan, (6) terjaganya ketentraman dan ketertiban.

Tabel 2.119.
Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik (%)
Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Moga	100	90	100	100	80
2	Warungpring	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33
3	Pulosari	75	98,67	75	100	100
4	Belik	75	76,92	76,92	83	84,61
5	Watukumpul	73,33	100	80	86,67	86,67

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
6	Bodeh	63,16	63,16	78,95	84,20	84,20
7	Bantarbolang	99,64	81,32	88,24	94,12	96,33
8	Randudongkal	88	88,89	88,89	95	95
9	Pemalang	53,84	61,53	76,92	84,62	92,31
10	Taman	47,36	47,36	47,36	42,85	52,63
11	Petarukan	80	96,26	97,50	87,69	84,21
12	Ampelgading	75	75	69,50	84,50	84,50
13	Comal	58,82	100	72,22	77,78	83,33
14	Ulujami	61,11	66,67	66,67	72,22	83,33
	Rata-rata	72,63	77,96	77.49	84	85,03

Sumber: Kecamatan 2026

Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025. Rata-rata kabupaten naik dari 72,63% pada 2021 menjadi 85,03% pada 2025, menandakan adanya perbaikan kualitas tata kelola desa secara umum meskipun sempat mengalami sedikit stagnasi pada 2023.

Beberapa kecamatan seperti Moga, Pulosari, dan Bantarbolang memiliki capaian tinggi dan stabil, sementara kecamatan seperti Taman dan Pemalang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari kondisi awal yang relatif rendah. Secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa berjalan cukup efektif di hampir seluruh kecamatan.

Peningkatan capaian persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik didorong oleh beberapa faktor utama:

- 1. pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah
- 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang membuat pengelolaan pemerintahan menjadi lebih tertib dan profesional;
- 3. pemanfaatan sistem pelayanan digital

h. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusifitas wilayah dapat diukur melalui jumlah konflik yang terjadi, baik konflik sosial maupun agama. Di tahun 2025 di Kabupaten Pemalang terjadi peristiwa Pegundan yang merujuk pada bentrokan antar-organisasi masyarakat (ormas) pada 23 Juli 2025 di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Meskipun masih terdapat konflik yang terjadi, namun konflik tersebut dapat tertangani. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120.
Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	0
2.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80,85	82	85	88	90
4.	Persentase masyarakat yang paham politik	%	50	50	55	60	65
5.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%	65	70	80	80	80
6.	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	%	64,94	65	65	70	75
7.	Jumlah konflik agama	kasus	0	0	0	0	0
8.	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	65	65	65	70	75

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Pemalang, 2026

Data menunjukkan kondisi yang sangat kondusif selama 2021–2025, tanpa adanya konflik sosial maupun konflik agama (0 kasus). Seluruh potensi konflik juga tertangani 100% setiap tahun. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terus meningkat, baik terkait ideologi Pancasila (capaian tahun 2021 sebesar 80,85% menjadi 90% pada tahun 2025), politik (capaian tahun 2021 sebesar 50% menjadi 65% pada tahun 2025), kewaspadaan konflik (capaian tahun 2021 sebesar 64,94% menjadi 75% pada tahun 2025), maupun ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya (capaian tahun 2021 sebesar 65% menjadi 75% pada tahun 2025). Pemahaman organisasi kemasyarakatan juga naik dan stabil di angka 80%.

Kondisi sosial selama 2021–2025 sangat stabil dan terkendali, ditandai dengan tidak adanya konflik serta penanganan potensi konflik yang optimal. Hal ini didukung oleh meningkatnya pemahaman masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai aspek kebangsaan, politik, dan kewaspadaan sosial, sehingga memperkuat ketahanan dan keharmonisan sosial secara berkelanjutan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pembahasan daya saing daerah pada bagian ini sangat terkait dengan bagian sebelumnya yang telah menjelaskan indikator dan capaian pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek pelayanan umum serta terkait dengan daya saing Kabupaten Pemalang.

Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), nilai IDSD Kabupaten Pemalang sebesar 3,63 turun 0,01 lebih rendah dari skor tahun 2024 sebesar 3,64

masih lebih tinggi dari skor nasional yaitu sebesar 3,50 dan lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah 3,87.

Empat komponen dasar daya saing yang menjadi kerangka pengukuran IDSD tahun 2025 adalah 4 aspek daya saing daerah yang merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah Kabupaten Pemalang yaitu: (1) Aspek

Lingkungan Pendukung yang didalamnya memuat pilar kelembagaan/institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro; (2) Aspek Sumber Daya Manusia yang dipengaruhi pilar kesehatan dan keterampilan; (3) Aspek Pasar/market yang memuat pilar pasar produk, tenaga kerja, sistem keuangan dan ukuran pasar; serta (4) Aspek Ekosistem inovasi yang memuat pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi.

Jika merujuk hasil pengukuran IDSD di tahun 2025, 2 skor pilar terendah daya saing Kabupaten Pemalang berada pada komponen pasar (pilar sistem keuangan = 2,25 ada kenaikan sebesar = 0,1 dari skor tahun 2024 sebesar = 2,15) dan ekosistem inovasi (pilar kapabilitas inovasi = 2,32 ada kenaikan sebesar = 0,32 dari skor tahun 2024 sebesar = 2,00). Dilihat dari data tersebut untuk 2 skor pilar terendah di tahun 2024 ada kenaikan walaupun belum signifikan ini menggambarkan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang tersalurkan kepada pelaku UMKM atau kelompok usaha dalam wadah koperasi belum maksimal yang dibuktikan dengan masih rendahnya nilai indikator Kredit Usaha Rakyat (KUR) per penduduk (skala 2). Adapun rendahnya aspek ekosistem inovasi didukung oleh rendahnya pilar kapabilitas inovasi (skala 2) yang disebabkan rendahnya indikator Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), Belanja Riset dan Indeks Keunggulan Lembaga Riset. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kekayaan intelektual produk atau inovasi yang dihasilkan, serta belum adanya lembaga riset di sektor industri/ lembaga/pemerintah menjadi penyumbang rendahnya nilai kapabilitas inovasi di Kabupaten Pemalang.

Pilar tertinggi yang mendukung daya saing daerah (berada di skala 4) adalah pilar institusi/kelembagaan(4,89), pilar adopsi TIK (4,80), pilar ukuran pasar (4,45) dan pilar kesehatan (4,08). Sedangkan pilar yang masuk kategori rendah (skala 2) adalah pilar sistem keuangan (2,25) dan pilar kapabilitas inovasi (2,32).

Dari gambaran tersebut di atas, bahwa Kabupaten Pemalang telah menciptakan dinamisme bisnis positif yang akan menjadikan Kabupaten Pemalang mampu berkompetitif dan produktif serta memperluas cakupan pasar, dengan didukung oleh institusi/kelembagaan yang kokoh dalam menetapkan aturan tertulis (kebijakan pemerintah) dalam mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Disamping itu Kabupaten Pemalang juga telah mengoptimalkan pemanfaatan IPTEK yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi karena berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi, mendorong efisiensi dan inovasi.

Berdasarkan data tersebut diatas, pilar yang masih memiliki skor rendah ini harus didorong potensinya melalui berbagai program kerja pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Pemalang. Sektor andalan atau potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pemalang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sektor pariwisata. Dengan keunggulan dua aspek yaitu

sumber daya manusia dan lingkungan pendukung diharapkan pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Pemalang dapat ditingkatkan. Sedangkan dua aspek lainnya, yaitu aspek pasar dan ekosistem inovasi harus mendapatkan perhatian untuk mendukung peningkatan sektor andalan.

Berikut adalah tabel capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitar, provinsi dan Nasional:

Tabel 2.121.
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar tahun 2025

	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		IDS D
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROVINSI JAWA TENGAH	4,77	4,54	4,02	4,30	4,16	3,63	2,07	2,94	2,36	5,00	3,97	4,68	3,87
KAB. PEKALONGAN	4,86	3,07	4,72	3,73	4,08	4,03	3,85	3,20	2,38	4,40	3,10	2,86	3,69
PEMALANG	4,89	3,16	4,80	3,43	4,08	3,43	3,93	3,11	2,55	4,45	3,43	2,32	3,63
KAB. TEGAL	4,90	3,47	4,68	3,85	3,93	3,58	3,63	3,27	2,08	4,59	3,19	3,03	3,68
BANYUMAS	4,92	3,56	4,85	3,95	4,11	3,71	4,01	3,15	2,42	4,80	3,63	4,29	3,95
PURBALINGGA	4,92	2,77	4,77	3,52	4,05	3,77	3,25	3,06	2,29	4,42	3,57	2,57	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sampai dengan tahun 2025, Kabupaten Pemalang telah melakukan inovasi daerah yang dikelola dan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun Indeks Inovasi daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 berada di kategori innovative (48,61) sebagai hasil penghitungan dari jumlah inovasi yang dilaporkan ke sistem Kemendagri di tahun 2025 (62 inovasi yang dikelola oleh 19 perangkat daerah dan 19 unit pelaksana teknis).

Berikut data inovasi daerah yang dikelola oleh 19 perangkat daerah dan 19 unit pelaksana teknis tahun 2025:

Tabel 2.122.
Data Inovasi Daerah tahun 2025

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
1.	LAPAK MURAH (Layanan Pajak Mudah, Sederhana dan Ramah)	Inovasi Pelayanan Publik	Mengelola anggaran, pendapatan, belanja, dan aset daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	Mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak
2	1. SAMBATSUNG (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Teknologi Langsung) 2. SIJEMPOL (Sistem Jemput Pelayanan Online)	Inovasi Pelayanan Publik	Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Membantu masyarakat dalam mengurus izin usaha
3	1. PELANDUK DESA (Pelayanan Adminduk di Desa) 2.MONG PUTU PLUS 3.MBOKE PLUS (Layanan Online Fasilitasi Dokumen Kependudukan dengan Fasilitas Kesehatan) 4.IKATAN CINTA (Layanan Kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang) 5.PUTUS CINTA (Layanan Kolaborasi dengan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Memberikan kemudahan akses terkait informasi dan aduan terhadap pelayanan administrasi kependudukan
4	WISATA PEMALANG (Platform Digital Wisata Pemalang yang Menyediakan Informasi Seputar Pariwisata di Kabupaten Pemalang)	Inovasi Pelayanan Publik	Pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan pembinaan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Keberlanjutan dari inovasi SIPRO adalah dengan menambahkan fasilitas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui aplikasi SIPRO
5	1.CETING KEPITING (Cegah Stunting dengan Kartu Kembang Anak Itu Penting) 2. HE FOR SHE (Gerakan Laki-Laki Melindungi Perempuan)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	Masyarakat terpenuhi dokumen dasarnya (Akta Kelahiran, KK dan KIA), jumlah pelayanan pengurusan adminduk melalui Calo semakin berkurang, masyarakat terjamin pemeliharaan dan perlindungan dalam kesehatan dasarnya dengan mempunyai Kartu JKN-KIS.

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
				Pemalang	
6	1.PONAKANE RADEN DAYAT (Pengendalian OPT Menggunakan <i>Drone Sprayer</i> dengan Pestisida) 2.BANG PONIRAS MINTA LAHAN (Pengembangan Produk Pupuk Organik Cair Tennas Melalui Pemanfaatan Limbah Pertanian) 3.Pupuk Organik KINAS O (Pupuk organik yang dibuat oleh kulit dan daun nanas) 4.HALLO DISPERTAN (<i>Website</i> Informasi dan Layanan Cepat Dinas Pertanian)	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan pertanian, produksi tanaman pangan, dan ketersediaan pangan masyarakat.	Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang	Manfaat yang diperoleh dari penggunaan <i>drone sprayer</i> adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian hama tanaman dengan tujuan agar proses penyemprotan pestisida menjadi lebih cepat, merata, dan aman sehingga petani di Kabupaten Pemalang dapat mengurangi risiko paparan bahan kimia, menekan biaya operasional, serta menjaga kualitas dan produktivitas hasil pertanian secara optimal.
7	1.SIBANGKONG PUAS BERSOLEK (Sistem informasi perkembangan barang kebutuhan pokok dan penting, pertokoan pupuk, ekspor, gas dan SPBU, bersinergi promosi dan melestarikan produk lokal) 2.E RETRIBUSI PASAR (Elektronik retribusi merupakan pungutan retribusi pasar secara elektronik) 3.LOTIS IKM (Layanan Konsultasi <i>Online</i> dan Otomatis IKM) Untuk Optimalisasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	1. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok 2. Mempermudah para pedagang dalam membayar retribusi 3. Sarana untuk menerima aduan/konsultasi masyarakat terkait usaha industri
8	SISIK IKAN (Sistem Informasi Produksi Perikanan)	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan produksi Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Membantu masyarakat dalam untuk memperoleh informasi serta meningkatkan produksi perikanan
9	SIMPANSE PLUS+ (Sistem Informasi Manajemen Penataan	Inovasi Pelayanan Publik	Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	OPD dapat mengirimkan surat dan <i>mentracking</i> surat/ berkas tanpa harus datang ke kantor Bupati/Sekda/OPD lainnya

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	Administrasi Surat Secara Elektronik Plus+)		perundangan	Pemalang	
10	1. NJUH SEKOLAH MANING (Gerakan Masyarakat Untuk Melanjutkan Sekolah Kembali) 2. GEMA PAUD (Gelem Maring PAUD) CAGAR BUDAYA GOES TO SCHOOL	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Menggugah minat masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang putus putus sekolah
11	SEMESTA 21 (Sistem Edukasi Berbasis Media Sosial dan Teknologi Abad 21)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	SMP Negeri 4 Pemalang	Sasaran utama Semesta 21 adalah untuk menciptakan siswa dengan kecakapan abad 21. Budaya baik dalam bersosial media harus ditanamkan sejak dini. Siswa harus menyadari bahwa sosmed tidak hanya berisi konten negatif akan tetapi sumber pengetahuan jika dimanfaatkan dengan baik. Kesadaran siswa akan fungsi sosmed melalui kurikulum operasional Semesta 21 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi.
12	SILARAS NULIS (Sistem Layanan Literasi dan Numerasi Berbasis Aplikasi <i>Slims</i> (Senayan <i>Library Management System</i>))	Inovasi Pelayanan Publik	Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	SMP Negeri 5 Pemalang	Untuk meningkatkan Kesadaran dan minat siswa akan fungsi sosmed dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi.
13	KLASIK (Kamis Literasi Asyek dan Kreatif)	Inovasi Pelayanan Publik dan pendidikan	Kesehatan	SMP Negeri 1 Belik	Untuk meningkatkan kreatif anak
14	PANTER PEMALANG (Pelaksanaan Pemantauan dan Himbauan Lalu Lintas Melalui <i>Traffic Control Center</i>)	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas, angkutan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian kendaraan bermotor (KIR), perparkiran, dan manajemen sarana prasarana transportasi lokal di wilayah kabupaten/kota	Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	Memudahkan pemantauan dan himbauan terhadap angkutan umum dan pengguna jalan lain.
15	1.SINTAR (Sistem Tata Ruang)	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan), sumber daya air,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terupdate terkait kondisi jalan maupun jalan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	2.SIJANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)		dan tata ruang wilayah.	Kabupaten Pemalang	
16	PINDAI SITAPAK (Pemberdayaan Intelijen dan Agen Informasi dalam Sistem dan Antisipasi Penanganan Konflik).	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta penanganan konflik sosial.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang	Memberikan manfaat utama sebagai sistem deteksi dini. Program ini melindungi masyarakat dengan menjaga keamanan, mencegah potensi konflik sosial, serta memperkuat kolaborasi
17	GERABAHKU (Gerakan Hibah Buku)	Inovasi Pelayanan Publik	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Memberikan terobosan penting untuk mengatasi keterbatasan koleksi buku daerah. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, antara lain: · Meningkatkan Akses Buku: Membantu pemerataan bahan bacaan dan literatur bermutu hingga ke pelosok desa dan taman bacaan masyarakat (TBM). · Mendukung Gerakan Literasi: Mengurangi dampak minimnya pengadaan buku tahunan pemerintah dengan partisipasi aktif dan gotong royong dari
18	LA LISA (Sistem Pengelolaan Pengaduan Gangguan Trantibum Lewat Layanan Informasi Digital)	Inovasi Pelayanan Publik	penegakan Perda, ketenteraman, dan ketertiban umum.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Memberikan manfaat utama bagi masyarakat dengan menghadirkan kemudahan pelaporan yang cepat, aman, dan transparan. Layanan berbasis digital ini memangkas jarak antara warga dan pemerintah, memastikan setiap aduan terkait ketertiban umum dan pelanggaran perda ditindaklanjuti
19	SIMPUL BAJA (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa)	Inovasi Pelayanan Publik tata kelola pemerintahan	mengampu urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pembinaan SDM, advokasi, hingga pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan sistem e-purchasing/katalog.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Memberikan manfaat utama dalam mempercepat proses lelang, menciptakan transparansi, dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintah. Sistem ini meminimalisir potensi penyimpangan melalui digitalisasi yang akurat.
20	1. SIPERKASA (Sistem Pelaporan	Inovasi Pelayanan Publik	Mengampu urusan administrasi	Bagian Tata Pemerintahan	Memberikan manfaat utama bagi masyarakat berupa kemudahan akses layanan administrasi, efisiensi waktu,

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	Kerja Sama dan Sinergi Daerah (berbasis digital)) 2. SIPEDAL GSP (Sistem Pengelolaan Data Laporan Kerja Sama Daerah menggunakan <i>Google Spreadsheet</i>) 3. SIP PATEN (Digitalisasi Pelaporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)		pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan kewilayahan, kerja sama daerah, dan pertanahan. Bagian ini bertanggung jawab membantu Sekretaris Daerah (Setda) dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas teknis terkait.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	dan peningkatan transparansi birokrasi.
21	1. SI CENDOL (Simplifikasi Cek Data Kepesertaan <i>Online</i> Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan) 2. PETIS PEMALANG (Pelayanan Terpadu Peserta JKN-KIS Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinsos KBPPA Kabupaten Pemalang) 3. LAKONE SARI BECAK (Layanan Konsultasi via <i>Video Online</i> bersama Puskesmas Rowosari dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Puskesmas Rowosari	Peserta JKN - KIS lebih cepat dalam kepengurusan data kepesertaannya Membantu masyarakat dalam kendala kepesertaan JKN-KIS (kartu tidak aktif, identitas salah) Manfaat yang sudah dirasakan oleh penerima manfaat (OPD/Masyarakat/pihak lainnya) 1. Bagi Masyarakat Peserta JKN – KIS lebih cepat mengurus kepesertaan Pelayanan kepengurusan data kepesertaan JKN – KIS lebih terjangkau Hemat biaya, waktu dan tenaga 2. Bagi Puskesmas Inovasi ini mendukung tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> di wilayah kerja Puskesmas Rowosari 3. Bagi Dinas Kesehatan/ Pemerintah Kabupaten Pemalang Inovasi ini berkontribusi mendukung tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> di Kabupaten Pemalang Masyarakat terpenuhi dokumen dasarnya (Akta Kelahiran, KK dan KIA), jumlah pelayanan pengurusan adminduk melalui Calo semakin berkurang, masyarakat terjamin pemeliharaan dan perlindungan dalam kesehatan dasarnya dengan mempunyai Kartu JKN-KIS. Pemantauan Bayi Dalam Kandungan Sampai dengan Si Buah Hati Lahir

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	4. SI BOLANG MAHIR PLUS-PLUS (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK dan KIA Plus JKN-KIS) 5. PETUALANGAN SI BOLANG MAHIR PLUS PLUS (Pemantauan Bayi Dalam Kandungan, Cek Stunting Sampai Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK dan KIA Plus JKN-KIS dan Sertifikat Imunisasi)				Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN - KIS & Sertifikat Imunisasi
22	1. KASUS (Kartu Anak Sehat untuk Siswa SD) 2. LALA TERSIPU (Pelayanan Lansia Terpadu Satu Pintu)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kesehatan	Puskesmas Sarwodadi	1. Meningkatkan gizi anak sekolah dasar 2. (Layanan Tertib dan Tuntas Administrasi Kependudukan) bagi masyarakat meliputi kemudahan akses pengurusan dokumen tanpa calo, efisiensi waktu karena proses yang lebih cepat, serta kepastian hukum dan perlindungan data kependudukan..
23	1. PRAP ADA TOP (Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, Anak Datang dan Tenang, Orang Tua Senang, Penyakit Hilang) 2. PUTRI BUAH HATI (Persiapan Untuk Remaja Putri menjadi Ibu Hamil Sehat Tanpa Anemia) 3. KASUARI MINGGAH PAMAN SENANG (Kehamilan Aman, Hati Berseri, Anemia Minggir, Dapat Hadiah, Persalinan Aman)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Kebondalem	1. Puskesmas ramah anak, karena difasilitasi tempat bermain yang ramah anak.) 2. Meminimalisir remaja putri dan calon pengantin putri menderita anemia sehingga bila kelak menjadi ibu hamil, 3. Manfaat yang Diharapkan a) Meningkatnya kepatuhan ibu hamil dalam minum tablet tambah darah. b) Menurunnya angka kekurangan darah selama kehamilan. c) Meningkatnya perawatan prenatal yang berkualitas. d) Peningkatan kesehatan ibu hamil dan janin. e).Persalinan Aman dan senang

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	dan Senang)				
24	GISELA CANDU (Gigi sehat lahir aman dengan pelayanan bumil terpadu)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Banjardawa	Ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya, sehingga mencapai derajat Kesehatan gigi yang optimal, menurunkan angka kelahiran prematur, mencegah stunting, meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi pada ibu hamil
25	APLIKASI GELANG ANTING (Penanggulangan Anak Stunting)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kesehatan	Puskesmas Losari	Manfaat inovasi ini meningkatkan pengetahuan ibu balita terhadap status gizi balita, balita stunting dapat terdeteksi dini, semakin cepatnya intervensi gizi untuk penanggulangan stunting, semakin luasnya persebaran informasi terkait stunting dan upaya pencegahannya. Setelah dilaksanakan, inovasi Gelang Anting telah memberikan dampak positif bagi kemudahan akses dalam mengetahui status gizi balita yang ditunjukkan dengan kondisi sebelum dan sesudah berbasis indikator kinerja sebagai berikut: 1. Ibu balita dulu tidak mengetahui status gizi balitanya, sekarang ibu balita dapat mengetahui status gizi balita tanpa bertanya dengan petugas kesehatan 2. Mendeteksi dini kasus berisiko stunting secara cepat 3. Inovasi ini juga memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan yang membutuhkan hasil status gizi secara cepat
26	KEMILAU CINTA LUNA (Kelas Ibu Hamil Andalan Utama Cegah Trauma Persalinan)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Karangasem	Ibu hamil dan keluarga akan mendapatkan pengetahuan lengkap seputar apa saja yang harus diketahui oleh seorang ibu hamil. Mulai dari gizi seimbang ibu hamil, persiapan menghadapi proses persalinan, perawatan pasca persalinan dan nifas hingga perawatan bayi lahir. Diajarkan pula senam hamil untuk ibu yang hamil dengan usia kandungannya 20-36 minggu (5-9 bulan)
27	1. SEGUDANG CINTA (Skrining Edukasi Pencegahan Stunting Pada Pasangan Calon Pengantin Bersertifikat Kawin) 2. SATE KEBUL (Pemeriksaan Kesehatan Dan Edukasi Kepada yang Berulang Tahun)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Paduraksa	Memberikan manfaat luar biasa dengan memangkas waktu tunggu, meniadakan antrean panjang, dan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pintu. Hal ini menciptakan akses yang transparan, efisien, dan merata bagi seluruh warga
28	SING PENTING AE (Saluran Ilmu Ning)	Inovasi Pelayanan	Kesehatan	Puskesmas Bantarabola	Melalui grup Whatsapp, Ibu Hamil lebih mudah mengetahui informasi

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	Grup Pencegahan Stunting ASI Eksklusif)	Publik		ng	tentang stunting, pentingnya ASI Eksklusif dan kehamilan lebih terpantau oleh dokter, bidan dan tenaga kesehatan.
29	CINTA YANDU (Cegah Kematian Ibu Dan Balita Dengan Pelayanan ANC Terpadu)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Watukumpul	(Cinta Posyandu) memberikan kemudahan akses kesehatan dasar terintegrasi, mempercepat deteksi dini masalah kesehatan (terutama ibu dan balita) melalui pendekatan siklus hidup, serta memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
30	1. PELAYANAN ONE STOP SERVICE (Satu layanan cepat dan profesional untuk lansia dan penyandang disabilitas) 2. LIDAH SERASI (Lengkapi Imunisasi Dasar dapat Sertifikat Imunisasi) 3. KOPI TUBRUK (Kolaborasi Pemeriksaan Terintegrasi Tuberculosis)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Mulyoharjo	Manfaat dan Dampak Inovasi: 1. Bagi masyarakat : pasien lanjut usia dan penyandang disabilitas memperoleh akses yang lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Bagi Puskesmas Mulyoharjo : a. Meningkatkan pengelolaan pengendalian penyakit bagi pasien lanjut usia dan penyandang disabilitas b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Mulyoharjo 3. Bagi Kabupaten Pemalang : Mendukung misi pertama Kabupaten Pemalang yaitu mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat secara berkesinambungan. 4. Bagi Negara Indonesia : mewujudkan nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
31	SAMPER BU MILA (Bersama Perhatikan Ibu Hamil Dan Melahirkan)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Jatiroyom	Ibu hamil akan merasa nyaman menjalani persalinannya karena pendukung persalinan sudah terencana dan siap menjelang persalinannya (usia kehamilan 36 minggu) 1. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran, Masyarakat di luar sasaran dapat berpartisipasi aktif yaitu kader kesehatan yang dapat membantu inovasi ini dalam rangka meminimalisir kemungkinan yang tidak diharapkan. 2. Aspek tata pemerintahan, Pemerintah desa lebih memahami warganya yang akan bersalin ketika ada warga yang meminta surat keterangan dari desa bila warga tidak memiliki kartu jaminan kesehatan apapun sehingga desa dapat mengusulkan kepesertaan jaminan kesehatan bila memungkinkan.
32	GARDU SANTIBI (Gerakan Aku Perduli Pemberantasan	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Warungpring	(Gerakan Terpadu Sehat Aman dan Tertib Ibu dan Bayi) membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak. Program ini berfokus pada

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	OPD/Unit	Gambaran/ Manfaat Inovasi
	<i>Tuberculosis)</i>				pendekatan terpadu untuk menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu/bayi, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga.
33	PENTOL MBAH MUS (Pelatihan Pertolongan dan Manajemen Bantuan Hidup Dasar pada Masyarakat Umum dan Sekolah)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Randudongkal	Memberikan manfaat dengan menghadirkan pemeriksaan kesehatan proaktif, kemudahan akses layanan medis, dan penurunan angka penyakit kronis. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
34	JAMILLA ASIEK (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan Dan Melaksanakan ASI Eksklusif)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Mojo	Puskesmas ramah anak, karena difasilitasi tempat bermain yang ramah anak.
35	PELABUHAN BIRU YANG TERBUANG (Pelayanan Laboratorium Ibu Hamil Dan Anak Bisa Di Rumah Teruntuk Ibunda Tersayang)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Puskesmas Kalimas	
36	EPSS MANDIRI (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mandiri-Ajang Penilaian Indeks Pembangunan Statistik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)	Inovasi Pelayanan Publik	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	(Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) memberikan manfaat utama bagi masyarakat berupa jaminan kebijakan publik yang tepat sasaran, peningkatan kualitas layanan masyarakat, dan kemudahan dalam mendapatkan data yang akurat dan transparan.
37	SIMPENRUSA (Sistem Informasi Rusunawa)		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	(Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Rusunawa) di Kabupaten Pemalang memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat melalui pendaftaran sewa rusunawa yang dilakukan secara <i>online</i> , transparan, dan terintegrasi
38	SITIRTA <i>Mobile</i> (Layanan Yang Berbasis Informasi, Pengaduan dan Pembayaran)		Perusahaan Umum Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia	Memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam mengakses layanan air bersih secara praktis dan transparan langsung dari genggaman.

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Pemalang, 2026

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB menurut lapangan usaha atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selebihnya merupakan lapangan usaha dengan kontribusi kurang dari 6,5

persen yang bergerak di bidang jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta sektor lainnya.

Tahun 2025 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB (atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Pemalang, yaitu sebesar 25,51%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,14%; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,33%; serta lapangan usaha lainnya yang berkontribusi kurang dari 6%. PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang memiliki produktivitas hasil pertanian yang besar dan dijadikan lumbung pangan terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 13,32% atau sebesar 173,40 ribu jiwa menurun dibanding tahun 2024 sebesar 14,92% atau sebesar 194,20 ribu jiwa. Perlu upaya lebih optimal dalam penanggulangan kemiskinan. Sinergitas dan Data dasar penduduk miskin yang akurat berdasarkan updating data secara periodik sebagai penentu kebijakan yang tepat sasaran.

Kabupaten Pemalang bersama 16 kabupaten lain masuk dalam prioritas penanganan **kemiskinan ekstrem** tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah. kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 0,38%. Kemiskinan ekstrem ini menjadi permasalahan kita bersama, untuk itu perlu sinergitas semua pihak (stakeholder) dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. Upaya penanganan kemiskinan ekstrem sudah dilakukan berupa intervensi di 8 (delapan) fokus penanganan yaitu pemenuhan kebutuhan RTLH, jamban, listrik, air dan penanganan secara tuntas untuk penderita stunting dan disabilitas serta penuntasan ATS melalui gerakan Njuh Sekolah Maning. dengan harapan bisa mencapai target nasional dimana kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada tahun 2025.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dalam pembangunan daerah dijabarkan dalam urusan pekerjaan umum (dan penataan ruang) dan perhubungan.

Hasil penilaian untuk seluruh infrastruktur di Kabupaten Pemalang diperoleh persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) menunjukkan kenaikan dari 75,05 % di tahun 2024 menjadi 79,08 % di tahun 2025. Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestic sebesar 99,45% di tahun 2024 dan menurun menjadi 95,72 % di tahun 2025. Indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2024 hanya sebesar 51,77 % kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 55,33 %. Cakupan akses air minum yang layak pada Tahun 2025 sebesar 91,04 % meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 88,48 %. Capaian rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani di Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 60,85% (42.709 unit) meningkat dari tahun 2024

sebesar yang hanya sebesar 32,13%. Perlu upaya optimal untuk meningkatkan capaian layanan infrastruktur dalam kondisi keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta membuka jejaring multipihak perlu dilakukan.

Terkait dengan fasilitas wilayah yang mendukung transportasi orang maupun barang, kinerja urusan perhubungan difokuskan Rasio Konektivitas yang pada tahun 2025 capaiannya sebesar 73,64% meningkat dari Tahun 2024 sebesar 71,42%. Capaian indikator Level of Service (V/C) ratio tahun 2025 sebesar 0,37 menurun dari tahun 2024 sebesar 0,38. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kinerja lalu lintas di Kabupaten Pemalang sehingga tingkat kepadatan lalu lintas juga menurun.

Kondisi terminal di Kabupaten Pemalang secara umum terdapat 9 terminal telah memiliki fasilitas utama dengan kondisi layak. Namun kondisi “layak” tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Upaya peningkatan fasilitas terminal terus dilakukan.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Optimalisasi kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan sosial kemasyarakatan serta promosi (*roadshow*) dan keikutsertaan dalam event-event pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional.

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi maka kondusifitas wilayah dapat diukur melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal kondusifitas wilayah yang dapat mencerminkan kepastian hukum, dilihat dari penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan jumlah konflik. Di Tahun 2025, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100% dan tidak terjadi konflik baik konflik sosial maupun agama dikarenakan potensi konflik yang ada dapat terselesaikan 100%.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2025, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 83,16 masuk pada kelas kategori Sedang. Evaluasi SAKIP Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 sebesar 68,42 (B) sedangkan pada tahun 2025 sebesar 68,88. Jika dilihat dari kinerja investasi, peningkatan investasi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten selama periode 2021–2025. Setelah tumbuh sebesar 3,13% pada tahun 2021, persentase peningkatan investasi terus meningkat menjadi 4,64% pada tahun 2022, 9,73% pada tahun 2023, 11,67% pada tahun 2024, dan mencapai 14,67% pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan berbagai upaya untuk menarik investor, antara lain dengan melakukan promosi (*roadshow*) dan keikutsertaan dalam *event-event* pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor dan mempermudah perizinan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan dan dukungan

kondusifitas social. Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) telah meningkatkan pelayanan penanaman modal secara terpadu dengan capaian persentase terselenggaranya perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebesar 100% pada tahun 2025.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan, mengingat perannya sebagai motor penggerak sekaligus subjek dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam konteks Kabupaten Pemalang, tantangan bonus demografi serta perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari derajat kesehatan masyarakat, yang salah satunya tercermin melalui usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, aspek kebugaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi capaian makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025, IPM mencapai 69,47, meningkat sebesar 0,82 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 68,65. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Komponen ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan, dari Rp10.017 ribu per orang per tahun pada 2024 menjadi Rp10.521 ribu per orang per tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang erat kaitannya dengan kapasitas pendapatan rumah tangga. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,61 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,63 persen. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

a) Pendidikan.

Beberapa permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Pemalang masih menjadi perhatian, khususnya terkait capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2025, HLS Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 12,03 tahun, meningkat tipis dibandingkan tahun 2024 sebesar 12,02 tahun. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 13,05 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama pendidikan yang diharapkan ditempuh penduduk Pemalang masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan HLS erat kaitannya dengan ketersediaan dan daya tampung satuan pendidikan di setiap jenjang. Oleh karena itu, peningkatan rasio antara

jumlah sekolah dengan jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan menjadi faktor penting. Lulusan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu dapat tertampung secara optimal di jenjang Sekolah Dasar (SD), lulusan SD ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta lulusan SMP ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dalam rangka mendukung pencapaian wajib belajar 13 tahun.

Selain itu, peningkatan peran serta sekolah swasta menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi keterbatasan daya tampung satuan pendidikan. Keterlibatan sekolah swasta diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, mengurangi potensi angka putus sekolah, serta mendorong pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebesar 6,69 tahun meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 6,56 tahun. Untuk meningkatkan Rata-rata Lamanya Sekolah perlu ditingkatkan upaya mengentaskan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pemalang. Jumlah Anak tidak sekolah di Kabupaten Pemalang 12.540 anak dan sejumlah 6.403 (Usia 7-18 tahun) sudah kembali ke sekolah. Melalui kolaboratif dan sinergitas para pemangku kebijakan terkait dan stakeholder dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) “NJUH SEKOLAH MANING” diharapkan permasalahan ATS di Kabupaten Pemalang dapat ditangani. Dalam hal Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan capaian yang tergolong masih rendah, yaitu masih ada 15,47% anak usia PAUD belum mengikuti pendidikan PAUD, masih ada 4,23% anak usia SD/SMP belum mengikuti pendidikan SD/SMP/ sederajat.

b) Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan capaian usia harapan hidup (UHH). Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Tahun 2025, UHH Kabupaten Pemalang sebesar 74,55 meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 74,23, namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,25 namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan nasional sebesar 74,47. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia juga ditandai dengan masih adanya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Di tahun 2024 AKI mengalami kenaikan dari sebesar 45,14/100.000KH pada tahun 2023 menjadi sebesar 49,95/100.000 KH. Pada tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,18/1.000 KH atau sejumlah 151 kasus menjadi sebesar 5,94/1.000 KH atau sejumlah 119 kasus. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami penurunan menjadi sebesar 4,85 per 1.000 kelahiran hidup (KH). Pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 7,02 per 1.000 KH. Untuk persentase balita stunting turun sebesar 0,21 dari 10,30% pada tahun 2024 menjadi sebesar 10,09% di tahun 2025 . Sedangkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal ditandai oleh Indeks Keluarga Sehat

Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 0,24 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat (0,80).

c) *Tenaga kerja*

Aspek tenaga kerja dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemalang Tahun 2025 sebesar 6,61% menurun jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 6,63%. Namun demikian ini terus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyediakan fasilitasi peningkatan kompetensi keterampilan para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pemalang saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mengadakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi. Melalui ini, pencari kerja dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) terakreditasi. Urusan ketenagakerjaan perlu ditangani secara lebih intensif melalui pendekatan kemitraan berbasis komunitas. Kemitraan dengan asosiasi pengusaha dan organisasi profesi di Kabupaten Pemalang memiliki potensi besar dalam meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan juga perlu dioptimalkan untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta memastikan kepesertaan perusahaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja.

d) *Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak*

Komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sampai saat ini belum dirilis oleh BPS. sedangkan pada tahun 2024 IPG Kabupaten Pemalang sebesar 87,14 sama seperti tahun sebelumnya. Upaya dalam mencapai kinerja IPG yang baik di Kabupaten Pemalang perlu terus ditingkatkan baik dalam proses pendataan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender, sehingga tidak ada kesenjangan hasil pembangunan di Kabupaten Pemalang baik dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, akses pembangunan dapat dirasakan oleh semua penduduk baik laki-laki dan perempuan.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari persentase keterlibatan

perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Implementasi kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pemalang yang terlihat dari Indikator Persentase kelembagaan PUG yang aktif di tahun 2025 sebesar 74,00%. Pada tahun 2025 Perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah sebesar 2,22%. Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus dilakukan untuk dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender utamanya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Pemalang.

Upaya Perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan partisipasi anak dalam pembangunan juga harus dilibatkan. Anak sebagai investasi Sumber daya manusia masa depan perlu diperhatikan tumbuh kembangnya dengan baik, hal ini tentu terwujud dalam lingkungan yang layak untuk anak mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 161 atau sebesar 72,19% desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang dinyatakan layak anak, belum semua Desa di kabupaten Pemalang layak anak, ini menjadi tantangan untuk mewujudkan semua Desa yang layak anak.

e) Budaya peningkatan minat baca (Literasi), dan pengembangan Pemuda dan Olahraga

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari karakter masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai budaya, nilai agama di Kabupaten Pemalang. Pembangunan sumber daya manusia bisa terus dilakukan melalui pendidikan karakter yang dikembangkan di tingkat Pendidikan anak usia dini (PAUD). Budaya minat baca (literasi) di masyarakat juga tidak kalah penting menjadi salah satu alat ukur terkait peningkatan kualitas SDM. Pada Tahun 2024 sebesar 35,86% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 35,05%, hal ini disebabkan semakin meningkatnya minat baca masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakses internet (selain media sosial, sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar tahun 2024 sebesar 45,12% capaian mengalami penurunan dikarenakan masih belum tercukupinya koleksi bahan pustaka. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan kajian survey yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dan seberapa besar tingkat kegemaran membaca masyarakat, survei ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.

Kinerja pengembangan pemuda kepemudaan dan olah raga yang belum optimal, masing perlu dukungan, dorongan dan motivasi pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri, mencetak atlet pemuda yang berprestasi di tingkat regional dan nasional, serta mendorong pemuda untuk menjadi wirausaha kreativitas dan inovatif.

f) Pangan

Selama Tahun 2020-2025, skor PPH Kabupaten Pemalang sebesar 92,6 di Tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 97,95 di Tahun 2025 masuk dalam kategori baik. Jumlah ketersediaan cadangan pangan di tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 17,526 ton dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,72 ton. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya akumulasi sisa cadangan pangan Tahun 2024 sebanyak 12,446 ton yang ditambah dengan pengadaan cadangan pangan pada Tahun 2025 sebanyak 5,080 ton, sehingga total cadangan pangan yang tersedia pada Tahun 2025 mencapai 17,526 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,750 ton telah disalurkan untuk penanganan daerah terdampak bencana pertanian di 11 desa, yaitu Desa Blendung, Desa Bongas, Desa Pesantren, Desa Pegongsoran, Desa Kertosari, Desa Warungpring, Desa Bulakan, Desa Kuta, Desa Beluk, dan Desa Mereng.

Ke depan, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang akan melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kreativitas dan efektivitas implementasi program guna mendorong peningkatan capaian kinerja program secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan, energi dan protein cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah perlu terus dioptimalkan melalui penguatan aspek ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan keamanan pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Selain itu, promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman perlu ditingkatkan secara konsisten guna mendorong kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih sehat.

Penguatan kelembagaan pangan daerah juga perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang tangguh (resilien), adaptif, serta mampu mengantisipasi dan merespons berbagai potensi risiko, termasuk bencana alam maupun gangguan pasokan pangan.

e. Arah Pembangunan Wilayah

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-

- Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, kawasan pengembangan industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo- Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati-Rembang, dan Cilacap;
 3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng-Serayu-Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung – Tuntang – Serang – Lusi – Juwana (Kab. Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
 - c. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
 - d. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu - Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong, meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
4. WP Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti, meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor, meliputi: Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
8. WP Keburejo, meliputi: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo
9. WP Gelang Manggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
10. WP Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang adalah sebagai berikut:

1. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:

Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: bawang merah, padi, cabe, perikanan tangkap dan budidaya).

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan tangkap cukup besar dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan.

Penggunaan alat tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan, keselamatan, dan produktivitas usaha penangkapan ikan.

Jenis alat tangkap ramah lingkungan yang digunakan nelayan di Kabupaten Pemalang antara lain Purse seine, Payang, Gillnet, dan Pancing. Purse seine digunakan untuk menangkap ikan pelagis secara selektif dengan metode melingkari gerombolan ikan. Payang banyak digunakan nelayan tradisional dan relatif tidak merusak habitat perairan. Gillnet memiliki tingkat selektivitas berdasarkan ukuran mata jaring sehingga dapat mengurangi tertangkapnya ikan yang belum layak tangkap, sedangkan Pancing merupakan alat tangkap yang sangat selektif terhadap ikan target.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang terus melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan guna mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan memberikan manfaat dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap, menjaga ekosistem perairan, mengurangi tangkapan sampingan (bycatch), serta meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan nelayan.

2. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:

- Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038, setiap wilayah di Kabupaten Pemalang memiliki potensi dan karakter yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, selain itu beberapa wilayah harus tetap dilindungi dan dipertahankan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, antara lain:

- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah.
- b. pembangunan prasarana daerah.
- c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
- d. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah.
- f. pengembangan industri; pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir.
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dan pengembangan kawasan strategis daerah.



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Gambar 2.42.
Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada WP Bregasmalang

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah

Tabel 2.123.
Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka	77,00	76,78	72,49	94,41	94,14		Lingkungan Hidup
		1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,97	84,92	75,11	88,44	88,39		Lingkungan Hidup
		2	Indeks Kualitas Air	Indeks	76,35	75,85	75,14	99,06	98,41		Lingkungan Hidup
		3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,37	63,32	63,08	99,62	99,54		Lingkungan Hidup
		4	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	195,258	197,758	192,700	97,44	98,69		DPPKP
		5	Backlog Rumah	Unit	15.000	16.812	12.673	75,38	84,49		DPPKP
		6	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	77,32	69,48	51,62	74,29	66,76		DPPKP
		7	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha tertangani	%	32,20	31,4	31,20	99,36	96,89		DPPKP
		8	Indeks pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	100	100	100	100	100		DPPKP
		9	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas	%	84	80	0	0	0		DPPKP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
			izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan								
		10	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	★	DPPKP
		11	Indeks Resiko Bencana	Indeks	94,31-90,87	100,33-104,72	97,49	95,33	103,37	★	BPBD
		12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,83	0,8	0,8	100	96,39	➡	BPBD
2	Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	85,00	77,33	83,16	107,53	97,83	➡	Sekretariat Daerah
		1	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	35,5	35	39,39	112,54	110,96	★	Sekretariat Daerah
		2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	Nilai	35,5	35	39,39	112,54	110,96	★	Sekretariat Daerah
		3	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	35,5	35	39,39	112,54	110,96	★	Sekretariat Daerah
		4	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	85,9395	84,3770	84.377	100	100	★	Bapperida
		5	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	75	75	65,89	87,85	87,85	🚧	BPKPAD
		6	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks	3,0	3,0	2,60	86,67	86,67	🚧	BPKPAD

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		7	Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	70	70	55,56	79,37	79,37		BPKPAD
		8	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	20	18,909	18,26	96,57	91,30		BPKPAD
		9	Indeks Integritas Nasional	%	75	69,97	69.39	99,17	92,52		Inspektorat Daerah
		10	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	100,00	100,00		Inspektorat Daerah
		11	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	100	15,7	5,25	33,44	5,25		Kecamatan Petarukan
		12	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	82,34	17,65	17,65	100	21,44		Kecamatan Comal
		13	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	85	62	66,69	107,56	78,46		Kecamatan Ampelgading
		14	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	100	57,89	47,37	81,83	47,37		Kecamatan Bodeh
		15	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	88,88	33,33	38,88	116,65	43,74		Kecamatan Ulujami
		16	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	100	23,53	23,52	99,96	23,52		Kecamatan Bantarbolang
		17	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	82,25	65,50	88,78	135,54	107,94		Kecamatan Randudongkal

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		18	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	100	33,33	33,33	100	33,33		Kecamatan Warungpring
		19	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	40	20	20	100	50		Kecamatan Moga
		20	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	58,33	16,67	16,67	100	28.58		Kecamatan Pulosari
		21	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	38,46	7,70	15,39	199,87	40,02		Kecamatan Belik
		22	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	26,67	20,00	20,00	100	74,99		Kecamatan Watukumpul
		23	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	100	61,54	92,31	150	92,31		Kecamatan Pemalang
		24	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	31,57	21,05	31,57	149,98	100		Kecamatan Taman
		25	Indeks Desa	%	78,18	69,50					Dinpermasdes
		26	Indeks Pemerintah Digital (SPBE)	Indeks	3,7	3,2	3,37	105,31	91,08		Diskominfo
		27	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,20	2,59	NA	NA	NA		Diskominfo
		28	Nilai Domain Layanan	Indeks	4,7	4,2	NA	NA	NA		Diskominfo
		29	Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	3,8	2,4	NA	NA	NA		Diskominfo
		30	Indeks Profesional ASN (IPA)	Nilai	78,4	78,3	-	-	-		BKPSDM
		31	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	325,5	273,0	-	-	-		BKPSDM
		32	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,40	78,30	-	-	-		BKPSDM
		33	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	89,92	88,67	-	-	-		BKPSDM
		34	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	93,00	90,75	91,59	100,93	98,48		Disdukcatpil

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		35	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	85,52	80,52	NA	NA	NA		Sekretariat DPRD
3	Indeks Daya Saing Daerah			Angka	4,10	3,70	3,63	98,12	88,54		
4	Pertumbuhan Ekonomi			%	7,80-8,29	4,14-4,90	5,80	140,09	74,35		Sekretariat Daerah
		1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,95	81,49	71,10	87,25	82,72		Distanparik
		2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,2	6,2	6,77	91,58	76,80		Distanparik
		3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	96,24	97,95	101,78	97,95		Distanparik
		4	Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB	%	25,05	25,05	25,51	101,83	101,83		Distanparik
		5	Produktivitas tanaman pangan (padi)	kw/ha	62,46	62,15	61,84	99,50	99,01		Distanparik
		6	Produktivitas hortikultura (nanas)	kw/ha	741,79	741,42	1.320,21	178,07	177,98		Distanparik
		7	Produktivitas perkebunan (kopi)	kw/ha	22	15	1,146	7,64	5,21		Distanparik
		8	Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras	kg	4.691.230	4.671.940	5.968.670	127,76	127,23		Distanparik
		9	Total Produksi Perikanan	Ton/ Tahun	41.613	37.690	39.448	104,66	94,79		Distanparik
		10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	77	72	72,81	101	94,56		DPUPR

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		11	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	77,5	65	94,88	145,97	122,43	★	DPUPR
		12	Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum	%	71,68	60,54	61,19	101,07	85,37	↔	DPUPR
		13	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	★	Satpol PP
		14	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	★	Satpol PP
		15	Jumlah Kasus Kebakaran	%	102	90	93	103,33	91,18	➡	Satpol PP
		16	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15	15	15	100	100	★	Satpol PP
		17	Rasio Konektivitas	%	73,22	71,72	73,64	102,68	100,57	★	DPPKP
		18	VC Rasio	Rasio	0,33	0,38	0,37	102,70	89,18	↔	DPPKP
		19	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,25	0,2	-9,67	-4835,00	-3868,00	↔	Diskumdag
		20	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,41	2,91	2,29	78,69	42,33	↔	Diskumdag
		21	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,03	17,58	15,33	87,20	85,02	↔	Diskumdag
		22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,61	1,56	1,3	84	82	↔	Diskumdag
		23	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	34,72	32,22	21,78	62,73	67,59	↔	Diskumdag
		24	Nilai Ekspor	\$	449.917.368	352.522.031	83.637.313	23,72	18,58	↔	Diskumdag
		25	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,75	4,54	4,66	102,6	98,10	➡	Diskumdag

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		26	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	6,9	6,48	6,4	98,77	92,75		DTKPT
		27	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	1,23	0,86	-9,6	-11,16	-780,49		Disparbud
		28	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	%	15,54	4,24	0	0	0		Disparbud
		29	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	13,25	12,00	14,67	122,25	110,72		DPMPTSP
		30	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7,8	7,07	7,07	100	90,64		Bakesbangpol
		31	Konflik SARA	Kasus	0	0	0	100,00	100,00		Bakesbangpol
5	Indeks Pembangunan Manusia			Angka	73,20	69,75	69,47	99,60	94,90		Sekretariat Daerah
		1	Indeks Pendidikan	Indeks	1,00	0,79	0,55	69,62	55		Dindikpora
		2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	62,07	62,07	NA	NA	NA		Dindikpora
		3	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,255	0,255	NA	NA	NA		Dindikpora
		4	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,70	87,45	87,71	100,30	100,01		DinsosKBPP
		5	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,35	0,38	0,380	100,00	108,75		DinsosKBPP
		6	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Utama (900)	Nindya	734,68 (Nindya)	100,00	100,00		DinsosKBPP
		7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,18	1,23	1,21	98,37	102,54		DinsosKBPP
		8	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jiwa	2,10	2,12	2,14	100,94	101,90		DinsosKBPP
		9	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	67,32-67,41	63,60-64,81	62,77	98,69	93,24		DinsosKBPP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
		10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPKB)	Angka	69,10	65,10	64,30	98,77	93,05		DinsosKBPP
		11	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75	75,50	74,55	98,74	98,42		Dinkes
		12	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	9	10	10	100,00	90,00		Dinkes
		13	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	110	120	123	97,56	89,43		Dinkes
		14	Prevalensi stunting	%	17,75	19,00	10,09	188,30	175,91		Dinkes
		15	Angka populasi bebas penyakit menular	%	64	24	12	50	18,75		Dinkes
		16	Angka populasi bebas penyakit tidak menular	%	80	60	96	160	120		Dinkes
		17	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,5	59,5	91,01	152,96	117,43		Dinkes
		18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65	53	14,88	28,08	22,89		Dinperpuska
		19	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	71,25	65,4	61,67	94,30	86,55		Dinperpuska
		20	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,22	58,32	74,27	127,35	105,77		Dinperpuska
		21	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	53,65	29,27	75,6	258,28	140,91		Dinperpuska
		22	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	26,63	21,76	21,14	97,15	79,38		Disparbud
		23	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	50,61	51	100,77	83,60		Bapperida

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target RKPD 2025	Realisasi Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status	OPD
6	Tingkat Kemiskinan			%	11,51-10,45	14,31-13,64	13,32	102,40	86,41	➡	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengangguran Terbuka			%	5,47-5,17	6,89	6,61	104,23	78,21	➡	DTKPT
		1	Persentase Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	75,00	68,00	72,90	107,21	97,20	➡	DinsosKBPP
		2	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100	100	100	100,00	100,00	★	DinsosKBPP
		3	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100,00	100,00	★	DinsosKBPP
		4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,41	72,6	71,97	99,13	96,72	➡	DTKPT
		5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	28,73	27,39	63,18	230,67	219,91	★	DTKPT

Keterangan:★:telah tercapai (≥100%), ➡ akan tercapai (90% ≤ 99%), ➡ perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029
OPD Kabupaten Pemalang, 2026
LPPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah diukur melalui capaian 7 indikator kinerja. Terhadap target akhir RPJMD posisi ketujuh indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**, yaitu indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan manusia, dan indeks kualitas lingkungan hidup;
2. Terdapat 4 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks daya saing daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

Dari 3 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang belum mencapai target akhir RPJMD karena masih terdapat berbagai permasalahan pada tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian IRB tahun 2025 sebesar 83,16 masih di bawah target RPJMD sebesar 85,00 akibat belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi, rendahnya maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, belum terintegrasinya basis data antar perangkat daerah, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya berbasis digital. IPM tahun 2025 sebesar 69,47 juga belum mencapai target RPJMD sebesar 73,20 karena masih tingginya angka putus sekolah, banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS), rendahnya rata-rata lama sekolah, serta belum optimalnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, IKLH tahun 2025 sebesar 72,49 masih di bawah target RPJMD sebesar 77,00 yang disebabkan oleh rendahnya kualitas lahan, belum optimalnya pengelolaan sampah, keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta tekanan lingkungan akibat banjir, longsor, abrasi, dan perubahan iklim.

Sebanyak 4 indikator dengan status **perlu upaya keras**, yaitu Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks daya saing daerah (IDSD), dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang belum mencapai target akhir RPJMD karena masih adanya tantangan pada kualitas ekonomi dan daya saing daerah. Tingkat kemiskinan tahun 2025 masih sebesar 13,32% akibat belum meratanya kesejahteraan dan perlindungan sosial yang belum optimal, sedangkan TPT sebesar 6,61% dipengaruhi terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. IDSD tahun 2025 sebesar 3,63 juga menurun dibanding tahun 2024 karena rendahnya inovasi, sistem keuangan, dan daya saing industri daerah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80% belum sepenuhnya berkualitas karena masih bergantung pada sektor primer, industri pengolahan dan pariwisata belum optimal, serta belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk IKU Perangkat Daerah diukur melalui capaian 105 indikator kinerja. Terhadap target akhir RPJMD posisi ke-105 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 33 indikator kinerja dengan status **telah tercapai**.
2. Terdapat 25 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**.

- 3. Terdapat 41 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**.
- 4. Terdapat 6 indikator kinerja yang belum tersedia datanya untuk capaian tahun 2025.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.124.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	87,50	74,84	85,53	74,87	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,86	99,18	99,42	100,24	99,56	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,41	90,44	87,66	96,93	89,08	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	41,11	20,61	18,25	88,56	44,40	
	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 Penduduk	0,75	0,73	0,74	98,67	98,67	
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100,00	100,00	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	99,96	99,96	99,96	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	96,15	96,15	96,15	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100,00	100,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00	

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	98,23	98,23	98,23	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	99,82	99,82	99,82	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	98,28	98,28	98,28	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	87.81	87.81	87.81	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	17,50	15,00	4,5	30	25,71	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	%	1,0	0,50	0	0	0	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73,50	71,00	72,6	102,25	98,77	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air	%	91,50	88,80	91,04	102,52	99,49	

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota							
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100,00	97,50	95,72	98,17	95,72	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	85,71	74,29	72,86	98,08	85,01	
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	84,79	77,29	78,09	101,04	92,08	
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	35,00	16,00	14,07	87,94	105,26	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	95	70	100	142,86	73,68	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Ha	32,20	31,40	31,20	99,36	96,89	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	22,68	30,52	72,98	239,12	321,78	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	57,80	34,86	34,86	100	60,31	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN							

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	MASYARAKAT							
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	100,00	★
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100,00	100,00	★
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100,00	100,00	★
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100,00	100,00	★
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100,00	100,00	★
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	75,00	100	133,00	100,00	★
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	100,00	100,00	★
	SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	100,00	★
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100,00	100,00	★
	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	80	80	100	80	🔴➡️
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	4,60	5,5	6,4	100	100	★
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	28,73	45,78	63,18	100	100	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	100	26,35	33,84	100	33,84	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	75,98	72	71,67	99,53	94,32	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,7	5,6	2,68	47,86	47,02	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100,00	100,00	100,00	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	0,02	0,02	Belum Rilis	-	-	-
	PANGAN							
1	Persentase Cadangan Pangan	%	7,58	7,58	87,63	100	100	
	PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	84	80	0	0	0	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	50	0	0	0	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	50	0	0	0	

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	★
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	84	80	80	100	95,24	➡
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	77,00	76,78	72,49	94,41	94,14	➡
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	88,97	86,47	60,82	70,34	68,38	➡
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65	65	25	38,46	38,46	➡
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,91	99,91	99,23	99,32	99,32	➡
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	70,00	60,00	70,44	117,40	100,63	★
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,20	99,20	99,15	99,95	99,95	➡
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	90,00	73,00	76,92	105,37	85,47	➡
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	65,47	50,66	0	0,00	0,00	➡
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	81,13	81,13	81,13	➡
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Indeks	2,10	2,12	2,14	99,07	98,13	➡
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive</i>	%	71,25	70,75	71,05	100,42	99,72	➡

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	<i>Prevalence Rate/ MCPR)</i>							
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	9,18	9,68	9,34	96,49	101,74	★
	PERHUBUNGAN							
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	%	73,22	71,72	73,64	102,68	100,57	★
2	V/C ratio	rasio	0,33	0,38	0,37	102,70	89,19	↔
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	★
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	73	37	83	224,32	113,69	★
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	37	30	81	270	218,92	★
	KOPERASI DAN UKM							
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	94	43	35,35	82,20	37,60	↔
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	34,72	32,22	21,67	67,59	62,41	↔
	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	13,25	12,00	14,67	100	100	★
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,060	0,035				
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	38,80	38,66				
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	65	60				

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	★
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	★
	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	39	34	35	102,94	89,74	↔
	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	100	100	100	★
	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	71,25	65,40	61.67	94,30	86,55	↔
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65,00	53,00	14.88	28,08	22,89	↔
	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	83,54	70,44	74.63	105,95	89,33	↔
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	41,80	16,67	33.74	202,40	80,72	↔
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	Ton/Tahun	41.613	37.690	39.448	100	94,80	➡

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	90	90	89,47	99,41	99,41	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	1,20	0,86	-5,62	-653,48	-468,3	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,50	35,47	46,35	100	100	
	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun							
	padi	kw/ha	62,46	62,15	61,84	99,50	99	
	kopi	ton/ha	2,2	1,5	1,15	76,67	52,27	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	6	6	15	100	100	
	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	100	100	80	80	80	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	95,58	95,58	95,58	
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	9,28	7,87	4,88	62	52,58	
	PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	6,90	6,48	1,58	27,78	22,90	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	47,3	46,8	31,03	66,30	65,60	

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	10	-	-	-	
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	125	125	100	80	80	
	TRANSMIGRASI							
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	-	30	20	66,67	-	
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	100,00	100,00	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	65	52	36.88	70,92	56,74	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	75	58	55.5	95,69	74,00	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	80	70	14.39	20,56	17,99	
	KEUANGAN							
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	23,25	24,50	24,94	100	100	
2	Rasio PAD	%	20	18,909	14,05	74,30	70,25	
3	Rasio belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	70,00	71,25	71,44	100	100	
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-3,50	-4,88	-0,2	5	5,71	

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2025-2029	Target 2025	Realisasi Capaian RKPD 2025	Tingkat Capaian RKPD s/d 2025 (%)	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2025 (%)	Status
6	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	2	5	-12,35	100	100	★
7	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	★
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,0	10,5	11	100	100	★
	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	47,29	45,29	53	117,02	112,07	★
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,67	14,17	21	148,20	125,97	★
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,94	23,44	25	106,66	96,38	➡
	PENGAWASAN							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	2,995	2,945	2,930	99,49	97,83	➡
2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	100,00	100,00	★

Keterangan:★:telah tercapai (≥100%), ➡akan tercapai (90% ≤ 99%), ➡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Sumber: LPPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapat 1 indikator dengan akan tercapai, yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 99,56%;
- 2. Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat partisipasi PAUD, pendidikan menengah pertama dan pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan belum representatifnya fasilitas pendidikan yaitu masih ada bangunan sekolah yang kondisinya tidak baik sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan sebaran guru yang belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 14 IKK **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapat 7 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi; persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; dan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.
- 2. Terdapat 6 indikator dengan status akan tercapai yaitu Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; dan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pemalang masih berorientasi pada paradigma sakit sehingga kegiatan kuratif masih menjadi prioritas yang harus dicukupi dan kegiatan preventif masih kurang mendapatkan perhatian.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 9 IKK **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut:

- 1. Sebanyak 1 indikator menunjukkan status telah tercapai yaitu Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.
- 2. Sebanyak 4 indikator menunjukkan status capaian akan tercapai. Indikator tersebut meliputi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi; Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota; Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota

3. Sementara itu, 4 indikator lainnya masih perlu upaya keras untuk bisa mencapai target. Indikator tersebut mencakup Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota, Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota, Rasio kepatuhan IMB kab/kota, Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 IKK **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, serta Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.
3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 7 IKK **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat** diketahui semua indikator telah mencapai status telah tercapai yaitu persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, jumlah warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hal ini disebabkan masih minimnya sarana, prasarana dan SDM bencana/kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengingat luasnya cakupan bencana/kebakaran dan Kabupaten Pemalang termasuk daerah resiko tinggi bencana

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Sosial** adalah 2 indikator dengan status telah mencapai target yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan tingkat capaian sebesar 100%. Serta indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100% pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 IKK **Urusan Tenaga Kerja** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Capaian ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri yang

- mensyaratkan sertifikat kompetensi sebagai dasar penempatan di perusahaan serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja baik melalui pelatihan, pembinaan, maupun sosialisasi produktivitas.
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota, yang nilai capaiannya sebesar 94,32%. Terdapat beberapa kendala dalam menempatkan tenaga kerja, antara lain:
 - Minat pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada di perusahaan;
 - Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
 - Sebagian besar pencari kerja masih labil dalam bekerja sehingga sering keluar masuk perusahaan;
 - Kecenderungan kebutuhan perusahaan pada gender tertentu.
 3. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sebesar 80% serta dan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) sebesar 33,84%.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten sebesar
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 2,52%
3. Terdapat 1 indikator dengan belum diketahui realisainya yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD yang baru mencapai 2,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah belum optimal, baik dalam penyusunan program maupun alokasi anggaran pada perangkat daerah. Selain itu, komitmen dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender masih perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi IKK **Urusan Pangan**, yakni persentase cadangan pangan menunjukkan status telah tercapai. Realisasi cadangan pangan mencapai 87,63% dari target sebesar 7,58% sehingga capaiannya 100%. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut adalah adanya akumulasi sisa cadangan pangan Tahun 2024 sebesar 12,446 Ton yang ditambah dengan pengadaan cadangan pangan yang tersedia mencapai 17.526 Ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,750 Ton telah disalurkan penanganan daerah terdampak bencana pertanian di 11 Desa yaitu Desa Blendung, Desa Bongas, Desa Pesantren, Desa Pegongsoran, Desa Blendung, Desa

Kertosari, Desa Warungpring, Desa Bulakan, Desa Kuta, Desa Beluk, dan Desa Mereng.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. Serta Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota.

Pada IKK Urusan Lingkungan Hidup masih terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras karena pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH belum optimal, sehingga masih diperlukan penguatan pengendalian serta pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang juga belum optimal akibat keterbatasan kapasitas dan teknologi TPA, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta masih rendahnya cakupan pengelolaan dan pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Pemalang. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan lingkungan seperti darurat sampah, banjir, abrasi, dan perubahan iklim sehingga capaian indikator pengelolaan lingkungan hidup belum memenuhi target RPJMD.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 IKK **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 100,63%.
2. Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Perekaman KTP elektronik dan Kepemilikan akta kelahiran
3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** berupa persentase peningkatan status desa mandiri dan Persentase pengentasan desa tertinggal adalah perlu upaya keras. Hal ini disebabkan Dana Desa yang sedianya digunakan untuk pembangunan desa baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan sehingga terwujud kemandirian desa, sejak tahun 2020 difokuskan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga yang terdampak Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu TFR (Angka Kelahiran Total).
2. Terdapat 2 indikator dengan status akan keras, yaitu Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR) dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*). Dampak covid 19 dimana berkurangnya kemampuan penduduk untuk membeli alat kontrasepsi dan adanya pembatasan sosial sehingga penduduk tidak dapat ke

bidan atau fasilitas kesehatan untuk konsultasi maupun membeli/memasang alat kontrasepsi. Serta ASRF (15-49).

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Perhubungan** yaitu Rasio konektivitas kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 73,64% dari target 73,22% sehingga statusnya telah tercapai atau sebesar 100,57%. Sedangkan untuk indikator V/C ratio dari target 0,33 terealisasi 0,37 sehingga masih memerlukan upaya keras.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Komunikasi dan Informasi** menunjukkan hasil yang optimal, di mana seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan sehingga status capaiannya telah tercapai. Ketiga indikator tersebut meliputi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, kemudian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 2 IKK **Urusan Koperasi dan UKM** yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah perlu upaya keras dengan tingkat capaian 37,60% dan 62,41%. Hal ini disebabkan karena pada bulan Juni 2025, terdapat penambahan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) sejumlah 223 koperasi, sehingga jumlah koperasi aktif menjadi 478 koperasi. KDKMP merupakan koperasi baru sehingga belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di tahun 2025, dimana pelaksanaan RAT ini menjadi salah satu perhitungan dalam indikator koperasi berkualitas. Kemudian, kurangnya realisasi pada usaha mikro kecil yang terakses pada perizinan berusaha menjadi kendala dalam meningkatkan usaha mikro menjadi wirausaha.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian IKK **Urusan Penanaman Modal** yaitu persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota adalah sudah tercapai. Investasi di tahun 2024 sebesar 220.159.341.867 dan Investasi di tahun 2025 sebesar 252.451.320.096, sehingga hasil perhitungan menunjukkan angka realisasi sebesar 14,67%. Hal ini selaras dengan adanya upaya yang dilakukan antara lain:

- Melakukan kegiatan pameran investasi di luar daerah;
- Menyusun kajian potensi investasi di Kabupaten Pemalang; serta
- Melakukan pendampingan perizinan kepada pelaku usaha.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam menjaga sekaligus meningkatkan investasi adalah dengan meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha serta melakukan pameran investasi yang lebih baik.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pemuda dan Olahraga** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

yang disebabkan masih rendahnya kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi serta indikator peningkatan prestasi olahraga disebabkan tidak adanya event olahraga yang diselenggarakan akibat pandemi Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 2 IKK **Urusan Statistik** yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah tercapai dengan tingkat capaian dari kedua indikator sebesar 100%.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian IKK **Urusan Persandian** dengan indikator tingkat keamanan informasi pemerintah dengan realisasi 34% dengan target 39% sehingga capaiannya 87,18% dengan status masih perlu upaya keras. terjadi karena tingkat keamanan informasi pemerintah daerah belum optimal dalam mendukung perlindungan data dan sistem pemerintahan berbasis digital. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya penguatan tata kelola keamanan informasi, kesiapan infrastruktur keamanan siber, serta kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi. Selain itu, meningkatnya penerapan SPBE dan transformasi digital pemerintahan belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem keamanan informasi yang terintegrasi dan memadai sehingga capaian indikator baru mencapai 34% dari target 39%.

Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, status capaian IKK **Urusan Kebudayaan**, yaitu terlestariannya cagar budaya, telah tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan prinsip pelestarian cagar budaya yang meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Aspek perlindungan dilakukan melalui upaya pengamanan, pemeliharaan, dan pencegahan kerusakan terhadap objek cagar budaya. Sementara itu, aspek pengembangan diarahkan pada peningkatan nilai guna cagar budaya melalui kegiatan kajian, revitalisasi, serta penguatan fungsi edukasi dan budaya. Adapun aspek pemanfaatan dilakukan dengan mendorong pemanfaatan cagar budaya sebagai media pembelajaran, pengembangan pariwisata, serta penguatan identitas dan karakter daerah.

Dari 11 cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pemalang, berbagai upaya telah dilaksanakan secara konsisten, antara lain melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya, pelaksanaan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi fisik objek, serta penugasan juru pelihara sebagai ujung tombak dalam pengawasan dan perawatan di lapangan.

Ke depan, upaya pelestarian cagar budaya perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pengelolaan maupun keterlibatan masyarakat, agar keberadaan cagar budaya tetap terjaga, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Perpustakaan** adalah dengan status perlu upaya keras yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat disebabkan adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, masih terbatasnya sarana prasarana perpustakaan dan kelengkapan koleksi bacaan.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Kearsipan** dengan status perlu upaya keras yaitu tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban disebabkan pada tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban serta tidak ada penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi IKK **Urusan Kelautan dan Perikanan** yakni jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota menunjukkan tingkat capaian sebesar 94,80% dengan status akan tercapai. Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya pendangkalan muara alur pelayaran sehingga banyak nelayan yang tidak menjual hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta terjadinya rob mengakibatkan tambak gagal panen.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 3 IKK **Urusan Pariwisata** adalah sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2024 sebanyak 19 Orang, sedangkan kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 sebanyak 36 Orang. Hasil perhitungan menunjukkan hasil Realisasi tahun 2025 sebesar 89,47% dari target akhir sebesar 90%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,41% dengan status capaian akan tercapai. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, secara absolut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih relatif kecil, sehingga diperlukan penguatan promosi pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi, serta pengembangan event dan paket wisata yang berorientasi pada pasar mancanegara agar peningkatan kunjungan dapat lebih signifikan dan berkelanjutan.
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota. Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2024 sebanyak 1.159.223 Orang, sedangkan kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2025 sebanyak 1.094.054 Orang. Hasil perhitungan menunjukkan Realisasi tahun 2025 sebesar -5,62% dari target akhir sebesar 1,20%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar -468,3% dengan status perlu upaya keras. Belum tercapainya target kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang, yang ditandai tidak adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh keterbatasan event unggulan berskala besar, belum optimalnya promosi dan pemasaran destinasi secara terpadu, serta belum meratanya peningkatan kualitas daya tarik dan fasilitas pendukung pada destinasi wisata.
3. Tingkat hunian akomodasi menunjukkan status capaian sudah tercapai. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 303.315, sedangkan jumlah kamar yang terjual sebanyak 140.610. Hasil perhitungan menunjukkan Capaian tahun 2025 sebesar 46,35% dari target akhir sebesar 37,50%. Tingginya

capaian tingkat hunian akomodasi menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas akomodasi di Kabupaten Pemalang yang secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan akomodasi untuk berbagai keperluan, serta aktivitas ekonomi dan sosial yang berlangsung sepanjang tahun. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah, khususnya pada sektor jasa akomodasi.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi IKK **Urusan Pertanian** adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi). Pada tahun 2025 produksi padi sebanyak 4.398.460 kw, dengan luasan panen 70.972 hektar. Hasil perhitungan menunjukkan realisasi tahun 2025 sebesar 61,84% dari target akhir sebesar 62,46%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 99% dengan status akan tercapai.
2. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (kopi). Hasil perhitungan menunjukkan realisasi tahun 2025 sebesar 1,15% dari target akhir sebesar 2,2%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 52,27% dengan status perlu upaya keras.
3. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Hasil perhitungan menunjukkan realisasi tahun 2025 sebesar 15% dari target akhir sebesar 6%. Sehingga sudah tercapai sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya yang dilakukan untuk menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tersebut dengan percepatan vaksinasi dan pengobatan melalui kegiatan Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan (Yanduan) pada ternak sapi, kerbau, domba dan kambing.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Perdagangan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase kinerja realisasi pupuk dengan tingkat capaian sebesar 95,58%. Hal ini disebabkan oleh adanya petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi karena lahannya sudah beralih ke pengembang perumahan atau pabrik.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yakni Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan), dengan tingkat capaian 80%. dan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Realisasi di tahun 2025 sebanyak 1.736unit Alat UTTP. Hasil perhitungan menunjukkan realisasi sebesar 1,58% dari target akhir 6,90%. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 22,90%.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 4 IKK **Urusan Perindustrian** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator dengan status belum diketahui, yakni Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

2. Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini; pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian IKK **Urusan Transmigrasi** adalah perlu upaya keras. Persentase transmigran yang ditempatkan menunjukkan realisasi di tahun 2025 sebesar 20%. Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena perencanaan calon transmigran yang semula dialokasikan untuk 2 Kartu Keluarga menjadi 1 Kartu Keluarga setelah adanya perubahan lokasi Transmigran.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 4 IKK **Urusan Penunjang Sekretariat Daerah** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif; Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
2. Terdapat 1 indikator dengan status belum diketahui karena tidak tersedia data realisasi.

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 8 IKK **Urusan Penunjang Keuangan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yakni rasio PAD. Realisasi di tahun 2025 sebesar 14,05% dari target sebesar 18,90. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 70,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD masih menjadi tantangan utama, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Terdapat 7 indikator dengan status sudah tercapai, antara lain:
Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, rasio belanja urusan Pemerintahan Umum, opini laporan keuangan, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, manajemen aset, serta rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.

Capaian positif pada mayoritas indikator tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan secara akuntabel, efisien, dan sesuai regulasi. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penguatan strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, serta penguatan pengawasan dan penagihan, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Penunjang Kepegawaian** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan Rasio pegawai

Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- 2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Penunjang Pengawasan** adalah sebagai berikut :

- 1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebabkan evaluasi atas pengendalian intern belum dilakukan dengan dokumentasi yang memadai.

Capaian Program Unggulan

Tabel 2.125.
Capaian Program Unggulan Tahun 2025

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
1	Seragam Sekolah dan LKS Gratis	Pemberian seragam sekolah dan LKS gratis untuk siswa di tingkat SD dan SMP pada tahun ajaran baru	Rp3.173.760.000,00	Rp3.132.682.917,00	Pemberian seragam sekolah bagi 1.450 siswa SD dan 6.196 siswa SMP	Pemberian seragam sekolah bagi 1.450 siswa SD dan 6.196 siswa SMP	Dindikpora
2	Jalan halus merata	Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan	Rp140.868.163.300,00	Rp137.837.332.437,00	Pengadaan Paket pekerjaan Rekonstruksi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan: - 179 Paket jalan (67,85 km) - 7 Paket pekerjaan jembatan	Pengadaan Paket pekerjaan Rekonstruksi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan: - 179 Paket jalan (67,85 KM) - 7 Paket pekerjaan jembatan	DPUPR
3	Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Penambahan Sambungan Rumah	Rp6.458.296.900,00	Rp6.095.907.050,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wiyorowetan Kec. Ulujami dan Desa Pesucen Kec. Petarukan serta Peningkatan Air Baku Pulosari dan Peningkatan Sistem Penyediaan SPAM perpipaan di 17 lokasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wiyorowetan Kec. Ulujami dan Desa Pesucen Kec. Petarukan serta Peningkatan Air Baku Pulosari dan Peningkatan Sistem Penyediaan SPAM	DPUPR

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
					Desa di Kab. Pemalang	perpipaan di 17 lokasi Desa di Kab. Pemalang	
4	Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya	Pemeliharaan dan normalisasi sungai	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Padat karya Pemeliharaan dan normalisasi pada 16 sungai di Kab. Pemalang 14 Saluran sekunder/tersier di Kab. Pemalang	Padat karya Pemeliharaan dan normalisasi pada 16 sungai di Kab. Pemalang 14 Saluran sekunder/tersier di Kab. Pemalang	DPUPR
5	Bantuan modal usaha untuk UMKM	Memberikan pinjaman ke UMKM melalui PT LKMBKD (Perusda)	Rp1.100.000.000,00	0	Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM	- Penyertaan Modal untuk bantuan Modal UMKM ke PT LKM BKD masih dalam proses; - Belum ada pengajuan pinjaman modal dari UMKM ke LKM BKD karena masih menunggu proses penyusunan Perbup terkait Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Modal UMKM dan Perbup penugasan dari Pemda kepada LKM BKD	Diskumdag
6	Wifi gratis tiap desa	Pemasangan akses internet / wifi gratis di area publik Wifi gratis tiap desa	Rp544.416.000,00	Rp449.837.122,00	Pemasangan pada 212 Desa di Kabupaten	Pemasangan pada 212 Desa di Kabupaten	Diskominfo

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
		dialokasikan untuk abonemen dengan kapasitas 30 Mbps (WMS) – 50 Mbps (Up to)			Pemalang	Pemalang	
7	Satu ambulan satu desa	Pengadaan dan distribusi mobil ambulan desa yang diserahkan kepada desa	Rp6.130.830.800,00	Rp1.467.120.000,00	Pembelian ambulan desa untuk 16 unit di penetapan: 1. desa simpur kec. belik 2. desa bulakan kec. belik 3. desa gongseng kec. randudongkal 4. desa mandiraja, kec. Moga 5. desa plakaran kec. moga 6. desa klareyan kec. petarukan 7. desa karangasem kec. petarukan 8. desa kebagusan kec. ampelgading 9. desa wonogiri kec. Ampelgading 10. desa kebojongan kec. Comal 11. desa pesantren kec. Ulujami 12. desa padek kec. Ulujami 13. desa kertosari kec. Ulujami	21 unit mobil ambulan sudah terdistribusi	Dinpermasdes

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
					14. desa longkeyang kec. Bodeh 15. desa jatingarang kec. Bodeh 16. desa parunggalih kec. Bodeh dan ditambah penambahan 5 unit di perubahan (Daftar desa masih menunggu petunjuk pak bupati)		
8	Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah	Tersedianya bibit unggul dan distribusi pupuk yang merata dan lancar	Rp270.000.000,00	Rp249.448.000,00	Pengadaan benih padi genjah sebanyak 17.000 kg untuk lahan seluas 680 hektar. Jumlah tersebut terbagi atas: - 5.000 kg benih untuk 200 hektar lahan yang terbagi kepada 6 kelompok tani. (Anggaran Penetapan) - 12.000 kg benih untuk 480 hektar lahan yang terbagi kepada 22 kelompok tani. (Anggaran Perubahan)	Pengadaan benih padi genjah sebanyak 17.000 kg untuk lahan seluas 680 hektar. Jumlah tersebut terbagi atas: - 5.000 kg benih untuk 200 hektar lahan yang terbagi kepada 6 kelompok tani. (Anggaran Penetapan) - 12.000 kg benih untuk 480 hektar lahan yang terbagi kepada 22 kelompok tani. (Anggaran Perubahan)	Distanparik
9	Bantuan kendaraan operasional	Pemberian kendaraan operasional untuk Pondok	Rp1.520.000.000,00	Rp1.449.763.862,00	Delapan (8) unit mobil/kendaraan	Delapan (8) unit mobil/kendaraan	Setda (Bagian

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
	pondok pesantren	Pesantren yang memiliki peran penting dalam menjaga moral dan nilai-nilai di tengah masyarakat			operasional ponpes	operasional ponpes	Kesra)
10	Insentif untuk guru, TPQ, Madin dan Marbot	Pemberian hibah untuk insentif guru, pengajar lembaga pendidikan keagamaan islam dan petugas di lingkungan Masjid (Marbot)	Rp17.575.600.000,00	Rp8.247.900.000,00	a. Honorarium insentif non kategori, insentif K2 guru dan administrasi, pendidik PAUD, insentif honda, tenaga pendidik PKBM b. Hibah Kepada Kementerian Agama Kab. Pemalang untuk 3.675 guru pengajar keagamaan dan Rp90.000.000,00 untuk operasional kemenag c. Insentif untuk marbot sejumlah 950 orang dan Rp50.000.000,00 untuk operasional kemenag	a. Honorarium insentif non kategori, insentif K2 guru dan administrasi, sedangkan untuk insentif pendidik PAUD, hunda dan tutor PKBM belum diberikan karena ada temuan inspektorat b. Pencairan menggunakan skema Hibah Kepada Kementerian Agama Kab. Pemalang untuk 3.675 guru pengajar keagamaan dan Rp90.000.000,00 untuk operasional kemenag c. Insentif untuk marbot sejumlah 1.000 orang @	Dindikpora

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
						Rp1.000.000,00	
11	Santunan kematian Rp3.000.000,00	Santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 yang terdata pada desil 1-4 DT SEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ Pekerja Rentan. Program ini akan melibatkan Dinas Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas Tenaga Kerja untuk MBR/ Pekerja Rentan	Rp2.163.000.000,00	Rp1.608.000.000,00	Dengan mendasarkan pada data awal KPM PKH sejumlah 721 orang	Keluarga yang sudah diberikan santunan sampai dengan per 29 Desember 2025 sejumlah 536 orang (menggunakan desil 1 sampai dengan desil 5 DTSEN)	Dinsos
		Santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin pekerja rentan atau pekerja bukan penerima upah yang meninggal dunia yang terdata pada desil 1-4 DT SEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ Pekerja Rentan. Program ini akan melibatkan Dinas Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas Tenaga Kerja untuk MBR/ Pekerja	Rp1.621.812.740,00	Rp1.601.224.800,00	- Terlindunginya pekerja rentan usia 55-65 th yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/169/Tahun 2025 (11.635 Orang) dengan perlindungan dari bulan Mei 2025 - Sept 2025 - Kemudian terdapat perubahan dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/393/Tahun 2025	- Telah diberikan santunan kematian kepada 32 orang pekerja rentan usia 55-65 tahun (mei 2025 - Des 2025)Terdapat anggaran dari DBHCHT sebesar 1,007,848,800 untuk 6.845 Orang Petani Tembakau di luar anggaran APBD Murni)	DTKPT (pekerja rentan)

No.	Program Unggulan	Uraian	Anggaran		Kinerja		OPD Pengampu
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	
		Rentan			(12.342 orang) penambahan pekerja rentan yang terlindungi sebanyak 707 orang dari bulan Okt 2025 - Des 2025		
12	Pembukaan pintu tol Sewaka	a. Tahun 2025 koordinasi ke pihak terkait b. Tahun 2026 penyusunan kajian Feasibility Study (FS) c. Tahun 2027 penyusunan kajian penyesuaian / penentuan trase jalan d. Tahun 2028 penyusunan kajian pengadaan tanah e. Tahun 2029 penyusunan kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal). f. Tahun 2030 penyusunan kajian kelengkapan administrasi dan pengusulan	Anggaran Rutin Dinas	Anggaran Rutin Dinas	Pada tahun 2025 melaksanakan Persiapan pentahapan pengajuan pembukaan pintu tol: - Melaksanakan Rapat Koordinasi penyamaan persepsi - Melaksanakan kunjungan untuk peningkatan pemahaman	Melaksanakan Rakor dan Kunjungan ke: - Rakor bersama BPN Pemalang, DPUTR, Dishub dan Camat Pemalang - Rakor dan Kunjungan Tim kab. Pemalang ke PT. Pemalang Batang Toll Road Kab. Batang - Rakor dan Kunjungan Tim kab. Pemalang ke PT. Semesta Marga Raya kab. Cirebon dan Bappelitbang kab. cirebon	Bapperida bersama OPD terkait

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029;
LKPD Kabupaten Pemalang, 2025.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang periode 2025-2030, Pemerintah Kabupaten menetapkan 12 (dua belas) program unggulan yang merupakan upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Program unggulan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, secara umum capaian Program Unggulan Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada urusan infrastruktur, Program Unggulan Jalan Halus Merata melalui kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah terealisasi secara optimal, yang ditunjukkan dengan peningkatan kemantapan jalan serta konektivitas antar wilayah.
2. Program Unggulan Revitalisasi Penyediaan Air Bersih dari Hulu ke Hilir telah berkontribusi terhadap peningkatan akses air bersih bagi masyarakat di beberapa wilayah perdesaan.
3. Pada urusan pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah dan LKS gratis bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar telah terealisasi sesuai target, sehingga mendukung pemerataan akses pendidikan dan meringankan beban masyarakat. Namun demikian, pada Program Unggulan Insentif untuk guru, TPQ, Madin, dan Marbot belum terealisasi maksimal.
4. Pada sektor ekonomi, pelaksanaan Program Unggulan Bantuan Modal ke UMKM belum dapat direalisasikan secara optimal.
5. Pada aspek perlindungan sosial, Program Unggulan Santunan Kematian telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun capaian realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
6. Di sisi lain, pelaksanaan program inovasi pelayanan publik seperti penyediaan akses internet (wifi gratis) di desa serta pengadaan ambulans desa menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar dan aksesibilitas masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi dalam aspek pemerataan dan efektivitas pemanfaatan layanan.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan Program Unggulan Daerah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 9 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2025	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp.	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					262.31 1.532. 481,00		231.12 5.333. 600					
1	Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Non Formal/ Kesetaraan (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	%	100	74,84	74,84		76,73		74,84		74,84	74,84	↔
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	%	99,86	99,42	99,42		99,43		99,42		99,42	99,55	➡
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang 19,75berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	%	98,41	87,66	87,66		87,77		87,66		87,66	89,07	↔
5	Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	%	41,11	18,25	18,25		19,75		18,25		18,25	44,39	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					129.77 3.600, 00		100.00 0.000					
6	Persentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
7	Persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					405.12 0.413, 00		200.00 0.000					
8	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
9	Persentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★

Sumber : Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 9 indikator kinerja **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut :

- 1) Ada 5 indikator dengan status sangat telah tercapai, yaitu Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Non Formal/Kesetaraan; Persentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan (%); Persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal (%); Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (%); Persentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat (%).
- 2) Terdapat 3 indikator dengan status akan tercapai yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%); Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang 19,75 yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%); Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%).
- 3) Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%).

Dengan adanya alokasi Dana Alokasi Umum terarah bidang Pendidikan yang relatif besar alokasinya maka perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja dalam urusan Pendidikan utamanya 3 indikator program pengelolaan pendidikan yang capaiannya masih memerlukan upaya keras agar dapat mencapai target akhir RPJMD 2025-2029.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 17 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.127.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MASYARAKAT					4.195.045.115		132.297.243.660,00		125.581.442.514,00			
1	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	%	76,00	0,75	80,66		74,00		0,83		0,78	100	★
2	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	%	50	50	100		40,00		39,37		100	100	★
3	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	%	100	92,56	80,66		100		99,96		99,96	99,96	➡
4	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	%	100	98,4	100		100		94		94	94	★
5	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	%	100	99,58	100		100		99,36		100	100	★

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)												
6	Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV) (%)	%	100	68,44	69,02		100		99,89		69,02	69,02	↔
7	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	%	100	23,24	93,03		100		99,86		93,03	93,03	➡
8	Indeks SPM Kesehatan Keluarga	Indeks	100	36,81	60		100		98,23		60	60	↔
9	Persentase Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	%	100	34,93	92,68		100		99,82		92,68	92,68	➡
10	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Kesehatan sesuai Standar (%)	%	100	13,35	95,61		100		98,28		95,61	95,61	➡
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					166.122.2778.882		1.952.297.500,00		1.753.243.678,00			
11	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (rasio)	Per 100.000 Penduduk	200	194,23	75		198		198		85	131	↔
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					166.122.278.882		515.631.000,00		501,246.320,00			
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	%	78	Na	75		78		80		85	106,25	★
13	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan (%)	%											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.150.000		445.233.000,00		441.394.756,00			
14	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	%	100	100	75		100		100		100	100	★

Sumber: Dinkes Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 14 indikator kinerja **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, dari 14 indikator kinerja, terdapat 12 indikator dengan status sangat tinggi yaitu Rasio daya tampung RS; Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama) (%);Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil; Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin; Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase orang usia 15- 59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase warga negara usia > 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar; Persentase penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Rasio tenaga kesehatan per seratus ribu penduduk; Persentase sarana kefarmasian alkes dan PIRT yang memenuhi standar; Cakupan Desa Siaga Aktif.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status Sedang yaitu Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar,
- 3) Terdapat 1 indikator dengan status Sedang yaitu Indeks SPM Kesehatan Keluarga dan Rasio Tenaga Kesehatan

Alokasi pemberian Dana Alokasi Umum Terarah bidang Kesehatan belum efektif untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja agar semua indikator kinerja program bidang Kesehatan dapat tercapai.

3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan melalui capaian 10 program dengan 17 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.128.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN					137,83 7,332, 437		214,13 5.806. 879		5.713.4 80.250			
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kot a (%)	%	84,79	75,05	78,0 9		78,7 9		76,3 6		90,05	96,92	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.209 .715.7 73		4.944. 000.00 0		269.926 .166			
2	Persentase jaringan sumber daya air	%	30,67	28,74	14		29,2		25,1 7		82,06	86,20	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	dalam kondisi baik (%)												
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kot a (%)	%	17,5	14,93	4,5		15,50		4,5		25,71	29,03	↔
4	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kot a (%)	%	1	0,45	0		0,60		0		0	0	↔
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kot a yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	73,5	70,84	72,6		71,50		72,6		98,76	101,53	➡
6	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	%	59,60	51,77	55,33		55,12		55,33		92,84	100,38	➡
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.095.907.050		1.832.475.000		3.530.000			
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a (%)	%	91,5	88,48	91,04		89,32		91,04		99,50	101,92	➡
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	46,02	23,95	36,47		32,01		36,47		79,25	113,93	↔
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH					2.018.018.700		7.082.959.264,00		6.852.436.382,00			
9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	%	100	97,27	95,72		98		95,72		95,72	97,67	➡
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	62,77	54,13	49,55		57,17		0		0	0	↔

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					554.335.500		0		0			
11	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	%	76,97	76,62	80,01		76,69		80,01		103,94	104,33	★
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.619.870.275		6.160.000.000		16.150.000			
12	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik (%)	%	83	78	78,27		79		78,27		94,30	99,08	➡
13	Rasio Kepatuhan PBG (%)		91,43	71,43	72,86		80		72,86		79,69	91,08	↔
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					0		Rp. 500.000.000		Rp. 0			
14	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya(%)	%	100	48	48		60		48		48	80	↔
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					Rp. 769.184.663		Rp. 499.295.000		Rp. 13.565.300			
15	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Rp. 90.246.600		Rp. 120.000.000		Rp. 0			
16	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	%	35	1,32	1,32		18		14,07		40,20	78,17	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					Rp. 3.951.544.100		Rp. 1.759.875.000		Rp. 10.387.232			
17	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	%	43,16	25	36,84		33,89		36,84		85,36	108,70	↔

Sumber: DPUPR Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡ :akan tercapai (90% ≤ 99%), ↔:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 17 indikator kinerja **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, dan Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 2) Terdapat 6 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota, Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dan Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.
- 3) Terdapat 9 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik, Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota, Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Rasio Kepatuhan PBG, Persentase penataan bangunan dan lingkungannya, Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, dan Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.129.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					793.252.123		535.217.000		28.630.000			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	%	100	100	10		10		1		1	10	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	%	100	0	10		10		10		10	100	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)												
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					35.961.117		5.000.000		2.265.000			
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani (%)	%	32,2	31,2	0		1		1		3,10	100	➡
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					940.587.384		957.700.000		17.698.998			
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani (%)	%	77,32	32,13	0		87		0		0	0	➡
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					25.014.419.377		5.335.100.000		19.722.502			
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	57,8	27,52	0		55		0		0	0	➡
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					NA		NA		NA			
6	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (%)	%	100	100	NA		NA		NA		NA	NA	

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: 🟢:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%), ➡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 program yang tidak didanai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran sehingga diperlukan prioritas terhadap program-program yang dinilai paling mendukung pencapaian target kinerja utama.
- 2) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program

pemerintah kabupaten/kota; Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani, Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani, Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Hal ini terjadi diantaranya karena terdapat program yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 8 indikator yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Satpol PP dan BPBD sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.130.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPDPD 2025		Target RKPDPD 2026		Realisasi RKPDPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPDPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					126.223.993		1.785.640.000		219.818.900			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	%	100	100	12		166		41		41	24,70	
2	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara (%)	%	85	56	100		75		100		100	100	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					134,142,868		1.062.500.000,00		1.036.389.434,00			
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	%	41	35,3	100		80		112,75		62,86	94,46	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					921,924,000		2.501.300,00		2.466.031,00			
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	%	100	98	0,78		0,80		0,80		0,90	105,88	
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	%	100	100	100		95		100		100	105,26	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	dan evakuasi korban bencana (%)												
7	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
8	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi (%)	%	100	100	7,66		8,56		10,76		7,66	103,99	🔴

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2026
BPBD Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), 🔴:akan tercapai (90% ≤ 99%),
🔴:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi;
- 2) Terdapat 4 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dan Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan melalui capaian 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.131.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					382,586,600		642.085.000,00		641.772.648,00			
1	Persentase PMKS yang diberdayakan Persentase PSKS yang dibina (%)	%	40,13	16,07	100		32,11		32,11		80,01	100	🔴
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					300,000		9.633.270.000,00		9.409.878.766,00			
2	Persentase warga negara penyandang	%	100	0	100		68		100,00		100	100	★

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)												
3	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani (%)	%											
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,005,680,987		4.003.771.600,00		4.032.715.500,00			
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	17	100		28,49		28,00		196,07	100	★
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5,573,105,080		38,907.000,00		38.895.000,00			
5	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	%	28,51	28,45	99,95		100		100		350,94	350,57	★
6	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	%											
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					.62,369,600		33.915.000,00		33.915.000,00			
7	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial (%)	%	100	85	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					34.903.600		33.915.000,00		33.915.000,00			
8	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kot a yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	%	100	100	100		100		100		100	100	★

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta a)	K	Rp(juta a)	K	Rp(juta)			
	kabupaten/kot a (%)												
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kot a (%)	%											
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN												
10	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	%											

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: :telah tercapai, :akan tercapai, :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja

Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- 1)
- Berdasarkan tabel di atas, terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, 5 (lima) indikator dengan status Sangat Tinggi dan telah sesuai target akhir RPJMD Tahun 2021-2026. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Pemalang telah melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga potensi sumber kesejahteraan sosial di Kecamatan serta telah melakukan verval DTKS untuk pemberian jaminan dan perlindungan sosial. Selain itu, adanya peningkatan anggaran dari DAU Terarah untuk pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					6.754.500		48.972.000		2.407.000			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	80		100		0		0	0	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.143.994.512		1.320.910.600		108.385.412			
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,6	5,49	6,4		2,03		1,04		22,60	51,23	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.085.326.654		999.079.500		32.528.000			
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	75,98	71,74	71,67		73,13		88,19		116,07	120,59	★
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.979.274.945		300.000.000		32.797.700			
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	26,26	33,84		100		33,84		33,84	33,84	↔

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Tenaga Kerja** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.
- 2) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja; Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi; dan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					229,511,000		955.000.000,00		839.977.883,00			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase ARG	%	5,6	4,85	2,73		5,4		0		50,55	48,75	↔

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW 1 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	pada belanja langsung APBD (%)												
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					124,763,405		367.500.000,00		344.644.495,00			
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	%	100	100	100		100		0		100	100	★
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					144,684,742		440.500.000,00		436.557.108,00			
3	Persentase pernikahan usia anak Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (%)	%	4	5,32	5,6		4,5		5		82,10	94,73	➡
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					.19.000.000		14.500.000,00		14.450.000,00			
4	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak Persentase OPD yang memiliki data gender (%)	%	92,59	74,07	81,47		85,18		85		100	87,99	➡
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					115,359,000		405.500.000,00		383.536.480,00			
5	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	45,95	22,5	58,74		33,33		33		217,31	127,83	★
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					66,655,500		152.500.000,00		146.578.092,00			
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:★ :telah tercapai,➡ :akan tercapai,➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai yaitu: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak, dan Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota;
- 2) Terdapat 3 indikator program dengan capaian perlu upaya keras, yakni Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Persentase pernikahan usia anak Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan

pengembangannya, dan Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak Persentase OPD yang memiliki data gender.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.134.
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					299.78 0.000		123.70 0.000		0			
1	Persentase Cadangan Pangan	%	7,58	7,42	7,97		7,58		0		0	0	↔
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					641.05 1.812		501.70 0.000		6.063.5 00			
2	Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kapita /hari	2100	2263	221 7,9		210 0		0		0	0	↔
3	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/ kapita /hari	57	66,5	68,8 3		57		0		0	0	↔
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					49.073 .600		55.000 .000		0			
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	6,73	9,42	13,4 5		8,52		0		0	0	↔
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					17.560 .400		55.000 .000		27.880. 000			
5	Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	%	100	94,7	95		92		0		0	0	↔

Sumber : Distanparik Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai,↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja **Urusan Pangan** menunjukkan status perlu upaya keras, yaitu Persentase cadangan pangan, konsumsi energi per kapita per hari, konsumsi protein per kapita per hari, persentase daerah rentan rawan pangan, dan persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0		50.000.000		556.000			
1	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	%	84	78,5	78,5		2		0		0	0	↔
	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH					0		17.369.238.000		26.794.385			
2	Jumlah Fasilitas Pengadaan Tanah dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kab/Kota (%)	%	100	91,51	91,51		12		3		3	25	↔

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%),
↔:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 2 indikator kinerja **Urusan Pertanahan** adalah sebagai berikut :

- 1)
- Capaian Seluruh Indikator kinerja Urusan Pertanahan dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi, dan Jumlah Fasilitas Pengadaan Tanah dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu).

Capaian dari indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi masih perlu upaya keras karena belum optimalnya penyampaian informasi kepada stakeholder terkait dan lebih meningkatkan kinerja tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui capaian 8 program dengan 9 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.136.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Realisasi Capaian RPJMD s/d TW I 2026	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						274.654.940		98.972.000		3.195.250		
1	Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun (%)	%	100	66,67	100			100		100	100	100	★
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						780.204.407		364.899.050		29.487.360		
2	Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu (%)	%	70,83	100	54,17			54,17		54,17	76,48	100	🚗
3	Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu (%)	%	60,42	84,38	52,08			52,08		52,08	86,,19	100	🚗
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						76.769.900		1.192.800.000		5.759.550		
4	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Indeks	43,12	43,09	43,096			43,096		43,096	99,94	100	➡
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						17.684.430		5.000.000		0		
5	Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 (%0	%	45	18	25			25		25	55,56	100	🚗
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLA						16.184.500		23.700.000		2.059.000		

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Realisasi Capaian RPJMD s/d TW I 2026	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	AN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	%	65	68	65		65		65		100	100	★
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						256.249.560		192.402.000		1.732.250		
7	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	62	48	50		50		50		80,65	100	➡
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						4.948.000		5.000.000		1.476.500		
8	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						15.588.848.980		16.531.361.000		1.478.242.820		
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	85	80	26,51		32,81		32,81		38,6	100	➡

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%), ➡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 9 indikator kinerja **Urusan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:

- 1)
- Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun, Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

- kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, dan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti;
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai yaitu Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu, Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu, Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3, Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, dan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Permasalahan urusan lingkungan hidup masih menjadi perhatian diperlukan upaya yang keras untuk menangani permasalahan persampahan dan diperlukan komitmen bersama agar permasalahan persampahan dapat diselesaikan diharapkan sampah dapat langsung dikelola di TPA dan sampah dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah 75,14. Nilai ini mengindikasikan kualitas air Kabupaten Pemalang adalah “Sedang”. Nilai ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 48,33. Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah 75,11. Dengan demikian, maka hal ini mengindikasikan kualitas udara Kabupaten Pemalang adalah “Sedang”.

Hasil perhitungan angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah 63,08. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pemalang adalah “SEDANG”. kualitas lahan masih menjadi komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,49 lebih tinggi dari pada capaian pada tahun 2024 yang hanya sebesar 66,81.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.137.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPd 2025		Target RKPd 2026		Realisasi RKPd TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPd TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					138.800.000		81.689.000		80.106.120			
1	Perekaman KTP el	%	99,5	99,09	99,69		99,2		99,15		99,95	99,65	
2	Persentase anak usia 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	100	100	100		100		100		100	100	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
3	Cakupan penerbitan KK	%	100	100	100		100		100		100	100	★
4	Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					138.800.000		81.689.000		80.106.120			
5	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,5	99,09	99,69		99,2		99,15		99,95	99,65	➡
6	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100		100		100		100	100	★
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100		100		100		100	100	★
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					445.828.623		599.266.000		590.057.728			
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	%	87	71,79	71,79		73		76,92		105,37	88,41	★
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					46.307.000		37.748.000		36.512.000			
10	Persentase data profil kependudukan yang disusun (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ➡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, capaian realisasi kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator telah mencapai target RKPD Triwulan I Tahun 2026 dengan tingkat capaian sebesar 99,65 persen hingga 100 persen, bahkan terdapat indikator yang melampaui target yang ditetapkan. Terdapat 8 indikator program dengan status telah tercapai dan 2 program dengan status akan tercapai.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, indikator Perekaman KTP-el mencapai 99,15 persen atau sebesar 99,95 persen terhadap target RPJMD dan 99,65 persen terhadap target RKPD Triwulan I Tahun 2026. Sementara itu, indikator Persentase Anak Usia 0–17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA, Cakupan Penerbitan KK, dan Kepemilikan Identitas Kependudukan masing-masing telah mencapai 100 persen sehingga target RKPD Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sepenuhnya. Pada Program Pencatatan Sipil, indikator Kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 99,15 persen atau sebesar 99,95 persen terhadap target RPJMD dan 99,65 persen terhadap target RKPD Triwulan I Tahun 2026. Adapun indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan,

Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan, dan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan seluruhnya telah mencapai 100 persen. Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, indikator Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama mencapai 76,92 persen atau sebesar 105,37 persen terhadap target RKPD Triwulan I Tahun 2026 dan 88,41 persen terhadap target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan, indikator Persentase Data Profil Kependudukan yang Disusun telah mencapai 100 persen sesuai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 berada pada kategori sangat tinggi dan sebagian besar indikator berstatus telah tercapai. Kondisi ini didukung oleh optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan sistem informasi yang semakin baik, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan upaya menjaga konsistensi pelayanan dan peningkatan integrasi data kependudukan agar capaian target RPJMD Tahun 2025–2029 dapat dipertahankan secara optimal.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.138.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENATAAN DESA					335,228,600		1.600.784.000,00		1.599567.722,00			
1	Indeks infrastruktur desa		50,47	0,47	30,17		23,58		23,58		46,72	100	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					174,104,060		97.497.000,00		89.086.50,00			
2	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama (%)	%	77,73	36,49	64,61		63,98		63,98		82,31	100	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3,397,019,678		3.376.157.000,00		3.324.361.036,00			
3	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	50,47	0	18,87		23,58		23,58		46,72	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN					1,062,706,547		1.146.309.300,00		1.086.278.000,00			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	MASYARAKAT HUKUM ADAT												
4	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	%	48,59	15,61	34,07		34,83		34,83		71,68	100	➡

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: 🟢:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%),
➡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, capaian realisasi kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target RKPD Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100,00 persen. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, tingkat capaian masing-masing indikator masih berada pada kisaran 46,72 persen sampai dengan 82,31 persen sehingga secara umum masih memerlukan upaya keras agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Capaian indikator pada Program Penataan Desa, yaitu Indeks Infrastruktur Desa, mencapai 23,58 atau sebesar 46,72 persen terhadap target RPJMD. Pada Program Peningkatan Kerja Sama Desa, indikator Persentase Desa yang Melaksanakan Kerja Sama mencapai 63,98 persen atau sebesar 82,31 persen terhadap target RPJMD. Selanjutnya, pada Program Administrasi Pemerintahan Desa, indikator Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa mencapai 23,58 persen atau sebesar 46,72 persen terhadap target RPJMD. Adapun pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, indikator Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mencapai 34,83 persen atau sebesar 71,68 persen terhadap target RPJMD.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.139.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					10,507,872,894		9.662.363693,00		9.633.381.540,00			
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	%	33	35	25,23		34,0		0		74,20	76,45	➡
2	Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%											
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA					5,222,769,000		3.153.733.000,00		3.163.632.000,00			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	BERENCANA (KB)												
3	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR (%0	%	24	20,59	70,11		23,30		71,05		304,82	292,12	★
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1,577,759,500		1.577.551.725,00		1.574.434.700,00			
5	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif (%)	%	86,14	85,64	70,11		85,94		85,94		81,67	81,39	↔

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19), dan Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.140.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.447.817.701		20.924.320.200		4.613.029.118			
1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	%	68,21	66,34	210		191		61		89,43	31,94	↔
2	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,85	0,70	0,87		11		0		0	0	↔
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C (%)	%	71	65,36	16		16		3		4,22	18,75	↔
4	Persentase Kendaraan	%	82	76,4	13		19		9		10,98	47,37	↔

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	Yang Melakukan KIR (%)												

Sumber: DPPKP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Perhubungan** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 4 Indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota, Rasio Ijin Trayek, Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C, dan Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.141.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Realisasi Capaian RPJMD s/d TW I 2026	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1,659,435,263		2.425.000.000,00		2.380.824.289,00			
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota (%)	%	37	80	80		85		64		172,97	75,29	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3,692,199,089		3.049.994.000		3,692,199,089			
2	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika (%)	%	100	100	73		73		73		73	100	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	%	73	83	85		87		57		78,08	65,51	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Realisasi Capaian RPJMD s/d TW I 2026	Tingkat Capaian RKPD TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	dan terintegrasi (%)												

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Komunikasi dan Informatika** adalah sebagai berikut:
Capaian realisasi dari indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota sudah tercapai. Untuk 2 indikator sisanya status capaiannya perlu upaya keras yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika dan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui capaian 7 program dengan 7 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				NA			NA		NA			
1	Persentase Verifikasi syarat usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	%	100	NA			NA		NA		NA	NA	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					424.95 9.300		89.00 0.000		13.871. 750			
2	Persentase koperasi aktif	%	40,4	39,44	34		28		4		9,90	14,28	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP					0		6.000. 000					
3	Persentase Koperasi sehat	%	35,252	34,93	0		35		0		0	0	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN					583.91 5.600		330.0 00.00 0		40.446. 250			
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	21,4	21,29	21, 31		21,3 2		5,33		0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI					NA		NA		NA			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0,94	228,29	NA		NA		NA		NA	NA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					0		649.800		13.808.276			
6	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	%	3,72	NA	0		1,72		1,0		26,88	58,13	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.440.368.161		685.000.000		117.347.485			
7	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	172	169	30		170		133		77,32	78,23	↔

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 7 indikator kinerja **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 program yang tidak didanai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; serta Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran sehingga sehingga diperlukan prioritas terhadap program-program yang dinilai paling mendukung pencapaian target kinerja utama. Namun, indikator kinerja program tersebut tetap dapat diukur dan berkontribusi terhadap capaian kinerja perangkat daerah, meskipun tidak berdiri sebagai program tersendiri karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut diintegrasikan atau diakomodir dalam program lain yang relevan. Perlunya kecermatan agar di tahun 2027 program tersebut dapat teralokasikan anggaran sehingga dapat dilaksanakan.
- 2) Terdapat 5 indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu Persentase koperasi aktif, Persentase Koperasi sehat, Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan, Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan, dan Persentase Pertumbuhan UMKM.

Adanya inovasi yang dilakukan oleh Diskumdag Kabupaten Pemalang, yang dikenal dengan sebutan “LOTIS IKM”, merupakan sebuah forum tanya jawab yang dikelola secara otomatis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar IKM, mulai dari perizinan, fasilitasi pendaftaran merek, fasilitasi pengembangan usaha, akses permodalan sampai pelaporan data industri. Diharapkan dengan adanya hal ini, IKM di Kabupaten Pemalang tidak harus mendatangi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi, namun cukup mengakses LOTIS IKM.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					64.916.300		4.870.000		750.000			
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	107,37	- 3,45		100		41,93		41,93	41,93	↔
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					237.550.579		185.920.000		5.980.052			
2	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		25		25	25	↔
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					49.162.500		75.000.000		16.812.500			
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	100		100		25		25	25	↔
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					42.678.000		38.135.000		21.376.306			
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	83,33	100		100		25		25	25	↔
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					24.301.920		25.000.000		2.255.000			
5	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	%	100	100	100		100		25		25	25	↔

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:★ :telah tercapai,👉 :akan tercapai,↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja **Urusan Penanaman Modal** yaitu kelima indikator tersebut menunjukkan capaian dengan status perlu upaya keras, yaitu Realisasi total terhadap target investasi, Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan, Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, serta Persentase ketersediaan profil investasi sektor unggulan daerah. Hal ini disebabkan karena kegiatan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD TW I s/d 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD TW I s/d 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					492,090,656		1,358,000,000		35980000			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	58,82	47	267		221		50		22,62	85,01	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.282,903,200		1,765,000,000		178,136,000			
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	57,89	54,05	318		342		0		0	0	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					350,000,000		350,000,000		300,000,000			
3	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	100	100	100		100		100		100	100	★

Sumber: Dindikpora Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina;
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase organisasi pemuda yang aktif, dan Cakupan Pembinaan Olahraga.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					136,101,940		128.373.000,00		127.221.469,00			
1	Persentase Organisasi	%	100	100	32		40		40		32	53,33	↔

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)												
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%),
⚡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 2 indikator kinerja **Urusan Statistik** adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas, terhadap target RKPD tahun 2026 pada triwulan I, capaian realisasi dari indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah masih perlu upaya keras. Sedangkan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah statusnya telah tercapai.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 1 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					113,03 0,025		121. 277.13 7. 600,00		275.083 . 965,00			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	%	39	34	30		33		24		61,53	72,72	⚡

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%),
⚡:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Berdasarkan tabel di atas, terhadap target RKPD tahun 2026 pada triwulan I, diukur dari satu program dan satu indikator program. Kinerja capaian realisasi indikator kinerja Tingkat keamanan informasi pemerintah masih perlu upaya keras. Hal ini disebabkan kegiatan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 7 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					NA		638.292.000		44.815.000			
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	38,8	19,44	NA		28,36		1,5		3,86	5,29	↔
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional					NA		NA		-NA			
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan		100	NA	NA		NA		NA		NA	NA	NA
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					NA		50.000.000		0			
3	Persentase sejarah lokal yang dibina	%	12	NA	NA		10,53		0		0	0	↔
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	orang	86.062	85.762	NA		85.862		0		0	0	↔
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					NA		502.000.000		12.822.923			
5	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	0,63	0,88	NA		0,8		0		0	0	↔
6	Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan	%	0,09	0,06	NA		0,07		0		0	0	↔
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					NA		NA		NA			
7	Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara	unit	9	NA	NA		2		NA		NA	NA	NA

Sumber: Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: 🟢 :telah tercapai, 🔵 :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 7 indikator kinerja Urusan **Kebudayaan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 program yang tidak didanai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator kinerja Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan; serta Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran sehingga sehingga diperlukan prioritas terhadap

program-program yang dinilai paling mendukung pencapaian target kinerja utama. Namun, indikator kinerja program tersebut tetap dapat diukur dan berkontribusi terhadap capaian kinerja perangkat daerah, meskipun tidak berdiri sebagai program tersendiri karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut diintegrasikan atau diakomodir dalam program lain yang relevan. Seperti pengembangan kesenian tradisional sudah ada dalam sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Program Pengelolaan Permuseuman yang diintegrasikan ke Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Perlunya kecermatan agar di tahun 2027 program tersebut dapat teralokasikan anggaran sehingga dapat dilaksanakan.

- 2) Terdapat 5 indikator program dengan status perlu upaya keras, yakni Prosentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, Persentase sejarah lokal yang dibina, Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal, Persentase cagar budaya yang teregistrasi, serta Persentase warisan budaya yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					962.914.500		4.161.937.000,00		3.977.329.896,00			
1	Persentase perpustakaan yang terstandarisasi (%)	%	22	0,96	3,13		3,97		5,96		24,28	13,43	🔴
2	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71,25	65,25	55,45		3,97		65,25		100,18	100	🟢
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							5.680.000,00		5.233.080,00		-	
3	jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan	Unit	1	0	55,50		55,5		55,55		110,11	110,11	🟢

Sumber: Dinperpuska Kabupaten Pemalang 2026
Keterangan: 🟢:telah tercapai, 🔵:akan tercapai, 🔴:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 2 indikator kinerja **Urusan Perpustakaan** telah tercapai yaitu Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat dan jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan. Kemudian terdapat 1 indikator program yang statusnya masih perlu upaya keras yaitu Persentase perpustakaan yang terstandarisasi.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.149.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					.279,689,453		349.721000,00		.332.599,417,00			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (%)	%	53,54	67,82	88,85		64,5		67,82		501,97	501,97	★
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					9,456,660		17.000.000,00		15.152.945,00			
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	%	41,8	33,34	33,33		33		7,10		469,43	430,62	★

Sumber: Dinperpuska Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:★ :telah tercapai, ■ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 2 indikator kinerja **Urusan Kearsipan** adalah sebagai berikut:

Capaian realisasi 2 indikator kinerja Urusan Kearsipan dengan dengan status sudah tercapai. Hal ini disebabkan karena Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya peningkatan pembinaan pengelolaan arsip khususnya pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis dan digitalisasi arsip serta melakukan upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.150.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.494.808.080		1.545.313.500		134.733.600			
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	19.174	17.026	NA		17.714		0		0	0	🔴↔️
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.309.309.178		1.195.269.500		135.380.720			
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	21.151	19.925	NA		20.325		0		0	0	🔴↔️
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					NA		83.030.000		6.275.000			
3	Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi	%	2,56	3,07	NA		2,88		0		0	0	🔴↔️
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					192.307.600		351.973.000		26.120.000			
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	12.837	13.212	NA		12.718				0	0	🔴↔️

Sumber: Distanparik Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: 🟢:telah tercapai, 🔵:akan tercapai, 🔴↔️:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Kelautan dan Perikanan**, yakni Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya, Jumlah kasus kelompok usaha perikanan yang diawasi, serta Jumlah produksi olahan hasil perikanan menunjukkan status capaian perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.151.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					NA		5.915.000.000		105.080.750			
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	1.219.242	1.159.242	NA		1.180.242		31.253		2,56	2,64	🔴↔️
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					NA		NA		NA			
2	Jumlah pengunjung	Orang	26.150	21.372	NA		23.604		NA		NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	media promosi online dan offline												
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					NA		NA		NA			
3	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftaran HKI	%	70	40	NA		50		NA		NA	NA	NA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					NA	449.820.000			50.504.000			
4	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan	%	42	63	NA		25		25		59,52	100	↔

Sumber: Disparbud Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 Program yang tidak didanai dan tidak dilaksanakan, yaitu Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator kinerja Jumlah pengunjung media promosi online dan offline; dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftaran HKI. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran sehingga sehingga diperlukan prioritas terhadap program-program yang dinilai paling mendukung pencapaian target kinerja utama. Namun, indikator kinerja program tersebut tetap dapat diukur dan berkontribusi terhadap capaian kinerja perangkat daerah, meskipun tidak berdiri sebagai program tersendiri karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut diintegrasikan atau diakomodir dalam program lain yang relevan. Ke depan, diperlukan kecermatan dalam perencanaan dan penganggaran agar program yang belum terfasilitasi pada tahun 2026 dapat diusulkan kembali dan memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2027, sehingga seluruh target kinerja RPJMD dapat tercapai secara optimal.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status capaian perlu upaya keras, yakni Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, dan Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.152.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.473.178.845		5.208.657.000		237.929.750			
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	624.140	587.968	597.460		599.786		0		0	0	↔
2	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	312.620	294.502	306.419		300.421		0		0	0	↔
3	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	1.402	963	1.176,16		1.083		0		0	0	↔
4	Populasi Ternak	Ekor	3.954.738	3.923.107	3.591.221		3.933.476		0		0	0	↔
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.993.047.547		4.888.131.570		21.751.500			
5	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT)	%	25,23	22,38	22,75		23,23		22,75		90,17	97,93	➡
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					765.476.707		537.090.000		62.024.250			
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	12,22	10,64	10,98		11,08		0		0	0	↔
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					720.338.131		401.288.000		18.819.000			
7	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman pangan	%	50	54	57,02		50		0		0	0	↔
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.196.340.968		891.957.000		0			
8	Persentase kelompok tani utama	%	0,46	0,07	0,07		0,13		0,07		15,21	53,84	↔

Sumber: Ditanparik Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: 🟢 :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Pertanian** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator, yakni Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT) dengan status akan tercapai.
- 2) Terdapat 7 indikator dengan status capaian perlu upaya keras, sebab kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.153.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					6.235.000		10.000.000		300.000			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	1		100		0		0	0	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.176.179.618		951.000.000		11.656.039			
2	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direhabilitasi	%	6,25	NA	6,25		6,25		0		0	0	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					946.746.800		408.554.400		182.542.400			
3	Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100		100		7		7,00	7,00	
4	Disparitas Harga	%	<10	<10	10		10		0		0	0	
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100		100		0		0	0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		35.000.000		0			
6	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	51,85	40,74	0		44,44		0		0	0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					23.977.842		45.000.000		1.420.000			
7	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	9,56	7,87	1,53		8,43		4,0		41,84	47,44	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN					339.659.000		549.815.000		0			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PRODUK DALAM NEGERI												
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	65	70	20		52		0		0	0	↔

Sumber: Diskumdag Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Perdagangan** menunjukkan status capaian perlu upaya keras. Hal ini disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.154.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					NA		592.200.000		10.617.000			
1	Persentase sentra industri terbina	%	23	NA	NA		15		11,11		48,30	74,067	↔
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					12.053.500		30.000.000		0			
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100		100		0		0	0	↔
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					53.515.500		79.800.000		20.679.937			
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	125	125	100		125		50		40	40	↔

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026

Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Perindustrian** menunjukkan status capaian perlu upaya keras. Hal ini

disebabkan karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 1 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.155.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					120.910.004		80.000.000		0			
1	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	28,57	5,71	20		11,43		0		0	0	↔

Sumber: DTKPT Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian indikator kinerja **Urusan Transmigrasi** yaitu persentase transmigran terhadap animo transmigran menunjukkan status capaian perlu upaya keras. Hal ini disebabkan karena perhitungan ada pada triwulan IV.

Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.156.
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					32,468,120,033		33.664.893.899,00		31.665.649.755,00			
1	Capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	%	59,59	Na	60		58,77		60,29		60	103,49	↔
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					19,653,689,409		15.944.376.006,00		13.545.619.655,00			
2	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	94,40	Na	29		93,13		104,66		29	31,61	↔

Sumber: Setda Kabupaten Pemalang, 2025
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Berdasarkan tabel di atas terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, semua indikator program unsur Sekretariat Daerah statusnya perlu upaya keras. 2 indikator program tersebut adalah Capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.157.
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					38,784,891,670		41.013,481.050,00		39.576.309.283,00			
1	Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas (%)	%	100	66,67	95,74		100		96,14		95,74	95,75	➡
2	Persentase dokumen daerah yang dibahas (%)	%	100	100	100		158		74		74	46,84	↔
3	Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas (%)	%	100	88,67	98		163		85		85	52,14	↔

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Berdasarkan tabel di atas terhadap target akhir RPJMD 2025-2029 capaian realisasi 3 indikator kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD adalah 2 indikator program dengan capaian perlu upaya keras dan 1 indikator dengan akan tercapai yaitu Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas.

Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Perencanaan ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.158.
Capaian Kinerja Unsur Perencanaan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH					815,034,690		1.156.045,50		1.153.355,98			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi (%)	%	100	99,49	100		100		100		100	100	★
2	Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi (%)	%	100	100	100		100		50		50	50	↔
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					957,836,680		1.100.254,50		1.207.236,79			
3	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	%	100	82,14	100		100		100		100	100	★
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (%)	%	100	85,71	100		100		100		100	100	★
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (%)	%	100	88,33	100		100		100		100	100	★
6	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	%	100		100		100		40		40	40	↔
7	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (%)	%	100		100		100		66,67		66,67	66,67	↔
8	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	%	100		100		100		47,06		47,06	47,06	↔

Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 8 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Perencanaan** capaiannya yaitu:

- 1) Terdapat 4 indikator program yang telah tercapai yaitu Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia, nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- 2) Terdapat 4 indikator program dengan status perlu upaya keras yaitu Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi, Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Keuangan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 7 indikator yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.159.
Capaian Kinerja Unsur Keuangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					444.20 2.881		456.74 5.343		66.901. 504			
1	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		0		0	0	
2	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		100		100	100	
3	Persentase penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		0		0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					570.97 9		689.73 0		52.681			
4	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	100	99,13	100		99,1		0		0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.137. 867		3.099. 100		64.452			
5	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)	%	20	21	100		20		0		0	0	
6	Persentase Piutang yang terbayarkan	%	10	10	100		8		0		0	0	
7	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100		100		0		0	0	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: :telah tercapai, :akan tercapai, :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 7 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Keuangan** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase belanja urusan pemerintahan umum, persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat 6 indikator dengan status perlu upaya keras, sebab kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

3. **Kepegawaian**

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Kepegawaian ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.160.
Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.22 3.07 8.39 3		1.24 8.00 0.00 0		329.3 38.76 5			
1	Persentase Terpenuhinya ASN (%)	%	4,0	3,50	71,3 1		74,4 3		0		84	0	↔
2	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (%)	%	2,0	1,50	99,1 8		99,3 1		39,1 0		99	30	➡
3	Nilai IP ASN dimensi kualifikasi (%)	%	100	100	20,4 2		21,1 6		20,4 5		96	100	➡
4	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (%)	%	2,0	1,50	18,6 9		20,1 9		0,17		81	1	↔
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai "Baik" (%)	%	100	100	94,8 9		94,9 5		0		99,96	0	➡
6	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (%)	%	100	100	89,6 5		90,1 5		0		97	0	➡

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: 🟢 :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian** adalah terdapat 4 indikator program dengan status akan tercapai, dan sisanya masih perlu upaya keras. Capaian realisasi 6 indikator kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang Kepegawaian keseluruhannya sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1. Selama tahun 2024 tidak ada lembaga profesi ASN yang minta difasilitasi;
- 2. Pembinaan direncanakan berlangsung selama 2 hari dengan 2 narasumber, dikarenakan 1 narasumber tidak dapat hadir, maka pelaksanaan pembinaan diefektifkan menjadi 1 hari sehingga dapat mengefisiensi biaya;
- 3. Pelantikan fungsional direncanakan dilaksanakan 2 kali, yaitu pelantikan untuk fungsional perijinan dan untuk fungsional guru, namun karena kelengkapan pelantikan fungsional perijinan baru lengkap di bulan Desember

maka pelantikan fungsional perijinan digabung dengan pelantikan fungsional guru, sehingga dapat mengefisiensi biaya;

- 4. Uji kompetensi fungsional dilaksanakan secara daring sehingga dapat mengefisiensi biaya;
- 5. Adanya efisiensi anggaran karena penyusunan kebijakan evaluasi kinerja tidak membutuhkan pembiayaan tersendiri;
- 6. Perbup Penghargaan direncanakan ditetapkan di tahun 2024 dan disosialisasikan, namun sampai dengan akhir tahun 2024 Perbup Penghargaan masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham sehingga belum dapat ditetapkan dan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan melalui capaian 1 program dengan 1 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabell berikut.

Tabel 2.161.
Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					829,120,60		1.437.200,00		1.226.453,17			
1	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	86	80	90		84		93,10		108,25	110,83	★

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ➡:perlu upaya keras

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.162.
Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					829,120,60		1.437.200,00		1.226.453,17			
1	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	%	86	80	90		84		93,10		108,25	110,83	★
2	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi	%	32,50	796	40,36		30,50		48,61		0,36	124,18	➡

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)												
3	Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (%)	%	100	100	NA		NA		NA		NA	NA	NA

Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan:  :telah tercapai,  :akan tercapai,  :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 2 indikator kinerja

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu indikator Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah dengan capaian sangat tinggi. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah dengan capaian dangat rendah. Adapun kinerja keuangannya sedang. Hal ini terjadi karena Litbang telah melakukan identifikasi permasalahan yang kemudian diangkat menjadi tema kajian. Selain itu, litbang telah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk identifikasi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan *evidence* inovasi Perangkat Daerah. Untuk indikator program persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sudah tidak digunakan lagi karena itu masih indikator bawaan saat masih Bappeda.

Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Kinerja penyelenggaraan unsur pengawas ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.163.
Capaian Kinerja Unsur Pengawas

No	Indikator	Satu an	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1,530,242,951		1.599.156.235,00		1.327.609.824,00			
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		100	80,54	85		90		82		85	85	
2	Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan yang direalisasi		95	90	110,67		100		44		46,32	44	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					725,642,447		1.052.472.000,00		906.286.499,00			
3	Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/	%	100	70	85		93		89		85	85	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	Pengendalian Korupsi (%)												
4	Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)	%	100		85		100		36		36	36	🚦

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pemalang, 2026

Keterangan: 🟢:telah tercapai,🟡:akan tercapai,🚦:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2026, status capaian semua indikator kinerja **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan** adalah perlu upaya keras. Indikator program tersebut diantaranya Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1, Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan yang direalisasi, Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko/SPIP/Pengendalian Korupsi, dan Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa.**Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan**

1. Kecamatan Comal

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Comal ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.164.
Capaian Kinerja Kecamatan Comal

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					15.64 5.800		92.89 0.000		2.500.0 00			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	100		100		21,8 8		21,88	21,88	🚦
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					61.24 6.000		152.2 35.00 0		34.000. 000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	0		100		24,8 3		24,83	24,83	🚦
3	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)		100	100	68,1 2		0		0		0	0	🚦
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					102.5 67.80 0		60.02 2.400		0			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		0		0	0	🟡
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					85.51 9.800		174.6 66.00 0		45.560. 000			
5	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		14,6 4		14,64	14,64	🟡
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					23.31 6.400		331.6 88.30 0		13.160. 000			
6	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	100	83,3 3		2		0		0	0	🟡

Sumber: Kecamatan Comal, 2026

Keterangan: 🟢:telah tercapai (≥100%), 🟡:akan tercapai (90% ≤ 99%), 🟠:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

- 1) Enam indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan), Jumlah desa yang naik statusnya, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan Persentase konflik di masyarakat yang ditangani.

2. Kecamatan Taman

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Taman ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.165.
Capaian Kinerja Kecamatan Taman

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39.99 2.800		44.24 8.000		3.805.0 00			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	63, 33		66,6 6		66,6 6		66,66	100	🟡
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT					38.50 0.000		58.00 0.000		42.584. 000			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DESA DAN KELURAHAN												
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
3	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)		100	100	78		78		78		78	100	🚧
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					52.99 8.960		19.91 6.000		0			
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					46.13 1.100		177.7 00.00 0		20.840. 000			
5	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					38.50 1.000		338.9 00.00 0		0			
6	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	100	4		4		4		4	100	🚧

Sumber: Kecamatan Taman, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), ➡:akan tercapai (90% ≤ 99%), 🚧:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Tiga indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) serta jumlah desa yang naik statusnya.

3. Kecamatan Moga

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Moga ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.166.
Capaian Kinerja Kecamatan Moga

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					17.01 2.800		18.75 0.750		0			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	74,44	20		12		0		0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					59.81 2.640		88.05 4.750		44.032.750			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	4		16		11		11	68,75	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					70.58 8.500		6.750.000		0			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	2		2		0		0	0	
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					66.58 8.500		189.5 88.00 0		33.400.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	464		486		101		101	20,78	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					121.0 14.78 0		208.6 18.40 0		0			
5	Jumlah desa yang naik statusnya	Desa	100	90	39		36		3		3	8,3	

Sumber: Kecamatan Moga, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Moga adalah sebagai berikut:

- 1) Satu indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Empat indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan Jumlah desa yang naik statusnya.

4. Kecamatan Ampelgading

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Ampelgading ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.167.
Capaian Kinerja Kecamatan Ampelgading

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		11.800.000		0			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	87,89	0		306		0		0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0		50.250.000		37.095.000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	96	0		27		10		10	37,03	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		164.968.000		3.283.000			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	0		155		95		95	61,29	
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		147.968.000		32.830.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	0		153		95		95	62,09	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		287.550.000		5.835.000			
5	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	84,5	0		128		22		22	17,19	

Sumber: Kecamatan Ampelgading, 2026
Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%),
:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

- 1) Dua indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, dan persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Tiga indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.

5. Kecamatan Bodeh

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Bodeh ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.168.
Capaian Kinerja Kecamatan Bodeh

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.000.000		10.000.000		0			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	2		2		0		0	0	🟡
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					48.362.000		53.200.000		0			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	3		3		0		0	0	🟡
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		15.000.000		5.000.000			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	0		3		1		1	33,33	🟡
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					78.423.000		120.020.000		33.140.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	151		151		70		70	46,36	🟡
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					9.918.000		232.916.000		5.000.000			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	100	24		24		1		1	4,17	🟡

Sumber: Kecamatan Bodeh, 2026

Keterangan: 🟢:telah tercapai (≥100%), 🟡:akan tercapai (90% ≤ 99%),

🔴:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut:

- 1) Lima indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, persentase konflik di masyarakat yang ditangani, dan Jumlah desa yang naik statusnya.

6. Kecamatan Belik

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Belik ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.169.
Capaian Kinerja Kecamatan Belik

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.080.000		21.759.000		8.340.000			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100		70		70		70		70	100	🔴
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.703.000		67.965.000		34.160.250			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.965.000		12.213.000		3.639.000			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100		100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.090.000		136.073.000		50.550.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					22.839.000		261.090.750		12.091.000			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PEMERINTAHAN DESA												
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100		2		2		0		0	0	

Sumber: Kecamatan Belik, 2026
Keterangan: :telah tercapai ($\geq 100\%$), :akan tercapai ($90\% \leq 99\%$), :perlu upaya keras ($\leq 89,99\%$)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Belik adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase kelembagaan desa kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, dan Persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Dua indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, dan Jumlah desa yang naik statusnya.

7. Kecamatan Ulujami

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Ulujami ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.170.
Capaian Kinerja Kecamatan Ulujami

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					15.395.500		9.597.500		9.597.500			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	87	87	86		86		0		0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					32.407.000		35.998.000		28.998.000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	94	80	88		88		0		0	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11.000.000		6.000.000		0			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		0		0	0	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					59.04 2.800		172.6 28.00 0		33.350. 000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	★
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					81.49 8.800		371.1 50.00 0		0			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	94,44	72,22	88,8 8		88,8 8		0		0	0	🔴

Sumber: Kecamatan Ulujami, 2026

Keterangan: ★:telah tercapai (≥100%), 🔵:akan tercapai (90% ≤ 99%), 🔴:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut:

- 1) Satu indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Empat indikator dengan status perlu diupayakan, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, Jumlah desa yang naik statusnya. Hal ini terjadi karena program akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

8. Kecamatan Pulosari

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pulosari ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.171.
Capaian Kinerja Kecamatan Pulosari

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.717. 600		51.75 0.000		11.000. 000			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100		36		53		15		15	28,30	🔴
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT					60.25 4.800		98.73 3.500		41.322. 500			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DESA DAN KELURAHAN												
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	96,08	94,7	15		176		25		26,02	14,20	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					108.290.200		10.000.000		2.000.000			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	24		24		6		6	25	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					156.763.350		232.873.000		45.100.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	212		212		33		33	15,57	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					86.905.000		188.090.000		0			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	66,67	16,67	124		12		22		32,99	183,33	

Sumber: Kecamatan Pulosari, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%),:akan tercapai (90% ≤ 99%),
:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

- 1) Lima indikator dengan status perlu diupayakan, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, dan Jumlah desa yang naik statusnya.

9. Kecamatan Watukumpul

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Watukumpul ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.172.
Capaian Kinerja Kecamatan Watukumpul

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					34.960.200		51.860.000		2.194.000			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PELAYANAN PUBLIK												
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	70		70		70		70	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					54.600.780		83.823.500		22.783.000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					24.556.000		31,500,000		357.236.469,00			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					46.820.900		170.734.800		233.819.480			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					96.530.400		335.251.500		11.959.000			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	100	2		2		0		0	0	

Sumber: Kecamatan Watukumpul, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, dan Persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Dua indikator dengan status perlu diupayakan, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, dan Jumlah desa yang naik statusnya. Hal ini karena program akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

10. Kecamatan Pemalang

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pemalang ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.173.
Capaian Kinerja Kecamatan Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.427.000		34.170.000		0			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	70		73,33		73,33		73,33	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					460.342.295		231.924.800		33.375.000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
3	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	%	72,5		63		65		0		0	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.730.000		5.890.000		0			
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					33.885.000		99.085.000		25.525.000			
5	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		100		100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.210.000		293.785.000		0			
6	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	100	6		2		0		0	0	

Sumber: Kecamatan Pemalang, 2026
Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%),
:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, dan Persentase konflik di masyarakat yang ditangani;
- 2) Tiga indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan, dan Jumlah desa yang naik statusnya. Hal ini karena program akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

11. Kecamatan Randudongkal

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Randudongkal ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.174.
Capaian Kinerja Kecamatan Randudongkal

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.85 0.200		73.00 0.000		20.014. 500			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	99	100	41		41		12,5		12,63	30,49	
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					39.38 8.000		73.40 6.400		35.912. 400			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	99	100	19		21		5		5,10	23,81	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM					12.78 5.800		26.12 5.000		7.060.0 00			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	98	100	5		7		3		3,06	42,86	
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					40.58 9.600		126.0 00.00 0		33.905. 000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	98	100	147		141		55		56,12	39	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					69.88 2.400		321.2 27.00 0		25.881. 500			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	90	153		166		46		46	27,71	

Sumber: Kecamatan Randudongkal, 2026
Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%),
:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Randudongkal dapat di lihat pada tabel di atas. Terdapat lima indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif), Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, Persentase konflik di masyarakat yang ditangani, dan Jumlah desa yang naik statusnya. Hal ini karena program akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

12. Kecamatan Warungpring

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Warungpring ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.175.
Capaian Kinerja Kecamatan Warungpring

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.49 5.700		25.09 5.000		5.143.0 00			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	100		100		25		25	25	
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					60.38 8.500		71.26 7.800		3.342.5 600			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	100		100		25		25	25	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM					16.06 3.600		22.45 5.500		2.426.0 00			
3	Persentase gangguan ketentraman	%	100	100	100		100		25		25	25	

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	dan ketertiban umum yang ditangani (%)												
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					59.15 9.000		169.6 58.50 0		45.721. 650			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		25		25	25	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.26 5.900		160.6 10.00 0		5.158.9 00			
5	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	100	83,3 2		2		2		2	100	

Sumber: Kecamatan Warungpring, 2026

Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Warungpring dapat di lihat pada tabel di atas. Terdapat lima indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif), Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, Persentase konflik di masyarakat yang ditangani, dan Jumlah desa yang naik statusnya.

13. Kecamatan Bantarbolang

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Bantarbolang ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.176.
Capaian Kinerja Kecamatan Bantarbolang

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.075. 240		31.49 0.250		415.65 5. 519,00			
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	92,22	92,22	22		22		0		0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT					29.71 8.720		61.81 0.000		37.310. 000			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DESA DAN KELURAHAN												
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	99,12	94,12		3		4		0	0	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.600.000		22.248.000		0			
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	5		5		0		0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.777.640		159.824.500		14.035.000			
4	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	177		707		1		1	0,14	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.525.540		222.489.800		0			
5	Jumlah desa yang naik statusnya	%	14	94,12	4		2		0		0	0	

Sumber: Kecamatan Bantarbolang, 2026
Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%), :perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 5 indikator kinerja Kecamatan Bantarbolang dapat di lihat pada tabel di atas. Lima indikator dengan status perlu perlu keras, yaitu yaitu Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif, Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, Persentase konflik di masyarakat yang ditangani, dan Jumlah desa yang naik statusnya. Hal ini karena program akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

14. Kecamatan Petarukan

Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Petarukan ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.177.
Capaian Kinerja Kecamatan Petarukan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					20.027.880		33.180.000		5.916.900			

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	N DAN PELAYANAN PUBLIK												
1	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	%	100	100	27		8		8		8	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.000.000		60.000.000		46.250.000			
2	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)	%	100	100	3		3		2		2	66,67	
3	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	%	100	100	70,10		0		0		0	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.771.000		15.250.000		0			
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	%	100	100	1		1		0		0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					88.500.800		158.900.000		17.100.000			
5	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	%	100	100	100		100		0		0	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					35.431.000		339.400.000		12.395.750			
6	Jumlah desa yang naik statusnya (%)	%	100	100	79		95		10		10	10,52	

Sumber: Kecamatan Petarukan, 2026
Keterangan: :telah tercapai (≥100%), :akan tercapai (90% ≤ 99%),
:perlu upaya keras (≤ 89,99%)

Terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, capaian realisasi 6 indikator kinerja Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:

1) Enam indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan), persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif), persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, persentase pelimpahan

kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, jumlah desa yang naik statusnya dan Persentase konflik di masyarakat yang ditangani.

Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaraan unsur kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.178.
Capaian Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2025 - 2029)	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Realisasi RKPD 2025		Target RKPD 2026		Realisasi RKPD TW I 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d TW I 2026 (%)	Tingkat Capaian RKPD s/d TW I 2026 (%)	Status
					K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)			
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.586.855/100		1.176.200.000,00		175.590.237,00			
1	Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara (%)	%	95	75	85		88		85		85	89,47	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					4.342.995.903		68.175.035.000,00		68.073.884.674,00			
2	Indeks Demokrasi Indonesia (%)	%	70	40	55		60		60		55	78,57	
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					606.453.000		560.000.000,00		509.274.000,00			
3	Indeks Kinerja Ormas	angka	100	50	80		80		80		80	80	
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					104.389.500		290.000.000,00		287.833.300,00			
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	angka	80	45	65		70		70		65	81,25	
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					533.700.000		260.800.000,00		250.691.000,00			
5	Indeks kewaspadaan nasional	angka	80	50	65		70		70		65	81,25	

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Pemalang, 2026
Keterangan:  :telah tercapai,  :akan tercapai,  :perlu upaya keras

Berdasarkan tabel di atas terhadap target akhir RPJMD 2025-2029, status capaian 5 indikator kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; paham politik; paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan; paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial; serta paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya adalah perlu di upayakan keras supaya dapat tercapai. Hal ini karena program akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2.2 Rangkuman Evaluasi Kinerja Pembangunan

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026 dari 284 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 66 indikator (23,24%) berstatus telah tercapai; 12 indikator (4,23%) berstatus akan tercapai; 199 indikator (70,07%) berstatus perlu upaya keras; dan 7 indikator (2,46%) data belum tersedia.

Tabel 2.179.
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

No	Status Pencapaian Indikator	Jumlah Indikator	%
1	Telah Tercapai (hijau)	66	23,24
2	Akan Tercapai (biru)	12	4,23
3	Perlu Upaya Keras (kuning)	199	70,07
4	Data Belum Tersedia	7	2,46
Total Indikator		284	100

Sumber: Analisa Penulis, 2026

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 bersumber dari isu strategis yang tercantum di Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, yaitu “Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”. Perumusan masalah per urusan dilakukan dengan melihat capaian indikator program di tiap urusan. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dipetakan untuk menentukan isu strategis di Tahun 2027.

2.3.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- a. Tingginya resiko bencana;
- b. Beberapa indikator SPM belum memenuhi target;
- c. Reformasi birokrasi belum berjalan secara optimal;
- d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- e. Tingginya angka kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrem;

- f. Tingginya tingkat pengangguran;
- g. Masih rendahnya kemandirian desa;
- h. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah;
- i. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi;
- j. Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur wilayah dan permukiman yang layak;
- k. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari jumlah ATS yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8,378 anak, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 23,325 anak.
- b. Rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih menjadi tantangan dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pemalang. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD tahun 2025 sebesar 74,84, APS SD/SMP tahun 2025 sebesar 95,77 persen. APS Kesetaraan baru mencapai 18,25 persen. Selain itu, keterbatasan jumlah SMA dan perguruan tinggi juga turut mempengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat, terutama bagi penduduk di wilayah tertentu.
- c. Tidak adanya Jabatan Fungsional Kurikulum sehingga pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan SD dan SMP belum optimal.
- d. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2025 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase ruang kelas dalam kondisi baik yang masih relatif rendah, yaitu ruang kelas PAUD sebesar 43,77 persen, ruang kelas SD sebesar 30,95 persen, dan ruang kelas SMP sebesar 34,35 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan nyaman.
- e. Sebaran tenaga pendidik di Kabupaten Pemalang masih belum merata, terutama di wilayah punggung (wilayah selatan). Kondisi ini terlihat dari masih adanya kekurangan tenaga pendidik pada berbagai jenjang pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik

tingkat SMP sebesar 2.722 sedangkan kondisi Existing 2.101. Masih ada kekurangan tenaga pendidik SMP sebesar 621. Kebutuhan Tenaga Pendidik tingkat SD masih terdapat kekurangan 1.175 tenaga pendidik SD. Tenaga pendidik tingkat TK kekurangan 9 Tenaga Pendidik TK.

2. Kesehatan

- a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 masih belum memenuhi standar ideal, yaitu baru mencapai 0,84 tempat tidur per 1.000 penduduk, sementara rasio ideal yang ditetapkan adalah 1 tempat tidur per 1.000 penduduk.
- b. Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2025. Dari 12 jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan, hanya 6 capaian indikator kinerja SPM yang mencapai target 100%, sedangkan 6 indikator kinerja SPM lainnya masih dibawah 100%;
- c. Masih adanya kasus kematian ibu di Kabupaten Pemalang, dimana pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8 kasus kematian ibu atau dalam Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 43,3 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 49,95 per 100.000 kelahiran hidup;
- d. Masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Pemalang, di tahun 2025 tercatat kasus kematian bayi sebanyak 119 kasus atau dalam Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,43 per 1.000 kelahiran hidup. Angka AKB ini meningkat dibandingkan dengan AKB tahun 2024 sebesar 5,94 per 1.000 kelahiran hidup;
- e. Masih ditemukannya kasus balita stunting dan balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang, walaupun demikian pencegahan dan penanggulangan kasus balita gizi buruk dan stunting tetap dilakukan melalui perawatan sesuai standar pada balita gizi buruk yang ditemukan dan intervensi spesifik dan sensitif pada lokus perluasan stunting. Capaian kinerja tahun 2025 dari hasil data ePPGBM menunjukkan persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang meningkat menjadi sebesar 10,09%;
- f. Belum semua warga Pemalang menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional (peserta BPJS Kesehatan) sehingga capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tercatat sebesar 99,48% dan telah melampaui target nasional sebesar 98%. Namun persentase peserta aktif

jaminan kesehatan nasional sampai dengan Tahun 2025 masih sebesar 80,66%.

- g. Belum meratanya distribusi SDM Kesehatan terutama di puskesmas, dimana ada beberapa puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar;
- h. Belum optimalnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sebab masih terdapat beberapa puskesmas dan rumah sakit belum terakreditasi paripurna.
- i. Masih adanya kasus penyakit menular yang dilaporkan terutama pada penyakit Tuberkulosis (19.971 orang) dan HIV/ AIDS (21.663 orang);
- j. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular, seperti penyakit Diabetes Melitus (133.570 orang), Hipertensi (351.620 orang), dan Psikosis (Gangguan Jiwa) sebanyak (2.621 orang);

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih terdapat kawasan permukiman rawan banjir yang belum didukung oleh infrastruktur pengendalian banjir yang memadai.
- b. Kawasan permukiman di sepanjang wilayah pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi masih belum terlindungi secara optimal oleh infrastruktur pengaman pantai.
- c. Pada tahun 2025 masih terdapat 11,52% penduduk yang belum memiliki akses terhadap layanan air minum layak.
- d. Pada tahun 2025 masih terdapat 8,96% rumah tangga yang belum memperoleh akses air minum melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- e. Kondisi jaringan drainase yang berada dalam kondisi baik masih belum optimal, dengan capaian tahun 2025 sebesar 80,01%.
- f. Kondisi kemantapan jalan daerah masih belum sepenuhnya optimal, dengan persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2025 baru mencapai sebesar 78,09% atau sepanjang 597,92 km.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat korban bencana yang membutuhkan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah layak huni pascabencana.
- b. Luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,61%.

- c. Penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 hektare masih belum optimal, dengan capaian penanganan pada tahun 2025 baru sebesar 31,20%.
- d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 69,48%, sehingga masih diperlukan percepatan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pemalang masih belum memadai. Kondisi ini terutama terlihat pada layanan pemadam kebakaran, di mana dari total 14 kecamatan yang ada, baru tersedia 3 pos pemadam kebakaran yang berada di Kecamatan Comal, Randudongkal, dan Belik. Keterbatasan ini berdampak pada jangkauan pelayanan dan kecepatan respons dalam penanganan kejadian kebakaran, sehingga masih diperlukan penguatan dan pemerataan sarana prasarana pemadam kebakaran di seluruh wilayah kecamatan.
- b. Masih kurangnya jumlah relawan kebakaran. Sampai dengan tahun 2025, jumlah relawan kebakaran di Kabupaten Pemalang baru sebanyak 80 orang yang tersebar pada 7 desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan relawan kebakaran masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan kebakaran.
- c. Perlunya penguatan upaya pencegahan kebakaran. Hal ini terlihat dari jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebanyak 93 kejadian selama tahun 2025.
- d. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta adanya aktivitas pemberian kepada pengamen dan pengemis di jalanan. Masih perlunya penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta intensifikasi penegakan aturan secara berkelanjutan agar kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada dapat semakin meningkat.
- e. Ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban umum masih relatif tinggi sehingga memerlukan

penguatan sistem deteksi dini, pengawasan, dan kesiapsiagaan daerah. bencana.

6. Sosial

- a. Capaian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2025 belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian PPKS sebesar 72,90 persen.
- b. Verifikasi data Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum optimal, karena belum terbentuk Tim Verval secara terpadu.
- c. Jumlah Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) hingga tahun 2025 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan peran PSKS sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan. Kedepan, diperlukan optimalisasi pemberdayaan dan pengembangan PSKS secara lebih terstruktur dan berkelanjutan guna mendukung efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pemalang.
- d. Masih terdapat warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan sehingga memerlukan perlindungan dan penanganan sosial yang optimal.
- e. Jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat pada kelompok kesejahteraan desil satu dan dua masih perlu diperkuat guna mendukung penurunan kemiskinan dan kerentanan sosial.
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial, baik pada saat tanggap darurat maupun pascabencana, masih perlu dioptimalkan.
- g. Kondisi Taman Makam Pahlawan masih memerlukan pemeliharaan guna menjaga fungsi, kelayakan, dan nilai historis kawasan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Pemalang masih relatif rendah sehingga belum mampu bersaing secara optimal di pasar kerja.
- b. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja maupun dunia industri.

- c. Meskipun seluruh perusahaan telah menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), tingkat upah yang masih relatif rendah menyebabkan banyak tenaga kerja memilih bekerja di daerah lain dengan tingkat UMK yang lebih tinggi.
- d. Ketersediaan tenaga instruktur pelatihan kerja yang berstatus ASN masih sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 5 orang.
- e. Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) masih belum memadai untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja.
- f. Masih terdapat ketidaksesuaian (mismatch) antara materi dan kompetensi pelatihan kerja dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terlihat dari nilai IDG Kabupaten Pemalang yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional walaupun capaian persentase keterwakilan di instansi pemerintah dan posisi perempuan sebagai tenaga manajer, administrasi dan teknisi di Kabupaten Pemalang sudah cukup tinggi yaitu 62,76%.
- b. Masih rendahnya proporsi anggaran responsif gender pada tahun 2025 hanya sebesar 5,24% dari total belanja langsung APBD.
- c. Belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak karena adanya keterbatasan SDM dan sarpras UPPA yang terdapat di desa. Hal ini ditunjukkan masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah kasus pada tahun 2025 tercatat sebanyak 31 kasus. Dan kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban pada tahun 2025 tercatat sebanyak 68 anak.
- d. Praktik pernikahan anak masih terjadi di Kabupaten Pemalang, dengan persentase pada tahun 2025 sebesar 3,79%.
- e. Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak pada perangkat daerah masih belum optimal, dengan capaian tahun 2025 sebesar 88,88%.
- f. Belum seluruh desa/kelurahan berstatus layak anak, dengan capaian pada tahun 2025 baru sebesar 72,19%.

3. Pangan

- a. Pemanfaatan lumbung pangan masyarakat masih belum optimal, dengan tingkat keaktifan pada tahun 2025 baru mencapai 18,47%.
- b. Masih terdapat desa rawan pangan di Kabupaten Pemalang, yaitu 13,45% pada tahun 2025 atau 28 desa rawan pangan.
- c. Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman masih relatif rendah.

4. Pertanian

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah masih perlu ditingkatkan agar penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. Masih terdapat Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap untuk didistribusikan namun belum dimanfaatkan secara optimal.
- c. Kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum masih terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
- d. Ketersediaan lahan untuk mendukung kegiatan penanaman modal dan pengembangan investasi daerah masih perlu disiapkan secara memadai.

5. Lingkungan Hidup

- a. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan masih perlu dioptimalkan guna menjamin keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.
- b. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 masih berada pada kategori sedang, dengan nilai sebesar 72,49.
- d. Indeks tutupan lahan 50,39 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas tutupan lahan dan daya dukung lingkungan.
- e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati masih perlu ditingkatkan.
- f. Pengendalian terhadap bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun masih perlu diperkuat untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- g. Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan masih perlu dioptimalkan.
- h. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait

- pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah.
- i. Pemberian penghargaan kepada penggiat dan pelaku peduli lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam pelestarian lingkungan.
 - j. Pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup masih terus terjadi dan memerlukan penanganan yang lebih responsif.
 - k. Pada tahun 2025 masih terdapat 39,18% sampah yang belum dapat terangkut dan terlayani secara optimal.
 - l. Tingkat pengelolaan sampah pada tahun 2025 masih relatif rendah, yaitu sebesar 60,82%, sehingga berdampak pada semakin terbatas dan mengkhawatirkannya kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, dengan capaian kepemilikan dokumen pada tahun 2025 sebesar 94,73%.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, dengan capaian kepemilikan pada tahun 2025 sebesar 99,15%.
- c. Belum seluruh Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- d. Masih perlu mengoptimalkan pendataan penduduk non permanen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penataan desa di Kabupaten Pemalang masih belum optimal, dengan persentase desa tertata pada tahun 2025 baru mencapai 35,28%.
- b. Desa yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kerja sama desa masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 72,04%.
- c. Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik masih belum optimal, ditunjukkan dengan capaian desa beradministrasi pemerintahan baik pada tahun 2025 sebesar 35,28%.
- d. Kinerja dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 41,33%.

- e. Persentase desa berdaya di Kabupaten Pemalang masih rendah, dengan capaian tahun 2025 sebesar 10,85%.
- f. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (RPKP) masih belum optimal, karena hingga saat ini baru dilaksanakan di 4 kecamatan, sementara pemerintah pusat mengarahkan agar seluruh kecamatan menyusun RPKP.
- g. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) reguler telah terbentuk di 14 kecamatan, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terdapat beberapa BUMDes yang mengalami penurunan kinerja bahkan berhenti beroperasi (collapse), seperti di Kecamatan Randudongkal dan Belik. Selain itu, pembinaan BUMDesma masih menghadapi tantangan karena belum seluruh unit usaha berbasis kearifan lokal dan masih terdapat ego sektoral maupun kepentingan personal dalam pengelolaannya.
- h. Kapasitas administrasi pemerintahan desa masih belum optimal, terutama dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat desa, sehingga masih diperlukan peningkatan bimbingan teknis (bimtek) dan penguatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.
- i. Pelaksanaan pembinaan administrasi desa masih sangat bergantung pada pendampingan dari kecamatan, di mana peningkatan kapasitas aparatur desa selama ini dilakukan melalui mekanisme pelatihan berjenjang dari kecamatan kepada pemerintah desa masing-masing.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya belum terpenuhi (*unmet need*), dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 9,78%.
- b. Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam kepesertaan program Keluarga Berencana ditandai masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MOP.
- c. Prevalensi penggunaan kontrasepsi modern pada tahun 2025 masih belum optimal, dengan capaian sebesar 70,75%.
- d. Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, prasarana dan sarana pelayanan KB. Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 222 kelurahan/ desa yang ditangani oleh 74 orang PLKB sehingga ratio PLKB 1:3, artinya 1 orang PLKB melayani 3 desa.

9. Perhubungan

- a. Penyelenggaraan lalu lintas masih memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang lebih optimal guna mendukung kelancaran, keselamatan, dan ketertiban transportasi.
- b. Penyelenggaraan angkutan jalan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.
- c. Pada tahun 2025, capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 0,37, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,38. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi lalu lintas yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kepadatan arus kendaraan di wilayah Kabupaten Pemalang.
- d. Ketersediaan alat kelengkapan jalan, khususnya Alat Penerangan Jalan (APJ), masih belum memadai sehingga perlu dilakukan penambahan dan pemerataan fasilitas penerangan jalan

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Masih terdapat kesenjangan konektivitas internet di beberapa wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya pada daerah pegunungan yang masih mengalami kondisi blankspot parsial.
- b. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sehingga pengelolaan sistem informasi dan pengembangan layanan digital belum berjalan optimal.
- c. Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah masih belum sepenuhnya terpadu, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan data belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Tingkat koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) yang sehat masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 38,57%.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota maupun karyawan koperasi yang telah mendapatkan pelatihan masih belum optimal, dengan capaian sebesar 0,16%.
- c. Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha masih rendah, yang tercermin dari persentase pelaku usaha mikro yang telah memiliki izin usaha baru sebesar 22,59%.
- d. Kinerja usaha koperasi masih belum optimal, tercermin dari rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

yang baru mencapai 1,56%.

12. Penanaman Modal

- a. Integrasi pelayanan perizinan pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga pelayanan terpadu satu pintu belum mengakomodasi seluruh instansi terkait.
- b. Sarana dan prasarana penunjang pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) masih belum memadai untuk mendukung pengembangan investasi dan kegiatan industri.
- c. Kebijakan pemberian insentif bagi investor masih belum diimplementasikan secara optimal guna meningkatkan daya tarik investasi daerah.
- d. Kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal masih belum optimal dalam masa transisi sistem dari OSS versi 1.1 menuju OSS Risk Based Approach (OSS-RBA).
- e. Keikutsertaan dalam kegiatan promosi dan pemasaran investasi masih belum optimal sehingga potensi investasi daerah belum terpublikasikan secara maksimal.
- f. Ketersediaan data dan informasi mengenai profil serta peluang investasi daerah masih belum memadai dan perlu diperkuat.
- g. Kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- h. Harga tanah pada kawasan peruntukan industri masih belum terkendali sehingga berpotensi menghambat pengembangan investasi.
- i. Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berpengaruh terhadap proses masuknya investasi di Kabupaten Pemalang, khususnya pada penyediaan lahan untuk kegiatan usaha dan industri.
- j. Proses perizinan melalui sistem OSS-RBA masih mengalami hambatan akibat belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang dipengaruhi oleh kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Database kepemudaan di Kabupaten Pemalang masih belum tersedia secara lengkap dan terintegrasi.
- b. Pemberdayaan organisasi kepemudaan. masih belum optimal dalam mendukung pengembangan kapasitas dan partisipasi pemuda.

- c. Database kewirausahaan pemuda masih belum tersedia secara memadai sebagai dasar pengembangan program kewirausahaan.
- d. Pengembangan kewirausahaan pemuda masih belum optimal, baik dari aspek pembinaan, pendampingan, maupun penguatan akses usaha.
- e. Kualitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan olahraga masih belum memadai.
- f. Pembinaan atlet, pelatih, dan sumber daya manusia keolahragaan masih belum optimal dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.
- g. Peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga masih perlu ditingkatkan.

14. Statistik

- a. Pada tahun 2025, kualitas data statistik sektoral yang sesuai standar masih belum optimal, dengan capaian baru sebesar 32% dan belum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024.
- b. Pemanfaatan Portal Satu Data Kabupaten Pemalang masih belum optimal dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan daerah.
- c. Integrasi portal data dengan aplikasi pemerintah daerah lainnya masih belum sepenuhnya terwujud sehingga pengelolaan data antar perangkat daerah belum berjalan secara terpadu.

15. Persandian

- a. Keamanan informasi dan perlindungan data masih menjadi tantangan, terutama seiring meningkatnya ancaman siber terhadap aplikasi dan sistem informasi pemerintah daerah, termasuk penyalahgunaan untuk konten ilegal.
- b. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi dan pengamanan data masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

16. Kebudayaan

- a. Pengelolaan warisan budaya tak benda di Kabupaten Pemalang masih perlu ditingkatkan guna menjaga pelestarian nilai, tradisi, dan identitas budaya daerah.
- b. Pengelolaan sejarah Kabupaten Pemalang masih perlu diperkuat sebagai upaya pelestarian nilai historis dan penguatan identitas daerah.
- c. Pengelolaan warisan budaya benda masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pelestarian cagar budaya dan aset budaya daerah secara berkelanjutan.

17. Perpustakaan

- a. Jumlah perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional masih sangat terbatas, dengan capaian pada tahun 2025 baru sebesar 10,756% atau sebanyak 79 unit, meliputi perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan Taman Baca Masyarakat.
- b. Budaya literasi masyarakat masih relatif rendah, dengan capaian tingkat literasi pada tahun 2025 sebesar 14,88%.
- c. Pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 4,7%.
- d. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah, yaitu hanya 10,78% pada tahun 2025. Padahal angka kunjungan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
- e. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga perpustakaan/pustakawan yang memiliki kompetensi sesuai standar.
- f. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masih perlu dioptimalkan sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

18. Kearsipan

- a. Perlindungan dan penyelamatan arsip masih belum optimal, antara lain karena belum tersedianya depo arsip tertutup pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.
- b. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan tata kelola arsip dan penggunaan klasifikasi arsip secara tertib.
- c. Belum optimalnya digitalisasi arsip sehingga pengelolaan arsip elektronik masih terbatas.
- d. Ketersediaan tenaga arsiparis dan pustakawan masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kapasitas.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Dampak rob dan banjir masih menyebabkan kerusakan infrastruktur perikanan, seperti jalan produksi dan tempat pelelangan hasil tambak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembudidaya ikan. Pada awal tahun 2025, luas tambak yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 320 hektare.
- b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pemalang yang memenuhi standar sesuai Cara Penanganan Ikan

yang Baik masih belum optimal, dengan pada tahun 2025 masih terdapat 29% TPI yang belum memenuhi standar.

- c. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pemalang masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 17,37 kg/kapita/tahun.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran tambak, masih belum memadai, dengan tingkat kekurangan mencapai 70%.
- e. Sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan masih belum optimal, dengan tingkat kekurangan pada tahun 2025 mencapai 69%.
- f. Keterbatasan kapasitas pengawasan karena belum memiliki personel pengawas perikanan yang berwenang, sehingga fungsi pengawasan saat ini masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

2. Pariwisata

- a. Daya tarik wisata milik pemerintah daerah masih belum optimal sehingga belum mampu menarik kunjungan wisatawan secara maksimal.
- b. Promosi pariwisata daerah masih belum optimal dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kunjungan wisatawan.
- c. Pengelolaan tiket pada daya tarik wisata masih belum berjalan secara optimal dan profesional.
- d. Pengelolaan desa wisata masih menghadapi ego sektoral antar lembaga yang terlibat sehingga menghambat sinergi pengembangan pariwisata.
- e. Status kepemilikan lahan pada beberapa daya tarik wisata masih belum sepenuhnya menjadi milik pemerintah desa sehingga berpotensi menghambat pengembangan kawasan wisata.
- f. Legalitas hukum kelembagaan pengelola wisata masih perlu diperkuat guna mendukung tata kelola pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.
- g. Sarana dan prasarana pendukung di desa wisata masih belum memadai untuk mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkualitas.
- h. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wisata di desa wisata masih perlu ditingkatkan.
- i. Fasilitasi akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif masih belum optimal dalam mendukung

pengembangan produk dan pemasaran ekonomi kreatif daerah.

- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk ekonomi kreatif dan potensi lokal masih belum dilaksanakan secara optimal.

3. Pertanian

- a. Kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi, dengan jumlah kasus pada tahun 2025 mencapai 3.326 kasus.
- b. Luas lahan sawah terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan dan menurunnya tingkat kesuburan tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus yang menyebabkan kejenuhan lahan. Selain itu, c.
- c. Tingkat ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan keberlanjutan lahan pertanian.
- d. Kondisi sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai, ditunjukkan dengan masih tingginya kerusakan jalan produksi sebesar 76,95% dan jaringan irigasi sebesar 79,80%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pendangkalan saluran irigasi serta banyaknya saluran irigasi yang tertutup bangunan maupun sampah.

4. Perdagangan

- a. Fasilitasi pelayanan perizinan bagi pelaku usaha masih perlu ditingkatkan guna mendukung kemudahan berusaha dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 baru sebesar 11,7%.
- c. Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masih memerlukan penguatan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan.
- d. Pertumbuhan nilai ekspor daerah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan daya saing produk dan perluasan akses pasar.
- e. Tingkat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang telah dilakukan tera ulang masih rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 7,86%.
- f. Kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan ketentuan perdagangan masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 baru sekitar 30% pelaku usaha yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

5. Perindustrian

- a. Keterbatasan akses permodalan usaha masih menjadi kendala dalam pengembangan industri kecil, terutama pada aspek akses pembiayaan formal, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi keuangan pelaku IKM. Hal ini tercermin dari pertumbuhan industri kecil pada tahun 2025 yang baru mencapai 6,43%.
- b. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 22,51%.
- c. Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas usaha, kualitas produk, dan daya saing industri daerah.
- d. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih relatif rendah sehingga daya saing produk industri lokal belum optimal.

6. Transmigrasi

- a. Jumlah kuota transmigran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih terbatas sehingga membatasi kesempatan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum masih perlu ditingkatkan, dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 60,29%. Penguatan koordinasi administrasi umum diperlukan untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat masih perlu terus diperkuat guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- c. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan, pada tahun 2025 capaiannya 83,32% dari target kinerja sebesar 84,31% atau sebesar 98.82%. Peran koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- d. Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dimana pada tahun 2025 terealisasi sebesar

60,43 % dari target kinerja sebesar 60,90% atau sebesar 99.23%. Peningkatan koordinasi di bidang administrasi umum sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

2. Sekretariat DPRD

- a. Kurang terkoordinasinya antara kegiatan kedewanan dengan kegiatan OPD yang melibatkan anggota DPR sebagai narasumber;
- b. Belum optimalnya dalam merumuskan hasil reses sebagai bahan informasi utama dalam perencanaan Pembangunan;
- c. Belum tertibnya administrasi kegiatan dewan, meliputi penyusunan reses, kelengkapan proposal pokok-pokok pikiran dewan dll.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan pedoman penyusunan dokumen perencanaan dari pemerintah pusat.
- b. Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
- c. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan guna mendukung penyusunan perencanaan yang berkualitas.
- d. Keakuratan data pembangunan masih perlu ditingkatkan dan integrasi data antar perangkat daerah masih belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan.

2. Keuangan

- a. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengalokasian belanja untuk urusan pemerintahan umum masih perlu diperkuat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.
- c. Ketepatan waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masih perlu dijaga agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD masih perlu dijaga agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- e. Penyampaian laporan keuangan daerah masih perlu

- ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pengelolaan keuangan daerah.
- f. Proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD masih relatif tinggi sehingga berpotensi membatasi ruang fiskal pembangunan daerah.
 - g. Deviasi antara realisasi belanja dan total belanja daerah masih relatif tinggi sehingga menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran daerah.
 - h. Kualitas laporan keuangan daerah masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

3. Kepegawaian

- a. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 3,45%.
- b. Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN masih perlu didorong, dengan capaian ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan pada tahun 2025 baru sebesar 2,56%.
- c. Penilaian kinerja ASN masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 83,36%.
- d. Kedisiplinan ASN masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 93,10%.
- b. Pelaksanaan inovasi daerah masih belum optimal, dengan capaian inovasi daerah pada tahun 2025 sebesar 48,61, sehingga Kabupaten Pemalang masih berada pada level kedua (inovatif) dalam indeks inovasi daerah.
- c. Ketersediaan tenaga fungsional yang kompeten di bidang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) masih perlu ditingkatkan. Bapperida belum memiliki JFT Peneliti, Perakayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maupun Teknisi Penelitian dan Perakayasa.

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

- a. Penyelenggaraan pengawasan masih belum optimal, dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 82%.
- b. Kualitas sumber daya pengawas masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif. Dikarenakan masih banyak SDM pengawas yang belum mengikuti bimtek pengawas.

- c. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di tingkat perangkat daerah, sehingga tindakan pengawasan cenderung dilakukan setelah masalah terjadi.
- d. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah yang dipengaruhi oleh masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengawas.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 89%.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan masih belum optimal.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa masih belum optimal, dengan pada tahun 2025 baru sebanyak 84% desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik.
- d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan secara optimal.
- e. Banyaknya sistem informasi manajemen (SIM) yang harus diinput di tingkat desa belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai.
- f. Penganggaran untuk fasilitasi lembaga kemasyarakatan masih belum optimal dalam mendukung pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 baru sebesar 85%.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 60%.
- c. Peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 80%.
- d. Pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial masih perlu ditingkatkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 70%.

- e. Pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masih relatif rendah, dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 70%.
- f. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial masih menimbulkan dampak sosial negatif, antara lain penyebaran berita hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.
- g. Masih terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang belum terdaftar atau telah habis masa berlaku registrasinya, serta masih terbatasnya pemahaman ormas dan LSM terhadap penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan.
- h. Kasus penyalahgunaan narkoba masih terjadi sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.
- i. Masih terjadinya degradasi nilai nasionalisme dan pengamalan Pancasila di masyarakat, khususnya pada generasi muda yang rentan terpengaruh budaya luar yang bersifat negatif.

2.3.3 Isu strategis Pembangunan

Perumusan isu strategis di Tahun 2027 didapatkan dari pemetaan permasalahan perurusan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2027, serta RKP 2027.

Berdasarkan hasil analisis kondisi daerah, capaian pembangunan, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terpadu. Isu strategis tersebut dirumuskan sebagai fokus utama pembangunan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah akibat belum berkembangnya industri pengolahan lokal. Struktur ekonomi daerah juga masih bergantung pada sektor primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, potensi sektor pariwisata belum berkembang optimal yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara pada destinasi unggulan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Pemalang masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebesar 5,80% sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 sebesar 5.11%. Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2025 ini lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah (5,37 %) dan Nasional (5,11%).

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021–2025, nilai PDRB meningkat dari Rp27,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp37,50 triliun pada tahun 2025, atau bertambah sekitar Rp10,05 triliun (36,6%) dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ditopang oleh beberapa sektor utama yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur ekonomi daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 25,51%, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih banyak bertumpu pada sektor primer. Kontributor terbesar kedua adalah Industri Pengolahan sebesar 22,14%, menandakan peran penting sektor manufaktur dalam menciptakan nilai tambah ekonomi daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati posisi ketiga dengan kontribusi 15,33%, mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Sementara itu, sektor jasa seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,28%), Jasa Pendidikan (5,48%), dan Konstruksi (4,76%) turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Di sisi lain, sektor-sektor seperti Informasi dan Komunikasi (2,50%), Jasa Keuangan dan Asuransi (2,77%), serta Real Estate (1,50%) masih memiliki kontribusi relatif kecil. Adapun sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,10%) serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,06%) merupakan sektor dengan kontribusi paling rendah terhadap perekonomian daerah.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan penerapan konsep ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai bagian dari transformasi pembangunan daerah. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru merupakan salah satu implementasi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan produk domestik regional bruto yang signifikan namun juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan sosial. Konsep Ekonomi Hijau memiliki fokus utama pada pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan Konsep Ekonomi Biru memiliki fokus utama pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dengan tetap melindungi ekosistem laut yang ada.

Kabupaten Pemalang sebagai daerah yang memiliki potensi agraris dan maritim, hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan ekonomi hijau dan biru. Permasalahan terkait lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pemalang seperti kondisi darurat sampah, bencana banjir rob dan kekeringan, menjadi penanda bahwa pembangunan ekonomi hijau dan biru belum diterapkan dengan baik. Namun demikian upaya-upaya untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Pemalang sudah mulai dilakukan.

Implementasi Ekonomi Hijau dan Biru di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari (1) Pemanfaatan Panel Surya sebagai sumber listrik pada sebagian Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); (2) Pengembangan Pupuk Organik dan Demplot Padi Organik; (3) Pengolahan atau Daur Ulang Sampah di beberapa lokasi; (4) Pengembangan Desa Wisata Bahari; (4) Konservasi Mangrove; (5) Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan; dan (6) Pengembangan integrated farming atau kolaborasi sektor pertanian dan perikanan dalam satu tempat.

Dalam rangka mendorong Pembangunan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Pemalang, Penerapan Ekonomi Syariah juga perlu dilakukan dalam pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan Inpres No. 3 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/3700/SJ Tahun 2021 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Ekosistem Ekonomi Syariah. Salah satu dukungan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ekosistem ekonomi syariah di Kabupaten Pemalang adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kedepannya diharapkan dapat membangun kemitraan lintas sektor untuk memperkuat rantai nilai halal atau *halal value chain* termasuk sektor pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata dan keuangan mikro syariah. Berikut adalah data pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal di Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2022, Program Sertifikasi Halal produk olahan makanan dan minuman telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang. Dari hasil pemantauan Pendamping UMKM Pemerintah Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2025 sudah lebih dari 12.865 produk UMKM di Kabupaten Pemalang telah memiliki sertifikat halal.

2. Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat

Ketahanan pangan daerah menghadapi tantangan berupa alih fungsi lahan pertanian produktif yang sulit dikendalikan, tingginya biaya produksi pertanian, serta kerusakan infrastruktur irigasi terutama pada saluran tersier. Kondisi tersebut berpotensi

menurunkan produktivitas pertanian dan mengganggu stabilitas ketersediaan pangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi isu strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Ancaman ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang adalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pangan sehingga hasil produksi pangan juga menurun. Peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penyebab yang tidak dapat dihindari sehingga perlu upaya untuk melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan paling sedikit seluas ±34.299 hektar. Upaya ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Penguatan fondasi Ketahanan Pangan Dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat harus diarahkan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah Daerah harus berupaya mencapai swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bagi komoditas pangan strategis melalui sinergi dan keterpaduan antar sektor sehingga tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Distribusi pangan diarahkan guna menjamin ketersediaan pangan selalu dalam kondisi yang cukup, memadai dan dikelola dengan baik ditandai dengan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi konsumen namun disisi lain juga memberikan penghasilan yang memadai bagi petani. Sedangkan konsumsi diarahkan untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal termasuk meningkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayati perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat sekaligus mengatasi ketergantungan pada beras.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota yang Inklusif

Pembangunan infrastruktur daerah masih menghadapi ketimpangan kualitas antarwilayah, khususnya antara wilayah pegunungan dan pesisir. Selain itu, masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum perpipaan menunjukkan belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, dan energi bagi penduduk Kabupaten Pemalang yang terus bertambah dan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Infrastruktur mampu menciptakan

multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi.

Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pemalang disebabkan oleh infrastruktur yang belum optimal. Beberapa capaian kinerja infrastruktur Kabupaten Pemalang diantaranya adalah jalan kondisi mantap (baik) Kab. Pemalang 79,08% (765,72 Km) pada tahun 2025, naik dari 2024 yang hanya sebesar 75,05% (531,66 km). Capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai dengan tahun 2025 adalah 60,85% (42.709 unit) meningkat dari Tahun 2024 sebesar yang hanya sebesar 32,13%. Cakupan akses air minum yang layak pada Tahun 2025 sebanyak 91,04% mengalami peningkatan dari Tahun 2024 yang hanya sebesar 88,48%. Cakupan akses limbah domestik (*septic tank*) pada Tahun 2024 sebanyak 95,49% dan Tahun 2025 menjadi 95,72%. Perlu upaya seksama untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian layanan infrastruktur dalam kondisi keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 0,37 naik dibanding Tahun 2024 sebesar 0,38. Capaian kinerja lalu lintas adalah kemampuan ruas jalan untuk melayani lalu lintas dengan baik, semakin tinggi angka capaian kinerja lalu lintas menunjukkan kemampuan ruas jalan dalam melayani lalu lintas semakin berkurang. Sedangkan rasio konektivitas Tahun 2025 mencapai 73,64% naik dari tahun 2024 dengan capaian 71,42% wilayah di Kabupaten Pemalang yang terlayani sarana prasarana perhubungan, sehingga masih diperlukan upaya perluasan perhubungan untuk meningkatkan rasio konektivitas di Kabupaten Pemalang. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Tahun 2025 sebesar 72,49 (Sedang) meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 66,81 (Sedang) dengan capaian masing-masing komponen : indeks kualitas air sebesar 75,14 (Sedang), indeks kualitas udara sebesar 75,11 (Sedang) dan indeks tutupan lahan sebesar 63,08% (sedang).

4. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan persampahan masih menjadi tantangan pembangunan daerah yang ditandai dengan tingginya timbulan sampah domestik yang belum terkelola sejak dari sumbernya. Di sisi lain, keterbatasan lahan dan kapasitas teknologi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan pengelolaan sampah belum optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

5. Penguatan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Pemalang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, terutama di wilayah pesisir yang rawan banjir rob dan abrasi serta wilayah hulu yang mengalami deforestasi sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu,

kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur mitigasi bencana di kawasan rawan bencana masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan penanggulangan bencana menjadi isu strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Sebagai kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana menunjukkan bahwa bencana di Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi baik banjir maupun kekeringan dimana bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan aktivitas manusia dan ekonomi serta perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

6. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi yang memerlukan penanganan serius, serta rendahnya minat baca dan literasi digital masyarakat. Permasalahan tersebut mempengaruhi kualitas dan daya saing sumber daya manusia daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal hal, ini ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tercatat sebesar 69,47 berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”. Dengan capaian tersebut Kabupaten Pemalang berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 73,87 dan 75,02 serta berada pada peringkat terakhir dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Kualitas umur harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Beberapa hal yang menyebabkan kualitas SDM belum optimal:

a) Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di bidang pendidikan Kabupaten Pemalang adalah masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang, dimana pada di Tahun 2025 HLS Kabupaten Pemalang sebesar 12,03 tahun masih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (13,05 tahun) dan Nasional

(13,30 tahun). Permasalahan lainnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang di tahun 2025 adalah 6,69 tahun lebih rendah dibandingkan dengan RLS Jawa Tengah (8,15 tahun) dan Nasional (9,07 tahun). Salah satu penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang diantaranya adalah banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS). Masih ditemukannya ATS merupakan tanda belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan. Sampai dengan tahun 2025 Masih terdapat 23,325 ATS di Kabupaten Pemalang dengan berbagai penyebab, diantaranya tidak terlayani PAUD, belum pernah sekolah, putus sekolah dan lulus tidak lanjut;

b) Kesehatan yang belum optimal

Derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Kualitas umur harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Tahun 2025 UHH Kabupaten Pemalang adalah 74,55 meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 74,23, namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,25 namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan nasional sebesar 74,47. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia juga ditandai dengan masih adanya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pemalang. Di tahun 2025 kasus AKI sebesar 43,23 per 100.000 kelahiran hidup atau mengalami penurunan sebesar 3,72 dari tahun 2024 sebesar 49,95/100.000 KH. Selanjutnya Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami kenaikan dari 5,94 per 1.000 KH di tahun 2024 menjadi 6,43 per 1.000 KH (119 kasus) pada tahun 2025. AKB merupakan kematian bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebagai akibat dari kondisi ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis di masa kehamilan yang mengganggu pertumbuhan janin. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2025 sebesar 6,14/1.000 KH atau sejumlah 123 kasus turun dari tahun 2024 sebesar 7,09/1000 KH atau sejumlah 157 kasus.

Selain beberapa hal diatas masih terdapat kasus balita stunting di Kabupaten Pemalang walaupun perkembangannya mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Tahun 2025 balita stunting sebesar 10,09% naik dari tahun 2024 sebesar 0,06%. Sedangkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal ditandai oleh Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pemalang di Tahun 2025 sebesar 0,24 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat (0,80);

c) Tenaga kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja di

Kabupaten Pemalang belum optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari banyaknya pencari kerja di Kabupaten Pemalang yang pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 18.005 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat sebesar 84,67%, diikuti lulusan perguruan tinggi sebesar 6,79%, SMP/ sederajat sebesar 6,07%, serta SD dan di bawahnya sebesar 0,87%. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas pencari kerja berasal dari kelompok pendidikan menengah yang umumnya memiliki keterampilan kerja terbatas dan memerlukan peningkatan kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pemalang semakin meningkat. Tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang sebesar 6,61% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,66% dan Nasional sebesar 4,85%. Kondisi Ini menjadi tantangan Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar;

- d) Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang masih perlu perhatian, dapat dilihat hasil komponen pembentuk indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pemalang. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan masih belum mencapai hasil yang optimal. Peran perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Pemalang sebesar 49,4% lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (50,67%) dan Nasional (49,99%). Kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pemalang belum terlaksana secara optimal, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang tahun 2025 yaitu 87,71 dimana nilai IPG tersebut lebih rendah dibandingkan capaian IPG provinsi (93,73) dan nasional (91,85). Hal ini menunjukkan upaya pemberdayaan perempuan masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan melalui upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan partisipasi anak dalam pembangunan. Anak sebagai investasi sumber daya manusia masa depan perlu diperhatikan tumbuh kembangnya dengan baik. Hal ini tentu bisa terwujud dalam lingkungan yang layak untuk anak mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sampai dengan tahun 2025 sebanyak 161 atau sebesar 72,19% desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang dinyatakan layak anak, sebanyak 14 atau sebesar 100% kecamatan di Kabupaten Pemalang dinyatakan layak anak dan Kabupaten Pemalang mendapatkan kategori Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya, namun belum semua desa di kabupaten Pemalang layak anak, ini menjadi tantangan untuk mewujudkan semua Desa yang layak anak;

- e) Pemajuan budaya peningkatan minat baca, dan pengembangan Pemuda dan Olahraga

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari karakter masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai budaya, nilai agama di Kabupaten Pemalang. Pembangunan sumber daya manusia bisa terus dilakukan melalui pendidikan karakter yang dikembangkan di tingkat Pendidikan anak usia dini (PAUD). Budaya minat baca (literasi) di masyarakat juga tidak kalah penting menjadi salah satu alat ukur terkait peningkatan kualitas SDM.

Kinerja pengembangan pemuda kepemudaan dan olah raga yang belum optimal. Masih perlu dukungan, dorongan dan motivasi pada para pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, ekonomi mandiri, mencetak atlet yang berprestasi di tingkat regional dan nasional, serta mendorong pemuda untuk menjadi wirausaha kreativitas dan inovatif.

7. Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih relatif tinggi. Selain itu, keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan belum selarasnya akses lapangan kerja dengan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor yang mempengaruhi perlambatan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi fokus penting pembangunan daerah.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat. Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 13,32% berkurang 1,60% dibanding tahun 2024 yang sebesar 14,92%. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terkait data dan ketepatan sasaran intervensi.

Akselerasi ini dilakukan dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak dan peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

8. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum terintegrasinya basis data sektoral antar perangkat daerah, rendahnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, serta pelayanan publik yang masih membutuhkan interaksi tatap muka secara intensif. Dengan capaian indeks reformasi birokrasi (IRB) sebesar 83,16 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik belum optimal.

Penyelenggaraan teknologi digital pada penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari Reformasi Birokrasi yang masih belum optimal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa penurunan kualitas hasil antara, yaitu Indeks profesionalitas ASN. Capaian IP ASN Kabupaten Pemalang di tahun 2025 sebesar 79,98 berada pada kategori sedang. Dari empat komponen pembentuk indeks profesionalisme ASN, kompetensi merupakan dimensi dengan capaian kinerja terendah dibandingkan ketiga dimensi lainnya. Implementasi SPBE tahun 2025 sebesar 3,38 naik dari tahun sebelumnya sebesar sebesar 2,23. Nilai maturitas SPIP tahun 2025 sebesar 2,93. Nilai kapabilitas APIP tahun 2025 pada level 2 turun dibanding dengan tahun 2024. Masih perlunya optimalisasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, namun belum semua perangkat daerah yang memberikan pelimpahan kewenangan ke kecamatan.

9. Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, efisiensi belanja daerah, khususnya pada belanja non-prioritas, masih perlu ditingkatkan agar ruang fiskal daerah dapat lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional, serta hasil telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional yang diimplementasikan di daerah, yang berpotensi mempengaruhi struktur, kinerja, dan prospek perekonomian Kabupaten Pemalang.

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dengan berpedoman pada RPJMD tersebut, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027, dan memperhatikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Pemalang pada tahun sebelumnya, maka ditetapkan target pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Realisasi dan Target Capaian Pembangunan Kabupaten Pemalang
Tahun 2023-2027

No	Indikator Pembangunan Daerah	Capaian			Target/Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	PDRB (ADHB) per kapita (Rp.ribu)	21,23	22,63	24,05	27,55-32,36	32,55 42,02
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,14	5,11	5,80	4,14–4,90	5,90-7,75
3.	TPT (%)	6,44	6,63	6,61	6,19–5,89	6,05-5,75
4.	Kemiskinan (%)	15,03	14,92	13,32	13,64–14,31	12,20-11,82
5.	Inflasi (%)	3,28	2,19	2,83	2,36	1,5-3,5
6.	IPM	68,03	68,65	69,47	69,75	71,10

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2026
RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029
*Hasil Rakortekbang tahun 2025
** Hasil Rakortekbang tahun 2026

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang semakin positif dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,14 %, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2024 menjadi 5,11 %, dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2025 hingga mencapai 5,80 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah semakin pulih dan bergerak ekspansif seiring meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, investasi, serta membaiknya kinerja sektor-sektor unggulan daerah. Capaian ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin solid pascapandemi, tetapi juga menempatkan kinerja ekonomi daerah lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,37%) maupun nasional (5,11%).

Secara year-on-year, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,97 poin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024, kemudian naik kembali sebesar 0,69 poin dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Laju pertumbuhan yang konsisten tersebut mencerminkan adanya penguatan struktur ekonomi daerah serta efektivitas kebijakan pembangunan yang mendorong sektor riil. Apabila tren ini dapat dipertahankan, maka Kabupaten Pemalang memiliki modal yang cukup baik untuk mencapai target pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk Tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 4,14–4,90 %. Rentang target ini relatif lebih konservatif dibanding realisasi Tahun 2025 yang telah mencapai 5,80 %. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai langkah antisipatif terhadap potensi perlambatan ekonomi global, ketidakpastian harga komoditas, inflasi, maupun risiko eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Namun demikian, apabila momentum pertumbuhan 2025 tetap terjaga, maka capaian Tahun 2026 berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2027 target pertumbuhan ekonomi dipatok lebih tinggi pada kisaran 5,90–7,75 %. Target ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas, pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Batas atas target sebesar 7,75 % tergolong ambisius dan memerlukan intervensi kebijakan yang kuat, terukur, dan konsisten.

Untuk mencapai target Tahun 2027 diperlukan beberapa prasyarat utama, yaitu:

1. peningkatan investasi daerah melalui kemudahan perizinan dan kepastian usaha.
2. penguatan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengendalian inflasi.
3. hilirisasi sektor unggulan terutama pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah.
4. percepatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pasar, dan konektivitas kawasan ekonomi.
5. penguatan SDM dan digitalisasi ekonomi agar produktivitas meningkat.

Dengan melihat tren realisasi 2023–2025, target bawah tahun 2027 sebesar 5,90 % cukup realistis untuk dicapai. Namun target atas sebesar 7,75 % membutuhkan lompatan pertumbuhan yang hanya dapat terwujud apabila seluruh sektor ekonomi tumbuh kuat secara simultan dan didukung stabilitas makroekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, strategi pembangunan tahun 2027 perlu difokuskan pada sektor pengungkit pertumbuhan yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

b. Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara tren, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang menunjukkan penurunan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 173,40 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 194,20 ribu jiwa, atau berkurang sekitar 1,60%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun secara relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang masih tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari persentase penduduk miskin tahun 2025 sebesar 13,32%, yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,48% dan nasional sebesar 8,25%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan yang terjadi belum cukup signifikan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah lain. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan antara lain adalah struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dengan produktivitas relatif rendah, khususnya pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal yang produktif menyebabkan sebagian besar angkatan kerja terserap di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dalam mengakses peluang kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. Di sisi lain, belum optimalnya hilirisasi produk pertanian dan pengembangan agroindustri menyebabkan potensi nilai tambah ekonomi belum termanfaatkan secara maksimal di tingkat lokal.

Selain faktor struktural tersebut, aspek spasial juga berperan, di mana kantong-kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar, layanan publik, serta konektivitas pasar. Ketimpangan distribusi pembangunan antar wilayah ini memperlambat proses penurunan kemiskinan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada perbaikan struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan konektivitas dan akses ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat tiga isu kunci yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah:

1. transformasi struktur ekonomi
Perlu diarahkan secara terencana agar pergeseran dari sektor primer ke sekunder tidak meninggalkan sektor pertanian, melainkan mengintegrasikannya melalui penguatan agroindustri.

- 2. nilai tambah dan rantai pasok
Tantangan utama bukan pada produksi, tetapi pada hilirisasi dan distribusi. Tanpa intervensi pada aspek ini, potensi ekonomi daerah tidak akan optimal.
- 3. digitalisasi dan akses pasar
Rendahnya adopsi teknologi dan keterbatasan akses pasar masih menjadi *bottleneck* utama, khususnya bagi UMKM.

Dengan membaca tren tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pemalang ke depan perlu difokuskan pada penguatan agroindustri berbasis klaster, akselerasi digitalisasi UMKM, serta integrasi sistem perdagangan yang lebih efisien dan inklusif. Ini bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

c. PDRB Perkapita

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah adalah PDRB per kapita, yaitu rasio antara total nilai tambah yang dihasilkan seluruh aktivitas ekonomi dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk. Indikator ini tidak hanya merefleksikan kapasitas produksi ekonomi daerah, tetapi juga memberikan gambaran rata-rata tingkat pendapatan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, dinamika PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sendiri menunjukkan nilai nominal pendapatan per penduduk tanpa memperhitungkan faktor inflasi.

Perkembangan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang relatif positif dalam jangka menengah. Pada periode 2018–2019 terjadi peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk serta tekanan terhadap kinerja ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada periode 2021–2022 PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dimana pada tahun 2023 PDRB per kapita mencapai Rp21.235.598 per orang, meningkat menjadi Rp22.630.000 per orang pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi Rp24.050.000 per orang pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah per penduduk.

Meskipun trend PDRB per kapita menunjukkan peningkatan, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan:

- 1. Pertumbuhan Nominal vs Riil
PDRB per kapita ADHB masih bersifat nominal dan belum mencerminkan daya beli riil masyarakat. Kenaikan yang terjadi berpotensi dipengaruhi oleh inflasi, sehingga perlu dikonfirmasi dengan PDRB per kapita ADHK (riil) untuk memastikan adanya peningkatan kesejahteraan yang substantif.

2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk
Fluktuasi pada tahun 2020 menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ekspansi ekonomi akan menekan PDRB per kapita. Artinya, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas menjadi faktor kunci.
3. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Kenaikan PDRB per kapita belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Jika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada sektor tertentu atau kelompok tertentu, maka disparitas pendapatan tetap berpotensi tinggi.
4. Struktur Ekonomi dan Produktivitas
Dengan struktur ekonomi yang masih ditopang sektor pertanian, peningkatan PDRB per kapita ke depan sangat bergantung pada transformasi struktural menuju sektor dengan produktivitas lebih tinggi, seperti industri pengolahan dan jasa bernilai tambah.
5. Implikasi Kebijakan
Untuk mendorong peningkatan PDRB per kapita yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu fokus pada:
 - Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan *link and match* dengan kebutuhan industri
 - Penguatan hilirisasi sektor unggulan (khususnya agroindustri)
 - Pengendalian inflasi daerah agar peningkatan pendapatan tidak tergerus harga
 - Perluasan kesempatan kerja bernilai tambah tinggi
 - Penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis peningkatan pendapatan

Secara keseluruhan, tren peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Pemalang merupakan sinyal positif, namun perlu dipastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar peningkatan angka nominal.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama periode 2020–2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2023–2025, sebelum diproyeksikan menurun pada tahun 2026–2027. Pada tahun 2023, TPT tercatat sebesar 6,55%, kemudian sedikit meningkat menjadi 6,63% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja masih lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang tersedia. Namun demikian, pada tahun 2025 TPT mulai mengalami perbaikan dengan turun menjadi 6,61%, meskipun penurunannya masih relatif terbatas. Diketahui dari total 867.489 penduduk usia produktif (15–59 tahun), sebanyak 57.356 orang masih berstatus pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja pada periode sebelumnya, pasar kerja di Kabupaten Pemalang masih menghadapi tekanan struktural.

Keberadaan investasi industri, khususnya pembangunan pabrik skala besar, sejatinya memberikan harapan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, hingga akhir tahun 2024, sebagian besar industri tersebut belum beroperasi secara optimal karena masih dalam tahap konstruksi dan penyelesaian pembangunan. Dampaknya, tambahan kapasitas lapangan kerja yang diharapkan belum terealisasi secara signifikan, sehingga angka pengangguran belum mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung meningkat. Di sisi lain, struktur pengangguran menunjukkan bahwa mayoritas pencari kerja didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 28.060 orang atau 48,92% dari total penganggur. Hal ini mencerminkan adanya tantangan pada aspek kualitas dan kesesuaian (*link and match*) antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang saat ini mengarah pada beberapa isu kunci yang perlu segera diintervensi:

1. *Mismatch Keterampilan (Skill Mismatch)*
Dominasi lulusan SMA dalam struktur pengangguran menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kerja masih bersifat umum dan belum spesifik sesuai kebutuhan industri. Ini menjadi hambatan utama dalam proses rekrutmen, terutama untuk sektor industri pengolahan yang membutuhkan keterampilan teknis.
2. *Lag Effect* Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Investasi yang masuk belum memberikan dampak langsung terhadap penurunan pengangguran karena adanya jeda waktu (*time lag*) antara pembangunan dan operasional industri. Tanpa strategi *bridging*, kondisi ini akan terus menahan laju penurunan TPT dalam jangka pendek.
3. Keterbatasan Lapangan Kerja Berkualitas
Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal dan pertanian menyebabkan terbatasnya lapangan kerja formal dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi.
4. Implikasi Kebijakan
Untuk merespons kondisi tersebut, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu difokuskan pada:
 - Penguatan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*)
 - Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan (SMK, BLK)
 - Penyusunan skema *pre-employment training* bagi calon tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri yang akan segera beroperasi
 - Pengembangan kewirausahaan dan UMKM sebagai penyangga penyerapan tenaga kerja jangka pendek
 - Fasilitasi percepatan operasional investasi agar segera memberikan dampak ekonomi riil

Secara keseluruhan, kenaikan TPT yang relatif kecil pada tahun 2025 harus dibaca sebagai sinyal bahwa pasar kerja Pemalang sedang berada pada fase transisi. Tanpa intervensi yang tepat, potensi bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, dengan

strategi yang terarah—khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan percepatan hilirisasi industri—pengangguran dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

e. Inflasi

Pada tahun 2025, laju inflasi Kabupaten Pemalang tercatat meningkat menjadi 2,83% (y-on-y), dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,19%. Meskipun demikian, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang yang terkendali, walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga pada beberapa kelompok pengeluaran, dengan penyumbang utama inflasi pada Desember 2025 (y-on-y) antara lain emas perhiasan, tarif rumah sakit, minyak goreng, biaya pendidikan (akademi/ perguruan tinggi), beras, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek mesin (SKM), kopi bubuk, bawang merah, serta daging ayam ras. Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang berperan sebagai penahan inflasi, yaitu cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, telur ayam ras, pepaya, popok bayi sekali pakai (diapers), cabai hijau, daun bawang, dan wortel.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang secara rutin melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pengendalian. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan konkret, antara lain melalui operasi pasar, penyelenggaraan pasar murah, serta pemberian bantuan kepada masyarakat guna menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, kenaikan inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 masih dalam batas wajar, namun perlu diantisipasi secara serius agar tidak berkembang menjadi tekanan yang mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pendekatan pengendalian yang lebih terintegrasi antara jangka pendek dan jangka menengah akan menjadi kunci dalam menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah secara multidimensi. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan yang direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), pendidikan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta dimensi standar hidup layak yang direfleksikan melalui pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 69,47, meningkat sebesar 0,82 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 68,65 (perhitungan menggunakan basis UHH hasil *Long Form* SP 2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM, meskipun secara relatif masih tergolong dalam kategori sedang. Namun demikian, posisi IPM Kabupaten Pemalang masih berada di bawah rata-rata IPM

kabupaten/kota di sekitarnya, serta menempati peringkat ke-35 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian IPM Kabupaten Pemalang mengandung beberapa implikasi penting:

1. Kenaikan positif namun belum kompetitif
Kenaikan IPM menunjukkan adanya kemajuan, tetapi laju peningkatan tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain. Artinya, diperlukan akselerasi yang lebih progresif dan terarah.
2. Indikasi ketimpangan antar dimensi
Posisi IPM yang masih relatif rendah mengindikasikan kemungkinan adanya dimensi yang tertinggal, umumnya pada aspek pendidikan (RLS) dan daya beli masyarakat. Ini menjadi sinyal bahwa intervensi belum merata atau belum efektif pada seluruh dimensi.
3. Korelasi dengan struktur ekonomi
Rendahnya IPM juga berkorelasi dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor berproduktivitas rendah, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan dan pengeluaran per kapita.
4. Implikasi kebijakan
Untuk meningkatkan IPM secara signifikan, perlu difokuskan pada:
 - Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya untuk menaikkan RLS
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan penurunan angka kematian
 - Peningkatan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas
 - Intervensi berbasis wilayah (spasial) untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang merupakan sinyal positif, namun masih memerlukan upaya luar biasa (*extra effort*) agar dapat keluar dari kelompok menengah bawah dan bertransformasi menuju kualitas SDM yang lebih unggul dan kompetitif.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realisasi dan proyeksi keuangan daerah, kerangka pendanaan, serta strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang dirancang untuk memperkuat kualitas layanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat transformasi ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata.

Sebagai landasan reformasi desentralisasi fiskal, UU HKPD menegaskan penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui lima pilar utama, yaitu:

1. Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja.

Melalui optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif serta mempertimbangkan kebutuhan daerah, dan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan kapasitas fiskal, tetapi juga pada pemerataan kualitas layanan publik.

2. Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Melalui peningkatan pendapatan asli daerah tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kemudahan berusaha, termasuk melalui implementasi skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) guna memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah.

Melalui simplikasi dan sinkronisasi program prioritas, penerapan standar harga dalam penyusunan anggaran, serta pengendalian struktur belanja dengan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dan minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40%. Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam masa transisi agar APBD semakin berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

4. Penguatan pembiayaan daerah.

Melalui pemanfaatan utang daerah secara selektif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan mekanisme persetujuan melalui integrasi dengan proses pembahasan APBD, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif berbasis kolaborasi dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, maupun kerjasama antar daerah, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudentality*).

5. Penguatan sinergi fiskal untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, pengendalian batas defisit dan pembiayaan utang daerah, serta harmonisasi bagan akun standar yang didukung oleh sistem informasi keuangan terintegrasi secara nasional.

Kelima pilar tersebut selaras dengan arah kebijakan TKD tahun 2027 yang difokuskan pada penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi, serta penguatan *earmarking* anggaran pada sektor prioritas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU HKPD membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola fiskal Kabupaten Pemalang ke depan:

1. perubahan paradigma dari *money follow function* ke *money follow program* prioritas. Kebijakan TKD berbasis kinerja dan penguatan *earmarking*

mendorong pergeseran orientasi penganggaran dari sekadar memenuhi fungsi kelembagaan menjadi berbasis pada pencapaian *outcome* pembangunan. Hal ini menuntut perencanaan yang lebih tajam dan terukur.

2. tekanan terhadap struktur belanja daerah. Batasan belanja pegawai maksimal 30% menjadi tantangan nyata bagi daerah yang saat ini masih memiliki proporsi belanja pegawai tinggi. Diperlukan strategi penyesuaian yang sistematis tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, termasuk melalui efisiensi dan redistribusi belanja.
3. optimalisasi PAD tanpa distorsi ekonomi. Reformasi PDRD membuka ruang peningkatan PAD, namun harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha. Keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak menjadi kunci.
4. peluang akselerasi infrastruktur melalui pembiayaan inovatif. Fleksibilitas dalam pembiayaan, termasuk utang daerah dan skema kerja sama, memberikan peluang percepatan pembangunan. Namun, kapasitas fiskal dan manajemen risiko menjadi faktor penentu agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
5. kebutuhan penguatan tata kelola dan digitalisasi fiskal. Integrasi sistem informasi keuangan dan harmonisasi bagan akun standar menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keuangan daerah berbasis UU HKPD menuntut transformasi mendasar dalam pengelolaan fiskal daerah. Kabupaten Pemalang perlu merespons secara adaptif dan progresif agar tidak hanya mampu memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja, dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, yang diarahkan pada pengembangan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, penguatan industri berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan UMKM. Arah kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mendukung perwujudan Misi RESIK, yang meliputi peningkatan pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, penguatan transformasi birokrasi yang berdampak, serta peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menekankan prinsip efektif, efisien,

transparan, akuntabel, tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat.

Dari sisi pendapatan, pajak daerah masih menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Pemalang pada periode 2024–2025 menunjukkan tren yang meningkat. Realisasi PAD pada tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 29,92% dibandingkan tahun 2024 atau mencapai Rp402,958,330,520,00. Peningkatan ini antara lain didorong oleh kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang naik sebesar Rp5.298.282.944,00 atau 19,18%, serta Pajak Air Tanah yang meningkat sebesar Rp124.754.955,00 atau 8,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Retribusi daerah sebagai komponen PAD lainnya juga menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2025, realisasi retribusi daerah mencapai Rp247.400.317.556,00 atau meningkat sebesar Rp8.030.235.295,00 (3,35%) dibandingkan tahun 2024. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada Retribusi Jasa Usaha yang melonjak menjadi Rp9.314.348.123,00 atau naik sebesar 204,24% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp31.355.655.173,00 pada tahun 2025, meningkat sebesar 20,45% dibandingkan tahun 2024.

Komponen lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi sebesar Rp25.116.317.485,00 pada tahun 2025 atau naik sebesar 51,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan sebesar Rp63.274.385.039,00 (2,69%), dari Rp2.352.632.220.128,00 pada tahun 2024 menjadi Rp2.289.357.835.089,00 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat yang masih cukup tinggi.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan pengelolaan pendapatan di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Ketergantungan fiskal masih tinggi
Penurunan pendapatan transfer mengindikasikan risiko fiskal yang cukup signifikan, mengingat struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer. Hal ini menuntut peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
2. Kinerja PAD mulai meningkat, namun basis masih terbatas
Pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif, namun secara nominal masih relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah. Artinya, ruang fiskal daerah masih terbatas dan perlu diperluas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Potensi pajak dan retribusi belum optimal
Kenaikan signifikan pada BPHTB dan retribusi jasa usaha menunjukkan adanya potensi yang dapat terus digali, terutama dari sektor properti, jasa,

dan aktivitas ekonomi lokal yang berkembang.

4. Peluang Diversifikasi sumber pendapatan

Peningkatan pada komponen lain-lain PAD yang sah dan pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan peluang diversifikasi sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi BUMD dan pemanfaatan aset daerah.

Ke depan, arah kebijakan pendapatan daerah perlu difokuskan pada:

- Peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD berbasis potensi lokal
- Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
- Penguatan pengelolaan aset daerah agar lebih produktif
- Peningkatan investasi daerah untuk memperluas basis pajak
- Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengantisipasi fluktuasi pendapatan transfer

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang cukup positif, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, strategi penguatan PAD dan diversifikasi sumber pendapatan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kapasitas keuangan yang berkelanjutan, kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang diarahkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan secara terencana, terukur, inovatif, serta berbasis transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, melalui:

1. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Difokuskan pada penguatan sistem pendataan potensi pendapatan secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak berbasis teknologi informasi. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan data potensi yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan (*tax gap*) antara potensi riil dan realisasi penerimaan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan PAD diarahkan bertransformasi dari pendekatan administratif menuju pengelolaan berbasis bukti (*evidence-based*) dan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

2. Penguatan kerangka regulasi pendapatan daerah

Melalui penyesuaian tarif dan dasar pengenaan pajak serta retribusi dilakukan secara adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah, dengan tetap menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan daya saing investasi. Selain itu, kebijakan regulatif diarahkan untuk mendorong inovasi pengelolaan PAD, antara lain melalui modernisasi sistem perpajakan, revitalisasi tata kelola pasar rakyat, serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.

3. Transformasi tata kelola pendapatan daerah

Dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Reformasi pengelolaan retribusi difokuskan pada objek-objek strategis yang memiliki kontribusi besar dan sensitivitas publik tinggi, seperti parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, persampahan, serta pengelolaan destinasi pariwisata dan fasilitas olahraga. Kebijakan ini juga didukung oleh penguatan kualitas belanja daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur layanan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan.

4. Penguatan sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan

Hal ini diwujudkan melalui integrasi sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (tax clearance) dengan layanan perizinan daerah sebagai instrumen peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah secara konsisten.

5. Optimalisasi peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Selain sebagai unit pelayanan, BLUD diharapkan menjadi entitas yang produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang langsung dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, pemanfaatan aset daerah dioptimalkan melalui skema yang produktif dan bernilai ekonomi, baik melalui kerja sama pemanfaatan maupun pola lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber penguatan fiskal.

6. Penguatan sinergi fiskal dengan Pemerintah Provinsi

Melalui peningkatan PAD, khususnya dalam optimalisasi penerimaan dari opsen PKB, opsen BBNKB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Pajak Air Tanah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi data potensi, serta kolaborasi dalam pendataan dan pemungutan pajak.

Di samping pajak dan retribusi daerah, struktur PAD Kabupaten Pemalang juga ditopang oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Komponen ini memiliki peran strategis karena berbasis pada kinerja korporasi daerah dan berpotensi terus ditingkatkan melalui pengelolaan investasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi profitabilitas. Oleh karena itu, optimalisasi kontribusi BUMD perlu didorong melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peningkatan kinerja usaha, serta penyusunan rencana bisnis yang realistis dan adaptif. Peran Pemerintah Daerah bersama DPRD menjadi krusial dalam memberikan arah kebijakan strategis, termasuk dalam penetapan target laba yang rasional dan berkelanjutan sebagai dasar proyeksi dividen daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas ruang fiskal dalam mendukung pembiayaan prioritas pembangunan daerah.

Realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah Tahun 2023-2027 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2027

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)	Realisasi Tahun 2025**)	Proyeksi Tahun 2026***)	Proyeksi Tahun 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	2.572.342.827.720	2.755.590.550.648	2,812,886,742,133	2.667.466.672.000	2.638.190.655.000
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	363.617.077.022	402.958.330.520	523,528,907,044	547.006.393.000	540.081.333.000
4.1.0 1	Pajak Daerah	116.205.661.323	120.978.507.825	219,656,616,830	248.060.000.000	243.435.000.000
4.1.0 2	Retribusi Daerah	36.963.121.727	239.370.082.261	247,400,317,556	256.258.000.000	253.787.940.000
4.1.0 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.940.780.939	26.031.762.403	31,355,655,173	29.458.393.000	29.458.393.0000
4.1.0 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	186.507.513.033	16.577.978.031	25,116,317,485	13.230.000.000	13.400.000.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.208.725.750.698	2.352.632.220.128	2,289,357,835,089	2.120.460.279.000	2.098.109.322.000
4.2.0 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.014.258.742.643	2.141.851.769.410	2,152,826,287,794	1.991.315.415.000	1.961.477.057.000
4.2.0 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.467.008.055	210.780.450.718	136,531,547,295	129.144.864.000	136.632.265.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0 2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026
*) LRA APBD TA 2023
**) LRA APBD TA 2024
***) APBD TA 2026 (Perda Nomor 8 Tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp2,57 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,81 triliun pada tahun 2025, namun diproyeksikan menurun menjadi Rp2,67 triliun pada tahun 2026 dan Rp2,63 triliun pada tahun 2027. Penurunan proyeksi tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun. PAD meningkat dari Rp363,62 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp402,96 miliar pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 10,82 persen. Pada tahun 2025, PAD kembali meningkat signifikan menjadi Rp523,53 miliar atau naik sekitar 29,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, PAD diproyeksikan mencapai Rp547,01 miliar pada tahun 2026 sebelum sedikit menurun menjadi Rp540,08 miliar pada tahun 2027. Peningkatan PAD terutama didorong oleh kenaikan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah juga meningkat dari sekitar 14,14% pada tahun 2023 menjadi sekitar 20,47% pada tahun 2027, menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Di sisi lain, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Realisasi pendapatan transfer meningkat dari Rp2,21 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,35 triliun pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 realisasinya sedikit menurun menjadi Rp2,29 triliun. Selanjutnya, pendapatan transfer diproyeksikan terus menurun menjadi Rp2,12 triliun pada tahun 2026 dan Rp2,10 triliun pada tahun 2027. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Transfer Pemerintah Pusat, yang diproyeksikan turun dari Rp2,15 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,99 triliun pada tahun 2026 dan Rp1,96 triliun pada tahun 2027. Meskipun demikian, kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah masih sangat dominan, yaitu sekitar 85,86% pada tahun 2023 dan diperkirakan masih sebesar 79,53% pada tahun 2027.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemandirian fiskal daerah mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan PAD yang relatif tinggi, struktur pendapatan Kabupaten Pemalang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, khususnya dari pajak daerah, retribusi daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah, perlu terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dalam meningkatkan PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan investasi daerah, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya secara berkelanjutan.

Tabel 3. 3
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024-2025

NO	URAIAN	2024	2025
4	PENDAPATAN DAERAH	98,16 %	100,26%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	96,58 %	97,39%
4.1.01	Pajak Daerah	98,19 %	89,81%
4.1.02	Retribusi Daerah	94,65 %	99,73%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100,00 %	113,92%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110,01 %	144,47%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	98,43 %	100,94%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	99,48 %	101,17%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88,90 %	97,52%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00%	0.00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00%	0.00%
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0.00%	0.00%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026
LRA APBD TA 2024
LRA APBD TA 2025 (unaudit)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui secara umum kinerja realisasi pendapatan daerah menunjukkan kondisi yang cukup baik dan cenderung meningkat. Hal tersebut terlihat dari capaian realisasi pendapatan daerah yang pada tahun 2024 mencapai 98,16% dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 100,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan menunjukkan peningkatan dari 96,58% pada tahun 2024 menjadi 97,39% pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan PAD meskipun masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang belum sepenuhnya mencapai target.

Dari sisi Pajak Daerah, realisasi mengalami penurunan dari 98,19% pada tahun 2024 menjadi 89,81% pada tahun 2025. Penurunan capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal dan kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan wajib pajak, maupun belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD.

Sebaliknya, pada komponen Retribusi Daerah terjadi peningkatan realisasi dari 94,65% pada tahun 2024 menjadi 99,73% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelayanan dan pemungutan retribusi daerah, serta meningkatnya aktivitas pelayanan publik yang menjadi objek retribusi daerah.

Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, capaian realisasi meningkat cukup signifikan dari 100,00% pada tahun 2024 menjadi 113,92% pada tahun 2025. Capaian di atas target tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan penyertaan modal dan hasil usaha daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pendapatan daerah.

Selanjutnya, komponen Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan peningkatan paling signifikan, yaitu dari 110,01% pada tahun 2024 menjadi 144,47% pada tahun 2025. Capaian tersebut mengindikasikan adanya penerimaan daerah yang melampaui target, kemungkinan berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, BLUD, atau sumber pendapatan sah lainnya yang meningkat cukup tinggi pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pendapatan daerah yang cukup baik di luar pajak dan retribusi daerah.

Pada komponen Pendapatan Transfer, realisasi juga menunjukkan peningkatan dari 98,43% pada tahun 2024 menjadi 100,94% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah dapat terealisasi secara optimal bahkan melampaui target pada tahun 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami peningkatan capaian dari 99,48% pada tahun 2024 menjadi 101,17% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya dapat

tersalurkan secara baik sesuai target bahkan melampaui proyeksi.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami peningkatan dari 88,90% pada tahun 2024 menjadi 97,52% pada tahun 2025, meskipun realisasinya masih belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan koordinasi dan penyaluran pendapatan transfer antar daerah, namun masih perlu dioptimalkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, baik tahun 2024 maupun 2025 tidak terdapat realisasi pendapatan atau tercatat sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menetapkan target maupun tidak memperoleh pendapatan dari kelompok pendapatan tersebut selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, ditandai dengan realisasi pendapatan daerah yang melampaui target. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh optimalisasi pendapatan transfer, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, penurunan capaian pajak daerah menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan sistem pemungutan, digitalisasi pelayanan perpajakan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. Penganggaran pendapatan transfer mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Adapun besaran final pendapatan transfer akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 atau Peraturan Menteri Keuangan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2027, serta publikasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Dari kondisi tersebut, diketahui kondisi pendapatan di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Ketergantungan Tinggi terhadap Transfer Pusat
Struktur APBD menunjukkan bahwa lebih dari 75% pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat. Kondisi ini menempatkan fiskal daerah pada posisi rentan terhadap perubahan kebijakan nasional (*fiscal dependency risk*).
2. Stagnasi PAD sebagai *Early Warning*
Proyeksi PAD tahun 2027 yang stagnan menjadi sinyal peringatan bahwa kapasitas fiskal lokal belum berkembang optimal. Tanpa intervensi kebijakan yang progresif, ruang fiskal daerah akan semakin terbatas.
3. Tekanan Fiskal
Penurunan pendapatan transfer sebesar 1,05% akan berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah, terutama pada belanja pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ini berpotensi menciptakan *fiscal gap* jika tidak diimbangi dengan optimalisasi PAD atau efisiensi belanja.

4. Keterbatasan Ruang Fiskal (*Fiscal Space Constraint*)

Dengan PAD yang relatif kecil dan transfer yang menurun, ruang fiskal menjadi semakin sempit. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan daerah dalam melakukan ekspansi program prioritas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu segera mengambil kebijakan sebagai berikut:

- Akselerasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis digitalisasi
- Optimalisasi aset daerah dan kinerja BUMD sebagai sumber alternatif pendapatan
- Penajaman belanja berbasis prioritas (*money follow program*) untuk menjaga efektivitas
- Penguatan strategi efisiensi belanja untuk mengantisipasi penurunan transfer
- Pengembangan skema pembiayaan alternatif (KPBU, kerja sama investasi)

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2027 menunjukkan adanya tekanan fiskal yang perlu diantisipasi secara serius. Tanpa langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal, kondisi ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, situasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Target/Proyeksi Pendapatan Daerah dengan struktur pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4
Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan 2027

NO	URAIAN	2026	2027
4	PENDAPATAN DAERAH	2.667.466.672.000	2.638.190.655.000
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	547.006.393.000	540.081.333.000
4.1.01	Pajak Daerah	248.060.000.000	243.435.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	256.258.000.000	253.787.940.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.458.393.000	29.458.393.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.230.000.000	13.400.000.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.120.460.279.000	2.098.109.322.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.991.315.415.000	1.961.477.057.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.144.864.000	136.632.265.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dalam skala yang relatif terbatas. Realisasi belanja tahun 2025 (unaudit) tercatat sebesar Rp2.802.593.346.436,85, meningkat sebesar

Rp5.029.370.465,02 atau 0,18% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.797.563.975.971,83. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pada komponen Belanja Modal yang mencapai Rp234.415.357.306,00 atau naik sebesar Rp53.426.939.357,00, serta Belanja Tidak Terduga yang meningkat signifikan sebesar 69,63% menjadi Rp4.169.630.360,00. Sementara itu, Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp1.411.040.827,00 atau 0,03%. Adapun pada tahun 2024, realisasi belanja juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan sebesar Rp258.263.896.539,83 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2.539.300.079.432,00, menandakan adanya ekspansi fiskal pasca pemulihan ekonomi.

Dalam penyusunannya, belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian output dan outcome pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dan pelayanan publik.

Untuk tahun 2027, komposisi belanja daerah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2.532.563.627.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,99% dibandingkan tahun 2026. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kapasitas fiskal daerah, seiring dengan proyeksi penurunan pendapatan, khususnya dari komponen transfer. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi belanja daerah di Kabupaten Pemalang mengalami:

1. **Pertumbuhan Belanja yang Melambat**
Kenaikan belanja tahun 2025 yang hanya sebesar 0,18% menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekspansi belanja daerah mulai mengalami tekanan.
2. **Kualitas Belanja Mulai Bergeser Positif**
Peningkatan Belanja Modal merupakan sinyal positif karena menunjukkan adanya orientasi pada belanja produktif yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, besaran dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
3. **Shock Respons melalui Belanja Tidak Terduga**
Kenaikan signifikan pada Belanja Tidak Terduga mengindikasikan adanya kebutuhan respons terhadap kondisi tertentu (misalnya bencana atau kondisi darurat), yang perlu diantisipasi melalui penguatan manajemen risiko fiskal.
4. **Tekanan Fiskal Tahun 2027**
Penurunan belanja sebesar 13,99% pada tahun 2027 merupakan sinyal kuat adanya tekanan fiskal akibat menurunnya pendapatan, terutama dari transfer pusat. Hal ini berpotensi mengurangi kapasitas pembiayaan program prioritas.

5. Risiko Penurunan Kualitas Layanan Publik

Jika penurunan belanja tidak dikelola dengan baik, terdapat risiko penurunan kualitas layanan publik dan tertundanya pembangunan infrastruktur strategis.

Mendasari hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten harus segera mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Penajaman prioritas belanja (*spending better*)
Mengoptimalkan prinsip *money follow program*, dengan memastikan belanja difokuskan pada program prioritas yang memiliki dampak tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Efisiensi dan rasionalisasi belanja
Melakukan efisiensi belanja non-prioritas, termasuk belanja operasional yang tidak langsung berdampak pada layanan publik, untuk menjaga keseimbangan fiskal.
3. Peningkatan proporsi belanja produktif
Mendorong peningkatan alokasi belanja modal dan belanja yang bersifat produktif, khususnya untuk mendukung sektor unggulan daerah (agroindustri, pariwisata, dan UMKM).
4. Penguatan *value for money*
Memastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan manfaat optimal (ekonomis, efisien, dan efektif).
5. Integrasi Perencanaan dan penganggaran
Memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dengan penganggaran (APBD) agar tidak terjadi mismatch antara target pembangunan dan alokasi anggaran.
6. Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif
Mengembangkan skema pembiayaan non-APBD (KPBU, investasi swasta, BUMD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
7. Penguatan manajemen risiko fiskal
Menyusun strategi mitigasi terhadap ketidakpastian fiskal, termasuk fluktuasi pendapatan transfer dan kebutuhan belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan, kondisi belanja daerah Kabupaten Pemalang mengarah pada fase konsolidasi fiskal. Tantangan utama ke depan bukan hanya pada besaran belanja, tetapi pada kualitas dan ketepatan alokasi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan belanja harus berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan keberdampakan agar tetap mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah meskipun dalam keterbatasan ruang fiskal.

Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan “Pengembangan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan UMKM”. Arah ini menegaskan fokus belanja pada penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit tinggi

terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tema tersebut, prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 meliputi:

1. Pengembangan pembangunan pariwisata
Difokuskan pada penguatan destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal (alam, budaya, dan religi) melalui peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi (3A). Intervensi diarahkan pada penataan kawasan wisata terpadu, peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, serta promosi berbasis digital. Selain itu, integrasi dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM menjadi kunci untuk memperluas *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal.
2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
Diarahkan pada hilirisasi produk pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri berbasis kawasan/klaster. Fokus kebijakan meliputi peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, penguatan rantai pasok hulu-hilir, penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan, serta peningkatan akses pasar. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan meningkatkan pendapatan petani/nelayan.
3. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing UMKM melalui fasilitasi permodalan, pelatihan kewirausahaan, sertifikasi produk, serta digitalisasi usaha (*onboarding ke platform e-commerce*). Penguatan UMKM juga diarahkan melalui pendekatan klaster usaha dan kemitraan dengan industri besar untuk memperluas akses pasar.
4. Peningkatan investasi
Diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur pendukung investasi. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan kawasan ekonomi strategis guna menarik investor baru.
5. Penguatan infrastruktur berkelanjutan
Difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan konektivitas wilayah) yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pendekatan berkelanjutan (*sustainable infrastructure*) menekankan efisiensi, ketahanan terhadap bencana, serta keberlanjutan lingkungan.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri (*link and match*). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung transformasi ekonomi daerah.

7. Penguatan penanganan kemiskinan

Difokuskan pada pengurangan kemiskinan secara terintegrasi melalui intervensi berbasis data (*by name by address*), peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pendekatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

8. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara. Kebijakan ini juga mendorong pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan.

9. Penguatan tata kelola pemerintahan

Difokuskan pada reformasi birokrasi yang berdampak melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan (*e-government*), penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan kapasitas aparatur. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesembilan prioritas tersebut membentuk satu kerangka pembangunan yang saling terintegrasi, dengan titik tekan pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pariwisata, agroindustri, dan UMKM menjadi *growth engine*, sementara SDM, infrastruktur, dan tata kelola menjadi *enabling factors*. Di sisi lain, penanganan kemiskinan serta pemberdayaan perempuan dan anak berfungsi sebagai *social balancing mechanism* agar pertumbuhan yang terjadi tetap inklusif. Dengan pendekatan ini, belanja daerah tidak hanya bersifat rutin, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

Selanjutnya dukungan terhadap prioritas nasional tahun 2027 diarahkan untuk memastikan sinergi yang kuat antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang selaras dengan agenda strategis nasional serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Dukungan tersebut meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Diarahkan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan kualitas demokrasi, serta perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pendidikan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian bangsa. Difokuskan pada penguatan ketahanan nasional melalui dukungan terhadap swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi strategis seperti ekonomi syariah, ekonomi

- digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Peran daerah diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas. Diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim berbasis kawasan dengan dukungan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal
 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, dan teknologi. Difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan riset dan inovasi, pengembangan prestasi olahraga, serta peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial, termasuk pemberdayaan perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), serta penyandang disabilitas.
 5. Melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Diarahkan pada pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, mengurangi ekspor bahan mentah, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar nasional dan global.
 6. Membangun dari desa dan wilayah bawah. Difokuskan pada penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan percepatan penurunan kemiskinan.
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi.
 8. Memperkuat harmoni sosial dan lingkungan. Difokuskan pada penyelarasan pembangunan dengan kelestarian lingkungan dan budaya, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta penguatan kohesi sosial sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
 9. Pemenuhan *mandatory spending*. Dilaksanakan melalui pengalokasian anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik, guna menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal dan prioritas nasional.
 10. Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan SDGs. Diarahkan pada sinkronisasi program/kegiatan daerah dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang TPB/SDGs, sehingga pembangunan daerah berkontribusi langsung terhadap agenda pembangunan global dan nasional.
 11. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Difokuskan pada intervensi terintegrasi berbasis data untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

12. Peningkatan kualitas penanganan bencana. Diarahkan pada penguatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana melalui pendekatan manajemen risiko bencana yang terintegrasi, termasuk peningkatan infrastruktur tangguh bencana dan edukasi masyarakat.
13. Pengakomodasian aspirasi pembangunan. Dilaksanakan melalui integrasi pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum koordinasi lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal, kewenangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Keseluruhan dukungan prioritas nasional tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional. Bagi Kabupaten Pemalang, hal ini berarti perlunya penyelarasan kebijakan, penguatan sinergi lintas sektor, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, agar setiap program yang dilaksanakan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam hal kebijakan *mandatory spending* dan alokasi belanja wajib yang direncanakan dalam RKPD tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Upaya arah kebijakan pada pemenuhan kebutuhan berikut ini:

1. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan, sebesar Rp1.073.614.519.432,00.
2. Alokasi anggaran belanja infrastruktur publik sebesar Rp369.139.360.458,00.
3. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp118.360.167.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp4.000.000.000,00, dengan perhitungan atau paling sedikit 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak / bukan pajak.
4. Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp30.033.133.300,00 atau paling sedikit 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah setelah dikurangi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
5. Alokasi anggaran belanja pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (belanja iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas 3) sebesar Rp43.250.000.000,00 atau minimal sebesar 37,5% dari pendapatan bagi hasil pajak rokok yang diterima pemerintah daerah.
6. Alokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik (hasil perolehan suara 705.629 x Rp4.000,00), sebesar Rp2.822.516.000,00.
7. Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selain pemenuhan alokasi *mandatory spending* di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu belanja pegawai maksimal 30% pada tahun 2027. Adapun upaya dimaksud diantaranya melalui penguatan kinerja pegawai dengan memaksimalkan potensi SDM pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Namun demikian pada tahun anggaran 2027 target tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan, mengingat kebijakan kepegawaian tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, bahkan belanja pegawai sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Disisi lain pengurangan transfer ke daerah juga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan prosentase belanja pegawai.

Sebagai gambaran disajikan alokasi belanja pegawai tahun 2023-2027 sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Prosentase Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi			Target	
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027
Total belanja	2.539.300.079,4	2.797.563.975,9	2.802.593.346,4	2.944.643.010	2.532.563.627
Diperhitungkan sesuai UU No.1 Tahun 2021	906.917.839,8	1.022.3.99.974,6	1.058.461.316,1	996.068.810,5	996.867.430,2
Persentase	35,72	36,55	37,77	33,83	39,10

Arah kebijakan belanja daerah masa lalu dan Tahun 2027 dapat dilihat dari realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2023-2027 sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2027

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)	Realisasi Tahun 2025**)	Target Tahun 2026***)	Proyeksi Tahun 2027
5	BELANJA DAERAH	2.539.300.079.432	2.797.563.975.971,83	2,802,593,346,437	2.944.643.010.000	2,532,563,627,000
5.1	Belanja Operasi	1.890.948.053.345	2.175.975.811.563,83	2,126,086,155,598	2.156.102.924.044,54	2.004.660.512.692
5.1.01	Belanja Pegawai	1.113.196.374.159	1.302.143.148.625	1,346,713,564,892	1.299.420.908.958	1.258.702.710.246
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.795.423.023	714.049.430.646	692,477,991,601	779.792.397.309,54	675.085.907.346
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	5.135.880.000	8.578.139.000
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	100.000.000	100.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	101.019.252.163	150.235.584.292,83	83,501,574,411	58.150.792.192	60.586.256.100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.937.904.000	9.547.648.000	3,393,024,694	3.031.500.000	1.607.500.000
5.2	Belanja Modal	217.207.125.026	180.988.417.949	234,415,357,306	339.312.169.155,46	102.015.176.008
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.046.604.500	2.199.576.000	1,360,000,000	17.600.000.000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.599.632.595	68.867.746.899	57,478,507,787	56.313.817.321,46	55.333.942.408
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.732.039.343	47.292.557.157	54,768,358,252	53.898.492.368	6.742.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.538.776.430	41.979.833.338	98,420,006,579	206.014.537.916	32.662.730.050
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.290.072.158	17.866.133.555	22,388,484,688	5.471.221.550	7.275.003.550
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	2.782.571.000	-	14.100.000	1.500.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	427.605.701	1.266.502.459	4,169,630,360	4.941.715.745	7.500.000.000

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)	Realisasi Tahun 2025**)	Target Tahun 2026***)	Proyeksi Tahun 2027
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	427.605.701	1.266.502.459	4,169,630,360	4.941.715.745	7.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	430.716.395.360	439.333.244.000	437,922,203,173	444.286.201.055	418.387.937.300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.047.084.900	14.681.180.000	27,127,840,500	26.846.340.500	30.033.133.300
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	415.669.310.460	424.652.064.000	410,794,362,673	417.439.860.555	388.354.805.000

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026
*) LRA APBD TA 2024
**) LRA APBD TA 2025 (unaudited)
***) APBD TA 2026 (Perda Nomor 8 Tahun 2025)

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan APBD Tahun 2027 disusun proyeksi/target Belanja Daerah dengan struktur belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7
Target/Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 dan 2027

NO	URAIAN	2026	2027
5	BELANJA DAERAH	2.944.643.010.000,00	2,532,563,627,000,00
5.1	Belanja Operasi	2.156.102.924.044,54	2.004.660.512.692,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.299.420.908.958,00	1.258.702.710.246,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.792.397.309,54	675.085.907.346,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.135.880.000,00	8.578.139.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.150.792.192,00	60.586.256.100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.031.500.000,00	1.607.500.000,00
5.2	Belanja Modal	339.312.169.155,46	102.015.176.008,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.600.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.313.817.321,46	55.333.942.408,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.898.492.368,00	6.742.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	206.014.537.916,00	32.662.730.050,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.471.221.550,00	7.275.003.550,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.100.000,00	1.500.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.941.715.745,00	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.941.715.745,00	7.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	444.286.201.055,00	418.387.937.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.846.340.500,00	30.033.133.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	417.439.860.555,00	388.354.805.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2026

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam struktur APBD yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, yaitu kondisi ketika belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya yang sah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2027 diarahkan pada pengurangan SiLPA melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan anggaran yang tidak terserap, sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap pembangunan.

Investasi daerah merupakan bagian dari pengeluaran pembiayaan yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal jangka panjang. Investasi ini berupa penempatan dana dan/atau barang milik daerah dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Manfaat investasi daerah antara lain berupa penerimaan dividen, bunga, atau pertumbuhan nilai perusahaan; peningkatan pendapatan daerah; penciptaan lapangan kerja; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penyertaan modal daerah sebagai bentuk investasi langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara selektif dan berbasis analisis kelayakan investasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap penyertaan modal didasarkan pada kajian profesional oleh penasehat investasi, sehingga mampu memberikan imbal hasil yang optimal, baik secara finansial maupun sosial, serta tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Defisit atau surplus anggaran merupakan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam kondisi defisit, pembiayaan daerah menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal. Penerimaan pembiayaan, khususnya dari SiLPA, digunakan untuk menutup defisit, sementara pengeluaran pembiayaan diarahkan pada investasi strategis dan kewajiban keuangan daerah yang harus dipenuhi.

Realisasi pembiayaan daerah pada tahun lalu dan rencana target tahun berjalan 2027 dapat dilihat pada tabel realisasi dan target pembiayaan Tahun 2023–2027 berikut.

Tabel 3. 8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2027

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)	Target Tahun 2025**)	Target Tahun 2026***)	Proyeksi Tahun 2027
	Surplus / (Defisit)	33.042.748.288	52.535.554.755,17	(133.370.788.000)	(277.176.338.000)	105.,627,028,000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.751.465.867	200.944.214.155	144.470.788.000	292.176.338.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	155.751.465.867	159.517.643.992	144.470.788.000	92.176.338.000	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	41.426.570.163	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	200.000.000.000	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	27.850.000.000	14.500.000.000	11.100.000.000	15.000.000.000	105,627,028,000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	-	-	-	30.000.000.000

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)	Target Tahun 2025**)	Target Tahun 2026***)	Proyeksi Tahun 2027
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.850.000.000	14.500.000.000	11.100.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	60,627,028,000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	127.901.465.867	186.444.214.155	133.370.788.000	277.176.338.000	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026
*) LRA APBD TA 2023
**) LRA APBD TA 2024
***) APBD TA 2026 (Perda Nomor 8 Tahun 2025)

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan APBD Tahun 2027 disusun proyeksi/target Pembiayaan Daerah dengan struktur pembiayaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026 dan 2027

NO	URAIAN	2026	2027
6.1	Penerimaan Pembiayaan	292.176.338.000	105,627,028,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	92.176.338.000	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	105,627,028,000
6.2.01	Pembayaran Pokok Utang	-	60,627,028,000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	30.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	277.176.338.000	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

Berdasarkan tabel 3.7 dan tabel 3.8, diketahui kondisi pembiayaan daerah menunjukkan adanya dinamika fiskal yang cukup signifikan seiring meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah digunakan sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran, menjaga kesinambungan fiskal, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Pada periode tahun 2023 dan 2024, kondisi APBD Kabupaten Pemalang masih mengalami surplus anggaran masing-masing sebesar Rp33,04 miliar dan Rp52,54 miliar. Namun demikian, pada tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan terjadi defisit anggaran yang cukup besar, masing-masing sebesar Rp133,37 miliar dan Rp277,18 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pembangunan dan program prioritas daerah meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan pendapatan daerah. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, realisasi tahun 2023 mencapai

Rp155,75 miliar dan meningkat menjadi Rp200,94 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp144,47 miliar, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp292,18 miliar pada tahun 2026. Peningkatan penerimaan pembiayaan tahun 2026 terutama berasal dari rencana penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp200 miliar. Sementara pada tahun 2027 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp105,63 miliar.

Komponen terbesar penerimaan pembiayaan selama periode tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2023 SiLPA tercatat sebesar Rp155,75 miliar dan meningkat menjadi Rp159,52 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya SiLPA diproyeksikan menurun menjadi Rp144,47 miliar pada tahun 2025 dan Rp92,18 miliar pada tahun 2026. Penurunan SiLPA tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan sehingga sisa anggaran dapat ditekan secara bertahap.

Pada tahun 2024 juga terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp41,43 miliar yang menunjukkan pemanfaatan dana cadangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan tertentu. Namun demikian, pada tahun 2025 hingga 2027 tidak terdapat lagi proyeksi pencairan dana cadangan.

Hal yang paling menonjol dalam struktur pembiayaan daerah adalah rencana penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp200 miliar pada tahun 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui utang daerah untuk mendukung pembangunan strategis dan menutup defisit anggaran yang cukup besar. Penggunaan pembiayaan utang daerah ini perlu dilakukan secara selektif, produktif, dan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi tahun 2023 sebesar Rp27,85 miliar kemudian menurun menjadi Rp14,50 miliar pada tahun 2024 dan ditargetkan sebesar Rp11,10 miliar pada tahun 2025. Pada tahun 2026 pengeluaran pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp15 miliar dan melonjak signifikan pada tahun 2027 menjadi Rp95,63 miliar. Peningkatan tajam pada tahun 2027 terutama dipengaruhi oleh kewajiban pembayaran pokok utang daerah sebesar Rp60,63 miliar dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp20 miliar.

Komponen pengeluaran pembiayaan selama periode tersebut didominasi oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp7,85 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp14,50 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya penyertaan modal diproyeksikan sebesar Rp11,10 miliar pada tahun 2025 serta Rp15 miliar pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi daerah dan mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan wajib pada

tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pemalang merencanakan pembentukan dana cadangan pada tahun 2027. Kebijakan ini ditempuh mengingat pada Tahun 2029 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memerlukan dukungan pendanaan dalam jumlah signifikan. Berdasarkan realisasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, kebutuhan anggaran tercatat mencapai sekitar Rp67 miliar. Oleh karena itu, pada Tahun 2027 direncanakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp30 miliar sebagai langkah menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mempersiapkan kebutuhan pendanaan strategis di masa mendatang. Selanjutnya, dana cadangan akan kembali dialokasikan sebesar Rp30 miliar pada Tahun 2028, sedangkan kekurangan kebutuhan pendanaan sebesar Rp7 miliar akan dipenuhi melalui APBD Tahun 2029. Skema pembentukan dana cadangan secara bertahap tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah pada tahun pelaksanaan Pilkada, sekaligus menjaga ruang fiskal bagi pembiayaan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahun yang sama juga mulai terdapat kewajiban pembayaran pokok utang daerah sebesar Rp60,63 miliar sebagai konsekuensi atas rencana penerimaan utang daerah pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan utang akan memberikan dampak terhadap struktur pengeluaran pembiayaan pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, struktur pembiayaan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023–2027 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan fiskal melalui optimalisasi SiLPA, pengelolaan investasi daerah, pembentukan dana cadangan, serta pemanfaatan alternatif pembiayaan berupa utang daerah. Namun demikian, tingginya defisit pada tahun 2025 dan 2026 serta rencana pemanfaatan utang daerah memerlukan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama dalam menjaga kemampuan pembayaran kewajiban daerah, efektivitas penggunaan pembiayaan, serta stabilitas APBD dalam jangka menengah dan panjang.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Pelaksanaan pembangunan tersebut disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025–2029 dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 adalah “PEMALANG BERCAHAYA – Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya”, yang mengandung makna sebagai berikut:

1. **Bersih:** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap:** Dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal:** Dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA:** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah yang dikemas dalam akronim “RHAPSODI” (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas) sebagai arah kebijakan dan landasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Adapun penjabaran masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

- 2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
- 3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
- 4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
- 5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6. **Misi 6 Organisatoris:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
- 7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun dengan mengacu dan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan serta kebijakan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045; (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029; (4) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029; (5) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 dan RKPD tahun berjalan; serta (6) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dengan memperhatikan keterpaduan berbagai dokumen tersebut, sasaran dan prioritas pembangunan daerah diharapkan dapat selaras, terintegrasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2027 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menjawab isu strategis pembangunan menuju pencapaian visi dan misi Daerah, maka pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 di tiap tahun adalah sebagai berikut:



Tahap kedua Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah “*Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM*”.

4.5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penetapan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2027 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga keterkaitan terhadap sasaran pembangunan nasional. Target tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2027
Visi dan Frase Visi: Bersih dan Handal				
T.1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.715.435,101
	S.1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,87
T.2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka
	S.2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,50
		Maturitas SPIP	Level	2,965
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,66
Visi dan Frase Visi: Cakap				
T.3 Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,82
	S.3 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-7,75
		Laju Inflasi	%	1,5-3,5
	S.4 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,10
Visi dan Frase Visi: MULYA				
T.4 Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	12,20-11,82
	S.5 Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat S.6 Meningkatnya penanganan pengangguran	Indeks Gini	Angka	0,313
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05-5,75

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

4.5.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1 Prioritas Nasional 2025-2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan

menjadi Prioritas Nasional atau goals (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:



Prioritas Nasional 2025-2029 sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas dan Fokus Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan sasaran utama: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	a. Penguatan ideologi Pancasila, Warisan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional b. Penguatan Komunikasi Publik dan Media c. Penguatan Lembaga Demokrasi d. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil e. Pengarusutamaan, Pemajuan dan Penegakan HAM,
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru	a. Swasembada Pangan; ● Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan; ● Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya ● Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>) ● Pengembangan Pangan Hewani ● Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati b. Swasembada Energi: ● Peningkatan Penyediaan Energi ● Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi ● Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan c. Ekonomi Digital: ● Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital ● Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya Profesionalisme dan pelayanan kepolisian; d. Swasembada Air: ● Konservasi Sumber Daya Air ● Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa e. Pertahanan dan Keamanan: ● Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i> Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif f. Ekonomi Hijau:

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
		• Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan sumber Daya Genetik • Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan • Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR g. Ekonomi Hijau: • Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	a. Pengembangan Infrastruktur: • Pengembangan dan peningkatan Ekosistem Digital • Pembangunan Infrastruktur Jaringan ketenagalistrikan dan Digitalisasinya b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Pengembangan Koperasi Sektor Produksi • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramenra • Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	a. Pengembangan SDM Berkualitas; • Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi • Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita • Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	a. Hilirisasi SDA Unggulan: • Pengembangan Hilirisasi Nikel • Pengembangan Hilirisasi Tembaga • Pengembangan Hilirisasi Bauksit • Pengembangan Hilirisasi Timah • Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit • Pengembangan Hilirisasi Kelapa • Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut b. Industri Padat Karya Terampil • Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil c. Industri Padat Teknologi Inovasi • Pembangunan Industri Semikonduktor • Pengembangan Industri Dirgantara d. Industri Dasar • Penguatan Industri Logam Dasar Besi dan Baja • Pengembangan Industri Kimia e. Pengembangan Kawasan • Pengembangan KEK Sei Mangkei • Pengembangan KIT Batang • Pengembangan KI Weda Bay
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	a. Pemerataan Ekonomi • Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Desa • Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke ibu Kota • Nusantara • Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	a. Reformasi Birokrasi • Ekstensifikasi dan intensifikasi Penerimaan Perpajakan • Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak • Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	a. Mitigasi Dampak Lingkungan • Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

4.2.3. Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Arahan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 direncanakan dan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 telah ditetapkan visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan visi tersebut yang akan dilaksanakan melalui 6 misi meliputi:

1. Misi 1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan;
3. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah, yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Misi 5: Menjaga Stabilitas dan Konduktivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Misi 6: Menjaga Iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga

jawa tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah 2027 sebagai berikut:

Tujuan:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Berintegrasi dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan;
3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, yang pelaksanaannya memasuki tahun kedua periode pembangunan jangka menengah daerah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, Tahun 2027 merupakan tahap “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD tersebut, pembangunan daerah difokuskan pada tema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Tema pembangunan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema tersebut meliputi:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM, pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;

9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, *amenitas*, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;

22. Penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun *startup* berbasis syariah.

Tahun 2027 juga diarahkan untuk “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah:
 - a. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
 - b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi guna mendukung transformasi digital;
 - c. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
 - d. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
 - e. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
 - f. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai reward and punishment yang berkeadilan;
 - g. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
 - h. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
 - i. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
 - j. penguatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum;
 - k. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - l. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;

- n. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
 - o. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - p. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum;
 - q. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
 - r. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - s. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - t. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - u. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
 - v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalitas;
 - w. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan:
- a. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
 - b. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga;
 - c. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi;
 - d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - f. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan Good Mining Practice;
 - g. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - h. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;

- i. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan;
- j. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
- k. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
- l. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
- m. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa;
- n. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
- o. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- p. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- q. peningkatan produktivitas komoditas sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;
- r. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
- s. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
- t. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
- u. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku;
- v. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- w. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata);
- x. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
- y. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
- z. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
- aa. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
- bb. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;

- cc. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
 - dd. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan zero waste tourism dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
 - ee. peningkatan Integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen SPPR;
 - ff. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
 - gg. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
 - hh. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
 - ii. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
 - jj. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
 - kk. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
 - ll. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:
- a. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
 - b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blank spot, penguatan kerjasama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - c. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
 - d. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
 - e. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
 - f. pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
 - g. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi;
 - h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
 - i. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;
 - j. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
 - k. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
 - l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;

- m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
- n. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
- o. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
- p. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
- q. pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
- r. peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan;
- s. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
- t. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;
- u. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
- v. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif;
- w. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- x. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- y. peningkatan ketahanan keluarga;
- z. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diukur dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan (%) sebesar 8,51 - 8,17;
2. Indeks Reformasi Birokrasi (angka) 92,50;
3. Indeks Integritas Nasional (angka) 82,25;
4. Indeks Demokrasi Indonesia (angka) 86,80 - 90,22;
5. Otonomi Fiskal Daerah (%) 66,80;
6. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,30-7,00;
7. Indeks Modal Manusia (angka) 0,63;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,65 - 4,08;

Sedangkan pencapaian kinerja berbagai aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Jawa Tengah akan diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kunjungan wisatawan sejumlah 1.192.242 orang
2. SDM Pengelola Desa Wisata yang dilatih
3. Daya tarik wisata (DTW) Alam yang memiliki SOP pelayanan dan mitigasi bencana

- 4. Desa/kampung wisata baru yang dicanangkan sebanyak 1000 desa/kampung wisata
- 5. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (Pariwisata) sebesar 3,72%;
- 6. Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional sebesar 13,54%;
- 7. Jumlah produk bersertifikasi halal sebesar 556.618 produk;
- 8. Aset perbankan syariah/PDRB sebesar 3,32 persen;
- 9. Indeks Zakat Nasional (Provinsi) sebesar 0,68.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sinkronisasi pembangunan Kabupaten Pemalang dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Tahun 2027 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

URAIAN	RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2027	RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027	RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027
Tema	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM
Fokus Pembangunan	Kualitas SDM Tenaga Kerja Produktif	1. Pariwisata Berkelanjutan 2. Pengembangan ekonomi syariah	1. Pengembangan pembangunan pariwisata 2. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
	Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat		
	Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola		
	Regulasi dan Kelembagaan		
	Efisiensi dan Efektivitas Investasi		
	Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi		
	Inovasi Pembiayaan Pembangunan		
	Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor		

URAIAN	RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2027	RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027	RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027
	Industri Nasional		
	Hilirisasi SDA Strategis		
	Swasembada Pangan, Energi dan Air		
Program Kerja Prioritas	1. Kemandirian Energi dan Air	Peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan	Pengembangan pembangunan pariwisata
	2. Kedaulatan Pangan		Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
	3. Hilirisasi dan Industrialisasi		
	4. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana		Penguatan infrastruktur berkelanjutan
	5. Ekonomi Kerakyatan dan Desa		Peningkatan investasi
			Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	6. Pendidikan	Peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
	7. Penurunan Kemiskinan		Penguatan penanganan kemiskinan
	8. Kesehatan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan tata kelola pemerintahan

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada:

- 1. Prioritas Pembangunan Nasional yang dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029;
- 2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027;
- 3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2045;
- 4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2025;

- 5. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang pada penyusunan RKPD Tahun 2027;
- 6. Hasil evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026;
- 7. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025;
- 8. Komitmen nasional untuk mencapai target Sustainable Development Goal (SDG's);
- 9. Hasil capaian penanggulangan kemiskinan

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pemalang, perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Pemalang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Pemalang
Tahun 2027

MISI	TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 Resik: Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih	Tujuan 1 Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dititikberatkan pada pengelolaan limbah dan persampahan, percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri.
Misi 4 Peduli: Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat	Tujuan 2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Peningkatan inovasi daerah. Dititikberatkan pada pengembangan potensi unggulan daerah dan inovasi pelayanan publik; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dititikberatkan pada optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara digital, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi kinerja BUMD; Implementasi collaborative funding. Dititikberatkan pada peningkatan peran TJSLP, KPBU, serta Lembaga lainnya; Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dititikberatkan pada penguatan kelembagaan, sumber daya aparatur, perencanaan-penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan pengawasan.
Misi 6 Organisatoris: Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi		
Misi 2 Hijau: Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman	Tujuan 3 Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Kualitas produksi pertanian & perikanan. Dititikberatkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian,

MISI	TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
melalui industri hijau yang berkelanjutan;	Sasaran: a. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	modernisasi dan hilirisasi pertanian, pengembangan agro industri, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas petani milenial, serta peningkatan kualitas perikanan tangkap dan budidaya;
Misi 3 Apik: Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah		Peningkatan cadangan pangan masyarakat. Dititikberatkan pada optimalisasi lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
Misi 7 Digitalisasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar		Peningkatan daya saing pariwisata. Dititikberatkan pada peningkatan kunjungan wisatawan, pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; Pengembangan industri kecil menengah. Dititikberatkan pada penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif, dan perluasan pasar berbasis digital; Peningkatan pertumbuhan usaha mikro melalui penguatan kelembagaan dan akses permodalan; Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; Penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian daerah; Peningkatan investasi. Dititikberatkan pada kemudahan pelayanan perizinan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP); Peningkatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan. Dititikberatkan pada peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan daerah, pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan, serta pengembangan kerja sama antar desa; Peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Dititikberatkan pada kemandapan jalan, sistem drainase, penanganan rob, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan alat penerangan jalan, serta kualitas sarana prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah; Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri melalui pelatihan berbasis kompetensi;

MISI	TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dititikberatkan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dititikberatkan pada perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera	Tujuan 4 Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat Sasaran a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat b. Meningkatnya penanganan pengangguran	Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dititikberatkan pada optimalisasi jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta, dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dititikberatkan pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, serta penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terintegrasi; Peningkatan penanggulangan bencana. Dititikberatkan pada optimalisasi operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, penguatan manajemen krisis terpadu dan sistem logistik, serta peningkatan kapasitas relawan bencana.
Misi 8 Ikhlas: Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan		

Selanjutnya tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi penyusunan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang disusun untuk mendukung:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sesuai target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 untuk periode tahun 2027;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 untuk periode tahun 2027;
3. Pemecahan permasalahan dan isu strategis daerah, yang mencakup:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
 - b. Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat;

- c. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif;
 - d. Pengelolaan persampahan;
 - e. Penguatan penanggulangan bencana;
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - g. Akselerasi penanggulangan kemiskinan;
 - h. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi;
 - i. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai urusan wajib pelayanan dasar.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Pemalang yang diarahkan untuk “Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”, yang diprioritaskan pada:

- P1. Pengembangan pembangunan pariwisata
- P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
- P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- P4. Peningkatan investasi
- P5. Penguatan infrastruktur berkelanjutan
- P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- P7. Penguatan penanganan kemiskinan
- P8. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- P9. Penguatan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan isu strategis daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta arah kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Prioritas dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun perencanaan. Prioritas pembangunan disusun untuk menjawab kebutuhan paling mendesak sekaligus mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, sedangkan strategi pembangunan dirumuskan sebagai langkah operasional yang terarah, terpadu, dan realistis sesuai kapasitas fiskal serta potensi daerah. Melalui penetapan prioritas dan strategi tersebut, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dapat berjalan lebih fokus, sinergis, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, serta penguatan perekonomian Kabupaten Pemalang pada Tahun 2027. Adapun prioritas dan strategi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Prioritas dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pemalang
Tahun 2027

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi Pembangunan
1.	Pengembangan pembangunan pariwisata	1) Peningkatan capaian olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga dengan fokus pelaksanaan event kejuaraan olahraga rekreasi dari tingkat RT kelurahan sampai kabupaten; 2) Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; 3) Peningkatan pelestarian budaya dengan fokus pengelolaan cagar budaya.
2.	Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan	1) Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri; 2) peningkatan kualitas petani milenial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya; 3) Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
3.	Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; 2) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi;
4.	Peningkatan investasi	1) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; 2) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5.	Penguatan infrastruktur berkelanjutan	1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik; 2) Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah; 3) Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh; 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; 5) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; 6) Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana; dan 7) Peningkatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi Pembangunan
		desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa.
6.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1) Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan; 2) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi; 3) Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital; 4) Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga; 5) Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; 6) Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; 7) Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan untuk mengurangi kumuh; 8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; 9) Peningkatan kondusifitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan; 8) Peningkatan capaian pemuda dengan fokus pengembangan kapasitas pemuda dalam organisasi sosial.
7.	Penguatan penanganan kemiskinan	1) Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
8.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1) Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; 2) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.
9.	Penguatan tata kelola pemerintahan	1) Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas pusat dan provinsi; 2) Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat,

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi Pembangunan
		peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; 3) Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas Smart City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 4) Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip; 5) Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; 6) Peningkatan keamanan informasi daerah; 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; 8) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD; 9) Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko; 10) Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas e-procurements, kualitas sarana dan prasarana; 11) Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan; 12) Peningkatan inovasi daerah dengan fokus pembentukan pusat penelitian daerah;

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027, pada bagian ini disajikan uraian terkait Program Unggulan, Program Nomenklatur, Indikator Program, Pagu Indikatif , serta tingkat keselarasan program dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027. Penyajian materi tersebut dimaksudkan sebagai instrumen penghubung antara kebijakan perencanaan dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga setiap alokasi sumber daya dapat diarahkan secara efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui pemetaan ini diharapkan tercipta sinkronisasi antara agenda strategis daerah, target kinerja perangkat daerah, serta dukungan pendanaan yang proporsional guna mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten pada Tahun 2027.

Tabel 4.5.
Program Unggulan, Program Nomenklatur, Indikator Program, Pagu Indikatif, serta Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Program Unggulan Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
1	Seragam sekolah dan LKS Gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	APS PAUD	3.992.560.000,-	P.6
			APS SD		
			APS SMP		
			APS Kesetaraan (7-18 tahun)		

No	Program Unggulan Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Keselaran dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
2	Jalan halus merata	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	35.000.000.000,-	P.5
3	Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1.000.000.000,-	P.5
4	Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	1.000.000.000,-	P.7
5	Bantuan modal usaha untuk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	1.200.000.000,-	P.3
6	WiFi gratis tiap desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	1.300.000.000,-	P.5, P.9
7	Satu ambulance, satu desa	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	4.500.000.000,-	P.6
			Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		
			Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan		

No	Program Unggulan Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Keselarasannya dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks PSPM KESGA		
			Persentase Fasyankes sesuai Standar		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional		
			Persentase desa/kelurahan STBM		
			Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)		
8	Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	2.000.000.000,-	P.2
			Produksi Tanaman Hortikultura		
			Produksi Komoditas Perkebunan (bidang Perkebunan)		
			Populasi ternak		
9	Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	1.200.000.000,-	P.6
			Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		
			Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan		
10	Insentif untuk guru, TPQ, Madin, dan Marbot	Program Pengelolaan Pendidikan	APS PAUD	1.000.000.000,-	P.6
			APS SD		
			APS SMP		
			APS Kesetaraan (7-18 tahun)		
11	Santunan kematian Rp 3.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	7.500.000.000,-	P.7
			Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
12	Pembukaan Pintu Tol Sewaka	Program	Persentase panjang jalan	0-	P.1,P.4

No	Program Unggulan Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Keselaran dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
		Penyelenggara an Jalan	kabupaten dalam kondisi baik (%)		

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (R)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,78	72,49	76,87
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,33	83,16	84,00*
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,68	3,68	3,82
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14-4,90	5,80	5,90-7,75**
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,75	69,47	71,10
6	Tingkat Kemiskinan	%	14,31 - 13,64	13,32	12,20-11,82**
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,19-5,89	6,61	6,05-5,75

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029

* evaluasi kinerja tahun 2026

**Hasil Rakortekbang tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 beserta strategi dan arah kebijakan pencapaiannya disusun dengan memperhatikan serta merespons berbagai isu strategis pembangunan daerah yang berkembang. Setiap prioritas pembangunan dirumuskan sebagai fokus intervensi utama, kemudian dijabarkan ke dalam strategi yang terarah dan arah kebijakan yang operasional guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun keterkaitan antara prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Keterkaitan Isu Strategis, Permasalahan Pembangunan, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Pemalang Tahun 2027

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
1.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	• Rendahnya nilai tambah produk unggulan karena minimnya industri pengolahan lokal • Ketergantungan pada sektor primer • Belum optimalnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di destinasi unggulan	• Melaksanakan akselerasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan melalui modernisasi rantai dingin • Pengembangan sentra industri kecil menengah yang ramah lingkungan • Meningkatkan daya saing pariwisata melalui kolaborasi <i>sport tourism</i> dan penguatan desa wisata berbasis kearifan lokal	• Peningkatan kualitas produksi pertanian dan perikanan yang dititikberatkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian, modernisasi dan hilirisasi pertanian, pengembangan agroindustri, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas petani milenial, serta peningkatan kualitas perikanan tangkap dan budidaya • Peningkatan daya saing pariwisata yang dititikberatkan pada peningkatan kunjungan wisatawan, pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata • Pengembangan industri kecil menengah yang dititikberatkan pada penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif, dan perluasan pasar berbasis digital • Peningkatan pertumbuhan usaha mikro melalui penguatan kelembagaan dan akses permodalan • Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen • Penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian daerah • Peningkatan investasi yang dititikberatkan pada kemudahan	P1 Pengembangan pembangunan pariwisata; P2 Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan; https://docs.google.com/document/d/1adL5MacGWLcDOcZcsjS2fbWbjNP7UTf8/edit#heading=h.3znysh7 P3 Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah; P4 Peningkatan investasi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
				pelayanan perizinan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) • Peningkatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan yang dititikberatkan pada peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan daerah, pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan, serta pengembangan kerjasama antar desa	
2.	Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat	• Alih fungsi lahan pertanian produktif yang sulit terkendali • Tingginya biaya produksi pertanian • Infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan pada saluran tersier	• Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah melalui Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) • Memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) • Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi secara berkala guna mendukung produktivitas lahan	• Peningkatan cadangan pangan masyarakat yang dititikberatkan pada optimalisasi lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan	P2 Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
3.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif	• Ketimpangan kualitas infrastruktur jalan antar wilayah pegunungan dan pesisir • Tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) • Terbatasnya akses air minum perpipaan	• Mempercepat konektivitas antar wilayah melalui penyediaan jalan halus merata dan pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan distribusi barang dan jasa	• Peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang dititikberatkan pada kemantapan jalan, sistem drainase, penanganan rob, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan alat penerangan jalan, serta kualitas sarana prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	P5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
			Melaksanakan penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui pemenuhan hunian layak dan peningkatan prasarana sarana utilitas yang berkelanjutan		
4	Pengelolaan persampahan	- Tingginya timbulan sampah domestik yang belum terkelola sejak dari sumbernya - Keterbatasan lahan serta kapasitas teknologi pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	- Mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan mendorong budaya <i>zero waste</i> skala rumah tangga dan mengoptimisasi pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Memperkuat kelembagaan bank sampah serta meningkatkan kerja sama antardaerah dalam pemanfaatan teknologi <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dititikberatkan pada pengelolaan limbah dan persampahan, percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri.	P5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan
5	Penguatan penanggulangan bencana	- Kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana banjir rob dan abrasi - Deforestasi di wilayah hulu yang memicu risiko banjir dan tanah longsor - Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur mitigasi di zona rawan bencana	- Meningkatkan mitigasi bencana melalui restorasi lahan dan pemenuhan ruang terbuka hijau guna menjaga keanekaragaman hayati serta menurunkan risiko bencana - Memperkuat kapasitas relawan dan	Peningkatan penanggulangan bencana yang dititikberatkan pada optimalisasi operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, penguatan manajemen krisis terpadu dan sistem logistik, serta peningkatan kapasitas relawan bencana.	P5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
			pembentukan Desa Tangguh Bencana yang didukung oleh sistem logistik operasi tanggap darurat yang terpadu.		
6	Penguatan kualitas sumber daya manusia	• Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang masih terjadi • Tingginya prevalensi tengkes (<i>stunting</i>) • Angka kematian ibu/bayi yang membutuhkan penanganan serius • Rendahnya minat baca dan literasi digital	• Mewujudkan program wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan kualitas sarana sekolah, akses pendidikan inklusi, dan penyediaan lahan untuk SMA/SMK baru. • Mempercepat penurunan angka tengkes melalui intervensi gizi terpadu, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.	• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dititikberatkan pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, serta penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terintegrasi. • Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri melalui pelatihan berbasis kompetensi. • Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang dititikberatkan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dititikberatkan pada perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.	P6 Peningkatan kualitas sumber daya manusia; P8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7	Akselerasi penanggulangan kemiskinan	• Masih tingginya angka kemiskinan • Keterbatasan modal usaha bagi pelaku mikro	• Melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui	• Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dititikberatkan pada optimalisasi jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kerjasama intervensi lintas sektor	P7 Penguatan penanganan kemiskinan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
		- Akses lapangan kerja yang tidak selaras dengan kompetensi lokal - Rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah	program padat karya dan akses permodalan UMKM. Memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri	dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	
8	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi	- Belum terintegrasinya basis data sektoral antar dinas - Rendahnya maturitas sistem pengendalian intern - Pelayanan publik yang masih memerlukan interaksi tatap muka secara intensif.	- Mendorong transformasi birokrasi melalui pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan satu data daerah. - Mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan mengimplementasikan standar operasional prosedur yang berbasis digital.	Peningkatan inovasi daerah yang dititikberatkan pada pengembangan potensi unggulan daerah dan inovasi pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel yang dititikberatkan pada penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	P9 Penguatan tata kelola pemerintahan
9	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah	- Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat - Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk pendapatan asli daerah (PAD) - Perlunya efisiensi pada belanja non-prioritas.	- Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pembentukan BUMD baru di bidang strategis guna meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah - Meningkatkan iklim investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan memberikan insentif	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dititikberatkan pada optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara digital, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Implementasi collaborative funding dalam pembiayaan pembangunan daerah yang dititikberatkan pada peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan	P9 Penguatan tata kelola pemerintahan; P4 Peningkatan investasi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2027
			pajak bagi sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi luas.	Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta lembaga lainnya.	

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang dengan misi Kepala Daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Misi dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
1.	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan.	Misi 1 Resik: Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten/Kota: - Kendaraan Angkut sampah roda 3 - Gerobak sampah - Becak sampah - Tempat sampah terpilah - Tong sampah bandol - Mesin Conveyor - Mesin Pencacah Pemilah Sampah (Gibrig) - Mesin Press - Incinerator ramah lingkungan - Pelatihan pengolahan sampah - pembinaan kelompok peduli lingkungan - Pembangunan TPS - Pembangunan TPST/TPS3R • Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
2.	P.3 Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. P.6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 2 Hijau: Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan;	• Pelatihan Ekonomi Kreatif • Pelatihan Ekonomi Kreatif • Pelatihan kewirausahaan pemuda • Pelatihan manajemen operasional dan SDM Koperasi • Pelatihan dan uji kompetensi pengurus/pengawas koperasi • Pelatihan penilaian kesehatan koperasi • Pelatihan penyusunan SOP dan SOM koperasi • Pelatihan digitalisasi koperasi • Pelatihan digital marketing bagi UMKM • Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM • Pelatihan levelling (1,2, dan 3) • Pelatihan menjahit • Pelatihan Barista • Pelatihan rias pengantin • Pelatihan hantaran pengantin • Pelatihan barista (pendidikan kesetaraan) • Pelatihan pengembangan organisasi kepemudaan • Pelatihan olahraga prestasi • penyelenggaraan event olahraga-Futsal • Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja • Perluasan Kesempatan kerja • Peningkatan kapasitas/ pemberdayaan perempuan miskin berupa pelatihan untuk perempuan rentan korban KDRT dan pemberian bantuan modal usaha (pemberdayaan ekonomi perempuan) • Pelatihan Public speaking • Pasar Murah • Peningkatan kapasitas pengelola BUMDES • Rehabilitasi tempat pelelangan ikan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			• Restocking perairan darat • Jalan produksi perikanan/jalan usaha perikanan • Fasilitasi rantai dingin untuk pemasaran hasil olahan perikanan • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani • Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton • Pembangunan jalan pertanian dengan makadam • Pembangunan Dam Parit • Pembangunan Embung
3.	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan. P.9 Penguatan tata kelola pemerintahan.	Misi 3 Apik: Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah;	• Pembangunan Jalan Desa • Pemeliharaan Jalan Desa • Pembangunan Irigasi • Pemeliharaan Irigasi • Pembangunan Gedung • Pemeliharaan Gedung • Pembangunan Saluran Air • Pemeliharaan saluran air • Pembangunan Talud • Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) • Pembangunan Jembatan • Pemeliharaan Jembatan • Drainase jalan kabupaten • Jaringan irigasi kewenangan kabupaten • Normalisasi sungai (rob) • Senderan/ bronjong/ talud sungai • Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten • Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten • Senderan jalan kabupaten

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			• Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum • Pembangunan TPS/TPS3R • Peningkatan SPAM Perdesaan (Stunting/PKE) • Pembangunan SPAL • Pemeliharaan Senderan/ bronjong/ talud sungai • Pembangunan Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (Stunting/PKE) • Ruang Terbuka Hijau Sederhana Skala Desa/Kelurahan • Pembangunan Trotoar dan Median Jalan • Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan • Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong • Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong – Gorong • Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum) di wilayah Kelurahan • Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan • Pembangunan LPJU di Wilayah Kabupaten Pemalang • Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kabupaten Pemalang
4.	P.6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia P.7 Penguatan penanganan kemiskinan	Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat	• Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan) • Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan) • Pengadaan Alat Praktek dan Peraga (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			• Pengadaan mebel (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan) • Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan dasar (RA/MI/MTS) • Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan dasar (RA/MI/MTS) • Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Praktek dan Peraga (RA/MI/MTS) • Pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan pembuatan dokumen rekomendasi • Pelatihan Pembuatan peta risiko krisis kesehatan akibat bencana bagi petugas puskesmas • Sosialisasi program imunisasi bayi dan baduta bagi kader kesehatan • Penanganan stunting gizi buruk bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) • Sosialisasi implementasi Germas di masyarakat • Peningkatan kesehatan usia remaja dan usia produktif • Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) • Pembangunan Posyandu di Desa • Pembangunan Posyandu di Kelurahan
5.	P.1 Pengembangan pembangunan pariwisata P.6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	Misi 5: Silaturahmi Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera;	• Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memiliki surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll • Sosialisasi Pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Desa Tematik (desa anti narkoba, desa moderasi antar umat beragama)

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			• Sosialisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (komponennya kesetaraan, kerjasama dan toleransi) • Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia • Sosialisasi Indeks kewaspadaan dini • Sosialisasi Indeks Pengukuran Peta kerawanan konflik • Sosialisasi Indeks kinerja ormas • Sosialisasi Indeks harmoni Indonesia • Sosialisasi Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (asta cita) • Sosialisasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara (Memantapkan kewaspadaan dini, , Komunikasi Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, FGD) dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (asta cita) • Sosialisasi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (berupa peningkatan kapasitas SDM untuk pemberdayaan ormas, Kesetaraan gender di sosialisasi kegiatan yang ada di kesbangpol dengan memperhatikan komposisi peserta antara laki - laki dan perempuan, Pelibatan disabilitas di pendidikan politik)/asta cita • Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			kemiskinan(asta cita).FGD dengan stakeholder terkait • Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Astacita) berupa pemberdayaan bagi Forum Komunikasi Umat Beragama di Tingkat Kecamatan, hibah FKUB, Monev FKUB, FGD dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat • Bantuan untuk organisasi relawan di Kabupaten Pemalang
6.	P.9 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Misi 6 Organisatoris Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.	• Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba(Astacita) berupa sosialisasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 14 Kecamatan dengan kerjasama BNN dan Polres
7.	P.6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 7 Digitalisasi Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.	• Pelatihan Penggunaan Media Online
8.	P.1 Pengembangan pembangunan pariwisata	Misi 8 Ikhlas Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.	• Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional • - Kegiatan yang menunjang terciptanya regenerasi di bidang seni budaya • Pemeliharaan/rehabilitasi warisan budaya/makam leluhur yang berjasa di wilayah tersebut

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
			• Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) • Pembangunan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) • Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) • Bantuan sarana prasarana rumah ibadah • Pembangunan rumah ibadah • Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah

RKPD Tahun 2027 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.9.
Keterkaitan Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Target Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
T1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.715.435 ,101						
	S1.1 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,87	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah		Indeks Kualitas Air	Indeks	75,95	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
							Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,93	
							Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,33	
						Meningkatnya hasil	Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD	Mg/l	2	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						pengujian air, udara dan tanah	Kualitas Udara pada Konsentrasi SO2 dan NO2	µg/m3	75	
							Luas Tutupan Lahan		43.101	
						Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	86,47	
					Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan kebutuhan perumahan serta pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya		Luasan Kawasan Kumuh	Ha	197.258	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
							Backlog Rumah	Unit	16.450	
						Meningkatnya akses hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	72,64	
							Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	28,94	
							Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	31,56	
							Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	%	31,56	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
							tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
						Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum			
					Meningkatnya mitigasi resiko bencana		Indeks Risiko Bencana	Indeks	104,16	URUSAN TRANTIBUMLI NMAS KEBENCANAAN
						Meningkatnya ketahanan daerah dalam bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81	
T2. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84,00						
	S2.2 Meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan	Nilai SAKIP	Nilai	71,50	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	70,75	SEKRETARIAT DAERAH
						Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang pemkesra	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang pemkesra	Nilai	35,1	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
	publik yang baik.					Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang perek. dan pemb	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang perek dam pemb	Nilai	35,1	
						Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang adm. Umum	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang adm. Umum	Nilai	35,1	
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah	Angka	84,5645	PERENCANAAN
						Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	%	100	
						Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	%	100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah		Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	75	KEUANGAN
							Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks	3,0	
						Meningkatnya belanja sesuai dengan per UU an dan pemanfaatan aset daerah	Persentase <i>Mandatory Spending</i> yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	70	
							Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	
					Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah		Rasio PAD terhadap APBD (indek kemandirian Keuangan daerah)	%	20	
						Meningkatnya hasil pemungutan pajak daerah	Rasio pajak terhadap Pdrb	%	0,70	
					Meningkatnya kualitas integritas daerah		Indeks Integritas Nasional	Angka	71	INSPEKTORAT
						Meningkatnya kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa		KECAMATAN COMAL
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	85,00	
							Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%		
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	13	KECAMATAN COMAL

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	87,50	
							Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	68,42	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	61	KECAMATAN PETARUKAN
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	87,61	
							Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	-	
					Meningkatnya kualitas tata kelola		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	65,40	KECAMATAN PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan					
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	86,70	
							Prosentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	-	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	-	KECAMATAN PULOSARI
							Nilai SKM	Nilai	87,25	
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam	Persentase Meningkatnya	%	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	jumlah Desa Mandiri			KECAMATAN TAMAN
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	4	
					Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM		Nilai	86,65	
						Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri		%	19,05	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa		
										KECAMATAN AMPELGADIN G

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan					
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai		
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%		
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa		
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan	Nilai SKM	Nilai		
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						pemberdayaan masyarakat				
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	4	KECAMATAN BANTARBOLANG
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	86,00	
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	24,00	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	-	KECAMATAN BELIK

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					masyarakat di wilayah Kecamatan					
					Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	86,65		
						Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	-		
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	4	KECAMATAN MOGA
					Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	91,00		
						Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	60,1	KECAMATAN ULUJAMI
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	88,86	
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	-	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	4	KECAMATAN WATUKUMPU L

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	91,01	
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	26,67	
					Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	-	KECAMATAN RANDUDONG KAL
						Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	94,5	
							Persentase Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	-	
					Meningkatkan Kemandirian Desa		Indeks Desa	Indeks	71,24	PERMASDES
						Meningkatnya capaian	Persentase Desa Mandiri	%	25,59	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Desa mandiri				
		Maturitas SPIP	Level	2,965	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Indeks	3,3	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	Indeks	4,3	
							Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	3	
					Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	283,5	KEPEGAWAIAN
						Meningkatnya penerapan NSPK dalam manajemen ASN	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	89,36	
						Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,66	Meningkatnya pelayanan adminduk yang prima		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	93,5	URUSAN ADMINDUKCA PIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk yang primA	Nilai SKM	5	92,25	SEKRETARIAT DPRD
							Cakupan Layanan Adminduk	%	91	
					Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	85,07	
						Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Cakupan layanan sekretariat DPRD	%	81,52	
						Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	Nilai	85,07	
T3. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah		Indeks Daya saing daerah	Angka	3,82						
	S3.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi	%	5,90-7,75	Meningkatnya Ketahanan pangan dan kontribusi pertanian dalam perekonomian		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,30	URUSAN PERTANIAN
		Laju Inflasi	%	1,5-3,5		Meningkatnya keanekaragaman dan pemenuhan kecukupan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
							Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	25,05	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Meningkatnya hasil pertanian unggulan daerah	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
							Padi	Kw/ha	62,21	
							kopi	Ton/hektar	1,7	
							Produksi Daging	Kg	4.338.395	
							Produksi Telur	kg	337.460	
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	73	URUSAN PUPR
							Meningkatnya kondisi jalan mantap	%	78,79	
							Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	55,77	
							Meningkatnya akses air minum perpipaan	%	32,01	
					Meningkatnya		% penurunan gangguan	%	100	URUSAN TRANTIBUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran		keamanan dan ketertiban			
							Angka Kriminalitas	-	-	
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	
						Meningkatnya penegakan Perda dan penanganan kebakaran	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	
							Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	
					Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Rasio Konektivitas	Rasio	72,02	URUSAN PERHUBUNGAN
						Meningkatnya kelancaran lalu lintas kendaraan	VC Rasio	Indeks	0,36	
					Meningkatnya peran koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dalam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,21	URUSAN KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
							Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,41	
							Kontribusi Sektor	%	17,50	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					perekonomian daerah		Perdagangan terhadap PDRB			
							Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	22,72	
						Meningkatnya Kualitas koperasi dan usaha mikro	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,57	
							Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	32,72	
						Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor	\$	352.522.031	
						Meningkatnya jumlah IKM	Persentase pertumbuhan IKM	%	6.50	
					Meningkatnya kontribusi kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata dalam pembangunan daerah		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,50	URUSAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Persentase prestasi pemuda	%	20,35	
						Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	0,94	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Potensial di Kabupaten Pemalang	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	%	8,13	
						Meningkatnya pemuda dalam partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	17,92	
						Meningkatnya keikutsertaan atlet dalam kejuaraan olahraga regional	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralympic)	Medali	51	
					Meningkatnya investasi di kabupaten		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	12,25	URUSAN PENANAMAN MODAL
						Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp/tahun	276.784.325	
					Meningkatnya produksi dan nilai ekonomi sektor perikanan yang berbasis potensi lokal		Nilai Produksi Perikanan	Rp		URUSAN KELAUTAN PERIKANAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					untuk mendorong daya saing dan perekonomian daerah Kabupaten Pemalang					
						Meningkatnya produksi sektor perikanan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pemalang	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton/Tahun	17.814	
						Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	20.325		
						Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton/Tahun	12.718		
					Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagaman dalam masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7,2	KESBANGPOL
						Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar	Konflik SARA	Kasus	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
	S3.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,10		kelompok masyarakat.				
					Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan		Indeks Pendidikan	Indeks	83,76	URUSAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
							Pemajuan Kebudayaan	Angka/huruf	B	
						Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,01	
							Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	
						Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	22,81	URUSAN KESEHATAN
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,75	
						Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah kematian ibu	Orang	9	
							Jumlah kematian Balita	Orang	118	
							Prevalensi Stunting	%	10	
							Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	90,5	
							Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Indeks	98,3	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
					Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60,7	URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN
							Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	55,4	
						Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	45	
							Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	2,88	
					Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah dengan provinsi dan pemerintah pusat serta kualitas penelitian, riset dan inovasi		Kapabilitas Inovasi		2,24	RISET DAN INOVASI
							Indeks inovasi daerah	Angka	53	
T4. Meningkatkan		Tingkat Kemiskinan	%	12,20-11,82						

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	S4.5 Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Indeks gini	Angka	0,313	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PPKS yang ditangani	%	70	URUSAN SOSIAL,PPPA , PPKB
							IPG	Indeks	87,5	
							LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,22	
						Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100	
							Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	
						Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek Ketimpangan gender)	Indeks	0,390	
							Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya (780)	
						Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian	TFR (Angka Kelahiran Total)	jiwa	2,11	
							Indeks Pembangunan	Angka	64,29-64,32	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran Tahun 2027	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Target 2027 Tujuan/ Sasaran PD Tahun 2027	Urusan
						penduduk	Keluarga (IBangga)			
	S4.6 Meningkatnya penanganan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05 – 5,75	Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran		TPAK		72,96	URUSAN TENAGA KERJA
						Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp (juta)/orang	27,65	

Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 dengan Nasional ditunjukkan dengan keselarasan Tujuan, Sasaran, Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan Daerah Tahun 2027 dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027 serta Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan Daerah Tahun 2027 dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027 serta Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
T1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman		Penurunan Emisi GRK Kumulatif							
	S1.1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan	P5 Penguatan infrastruktur	1. Program Perencanaan	Meningkatnya perencanaan	Persentase dokumen perencanaan	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PN8 Memperkuat penyelaras kehidupan yang	PD2 Peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif,

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
	serta pengelolaan sampah.	n Hidup (IKLH)	berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	LH yang disusun	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	dan berbasis lingkungan
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu			
							Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu		
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
				4. Program Pengelolaan	Meningkatnya pengelolaan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				Persampahan	persampahan	Pengolahan Sampah	URUSAN TRANTIBUM LINMAS		
				5. Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
						Jumlah Warga Negara terdampak bencana			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						yang memperoleh pelayanan rehabilitasi			
						Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi			
				6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meratanya Penyediaan Air Minum bagi rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meratanya layanan pengelolaan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
				8. Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
						Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
				9. Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						kab/kota yang ditangani	PERMUKIMAN		
T2. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi							
	S2.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.	Nilai SAKIP	P9 Peningkatan tata kelola pemerintahan	10. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	URUSAN PERENCANAAN	PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PP. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PD1 Peningkatan tata Kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah
					Keselarasn Dokumen RKPD dengan RKP	URUSAN PERENCANAAN			
				11. Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang perek. dan pemb	SEKRETARIAT DAERAH		
					ITKP				
						Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027	
						Persentase kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan				
				12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang adm. Umum	SEKRETARIAT DAERAH			
						Rata-rata IKM Pemda				
						Sakip Komp Pelaporan				
		Maturitas SPIP		13. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	URUSAN KEUANGAN			
						Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan				
						Persentase penyampaian Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan				

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				14. Program Pengelolaan BMD	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase tanah milik pemda yang bersertifikat	URUSAN KEUANGAN		
				15. Program pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru	URUSAN KEUANGAN		
						Persentase Piutang yang terbayarkan			
						Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital			
				16. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	URUSAN PENGAWASAN		
				17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	URUSAN PERENCANAAN		
						Keselarsan Dokumen RKPD dengan RKP			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
					nan Daerah				
				18. Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang perek. dan pemb	SEKRETARIAT DAERAH		
						ITKP			
						Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan			
						Persentase kebijakan di bidang adpem yang dihasilkan			
				19. Program kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas penataan kepegawaian Daerah	Persentase Terpenuhinya ASN	URUSAN KEPEGAWAIAN		
						Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN			
						Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya			
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai "Baik"			
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Menggunakan Sistem Informasi			
				20. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Rata rata SKM			
						Persentase OPD yang memiliki SOP dan SPP yang sesuai peraturan perundangan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						Persentase OPD dengan nilai komponen pelaporan			
				21. Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam kependudukan dan pencatatan sipil	Perekaman KTP elektronik	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
						Cakupan penerbitan Kartu Keluarga			
				22. Program Pencatatan Sipil		Kepemilikan akta kelahiran	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
						Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
T3. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah		Indeks Daya saing daerah							
	S3.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi	P1 Pengembangan pembangunan pariwisata P2 Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan P3 Penguatan Usaha	23. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pembangunan sentra industri	Persentase sentra industri terbina	URUSAN PERINDUSTRIAN	PN2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, ENergi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru	
				24. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	URUSAN PERDAGANGAN		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027	
			Mikro Kecil dan Menengah P4 Peningkatan investasi P5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan	25. Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	URUSAN PERDAGANGAN	PN3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
				26. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian yang didukung oleh sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan	URUSAN PERTANIAN			
						Produksi Tanaman Hortikultura				
						Produksi Komoditas Perkebunan (bidang Perkebunan)				
						Populasi ternak				
				27. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT, DAM PARIT	URUSAN PERTANIAN			
				28. Program Pengelolaan Sumber Daya	Meningkatnya Pengelolaa n Sumber Daya	Persentase Cadangan Pangan	URUSAN PANGAN			PN7

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
				29. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi per kapita per hari	URUSAN PANGAN		
						Konsumsi protein perkapita per hari			
				30. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	URUSAN PANGAN		
				31. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	URUSAN PANGAN		
				32. Program Peningkatan Daya	Meningkatnya	Jumlah kunjungan wisatawan	URUSAN PARIWISATA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				Tarik Destinasi Wisata	kuantitas wisatawan.	nusantara dan mancanegara			
				33. Program Pemasaran pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase media yang dipergunakan untuk promosi	URUSAN PARIWISATA		
				34. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Berkembangnya Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan mendaftarkan HAKI	URUSAN PARIWISATA		
				35. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				36. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya hasil Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				37. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terjaganya Iklim Penanaman Modal dalam meningkatkan realisasi penanaman modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	URUSAN PENANAMAN MODAL		
				38. Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	URUSAN PENANAMAN MODAL		
				39. Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	URUSAN PENANAMAN MODAL		
				40. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	URUSAN PERDAGANGAN		
						Disparitas Harga			
41. Program Perekonomian dan	Meningkatnya kualitas	Persentase kebijakan perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH						

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				Pembangunan	kebijakan perekonomian dan pembangunan	n yang dihasilkan			
				42. Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
				43. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/ Kota	URUSAN PERHUBUNGAN		
						Rasio Ijin Trayek			
						Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C			
						Persentase Kendaraan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						Yang Melakukan KIR			
				44. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
				45. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
				46. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Warga	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara			
				47. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penurunan kasus kebakaran	URUSAN TRANTIB LINMAS		
	S3.4 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	P6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia P8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan	48. Program pengelolaan pendidikan	Meningkatnya pengelolaan pendidikan	APS PAUD	URUSAN PENDIDIKAN	P4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran	PD3 Peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter
						APS SD			
						APS SMP			
				49. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Terpenuhi nya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	APS Kesetaraan (7-18 tahun)	URUSAN KESEHATAN		
						Indeks PSPM KESGA			
						Persentase Fasyankes sesuai Standar			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
			perlindungan anak	an Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	cakupan Jaminan Kesehatan Nasional		Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
						Persentase desa/kelurahan STBM			
						Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)			
				50. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	URUSAN KESEHATAN		
				51. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	URUSAN KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA		
				52. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing	Cakupan Pembinaan Olahraga	URUSAN KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				Saing Keolahra gan	Keolahra gan				
				53. Program Pembina an Perpusta kaan	Meningkat nya Pembinaan Perpustak aan	Persentase perpustakaa n yang terstandaris asi	URUSAN PERPUSTAK AAN		
						Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat			
				54. Program Pengarus utamaan Gender Dan Pemberd ayaan Perempu an	Meningkat nya Pengarusu tamaan Gender Dan Pemberday aan Perempua n	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	URUSAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK		
				55. Program Perlindu ngan Perempu an	Meningkat nya Perlindung an Perempua n	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatka n Layanan Komprehens if	URUSAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK		
				56. Program Pemenuh	Meningkat nya	Persentase pencapaian	URUSAN PEMBERDAY		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
				an Hak Anak (PHA)	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Desa/Kelurahan Layak Anak	AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
				57. Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
				58. Program Pengembangan Kebudayaan	Berkembangnya Kebudayaan lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	URUSAN KEBUDAYAAN		
				59. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Berkembangnya Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	URUSAN KEBUDAYAAN		
				60. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya	Terlaksananya Pelestarian dan Pengelola	Persentase cagar budaya dan WBTb yang dilestarikan	URUSAN KEBUDAYAAN		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
					n Cagar budaya				
				61. Program Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa	Indeks infrastruktur desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
				62. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
				63. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Tata Kelola Desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
				64. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang aktif (PKK, LPMK/LPMD , RT/ RW, Posyandu, Karangtaruna	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
	S3.5 Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	P6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia P9 Penguatan tata kelola pemerintahan.	65. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
				66. Program Riset dan Inovasi Daerah	Terlaksananya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah			
						Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di daerah			
T4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan		Tingkat Kemiskinan							
	S4.6 Menurunnya kesenjangan	Indeks gini	P3 Penguatan Usaha	67. Program Pemberd	Meningkatnya	Persentase PSKS yang dibina	URUSAN SOSIAL	PN6 Membangun dari Desa dan dari	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
penanggulangan kemiskinan.	pendapatan masyarakat		Mikro Kecil dan Menengah P7 Penguatan penanganan kemiskinan P8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	ayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial			Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:	
				68. Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	URUSAN SOSIAL		
						Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani			
				69. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulan	URUSAN SOSIAL		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
						gan kemiskinan	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
						Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			
				70. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan			
				71. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			
	S4.7 Meningkatnya penanganan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	P7. Penguatan penangana	72. Program Perencanaan	Tersusunnya Perencana	Persentase kegiatan yang	URUSAN TENAGA KERJA	PN4 Memperkuat Pembangunan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Prioritas Pembangunan 2027	Program Pembangunan Tahun 2027	Indikator Outcome	Indikator Outcome / Kinerja Program	Urusan	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tahun 2027	Keterkaitan dengan Prioritas Provinsi Tahun 2027
			n kemiskinan	Tenaga Kerja	an Tenaga Kerja	dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
				73. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	URUSAN TENAGA KERJA		
				74. Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	URUSAN TENAGA KERJA		

Sedangkan keterkaitan antara prioritas pembangunan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 mendukung Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional beserta Pagu Indikatif Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
P1.	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA							
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	1.192.242	1.047.902	4.530.750.902,00	URUSAN PARIWISATA	PD2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pengunjung media promosi online dan offline	Orang	24.356	Na	750.000,00	URUSAN PARIWISATA	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan mendaftarkan HKI	%	50	Na	450.000,00	URUSAN PARIWISATA	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang dibina/ dilatih keterampilan	%	31	Na	98.500.000,00	URUSAN PARIWISATA	
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	0,76	Na	150.450.000,00	URUSAN KEBUDAYAAN	
		Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan	%	0,08	Na			
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	31,34	Na	505.000.000,00	URUSAN KEBUDAYAAN	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	100	Na	450.000,00	URUSAN KEBUDAYAAN	
8.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dibina	%	10,53	Na	15.000.000,00	URUSAN KEBUDAYAAN	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Orang	85.912	Na			
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara	Unit	4	Na	450.000,00	URUSAN KEBUDAYAAN	
P2.	PENGUATAN INDUSTRIALISASI BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN							

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
10.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan	Ton	605.784	597,460	3.712.420.400,00	URUSAN PERTANIAN	
		Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	303.426	306,419			
		Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	1.156	1176,16			
		Populasi ternak	Ekor	3.938.245	3,591,221			
11.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT)	%	23,73	22,75	5.056.877.000,00	URUSAN PERTANIAN	
12.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	11,24	10,98	456.550.460,00	URUSAN PERTANIAN	
13.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman pangan	%	50	57,02	309.502.600,00	URUSAN PERTANIAN	
14.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani utama	%	0,27	0,07	24.350.000,00	URUSAN PERTANIAN	
15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	18.069	Na	1.629.025.000,00	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
16.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	20.529	Na	794.545.000,00	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
17.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi	%	2,79	Na	191.220.000,00	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
18.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	12.739	Na	213.780.000,00	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
19.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	%	7,58	7,97	50.000.000,00	URUSAN PANGAN	
		Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kapita/hari	2100	2217,9	638.000.000,00	URUSAN PANGAN	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
20.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi protein perkapita per hari	kkal/ kapita/hari	87	68,83			
21.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,07	13,45	55.000.000,00	URUSAN PANGAN	
22.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	94	95.00	55.000.000,00	URUSAN PANGAN	
23.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri terbina	%	15	Na	197.300.000,00	URUSAN PERINDUSTRIAN	
24.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	Na	18.500.000,00	URUSAN PERINDUSTRIAN	
25.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	125	Na	42.500.000,00	URUSAN PERINDUSTRIAN	
26.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	48,15	0	35.000.000,00	URUSAN PERDAGANGAN	
27.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	52	20	280.445.600,00	URUSAN PERDAGANGAN	
28.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	Na	568.439.400,00	URUSAN PERDAGANGAN	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	Na			
		Disparitas Harga	%	<10	Na			
29.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	8,72	Na	45.000.000,00	URUSAN PERDAGANGAN	
P3.	PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
30.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Verifikasi syarat usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	%	100		-	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
31.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	39,7	Na	80.000.000,00	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
32.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	35,2	Na	20.000.000,00	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
33.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	21,34	Na	345.000.000,00	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
34.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0,88	Na	0	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
35.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	%	2,22	Na	643.700.000,00	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
36.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	170,5	Na	446.300.000,00	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
P4.	PENINGKATAN INVESTASI							
37.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	-3,45	4.890.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
38.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	%	100	100	130.510.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
39.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	75.000.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
40.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	81.210.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
41.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	%	100	100	25.000.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
42.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	80	10.000.000,00	URUSAN TENAGA KERJA	
43.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,78	6.4	480.000.000,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
44.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	73,83	71.67	755.080.850,00	URUSAN PENANAMAN MODAL	
45.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	33.84	250.000.000,00	URUSAN PERINDUSTRIAN	
46.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)ji	%	100	Na	10.000.000,00	URUSAN PERDAGANGAN	
47.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	%	6,25	Na	951.115.000,00	URUSAN PERDAGANGAN	
P5.	PENGUATAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN							
48.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	80,29	78,09	47.109.893.550,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
49.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik	%	29,57	14	996.520.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	16	Na			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,7	Na			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72	Na			
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	56,24	Na			
50.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	89,85	Na	415.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	23,95	53			
51.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,5	1,080	10.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	58,57	Na			
52.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	76,76	4	20.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
53.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	80	Na	20.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Rasio Kepatuhan PBG	%	82,86	203			
54.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	70	0	10.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
55.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	100	Na	40.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
56.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21	Na	20.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
57.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar	%	36,21	233	10.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
58.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Na	1.030.000.000,00	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	Na			
59.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	44,04	Na	11.809.250.000,00	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
60.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun	%	100	Na	370.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
61.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	58,33	Na	725.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	54,17	Na			
62.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	43,101	Na	450.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
63.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	%	30	Na	10.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
64.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65	Na	50.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
65.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	35,82	Na	12.700.800.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
66.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	Na	10.000.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
67.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	67,12	Na	36.130.123.800,00	URUSAN PERHUBUNGAN	
		Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,82	Na			
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	68	Na			
68.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,	%	100	Na	1.850.000,00	URUSAN PERUMAHAN DAN	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
	KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					KAWASAN PERMUKIMAN	
69.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	81	Na	50.000.000,00	URUSAN PERTANAHAN	
70.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kab/Kota	%	100	Na	50.000.000,00	URUSAN PERTANAHAN	
P6	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA							
71.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS PAUD	%	93,01	Na	227.994.197.000,00	URUSAN PENDIDIKAN	
		APS SD	%	99,45	Na			
		APS SMP	%	93,63	Na			
		APS Kesetaraan (7-18 tahun)	%	28,81	Na			
72.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	Na	100.000.000,00	URUSAN PENDIDIKAN	
73.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru (Redistribusi guru)	%	94	Na	200.000.000,00	URUSAN PENDIDIKAN	
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	85	Na			
74.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	50	Na	326.561.833.270,00	URUSAN KESEHATAN	
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	98	Na			
		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	74,5	Na			
		Angka Keberhasilan Pengobatan		94	Na			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		Tuberkulosis	%	100	Na			
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	75	Na			
		Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV)	%	61	Na			
		Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	99,5	Na			
		Indeks SPM Kesehatan Keluarga	Indeks	75	Na			
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	%	89	Na			
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Kesehatan sesuai Standar	%	50	Na			
75.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Per 100,000 Penduduk	258	Na	1.640.576.000,00	URUSAN KESEHATAN	
76.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	Na	184.853.000,00	URUSAN KESEHATAN	
		Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan	%	71	Na			
77.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	75	Na	1.038.092.730,00	URUSAN KESEHATAN	
78.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli	unit	55	Na	228.188.000,00	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		dan berbudaya lingkungan hidup						
79.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	64,71	267	192.999.900,00	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
80.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	60,53	318	1.363.000.000,00	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
81.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	100	1	100,00	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
82.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	12	559.399.600,00	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100	Na			
83.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	38	Na	1.123.425.000,00	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
84.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	Na	1.345.000.600,00	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Na			
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	Na			
		Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang	%	100	Na			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		memperoleh pelayanan rehabilitasi						
		Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi	%	100	Na			
85.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	16,1	Na	350.700.000,00	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)		100	Na			
86.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,95%	Na	5.338.635.000,00	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,48%	Na			
87.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	100	Na	7.891.300.000,00	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
88.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara	%	88,7	Na	1.570.000.000,00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
89.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	%	77,5	Na	2.897.516.000,00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
90.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	angka	72,5	72,23	595.000.000,00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
91.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	angka	76	79,37	380.000.000,00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
92.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks kewaspadaan nasional	angka	7,5	7,16	435.000.000,00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
93.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	14,3	20	30.000.000,00	URUSAN TRANSMIGRASI	
94.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Na	459.500.000,00	KECAMATAN COMAL	
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)			Na			
95.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Na	809.194.000,00	KECAMATAN TAMAN	
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%		Na			
96.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Na	60.000.000,00	KECAMATAN MOGA	
97.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	98,1	Na	40.700.000,00	KECAMATAN AMPELGADING	
98.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	3	27.700.000,00	KECAMATAN BODEH	
99.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Na	29.086.500,00	KECAMATAN BELIK	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
100.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	83	88	32.498.000,00	KECAMATAN ULUJAMI	
101.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	95,39	15	90.392.800,00	KECAMATAN PULOSARI	
102.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan Desa dan Kelurahan yang aktif	%	100	100	57.783.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL	
103.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100.00	2.230.419.350,00	KECAMATAN PEMALANG	
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%	67,25	63.00			
104.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	98	19	104.062.400,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL	
105.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	53.990.400,00	KECAMATAN WARUNGPRING	
106.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	96,12	3	30.000.00000	KECAMATAN BANTARBOLANG	
107.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Na	419.490.620,00	KECAMATAN PETARUKAN	
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%	100	Na			
P7	PENGUATAN PENANGANAN KEMISKINAN							
108.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	31,72	Na	5.100.000,00	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
109.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani	%	72,64	Na	1.120.000.000,00	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
110.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina	%	100	Na	22.530.800,00	URUSAN SOSIAL	
111.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Na	353.500.300,00	URUSAN SOSIAL	
		Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	%	69	Na			
112.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	Na	201.490.100,00	URUSAN SOSIAL	
		Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Na			
113.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	%	100	Na	0,00	URUSAN SOSIAL	
114.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Na	230.000.000,00	URUSAN SOSIAL	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Na			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
115.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	Na	14.379.100,00	URUSAN SOSIAL	
P8.	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
116.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,5	Na	55.000.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
117.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,02	Na	235.456.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
118.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	45	Na	75.000.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
119.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender	%	95,77	Na	15.000.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
120.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	51,12	Na	5.000.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
121.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	Na	287.541.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
P9.	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN							
		Perekaman KTP elektronik	%	99,92	Na	954.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
122.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64	Na		URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	99,54	Na			
		Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	20	Na			
123.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,3	Na	19.500.000,00	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	Na			
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Na			
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Na			
124.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	80	Na	341.900.000,00	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
125.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data profil kependudukan yang disusun	%	100	Na	5.600.000,00	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
126.	PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks infrastruktur desa		5,81	307	391.850.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
127.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama	%	18,39	19	92.150.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
128.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	9,3	Na	3.272.865.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	6,89	37	1.205.000.000,00	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
130.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	34	Na	1.775.000.000,00	URUSAN KOMUNIKASI	
131.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	%	100%	Na	3.674.600.000,00	URUSAN INFORMATIKA	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	51	Na			
132.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	36	Na	361.300.000,00	URUSAN PERSANDIAN	
133.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,68	Na	115.312.095,00	URUSAN KEARSIPAN	
134.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	36,7	Na	8.687.905,00	URUSAN KEARSIPAN	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
135.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terstandarisasi	%	15	Na	783.894.200,00	URUSAN KEARSIPAN	
		Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,9	Na			
136.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan	unit	1	Na	45.105.800,00	URUSAN PERPUSTAKAAN	
137.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	82,5	113	10.289.650.000,00	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	
138.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	97,5	83.32	200.000.000,00	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	
139.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Bidang Administrasi Umum	Nilai	56,95	85.9	9.717.478.399	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	
140.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	%	100	Na	4.748.482.990,00	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase dokumen daerah yang dibahas	%	100	Na			
		Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	100	Na			
141.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi	%	100	100	150.000.000,00	URUSAN PERENCANAAN	
		Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi	%	100	Na			
142.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Na	355.274.400,00	URUSAN PERENCANAAN	
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang	%	100	Na			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	Na			
		Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Na			
		Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100	Na			
		Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Na			
143.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	100	435.961.077.300,00	URUSAN KEUANGAN	
		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	100			
		Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	100			
144.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemanfaatan barang milik daerah	%	100	100	460.000.000,00	URUSAN KEUANGAN	
145.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)	%	20	100	1.900.720.000,00	URUSAN KEUANGAN	
		Persentase Piutang yang terbayarkan	%	10	100			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100			
146.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya ASN	%	77,39	Na	1.336.064.949,00	URUSAN KEPEGAWAIAN	
		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	99,58	Na			
		Nilai IP ASN dimensi kualifikasi	Nilai	21,72	Na			
		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	%	21,69	Na			
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai "Baik"	%	94,99	Na			
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	%	92	Na			
147.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	37,8	Na	337.690.370,00	Urusan PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
148.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	Na	140.000.000,00	URUSAN RISET DAN INOVASI	
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	100	Na			
		Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	%	100	Na			
149.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		95	97	1.020.000.000,00	URUSAN PENGAWASAN	
		Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan yang direalisasi			110,67			

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
150.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko/SPIP/ Pengendalian Korupsi	%	100	100	705.000.000,00	URUSAN PENGAWASAN	
		Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	100	100			
151.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	12.000.000,00	KECAMATAN COMAL	
152.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	4.000.000,00	KECAMATAN COMAL	
153.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	89.000.000,00	KECAMATAN COMAL	
154.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	Na	18.235.000,00	KECAMATAN COMAL	
155.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	15.250.000,00	KECAMATAN TAMAN	
156.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN	
157.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	49.800.200,00	KECAMATAN TAMAN	
158.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	Na	20.255.000,00	KECAMATAN TAMAN	
159.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	10.500.000,00	KECAMATAN MOGA	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
160.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	5.000.000,00	KECAMATAN MOGA	
161.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	94.000.000,00	KECAMATAN MOGA	
162.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	Na	42.000.000,00	KECAMATAN MOGA	
163.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	90,94	Na	9.800.000,00	KECAMATAN AMPELGADING	
164.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	3.000.000,00	KECAMATAN AMPELGADING	
165.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	57.520.000,00	KECAMATAN AMPELGADING	
166.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	90,98	Na	21.000.000,00	KECAMATAN AMPELGADING	
167.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	2	5.000.000,00	KECAMATAN BODEH	
168.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	0	5.000.000,00	KECAMATAN BODEH	
169.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	151	42.480.000,00	KECAMATAN BODEH	
170.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	24	7.800.000,00	KECAMATAN BODEH	
171.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	10.150.000,00	KECAMATAN BELIK	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
172.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	2.075.000,00	KECAMATAN BELIK	
173.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	37.225.000,00	KECAMATAN BELIK	
174.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	Na	21.474.000,00	KECAMATAN BELIK	
175.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	87	86	13.000.000,00	KECAMATAN ULUJAMI	
176.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	3.500.000,00	KECAMATAN ULUJAMI	
177.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100	56.658.000,00	KECAMATAN ULUJAMI	
178.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	83,33	88.88	83.500.000,00	KECAMATAN ULUJAMI	
179.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	36	21.135.800,00	KECAMATAN PULOSARI	
180.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	24	10.000.000,00	KECAMATAN PULOSARI	
181.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	212	89.908.000,00	KECAMATAN PULOSARI	
182.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	41,67	124	69.697.200,00	KECAMATAN PULOSARI	
183.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	70	18.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
184.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	11.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL	
185.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100	65.170.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL	
186.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	2	27.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL	
187.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	70,00	42.254.600,00	KECAMATAN PEMALANG	
188.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100.00	13.465.000,00	KECAMATAN PEMALANG	
189.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100,00	59.067.600,00	KECAMATAN PEMALANG	
190.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	6	15.042.000,00	KECAMATAN PEMALANG	
191.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	99	41	39.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL	
192.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	97	5	20.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL	
193.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	97	147	59.500.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL	
194.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	10	61.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL	
195.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	9.457.500,00	KECAMATAN WARUNGPRING	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Dan Program Pembangunan Daerah (Program RPJMD 2025-2029)	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2027	Capaian 2025	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Urusan	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
196.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	6.000.000,00	KECAMATAN WARUNGPRING	
197.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	5.000.000,00	KECAMATAN WARUNGPRING	
198.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	%	100	Na	12.700.000,00	KECAMATAN WARUNGPRING	
199.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	92,22	22	15.000.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG	
200.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	5	11.250.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG	
201.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	177	69.113.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG	
202.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	96,12	4	33.750.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG	
203.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	Na	18.180.000,00	KECAMATAN PETARUKAN	
204.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	Na	12.550.000,00	KECAMATAN PETARUKAN	
205.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	Na	90.300.000,00	KECAMATAN PETARUKAN	
206.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100	Na	37.300.000,00	KECAMATAN PETARUKAN	

4.5.3 Implementasi Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pada kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 terdapat Sepuluh Wilayah Pengembanag (WP) di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang termasuk dalam WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang; dengan arah pengembangan sebagai berikut:

1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya;
2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:
 - a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - f. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;
4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik; mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan
7. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetapmempertimbangkan kelestarian alam.

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang adalah sebagai berikut:

1. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:

Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: bawang merah, padi, cabe, perikanan tangkap dan budidaya)
2. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang.

- Pengembangan Integrated Ecotourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, salah satu strategi guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah adalah mengembangkan fungsi masing-masing Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kabupaten Pemalang terbagi atas 5 (lima) SWP, yaitu:

- a. SWP Pemalang, meliputi Kecamatan Pemalang, Taman dan Petarukan dengan pengembangan fungsi pusat Pemerintahan Daerah, perdagangan dan jasa, industri transportasi, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan perikanan.
- b. SWP Comal, meliputi Kecamatan Ampelgading, Comal, Ulujami dan Bodeh dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, pariwisata, industri, pertambangan, dan perikanan.
- c. SWP Randudongkal, meliputi Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Warungpring dengan pengembangan fungsi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, industri, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- d. SWP Belik, meliputi Kecamatan Belik dan Watukumpul dengan pengembangan fungsi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, agroindustri, kehutanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- e. SWP Moga, meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, agroindustri, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.

Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya merata pada kelima SWP tersebut sesuai pengembangan fungsi dan potensinya masing-masing.

Kebijakan lain yang diambil untuk pemerataan pembangunan adalah ditetapkannya plafon indikatif wilayah kecamatan (PIWK). PIWK adalah alokasi dana APBD yang digunakan untuk mengakomodir usulan dalam perencanaan partisipatif guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan berdasarkan prioritas hasil musrenbang kecamatan sebesar 15 Milyar rupiah setiap tahunnya yang dibagi untuk 14 kecamatan sesuai indeks kecamatan.

Adapun komponen yang digunakan untuk menghitung indeks kecamatan, meliputi jumlah penduduk, jumlah desa, luas wilayah, kondisi geografis, penduduk miskin, realisasi swadaya masyarakat, dan pelestarian kegiatan. Selanjutnya hasil penghitungan PIWK untuk tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12.
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Tahun 2027

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Desa		Luas Wilayah		Kondisi Geografis		Penduduk Miskin			Realisasi Swadaya Masyarakat		Pelestarian Kegiatan		Total Skor		Rincian Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (Rp.)	Pembulatan
		Jumlah	Bobot = % X 1	Jumlah	Bobot = % X 3	Luas Wilayah	Bobot = % X 1	Skor	Bobot = % X 3	Jumlah	%	Bobot = % X 1	%	Bobot = % X 2	%	Bobot = % X 2	Total Skor	%	Total skor (%) X Rp.15 M	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Moga	81,945	5.09	10	13.45	41.40	3.71	3.25	22.41	52,094	63.57	7.85	100	14.29	100	14.29	81	0.062	935,571,041	935,600,000
2	Pulosari	68,893	4.28	12	16.14	87.52	7.84	3.75	25.86	47,047	68.29	8.43	100	14.29	100	14.29	91	0.070	1,051,460,986	1,051,500,000
3	Belik	132,933	8.25	13	17.49	124.54	11.16	4.00	27.59	94,067	70.76	8.73	100	14.29	100	14.29	102	0.078	1,174,553,090	1,174,500,000
4	Watukumpul	82,878	5.15	15	20.18	129.02	11.56	4.75	32.76	58,198	70.22	8.67	100	14.29	100	14.29	107	0.082	1,233,283,530	1,233,300,000
5	Bodeh	67,493	4.19	19	25.56	85.98	7.70	3.50	24.14	40,320	59.74	7.37	100	14.29	100	14.29	98	0.075	1,125,451,684	1,125,400,000
6	Bantarbolang	93,488	5.80	17	22.87	139.19	12.47	3.25	22.41	54,034	57.80	7.13	100	14.29	100	14.29	99	0.076	1,145,386,756	1,145,400,000
7	Randudongkal	121,662	7.55	18	24.22	90.32	8.09	3.25	22.41	61,532	50.58	6.24	100	14.29	100	14.29	97	0.075	1,120,275,982	1,120,300,000
8	Pemalang	217,835	13.52	20	26.91	101.93	9.13	2.25	15.52	97,523	44.77	5.53	100	14.29	100	14.29	99	0.076	1,144,373,908	1,144,400,000
9	Taman	203,549	12.64	21	28.25	67.41	6.04	2.25	15.52	105,215	51.69	6.38	100	14.29	100	14.29	97	0.075	1,123,827,272	1,123,800,000
10	Petarukan	184,892	11.48	20	26.91	81.92	7.34	2.50	17.24	100,043	54.11	6.68	100	14.29	100	14.29	98	0.076	1,133,281,255	1,133,300,000
11	Ampelgading	80,985	5.03	16	21.52	53.30	4.78	2.50	17.24	43,775	54.05	6.67	100	14.29	100	14.29	84	0.064	967,084,113	967,000,000
12	Comal	101,746	6.32	18	24.22	26.54	2.38	2.25	15.52	54,094	53.17	6.56	100	14.29	100	14.29	84	0.064	964,174,518	964,200,000
13	Ulujami	123,472	7.67	18	24.22	60.55	5.43	2.75	18.97	64,475	52.22	6.45	100	14.29	100	14.29	91	0.070	1,053,342,176	1,053,300,000
14	Warungpring	48,931	3.04	6	8.07	26.31	2.36	3.25	22.41	28,944	59.15	7.30	100	14.29	100	14.29	72	0.055	827,933,689	828,000,000
		1,610,702	100	223	300	1,115.93	100	43.50	300	901,361	810.12	100	1400	200	1400	200	1,300	1.000	15.000.000.000	15.000.000.000

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pemalang, Semester I
Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2025
DTKS Kabupaten Pemalang, 2025 (diolah)

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagai forum strategis untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, serta usulan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan bersama perangkat daerah, sehingga proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terwujud sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi publik, serta meningkatnya kualitas perencanaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Kamus Usulan Musrenbang RKPD tahun 2027 di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13.
Usulan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kecamatan

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
NON-FISIK								
1	Pelatihan Tata Boga (BLK)	1 Paket	71,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	• 16 Orang/Kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
2	Pelatihan Tata Boga (Bidang Penta Disnaker)	1 Paket	50,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)	• 20 Orang • 6 hari (36 Jam Pelajaran) • Pemberian sarana prasarana peralatan praktek	DTKPT
3	Pelatihan Menjahit (BLK)	1 Paket	73,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	• 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
4	Pelatihan Menjahit (Bidang Penta Disnaker)	1 Paket	73,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)	• 20 Orang • 10 hari (60 Jam Pelajaran) • Pemberian sarana prasarana peralatan praktek	DTKPT
5	Pelatihan Perbengkelan Las / Las Listrik Fabrikasi (BLK)	1 Paket	78,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	• 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
6	Mekanik Sepeda Motor (BLK)	1 Paket	69,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	• 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
7	Mekanik Montir Mobil (BLK)	1 Paket	70,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	• 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
8	Pelatihan Sablon (Bid. Penta)	1 Paket	50,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)	• 20 Orang • 6 hari (36 Jam Pelajaran)	DTKPT

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
9	Pelatihan IT (BLK)	1 Paket	61,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	Khusus Pelatihan ini harus dilaksanakan di BLK • 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
10	Pelatihan Service AC (BLK)	1 Paket	61,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	Khusus Pelatihan ini harus dilaksanakan di BLK • 16 Orang/kelas • 20 Hari/160 Jam Pelatihan • Calon Peserta berusia minimal 17-35 tahun/sudah memiliki KTP • Pendidikan Minimal SD sederajat	DTKPT
11	Pelatihan Barista (Bidang Penta Disnaker)	1 Paket	50,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)	• 20 Orang • 6 hari (36 Jam Pelajaran)	DTKPT
12	Pelatihan Pengolahan Makanan/ Tata Boga (Bakery/ kue kering	1 Paket	40,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)	• 20 orang • 5 hari	DISKU MDAG

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
13	Pelatihan Handycraft / Kerajinan Tangan (membatik, tas rajut, souvenir)	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)	• 20 orang • 5 hari	DISKU MDAG
14	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)		DISKU MDAG
15	Pelatihan Service HP	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)		DISKU MDAG
16	Pelatihan Pertukangan Kayu	1 Paket	50,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)	• 20 orang • 5 hari	DISKU MDAG

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
17	Pelatihan Pembuatan Mebel Kayu	1 Paket	50,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)		DISKU MDAG
18	Pelatihan Pertukangan Bambu	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)		DISKU MDAG
19	Pelatihan Sablon	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)	• 20 orang, • 5 hari	DISKU MDAG
20	Pelatihan Menjahit untuk Pemberdayaan Masyarakat	1 Paket	30,000,000	Program Pengembangan UMKM (02.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha (02.17.08.2.01)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (02.17.08.2.01.01)		DISKU MDAG
21	Orientasi Kader Kesehatan (Stunting)	1 Paket	20,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.15)	• 20 Orang, • 2 Hari	DINKE S

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
22	Pelatihan Rias Pengantin	1 Paket	40,000,000	Program Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04)	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04.12)	• 25 Orang	DINDI KPORA
23	Pelatihan Pembuatan Parcel Hantaran Pengantin	1 Paket	15,000,000	Program Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04)	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04.12)		DINDI KPORA
24	Pelatihan Karawitan	1 Paket	37,750,000	Program Pengelolaan Kebudayaan (1.01.02)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04)	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.04.12)	• 30 Orang	DISPA RBUD
25	Pelatihan Pengolahan Limbah Pertanian	1 Paket	37,500,000	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	• 25 Orang	DISTANPARIK
26	Pelatihan Budidaya/Pe mbibitan Tanaman	1 Paket	37,500,000	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	• 25 Orang	DISTANPARIK
27	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	1 Paket	37,500,000	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	• 25 Orang	DISTANPARIK
28	Pelatihan Pengolahan/ pengelolaan sampah	1 Paket	30,000,000	Program Pengelolaan Sampah (2.11.11)	Pengelolaan sampah (2.11.11.2.01.00.04)	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (2.11.11.2.01.00.04)	• 50 orang • 2 Hari	DLH
FISIK								
1	Jambanisasi	1 Paket	3,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1.02.02.2.02.17)		DINKES

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
2	Peralatan Posyandu Anak	1 Paket	20,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.15)		DINKE S
3	Peralatan Posyandu Lansia	1 Paket	20,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.07)		DINKE S
4	Belanja Alat Posyandu Remaja KIT	1 Paket	5,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (1.02.02.2.02.05)		DINKE S
5	PMT per Ibu Hamil KEK	1 Orang	2.580.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.15)	• 120 x 21.500	DINKE S
6	Antropometri KIT	1 Paket	9,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.15)		DINKE S
7	Skrining Kesehatan Lansia	1 Paket	55,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.07)		DINKE S
8	Alat Kesehatan Skrining Lansia	1 Paket	650,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.07)		DINKE S

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
9	Belanja Alat Posbindu KIT	1 Paket	10,000,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.07)		DINKE S
10	Gizi Buruk / Stunting (Anak)	1 Paket	3.120.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02).	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.15)	• 24 x 130.000	DINKE S
11	RTLH (Peningkatan Kualitas/Rehabilitasi)	1 Unit	25,000,000	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh (1.04.04)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (1.04.04.2.01)	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha (1.04.04.2.01.0001)		DPPKP
12	RTLH bencana	1 Unit	25,000,000	Program pengembangan perumahan (1.04.02)	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (1.04.02.2.03)	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (1.04.02.2.03.0001)		DPPKP
13	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	M3	3,434,645	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)		DPPKP

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
14	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	M3	2,389,250	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)		DPPKP
15	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum) di wilayah Kelurahan	M2	250,000	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)	• Aspal	DPPKP
16	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan	M3	1,400,000	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)	• Beton	DPPKP
17	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Wilayah Kelurahan	M2	9,363,000	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)		DPPKP
18	Pembangunan Jalan Makadam / Telford	M3	445,850	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)	• Jalan Kabupaten	DPUPR

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
19	APJ (Alat Penerangan Jalan)	1 Paket	9,500,000	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01.02)	• 1 Titik	DPPKP
20	Pengadaan APE Dalam untuk PAUD	1 Paket	5,000,000	Program Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.03)	Pengadaan Perlengkapan PAUD (1.01.02.03.09)		DINDI KPORA
21	Pengadaan APE Luar untuk PAUD	1 Paket	10,000,000	Program Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (1.01.02.03)	Pengadaan Perlengkapan PAUD (1.01.02.03.09)		DINDI KPORA
22	Normalisasi/Restorasi Sungai	400 Meter	200,000,000	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		DPUPR
23	Pembangunan Bronjong (Pekerjaan bronjong+lang siran)	214 M ³	200,000,000	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		DPUPR
24	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	100 Meter	200,000,000	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		DPUPR

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
25	Swakelola Jaringan Irigasi (Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan)	200 Ha	200,000,000	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03 .02 . 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03 .02 .2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	• Area yang diairi	DPUPR
26	Pembangunan /Peningkatan SPAM Perdesaan	100 M ²	160,000,000	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03 .03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		DPUPR
27	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara	36 M ²	187,848,000	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03 .04 . 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03 .04 .2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		DPUPR
28	Pembangunan /Penyediaan SPALD	10 SR/UNIT	50,000,000	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03 .05 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03 .05 .2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		DPUPR
29	Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	50 M3	119,462,950	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03 .06 .2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03 .06 .2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		DPUPR
30	Pemeliharaan rutin jalan	300 Meter	200,000,000	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	• Aspal	DPUPR

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
31	Pembangunan /Pemeliharaa n jembatan	M2	15,000,000	1.03.10 Program Penyelenggar aan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggara an Jalan Kabupaten/K ota	1.03 .10 .2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan		DPUPR
32	Pemeliharaan gorong-gorong ruas jalan Kabupaten	50 M3	119,462,950	1.03.10 Program Penyelenggar aan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggara an Jalan Kabupaten/K ota	1.03 .10 .2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		DPUPR
33	Pembangunan TPA/TPST/SP A/TPS3R/TPS	Pembangunan Hanggar TPS 3R	500.000.000	1.03.04 Program Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembanga n sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota	1.03.04.2.01 .0010 Pembanguna n TPA/TPST/S PA/TPS3R/T PS		DPUPR
34	Pembangunan TPA/TPST/SP A/TPS3R/TPS	Pembangunan Hanggar TPS 3R dan Pembeli an Incinera tor dan Kompos	900.000.000	1.03.04 Program Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembanga n sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota	1.03.04.2.01 .0010 Pembanguna n TPA/TPST/S PA/TPS3R/T PS		DPUPR
35	Ruang Terbuka Hijau Sederhana Skala Desa/Kelurah an	M2	4,500,000	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1.04.05)	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan (1.04.05.2.01)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (1.04.05.2.01 .02)		DLH
36	Revitalisasi TPS 3R : mesin pencacah dan pemilah kapasitas 4000kg/jam	1 Paket	81.159.518	Program Pengelolaan Sampah (2.11.11)	Pengelolaan sampah (2.11.11.2.01. 00.04)	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/S DA Kabupaten/K ota (2.11.11.2.01 .0007)		DLH
37	Revitalisasi TPS 3R : Mesin press sampah, kapasitas 60 kg	1 Paket	100.000.000	Program Pengelolaan Sampah (2.11.11)	Pengelolaan sampah (2.11.11.2.01. 00.04)	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/S DA Kabupaten/K ota (2.11.11.2.01 .0007)		DLH

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
38	Revitalisasi TPS 3R : Mesin conveyor spesifikasi kapasitas 300kg/jam	1 Paket	126.000.000	Program Pengelolaan Sampah (2.11.11)	Pengelolaan sampah (2.11.11.2.01.00.04)	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA Kabupaten/Kota (2.11.11.2.01.0007)		DLH
39	Revitalisasi TPS 3R : Mesin incinerator spesifikasi kapasitas 1 ton/hari	1 Paket	392.000.000	Program Pengelolaan Sampah (2.11.11)	Pengelolaan sampah (2.11.11.2.01.00.04)	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA Kabupaten/Kota (2.11.11.2.01.0007)		DLH
40	Pembangunan Jalan Desa (termasuk rabat beton dan pengurugan)	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
41	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
42	Pembangunan Irigasi	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
43	Pemeliharaan Irigasi (pembuatan senderan, pemeliharaan senderan, normalisasi sungai, bronjong)	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
44	Pembangunan Saluran Air	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
45	Pemeliharaan Saluran Air	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
46	Pembangunan Talud	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
47	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	-	Mempedomani SSH Pemda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02.2.04)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08)	Menyebutkan lokasi secara lengkap RT/RW	BPKPA D (Bantuan Keuangan Kepada Desa)
48	Penyusunan kajian risiko bencana / rencana kontingensi / kajian mitigasi	1 Paket	50,000,000	Program Penanggulangan Bencana (80.1.05.03)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (80.1.05.03).2.01)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (80.1.05.03).2.01.007)		BPBD
49	Pengadaan Alat Peringatan Dini Bencana Longsor, banjir	1 Paket	100,000,000	Program Penanggulangan Bencana (80.1.05.03)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (80.1.05.03).2.01)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota (80.1.05.03).2.01.015)		BPBD
50	Bantuan Alat Difabel : Alat Bantu Dengar EX-13 AXVA	1 Unit	234,000	Program Rehabilitasi Sosial (84.1.06.04)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu (1 6 04 2.01 0003)	• 150 Orang • Sasaran Kelompok: Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Durasi Kegiatan: 1 kali dalam setahun	DINSO S KBPP
51	Kursi Roda	1 Unit	3,795,000	Program Rehabilitasi Sosial (84.1.06.04)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu (1 6 04 2.01 0003)	• 300 Orang • Sasaran Kelompok: Penyandang Disabilitas Fisik Durasi Kegiatan: 1 kali dalam setahun	DINSO S KBPP

NO	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KODE REKENING DAN PROGRAM	KODE REKENING DAN KEGIATAN	KODE REKENING DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	OPD
52	Walker Besi	1 Unit	1,450,000	Program Rehabilitasi Sosial (84.1.06.04)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu (1 6 04 2.01 0003)	• 80 Orang • Sasaran Kelompok: Penyandang Disabilitas Fisik Durasi Kegiatan: 1 kali dalam setahun	DINSO S KBPP
53	Alat Bantu Dengar (Kruk)	1 Unit	450,000	Program Rehabilitasi Sosial (84.1.06.04)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu (1 6 04 2.01 0003)	• 50 Orang • Sasaran Kelompok: Penyandang Disabilitas Fisik Durasi Kegiatan: 1 kali dalam setahun	DINSO S KBPP
54	Tongkat Jalan bagi Tuna Netra	1 Buah	200,000	Program Rehabilitasi Sosial (84.1.06.04)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu (1 6 04 2.01 0003)	• 50 Orang • Sasaran Kelompok: Penyandang Disabilitas Fisik Durasi Kegiatan: 1 kali dalam setahun	DINSO S KBPP

4.5.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang

Selain melalui mekanisme partisipatif masyarakat, proses penyusunan rencana pembangunan daerah juga memperhatikan aspirasi representatif yang disampaikan melalui lembaga legislatif. Dalam konteks tersebut, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang menjadi salah satu referensi penting dalam merumuskan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2027.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang yang merupakan hasil pelaksanaan reses memuat berbagai aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang berkembang di masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan. Substansi tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang agar kebijakan yang dirumuskan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga tercipta sinergi antara aspirasi masyarakat, kebijakan eksekutif, dan fungsi representasi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berikut usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2027 dalam RKPD Tahun 2027:

Tabel 4.14.
Usulan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1.	Sosialisasi memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Sosialisasi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (berupa peningkatan kapasitas SDM untuk pemberdayaan ormas, Kesetaraan gender di sosialisasi kegiatan yang ada di kesbangpol dengan memperhatikan komposisi peserta antara laki - laki dan perempuan, Pelibatan disabilitas di pendidikan politik) (asta cita)	Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Sosialisasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara (Memantapkan kewaspadaan dini, , Komunikasi Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, FGD) dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (asta cita)	Kantor (Aula) Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Sosialisasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara (Memantapkan kewaspadaan dini, , Komunikasi Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, FGD) dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (asta cita)	Kantor (Aula) Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
5.	Sosialisasi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (berupa peningkatan kapasitas SDM untuk pemberdayaan ormas, Kesetaraan gender di sosialisasi kegiatan yang ada di kesbangpol dengan memperhatikan komposisi peserta antara laki - laki dan perempuan, Pelibatan disabilitas di pendidikan politik) (asta cita)	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Sosialisasi memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Sosialisasi Pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Desa Tematik (desa anti narkoba, desa moderasi antar umat beragama)	Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Sosialisasi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (berupa peningkatan kapasitas SDM untuk pemberdayaan ormas, Kesetaraan gender di sosialisasi kegiatan yang ada di kesbangpol dengan memperhatikan komposisi peserta antara laki - laki dan perempuan, Pelibatan disabilitas di pendidikan politik) (asta cita)	Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	250.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
9.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (Astacita) berupa sosialisasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 14 Kecamatan dengan kerjasama BNN dan Polres	Desa Mojo RT 001 RW 005 Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Sosialisasi indeks harmoni Indonesia	Dukuh Karangsambung RT 004 RW 008 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Sosialisasi memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Jl. Serka Marinir (Anm.) Tulus Ujianto No.23, Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52356, Kab. Pemalang	80.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Astacita) berupa pemberdayaan bagi Forum Komunikasi Umat Beragama di Tingkat Kecamatan, hibah FKUB, Monev FKUB, FGD dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	Sosialisasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara (Memantapkan kewaspadaan dini, , Komunikasi Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, FGD) dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (asta cita)	Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Sosialisasi Indeks Pengukuran Peta kerawanan konflik	Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.	Sosialisasi Indeks kewaspadaan dini	Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
16.	Sosialisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (komponennya kesetaraan, kerjasama dan toleransi)	Dukuh Tanjungsari RW 06 RW 07 kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.	Sosialisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (komponennya kesetaraan, kerjasama dan toleransi)	Jalan Lumba- lumba RT 01 RW 04 kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalan, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18.	Bantuan untuk organisasi relawan di Kabupaten Pemalang	Desa Belik Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	83.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19.	Pembangunan Jalan Desa	RT 02 RW 01 Desa Gedeg Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	133.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
20.	Pembangunan Jalan Desa	RT. 02 RW 01 Dusun 1 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	RT 01 RW 12 Dusun 2 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
22.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun I RT 01-02 RW 01 Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
23.	Pembangunan Jalan Desa	Dukuh Ujungmulyo RT 02 RW 08 Desa Limbangan, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
24.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun VI RT 02 RW 17, desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
25.	Senderan/ bronjong/ talud sungai	RT 01 RW 09 Dusun IV Desa Purwosari Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
26.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	RT 03 RW 01 dan RT 09 RW 01 Desa Pesucen, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
27.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01 RW 06 Dusun Pesadean Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
28.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun Copol RT 05 RW 01 dan Dusun Blandong RT 03 RW 02 Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
29.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun 1 RT 03 RW 01 Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
30.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun Gumingsir Desa Limbangan Blok warung Siem(sebelah makam) RT 02 RW 05 Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	75.500.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
31.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun Kwaringan RT 01 & 02 RW 04 Desa Babakan Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	153.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
32.	Pembangunan Jogging Track Lapangan Desa	Dusun III RT 022 RW 006 Desa Wonokromo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	154.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
33.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun Kebukuran RT 09 RW 03 Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
34.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01-05 RW 06 Dusun Cebong Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
35.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01- 05 RW 06 Dusun Cebong Desa Kabunan Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
36.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Talud Jalan Melati dusun 7 desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	175.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
37.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	dusun 5 Dusun Benteng desa Kabunan, Kecamatan Taman. , Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
38.	Pemeliharaan Gedung Tingkat Desa	Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
39.	Pembangunan Jalan Desa	RT 03 RW 03 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
40.	Pembangunan Jalan Desa	RT 02 RW 04 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
41.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01 RW 03 Desa Cibelok, Kecamatan Taman , Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
42.	Pembangunan Jalan Desa	RT 03 RW 04 Dusun Mijen Desa Cibelok Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
43.	Pembangunan Jalan Desa	RT 06 RW 05 Dusun Kledung Desa Cibelok Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
44.	Pembangunan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 004 RW 001 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
45.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun II RT 003 RW 002, Desa Klegen Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	165.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
46.	Pembangunan Jalan Desa	RT 11 RW 03 Dusun Kali tengah, desa Beluk, kec. Belik, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
47.	Pemeliharaan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 06 dusun Pondok Nangka Desa Beluk, kec. Belik, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
48.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	RT 16 RW 04 Desa Tundagan kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
49.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Talud Dukuh Batur RT 021 RW 003 Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
50.	Pembangunan Jalan Desa	RT 07 RW 01 Dukuh Kubang Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
51.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Dusun Caur RT 05 RW 01 Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
52.	Pembangunan Jogging Track Lapangan Desa	Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
53.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun Limbangan RT 03, 05, 08 RW 02 Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
54.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Wonogiri Dusun Kepuh Rt.001 Rw.004 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
55.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 04 RW 03 Desa Majalangu Kecamatan	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Watukumpul, Kab. Pemalang			
56.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun Cengis RT 02 RW 06 Desa Simpur kecamatan Belik, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
57.	Pembangunan Jalan Desa	RT 23 RW 10 Desa Karangtalok, kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
58.	Pembangunan Jalan Desa	RT 27 RW 12 desa Karangtalok, Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
59.	Pembangunan Jalan Desa	RT 003 RW 001 Dukuh Watucandi Desa Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
60.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dukuh Siranti Desa Bongas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
61.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 001 RW 001 Dusun Tundagan Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
62.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 001 RW 001 Dusun Belik Desa Bodas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
63.	Pemeliharaan Gedung Tingkat Desa	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
64.	Pembangunan Jalan Desa	Dukuh Karangmulya Desa Sikasur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	350.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
65.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	RT 033 RW 034 Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
66.	Pemeliharaan Jalan Desa	RW 001-002 Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
67.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 031 RW 003 Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
68.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	RT 009 RW 002 Desa Mangli Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	50.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
69.	Pemeliharaan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 2 RW 4 Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
70.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Dusun Bodas RT 011, 012, 013 RW 003, Desa Bodas, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	107.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
71.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01-03 RW 02 Dusun Kunitir, Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
72.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01, 02, 03 RW 02 Desa Bongas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
73.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 3,5 RW 2 Desa Ketapang Kecamatan ulujami, Kab. Pemalang	190.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
74.	Pemeliharaan Jalan Desa	Jl Langsep RW 02 Dsn Wanasari-Grogol Desa Wanamulya Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
75.	Pemeliharaan Jalan Desa	Blok Kramat RT 003 RW 001 Desa Karangbrai Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
76.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 21,22,23,24 RW 4 dukuh kaso kulon Desa Sarwodadi Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
77.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 5 RW 7 jl. masjid Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
78.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 1 RW 2, 3 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
79.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 24 RW 13 dukuh gampit Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	195.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
80.	Pemeliharaan Jalan Desa	Gang 14 RT 14 RW 004 Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
81.	Pembangunan Jalan Desa	Desa Kendaldoyong RT 009 RW 004 Kecamatan Petarukan , Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
82.	Pembangunan Jalan Desa	RT 003 dan 004 RW 004 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
83.	Pembangunan Jalan Desa	RT 008 RW 003 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
84.	Pembangunan Jalan Desa	RT 007 RW 001 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
85.	Pemeliharaan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 01, 02 RW 06 Gang Melati 2 Dukuh Kedawung Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	80.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
86.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun 2 RT 16,17, 18 RW 02, Desa Kalimas, kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	80.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
87.	Pembangunan Jalan Desa	RT 33 RW 03 Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
88.	Pembangunan Jalan Desa	RT 16-17 RW 05 Dukuh Bongkot Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
89.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 003 RW 001 Desa Semingkir (Jalan Penghubung Semingkir-Karangmoncol), Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
90.	Pembangunan Jalan Desa	Dukuh Pucangsari RW 06 Desa Kejene, kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
91.	Pembangunan Jalan Desa	RT 011-012 RW 002 Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
92.	Pembangunan Jalan Desa	Dusun Krajan RT 029-030 RW 007 Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
93.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 3,4 RW 6,7 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
94.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 05 RW 04 Desa Botekan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
95.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 7 RW 3 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
96.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 2- RT 4 RW 02 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
97.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01 RW 01 Desa Gedeg Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	112.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
98.	Pembangunan Jalan Desa	RT 010 RW 003 Desa Wonokromo, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	50.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
99.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Banglarangan Rt 001 Rw 001 Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
100.	Pembangunan Jalan Desa	Rt 01 Rw 4 dan Rt 03 Rw 5 Desa Blendung Kec Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
101.	Pembangunan Jalan Desa	Rt 9 Rw 3 Dukuh Lesung Desa Pasir Kec Bodeh, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
102.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Blok sigupit Ex Rel Kereta api Rt 1 Rw 1 Desa Kebojongan Kec Comal, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
103.	Pembangunan Jalan Desa	Rt 01 Rw 03 Dukuh Kebukuran Desa Kebojongan Kec Comal, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
104.	Pemeliharaan Jalan Desa	Jalan Sembilang Timur Dusun 4 Desa Kaliprau Kec Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
105.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 01 - 04 Dusun Wadasmalang Desa Kalitorong, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
106.	Pembangunan Jalan Desa	Rt 2 Rw 7 Desa Blendung Kec Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
107.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 2 Rw 2 Desa Batusari Kec Pulosari, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
108.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 8, 9, 10 Rw 4 Desa Mandiraja Kec Moga, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
109.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 3 Rw 5 Desa Clekatakan Kec Pulosari, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
110.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 4 dan 9 Rw 3 Dusun Majakerta Desa Majakerta Kec watukumpul, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
111.	Pembangunan Jalan Desa	Desa Karangbrai RT 013 RW 004 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
112.	Pemeliharaan saluran air yang berlokasi di Desa	dukuh glempang RW 4 desa mandiraja kec moga, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
113.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dsn Krajan RT 034-036 RW 008 Desa Beluk Kec. Belik, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
114.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun Mijen RT.05 RW.04 Desa Cibelok Taman, Kab. Pemalang	150.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
115.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 01 RW 01 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	30.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
116.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 05 RW 01 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	30.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
117.	Pembangunan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 03 RW 02 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	62.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
118.	Pemeliharaan Jalan Desa	Jalan Lingkar Timur Lingkungan RT 05 RW 05 Dusun Karangsuci Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	90.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
119.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 01 RW 05 Desa Penggarit, Jalan penghubung antar desa Penggarit - Pener Kec. Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
120.	Pembangunan Jalan Desa	RT 07 RW 03 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	167.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
121.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 01 RW 04 Dusun Siber Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
122.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 05 RW 01 Desa Penggarit Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	30.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
123.	Pemeliharaan Irigasi Desa	Blok Siwaru Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
124.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	Desa Nyamplungsari RT 009 RW 002 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
125.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Banglarangan RT 001 RW 001 Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
126.	Pembangunan Jalan Desa	Desa Kesesirejo RT 002 RW 006 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	190.250.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
127.	Pembangunan Jalan Desa	Desa Kemandungan jalan blok jambangan Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	176.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
128.	Pembangunan Jalan Desa	Desa Cangak RT 004 RW 001 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
129.	Pemeliharaan Jalan Desa	Dukuh Krajan Rt 009 Rw 007 Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
130.	Pembangunan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 031 RW 006 Dusun Sawahrejo Selatan Desa Tegal Sari Timur Kecamatan	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Ampelgading, Kab. Pemalang			
131.	Pembangunan Jogging Track Lapangan Desa	RT 01 RW 05 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
132.	Pembangunan Jalan Desa	RT 05, 06 RW 05 Desa Mojo Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
133.	Pembangunan Jalan Desa	RT 01, 02 RW 07 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
134.	Pembangunan Jalan Desa	RT 03 RW 01 Desa Mojo Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
135.	Pembangunan saluran air yang berlokasi di Desa	RT 01 RW 03 Desa Mojo Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
136.	Pembangunan talud yang berlokasi di Desa	RT 06 RW 01 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
137.	Pembangunan Jalan Desa	RT 04, 05 RW 03 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
138.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rt 007 Rw 001, desa kendaldoyong, kecamatan petarukan, Kab. Pemalang	100.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
139.	Pembangunan Jalan Desa	RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Gedeg (depan Balai Desa Gedeg), Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
140.	Sosialisasi implementasi Germas di masyarakat	Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
141.	Sosialisasi implementasi Germas di masyarakat	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
142.	Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
143.	Sosialisasi program imunisasi bayi dan baduta bagi kader kesehatan (peserta 25 orang)	Desa Belik. Kec. Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
144.	Sosialisasi program imunisasi bayi dan baduta bagi kader kesehatan (peserta 25 orang)	Kelurahan Paduraksa Kec. Pemalang , Kab. Pemalang	50.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
145.	Pelatihan IT	Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
146.	Pelatihan Penggunaan Media Online	Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
147.	Pelatihan IT	DPK KNPI Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
148.	Pelatihan Public speaking	Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
149.	Pelatihan Public speaking	Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
150.	Pelatihan Penggunaan Media Online	Desa Beluk kec. Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
151.	Pelatihan Public speaking	Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
152.	Pelatihan Penggunaan Media Online	Kec. Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
153.	Pelatihan IT	Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	50.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
154.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Desa Pedurungan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	40.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
155.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
156.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	40.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
157.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	40.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
158.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
159.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	
160.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Kec. Warungpring, Kab. Pemalang	40.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
161.	Pelatihan Kapasitas Koperasi Desa Merah Putih	Wilayah Kecamatan warungpring , Kab. Pemalang	35.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
162.	Pasar Murah	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
163.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Desa Sikasur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
164.	Pasar Murah	Desa sidorejo Kec. Comal, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
165.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM Se Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
166.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM Se Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
167.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	35.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
168.	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM	Desa belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	35.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
169.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Jl. Raya Moga Rt. 007 Rw. 009 Desa Moga Kec. Moga, Kab. Pemalang	40.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
170.	Pelatihan digital marketing bagi UMKM	Gedung MWC NU Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	35.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
171.	Pelatihan pengolahan sampah	Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
172.	Pelatihan pengolahan sampah	Desa Sikasur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
173.	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan)	Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
174.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten/Kota (Kendaraan Angkut Sampah roda 3)	Desa Pecangakan Kecamatan Comal, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	45.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
175.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten/Kota (Kendaraan Angkut Sampah roda 3)	Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	45.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
176.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten/Kota (Kendaraan Angkut Sampah roda 3)	Desa Beluk Kec. Belik, Kab. Pemalang	45.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
177.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten/Kota (Penyediaan Alat Pengolahan dan Pemilahan Sampah)	Perum Sewaka Indah, RT 04 RW 08 Desa Sewaka Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	70.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
178.	Pemeliharaan/rehabilitasi warisan budaya/makam leluhur yang berjasa di wilayah tersebut	Makam Jati Bungkus Dukuh Depokan RT 01 RW 04 Desa Kelangdepok, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
179.	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	30.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
180.	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Desa Mendelem Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
181.	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	30.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
182.	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	RT 11 RW 03 Desa Gapura, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
183.	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
184.	Kegiatan yang menunjang terciptanya regenerasi di bidang seni budaya	Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	30.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
185.	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Sanggar Seni Dan Drama Remaja "SANIDARCA" RT 42 RW 06 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
186.	Fasilitasi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	Desa Sodong Kec. Belik, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
187.	Pelatihan pengelolaan desa wisata	Desa Sodong Kec. Belik, Kab. Pemalang	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
188.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Desa Mendelem Wisata Sisogok Kec. Belik, Kab. Pemalang	70.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
189.	Pemeliharaan/rehabilitasi warisan budaya/makam leluhur yang berjasa di wilayah tersebut	Belik Krajan Barat RT. 007 RW. 001 Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
190.	Kegiatan yang menunjang terciptanya regenerasi di bidang seni budaya	Sanggar Seni dan Drama Remaja SANIDARCA , RT 42 RW 06, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	30.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
191.	Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Desa Sodong Kec. Belik, Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
192.	Pemeliharaan/rehabilitasi warisan budaya/makam leluhur yang berjasa di wilayah tersebut	Desa Mendelem Kec. Belik, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
193.	Pelatihan pengelolaan desa wisata	Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pariwisata Kabupaten/Kota	
194.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Desa Mejagong Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	70.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
195.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Desa Kecepit Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	70.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
196.	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	RW 10 Dukuh Tumanggal Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
197.	Pelatihan pengelolaan desa wisata	Balai Desa Asemdayong Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
198.	Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum	RT 02 RW 01 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	400.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	jalan Gunung gede ke jalan Agung Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.	Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum	RW 05 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	400.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
201.	Drainase jalan kabupaten	jalan Gurameh RT 01,02 RW 02 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Drainase Jalan Bromo RW 016 (RT 01,02,03 dan RT 05) Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	ruas jalan Jatirejo - Panjunan, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
204.	Drainase jalan kabupaten	Jalan Petarukan - Dk. Sikentung Kelurahan Petarukan Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205.	Senderan/ bronjong/ talud sungai	Rt.03.Rw.03.Des Kaliprau Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
206.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	jalan kabupaten ruas pulosari - siremeng Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
207.	Pemeliharaan Senderan/bronjong/ talud sungai	Rt 001 Rw 001 dan Rt 010 dan Rw 003 Desa Wonokromo, Kab. Pemalang	200.000.000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
208.	Senderan/ bronjong/ talud sungai	Sungai Waluh Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Cibuyur, Kab. Pemalang	200.000.000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
209.	Normalisasi sungai (rob)	Desa Jebed Utara Kec. Taman, Kab. Pemalang	152.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
210.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	Pemeliharaan jalan kabupaten batursari - gombang Pulosari, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
211.	Senderan/ bronjong/ talud sungai	Kali Putih Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	200.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
212.	Pemeliharaan Senderan/bronjong/ talud sungai	Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	200.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
213.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	Ruas Jalan Desa Kandang ke Desa Pesantren, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
214.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	Ruas Jalan kelurahan purwoharjo ke desa susukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
215.	Pemeliharaan/rekonstruksi jalan kabupaten	Jalan Sriti Rt 12 Rw 5 dusun Kamulyan Desa Danasari, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
216.	Pembangunan Jalan Desa	Jalan Tongkol Rt 1 Rw 2 Desa Lawangrejo Kec Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
217.	Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum	Desa Moga Kec. Moga, Kab. Pemalang	400.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
218.	Senderan jalan kabupaten	RW 02 Kelurahan Kebondalem Kec. Pemalang , Kab. Pemalang	200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
219.	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa	Kecamatan Moga dan Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	30.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
220.	Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	Desa Belik Kec. belik, Kab. Pemalang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
221.	Peningkatan kapasitas BPD	Desa belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	20.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
222.	Peningkatan kapasitas aparatur desa (Pelatihan penyusunan pengadaan barang dan jasa desa (1 desa)	Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
223.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
224.	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
225.	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa	Di Balai Desa Taman Kecamatan Taman Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
226.	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	TK Muslimat NU Siti Hajar desa Kuta Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	17.600.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
227.	Pembangunan Jogging Track Lapangan Desa	Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
228.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jln Lingkar selatan Dsn Gombong RT012 RW 003 Kec. warungpring, Kab. Pemalang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
229.	Penyelenggaraan event olahraga	Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	100.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
230.	Pelatihan SDM olahraga prestasi	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	52.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
231.	Pelatihan pengolahan kopi (pendidikan kesetaraan)	Desa Semaya Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	90.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
232.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Sidorejo Dk Kedawung Rt 003 Rw 006 Kec. Comal, Kab. Pemalang	100.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
233.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	RT 11 RW 11 Dusun Keboijo Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	50.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
234.	Pelatihan SDM olahraga prestasi	Lapangan Sepakbola Kelurahan Kebondalem, Kab. Pemalang	52.000.000	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
235.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
236.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Karanganyar Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
237.	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jalan Kulbanda RT 02 RW 07 No. 24 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	25.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
238.	Pelatihan pengembangan organisasi kepemudaan	Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
239.	Pelatihan pengembangan organisasi kepemudaan	Desa belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
240.	Pelatihan SDM olahraga prestasi	Wilayah Kec. Belik, Kab. Pemalang	52.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
241.	Penyelenggaraan event olahraga	Wilayah Kec. Belik , Kab. Pemalang	100.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
242.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Clebak RT 59 RW 06 Desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
243.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	RT 17 RW 05 Desa Beluk Kecamatan Belik , Kab. Pemalang	50.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
244.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jalan Jati Gang Lapangan RT 02 RW 02 Dusun Mangunsari Desa Tegalsari Barat Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
245.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jalan Ternate RT 03 RW 04 Desa Banjardawa Kec. Taman, Kab. Pemalang	50.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
246.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	KB. Sekar Wangi Desa Sokawangi Kec. Taman, Kab. Pemalang	30.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
247.	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jl samba RT 007 RW 001 Desa Muncang Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
248.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Balai Desa Taman Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
249.	Pelatihan pengembangan organisasi kepemudaan	Kantor Kecamatan Taman Pemalang, Kab. Pemalang	31.000.000	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
250.	Penyelenggaraan event olahraga	Gor Amalia Indah Tanjungsari Sugihwaras Pemalang, Kab. Pemalang	100.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
251.	Penyelenggaraan event olahraga	Gor Cristal RT. 01 RW. 06 Wanarejan Selatan Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	100.000.000	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
252.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Setapak RT 01, 02 RW 06 kelurahan Pelutan kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
253.	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	Drainase RT 01, 02 RW 06 Kelurahan Pelutan, kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
254.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 03 RW 10 kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
255.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	RT 02 RW 04 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
256.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	RT 01 RW 07 Perumahan widuri Graha Pesona, Kelurahan Widuri, kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
257.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	RT 03, 05 RW 011 (Gang Cempaka dan Gang Anyelir) Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
258.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 03, 05 RW 011 (jalan setapak gang Anyelir dan Gang Cempaka) kelurahan Pelutan kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
259.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 003, 004, 005 RW 013 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
260.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Kelurahan Petarukan gang garuda II Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
261.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 04 RW 05 Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan (Jl. Prajurit) kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
262.	Pembangunan LPJU di Wilayah Kabupaten Pemalang	RT 05 RW 03 Kelurahan Widuri, Kecamatan	100.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pemalang, Kab. Pemalang		di Jalan Kabupaten/Kota	Kawasan Permukiman
263.	RTLH (Peningkatan Kualitas/Rehabilitasi)	Herli Purnomo RT 02 RW 01 Dusun Krajan Desa Majalangu dan Sdr Kateng RT 05 RW 01 Desa Majalangu, Kab. Pemalang	50.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
264.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Jl Kutilang Rw 03 & 04 Sisi Selatan Dari Pertigaan Gang Paluan Ke Timur Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
265.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	KELURAHAN WIDURI RT 02 RW 05 KEC. PEMALANG, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
266.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Jalan Setapak RW 005 Kelurahan Widuri Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
267.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Jl Setapak RW 008 Kelurahan Widuri Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
268.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jl Cucak rowo Kel. Widuri Kec. Pemalang , Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
269.	RTLH (Peningkatan Kualitas/Rehabilitasi)	Rumah sdr Sri Amilatun RT 08 RW 02 dan sdr. Casmirah RT 08 RW 02 Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	50.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
270.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Jl Mujaher Rt 01-02-03 Kel. Widuri Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
271.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Ndalem Widuri Ke kali Beting Rw 008 Kel. Widuri Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
272.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 01-02 RW 008 Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
273.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo RT 001 RW 006 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
274.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Gang Kelurahan Bojongbata Rt 001 Rw 002 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
275.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 01-05 RW 010 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
276.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Rt 001-002-003 Rw 001 Kel. Sugihwaras, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
277.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	RT 005 RW 009 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
278.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jl Jati Raya Dan Jati II, RW 003 Kel. Pelutan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
279.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Perumahan Widuri Estate RT 01 RW 05 Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
280.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Gurameh Gang I (Satu) RT 001 RW 005 Kelurahan Sugihwaras , Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
281.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	RT 01 RW 07 kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
282.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	Jalan Sembilang RT 01 RW 05 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
283.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Kebondalem Jl citarum Utara Rt 006 Rw 009 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
284.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Kebondalem Gang Slamet Rt 03-04-05 Rw 01 Kec.	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pemalang, Kab. Pemalang			Kawasan Permukiman
285.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Dalem Mulyo Rt 001 Rw 001 kel. Kebondalem, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
286.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 01-02-04 RW 02 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
287.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Di lingkungan RW 007 Kel. Widuri Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
288.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong - Gorong	RT 003 RW 005 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
289.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Perum BTN Pepabri RW 014 Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
290.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Rt 01-02-03- Rw 04 Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
291.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Rt 05 Rw 05 Kel. Kebondalem Kec. pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
292.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Rt 03-04 Rw 11 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
293.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo RT 003 RW 013 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
294.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Jatisari 1 RT 05, 04, 03, 01 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
295.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Jatisari 2 RT 06, 04, 01 RW 13 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
296.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Jatisari 4 RT 10 RW 13 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
297.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Jatisari 5 RT 08, 09, 10 RW 13 Kelurahan	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana,	Dinas Perhubungan, Perumahan dan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang		dan Utilitas Umum di Perumahan	Kawasan Permukiman
298.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 02, 03 RW 07 Kauman Barat Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
299.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Tongkol RW 06 dan RW 07 Kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
300.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Udang RT 01 dan RT 02 RW 06 kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
301.	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	RT 02 RW 16 dukuh Krasak, kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
302.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan (Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum)	RT 02 RW 16 dukuh Krasak kelurahan Sugihwaras kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
303.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jl. Enggano RT 05 RW 17 Perum Bojongbata, Kel. Bojongbata Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
304.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Ternate RT 04 RW 24 Perum Puri Praja Kencana, Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
305.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	RT 01 RW 09 Kelurahan Kebondalem Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
306.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Sumatera I RW 23 Perum Puri Praja Kencana Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
307.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Sulawesi I RT 05 RW 10 Kel. Mulyoharjo & RT 004 RW 006 Kel. Bojongbata Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
308.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Ternate RT 06 RW 24 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kec.	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pemalang , Kab. Pemalang			
309.	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	Jl gang Garuda II Kel. Petraukan kec. Petarukan, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
310.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Gang Melati 2, Gang Sukun, Gang Kusuma 2, RT 005 RW 007 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	150.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
311.	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan	Jalan Kulbanda Gg Guntur Kelurahan Beji Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
312.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Blok Banjarsari desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	390.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
313.	Kambing Jawa Randu Betina Dewasa	Jl. Senopati Rt. 04/02 Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	77.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
314.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
315.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Blok 5 dukuh pagilaran Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
316.	Kambing PE Betina Dewasa	Kelompok Tani BOMAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	120.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
317.	Jalan produksi perikanan/jalan usaha perikanan	BKD Majakerta, Makadam Jalan Usaha Tani RT 05/03 Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
318.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Rt. 003 Rw.001 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
319.	Traktor Roda 2, Roda besi tapak lebar 120/150 mm	RT 001 RW 001 Desa Pepedan Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	73.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
320.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten	160.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pemalang, Kab. Pemalang			
321.	Kambing PE Betina Muda	Desa Karangtalok Rt 003 Rw 002 Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	420.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
322.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	RT 4 RW 4 dusun dawuhan Desa Botekan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
323.	Pemeliharaan Jalan Desa	RT 009 RW 001 Dsn Pesapen Desa Saradan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
324.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Jalan sabrang grugus tengah desa Purana, Kab. Pemalang	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
325.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Desa Purana Rt 9 Rw 2 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. , Kab. Pemalang	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
326.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Pabuaran kecamatan bantarbolang, Kab. Pemalang	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
327.	Domba Betina Dewasa	sahabat Tani Muda Farm, desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	134.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
328.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Jalan pertanian Blok 7 Rt 1 Rw 1 Desa Kandang Kec Comal, Kab. Pemalang	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
329.	Kambing Jawa Randu Jantan Dewasa	Desa Sewaka Kec Pemalang, Kab. Pemalang	90.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
330.	Kambing Jawa Randu Jantan Dewasa	Rt 3 Rw 2 Desa Pagenteran Kec Pulosari, Kab. Pemalang	90.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
331.	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Jalan Pertanian Rw 06 desa tegalsari barat ampelgading menuju ke desa pener taman, Kab. Pemalang	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
332.	Kambing Perah Jantan Dewasa	RT 05 RW 02 Dusun Tingkir Desa Nyamplungsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	83.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
333.	Kambing Jawa Randu Jantan Dewasa	Dusun Cemara III Rt. 04/Rw. 04 Desa Batusari Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	30.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
334.	Kambing Jawa Randu Jantan Dewasa	Rt 004 Rw 004 Desa Clekatakan Kec. Pulosari Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
335.	Kambing Jawa Randu Betina Muda	RT 11 RW 02 Dusun Kalilongkrang Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
336.	Kambing Jawa Randu Jantan Dewasa	Desa Pulosari dukuh krajan Rt. 07 Rw 02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang , Kab. Pemalang	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
337.	Kambing Jawa Randu Betina Muda	Dusun Petaunan desa Kebongede kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
338.	Kambing Perah Betina Muda	Kelompok Peternakan "FAMILY 5+" Sebelah Pintu Air Desa Sokawangi Kec. Taman, Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
339.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	RT 05 RW 03 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	26.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
340.	Pembangunan rumah ibadah	Desa Parunggalih, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
341.	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Madrasah Bahrul Ulum jln Sonokeling Rt.08/ Rw. 01 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
342.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Majlis Ta'lim Al Ittihad Jl. Melon Rt. 02/ Rw. 03 Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
343.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Jl. Raya Sirayak Desa Cibelok Kecamatan Taman , Kab. Pemalang	91.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
344.	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	TPQ Nurusy Syifa Pedurungan Tengah Desa Pedurungan Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	60.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
345.	Pembangunan rumah ibadah	RT 03 RW 04 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
346.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	RT 01 RW 02 Desa Mojo Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang	35.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
347.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Musholla Baitul Muttaqin Desa Pedurungan Barat Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	45.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
348.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Desa Wonokromo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
349.	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan dasar (RA/MI/MTS)	MTs Daarussalaam, Jalan Lingkar Selatan Masjid Nurul Huda RT 006 RW 002 Dusun Kuta Lor, Desa Kuta Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
350.	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan dasar (RA/MI/MTS)	Yayasan LP Ma"arif Nahdlatul Ulama Ulujami, MTs Walisongo Ulujami, Jalan Desa Ambowetan, Ulujami, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
351.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Rehab Masjid Nurul Yaqin. RT 03.RW 08.Deso Blendung Kec Ulujami. , Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
352.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Madin Mardzotillah.Rt 03.Rw.05.Deso sukorejo. Kec. Ulujami., Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
353.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Musholla Al amin Rt 02.Rw 03. Desa Rowosari Kec.ulujami. , Kab. Pemalang	35.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
354.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Jl. Raya Moga Pulosari KM 1 Desa Sima Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	60.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
355.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Desa Sima Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
356.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Masjid Baitul Muslimin Desa Banyumudal Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
357.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	MDT Bustanun Nasyiin Desa Kebanggan Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	40.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
358.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	PR NU Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
359.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Desa Karangtalok Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
360.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Dusun Jetis Rt.005 Rw.001 Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
361.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
362.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Jalan Melati RT 002 RW 003 Desa Moga Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
363.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Desa Jatirejo Rt.004 Rw.007 Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
364.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	RT 018 RW 004 Karangpoh Desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	60.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
365.	Rehabilitasi/pemeliharaan n rumah ibadah	RT 010 RW 003 Dusun Barong Desa Simpur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	45.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
366.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	RT 001 RW 005 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	31.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
367.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	RT 12 RW 05 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
368.	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan dasar (RA/MI/MTS)	MTs Ma'hadul Muta'allimin Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
369.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	PAC Fatayat NU Kecamatan Ulujami Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
370.	Rehabilitasi/pemeliharaan n rumah ibadah	Musholla Baiturrohman RT 3 RW 3 Desa Sidorejo Kec. Comal , Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
371.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	TPQ Al-Munawaroh RT 01 RW 06 Desa Sidorejo Kec. Comal, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
372.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	PAC Muslimat NU Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo Kec. Comal, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
373.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Jl cemara gang V Rt 004 Rw 002 Dk Kendalduwur Desa Sidorejo Kec. Comal, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
374.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	RT. 03 RW. 09 Perumahan PIR Desa Kaligelang Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
375.	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Dk. Sawangan RT.20 RW.07 Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
376.	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan (NU dan Banomnya, Muhammadiyah dan Banom serta amal usaha. Dll)	Jl. raya Belik-Moga KM.01 Desa Belik Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
377.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dusun Sumurgesing RT 002 RW 012 Desa Jebed Utara Kec. Taman, Kab. Pemalang	17.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
378.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Desa Cibelok Rt 002 Rw 006 Kec. Taman, Kab. Pemalang	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
379.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	TPQ Uswatun Khasanah rt 04 rw 04 Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
380.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	TPQ Muslimatul Karimah Desa Sidokare Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	70.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
381.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	RT 003 RW 002 Desa babakan Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
382.	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	RT 015 RW 004 Desa Pasir Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
383.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Rt 8 Rw 3 Desa Loning Kec Petarukan, Kab. Pemalang	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
384.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Rt 7 Rw 3 Desa Loning Kec Petarukan, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
385.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dusun Batan RT 003 RW 004 Desa Jebed Utara, Kec.Taman, Kab. Pemalang	11.450.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
386.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dusun Barong RT 05 RW 03 Desa Simpur Kec. Belik, Kab. Pemalang	75.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
387.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dk.temu RT.009 RW.002 Desa Wangkelang Kec. Moga, Kab. Pemalang	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
388.	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Dusun Krajan Rt, 03 Rw 02 Desa Pulosari Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
389.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	RT 02 RW 01 Desa Gendoang Kec. Moga, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
390.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dusun Blendung RT 02 RW 02 Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
391.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Dusun Pesuruhan RT 27 RW 04 Desa Karangsari Kec. Pulosari , Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
392.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Jalan Tidar RT 2 RW 15 Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
393.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Jalan Ternate II RT 01 RW 24 Perum Puri Praja Kencana Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang , Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
394.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	Desa Banjaran Rt 01 Rw 04 Kec. Taman, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
395.	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah	RT. 2 RW. 4 Dusun Lawang Desa Sikayu Kec. Comal, Kab. Pemalang	35.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
396.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Musholla Al-Ikhlash Dusun Jurang Jero RT. 01 Rw.04 Desa Badak Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Usulan	Alamat	Anggaran	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
397.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	TPQ Mathla'ul Anwar Jl. Raya Simpur - Sikasur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
398.	Pembangunan rumah ibadah	Dukuh kaliletak Desa Pasir RT 007 RW 002 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	36.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
399.	Pembangunan rumah ibadah	Jl Parunggalih RT 003 RW 002 Desa Parunggalih Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	45.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
400.	Rehabilitasi/pemeliharaa n rumah ibadah	Dkh Langgar RT 006 RW 003 Desa Kesesirejo Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	45.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
401.	Rehabilitasi/Pemeliharaa n gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Desa Longkeyang RT 012 RW 003 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
402.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	aman Pendidikan Al Quran (TPQ) Al Fatah Dk. Beber Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
403.	Rehabilitasi/pemeliharaa n rumah ibadah	Dk. Karangpoh RT.16 RW.04 Desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
404.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Taman Pendidikan Al Qur'an Nurul Khasanah Desa Bongan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
405.	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah	Musholla Al-Hidayah RT 2 RW 1 Desa Jraganan Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
406.	Rehabilitasi/Pemeliharaa n gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Dusun Jaidan RT 001 RW 006 Desa Kesesirejo Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
407.	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasah, Ponpes dll)	Desa Karangtalok Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	40.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
408.	Rehabilitasi/Pemeliharaa n gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majelis Taklim,Madrasa, Ponpes dll)	JL Lumba-Lumba No 98 Kelurahan Sugihwaras Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.5.5 Dukungan Sasaran dan Prioritas Daerah

4.5.1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

pemerintah daerah dalam menjamin layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai SPM diatur dalam regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, terdapat enam jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Implementasi SPM di Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi **“PEMALANG BERCAHAYA”** melalui Misi **"Peduli"** yaitu meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Upaya pemenuhan SPM ini, yang merupakan salah satu isu strategis daerah, diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar secara holistik, mencakup aspek jenis dan mutu pelayanan, guna memastikan setiap warga memperoleh hak pelayanan yang layak sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada bidang Pendidikan, pemenuhan SPM diarahkan untuk mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini (PAUD) guna meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

Pada bidang Kesehatan, pemenuhan SPM juga mendukung sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tuberkulosis (TBC), dan kelompok berisiko HIV. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan SPM mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif. Implementasinya dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan pengelolaan air limbah domestik guna mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pemenuhan SPM dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman yang mendukung prioritas pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif. Program ini diarahkan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program pemerintah.

Pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pemenuhan SPM mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan melalui prioritas penguatan penanggulangan bencana. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penanggulangan Bencana. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran, serta penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sementara itu, pada bidang Sosial, pemenuhan SPM mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui prioritas akselerasi penanggulangan kemiskinan. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Program-program tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta perlindungan sosial bagi korban bencana dan masyarakat rentan lainnya sesuai standar pelayanan minimal.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara sasaran daerah, prioritas pembangunan daerah, dan program RKPD Tahun 2027 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal secara terintegrasi melalui penguatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial guna

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2027

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Anggaran (Rp)
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	227.994.197.000,00
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.561.833.270,00
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan				

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Anggaran (Rp)
		balita	kesehatan balita sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar				
		Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara dengan				

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Anggaran (Rp)
		orang dengan resiko terinfeksi HIV	resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif;	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	415.000.000,00
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.000.000,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.220.000.000,00
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni				
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penguatan penanggulangan bencana	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana	559.399.600,00
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat				1.345.000.000,00

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Anggaran (Rp)
			dari penegakan hukum Perda dan perkada				
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Akselerasi penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	22.530.800,00
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			Program Rehabilitasi Sosial	353.500.300,00
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			Program Perlindungan dan Sosial	201.490.100,00
		Rehabilitasi	Jumlah warga				

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Anggaran (Rp)
		sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			Program Penanganan Bencana	230.000.000,00

4.5.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pemalang menjadikan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu isu strategis dan prioritas pembangunan daerah (P7) tahun 2027. Upaya ini dilaksanakan guna mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 12,20-11,82% pada tahun 2027.

Strategi penanganan difokuskan pada pendekatan yang terpadu dan terarah, yang meliputi optimalisasi jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menyasar faktor-faktor utama penyebab kemiskinan, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun akses terhadap layanan dasar, untuk memastikan intervensi pemerintah semakin tepat sasaran dan efektif.

Program dan kegiatan pendukung percepatan penghapusan kemiskinan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Pelaksanaan program dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bidang pendidikan, dukungan percepatan penghapusan kemiskinan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Program ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi risiko putus sekolah pada masyarakat miskin sehingga mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Pada bidang kesehatan, percepatan penghapusan kemiskinan didukung melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Pada bidang pekerjaan umum dan permukiman, dukungan dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, serta Program Kawasan Permukiman. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat miskin.

Dalam bidang sosial, percepatan penghapusan kemiskinan didukung melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, serta Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Program-program tersebut diarahkan untuk memberikan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak risiko sosial dan bencana.

Selain itu, dukungan percepatan penghapusan kemiskinan juga dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan integrasi data kemiskinan melalui Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data masyarakat miskin sebagai dasar penetapan sasaran program dan bantuan sosial agar intervensi penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan pendukung percepatan penghapusan kemiskinan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan perlindungan sosial guna mewujudkan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Adapun program dan kegiatan pendukung percepatan penghapusan kemiskinan disajikan pada berikut.

Tabel 4.16.
Program Kegiatan Pendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
1	Pengelolaan Pendidikan	228.455.606.500,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Toilet Siswa, Toilet Guru, Ruang Guru, UKS/Lab TIK, Pagar Sekolah, Ruang Inklusi dan Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Prasarana dan utilitas sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dindikpora
				1. Melakukan cek data Satuan Pendidikan calon penerima BOS 2. Melakukan Bimtek penyusunan ARKAS kepada semua lembaga terkait penyusunan RKAS, Penatausahaan, dan Pelaporan 3. Melakukan pemantauan progres penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan pada tiap Tahap (2 Tahap/Tahun) 4. Melakukan monev pengelolaan BOS pada Satuan Pendidikan pada semester 1 dan 2 5. Melaporkan realisasi penggunaan BOS ke BPKAD Kabupaten	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk Sekolah Dasar	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Rehabilitasi Toilet Siswa, Toilet Guru, Ruang Guru, UKS/Lab TIK, Pagar Sekolah, Ruang Inklusi dan Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Kegiatan Asesmen Nasional (AN), Kegiatan PPDB	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Untuk Sekolah Dasar	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Pemberian Seragam siswa SD	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Melaksanakan survey lokasi 2. Melaksanakan perencanaan pekerjaan 3. Melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan 4. Melaksanakan Proses tender dan penunjukan langsung pekerjaan 5. Proses pelaksanaan progres fisik pekerjaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
				6. Dindikbud melaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% 7. Melaksanakan serah terima atas hasil pekerjaan		
				1. Melaksanakan survey lokasi 2. Melaksanakan perencanaan pekerjaan 3. Melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan 4. Melaksanakan Proses tender dan penunjukan langsung pekerjaan 5. Proses pelaksanaan progres fisik pekerjaan Dindikbud 6. melaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% 7. Melaksanakan serah terima atas hasil pekerjaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Pemberian Seragam untuk siswa SMP Negeri dan Swasta serta pemberian bantuan personil utk sisa SMP Swasta	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				1. Melakukan cek data Satuan Pendidikan calon penerima BOS 2. Melakukan Bimtek penyusunan ARKAS kepada semua lembaga terkait penyusunan RKAS, Penatausahaan, dan Pelaporan 3. Melakukan pemantauan progres penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan pada tiap Tahap (2 Tahap/Tahun) 4. Melakukan monev pengelolaan BOS pada Satuan Pendidikan pada semester 1 dan 2 5. Melaporkan realisasi penggunaan BOS ke BPKAD Kabupaten	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Kegiatan Asesmen Nasional (AN), Kegiatan PPDB	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Melakukan cek data lembaga calon penerima BOP PAUD, 2. Melakukan Bimtek penyusunan ARKAS kepada semua lembaga	Mengurangi Beban Pengeluaran	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
				terkait penyusunan RKAS, Penatausahaan, dan Pelaporan 3. Melakukan pemantauan progres penyaluran BOP PAUD ke Satuan Pendidikan pada tiap Tahap (2 Tahap/Tahun) 4. Melakukan monev BOP PAUD pada Satuan Pendidikan pada semester 1 dan 2 5. Melaporkan realisasi penggunaan BOP PAUD ke BPKAD Kabupaten		
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Melakukan cek data lembaga calon penerima BOP Kesetaraan, 2. Melakukan Bimtek penyusunan ARKAS kepada semua lembaga terkait penyusunan RKAS, Penatausahaan, dan Pelaporan 3. Melakukan pemantauan progres penyaluran BOP Kesetaraan ke lembaga pada tiap Tahap (2 Tahap/Tahun) 4. Melakukan monev BOP Kesetaraan pada lembaga pada semester 1 dan 2 5. Melaporkan realisasi penggunaan BOP Kesetaraan ke BPKAD Kabupaten	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				1. Melakukan cek keaktifan lembaga (PKBM) 2. Melakukan rekonfirmasi kegiatan ATS 3. Melakukan pendampingan Akreditasi, ANBK pada lembaga 4. Melaksanakan kegiatan hasil Musrenbang	Mengurangi Beban Pengeluaran	
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.616.273.270,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan sosialisasi terhadap kader yang menangani pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinkes
				Pembinaan dan sosialisasi terhadap kader yang menangani pelayanan kesehatan Ibu bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pembinaan dan sosialisasi terhadap kader yang menangani pelayanan kesehatan Bayi Baru lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pembinaan dan sosialisasi terhadap kader yang menangani	Mengurangi Beban Pengeluaran	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
				pelayanan kesehatan Balita		
				Pemeriksaan Kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan pada usia lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan pada penderita DM	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Penanganan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan terhadap orang terduga TB	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan terhadap orang dengan resiko HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemberian Makanan Tambahan bagi masyarakat kurang Gizi	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait kesehatan lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan terhadap Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemberian Bantuan Iuran BPJS terhadap Masyarakat Miskin	Mengurangi Beban Pengeluaran	
3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	996.520.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Daerah Irigasi, Senderan saluran air/kali, Konsultan Pengawas, Survey ePaksi	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	DPUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan/ Swakelola irigasi	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
4	Perumahan Kawasan Permukiman	1.120.000.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Memperbaiki rumah tidak layak huni beserta PSUnya agar menjadi rumah sehat layak huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	DPPKP
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.685.000.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Merencanakan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
6	Penanggulan gan Bencana	1.348.000.60000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi PB, Sosialisasi SPAB, TMMD, Penyebaran Media Cetak Sosialisasi PB	Mengurangi Beban Pengeluaran	BPBD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana alam	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemberian bantuan logistik bagi korban bencana alam	Mengurangi Beban Pengeluaran	
7	Pemberdayaa n Sosial	22.530.800,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rakor/Bimbingan dan Evaluasi SDM PKH	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos KBPP
				Rakor Karang Taruna, Rakor LKKS, Rakor Puskesmas, Penguatan Kelembagaan LKS	Mengurangi Beban Pengeluaran	
8	Rehabilitasi Sosial	362.100.300,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persediaan Permakanan Di Rumah Singgah	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Persediaan Sandang PPKS di rumah singgah	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pelayanan Dasar berupa Fasilitas Reunifikasi Keluarga PPKS	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemberian dukungan dan Arahan berupa Pelatihan dan Bantuan Sosial bagi PPKS yaitu bansos permakanan bagi Lansia 140 orang, Penyandang Disabilitas sebanyak 140 orang, LKS sebanyak 440 orang selama 2 bulan @750.000,-, Bansos Cacat Permanen @2.500.000 sebanyak 182 orang, Bansos Stunting sebanyak 560 anak sebanyak 12 dus dan Ibu Hamil KEK sebanyak 75 orang sebanyak 8 dus,- Bansos Usaha	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Fasilitas Pelayanan Dasar untuk Pelatihan dan Ketrampilan bagi PPKS	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Respon Kasus warga terkait adanya PPKS yang berada di jalanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Respon Kasus warga terkait adanya PPKS dalam kondisi darurat	Mengurangi Beban Pengeluaran	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia	Fasilitasi Rujukan dan Pendampingan ke Panti Pelayanan Sosial sesuai kebutuhan PPKS	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Persediaan Peralatan Kesehatan bagi PPKS di rumah Singgah	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Kegiatan Bimbingan Sosial bagi PPKS	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pemberian dukungan dan Arahan berupa Pelatihan dan Bantuan Sosial bagi Yatim Piatu 56 anak @ 750.000,- dan Beras untuk Falir Miskin	Mengurangi Beban Pengeluaran	
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	201.490.100,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Asesmen/Pendamping an terhadap Anak Terlantar, Pelayanan Sosial bagi Anak Putus Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Rujukan Anak Terlantar ke Balai Balai atau Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Santunan kepada Anak Yatim Piatu/ Anak Terlantar (PKK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rakor Pendataan Verval DTKS, Rakor Persiapan dan Evaluasi Verval KPM PKH	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Monitoring dan Evaluasi Verval DTKS, Operasional Entry Data	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Bantuan Sosial bagi PMKS @Rp.1.110.000,-	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Monitoring dan Evaluasi KUBE	Meningkatkan Pendapatan	
10	Penanganan Bencana	230.000.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bantuan logistik paket permakanan bagi korban bencana (mie instan, sarden, minyak, biskuit, dll)	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Bantuan logistik paket sandang bagi korban bencana (daster, handuk, sarung, kaos/baju, dll)	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Pendampingan operasional relawan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Rakor, monitoring dan evaluasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Rakor, motivasi, monitoring dan evaluasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	
11	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	804.220.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	DTKPT
				Melakukan pembinaan kepada LPKS, Sosialisasi kepada LPKS	Meningkatkan Pendapatan	
12	Penempatan Tenaga Kerja	1.017.080.000,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Mempertemukan pencari kerja dan perusahaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran	Meningkatkan Pendapatan	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas	Meningkatkan Pendapatan	
				Melaksanakan Pelatihan berbasis Wirausaha bagi	Meningkatkan Pendapatan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
				masyarakat miskin dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur		
13	Pembanguna n Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberangkatan transmigrasi	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
14	Hubungan Industrial	250.000.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
15	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Distanparik
16	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638.000.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan beras untuk daerah terdampak bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	pengembangan desa B2SA	Meningkatkan Pendapatan	
17	Penanganan Kerawanan Pangan	55.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Kegiatan FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan), NBM, PPH dan PoU)	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Intervensi masyarakat miskin/kurang mampu (bantuan subsidi beras gula minyak)	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.112.020.400, 00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan alat mesin pertanian	Meningkatkan Pendapatan	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
19	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian	309.502.600,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan OPT dan pengadaan pupuk dan obat - obatan lainnya	Meningkatkan Pendapatan	
20	Penyuluhan Pertanian	24.350.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan untuk meningkatkan SDM petani	Meningkatkan Pendapatan	
21	Pendaftaran Penduduk	954.000.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Blangko KIA	Mengurangi Beban Pengeluaran	
22	Pencatatan Sipil	19.500.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput Bola adminduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdukcapil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
23	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an	341.900.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan data kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pengguna/ OPD	Mengurangi Beban Pengeluaran	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Aplikasi lakone dan jaringan SIAK	Mengurangi Beban Pengeluaran	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
			Administrasi Kependudukan			
24	Pengelolaan Profil Kependudukan	5.600.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Pelayanan akta kelahiran dan kematian	Mengurangi Beban Pengeluaran	
				Buku Profil Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
25	Penataan Desa	361.850.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan TMMD & verifikasi berkas pencairan/LPJ BKKD	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinpermasdes
26	Peningkatan Kerjasama Antar Desa	92.150.000,00	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
27	Administrasi Pemerintahan Desa	3.202.865.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kades Rp 140.000,-, Sekdes Rp 104.000,- & Perangkat Rp 80.000,-	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes, musrenbangdes, pelaksanaan RKP Desa dan lain lain terkait perencanaan pembangunan desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi DD/ADD serta Fasilitasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan di desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				fasilitasi kepada desa dalam rangka pengelolaan aset desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
28	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	945.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat, RT-RW, Posyandu dan LPMD	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Terfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	
29	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	36.030.123.800,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial kepada masyarakat pengemudi sektor transportasi angkutan umum	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	DPPKP
30	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.629.025.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	peningkatan kapasitas usaha	Meningkatkan Pendapatan	Distanparik
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas SDM berorientasi produksi dan berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
31	Pengelolaan Perikanan Budidaya	794.545.000,00	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	peningkatan kapasitas SDM berorientasi produksi dan berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan	
				monev kapasitas usaha	Meningkatkan Pendapatan	
				pengelolaan usaha budidaya	Meningkatkan Pendapatan	
				intensifikasi usaha budidaya untuk produksi dan berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan untuk pengadaan barang/jasa	Meningkatkan Pendapatan	
				persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan untuk pengadaan barang/jasa	Meningkatkan Pendapatan	
				pendataan, pelaksanaan pelaporan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
32	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.780.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	intensifikasi usaha pengolahan	Meningkatkan Pendapatan	
				intensifikasi usaha pengolahan dan pemasaran	Meningkatkan Pendapatan	
33	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	470.753.200,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan , Monitoring dan Evaluasi penerimaan bantuan kepada masyarakat miskin	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Semua Kecamatan
				Verifikasi dan validasi data kemiskinan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di 13 desa se Kecamatan Belik	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				1. Fasilitasi dan Monitoring Penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa di masing-masing desa; 2. Fasilitasi dan Monitoring Penyaluran bantuan RTLH pada KPM yang berhak menerima	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan , Monitoring dan Evaluasi penerimaan bantuan kepada masyarakat miskin	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Melaksanakan kegiatan 1. Sosialisasi pembinaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
				terhadap lingkungan di Desa se Kecamatan Randudongkal		
				2. Fasilitasi penyusunan pelaporan administrasi desa sesuai dengan Aplikasi Siskeudes tiap bulan dan evaluasi tiap semester		
				3. Sosialisasi dan pembinaan tanggap bencana		
				Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan , Monitoring dan Evaluasi penerimaan bantuan kepada masyarakat miskin	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Rapat Koordinasi Desa dan Kelurahan se Kecamatan Taman/ Monev Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Rapat Koordinasi Desa dan Kelurahan se Kecamatan Taman/ Monev Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan , Monitoring dan Evaluasi penerimaan bantuan kepada masyarakat miskin	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
				Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
34	Program Pembinaan Perpustakaa n	783.894.200,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pelatihan Pascabaca Babu Unik (Baca buku untuk implementasi kreatif)	Meningkatkan Pendapatan	Dinperpuska
				Kegiatan berupa Pelatihan maupun bantuan yang bertujuan sebagai upaya Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pendapatan	
35	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.500.000,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Disparbud
36	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	236.633.720,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kegiatan berupa Pelatihan maupun bantuan terhadap Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing	Meningkatkan Pendapatan	Dindikpora
37	Program Pengembangan UMKM	446.300.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM	Meningkatkan Pendapatan	Diskumdag

No	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Aktifitas	Tagging	PD
38	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	468.439.400,00	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Kegiatan Pasar murah menjelang hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Inflasi Daerah		

Tabel 4.17.
 Program Kegiatan dan aktivitas Pendukung Percepatan Penanganan Stunting

No	Program	Kegiatan	Aktifitas	Tagging
1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Spesifik
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Spesifik
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Spesifik
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Spesifik
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Spesifik
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Intervensi Spesifik
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Intervensi Spesifik
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga dan pengawasan serta tindak lanjut	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Intervensi Sensitif

No	Program	Kegiatan	Aktifitas	Tagging
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Intervensi Sensitif
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
10	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/ kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Intervensi Sensitif
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Intervensi Sensitif
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga	Intervensi Spesifik
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi Pelatihan Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	Intervensi Spesifik
14	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Intervensi Sensitif
15	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Intervensi Sensitif

Tabel 4.18.
Program Kegiatan dan aktivitas Pendukung Penanganan TBC, AIDS, Malaria

No	Program	Kegiatan	Aktifitas	Tagging
1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	TBC
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (OD HIV)	Aids

No	Program	Kegiatan	Aktifitas	Tagging
		Daerah Kabupaten/Kota		
3.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Malaria
4.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	TBC, HIV, Malaria

4.5.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah Tahun 2027 agar selaras dengan Program Prioritas Nasional.

Penyelarasan ini dilakukan dengan mengacu pada **RPJMN Tahun 2025-2029** dan **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027**. Sinkronisasi tersebut diwujudkan melalui harmonisasi sasaran, program, kegiatan, dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten dapat memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional. Melalui keterpaduan perencanaan ini, diharapkan tercipta peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Adapun dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut;;

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 4.19.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
2	Penguatan komunikasi publik dan media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
3	Penguatan lembaga	Program Peningkatan	Kesatuan Bangsa dan	BAKESBANGPOL

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
	demokrasi	Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Politik	
4	Penguatan lembaga demokrasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
5	Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	DINSOSKBPPA
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sosial	DINSOSKBPPA
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	DINSOSKBPPA
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosial	DINSOSKBPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Sosial	DINSOSKBPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	Sosial	DINSOSKBPPA

2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 4.20.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Pembangunan postur pertahanan	-	-	-
2	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	-	-	-
3	Komponen cadangan dan komponen pendukung	-	-	-
4	Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri	-	-	-
5	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Persandian	DISKOMINFO

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
6	Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi	-	-	-
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
8	Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian	-	-	-
9	Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	-	-	-
10	Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	DISTANPARIK
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DISTANPARIK
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	DISTANPARIK
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian	DISTANPARIK
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian	DISTANPARIK
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian	DISTANPARIK
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Urusan Pangan	DISTANPARIK
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Urusan Pangan	DISTANPARIK
11	Swasembada Energi	-	-	-
12	Swasembada Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
13	Penguatan Ekonomi Syariah	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Perdagangan	DISKUMDAG
14	Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Urusan Perdagangan	DISKOMINFO
15	Ekosistem Ekonomi Sirkular	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		DLH
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
16	Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
17	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
18	Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
19	Pembangunan rendah karbon	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
20	Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	DTKPT
		Program Hubungan Industrial	Urusan Tenaga Kerja	DTKPT
21	Pengelolaan Hutan Lestari	-	-	-
22	Pengembangan Ekonomi Baru	-	-	-

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Tabel 4.21.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Konektivitas dan Pelayanan Multimoda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Perhubungan	DPPKP
		Program Penyelenggaraan	Urusan	DPPKP

		Jalan	Perhubungan	
2	Peningkatan konektivitas digital dan transmisi energi listrik	Program Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
3	Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKUMDAG
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKUMDAG
4	Pendalaman sektor keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Keuangan	BPKPAD
5	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata	DISPARBUD
6	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	-	-	-

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Tabel 4.22.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA
3	Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA
4	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan			
6	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technologi, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA
7	Penguatan pendidikan dan	Program Pengelolaan	Urusan Pendidikan	DINDIKPORA

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
	pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Pendidikan		
8	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptek) dalam pembangunan nasional	Program penelitian dan pengembangan	Urusan Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA
9	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional			
10	Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi			
11	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
12	Pemberian makan gratis	-	-	-
13	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
14	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Urusan Kesehatan	DINKES
15	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
16	Peningkatan ketangguhan keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Kesehatan	DINKES
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINSOS KBPP
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINSOS KBPP
		Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINSOS KBPP
17	Peningkatan kualitas perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOS KBPP
18	Peningkatan kualitas pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOS KBPP
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOS KBPP
19	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	DINSOS KBPP
20	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Urusan Kepemudaan dan	DINDIKPORA

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
		Keolahragaan	Olahraga	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
21	Pengembangan kebudayaan olahraga yang inklusif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA

5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Tabel 4.23.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Urusan Perdagangan	DTKPT
2	Aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus prioritas	Program Hubungan Industrial	Urusan Perdagangan	DTKPT
		Program penataan bangunan gedung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
3	Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	DTKPT
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	DTKPT
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Urusan komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Perhubungan	DPPKP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Urusan DPUTR	DPUTR
4	Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPPTSP

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPTSP
5	Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Perdagangan	DISKUMDAG
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Urusan Perdagangan	DISKUMDAG
6	Optimalisasi investasi strategis negara	-	-	-

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah

Tabel 4.24.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Urusan Statistik	DISKOMINFO
2	Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial	DINSOS KBPP
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	DINSOS KBPP
		Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial	DINSOS KBPP
3	Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif			
4	Pembangunan perkotaan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
5	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-	-
6	Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmentasi yang perlu dilayani, serta target khusus antara lain untuk generasi milenial dan generasi Z dan masyarakat miskin dan rentan	Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKKP

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
7	Peningkatan kemandirian perdesaan	Program Penataan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMASDES
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMASDES
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMASDES

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Tabel 4.25.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027
Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Reformasi politik dan tata kelola pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Urusan Kesatuan bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
2	Reformasi hukum	-	-	-
3	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Urusan Kesatuan bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT
4	Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum	-	-	-
5	Transformasi sistem penuntutan dan <i>advocaat generaal</i>	-	-	-
6	Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	-	-	-
7	Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Urusan Kepegawaian	BKPSDM
8	Pemerintah digital	Program Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi	DISKOMINFO
		Program Pengelolaan Arsip	Urusan Kearsipan	DINPERPUSKA
7	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPSTP
8	Penataan desentralisasi	-	-	-

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
	dan otonomi daerah			
9	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara	Program Perekonomian Dan Pembangunan		SETDA
10	Optimalisasi pendapatan negara	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan Keuangan	BPKPAD
11	Optimalisasi belanja negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Keuangan	BPKPAD
12	Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Program Perekonomian Dan Pembangunan		SETDA
13	Pengendalian inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Urusan Perdagangan	DISKUMDAG
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Urusan Perdagangan	DISKUMDAG
14	Perlindungan Warga Negara Indonesia	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Urusan Kesatuan bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL

8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tabel 4.26.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Terhadap Prioritas Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
1	Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
2	Pelestarian dan pemajuan	Program Pengembangan	Urusan Kebudayaan	DISPARBUD

No	Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang mendukung PN	Bidang	Perangkat Daerah
	kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	Kebudayaan		
3		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
4	Pembangunan berketahanan iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
4	Pengelolaan resiko bencana yang efisien dan tepat guna	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Program Penanganan Bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD

4.5.4. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun terhadap Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Pemalang sepenuhnya mendukung 8 (delapan) Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan serta dukungan pendanaannya. Dukungan program dan alokasi anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung tema RKP Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Dukungan program dan alokasi anggaran dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 disajikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.27.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap
Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

SUB TEMA, FOKUS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	ANGGARAN (RP)	PD
A. PRODUKTIVITAS			
1. Kualitas SDM Tenaga Kerja Produktif	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	480.000.000,00	DTKPT
	Penempatan Tenaga Kerja	755.080.850,00	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	98.500.000,00	Disparbud
2. Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	480.000.000,00	DTKPT
	Penempatan Tenaga Kerja	755.080.850,00	
	Pengembangan UMKM	446.300.000,00	Diskumdag
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	643.700.000,00	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638.000.000,00	Distanparik
	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50.000.000,00	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	201.490.100,00	Dinsos KBPP
	Pemberdayaan Sosial	22.530.800,00	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.120.000.000,00	DPPKP
3. Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.775.000.000,00	Diskominfo
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	361.300.000,00	
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	150.000.000,00	Bapperida
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	355.274.400,00	
	Pengelolaan Keuangan	435.961.077.300,00	BPKPAD

SUB TEMA, FOKUS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	ANGGARAN (RP)	PD
	Daerah		
	Kepegawaian Daerah	1.336.064.949,00	BPKPSDM
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	337.690.370,00	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.020.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
4. Regulasi dan Kelembagaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.700.000,00	SETDA
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	150.000.000,00	BAPPERIDA
B. INVESTASI			
1. Efisiensi dan Efektivitas Investasi	Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	4.890.000,00	DPMPTSP
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.445.600,00	Diskumdag
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	81.210.000,00	DPMPTSP
	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000,00	Diskumdag
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	951.115.000,00	Diskumdag
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	568.439.400,00	Diskumdag
	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000,00	DPMPTSP
2. Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Penyelenggaraan Jalan	47.109.893.550,00	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	36.130.123.800,00	DPPKP
3. Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Pengelolaan Keuangan Daerah	435.961.077.300,00	BPKPAD
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	140.000.000,00	BAPPERIDA
4. Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor	Pengembangan Ekspor	35.000.000,00	DISKUMDAG
	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.445.600,00	DISKUMDAG
	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	197.300.000,00	DTPKPT

SUB TEMA, FOKUS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	ANGGARAN (RP)	PD
	Pengendalian Izin Usaha Industri	18.500.000,00	DTPKPT
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	42.500.000,00	DTPKPT
	Promosi Penanaman Modal	130.510.000,00	DPMPTSP
	Pelayanan Penanaman Modal	75.000.000,00	DPMPTSP
C. INDUSTRI			
1. Industri Nasional	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	197.300.000,00	DTKPT
	Pengendalian Izin Usaha Industri	18.500.000,00	DTKPT
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	DTKPT
2. Hilirisasi SDA strategis	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	50.000.000,00	Distanparik
3. Swasembada Pangan, Energi dan Air	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638.000.000,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.629.025.000,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	794.545.000,00	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	191.220.000,00	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	996.520.000,00	DPUPR

4.5.5. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Strategis Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta kebutuhan riil pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah disusun selaras dengan Program/Kegiatan Strategis Nasional sebagai bentuk

implementasi prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan berbasis hasil.

Sinkronisasi antara prioritas nasional dan prioritas daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, sekaligus menjawab berbagai permasalahan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kabupaten Pemalang masih menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah penduduk miskin, kerentanan sosial ekonomi masyarakat, serta kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027 diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan perluasan akses pelayanan dasar.

Dukungan terhadap agenda nasional tersebut diwujudkan melalui program pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal guna meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin. Di bidang kesehatan dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan masyarakat, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pada aspek perlindungan sosial dilaksanakan melalui pengelolaan data fakir miskin, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan korban bencana, serta pemberdayaan sosial masyarakat rentan. Pada aspek ekonomi dilakukan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, pengembangan UMKM, pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan peningkatan kesempatan kerja.

Dukungan terhadap program nasional seperti Sekolah Rakyat dan pembangunan rumah layak huni juga diakomodasi melalui penyediaan sarana prasarana perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan utilitas umum, serta peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ketahanan pangan merupakan prioritas strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kabupaten Pemalang sebagai daerah dengan basis pertanian memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan dan menjaga pasokan pangan regional.

Kebijakan daerah diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan daerah, diversifikasi konsumsi pangan, serta pengendalian kerawanan pangan. Implementasi program dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan sarana produksi pertanian,

pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida, serta penyuluhan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan pengelolaan cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan pangan, penyusunan peta kerentanan pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi melalui peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kebijakan nasional mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, percepatan penurunan stunting, dan peningkatan gizi masyarakat menjadi rujukan utama dalam penyusunan program daerah.

Dukungan Kabupaten Pemalang diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, layanan rujukan tingkat daerah, penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi, pengawasan sediaan farmasi dan makanan minuman, serta peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dasar.

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis, daerah juga memperkuat sektor pendidikan dan ketahanan pangan melalui sinergi lintas perangkat daerah agar penyaluran program gizi bagi peserta didik dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan pondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, prioritas nasional di bidang pendidikan ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, dan penguatan sarana prasarana pendidikan.

Program daerah difokuskan pada pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal dan kesetaraan. Selain itu, dilakukan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang.

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu didorong melalui penguatan sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sejalan dengan prioritas nasional, Kabupaten Pemalang mengarahkan pembangunan ekonomi Tahun 2027 pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan program daerah diwujudkan melalui pengendalian inflasi daerah, pembangunan sarana distribusi perdagangan, pengawasan harga

dan stok kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi, serta peningkatan akses pembiayaan usaha masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan investasi dilaksanakan melalui penyederhanaan perizinan, promosi penanaman modal, penyusunan peta potensi investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, serta penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan minat investor, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, sinergis, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Sinkronisasi kebijakan ini sekaligus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran daerah karena program yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan nasional dan daerah.

Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing. Selanjutnya dukungan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Strategis Nasional terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.28.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
A. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- Pembentukan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah - pemberian santunan kematian 3 juta - pemberian seragam dan LKS gratis untuk siswa SMP Negeri dan Swasta, - pemberian bantuan personil utk siswa SMP Swasta - pemberian bantuan rehabilitasi RTLH - pemberian bantuan rumah	Dindikpora
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
				terdampak bencana	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinkes
2	Sekolah Rakyat	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan lahan seluas 94.800m2	Dinsos
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		DPPKP
		Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		DPUPR
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Dindikpora
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Termasuk dukungan terhadap program prioritas Gubernur 1 KK 1 Rumah Layak Huni • Penetapan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah MBR • Sosialisasi kebijakan pembebasan BPHTP bagi MBR • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Menyediakan rumah sewa sederhana/rusunawa • Pemberian bantuan stimulan	DPPKP
		Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		BPKPAD
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
				perumahan swadaya • mendukung Gerakan Asri Gentengisasi melalui penggantian atap rumah menjadi genteng	
B. KETAHANAN PANGAN					
1	Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Pemerintah Kabupaten Pemalang • Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengadaan cadangan pangan sebesar 20 ton per tahun	Distanparik
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Distanparik
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
C. KESEHATAN UNTUK SEMUA					
1	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• penetapan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraa n Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Cakupan Kesehatan Universal (UHC) • Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinkes
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Sediaan Farmasi, Alat	pemberian Izin Apotek, Toko Obat,		

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
		Kesehatan Dan Makanan Minuman	Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Semua OPD
2	Makan Bergizi Gratis	Program Perekonomian Dan Pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Setda
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah, PAUD, Kesetaraan/Non Formal		Dindikpora
D. PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN					
1	Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah, PAUD, Kesetaraan/Non Formal	Rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium sekolah	Dindikpora
E. PERTUMBUHAN EKONOMI					
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	- pembentukan TPID - operasi pasar murah setiap triwulan	Setda
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Diskumdag
		Program Pengembangan Umkm	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha		Diskumdag
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Diskumdag
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat		Diskumdag

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
			Daerah Kabupaten/ Kota		
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota	• pelatihan pengelolaan Usaha Koperasi • pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan pendamping desa • pendampingan kelembagaan • monitoring KDKMP	Diskumdag
		Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi	Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Diskumdag
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Diskumdag
		Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		DPPKP
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		DPPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRO SN	PROGRAM RKPD MENDUKUNG PRO SN	KEGIATAN	AKTIVITAS	PD
3	Percepatan Kemudahan Perizinan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	• penetapan Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal • penguatan mall pelayanan publik • inovasi sistem jemput pelayanan online (SIJEMPOL) dan system aduan masyarakat berbasis aplikasi teknologi langsung	DPUPR
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		DPMPTSP
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

4.5.6. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Pusat sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah yang berfokus pada

peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perekonomian daerah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berdaya guna. Melalui dukungan program beserta alokasi anggarannya, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan PHTC dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui RKPD Tahun 2027 memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Pusat melalui sinkronisasi berbagai program prioritas daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan program pada sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur permukiman, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil dilaksanakan melalui penguatan intervensi kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat rentan.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis (TBC), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar maupun rujukan, penguatan fasilitas kesehatan, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Dukungan terhadap program pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, mengembangkan diversifikasi pangan lokal, serta menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Pada sektor pendidikan, dukungan terhadap pembangunan sekolah unggul terintegrasi dan perbaikan sekolah yang membutuhkan renovasi dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemberdayaan Sosial, serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan

kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses pendidikan yang layak, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan representatif.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk penghapusan kemiskinan absolut, Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat jaring pengaman sosial, serta menjaga keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak risiko sosial dan bencana.

Sementara itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses hunian layak, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan perlindungan sosial masyarakat.

Dukungan Program RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap PHTC disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.29.
Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

NO	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	PROGRAM DALAM RKPD TAHUN 2027	ANGGARAN (Rp)	PD
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.561.8333.270,00	Dinkes
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten			
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	50.000.000,00	Distanparik
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638.000.000,00	

NO	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	PROGRAM DALAM RKPD TAHUN 2027	ANGGARAN (Rp)	PD
		Penanganan Kerawanan Pangan	55.000.000,00	
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Pemberdayaan Sosial	22.530.800,00	Dinsos KBPP
		Pengelolaan Pendidikan	227.994.197.000,00	Dindikpora
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11.809.250.000,00	DPPKP
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Perlindungan dan Jaminan Sosial	201.490.100,00	Dinsos
		Penanganan Bencana	230.000.000,00	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.561.8333.270,00	Dinkes
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara			
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.220.000.000,00	DPPKP
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.900.720.000,00	BPKPAD
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%			

Tabel tersebut menggambarkan dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi arah kebijakan prioritas nasional. Penyelarasan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengintegrasikan agenda prioritas pemerintah pusat ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, penganggaran, dan penetapan perangkat daerah pelaksana.

Secara umum, dukungan RKPD Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,

serta pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam beberapa program prioritas sebagai berikut:

1. Pada bidang kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pemalang mendukung program pemberian makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan dukungan anggaran sebesar Rp86,59 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
2. Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan pengembangan rumah sakit diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan daerah. Kebijakan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat sistem kesehatan daerah.
3. Pada sektor ketahanan pangan, dukungan terhadap program peningkatan produktivitas lahan pertanian dilakukan melalui beberapa program, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Penanganan Kerawanan Pangan. Program tersebut didukung anggaran secara bertahap dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat cadangan pangan, serta mendukung kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan.
4. Pada bidang pendidikan, dukungan terhadap pembangunan sekolah unggul terintegrasi dan rehabilitasi sekolah diwujudkan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Program ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penyediaan sarana pendidikan yang layak dan representatif.
5. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Pemalang mendukung program kartu kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan layanan kesehatan masyarakat melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar.

6. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penanganan kawasan permukiman kumuh diwujudkan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta dukungan pengelolaan pendapatan daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses hunian layak, dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 telah disusun dengan memperhatikan sinergi antara prioritas nasional dan prioritas daerah. Integrasi program tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang secara berkelanjutan.

4.5.7. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Indikator Tematik RKPD Provinsi Jawa Tengah

Antara Program/Kegiatan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dengan Program/Kegiatan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 menunjukkan adanya sinergi perencanaan pembangunan daerah secara vertikal antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sinkronisasi ini penting agar agenda pembangunan provinsi dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kewenangan daerah kabupaten.

Secara substansi, tema besar yang diusung Provinsi Jawa Tengah pada sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi syariah telah direspons oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui penguatan sektor unggulan daerah, khususnya pariwisata berbasis potensi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan tata kelola sosial-keagamaan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di bidang pariwisata dan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengimplementasikan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparbud) dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.130.750.902,00.

Program tersebut mendukung beberapa sasaran pembangunan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, antara lain pembangunan 1.000 desa/kampung wisata baru, pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan religi berbasis potensi wilayah, pengembangan kebudayaan dan cagar budaya sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui pengembangan wisata ramah muslim. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pencanangan 30 desa wisata, pengembangan 5 destinasi wisata alam, peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan hingga 1.192.242 kunjungan, serta penetapan 5 unit usaha pariwisata ramah muslim.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata daerah melalui pengembangan atraksi wisata, peningkatan amenitas dan aksesibilitas, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata. Selain memperkuat identitas dan potensi unggulan daerah, program ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sektor pariwisata dan kebudayaan diharapkan semakin berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus mendukung pelestarian warisan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target pembentukan 60 konten kreator desa wisata guna memperkuat promosi digital destinasi wisata daerah dan penguatan halal value chain, Kabupaten Pemalang menargetkan 1 RPH/RPU tersertifikasi halal dan 4 juru sembelih halal bersertifikat sebagai upaya meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pangan asal hewan. Kedua program tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif, industri halal, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam agenda penguatan keuangan syariah, Kabupaten Pemalang mendukung melalui kerja sama pengembangan BPR BKK menjadi lembaga keuangan syariah, optimalisasi penghimpunan dana ZISWAF dari ASN, serta peningkatan literasi ekonomi syariah melalui program edukasi masyarakat. Pada Tahun 2027, penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya ditargetkan mencapai Rp10,12 miliar yang diharapkan dapat mendukung penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 telah mengakomodasi prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui program yang lebih aplikatif, terukur, dan sesuai karakteristik daerah. Sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Kabupaten Pemalang dalam pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Selanjutnya dukungan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 nampak pada tabel berikut:

Tabel 4.30.
Dukungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 terhadap Indikator Tematik RKPD Provinsi Jawa Tengah

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027	INDIKATOR/TARGET	RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027	
PROGRAM		PROGRAM	PD
1. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru;	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan, 30 desa	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
2. Pengembangan Destinasi Wisata alam, Budaya dan Religi berdasarkan potensi wilayah	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan, 5 DTW Jumlah Kunjungan Wisatawan, 1.192.242		
3. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal			
4. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan, 5 unit		
5. Pelatihan 1000 Konten Kreator Desa Wisata	Jumlah Konten Kreator yang dilatih, 60 orang	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
6. Penguatan halal value chain, melalui peningkatan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal, 1 orang Jumlah Tukang Jagal yang Bersertifikat Halal, 4 orang	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Distanparik
7. Peningkatan peran perbankan syariah melalui pendekatan terintegrasi	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial, Rp.10.123.893.932	Perekonomian dan Pembangunan	Setda
8. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana Ziswaf;		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027	INDIKATOR/TARGET	RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027	
PROGRAM		PROGRAM	PD
9. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan sekolah pelopor ekonomi syariah (SPES)			

4.5.8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam mendukung penanganan stunting Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran dan prioritas daerah yang terarah dalam mendukung penanganan stunting. Kebijakan tersebut disusun melalui pendekatan konvergensi lintas sektor dengan menitikberatkan pada pemenuhan gizi, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, akses air minum layak, edukasi pola asuh, serta penguatan perlindungan sosial bagi keluarga berisiko stunting. Melalui penetapan sasaran dan prioritas yang terukur, diharapkan upaya penanganan stunting di Kabupaten Pemalang dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Pada tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tercapai sebesar 19,10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 14,00%. Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027. Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung penanganan stunting Kabupaten Pemalang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.31.
Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program yang mendukung penanganan stunting

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PD
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Kesejahteraan	Dinsos KBPP
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PD
2	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	DPUPR
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPPKP

Berdasarkan Tabel 4.28, penanganan stunting di Kabupaten Pemalang dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta dukungan program lintas perangkat daerah. Penanganan stunting tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan, tetapi juga didukung melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan keluarga, penyediaan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur permukiman yang layak.

Pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan prioritas pembangunan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta penguatan layanan kesehatan dasar. Selain itu, Program Administrasi Pemerintahan Desa oleh Dispermades turut mendukung penguatan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi penanganan stunting di tingkat desa melalui optimalisasi tata kelola dan dukungan pembiayaan desa.

Selanjutnya, Dinas Sosial, KBPP dan PPA melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mendukung peningkatan kualitas keluarga dan penguatan ketahanan keluarga dalam upaya pencegahan stunting, terutama melalui edukasi pengasuhan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan keluarga berisiko stunting. Dukungan lainnya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang diarahkan untuk meningkatkan diseminasi informasi, edukasi, dan kampanye publik terkait pentingnya pencegahan stunting serta pola hidup sehat masyarakat.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal, ditetapkan prioritas pembangunan berupa pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif. Dukungan terhadap prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh DPUPR guna meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh oleh DPPKP untuk meningkatkan kualitas hunian dan

sanitasi lingkungan masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, program-program tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Pemalang dilaksanakan secara holistik, terintegrasi, dan lintas sektor dengan melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

4.5.9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Pemalang

Pemerintah Kabupaten Pemalang sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Keterkaitan Tujuan SDG's, Sasaran Daerah, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah disusun selaras dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's). Keterpaduan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan global melalui perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tujuan SDG's pertama hingga kelima, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan mewujudkan ketahanan pangan, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sasaran tersebut mencerminkan fokus pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan akses dan mutu layanan dasar.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan prioritas pembangunan daerah berupa akselerasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas akselerasi penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan

melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, penguatan peran perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat.

Pada tujuan SDG's keenam dan ketujuh, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua serta menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran daerah berupa meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah berupa pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif.

Prioritas tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti penyediaan air minum, sanitasi, energi, kawasan permukiman yang layak, serta penataan wilayah perkotaan dan perdesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, pada tujuan SDG's kedelapan dan kesembilan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan layak, serta membangun infrastruktur yang tangguh, industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan prioritas pembangunan daerah berupa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, penguatan UMKM dan industri lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Pada tujuan SDG's kesebelas dan kedua belas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran daerah berupa meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah berupa pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif serta penguatan ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat.

Prioritas pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman, infrastruktur dasar, sanitasi, konektivitas wilayah, serta penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sementara itu, prioritas penguatan ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, meningkatkan

produksi pangan lokal, memperkuat distribusi pangan, serta mendorong pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan di masyarakat.

Selanjutnya, pada tujuan SDG’s ketiga belas hingga kelima belas, yaitu penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut dan daratan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah berupa penguatan penanggulangan bencana. Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Pada tujuan SDG’s ke enam belas dan ketujuh belas, yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, serta memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah berupa reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi.

Prioritas reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selain itu, penguatan kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 telah mengintegrasikan Tujuan SDG’s ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, tangguh terhadap perubahan lingkungan, serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan modern.

Tabel 4.32.
Keterkaitan Tujuan SDG’s, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2027

NO	TUJUAN SDG’S	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	1. Akselerasi penanggulangan kemiskinan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

NO	TUJUAN SDG'S	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	meningkatkan pertanian berkelanjutan		
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat		
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan		
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif;
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua		Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi		
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara		
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang inklusif
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan		Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penguatan penanggulangan bencana
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan		
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalis
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global		

4.5.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Angka Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Pemalang

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemerintah Kabupaten Pemalang terus memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah melalui langkah-langkah penanganan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah melalui peningkatan akses layanan pendidikan, pendataan yang akurat, pendampingan keluarga, fasilitasi integrasi ke satuan pendidikan formal maupun nonformal, serta penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antara sasaran daerah, prioritas pembangunan daerah, dan program RKPD yang mendukung peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan perlindungan sosial masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan yang layak, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027, penanganan Anak Tidak Sekolah didukung oleh sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan penguatan kapasitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, penanganan anak putus sekolah, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan layanan pendidikan formal maupun nonformal bagi anak usia sekolah.

Selain itu, dukungan terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah juga dilakukan melalui prioritas akselerasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mendukung penyediaan data terpadu masyarakat miskin dan rentan sebagai dasar intervensi bantuan sosial dan layanan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah.

Selanjutnya, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah

melalui penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak dasar anak, perlindungan terhadap anak rentan, serta peningkatan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

Dari aspek tata kelola pembangunan, prioritas reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi mendukung penanganan Anak Tidak Sekolah melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Bappeda. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi data, sinkronisasi perencanaan lintas sektor, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanganan Anak Tidak Sekolah secara lebih efektif dan terukur.

Selain itu, dukungan koordinasi lintas perangkat daerah juga dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat oleh Sekretariat Daerah guna memperkuat sinergi kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, serta fasilitasi penanganan Anak Tidak Sekolah secara terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, keterkaitan sasaran daerah, prioritas pembangunan daerah, dan program RKPD Tahun 2027 menunjukkan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pemalang dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan, perlindungan sosial, perlindungan anak, penguatan keluarga, dan tata kelola pembangunan yang terintegrasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penanganan ATS terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.33.
Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program RKPD Tahun 2027 yang mendukung penanganan Anak Tidak Sekolah

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	NOMENKLATUR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Akselerasi penanggulangan kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	NOMENKLATUR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
		Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Setda

4.5.11. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang

Satu Data Indonesia sebagai landasan bagi instansi pemerintah dalam menyusun, mengelola, dan memanfaatkan data secara terintegrasi, terbuka, dan akuntabel. Dengan adanya standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk yang baku, data yang dihasilkan oleh perangkat daerah menjadi lebih seragam dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mendorong penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Pemalang dilaksanakan melalui koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, serta seluruh perangkat daerah selaku produsen data. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai Wali Data yang bertugas melakukan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data sektoral daerah, sedangkan BPS Kabupaten Pemalang berperan sebagai pembina data statistik sektoral.

Sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan forum koordinasi dan forum satu data yang melibatkan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data pembangunan daerah. Melalui forum tersebut dilakukan koordinasi terkait penetapan data prioritas daerah, penyusunan metadata, standardisasi data, serta sinkronisasi data

antar perangkat daerah sehingga tercipta satu basis data pembangunan yang terintegrasi.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan penguatan tata kelola data pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga terus mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dan portal data daerah sebagai media penyediaan dan publikasi data sektoral. Pengembangan portal data daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, mempermudah akses data bagi perangkat daerah dan masyarakat, serta mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara berbasis data.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pemalang memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan dukungan data yang valid, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tersedianya data yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas pembangunan secara objektif, serta mengalokasikan sumber daya dan anggaran pembangunan secara lebih efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, implementasi Satu Data Indonesia juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

4.5.12. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pengendalian pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja organisasi, mencegah terjadinya penyimpangan, meminimalkan risiko, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah. Dengan demikian, pengendalian pemerintahan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Pemalang, pemerintah daerah didukung oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keberadaan APIP memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan target kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung melalui Keputusan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Program kerja tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain APIP, penerapan SPIP juga memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas pengendalian pemerintahan daerah. SPIP merupakan proses integral yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri serta penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal tersebut didukung melalui Keputusan Sekretaris Daerah 100.3.3.5/ 41/Tahun 2024 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertugas melakukan penilaian dan memastikan kualitas implementasi SPIP pada seluruh perangkat daerah.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pula sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkesinambungan. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif dan sistematis, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang semakin meningkat.

Tabel 4.34.
Hasil Evaluasi Implementasi SPIP Kabupaten Pemalang Tahun 2025

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL EVALUASI
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,930
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,734
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,730

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang disusun oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, diperoleh gambaran bahwa tata kelola pengendalian intern Pemerintah Kabupaten

Pemalang telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek manajemen risiko, pengendalian korupsi, dan integrasi kinerja lintas perangkat daerah.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses penilaian mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan skor kesesuaian proses sebesar 80,43% atau kategori “Sesuai”. Tahapan persiapan memperoleh nilai 81,34%, tahap pelaksanaan 80,00%, dan tahap pelaporan 80,81%. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain belum lengkapnya dokumentasi rapat koordinasi, belum seluruh asesor mengikuti bimtek SPIP, belum optimalnya pengujian efektivitas sub unsur, serta rekomendasi hasil penilaian yang belum mencakup seluruh area perbaikan.

Hasil evaluasi substantif menunjukkan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebesar 2,930 atau berada pada Level 2 (Berkembang). Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,734 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,730, yang juga berada pada Level 2 (Berkembang). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern telah diterapkan dan mulai berkembang, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis pemerintahan daerah.

Dari sisi penetapan tujuan, kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran masing-masing memperoleh skor 3,000. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis daerah pada dasarnya telah selaras dengan isu strategis pembangunan dan telah memiliki indikator serta target kinerja. Namun, masih ditemukan indikator yang belum berorientasi hasil dan belum memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeliness). Selain itu, cascading kinerja antar OPD masih belum optimal sehingga belum seluruh intervensi perangkat daerah tergambar secara utuh dalam mendukung sasaran strategis daerah.

Pada komponen struktur dan proses, nilai yang diperoleh sebesar 2,768 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan namun belum dilaksanakan secara konsisten. Beberapa kelemahan utama yang ditemukan meliputi belum optimalnya penegakan integritas dan nilai etika terkait perilaku fraud, kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM yang belum menyeluruh, serta pemantauan dan monitoring pengendalian yang belum dilakukan secara rutin dan komprehensif.

Dari aspek pencapaian tujuan, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Mayoritas capaian sasaran strategis dan program dinilai tercapai, serta Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD selama dua tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat temuan berulang terkait pengamanan dan pencatatan aset daerah serta pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan, termasuk

kelebihan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian, pemantauan, dan evaluasi masih perlu diperkuat.

Dalam aspek manajemen risiko, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko belum memadai. Risiko strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya tergambar keterkaitannya dengan sasaran strategis daerah, penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja OPD, dan sebagian besar OPD belum melakukan pemutakhiran Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Selain itu, pemantauan efektivitas RTP belum dilakukan secara periodik. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya manajemen risiko belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pada aspek pengendalian korupsi, evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian korupsi belum optimal. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain belum lengkapnya kebijakan dan SOP antikorupsi, keterbatasan dukungan sumber daya, belum dimasukkannya risiko fraud dalam register risiko, serta saluran pelaporan internal yang belum dikelola secara kredibel. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan budaya integritas dan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada sektor pendidikan, evaluasi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah telah berdampak positif terhadap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Intervensi tersebut dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, pendidikan inklusif melalui PKBM dan LKP, kolaborasi lintas pihak, serta program perbaikan RTLH. Namun demikian, target RLS tahun 2025 dinilai terlalu tinggi dibandingkan capaian kenaikan tahun sebelumnya sehingga berisiko sulit dicapai. Selain itu, cascading intervensi lintas OPD belum tergambar secara detail sehingga sinergitas program berpotensi belum optimal.

Pada sektor penurunan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan berbagai intervensi seperti pemberian makanan tambahan, layanan pemeriksaan ibu dan balita, serta peningkatan sarana air bersih dan sanitasi. Namun, prevalensi stunting masih berada di atas target yang ditetapkan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum dicantumkannya indikator prevalensi stunting secara jelas dalam dokumen RKPD dan Renja, serta adanya dualisme data antara SSGI dan E PPGBM yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan pengukuran dan intervensi program.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa tata kelola SPIP Pemerintah Kabupaten Pemalang telah berkembang dan memiliki pondasi yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis hasil, integrasi kinerja lintas perangkat daerah, implementasi manajemen risiko, pengendalian korupsi, serta monitoring dan evaluasi pengendalian intern secara berkelanjutan.

Penguatan tersebut menjadi penting untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2027 diarahkan untuk ***“Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”*** dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

- P1. Pengembangan pembangunan pariwisata
- P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan
- P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- P4. Peningkatan investasi
- P5. Penguatan infrastruktur berkelanjutan
- P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- P7. Penguatan penanganan kemiskinan
- P8. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- P9. Penguatan tata kelola pemerintahan

RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi money follows program, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi. Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2027 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2027 mendatang untuk membiayai belanja daerah berasal dari pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.2.638.190.655.000 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), belanja daerah sebesar Rp2.532.563.627.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), penerimaan pembiayaan sebesar Rp.105,627,028,000,00 (seratus lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari surplus dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.105,627,028,000,00 (seratus lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta

dua puluh delapan ribu rupiah). Pendapatan daerah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.540.081.333.000,00 (lima ratus empat puluh milyar delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.098.109.322.000,00 (dua triliun sembilan puluh delapan milyar seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan kontribusi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar sebesar Rp. 1.961.477.057.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.136.632.265.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari sisi pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, sehingga pada Tahun Anggaran yang direncanakan nilai SiLPA diperkirakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Kondisi ini mencerminkan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, sehingga seluruh sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Secara rinci kerangka pendanaan dan belanja daerah berdasarkan struktur APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Kerangka Proyeksi Pendanaan dan Belanja Daerah Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	2.638.190.655.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.081.333.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	243.435.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	253.787.940.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.458.393.0000,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.400.000.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.098.109.322.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.961.477.057.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.632.265.0000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
5	BELANJA DAERAH	2.532.563.627.000,00
5.1	Belanja Operasi	2.004.660.512.692,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.258.702.264.246,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.085.907.346,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.578.139.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.586.256.100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.607.500.000,00
5.2	Belanja Modal	102.015.176.008,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.333.942.408,00

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2027
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.742.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.662.730.050,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.275.003.550,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.500.000,00,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	418.387.937.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.033.133.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.354.805.000,00
	Surplus / Defisit	105,627,028,000,00
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	SiLPA	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	105,627,028,000,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	60,627,028,000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA)	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pemalang, 2026

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dijabarkan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan yang terdiri dari 14 kecamatan, dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 7 tujuh) isu strategis pembangunan mendapat alokasi pendanaan karena sesuai 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah di Tahun 2027. Program dan kegiatan prioritas tersebut tersaji pada tabel:

Tabel 5.2.
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD 2027

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Urusan
PI	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA		
	1.	PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	URUSAN PARIWISATA
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	URUSAN PARIWISATA
	3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah	URUSAN PARIWISATA
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	URUSAN PARIWISATA
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
	5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	URUSAN URUSAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	6.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KEBUDAYAAN
	8.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KEBUDAYAAN
	9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	URUSAN KEBUDAYAAN
P2	PENGUATAN INDUSTRIALISASI BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN			
	10.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	URUSAN PERTANIAN
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	11.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	URUSAN PERTANIAN
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengembangan Lahan Penggemalaan Umum	
	12.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERTANIAN
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
	13.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	URUSAN PERTANIAN
	14.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	URUSAN PERTANIAN
	15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	
	16.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
17.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
18.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PANGAN
19.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	URUSAN PANGAN
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
20.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	URUSAN PANGAN
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
21.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PANGAN
22.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	URUSAN PERINDUSTRIAN
23.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	URUSAN PERINDUSTRIAN
24.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	URUSAN PERINDUSTRIAN

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	26.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah	URUSAN PERDAGANGAN
	27.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	URUSAN PERDAGANGAN
	28.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	URUSAN PERDAGANGAN
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	29.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	URUSAN PERDAGANGAN
P3	PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			
	30.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	31.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	32.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	33.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	34.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	35.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	36.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
P4	PENINGKATAN INVESTASI			

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	37.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	38.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	39.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	40.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	41.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya profil investasi daerah	URUSAN PENANAMAN MODAL
	42.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	URUSAN TENAGA KERJA
	43.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	44.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	45.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENANAMAN MODAL
	46.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	URUSAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
	47.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	URUSAN PERDAGANGAN
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
P5	PENGUATAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN			
	48.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	49.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	
	50.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	51.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	52.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	53.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	54.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	55.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	56.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
	57.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	58.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
	59.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	60.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
61.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
62.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
63.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Penyimpanan sementara Limbah B3	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
64.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
65.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Pengelolaan Sampah	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
66.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
67.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	URUSAN PERHUBUNGAN
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	68.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	69.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERTANAHAN
	70.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERTANAHAN
P6	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
	71.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	URUSAN PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	72.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	URUSAN PENDIDIKAN
	73.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	URUSAN PENDIDIKAN
	74.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KESEHATAN

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	75.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	URUSAN KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	76.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	URUSAN KESEHATAN
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	77.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KESEHATAN
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	78.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	79.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	80.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	81.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	82.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	83.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	
	84.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	85.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	86.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	87.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	88.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	89.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
		DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
90.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
91.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
92.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
93.		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN TRANSMIGRASI
94.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN COMAL
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
95.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN TAMAN
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
96.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN MOGA
97.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN AMPELGADING
98.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN BODEH
99.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN BELIK
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
100.		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN ULUJAMI

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	101.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN PULOSARI
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
	102.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN WATUKUMPUL
	103.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN PEMALANG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	104.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN RANDUDONGKAL
	105.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN WARUNGPRING
	106.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN BANTARBOLANG
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	107.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN PETARUKAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
P7	PENGUATAN PENANGANAN KEMISKINAN			
	108.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	109.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	110.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN SOSIAL
	111.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	URUSAN SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	112.		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	URUSAN SOSIAL

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	113.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	URUSAN SOSIAL
	114.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	URUSAN SOSIAL
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	115.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		URUSAN SOSIAL
P8	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	116.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	117.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	118.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	119.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	120.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	121.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
P9	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
	122.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	123.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	124.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	125.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	126.	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	127.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	128.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	130.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KOMUNIKASI
	131.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN INFORMATIKA
	132.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERSANDIAN
	133.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN KEARSIPAN
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
	134.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	URUSAN KEARSIPAN
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	
	135.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERPUSTAKAAN
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	136.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	URUSAN PERPUSTAKAAN
	137.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
	138.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
	139.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			Penataan Organisasi	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	140.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	URUSAN SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Fasilitasi Tugas DPRD	
	141.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	URUSAN PERENCANAAN
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	142.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	URUSAN PERENCANAAN
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	143.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	URUSAN KEUANGAN
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	144.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	URUSAN KEUANGAN
	145.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	URUSAN KEUANGAN

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	146.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	URUSAN KEPEGAWAIAN
			Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengembangan Kompetensi ASN	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	147.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	URUSAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	148.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	URUSAN RISET DAN INOVASI
	149.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	URUSAN PENGAWASAN
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	150.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	URUSAN PENGAWASAN
			Pendampingan dan Asistensi	
	151.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN COMAL
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	152.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN COMAL
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	153.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN COMAL
	154.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN COMAL
	155.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TAMAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	156.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN TAMAN
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	157.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN TAMAN
	158.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN TAMAN
	159.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN MOGA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	160.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN MOGA
	161.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN MOGA
	162.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN MOGA
	163.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN AMPELGADING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	164.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN AMPELGADING
	165.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN AMPELGADING
	166.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN AMPELGADING
	167.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN BODEH
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	168.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN BODEH
	169.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN BODEH

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
170.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN BODEH
171.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN BELIK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
172.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN BELIK
173.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN BELIK
174.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN BELIK
175.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN ULUJAMI
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
176.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN ULUJAMI
177.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN ULUJAMI
178.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN ULUJAMI
179.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PULOSARI
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
180.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PULOSARI
181.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN PULOSARI

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	182.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PULOSARI
	183.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN WATUKUMPUL
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	184.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN WATUKUMPUL
	185.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN WATUKUMPUL
	186.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN WATUKUMPUL
	187.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEMALANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	188.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PEMALANG
	189.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN PEMALANG
	190.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PEMALANG
	191.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN RANDUDONGKAL
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	192.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RANDUDONGKAL
	193.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN RANDUDONGKAL
	194.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN RANDUDONGKAL

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	Urusan
	195.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN WARUNGPRING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	196.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN WARUNGPRING
	197.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN WARUNGPRING
	198.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN WARUNGPRING
	199.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN BANTARBOLANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	200.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN BANTARBOLANG
	201.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN BANTARBOLANG
	202.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN BANTARBOLANG
	203.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PETARUKAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	204.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PETARUKAN
	205.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN PETARUKAN
	206.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PETARUKAN

5.2.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Melaksanakan tindak lanjut Surat Kemdikbud Ristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota melalui rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan target capaian persentase angka partisipasi PAUD, SD, SMP, PAUD dan kesetaraan masing-masing sebesar 93,01, 99,45%; 93,63%; 28,81%; dan Pagu Indikatif sebesar Rp227.994.197.600,00. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang Pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan melakukan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah 2 unit, pengadaan mebel sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa untuk 500 peserta didik, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.500 orang, pengelolaan dana BOS sekolah dasar sebanyak 742 satuan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar sebanyak 742 orang, rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 23 unit, penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sebanyak 742 satuan pendidikan, penyediaan biaya personil peserta didik sebanyak 725 peserta didik.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan melakukan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 2 unit, rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 16 unit, penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama 3.098 peserta didik, Pembinaan, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sebanyak 1.795 peserta didik, pengelolaan Dana BOS sebanyak 122 satuan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS sebanyak 122 Orang, penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sebanyak 122 satuan pendidikan.
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan melakukan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD sebanyak 7 unit, pengadaan mebel PAUD sebanyak 2 paket, pengadaan perlengkapan PAUD sebanyak 1 paket, pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD sebanyak 795 satuan Pendidikan, pengelolaan dana BOP PAUD sebanyak 795 satuan pendidikan, dan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD sebanyak 10 unit.
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sebanyak 1 satuan pendidikan, pengelolaan Dana BOP sekolah

nonformal/kesetaraan sebanyak 16 satuan pendidikan, dan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sebanyak 2.800 peserta didik.

- b. Program Pengembangan Kurikulum, dengan target capaian persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 100% dan Pagu Indikatif sebesar Rp100.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar melalui pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar sebanyak 1.000 orang.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan target capaian indeks pemerataan guru (Retribusi guru) 94% dan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 85% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp100.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 dokumen, serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 Laporan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 90% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 90% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp843.506.082.112,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sebanyak 1 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 laporan, Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorial Daerah sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 7.809 orang/bulan, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 61 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 paket, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 1 paket, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 dokumen, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 100 laporan.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 1 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 56 unit, Pemeliharaan Mebel sebanyak 15 unit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 20 unit, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis 50%, Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap 98%, Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 74,5, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis 94, Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 75, Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV) 61, Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 99.5%, Indeks SPM Kesehatan Keluarga 75, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna 89%, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Kesehatan sesuai Standar 50%, proporsi fasyankes terakreditasi paripurna 88,89% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp326.561.8333.270,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan puskesmas sebanyak 1 unit; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 5 unit, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 1 unit; pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan sebanyak 70 paket; distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan sebanyak 150 paket.
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 21.654 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebanyak 20.669 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 19.685 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan balita sebanyak 96.189 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebanyak 193.093 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif sebanyak 804.093 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebanyak 190.516 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebanyak 137.847 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebanyak 18.699 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.159 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebanyak 15.960 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 33.403 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sebanyak 1 dokumen; pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sebanyak 1 dokumen; pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sebanyak 1 dokumen; pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sebanyak 1 dokumen; pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sebanyak 1 dokumen; pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya sebanyak 1 dokumen, pengelolaan surveilans kesehatan; pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sebanyak 1 orang; pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan sebanyak 1 dokumen; pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 1 dokumen; penyelenggaraan kabupaten/kota sehat sebanyak 1 dokumen; operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 1 dokumen; pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota sebanyak 69 unit; investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan

pemberian obat massal sebanyak 1 dokumen; pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah sebanyak 1 dokumen; penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 1 unit; pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis sebanyak 4.308 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sebanyak 100 orang; pengelolaan pelayanan kesehatan malaria sebanyak 53 orang; serta pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak sebanyak 1 dokumen; pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional sebanyak 30 paket; pengelolaan pelayanan kesehatan kerja sebanyak 1 laporan; pengelolaan pelayanan kesehatan orang yang berisiko masalah kesehatan jiwa sebanyak 1 laporan; pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular sebanyak 1 laporan, pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular sebanyak 1 laporan; deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah sebanyak 100 orang.

- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan melalui pengelolaan sistem informasi kesehatan sebanyak 1 dokumen..
 - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 69 unit; peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten sebanyak 69 unit; peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sebanyak 69 unit; serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target capaian Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi sebesar 258 dan Pagu Indikatif sebesar Rp1.640.576.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota melalui pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan sebanyak 1 dokumen; pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 1 dokumen; Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 1 dokumen;

pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar sebanyak 200 orang.

- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat kabupaten sebanyak 200 orang.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan target capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebesar 100%, Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan sebesar 71% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp184.853.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan melakukan pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman IRT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebanyak 12 unit.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target capaian Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup sebesar 75% dan Pagu Indikatif Rp1.038.092.730,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

dengan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) sebanyak 1 dokumen.

- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 90% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 90% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp125.771.157.000,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 3 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan.
 - 8) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 1.666 orang/bulan; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD sebanyak 19 laporan.
 - 9) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah melalui penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.
 - 10) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen.
 - 11) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 paket; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 paket, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 5 paket, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 paket, Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 2 laporan.
 - 12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Pengadaan Mebel sebanyak 2 unit; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 4 unit .
 - 13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 1 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 1 laporan.
 - 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 4 unit, Pemeliharaan Mebel sebanyak 10 unit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 65 unit, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target capaian Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 0,7%; Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 72%; Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 56,24% dengan. Pagu Indikatif sebesar Rp.996.520.000,00 dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen; operasi dan pemeliharaan sungai sepanjang 0,5 KM; Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 lembaga; normalisasi/restorasi sungai sepanjang 0,5 KM; peningkatan bangunan perkuat tebing sepanjang 0,3 KM; rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya sepanjang 0,34 KM; serta penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, dan pengaman pantai 1 dokumen.
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui rehabilitasi jaringan permukaan sepanjang 1 KM; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 0,5 KM; serta Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa sebanyak 3 dokumen.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 89,85%, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.415.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebesar 25 liter/detik.

- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target capaian Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 98,5%, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 58,57% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman sebesar 1.080 M³/hari.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan target capaian Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik sebesar 76,76%. dengan pagu indikatif sebesar Rp20.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan; serta Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.
- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00 dengan target capaian Persentase penataan bangunan dan lingkungannya sebesar 70% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota melalui Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 kawasan.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan target capaian Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik sebesar 80%, Rasio Kepatuhan PBG sebesar 82,86% dan Pagu Indikatif sebesar Rp20.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG sebanyak 150 dokumen; serta Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 bangunan gedung.
- g. Program Penyelenggaraan Jalan dengan target capaian Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 80,29% dengan pagu indikatif sebesar Rp47.109.893.550,00 dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis

- penyelenggaraan jalan dan jembatan sebanyak 10 dokumen; Survey Kondisi Jalan/Jembatan sepanjang 765,72 KM; Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 3,95 KM; pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 1 KM; Rekonstruksi Jalan sepanjang 47,735 KM; Pemeliharaan Rutin Jembatan sebanyak 4 jembatan; Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjang 1,3 KM; serta Pembangunan Jembatan sepanjang 1 Meter.
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target capaian Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 21% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp20.000.000,00. Program ini dilakukan dengan melalui kegiatan:
- 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis sebanyak 50 orang.
 - 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen.
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target capaian Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp40.000.000,00 program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota guna peningkatan investasi daerah dengan melakukan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang sebanyak 3 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyusunan RDTR kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen; dan penyusunan RTRW kabupaten/kota sebanyak 5 dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi pelaksanaan penataan ruang sebanyak 3 dokumen.
- j. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan target capaian Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar sebesar 36,2% dengan pagu indikatif sebesar Rp10.000.000 dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R kapasitas 233,08 ton/hari.
- k. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp19.373.180.850,00, dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 8 dokumen;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 151 orang/bulan.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 480 orang.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket; Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 9 paket; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 4 paket; Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 2 paket; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 7 paket; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2 dokumen; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 150 laporan.
- 15) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebanyak 1 unit; Pengadaan Mebel sebanyak 55 unit; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 4 unit.
- 16) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 4 laporan; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 24 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan.
- 17) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 164 unit, Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sebanyak 23 unit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 60 unit.

4. Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan dengan target capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sebesar 100%, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.030.000.000,00 program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1

- dokumen; identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota sebanyak 5 dokumen.
- 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana sebanyak 50 orang; dan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan sebanyak 50 orang.
 - 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 10 unit rumah.
 - 4) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan melakukan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun sebanyak 2 laporan; penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 2 dokumen.
 - 5) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik sebanyak 12 dokumen;
- b. Program Kawasan Permukiman dengan target Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani sebesar 31,72% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.100.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha melalui kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh sebanyak 4 laporan; pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani sebesar 72,64% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.220.000.000,00. Dilakukan dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha sebanyak 45 Unit Rumah; penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh sebanyak 50 orang.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target capaian Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebanyak 44,40%

dengan Pagu Indikatif sebesar Rp11.809.250,00 yang dilakukan dengan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan melalui perencanaan penyediaan PSU perumahan sebanyak 3 dokumen; koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan sebanyak 4 laporan; verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang sebanyak 5 laporan; serta penyediaan PSU di Perumahan sebanyak 25 lokasi.

- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak digunakan dengan target Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.850.000,00.

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100% dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp559.399.600,00. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota sebanyak 6 dokumen; pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 4 dokumen; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 4 dokumen; penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1 dokumen; penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 10 laporan; dan penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebanyak 5 laporan.
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan melakukan sosialisasi penegakkan Perda dan Perkada sebanyak 1 laporan; penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

sebanyak 10 laporan; dan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada sebanyak 50 laporan.

- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan kapasitas dan karir PPNS sebanyak 2 laporan.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 38% dengan pagu indikatif Rp1.123.425.000,00 yang dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen; pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 4 laporan; penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sebanyak 10 dokumen; pembinaan aparatur pemadam kebakaran sebanyak 1 orang; pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri sebanyak 18 unit; penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebanyak 3 dokumen.
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk 200 orang; pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebanyak 4 desa/kelurahan; dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana sebanyak 1 unit.
 - 3) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen; pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 4 laporan; penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sebanyak 10 dokumen; pembinaan aparatur pemadam kebakaran sebanyak 1 orang; pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri sebanyak 18 unit; penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebanyak 3 dokumen.

- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk 200 orang; pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebanyak 4 desa/kelurahan; dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana sebanyak 1 unit.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp15.609.627.800,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 99 orang/bulan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 10 laporan; Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sejumlah 1 paket.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 2 paket; Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 80 laporan.
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebanyak 1 unit; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 8 unit.
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 2 Laporan; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 laporan; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 45 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 43 unit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 unit; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50 unit.
- d. Program Penanggulangan Bencana dengan target capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100%; jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100%; jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%; jumlah warga negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sebesar 100%; serta jumlah warga negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi sebesar 100%. Pagu Indikatif sebesar Rp1.345.000.600,00. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) dengan kapasitas sebanyak 100 orang.
 - 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan melakukan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1 unit; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota sebanyak 300 orang.
 - 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota.
 - 3) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana melalui pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; koordinasi dan penanganan pasca bencana kabupaten/kota.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.255.039.000,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 8) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 9) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 10) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebanyak 1 unit; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 8 unit.
- 12) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

6. Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan target capaian persentase PSKS yang dibina sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp22.530.800,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota melalui peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 5 keluarga; peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 3 lembaga; peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga sebanyak 10 orang; fasilitasi pengembangan pusat kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial (Puskesmas) kewenangan kabupaten/kota sebanyak 10 lembaga; peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 10 orang; Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi sebanyak 8 orang; serta pembinaan teknis Sumber Daya Manusia sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang.

- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan target capaian Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 100%; dan persentase PPKS diluar sasaran SPM yang terlayani sebesar 69% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp353.500.300,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan melakukan penyediaan permakanan untuk 80 orang; penyediaan sandang untuk 15 orang; penyediaan alat bantu sebanyak 21 orang; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 10 orang; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 140 orang; pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat sebanyak 375 orang; pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 100 orang; pemberian layanan data dan pengaduan sebanyak 30 orang; pemberian layanan kedaruratan sebanyak 15 orang; pemberian layanan rujukan sebanyak 30 orang; fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 15 orang.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target capaian persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan sebesar 100%; persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp201.490.100,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan melakukan penjangkauan anak-anak terlantar sebanyak 5 orang; rujukan anak-anak terlantar sebanyak 2 orang; pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar sebanyak 150 orang; serta Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi sebanyak 3 orang.
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 87.000 orang; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebanyak 3 orang; Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebanyak 3 orang; pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

sebanyak 8.700 usulan; fasilitasi bantuan jaminan sosial bagi pekerja rentan miskin sebanyak 2.800 orang; fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 1 orang; fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi fakir miskin Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.

- d. Program Penanganan Bencana dengan target capaian jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana sebesar 100%; dan persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp230.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan makanan untuk 1.000 orang; khusus bagi kelompok rentan sebanyak 10 orang; Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi sebanyak 10 orang.
 - 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana sebanyak 35 orang; peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana tingkat muda sebanyak 70 orang; fasilitasi kampung siaga bencana dan lumbung sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana sebanyak 10 desa/kelurahan; Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana sebanyak 6 orang; Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana sebanyak 70 orang.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target capaian persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP sebanyak 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp14.379.100,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota melalui rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen; pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 1 makam; serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 1 laporan.
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp6.565.507.100,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

- Daerah sebanyak 2 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 Laporan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 29 orang/bulan; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 10 laporan;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah dilakukan melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan; Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen; serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 35 orang.
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket; Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 1 paket; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 dokumen; Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan.
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 1 laporan; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 45 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan.
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 99 unit; pemeliharaan mebel sebanyak 1 unit; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 3 unit.

5.2.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan target capaian persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) melalui penyusunan rencana tenaga kerja makro sebanyak 1 dokumen, serta fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro untuk 1 orang.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi sebesar 2,78% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp480.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan melakukan serta pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota sebanyak 10 unit; proses pelaksanaan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan Unit Kompetensi sebanyak 160 orang.
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta sebanyak 20 lembaga.
 - 3) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja melalui penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi sebanyak 15 perizinan;
 - 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan melakukan pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil sebanyak 3 perusahaan.
 - 5) Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota melalui pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebanyak 1 dokumen.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota sebesar 73,83% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.755.080.850,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota melalui pelayanan antar kerja sebanyak 12.000 orang, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja sebanyak 350 orang, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan sebanyak 16 orang, serta perluasan kesempatan kerja untuk 190 orang.
 - 2) Pengelolaan informasi pasar kerja melalui job fair/bursa kerja sebanyak 1.500 orang.

- 3) Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota melalui peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia (PMI) sebanyak 20 orang.
- d. Program Hubungan Industrial dengan target capaian Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp250.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan sebanyak 20 perusahaan.
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan suatu daerah kabupaten/kota sebanyak 15 perkara, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat pekerja buruh serta non afiliasi sebanyak 20 asosiasi dan serikat pekerja, pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota sebanyak 3 lembaga, dan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 60 orang.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.484.232.150,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; kordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineja SKPD sebanyak 12 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
 - 8) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 45 orang/bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 12 laporan;

- 9) Adminisrasi Kepegawaian Perangkat daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 50 orang.
- 10) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 10 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 10 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 10 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 10 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
- 11) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 1 laporan; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 45 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan.
- 12) Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukab melalui pengadaan mebel sebanyak 5 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 5 unit.
- 13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukann melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 39 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 50 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target capaian persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 4,5% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp55.000.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 laporan; bimbingan teknis penyelenggaraan PUG bagi perangkat daerah kewenangan kabupaten/kota kepada 1 orang.

- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan ruang bersama Indonesia Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 kegiatan; bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 orang.
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 laporan; advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 lembaga; kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 dokumen; bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 orang.
- b. Program Perlindungan Perempuan dengan target capaian rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 0,02% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp235.456.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota dengan melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 kegiatan; Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 dokumen; bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 orang.
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 30 orang; layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 5 orang; layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 19 orang; Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban

Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 orang; layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 30 orang; Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 12 orang; layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota sebanyak 2 orang.

- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target capaian Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya sebesar 45% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp75.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 100 lembaga.
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 100 lembaga.
 - 3) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target capaian persentase OPD yang memiliki data gender sebesar 95,77% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp15.000.000,00, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota dilakukan dengan penguatan penyelenggaraan aplikasi simfoni PPA untuk penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak berkualitas sebanyak 1 dokumen; advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak sebanyak 38 lembaga.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan target capaian Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak sebesar 51,12% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan

Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 lembaga.

- f. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target capaian persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp287.541.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota sebanyak 50 orang; layanan pengaduan atau penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang; layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota sebanyak 8 orang; layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang; layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang; Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang; Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota sebanyak 2 orang; serta layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 30 orang.
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 lembaga; Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota sebanyak 1 orang.

3. Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan target capaian persentase cadangan pangan sebesar 7,58% dan Pagu Indikatif sebesar Rp50.000.000,00. Dilakukan dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota melalui penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya sebanyak 1 unit.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target capaian konsumsi energi per kapita per hari sebanyak 2.100 kkal/kapita/hari; konsumsi protein per kapita per hari sebesar 87 gram/kapita/hari dengan Pagu Indikatif sebesar Rp638.000.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota sebanyak 2 unit; koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis sebanyak 4 laporan.
 - 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 20 ton.
 - 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan melakukan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun sebanyak 5 dokumen; pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebanyak 1 laporan.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan target capaian persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 8,52% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp55.000.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan melakukan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan target capaian Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 94% dengan pagu indikatif sebesar Rp.55.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota melalui rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan sebanyak 1 dokumen melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga Pangan pokok strategis sebanyak 1 dokumen; penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan sebanyak 1 dokumen.

4. Pertanahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan target capaian persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 81% dengan Pagu Indikatif Rp50.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebanyak 1 berita acara.
- b. Program Penatagunaan Tanah dengan target capaian jumlah fasilitasi pengadaan tanah dan jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan pagu indikatif Rp50.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target capaian Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp370.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen.
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelenggaraan KLHS rencana tata ruang sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target capaian persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu sebesar 58,33% dan persentase data kualitas air yang memenuhi mutu baku sebesar 54,17% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp725.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut sebanyak 2 kegiatan; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebanyak 1 kegiatan; Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 laporan; serta Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota sebanyak 250 dokumen.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) dengan target capaian Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan target sebesar 43,101 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp450.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati sebanyak 1 dokumen.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dengan target capaian persentase kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3 sebesar 30% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3 melalui pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 17 usaha.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan target capaian Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar 65% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp50.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 25 usaha/kegiatan.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan target jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 55 unit dengan Pagu Indikatif sebesar Rp228.188.000,00 dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup sebanyak 10 dokumen; penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup untuk 150 orang; serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH untuk lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat sebanyak 10 lembaga.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan target capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kabupaten/Kota melalui pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusak lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota sebanyak 12 pengaduan.

- h. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp18.680.898.600,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 3 Laporan; pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 1 berita acara.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 155 orang/bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 16 laporan;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 70 orang.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 dokumen; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 100 laporan.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 1 laporan; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 45 laporan; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan.
 - 15) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukab melalui pengadaan mebel sebanyak 10 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 5 unit.

- 16) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 17) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 26 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 5 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 3 unit.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk dengan target capaian persentase perekaman KTP elektronik sebesar 99,92%; persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 64%; Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 99,54%; dan Kepemilikan identitas kependudukan digital sebesar 20%. Pagu Indikatif sebesar Rp954.000.000,00 Pada program ini akan ditingkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik melalui kegiatan :
 - 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk sebanyak 75.000 dokumen; peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk sebanyak 12 laporan; serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan sebanyak 14.400 dokumen.
 - 2) Penataan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk sebanyak 2000 dokumen.
- b. Program Pencatatan Sipil dengan target capaian persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 99,3%; persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan sebesar 100%; persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan sebesar 100%; persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan sebesar 100%. Pagu Indikatif sebesar Rp19.500.000,00. Pada program ini dilakukan dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui pencatatan,

penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting sebanyak 32.000 dokumen; dan peningkatan dalam pelayanan catatan sipil sebanyak 4 layanan.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target capaian jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 80% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp341.900.000,0000. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan melakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan sebanyak 12 dokumen; serta kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebanyak 6 dokumen.
 - 2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan melakukan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi adminduk sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi kependudukan sebanyak 6 laporan; fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebanyak 12 laporan; sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebanyak 4 laporan; serta komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebanyak 2 laporan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan target capaian persentase data profil kependudukan yang disusun sebesar 100%. Pagu program ini sebesar Rp5.600.000,00 dilakukan dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan melalui penyediaan data kependudukan Kabupaten/ Kota sebanyak 1 dokumen serta penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain sebanyak 1 dokumen.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp6.244.173.400,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1

- dokumen; kordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineja SKPD sebanyak 4 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 35/ 14 orang/bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 3 laporan;
 - 3) Adminisrasi Kepegawaian Perangkat daerah dilakukan melalui bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 15 orang.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 2 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 3 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 14 laporan.
 - 5) Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan mebel sebanyak 1 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 1 unit.
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 48 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 33 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan target capaian Persentase desa yang melaksanakan kerjasama sebesar 18,39% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp92.150.000,00 Program ini dilakukan dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa melalui fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota sebanyak 14 dokumen; fasilitasi kerjasama antar dengan pihak ketiga dalam

kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen; serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan sebanyak 5 dokumen.

- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target capaian indeks tata kelola desa sebesar 9,3% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp3,272,865,000.00 dilakukan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebanyak 13 dokumen; fasilitasi penyusunan produk hukum desa sebanyak 12 dokumen; fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 1 dokumen; fasilitasi pengelolaan keuangan desa sebanyak 6 dokumen; pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 212 orang; penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebanyak 1 laporan; fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebanyak 2 laporan; fasilitasi penyusunan profil desa sebanyak 1 dokumen; fasilitasi manajemen pemerintahan desa sebanyak 1 dokumen; fasilitasi pengelolaan aset desa sebanyak 1 dokumen; pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD sebanyak 28 orang; fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa sebanyak 5 desa; fasilitasi pembinaan laporan kepala desa sebanyak 173 laporan; fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 2 dokumen.
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan target capaian Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebesar 6,89% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.205.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat sebanyak 2 dokumen; peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat sebanyak 4 lembaga; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PADesa sebanyak 4 dokumen; fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 2 laporan; fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat sebanyak 1 laporan; serta fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebanyak 14 dokumen.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk dengan target capaian Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sebesar 16,1%; dan Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK) sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp350.700.000,00, dilakukan dengan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target capaian persentase jumlah peserta KB/mCPR sebesar 70,95% dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 9,48% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.338.635.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN)) sebanyak 10 layanan; pemantauan dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebanyak 5 laporan/dokumen; pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 1 laporan.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target capaian persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp7.891.300.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melakukan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) sebanyak 2 laporan; orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) sebanyak 4 laporan.
 - 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui partisipasi mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program pembangunan keluarga sebanyak 1 laporan; pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK

(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebanyak 1 keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota sebesar 67,12%; rasio ijin trayek sebesar 0,82%; persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sebesar 68%dengan Pagu Indikatif sebesar Rp36.130.123.800,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan melakukan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota sebanyak 2 unit; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota sebanyak 12 unit; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 10 unit; serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 16 unit.
 - 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) sebanyak 1 unit.
 - 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota sebanyak 12 laporan.
 - 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1 unit; penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1000 dokumen; sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor; pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 3 unit
 - 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sebanyak 4 laporan; penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota sebanyak 2 laporan.
 - 6) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota dengan melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin.
 - 7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan melakukan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C sebanyak 4 laporan.

- 8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 kabupaten sebanyak 12 laporan.
- 9) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota; serta fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 3 unit;
- 10) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 kabupaten/kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan target capaian Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 80% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.775.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui relasi media sebanyak 15 laporan; pelayanan informasi publik serta dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa; sosialisasi/diseminasi informasi serta pengelolaan media komunikasi publik; pengelolaan pengaduan masyarakat; monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik sebanyak 2 rekomendasi; penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat; Penyusunan Konten sebanyak 1.800 konten.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target capaian Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 100%; persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 51% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp3.674.600.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi

dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE sebanyak 1 laporan; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas sebanyak 1 dokumen; penyediaan akses internet sebanyak 38 titik; koordinasi pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK sebanyak 2 dokumen; koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 1 layanan; penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah Kab/Kota 38 titik; koordinasi pemanfaatan pusat data nasional dan penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah sebanyak 1 laporan.

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp7.302.989.400,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 5 dokumen; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
 - 8) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 33 orang/bulan; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
 - 9) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dilakukan melalui pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 12 dokumen; sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian sebanyak 10 orang.
 - 10) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 10 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 30 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 paket, penyediaan bahan/material sebanyak 7 paket; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 15 laporan.
 - 11) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 6 unit.
 - 12) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.

- 13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 23 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 35 unit.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan target Persentase Koperasi Aktif sebesar 39,7% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp80.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota sebanyak 140 unit usaha.
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan target Persentase Koperasi Sehat sebesar 35,2% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp20.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi melalui tata kelola, profil risiko; kinerja keuangan, dan permodalan sebanyak 40 unit usaha.
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan target Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan sebesar 21,34% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp345.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebanyak 300 orang.
- d. Program Pemberdayaan UMKM dengan target capaian Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan sebesar 2,22% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp643.700.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM untuk 30 lembaga; Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha sebanyak 70 orang; serta Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha sebanyak 1 unit usaha.
- e. Program Pengembangan UMKM dengan target capaian persentase pertumbuhan UMKM sebesar 170,5% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp446.300.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala

Usaha Menjadi Usaha Kecil melalui Pembinaan dan Fasilitas Wirausaha Tematik sebanyak 40 orang; Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM sebanyak 2 unit usaha; serta Pembinaan dan Fasilitas Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri sebanyak 10 produk.

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp22.441.394.000,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD; penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilakukan melalui Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan bahan logistik kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - 14) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan mebel sebanyak 1 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 1 unit.
 - 15) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 48 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
 - 16) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 33 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit.

12. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target Realisasi Total terhadap Target Investasi sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.890.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan melakukan penyusunan rencana umum penanaman modal sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan target capaian Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp130.510.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen serta penyusunan strategi promosi penanaman modal sebanyak 2 dokumen.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan sebesar 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota melalui penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik sebanyak 4.000 pelaku usaha; penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko sebanyak 5 pelaku usaha; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko sebanyak 30 kegiatan usaha.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target capaian Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp81.210.000,00. Dilakukan dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha sebanyak 10 pelaku usaha; serta pengawasan penanaman modal sebanyak 60 kegiatan usaha.

- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target capaian persentase ketersediaan profil investasi sektor unggulan daerah sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp25.000.000,00. Dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 1 dokumen.
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.996.198.400,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 5) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
 - 6) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 31 orang/bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 1 laporan; penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen.
 - 7) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 634 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
 - 17) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 5 unit.
 - 18) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
 - 19) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan,

biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 29 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 31 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan target capaian Persentase Organisasi pemuda yang aktif sebesar 64,71%. Pagu indikatif program ini sebesar Rp192.999.900,00 dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten/kota sebanyak 20 orang; serta Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 organisasi.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan target capaian Cakupan Pembinaan Olahraga sebanyak 60,53%. Pagu program ini sebesar Rp1.363.000.000,00 dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sebanyak 200 orang; serta penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan melakukan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait sebanyak 1 kerja sama.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan target Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina sebesar 100%. Pagu program ini sebesar Rp100,00 dilakukan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan melalui

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah sebanyak 1 organisasi.

14. Statistik

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan target capaian persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 100% dan persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.135.000.000,00 Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas statistik sektorial sebanyak 100%; serta peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektorial untuk 100 orang.

15. Persandian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan target capaian Tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 36%. Pagu indikatif sebesar Rp361.300.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan sebanyak 5 laporan; serta pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik sebanyak 5 laporan.

16. Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan target persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 31,34% dan Pagu Indikatif sebesar Rp505.000.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebanyak 1 objek.
 - 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata tradisional sebanyak 1 laporan.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan target prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan sebesar 100% dengan pagu indikatif Rp450.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebanyak 5

orang.

- c. Program Pembinaan Sejarah dengan target persentase sejarah lokal yang dibina 10,53% dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal 85.912 orang. Pagu Indikatif sebesar Rp15.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota sebanyak 100 orang.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan target persentase cagar budaya yang teregistrasi 0,76% dan persentase warisan budaya yang dilestarikan 0,08%. Pagu Indikatif sebesar Rp150.450.000,00 dilakukan dengan melalui kegiatan:
 - 1) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota melalui penetapan cagar budaya sebanyak 1 objek.
 - 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota melalui perlindungan cagar budaya sebanyak 1 objek.

17. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan target capaian persentase perpustakaan terstandarisasi sebesar 15% dan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 67,9% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp783.894.200,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan pada 6 perpustakaan; pengembangan perpustakaan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 6 perpustakaan; Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 layanan; Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 150 orang; Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan sebanyak 4 dokumen; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan sebanyak 150 eksemplar; serta Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik sebanyak 1 perpustakaan.
 - 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan Pemilihan duta baca/ bunda baca/ bunda literasi tingkat daerah kabupaten/ kota sebanyak 1 orang, Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada 1 perpustakaan, Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota sebanyak 1 perpustakaan, Pemberian

penghargaan gerakan budaya gemar membaca bagi 170 orang, serta sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat pada 1 lokus.

- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan target capaian Jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan sebanyak 1 naskah dengan Pagu Indikatif sebesar Rp45.105.800,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno bagi 1 orang; serta Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan untuk 2 eksemplar.
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.293.201.300,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; kordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineja SKPD sebanyak 5 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 24 orang/ 14 bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 lapporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 3 laporan.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 12 paket; penyediaan bahan logistic kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
 - 4) Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 2 unit.

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 25 unit; pemeliharaan mebel sebanyak 6 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 30 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 3 unit.

18. Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip dengan target capaian Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan sebesar 75,68. Pagu Indikatif sebesar Rp115.312.095,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis sebanyak 5000 berkas; Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 37 lembaga; serta Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 24 instansi;
 - 2) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN bagi 20 pengguna serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota sebanyak 1 laporan.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan target capaian Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 36,7% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp8.687.905,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun melalui penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun terhadap 700 arsip.

- 2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota melalui evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana sebanyak 250 arsip.

5.2.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target capaian jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 18,069 Ton/Tahun dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.629.025.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, serta penyediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan kapasitas nelayan kecil; Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 - 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan melakukan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
 - 4) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target capaian Jumlah produksi perikanan Budidaya sebanyak 20.529 Ton/Tahun dengan Pagu Indikatif sebesar Rp794.545.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dengan melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil; pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil; pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; serta pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

- 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan melakukan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan; penyediaan prasarana pembudidayaan ikan; pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan; perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan target capaian Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi sebesar 2,79% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp191.220.000,00, dilakukan dengan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota melalui Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota; Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota; serta Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target capaian Jumlah produksi olahan hasil perikanan sebesar 12.739 Ton dengan Pagu Indikatif sebesar Rp213.780.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan melakukan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah kabupaten/kota berdasarkan skala usaha mikro.
 - 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan melakukan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko.
 - 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan target capaian jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

sebanyak 1.192.242 orang dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.530.750.902,00, program ini dilakukan melalui kegiatan:

- 1) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota dengan melakukan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebanyak 1 unit.
 - 2) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan melakukan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota sebanyak 1 lokasi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota sebanyak 1 unit; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota sebanyak 2 laporan.
- b. Program Pemasaran Pariwisata dengan target capaian Jumlah pengunjung media promosi online dan offline sebesar 24.356 orang. dengan pagu indikatif Rp750.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 1 dokumen; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan; penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri sebanyak 1 promosi
- c. Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan target capaian Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan mendaftarkan HKI sebanyak 50%. dengan pagu indikatif Rp450.000,00 dilakukan dengan kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi penguatan kekayaan intelektual sebanyak 1 kegiatan.
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan sebanyak 31% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp98.500.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebanyak 10 orang; monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 1 laporan.
 - 2) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif sebanyak 10 orang.
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi

100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp9.430.499.298,00, dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan; pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 1 beria acara.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 57 orang/ bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 lapporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 3 laporan.
- 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah melalui sosialisasi peraturan peundang-undangan sebanyak 1 orang.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 paket; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 30 laporan.
- 5) Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 1 unit.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 30 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 30 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target capaian produksi tanaman pangan sebanyak 605.784 Ton; produksi tanaman hortikultura sebanyak 303.426 Ton; produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan) sebanyak 1.156 Ton; serta populasi ternak sebanyak 3.938.245 ekor. Pagu indikatif program ini sebesar Rp3.712.420.400,00 dan dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi sebanyak 1 laporan; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 4 laporan; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 2 laporan; Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih sebanyak 2,8 ton; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura sebanyak 2 laporan; perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang sebanyak 4.500 batang.
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengujian mutu benih dan bibit ternak sebanyak 1 dokumen
 - 4) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota melalui pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target capaian persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT, DAM PARIT) sebesar 23,73% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp5.056.877.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya sebanyak 12 laporan.
 - 2) Pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani sebanyak 11 unit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana

pertanian lainnya; serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 10 unit.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target capaian tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 11,24% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp456.550.460,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 laporan.
 - 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) sebanyak 12 laporan.
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 12 laporan.
 - 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan melakukan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan sebanyak 4 laporan; serta pengawasan Unit Usaha Produk Hewan sebanyak 3 unit usaha.
 - 5) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha sebanyak 2.500 unit.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target capaian persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman pangan sebesar 50% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp309.502.600,00 dilakukan dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penanganan dampak perubahan iklim (OPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- e. Program Penyuluhan Pertanian dengan target capaian persentase kelompok tani utama sebesar 0,27% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp24.350.000,00 dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa sebanyak 1 unit.
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi

kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp21.814.842.595,00, dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 5 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 3 laporan.
- 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 20 orang.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.

4. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan target capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota melalui pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2) sebanyak 2 laporan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target capaian persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi sebesar 6,25%; dan Persentase ketersediaan data harga kebutuhan pokok dan barang penting sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp951.115.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan melakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan

sebanyak 1 unit; fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 10 unit.

- 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan melakukan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan sebanyak 17 dokumen.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target capaian Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sebesar 100%, Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 100%, dan Disparitas harga sebesar <10% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp568.439.400,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat sebanyak 12 laporan.
 - 2) Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebanyak 96 laporan; serta pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebanyak 2 laporan.
 - 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi sebanyak 12 laporan.
- d. Program Pengembangan Ekspor dengan target capaian cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor sebesar 48,15% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp35.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan citra produk ekspor sebanyak 12 produk.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan target persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebanyak 8,72% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp45.000.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang sebanyak 1.000 unit; serta pengawasan/penyuluhan metrologi legal untuk 36 orang.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan target capaian persentase promosi produk lokal yang

difasilitasi/dilaksanakan sebesar 52% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp280.445.600,00 yang dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten pada 3 UMKM.

5. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target capaian Persentase sentra industri terbina sebesar 15% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp197.300.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri sebanyak 3 dokumen; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri sebanyak 5 dokumen; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana industri sebanyak 5 dokumen; serta koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebanyak 14 dokumen.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan target capaian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebesar 10% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp18.500.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen; fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem *online single submission risk base approach* (OSS RBA) sebanyak 1 dokumen.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target capaian tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini sebesar 125% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp42.500.000,00. Program ini dilakukan dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas sebanyak 3 dokumen.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target capaian Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran sebesar 14,3% . Pagu indikatif program ini sebesar Rp30.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten/kota sebanyak 2 laporan, serta pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota untuk 1 kepala keluarga.

5.2.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNSUR PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan target capaian Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah sebesar 86; serta nilai SAKIP komponen Pelaporan sebesar 10,8. Pagu indikatif program sebesar ini Rp5.549.927.590,00 dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Penataan Organisasi dengan melakukan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan sebanyak 2 dokumen; fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana sebanyak 6 laporan; peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sebanyak 2 dokumen; monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah sebanyak 2 dokumen.
 - 2) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan melakukan fasilitasi keprotokolan sebanyak 12 laporan; fasilitasi komunikasi pimpinan sebanyak 12 laporan; serta pendokumentasian tugas pimpinan sebanyak 12 laporan.
 - 3) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 2 orang/bulan; penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 1 paket; serta pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 2 orang.
 - 4) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan melakukan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebanyak 1 paket; penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah sebanyak 1 paket; serta penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah sebanyak 1 paket.

- b. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan target capaian Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebesar 97,5%. Pagu indikatif program sebesar Rp200.000.000,00 ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan perekonomian melalui koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD sebanyak 6 dokumen; pengendalian dan distribusi perekonomian sebanyak 6 laporan; perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Pemantauan kebijakan sumber daya alam melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebanyak 2 dokumen; koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen; koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air sebanyak 2 dokumen.
 - 3) Pelaksanaan administrasi pembangunan melalui pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 laporan.
 - 4) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 25 dokumen; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebanyak 4 dokumen; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebanyak 20 orang.
- c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target Capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 82,5; persentase kebijakan di bidang tata pemerintahan yang dihasilkan sebesar 100%; persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan sebesar 100%. Pagu indikatif program ini sebesar Rp10.289.650.000.00 dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi engelolaan bina mental spiritual sebanyak 4 dokumen; pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebanyak 1 dokumen; pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat sebanyak 2 dokumen.
 - 2) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebanyak 550 dokumen; fasilitasi bantuan hukum sebanyak 2 kasus; serta pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum sebanyak 550 dokumen.
- k. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi

kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp27.223.642.339,00, dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 148 orang/ bulan; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 1 laporan.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah melalui penatausahaan barang milik negara pada SKPD sebanyak 1 laporan.
- 4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah melalui pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 2 paket; pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 1 dokumen; sosialisasi praturan perundang-undangan sebanyak 3 orang; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 13 orang.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 12 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit; pengadaan mebel sebanyak 10 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 1 unit.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor .
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 8 unit, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 150 unit; pemeliharaan mebel sebanyak 32

unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp42.489.964.410,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-DPA sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-DPA sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD sebanyak 18 laporan; .
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 42 orang/ bulan; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 12 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 1 laporan.
 - 3) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah melalui pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 12 paket; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 42 orang.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 27.612 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 12 dokumen
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional sebanyak 6 unit; pengadaan mebel sebanyak 2 unit; pengadaan peralatan mesin lainnya sebanyak 2 unit; pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit; pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan.
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 6 unit, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 46 unit; pemeliharaan mebel sebanyak 1 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit.
 - 8) Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD melalui penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD sebanyak 50 orang/bulan; penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD sebanyak 150 paket; pelaksanaan medical chek up sebanyak 50 orang
 - 9) Layanan administrasi DPRD melalui penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD sebanyak 4 dokumen; fasilitasi fraksi DPRD sebanyak 2 laporan; fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD sebanyak 2 laporan.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan dengan target capaian persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas sebesar 100,00%; persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas sebesar 100%; persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas sebesar 100%. Pagu indikatif program ini sebesar Rp4.748.482.990,00 dilakukan melalui kegiatan , dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan melakukan penyusunan dan pembahasan program sebanyak 7 dokumen; pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 4 dokumen; penyelenggaraan kajian perundang-undangan sebanyak 4 dokumen; fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik sebanyak 4 dokumen; serta penyusunan tata tertib DPRD sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan melakukan pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 dokumen; pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 dokumen; pembahasan APBD sebanyak 1 dokumen; pembahasan APBD perubahan sebanyak 1 dokumen; serta pembahasan pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan melakukan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum sebanyak 12 laporan; bidang infrastruktur sebanyak 12

laporan; bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 12 laporan; bidang perekonomian sebanyak 12 laporan; pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebanyak 1 dokumen; pengawasan penggunaan anggaran sebanyak 2 dokumen; serta pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebanyak 1 dokumen.

- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD dengan melakukan orientasi DPRD sebanyak 1 dokumen; pendalaman tugas DPRD sebanyak 18 dokumen; penyediaan kelompok pakar dan tim ahli sebanyak 6 orang; penyediaan tenaga ahli fraksi sebanyak 72 orang; penyelenggaraan hubungan masyarakat sebanyak 12 dokumen; penyusunan program kerja DPRD sebanyak 1 dokumen; publikasi dan dokumentasi DPRD sebanyak 18 dokumen
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 48 laporan; penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 dokumen; serta pelaksanaan reses sebanyak 3 laporan.
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan melakukan penyusunan kode etik DPRD sebanyak 1 dokumen; serta pengawasan kode etik DPRD sebanyak 6 laporan.
- 7) Fasilitasi Tugas DPRD dengan melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebanyak 96 dokumen; penyusunan laporan kinerja DPRD sebanyak 1 laporan; fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah sebanyak 6 dokumen; dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD sebanyak 24 dokumen.

5.2.5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNSUR PENUNJANG

1. Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target capaian Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai regulasi sebesar 100% dan Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi sebesar 100%. Pagu indikatif program ini sebesar Rp150.000.000,00 dan dilakukan dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan melalui koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah sebanyak 2 berita acara; pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota sebanyak 2 berita acara; serta Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen.
 - 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan analisis

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen; serta penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota sebanyak 1 buku.

- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 4 laporan.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebesar 100%, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 100%, Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%, Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebesar 100%, dan Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100%. Pagu Indikatif program sebesar Rp355.274.400,00 dan dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 40 dokumen; Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 26 laporan; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 5 laporan.
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 2 dokumen; Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 12 laporan; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian sebanyak 12 laporan.
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur sebanyak 10 laporan; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur

sebanyak 3 laporan; koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 2 dokumen; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 14 laporan.

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp7.046.358.000,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 7 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD sebanyak 9 laporan, evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 5 laporan;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 41 orang/ bulan; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 12 laporan; penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 2 dokumen.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah melalui penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik Daerah SKPD sebanyak 2 dokumen; realisasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 2 laporan.
 - 4) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 10 orang.
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 6 paket; penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 6 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 6 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 paket; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan; penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 2 dokumen.
 - 10) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa layanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
 - 11) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau

kendaraan dinas jabatan sebanyak 40 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 40 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit.

2. Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target capaian persentase penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan sebesar 100%; persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan sebesar 100%; persentase penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan sebesar 100% dengan Pagu Indikatif program sebesar Rp435.961.077.300,00 dan dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan melakukan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen; serta koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 4 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan melakukan koordinasi dan pengelolaan kas daerah sebanyak 24 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga sebanyak 12 laporan; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sebanyak 2 dokumen; serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 45 orang.
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan melakukan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 18 laporan; konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 2 dokumen.
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan sebanyak 12 laporan; pengelolaan dana

darurat dan mendesak sebanyak 12 laporan; pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota sebanyak 12 laporan.

- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan sebanyak 12 laporan; pengelolaan dana darurat dan mendesak sebanyak 12 laporan; serta pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota sebanyak 12 laporan.
 - 6) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan melakukan implementasi dan pemeliharaan SIPD bidang keuangan daerah sebanyak 1 dokumen; serta pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota sebanyak 45 orang.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target capaian Persentase pemanfaatan barang milik daerah sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp460.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan pengelolaan barang milik daerah melalui penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebanyak 2 dokumen; pengamanan barang milik daerah sebanyak 4 laporan; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sebanyak 100 dokumen; serta penyusunan laporan barang milik daerah sebanyak 1 laporan.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target capaian Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB) sebesar 20%; persentase piutang yang dibayarkan sebesar 10%; dan persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital sebesar 100%. Pagu Indikatif program sebesar Rp1.900.720.000,00 dan dilakukan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah sebanyak 2 dokumen; analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah sebanyak 1 dokumen; penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 4 laporan; penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sebanyak 2 unit; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 4 laporan; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah sebanyak 12 laporan; penilaian PBB perdesaan dan perkotaan serta BPHTB sebanyak 12 objek pajak; penetapan wajib pajak daerah sebanyak 12 dokumen; pelayanan dan konsultasi pajak daerah sebanyak 12 layanan; penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah sebanyak 12 dokumen; penagihan pajak daerah sebanyak 12 dokumen; penyelesaian keberatan pajak daerah sebanyak 12 dokumen; pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah sebanyak 12 dokumen; serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 12 laporan.

- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp19.542.833.144,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 57 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 100 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 57 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 10 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD sebanyak 1 laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 74 orang/ bulan; penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 10 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 1 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 6 unit.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 50 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 25 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 3 unit.

3. Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah dengan target capaian Persentase

Terpenuhinya ASN sebesar 77,39%; Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi sebesar 99,58%; Nilai IP ASN dimensi kualifikasi sebesar 21,72%; Persentase ASN yang terpetakan kompetensinya sebesar 21,69%; Persentase pegawai dengan SKP bernilai “Baik” sebesar 94,99%; serta Persentase layanan administrasi kepegawain yang menggunakan sistem informasi sebesar 92%%. Pagu Indikatif program sebesar Rp1.336.064.949,00 dan dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan mengadakan dengan melakukan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 3 dokumen; koordinasi pelaksanaan administrasi sebanyak 12 dokumen; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 3 dokumen; serta Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 3 dokumen.
- 2) Mutasi dan Promosi ASN dengan melakukan pengelolaan mutasi ASN sebanyak 100 dokumen; pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 1.000 dokumen; serta pengelolaan promosi ASN sebanyak 20 dokumen.
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN dengan melakukan pengelolaan *assessment center* sebanyak 95 dokumen; pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebanyak 100 orang; pembinaan jabatan fungsional ASN sebanyak 80 orang; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional sebanyak 20 orang.
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan melakukan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 dokumen; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai sebanyak 3 orang; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai untuk 10 orang; pembinaan disiplin ASN sebanyak 120 orang; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 12 laporan; pelayanan proses izin perceraian pegawai sebanyak 23 dokumen.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp17.982.711.281,00, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 19 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 14 laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 orang/ bulan; koordinasi dan

penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 2 laporan.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 350 orang.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 paket; penyediaan bahan logistic kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 dokumen; fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 4 laporan; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan; penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 4 dokumen; dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebanyak 12 dokumen.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah melalui pengadaan mebel sebanyak 1 set unit; pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 13 unit.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 32 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 69 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target capaian Nilai IP ASN dimensi kompetensi sebesar 37,8%. Pagu Indikatif program sebesar Rp337.690.370,00 dan dilakukan melalui kegiatan: pengembangan kompetensi teknis dengan melakukan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum sebanyak 1 dokumen; penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum sebanyak 257 orang;

- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan melakukan pelaksanaan kerja sama antar lembaga sebanyak 2 dokumen; penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan sebanyak 88 laporan; serta pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan sebanyak 1 dokumen.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program Riset dan Inovasi Daerah dengan target capaian Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termamfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah sebanyak 100%; persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah sebesar 100%; dan Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp140.000.000,00 dilakukan melalui kegiatan Inovasi dan Inovasi dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi sebanyak 1 laporan; fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebanyak 1 laporan; koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah sebanyak 11 kegiatan; fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat sebanyak 20 laporan; serta pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi sebanyak 2 laporan.

5.2.6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNSUR PENGAWAS

1. Inspektorat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan target capaian tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 sebesar 95%; dan Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan yang terealisasi sebesar - dengan Pagu Indikatif sebesar Rp1.020.000.000,00, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 12 laporan; pengawasan keuangan pemerintah daerah sebanyak 12 laporan; revidi laporan kinerja sebanyak 10 laporan; revidi laporan

- keuangan sebanyak 45 laporan; pengawasan desa sebanyak 12 laporan; kerja sama pengawasan internal sebanyak 12 kesepakatan; serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sebanyak 4 dokumen.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan melakukan penanganan penyelesaian kerugian sebanyak 6 laporan; pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 12 laporan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan target capaian persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi penyelenggaraan manajemen risiko/SPIP/pengendalian korupsi sebesar 100%; serta persentase asistensi/pendampingan tematik penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp705.000.000,00. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebanyak 3 rekomendasi.
 - 2) Pendampingan dan Asistensi dengan melakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah sebanyak 6 perangkat daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB sebanyak 26 perangkat daerah; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebanyak 39 perangkat daerah.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp13.999.228.200,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 20 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 84 orang/ bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 12 laporan.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 76 orang; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 84 orang.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 dokumen; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan; penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 12 dokumen.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 1 unit; pengadaan mebel sebanyak 8 unit; pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 8 unit.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan surat menyurat sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; pemeliharaan mebel sebanyak 12 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit.

5.2.7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun. Pagu indikatif program ini sebesar Rp238.937.960,00 dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif

dan Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan). Pagu indikatif program ini sebesar Rp4.444.817.070.00 dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani. Pagu indikatif program ini sebesar Rp116.790.000.00 dilakukan dengan kegiatan :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja Persentase konflik di masyarakat yang ditangani. Pagu indikatif program ini sebesar Rp906.711.418.00 dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD. Pagu program ini sebesar Rp470.753.200,00 dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi dengan Pagu Indikatif sebesar Rp53.284.607.852,00, dilakukan dengan kegiatan :
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.2.8. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target capaian persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara. Pagu Indikatif program sebesar Rp1.570.000.000,00 dan dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sebanyak 1 dokumen; pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sebanyak 100 orang; Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan untuk 100 orang; serta pembentukan paskibraka sebanyak 75 orang;
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target capaian Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 77,5% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp2.897.516.000,00 dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik melalui Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 5 dokumen; Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 7 dokumen; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 500 orang; serta Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 1 laporan.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target capaian Indeks Kinerja Ormas sebesar 72,5 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp595.000.000,00 dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 1 dokumen; Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 6 dokumen; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah untuk 250 orang; serta Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 100 orang.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 76 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp380.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah untuk 100 orang; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 100 orang; serta Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 2 laporan.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan target Indeks Kewaspadaan Nasional sebesar 7,5 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp435.000.000,00, dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 100 orang; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 2 laporan; serta Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 dokumen.

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Persentase Layanan Kepegawaian yang terpenuhi 100% dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.079.537.800,00, dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 laporan; evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 laporan.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 156 orang/ bulan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 14 laporan.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah melalui penatausahaan barang milik daerah sebanyak 4 laporan.
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 30 orang; sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 500 orang.
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 4 paket; penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 4 paket; penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 paket; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui; pengadaan mebel sebanyak 6 unit; pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 1 unit.
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan; penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; pemeliharaan mebel sebanyak 15 unit; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit; pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagunya termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2027

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Pendidikan		
Program Pengelolaan Pendidikan	227.994.197.000,00	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kurikulum	100.000.000,00	DINDIKPORA
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	200.000.000,00	DINDIKPORA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	843.506.082.112	DINDIKPORA
Kesehatan		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.561.833.270,00	DINKES
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.640.576.000,00	DINKES
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	184.853.000,00	DINKES
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat	1.038.092.730,00	DINKES
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	125.771.157.000,00	DINKES
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program Penyelenggaraan Jalan	47.109.989.550,00	DPUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	996.520.000,00	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	415.000.000,00	DPUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.000.000,00	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.000.000,00	DPUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	20.000.000,00	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.000.000,00	DPUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20.000.000,00	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	40.000.000,00	DPUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	10.000.000,00	DPUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.373.180.850	DPUPR
Perumahan Rakyat Dan Permukiman		
Program Pengembangan Perumahan	1.030.000.000,00	DPPKP
Program Kawasan Permukiman	5.100.000,00	DPPKP
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.220.000.000,00	DPPKP
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.809.250.000,00	DPPKP
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.850.000,00	DPPKP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.234.630.000,00	DPPKP
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	559.399.600,00	SATPOLPP dan DAMKAR
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.123.425.000,00	SATPOLPP dan DAMKAR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.609.267.800,00	SATPOLPP dan DAMKAR
Program Penanggulangan Bencana	1.345.000.600,00	BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.039.000,00	BPBD
Sosial		
Program Pemberdayaan Sosial	22.530.800,00	DINSOS KBPP
Program Rehabilitasi Sosial	353.500.300,00	DINSOS KBPP
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	201.490.100,00	DINSOS KBPP
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0,00	DINSOS KBPP
Program Penanganan Bencana	230.000.000,00	DINSOS KBPP
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.379.100,00	DINSOS KBPP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.565.507.100,00	DINSOS KBPP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Tenaga Kerja		
Program Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000,00	DTKPT
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	480.000.000,00	DTKPT
Program Penempatan Tenaga Kerja	755.080.850,00	DTKPT

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Hubungan Industrial	250.000.000,00	DTKPT
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.484.232.150,00	DTKPT
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	55.000.000,00	DINSOS KBPP
Program Perlindungan Perempuan	235.456.000,00	DINSOS KBPP
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	75.000.000,00	DINSOS KBPP
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.000.000,00	DINSOS KBPP
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5.000.000,00	DINSOS KBPP
Program Perlindungan Khusus Anak	287.541.000,00	DINSOS KBPP
Pangan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50.000.000,00	DISTANPARIK
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638.000.000,00	DISTANPARIK
Program Penanganan Kerawanan Pangan	55.000.000,00	DISTANPARIK
Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.000.000,00	DISTANPARIK
Pertanahan		
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000,00	DPPKP
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000,00	DPPKP
Lingkungan Hidup		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	370.000.000,00	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	725.000.000,00	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	450.000.000,00	DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	10.000.000,00	DLH
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000,00	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	12.700.800.000,00	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	228.188.000,00	DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.680.898.600,00	DLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program Pendaftaran Penduduk	954.000.000,00	DISDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil	19.500.000,00	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	341.900.000,00	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.600.000,00	DISDUKCAPIL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.244.173.400,00	DISDUKCAPIL
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Penataan Desa	391.850.000,00	DINPERMASDES
Program Peningkatan Kerja sama Desa	92.150.000.00	DINPERMASDES
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.272.865.000,00	DINPERMASDES
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.205.000.000,00	DINPERMASDES
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.636.575.600,00	DINPERMASDES
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Pengendalian Penduduk	350.700.000,00	DINSOS KBPP
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.338.635.000,00	DINSOS KBPP
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.891.300.000,00	DINSOS KBPP
Perhubungan		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	36.130.123.800,00	DPPKP
Komunikasi dan Informatika		
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.775.000.000,00	DISKOMINFO
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.674.600.000,00	DISKOMINFO
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.302.989.400,00	DISKOMINFO
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80.000.000,00	DISKUMDAG
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000,00	DISKUMDAG
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	345.000.000,00	DISKUMDAG
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	643.700.000,00	DISKUMDAG
Program Pengembangan UMKM	446.300.000,00	DISKUMDAG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.441.394.000,00	DISKUMDAG
Penanaman Modal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.890.000,00	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	130.510.000,00	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	75.000.000,00	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	81.210.000,00	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000,00	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.996.198.400,00	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olahraga		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	192.999.920,00	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.363.000.000,00	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00	DINDIKPORA
Statistik		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	135.000.000,00	DISKOMINFO
Persandian		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	361.300.000,00	DISKOMINFO
Kebudayaan		
Program Pengembangan Kebudayaan	505.000.000,00	DISPARBUD
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	450.000,00	DISPARBUD
Program Pembinaan Sejarah	15.000.000,00	DISPARBUD
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	150.450.000,00	DISPARBUD
Program Pengelolaan Permuseuman	450.000,00	DISPARBUD
Perpustakaan		
Program Pembinaan Perpustakaan	783.894.200,00	DINPERPUSKA
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	45.105.800,000	DINPERPUSKA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.293.201.300,00	DINPERPUSKA
Kearsipan		
Program Pengelolaan Arsip	115.312.095,00	DINPERPUSKA
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	8.687.905,00	DINPERPUSKA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Kelautan dan Perikanan		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.629.025.000,00	DISTANPARIK
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	794.545.000,00	DISTANPARIK
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	191.220.000,00	DISTANPARIK
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.780.000,00	DISTANPARIK
Pariwisata		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.530.750.902,00	DISPARBUD
Program Pemasaran Pariwisata	750.000,00	DISPARBUD
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	450.000,00	DISPARBUD
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	98.500.000,00	DISPARBUD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.430.499.298,00	DISPARBUD
Pertanian		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.712.420.400,00	DISTANPARIK
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.056.877.000,00	DISTANPARIK
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	456.550.460,00	DISTANPARIK
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	309.502.600,00	DISTANPARIK
Program Penyuluhan Pertanian	24.350.000,00	DISTANPARIK
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.814.842.595,00	DISTANPARIK
Perdagangan		
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000,00	DISKUMDAG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	951.115.000,00	DISKUMDAG
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	568.439.400,00	DISKUMDAG
Program Pengembangan Ekspor	35.000.000,00	DISKUMDAG
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	45.000.000,00	DISKUMDAG
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.445.600,00	DISKUMDAG
Perindustrian		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	197.300.000,00	DTKPT
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	18.500.000,00	DTKPT
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	42.500.000,00	DTKPT
Transmigrasi		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00	DTKPT
UNSUR PENDUKUNG		
Sekretariat Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.773.569.989,00	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.289.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Program Perekonomian dan Pembangunan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat DPRD		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.489.964.410,00	SEKRETARIAT DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.748.482.990,00	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG		
Perencanaan		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	150.000.000,00	BAPERIDA
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	355.274.400,00	BAPERIDA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.046.358.000,00	BAPERIDA
Keuangan		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	435.961.077.300,00	BPKPAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	460.000.000,00	BPKPAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.900.720.000,00	BPKPAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.542.833.144,00	BPKPAD
Kepegawaian		
Program Kepegawaian Daerah	1.336.064.949,00	BKPSDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.982.711.281,00	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	337.690.370,00	BKPSDM
Penelitian dan Pengembangan		
Program Riset dan Inovasi Daerah	140.000.000,00	BAPPERIDA
UNSUR PENGAWAS		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Inspektorat Daerah		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.020.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	705.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.999.228.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN		
Kecamatan Comal		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.000.060,00	KECAMATAN COMAL
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	459.500.000,00	KECAMATAN COMAL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	89.000.000,00	KECAMATAN COMAL
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.235.000,00	KECAMATAN COMAL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.010.467.940,00	KECAMATAN COMAL
Kecamatan Taman		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.460.000,00	KECAMATAN TAMAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	809.194.000,00	KECAMATAN TAMAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	49.800.200,00	KECAMATAN TAMAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.255.000,00	KECAMATAN TAMAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.415.084.600,00	KECAMATAN TAMAN
Kecamatan Moga		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.500.000,00	KECAMATAN MOGA
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.000.000,00	KECAMATAN MOGA
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	KECAMATAN MOGA
Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	94.000.000,00	KECAMATAN MOGA
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.000.000,00	KECAMATAN MOGA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.184.524.000,00	KECAMATAN MOGA
Kecamatan Ampelgading		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.800.000,00	KECAMATAN AMPELGADING
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.700.000,00	KECAMATAN AMPELGADING

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000,00	KECAMATAN AMPELGADING
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.520.000,00	KECAMATAN AMPELGADING
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.000.000,00	KECAMATAN AMPELGADING
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.433.489.600,00	KECAMATAN AMPELGADING
Kecamatan Bodeh		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000,00	KECAMATAN BODEH
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.700.000,00	KECAMATAN BODEH
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	KECAMATAN BODEH
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.480.000,00	KECAMATAN BODEH
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.800.000,00	KECAMATAN BODEH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.249.354.600,00	KECAMATAN BODEH
Kecamatan Belik		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.150.000,00	KECAMATAN BELIK
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.086.500,00	KECAMATAN BELIK
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.075.000,00	KECAMATAN BELIK
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.225.000,00	KECAMATAN BELIK
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.474.000,00	KECAMATAN BELIK
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.609.040.500,00	KECAMATAN BELIK
Kecamatan Ulujami		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.000.000,00	KECAMATAN ULUJAMI
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.498.000,00	KECAMATAN ULUJAMI
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.500.000,00	KECAMATAN ULUJAMI
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.658.000,00	KECAMATAN ULUJAMI
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.500.000,00	KECAMATAN ULUJAMI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.434.165.200,0	KECAMATAN ULUJAMI
Kecamatan Pulosari		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.135.800,00	KECAMATAN PULOSARI
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.392.800,00	KECAMATAN PULOSARI

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	KECAMATAN PULOSARI
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.908.000,00	KECAMATAN PULOSARI
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.697.200,00	KECAMATAN PULOSARI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.279.043.600,00	KECAMATAN PULOSARI
Kecamatan Watukumpul		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	57.783.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.170.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.352.462.400,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
Kecamatan Pemalang		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.254.600,00	KECAMATAN PEMALANG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.230.419.350,00	KECAMATAN PEMALANG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.465.000,00	KECAMATAN PEMALANG
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59.067.600,00	KECAMATAN PEMALANG
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.042.000,00	KECAMATAN PEMALANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.907.217.850,00	KECAMATAN PEMALANG
Kecamatan Randudongkal		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	104.062.400,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59.500.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.000.000,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.741.770.600,00	KECAMATAN RANDUDONGKAL
Kecamatan Warungpring		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.457.500,00	KECAMATAN WARUNGPRING
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.990.400,00	KECAMATAN WARUNGPRING

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	KECAMATAN WARUNGPRING
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.969.618,00	KECAMATAN WARUNGPRING
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.700.000,00	KECAMATAN WARUNGPRING
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.744.250.682,00	KECAMATAN WARUNGPRING
Kecamatan Bantarbolang		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.000.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.00000	KECAMATAN BANTARBOLANG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	69.113.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.750.000,00	KECAMATAN BANTARBOLANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.650.651.400,00	KECAMATAN BANTARBOLANG
Kecamatan Petarukan		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.180.000,00	KECAMATAN PETARUKAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	419.490.620,00	KECAMATAN PETARUKAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.550.000,00	KECAMATAN PETARUKAN
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.300.000,00	KECAMATAN PETARUKAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.300.000,00	KECAMATAN PETARUKAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.212.244.880,00	KECAMATAN PETARUKAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.570.000.000,00	KESBANGPOL
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.897.516.000,00	KESBANGPOL
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	595.000.000,00	KESBANGPOL
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	380.000.000,00	KESBANGPOL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	435.000.000,00	KESBANGPOL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.079.537.800,00	KESBANGPOL

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bagian Tata Pemerintahan						200.000.000,00							615.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00							615.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00							615.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						10.289.650.000,00							21.537.000.000,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	615.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						162.500.000,00					-		484.000.000,00	
		-						162.500.000,00					-		484.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	88.500.000,00						-	290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	71.000.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	3.000.000,00						-	24.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						71.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	8 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	170.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						3.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	24.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						88.500.000,00							290.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	3 Dokumen	88.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	290.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						37.500.000,00					-		131.000.000,00	
		-						37.500.000,00					-		131.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	34.500.000,00						-	111.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-		-	-	2.000.000,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						34.500.000,00							111.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	10 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	111.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						2.000.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	14.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
		Bagian Umum						32.323.569.989,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32.323.569.989,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						32.323.569.989,00							0,00	
2.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.773.569.989,00							1.309.000.000,00	
			-	-		-	-	32.033.569.989,00						-	0,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.086.012.092,00					-		0,00	
		-						22.086.012.092,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	24.548.092,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	6.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	4.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	22.050.264.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.050.264.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	148 Orang/bulan	22.050.264.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24.548.092,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	24.548.092,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	6.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	4.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.500.000,00					-		0,00	
		-						5.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.500.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		0,00	
		-						60.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	13 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.076.500.000,00					-		0,00	
		-						1.076.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	550.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	101.600.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	34.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						101.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	101.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						550.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	550.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						72.514.000,00					-		0,00	
		-						72.514.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	39.514.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.514.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	39.514.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	18.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.695.380.000,00					-		0,00	
		-						2.695.380.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.420.380.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.420.380.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	1.420.380.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.221.836.307,00					-		0,00	
		-						1.221.836.307,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	750.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	319.690.000,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	77.146.307,00						-	0,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						319.690.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	319.690.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						750.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	150 Unit	750.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	32 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						77.146.307,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	78 Unit	77.146.307,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.255.827.590,00					-		0,00	
		-						1.255.827.590,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.005.827.590,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.005.827.590,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	2 Orang/Bulan	1.005.827.590,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah						3.850.000.000,00					-		0,00	
		-						3.850.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	-	1.750.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	-	-	600.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	-	1.500.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.750.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1.750.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1.500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						600.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	600.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Bagian Umum
		Bagian Organisasi						200.000.000,00							809.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00							809.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00							809.000.000,00	
3.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.773.569.989,00							1.309.000.000,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	809.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.900.000,00					-		47.000.000,00	
		-						5.900.000,00					-		47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.900.000,00						-	47.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.900.000,00							47.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	47.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						194.100.000,00					-		762.000.000,00	
		-						194.100.000,00					-		762.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	43.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	6.600.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	80.700.000,00						-	325.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	42.650.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	21.150.000,00						-	170.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						80.700.000,00							325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	2 Dokumen	80.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	325.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						21.150.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	6 Laporan	21.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	170.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						42.650.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	2 Dokumen	42.650.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	110.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						6.600.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	52.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						43.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	105.000.000,00	Bagian Organisasi
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						9.862.650.000,00							20.285.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						9.862.650.000,00							20.285.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						9.862.650.000,00							20.285.000.000,00	
4.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						10.289.650.000,00							21.537.000.000,00	
			-	-		-	-	9.812.650.000,00						-	20.285.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						9.862.650.000,00					-		20.285.000.000,00	
		-						9.862.650.000,00					-		20.285.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	9.762.650.000,00						-	20.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	-	-		50.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-		50.000.000,00						-	110.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						9.762.650.000,00							20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	4 Dokumen	9.762.650.000,00	Kab. Pemalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						50.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	110.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						50.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	-	-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	175.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Bagian Hukum						227.000.000,00							637.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						227.000.000,00							637.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						227.000.000,00							637.000.000,00	
5.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						10.289.650.000,00							21.537.000.000,00	
			-	-		-	-	227.000.000,00						-	637.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						227.000.000,00					-		637.000.000,00	
		-						227.000.000,00					-		637.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	77.000.000,00						-	167.295.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00						-	250.277.500,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	50.000.000,00						-	219.427.500,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						100.000.000,00							250.277.500,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	550 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	250.277.500,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						77.000.000,00							167.295.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	2 Kasus	77.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	167.295.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						50.000.000,00							219.427.500,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	550 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	219.427.500,00	Bagian Hukum
		Bagian Perekonomian dan SDA						50.000.000,00							524.200.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.000.000,00							524.200.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						50.000.000,00							524.200.000,00	
6.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						200.000.000,00							1.074.200.000,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	524.200.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						39.540.000,00					-		453.200.000,00	
		-						39.540.000,00					-		453.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	34.000.000,00						-	388.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	2.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	3.540.000,00						-	45.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						34.000.000,00							388.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	5 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	388.200.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						3.540.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	6 Laporan	3.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	45.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						2.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						10.460.000,00					-		71.000.000,00	
		-						10.460.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	-	4.080.000,00						-	14.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	-	1.920.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	-	4.460.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						4.460.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	2 Dokumen	4.460.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	50.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						1.920.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	1 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.500.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						4.080.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	2 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	14.500.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						250.000.000,00							500.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						250.000.000,00							500.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						250.000.000,00							500.000.000,00	
7.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.773.569.989,00							1.309.000.000,00	
			-	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						250.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	95.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	48.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	107.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						95.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						48.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						107.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	12 Laporan	107.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00							550.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						150.000.000,00							550.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						150.000.000,00							550.000.000,00	
8.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						200.000.000,00							1.074.200.000,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	550.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						30.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	30.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						120.000.000,00					-		450.000.000,00	
		-						120.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	60.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	10.000.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						60.000.000,00							180.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	4 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	180.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	0 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
	J U M L A H							43.263.219.989,00							23.920.200.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekretariat DPRD						47.238.447.400,00							72.221.612.335,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						47.238.447.400,00							72.221.612.335,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						47.238.447.400,00							72.221.612.335,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						42.489.964.410,00							52.646.673.960,00	
			-	-		-	-	42.188.964.410,00						-	52.066.149.960,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.881.600,00					-		22.609.000,00	
		-						5.881.600,00					-		22.609.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	402.200,00						-	1.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.338.200,00						-	5.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	562.400,00						-	2.226.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	566.000,00						-	1.590.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	599.800,00						-	2.371.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.389.600,00						-	5.494.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.023.400,00						-	4.047.500,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.338.200,00							5.290.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.338.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.290.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						599.800,00							2.371.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	599.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.371.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						566.000,00							1.590.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	566.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.590.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						402.200,00							1.590.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	402.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.590.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						562.400,00							2.226.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	562.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.226.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.389.600,00							5.494.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	18 Laporan	1.389.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.494.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.023.400,00							4.047.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	1.023.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.047.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.268.566.586,00					-		6.276.379.500,00	
		-						6.268.566.586,00					-		6.276.379.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.251.746,00						-	4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	546.240,00						-	2.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	846.600,00						-	3.347.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.265.922.000,00						-	6.265.922.000,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.265.922.000,00							6.265.922.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	42 Orang/bulan	6.265.922.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.265.922.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.251.746,00							4.950.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	1.251.746,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.950.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						546.240,00							2.160.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	546.240,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.160.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						846.600,00							3.347.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	846.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.347.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						58.980.682,00					-		257.296.000,00	
		-						58.980.682,00					-		257.296.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	332.802,00						-	1.316.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	57.147.880,00						-	225.980.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.500.000,00						-	30.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1.500.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	12 Paket	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	30.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						332.802,00							1.316.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1 Dokumen	332.802,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.316.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						57.147.880,00							225.980.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	42 Orang	57.147.880,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	225.980.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						207.421.868,00					-		975.684.000,00	
		-						207.421.868,00					-		975.684.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	37.258.152,00						-	147.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	1.457.653,00						-	25.764.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	6.322.228,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	60.709.746,00						-	300.415.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	54.434.898,00						-	199.247.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	27.341.611,00						-	199.247.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12.644.088,00						-	49.998.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	7.253.492,00						-	28.682.500,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.644.088,00							49.998.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	12.644.088,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	49.998.500,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.253.492,00							28.682.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	7.253.492,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	28.682.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54.434.898,00							199.247.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	54.434.898,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	199.247.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.341.611,00							199.247.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	27.341.611,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	199.247.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						37.258.152,00							147.330.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	27612 Dokumen	37.258.152,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	147.330.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.322.228,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	6.322.228,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.709.746,00							300.415.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	60.709.746,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	300.415.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.457.653,00							25.764.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	1.457.653,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.764.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.341.156,00					-		6.102.333.150,00	
		-						5.341.156,00					-		6.102.333.150,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	227.600,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	1.063.379,00						-	1.020.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.806.388,00						-	4.087.445.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	243.789,00						-	91.621.860,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	643.266.290,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.806.388,00							4.087.445.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	6 Unit	1.806.388,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.087.445.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.063.379,00							1.020.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	1.063.379,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.020.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						227.600,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	227.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	60.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						243.789,00							91.621.860,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	243.789,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	91.621.860,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							643.266.290,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	643.266.290,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						974.919.588,00					-		1.804.523.000,00	
		-						974.919.588,00					-		1.804.523.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	775.950.000,00						-	875.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	193.482.400,00						-	876.884.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.487.188,00						-	51.689.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.487.188,00							51.689.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.487.188,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	51.689.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						775.950.000,00							875.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	775.950.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	875.950.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						193.482.400,00							876.884.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	193.482.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	876.884.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						456.944.603,00					-		1.983.651.310,00	
		-						456.944.603,00					-		1.983.651.310,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	56.415.766,00						-	513.889.060,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	150.000.000,00						-	345.322.300,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	150.000.000,00						-	365.065.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	10.112.372,00						-	379.687.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	90.416.465,00						-	379.687.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							365.065.950,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	365.065.950,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							345.322.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	46 Unit	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	345.322.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.112.372,00							379.687.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	1 Unit	10.112.372,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	379.687.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.416.465,00							379.687.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	90.416.465,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	379.687.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						56.415.766,00							513.889.060,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	56.415.766,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	513.889.060,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						34.355.170.856,00					-		34.595.866.000,00	
		-						34.355.170.856,00					-		34.595.866.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	34.277.083.000,00						-	34.277.083.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	18.980.592,00						-	85.055.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	59.107.264,00						-	233.728.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						34.277.083.000,00							34.277.083.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	50 Orang/Bulan	34.277.083.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	34.277.083.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						59.107.264,00							233.728.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	150 Paket	59.107.264,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	233.728.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						18.980.592,00							85.055.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	50 Orang	18.980.592,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	85.055.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						156.737.471,00					-		628.332.000,00	
		-						156.737.471,00					-		628.332.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	-	4.083.400,00						-	56.147.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	-	2.654.071,00						-	20.495.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	-	150.000.000,00						-	551.690.000,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						4.083.400,00							56.147.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	4 Dokumen	4.083.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	56.147.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						2.654.071,00							20.495.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	2 Laporan	2.654.071,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.495.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						150.000.000,00							551.690.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	551.690.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.748.482.990,00							19.574.938.375,00	
			-	-		-	-	4.698.630.962,00						-	19.348.808.375,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						635.632.976,00					-		2.730.871.850,00	
		-						635.632.976,00					-		2.730.871.850,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	344.936.944,00						-	1.363.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	7.080.895,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	31.562.204,00						-	124.806.500,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	-	237.565.207,00						-	1.156.791.500,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	-	14.487.726,00						-	57.288.850,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						7.080.895,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	7 Dokumen	7.080.895,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	28.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						344.936.944,00							1.363.985.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	4 Dokumen	344.936.944,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.363.985.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						237.565.207,00							1.156.791.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	4 Dokumen	237.565.207,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.156.791.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						31.562.204,00							124.806.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	4 Dokumen	31.562.204,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	124.806.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						14.487.726,00							57.288.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	14.487.726,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	57.288.850,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						50.759.900,00					-		200.720.000,00	
		-						50.759.900,00					-		200.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	12.022.348,00						-	47.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	12.022.348,00						-	47.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	7.346.428,00						-	29.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	12.022.348,00						-	47.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	7.346.428,00						-	29.050.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						7.346.428,00							29.050.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	1 Dokumen	7.346.428,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	29.050.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						7.346.428,00							29.050.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	1 Dokumen	7.346.428,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	29.050.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						12.022.348,00							47.540.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	1 Dokumen	12.022.348,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	47.540.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						12.022.348,00							47.540.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	1 Dokumen	12.022.348,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	47.540.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						12.022.348,00							47.540.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	1 Dokumen	12.022.348,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	47.540.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						208.797.508,00					-		825.648.500,00	
		-						208.797.508,00					-		825.648.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	11.278.854,00						-	44.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	-	3.161.114,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	7.333.784,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	9.230.452,00						-	36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	-	9.230.452,00						-	36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	9.230.452,00						-	36.500.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	159.332.400,00						-	630.048.500,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						9.230.452,00							36.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	12 Laporan	9.230.452,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	36.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						7.333.784,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	12 Laporan	7.333.784,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	29.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						9.230.452,00							36.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	12 Laporan	9.230.452,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	36.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						9.230.452,00							36.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	12 Laporan	9.230.452,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	36.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						3.161.114,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	1 Dokumen	3.161.114,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						11.278.854,00							44.600.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	2 Dokumen	11.278.854,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	44.600.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						159.332.400,00							630.048.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	159.332.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	630.048.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						936.483.516,00					-		3.057.919.400,00	
		-						936.483.516,00					-		3.057.919.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	545.942.181,00						-	2.158.820.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	-	8.179.698,00						-	32.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	151.191.496,00						-	597.856.900,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	2.654.577,00						-	10.497.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	-	10.115.564,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	-	218.400.000,00						-	218.400.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						545.942.181,00							2.158.820.500,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	18 Dokumen	545.942.181,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.158.820.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						10.115.564,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	6 Orang	10.115.564,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						218.400.000,00							218.400.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	72 Orang	218.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	218.400.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						8.179.698,00							32.345.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	12 Dokumen	8.179.698,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	32.345.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						2.654.577,00							10.497.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	1 Dokumen	2.654.577,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.497.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						151.191.496,00							597.856.900,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	18 Dokumen	151.191.496,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	597.856.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						633.688.000,00					-		3.729.722.725,00	
		-						633.688.000,00					-		3.729.722.725,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	619.500.000,00						-	3.674.242.725,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	2.788.000,00						-	10.980.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	11.400.000,00						-	44.500.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						11.400.000,00							44.500.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	48 Laporan	11.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	44.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						2.788.000,00							10.980.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	2.788.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.980.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						619.500.000,00							3.674.242.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	3 Dokumen	619.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.674.242.725,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						5.571.090,00					-		22.004.500,00	
		-						5.571.090,00					-		22.004.500,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	-	2.773.890,00						-	11.004.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	2.797.200,00						-	11.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						2.773.890,00							11.004.500,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	1 Dokumen	2.773.890,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	11.004.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						2.797.200,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	1 Laporan	2.797.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	11.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.277.550.000,00					-		9.008.051.400,00	
		-						2.277.550.000,00					-		9.008.051.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	7.310.000,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	-	219.200.000,00						-	868.161.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	2.049.728.000,00						-	8.105.745.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	1.312.000,00						-	5.145.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						2.049.728.000,00							8.105.745.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	96 Dokumen	2.049.728.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	8.105.745.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						1.312.000,00							5.145.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	1 Laporan	1.312.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.145.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						7.310.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	6 Dokumen	7.310.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	29.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						219.200.000,00							868.161.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	24 Dokumen	219.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	868.161.400,00	Sekretariat DPRD
	J U M L A H							47.238.447.400,00							72.221.612.335,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Inspektorat						15.724.228.200,00							250.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.724.228.200,00							250.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						15.724.228.200,00							250.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.999.228.200,00							0,00	
			Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	-		-	100 %	405.000.000,00						-	0,00	
			Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah	-		-	100 %	752.895.200,00						-	0,00	
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan	-		-	100 %	12.383.133.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.200.000,00					-		0,00	
		-						21.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	20 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.525.133.000,00					-		0,00	
		-						11.525.133.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.200.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	-	-	-	1.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	11.522.733.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.522.733.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	84 Orang/bulan	11.522.733.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	-	-	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						752.895.200,00					-		0,00	
		-						752.895.200,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	552.895.200,00						-	0,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						552.895.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	76 Orang	552.895.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	84 Orang	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						660.000.000,00					-		0,00	
		-						660.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.000.000,00					-		0,00	
		-						90.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.000.000,00					-		0,00	
		-						265.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						685.000.000,00					-		0,00	
		-						685.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	280.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						280.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	280.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	12 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.020.000.000,00							250.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	-		-	100 %	840.000.000,00						-	250.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						820.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						820.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	140.000.000,00						-	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	110.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						110.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	110.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						140.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	140.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						90.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	10 Laporan	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	45 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	12 Kesepakatan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						80.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	4 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						200.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	120.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						80.000.000,00							0,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	6 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						120.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						705.000.000,00							0,00	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi dalam perumusan kebijakan daerah	-		-	100 %	555.000.000,00						-	0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						75.000.000,00					-		0,00	
		-						75.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						75.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	3 Rekomendasi	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						630.000.000,00					-		0,00	
		-						630.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	130.000.000,00						-	0,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						130.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	6 perangkat daerah	130.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	26 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	14 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	39 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Inspektorat
	J U M L A H							15.724.228.200,00							250.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						1.073.356.279.112,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.071.800.279.112,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.071.800.279.112,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						843.506.082.112,00							0,00	
			-	-		-	-	843.506.082.112,00						-	0,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						349.816.760,00					-		0,00	
		-						349.816.760,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.933.200,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	310.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.758.780,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	6.544.200,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.732.080,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	6.126.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	8.722.000,00						-	0,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.758.780,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	6.758.780,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.126.500,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	6.126.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.732.080,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.732.080,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.933.200,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.933.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.544.200,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	6.544.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.722.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	8.722.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						310.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	310.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						841.784.722.812,00					-		0,00	
		-						841.784.722.812,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	37.096.900,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	6.665.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	8.388.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	841.732.572.112,00						-	0,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						841.732.572.112,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	7809 Orang/bulan	841.732.572.112,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						37.096.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	61 Dokumen	37.096.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.665.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	6.665.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.388.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	8.388.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						75.159.540,00					-		0,00	
		-						75.159.540,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	75.159.540,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						75.159.540,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	75.159.540,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						601.158.000,00					-		0,00	
		-						601.158.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	21.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	169.384.500,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	31.188.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.328.500,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	40.357.000,00						-	0,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.328.500,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	17.328.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	21.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						40.357.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.357.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						169.384.500,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	169.384.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.188.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	31.188.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						21.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	21.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49.100.000,00					-		0,00	
		-						49.100.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	49.100.000,00						-	0,00	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	49.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						369.510.000,00					-		0,00	
		-						369.510.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	368.510.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						368.510.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	368.510.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276.615.000,00					-		0,00	
		-						276.615.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	155.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	20.025.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	71.590.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	56 Unit	155.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.025.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	15 Unit	20.025.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71.590.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	71.590.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						227.994.197.000,00							0,00	
			-	-		-	-	226.494.197.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						133.246.897.000,00					-		0,00	
		-						133.246.897.000,00					-		0,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	10.607.197.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	3.025.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	418.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	117.421.700.000,00						-	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	450.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	3 Paket	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						450.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	500 Peserta Didik	450.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						10.607.197.000,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	2500 Orang	10.607.197.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						117.421.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	742 Satuan Pendidikan	117.421.700.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						250.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	742 Orang	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.025.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	23 Unit	3.025.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						418.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	742 Satuan Pendidikan	418.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						500.000.000,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	725 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						60.842.700.000,00					-		0,00	
		-						60.842.700.000,00					-		0,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	1.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	913.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	2.150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	56.129.700.000,00						-	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	16 Unit	2.150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						1.000.000.000,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	3098 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						500.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	1795 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						56.129.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	122 Satuan Pendidikan	56.129.700.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						150.000.000,00							0,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	122 Orang	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						913.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	122 Satuan Pendidikan	913.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						21.147.900.000,00					-		0,00	
		-						21.147.900.000,00					-		0,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	19.167.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	-	222.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	-	668.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	590.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						668.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	7 Unit	668.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						0,00							0,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	2 Paket	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						222.600.000,00							0,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	1 Paket	222.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	795 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						19.167.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	795 Satuan Pendidikan	19.167.300.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						590.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Unit	590.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						12.756.700.000,00					-		0,00	
		-						12.756.700.000,00					-		0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	737.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	2.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	10.019.700.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	18 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						10.019.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	18 Satuan Pendidikan	10.019.700.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						737.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	2800 Peserta Didik	737.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						100.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						100.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						100.000.000,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	1000 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						200.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.556.000.000,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.556.000.000,00							0,00	
5.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						192.999.900,00							0,00	
			-	-		-	-	192.999.900,00						-	0,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						126.799.900,00					-		0,00	
		-						126.799.900,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	31.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	95.799.900,00						-	0,00	
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota						95.799.900,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	20 Orang	95.799.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						31.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						66.200.000,00					-		0,00	
		-						66.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	66.200.000,00						-	0,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						66.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	66.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.363.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	1.363.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah sentra pembinaan olahraga prestasi yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.19.03.2.01.0008	Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah sentra pembinaan olahraga prestasi yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	-	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.207.000.000,00					-		0,00	
		-						1.207.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	800.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	407.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						407.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	200 Orang	407.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						800.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	800.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	10 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0014	Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						156.000.000,00					-		0,00	
		-						156.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	156.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						156.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	156.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						100,00							0,00	
			-	-		-	-	100,00						-	0,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						100,00					-		0,00	
		-						100,00					-		0,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	100,00						-	0,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						100,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	J U M L A H							1.073.356.279.112,00							0,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						14.732.300.200,00							14.773.238.765,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						671.350.000,00							3.073.261.838,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						671.350.000,00							3.073.261.838,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						505.000.000,00							1.320.530.440,00	
			Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	-		-	31,34 %	505.000.000,00						-	1.320.530.440,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						370.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		920.530.440,00	
		-						370.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		920.530.440,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	370.000.000,00						-	920.530.440,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						370.000.000,00							920.530.440,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	6 Objek	370.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata		-	920.530.440,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		400.000.000,00	
		-						135.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	-	135.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						135.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	3 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	400.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL						450.000,00							48.000.000,00	
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	-		-	100 %	450.000,00						-	48.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		48.000.000,00	
		-						450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		48.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	-	450.000,00						-	48.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						450.000,00							48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	5 Orang	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	48.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						15.000.000,00							46.364.460,00	
			Persentase sejarah lokal yang dibina	-		-	10,53 %	15.000.000,00						-	46.364.460,00	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-		-	85912 Orang	15.000.000,00						-	46.364.460,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		46.364.460,00	
		-						15.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		46.364.460,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	-	15.000.000,00						-	46.364.460,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						15.000.000,00							46.364.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	100 Orang	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	46.364.460,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						150.450.000,00							1.657.916.938,00	
			Persentase cagar budaya yang teregistrasi	-		-	0,76 %	150.450.000,00						-	1.507.916.938,00	
			Presentase warisan budaya yang ditetapkan	-		-	0,08 %	150.450.000,00						-	1.507.916.938,00	
			-	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						0,00					-		150.000.000,00	
		-						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	1 Objek	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	150.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						150.450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		1.507.916.938,00	
		-						150.450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		1.507.916.938,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	150.450.000,00						-	1.507.916.938,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						150.450.000,00							1.507.916.938,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-		3 Objek	150.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P1. Pengembangan pariwisata		-	1.507.916.938,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						450.000,00							450.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara	-	-		1 Unit	450.000,00						-	450.000,00	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	-	-		0 %	450.000,00						-	450.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		450.000,00	
		-						450.000,00					Masyarakat, Pelaku Seni Budaya		450.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-	-		-	450.000,00						-	450.000,00	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						450.000,00							450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-	-		1 Unit	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	450.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						14.060.950.200,00							11.699.976.927,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14.060.950.200,00							11.699.976.927,00	
6.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.430.499.298,00							10.309.042.794,00	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	8.988.816.700,00						-	8.641.438.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	441.682.598,00						-	1.465.604.794,00	
			-	-		-	-	0,00						-	201.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.818.000,00					Pegawai		78.203.000,00	
		-						13.818.000,00					Pegawai		78.203.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.430.000,00						-	1.458.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.277.000,00						-	3.127.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-		3.375.000,00						-	3.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-		3.202.000,00						-	2.825.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-		2.224.000,00						-	1.732.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-		1.310.000,00						-	3.019.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		0,00						-	20.420.000,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.277.000,00							3.127.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen		2.277.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.127.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.224.000,00							1.732.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen		2.224.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.732.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.202.000,00							2.825.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	3.202.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.825.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.430.000,00							1.458.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.430.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.458.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.375.000,00							3.020.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	3.375.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.020.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.310.000,00							3.019.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	1.310.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.019.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							20.420.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.420.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							42.600.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	42.600.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.111.582.000,00					Pegawai		7.299.171.000,00	
		-						7.111.582.000,00					Pegawai		7.299.171.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.165.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.110.417.000,00						-	7.298.171.000,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.110.417.000,00							7.298.171.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	57 Orang/bulan	7.110.417.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.298.171.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.165.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.165.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		1.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						263.524.598,00					Pegawai		868.901.793,00	
		-						263.524.598,00					Pegawai		868.901.793,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	39.986.000,00						-	42.387.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	155.943.794,00						-	730.054.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.779.804,00						-	74.501.043,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.488.500,00						-	11.920.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.479.000,00						-	1.556.250,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.847.500,00						-	8.483.500,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.479.000,00							1.556.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.479.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.556.250,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.847.500,00							8.483.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.847.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.483.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.779.804,00							74.501.043,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	49.779.804,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	74.501.043,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.488.500,00							11.920.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.488.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.920.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						39.986.000,00							42.387.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	39.986.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	42.387.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						155.943.794,00							730.054.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	30 Laporan	155.943.794,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	730.054.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
		-						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	200.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.877.234.700,00					Pegawai		1.343.267.000,00	
		-						1.877.234.700,00					Pegawai		1.343.267.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	598.751.500,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.278.483.200,00						-	1.342.267.000,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						598.751.500,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	598.751.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.278.483.200,00							1.342.267.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.278.483.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.342.267.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164.340.000,00					Pegawai		518.500.001,00	
		-						164.340.000,00					Pegawai		518.500.001,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.370.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	131.310.000,00						-	1,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	12.660.000,00						-	18.500.000,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						131.310.000,00							1,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	30 Unit	131.310.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.660.000,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	12.660.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	18.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.370.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.370.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.530.750.902,00							1.270.499.540,00	
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	-		-	1192242 Orang	4.530.750.902,00						-	1.270.499.540,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						4.100.000.000,00					Destinasi Pariwisata		136.223.540,00	
		-						4.100.000.000,00					Destinasi Pariwisata		136.223.540,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	4.100.000.000,00						-	136.223.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						4.100.000.000,00							136.223.540,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	2 Unit	4.100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P1. Pengembangan pariwisata		-	136.223.540,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						430.750.902,00					Destinasi Pariwisata		1.134.276.000,00	
		-						430.750.902,00					Destinasi Pariwisata		1.134.276.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	-	750.000,00						-	654.227.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	375.000.000,00						-	380.049.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	55.000.902,00						-	100.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						750.000,00							654.227.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	1 Lokasi	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P1. Pengembangan pariwisata		-	654.227.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						55.000.902,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	-	-	1 Unit	55.000.902,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P1. Pengembangan pariwisata		-	100.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						375.000.000,00							380.049.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	8 Laporan	375.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P1. Pengembangan pariwisata		-	380.049.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						750.000,00							15.600.000,00	
			Jumlah pengunjung media promosi online dan offline	-	-	-	24356 Orang	750.000,00						-	15.600.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						750.000,00					Destinasi Pariwisata		15.600.000,00	
		-						750.000,00					Destinasi Pariwisata		15.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	750.000,00						-	600.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	0,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Pengembangan p embanguna n pariwisata		-	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Pengembangan p embanguna n pariwisata		-	15.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						750.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Promosi	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P1. Pengembangan p embanguna n pariwisata		-	600.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						450.000,00							450.000,00	
			Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftarkan HAKI	-		-	50 %	450.000,00						-	450.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						450.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		450.000,00	
		-						450.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		450.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	-	450.000,00						-	450.000,00	
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						450.000,00							450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	P1. Pengembangan p embanguna n pariwisata		-	450.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						98.500.000,00							104.384.593,00	
			-	-		-	-	98.500.000,00						-	104.384.593,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						36.800.000,00					-		102.684.593,00	
		-						36.800.000,00					-		102.684.593,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	35.000.000,00						-	100.884.593,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						35.000.000,00							100.884.593,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	50 Orang	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Pengembangan p embanguna n pariwisata		-	100.884.593,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						1.800.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	1.800.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						61.700.000,00					-		1.700.000,00	
		-						61.700.000,00					-		1.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	61.700.000,00						-	1.700.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						61.700.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	100 Orang	61.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	1.700.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	J U M L A H							14.732.300.200,00							14.773.238.765,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Kesehatan						214.155.536.000,00							905.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						214.155.536.000,00							905.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						214.155.536.000,00							905.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						125.771.157.000,00							0,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Regulasi	-		-	100 %	25.000.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	125.619.657.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						124.395.277.800,00					-		0,00	
		-						124.395.277.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	19.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	124.316.277.800,00						-	0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						124.316.277.800,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1666 Orang/bulan	124.316.277.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						35.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						19.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	19 Laporan	19.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		0,00	
		-						5.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		0,00	
		-						5.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						142.072.000,00					-		0,00	
		-						142.072.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.072.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.072.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.072.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.000.000,00					-		0,00	
		-						7.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						854.807.200,00					-		0,00	
		-						854.807.200,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	667.928.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	184.879.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						667.928.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	667.928.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						184.879.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	184.879.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						262.000.000,00					-		0,00	
		-						262.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	195.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						195.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	195.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	65 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	86.021.888.000,00						-	785.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20.085.823.000,00					-		35.000.000,00	
		-						20.085.823.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	98.850.000,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	7.079.391.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	7.645.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	262.282.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						7.645.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	7.645.300.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						262.282.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	5 Unit	262.282.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						7.079.391.000,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	70 Paket	7.079.391.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						98.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-		-	150 Paket	98.850.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	4.807.660.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	51.265.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	37.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	244.692.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	84.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	365.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	95.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	46.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	164.500.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						448.175.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	21654 Orang	448.175.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						65.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	20669 Orang	65.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						4.807.660.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	19685 Orang	4.807.660.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						70.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	96189 Orang	70.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						60.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	193587 Orang	60.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						174.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	804093 Orang	174.750.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						46.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	190516 Orang	46.800.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	138847 Orang	70.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						95.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	18699 Orang	95.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1159 Orang	75.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.623.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	15960 Orang	4.623.500.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						55.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	33403 Orang	55.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						110.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.858.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	1.858.050.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						244.692.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	244.692.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						37.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						217.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	217.800.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						51.265.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	51.265.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						84.800.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	1 Dokumen	84.800.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	69 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						25.000.000,00							0,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	4308 Orang	60.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	3 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						0,00							0,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	0 Tatanan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-		0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						388.758.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-		1 Dokumen	388.758.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	-		0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-		0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	-		0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						164.500.000,00							200.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-		30 Paket	164.500.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						380.050.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	380.050.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						74.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	74.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						10.000.000,00					-		0,00	
		-						10.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						505.530.000,00					-		0,00	
		-						505.530.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	-	230.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	240.030.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	69 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	69 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						240.030.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	69 Unit	240.030.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						230.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	1 Dokumen	230.500.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.640.576.000,00							0,00	
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	-		-	1,77 Per 1.000 Penduduk	1.640.576.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						47.000.000,00					-		0,00	
		-						47.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	37.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						37.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						333.491.000,00					-		0,00	
		-						333.491.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	303.491.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						303.491.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	303.491.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						5.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	200 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.260.085.000,00					-		0,00	
		-						1.260.085.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	1.260.085.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.260.085.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	200 Orang	1.260.085.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						184.853.000,00							0,00	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah	-		-	100 %	184.853.000,00						-	0,00	
			Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan	-		-	69 %	184.853.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						40.000.000,00					-		0,00	
		-						40.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						99.853.000,00					-		0,00	
		-						99.853.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	99.853.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						99.853.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	1 Dokumen	99.853.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						45.000.000,00					-		0,00	
		-						45.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	45.000.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						45.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	12 Unit	45.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	127.062.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28.000.000,00					-		0,00	
		-						28.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	28.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						28.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		0,00	
		-						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						49.062.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	49.062.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
		RSUD Dr. M. Ashari						131.000.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						131.000.000.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						131.000.000.000,00							0,00	
6.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	131.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20.085.823.000,00					-		35.000.000,00	
		-						20.085.823.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	7.079.391.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	RSUD Dr. M. Ashari
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Bantuan Keuangan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	RSUD Dr. M. Ashari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	-		0 Paket	0,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	RSUD Dr. M. Ashari
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	131.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						131.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	131.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Pendapatan dari BLUD	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	RSUD Dr. M. Ashari
		Puskesmas Banyumudal						4.935.096.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.935.096.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.935.096.000,00							0,00	
7.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.917.021.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						32.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1072 Orang	32.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						29.900.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	9579 Orang	29.900.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		57 Orang	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		790 Orang	16.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						231.238.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	231.238.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						17.641.470,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	17.641.470,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.438.031.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	4.438.031.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						540.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	540.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	11.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						122.170.530,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	122.170.530,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	18.075.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.075.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	18.075.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banyumudal
		Puskesmas Warungpring						2.874.220.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.874.220.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.874.220.000,00							0,00	
9.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	2.842.870.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.400.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	651 Orang	38.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						47.300.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5817 Orang	47.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		35 Orang	5.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		480 Orang	18.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						206.355.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	206.355.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						21.762.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	21.762.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.358.346.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.358.346.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.307.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	4.307.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						34.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	34.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						90.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	31.350.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						31.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	31.350.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Warungpring
		Puskesmas Pulosari						4.769.619.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.769.619.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.769.619.000,00							0,00	
11.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.732.499.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						85.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	933 Orang	85.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23.100.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8339 Orang	23.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	50 Orang	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	687 Orang	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						265.382.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	265.382.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.270.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	6.270.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.217.342.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	4.217.342.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						66.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	66.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						305.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	305.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						63.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	63.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	33.120.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						33.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	33.120.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Pulosari
		Puskesmas Belik						7.524.089.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.524.089.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7.524.089.000,00							0,00	
13.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	7.505.374.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						23.750.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1758 Orang	23.750.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.700.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	15715 Orang	34.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	94 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	1296 Orang	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						188.202.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	188.202.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						11.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15.655.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	15.655.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						7.107.967.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	7.107.967.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						91.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	91.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						4.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	4.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						19.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	19.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
14.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	12.715.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.715.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	12.715.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Belik
		Puskesmas Watukumpul						3.954.456.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.954.456.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.954.456.000,00							0,00	
15.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	3.924.931.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						44.800.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	492 Orang	44.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.300.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4402 Orang	13.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	26 Orang	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	363 Orang	10.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						267.788.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	267.788.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						11.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						18.077.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	18.077.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.496.566.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.496.566.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	9.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						46.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	46.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
16.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	29.525.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						29.525.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	29.525.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Watukumpul
		Puskesmas Kebandaran						4.292.710.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.292.710.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.292.710.000,00							0,00	
17.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.231.160.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						82.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	468 Orang	82.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						22.700.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4185 Orang	22.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		26 Orang	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		345 Orang	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						243.057.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	243.057.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						19.430.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	19.430.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.752.173.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.752.173.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						72.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	72.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	61.550.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						61.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	61.550.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebandaran
		Puskesmas Bantarbolang						6.437.007.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.437.007.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.437.007.000,00							0,00	
19.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	6.393.417.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						64.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1201 Orang	64.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						46.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	10738 Orang	46.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		64 Orang	9.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						25.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		885 Orang	25.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						309.711.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	309.711.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						22.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						24.443.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	24.443.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						5.696.916.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	5.696.916.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.747.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	4.747.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						74.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	74.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						115.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	115.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	43.590.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						43.590.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	43.590.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Bantarbolang
		Puskesmas Randudongkal						5.087.740.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.087.740.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.087.740.000,00							0,00	
21.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	5.067.650.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						90.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	890 Orang	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						64.300.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	7955 Orang	64.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		48 Orang	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		656 Orang	5.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						181.210.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	181.210.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	9.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15.421.960,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	15.421.960,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningk atan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.558.756.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	4.558.756.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						86.233.040,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	86.233.040,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.129.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	6.129.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						10.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						35.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	35.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	20.090.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.090.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	20.090.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Randudongkal
		Puskesmas Kalimas						3.245.926.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.245.926.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.245.926.000,00							0,00	
23.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	3.208.358.470,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						58.750.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	737 Orang	58.750.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						24.600.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	6592 Orang	24.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	39 Orang	13.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	543 Orang	8.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						243.894.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	243.894.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.941.470,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	10.941.470,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.703.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.703.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.088.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	6.088.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						130.485.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	130.485.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
24.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	37.567.530,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						37.567.530,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	37.567.530,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kalimas
		Puskesmas Paduraksa						4.195.649.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.195.649.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.195.649.000,00							0,00	
25.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.145.079.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						29.750.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	796 Orang	29.750.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						29.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	7117 Orang	29.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		43 Orang	1.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						49.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		587 Orang	49.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						191.003.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	191.003.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						19.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	19.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						39.926.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	39.926.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.630.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.630.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						800.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						148.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	148.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
26.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	50.570.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						50.570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	50.570.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Paduraksa
		Puskesmas Mulyoharjo						4.393.018.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.393.018.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.393.018.000,00							0,00	
27.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.338.873.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						46.320.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1232 Orang	46.320.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						56.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	11013 Orang	56.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	66 Orang	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						20.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	908 Orang	20.950.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						189.998.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	189.998.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						42.529.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	42.529.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.861.881.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.861.881.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.455.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	5.455.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						96.740.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	96.740.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
28.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	54.145.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						54.145.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	54.145.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mulyoharjo
		Puskesmas Kebondalem						4.364.432.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.364.432.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.364.432.000,00							0,00	
29.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.337.520.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	938 Orang	25.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8389 Orang	23.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	50 Orang	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						14.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	692 Orang	14.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						218.578.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	218.578.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						21.751.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	21.751.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.943.691.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.943.691.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						78.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	78.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	26.912.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						26.912.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	26.912.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kebondalem
		Puskesmas Banjardawa						4.103.441.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.103.441.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.103.441.000,00							0,00	
31.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.071.841.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						27.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	769 Orang	27.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						21.700.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	6878 Orang	21.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	41 Orang	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	567 Orang	9.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.104.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.104.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						34.057.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	34.057.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.786.380.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.786.380.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	4.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						56.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	56.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
32.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	31.600.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						31.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Banjardawa
		Puskesmas Kabunan						3.220.085.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.220.085.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.220.085.000,00							0,00	
33.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	3.207.815.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						33.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	840 Orang	33.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.400.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	7507 Orang	13.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-		45 Orang	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		619 Orang	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-		0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						98.580.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-		1 Dokumen	98.580.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-		1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15.343.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-		1 Dokumen	15.343.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.946.477.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.946.477.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.915.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	5.915.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						75.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	75.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	12.270.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.270.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	12.270.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Kabunan
		Puskesmas Jebed						4.305.685.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.305.685.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.305.685.000,00							0,00	
35.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.268.724.450,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						135.850.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1096 Orang	135.850.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						76.100.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	9795 Orang	76.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	59 Orang	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						17.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	808 Orang	17.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						323.219.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	323.219.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	18.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						21.702.450,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	21.702.450,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.532.857.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.532.857.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.431.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.431.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	9.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						126.265.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	126.265.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
36.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	36.960.550,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						36.960.550,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	36.960.550,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jebed
		Puskesmas Petarukan						5.729.954.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.729.954.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.729.954.000,00							0,00	
37.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	5.706.119.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						55.825.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	811 Orang	55.825.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						49.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	7253 Orang	49.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	43 Orang	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	598 Orang	9.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						308.583.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	308.583.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.531.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	30.531.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						5.083.480.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	5.083.480.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						7.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	7.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						43.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	0 Dokumen	43.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						3.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						39.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	39.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						17.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	17.550.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						17.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	17.850.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
38.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	23.835.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						23.835.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	23.835.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Petarukan
		Puskesmas Klareyan						4.804.799.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.804.799.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.804.799.000,00							0,00	
39.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.775.224.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						27.600.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1037 Orang	27.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						43.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	9267 Orang	43.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	55 Orang	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	764 Orang	6.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						150.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.840.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						20.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	20.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						19.244.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	19.244.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.382.440.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	4.382.440.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						119.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	119.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
40.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	29.575.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						29.575.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	29.575.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Klareyan
		Puskesmas Losari						5.604.209.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.604.209.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.604.209.000,00							0,00	
41.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	5.568.901.350,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						66.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1109 Orang	66.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						36.486.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	9915 Orang	36.486.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	59 Orang	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						22.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	817 Orang	22.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						261.137.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	261.137.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						41.707.350,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	41.707.350,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.901.901.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	4.901.901.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.525.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	3.525.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						224.745.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	224.745.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
42.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	33.707.650,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						33.707.650,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	33.707.650,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Losari
		Puskesmas Purwoharjo						6.028.268.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.028.268.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.028.268.000,00							0,00	
43.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	6.002.118.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						78.010.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	929 Orang	78.010.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8303 Orang	13.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	50 Orang	6.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						19.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	685 Orang	19.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						221.069.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	221.069.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						16.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	0 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						38.247.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	0 Dokumen	38.247.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						5.511.032.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	5.511.032.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	7.960.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						48.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	48.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						40.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	40.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
44.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	26.150.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						26.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	26.150.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Purwoharjo
		Puskesmas Sarwodadi						3.169.822.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.169.822.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.169.822.000,00							0,00	
45.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	3.152.879.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						33.040.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	555 Orang	33.040.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						35.488.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4965 Orang	35.488.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	30 Orang	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	409 Orang	13.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						120.215.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	120.215.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						27.139.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	27.139.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.713.007.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.713.007.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.890.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	3.890.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						134.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	134.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						58.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	58.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
46.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	16.943.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						16.943.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	16.943.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Sarwodadi
		Puskesmas Rowosari						2.822.596.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.822.596.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.822.596.000,00							0,00	
47.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	2.760.026.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						47.360.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	553 Orang	47.360.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						17.600.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4947 Orang	17.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	30 Orang	2.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	408 Orang	9.900.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						157.953.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	157.953.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						39.475.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	39.475.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.368.588.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.368.588.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	6.850.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						11.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	11.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						85.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
48.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	62.570.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						62.570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	62.570.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Rowosari
		Puskesmas Mojo						4.459.773.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.459.773.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.459.773.000,00							0,00	
49.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	4.407.553.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						55.050.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1130 Orang	55.050.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						33.400.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	10106 Orang	33.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	61 Orang	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						21.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	833 Orang	21.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						184.928.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	184.928.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	13.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						43.677.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	43.677.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.884.198.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	3.884.198.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	7.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						96.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	96.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						61.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	61.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
50.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	52.220.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						52.220.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	52.220.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Mojo
		Puskesmas Cikadu						3.058.298.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.058.298.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.058.298.000,00							0,00	
51.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	2.998.363.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						37.800.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	599 Orang	37.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5356 Orang	13.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	32 Orang	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	441 Orang	8.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						247.917.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	247.917.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						19.763.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	19.763.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.573.783.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.573.783.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	10.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						69.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	69.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
52.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	59.935.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						59.935.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	59.935.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Cikadu
		Puskesmas Jatiroyom						2.989.240.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.989.240.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.989.240.000,00							0,00	
53.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	2.945.455.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						57.600.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	443 Orang	57.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						26.600.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3958 Orang	26.600.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	24 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						26.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	326 Orang	26.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						240.993.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	240.993.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						17.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	17.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						20.796.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	20.796.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.447.866.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.447.866.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	7.400.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						96.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	96.300.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
54.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	43.785.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						43.785.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	43.785.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Jatiroyom
		Puskesmas Karangasem						3.320.844.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.320.844.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.320.844.000,00							0,00	
55.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	3.258.574.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	868.274.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	283.333.040,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	5.577.698.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	2.181.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	855.892.700,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	450.529.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	96.602.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	65.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.789.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	67.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.149.265.530,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	902.440.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	52.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	64.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	58.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	4.979.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	180.921.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	181.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	174.750.000,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	25.300.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						67.500.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	615 Orang	67.500.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5496 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	33 Orang	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	453 Orang	8.700.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						290.744.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	290.744.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						32.563.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	32.563.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.704.767.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	2.704.767.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						200.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	2.800.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						118.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	118.100.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
56.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.038.092.730,00							0,00	
			Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	-		-	50 %	62.270.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						960.092.730,00					-		0,00	
		-						960.092.730,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	960.092.730,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						62.270.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	62.270.000,00	Kab. Pemalang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Puskesmas Karangasem
		Laboratorium Kesehatan Daerah						350.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						350.000.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						350.000.000,00							0,00	
57.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						326.561.833.270,00							905.000.000,00	
			-	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
		-						305.960.480.270,00					-		870.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	365.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Laboratorium Kesehatan Daerah
	J U M L A H							455.196.512.000,00							905.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						21.641.039.400,00							6.545.163.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.387.407.400,00							5.000.250.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.387.407.400,00							5.000.250.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.565.507.100,00							4.058.000.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	-		-	100 %	5.757.171.375,00						-	3.161.500.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	766.335.725,00						-	791.500.000,00	
			-	-		-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.000.000,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		95.000.000,00	
		-						85.000.000,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-		20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		16.000.000,00						-	16.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							31.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen		25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	31.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.000.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen		7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	6.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	4.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.000.000,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	6.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	16.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	16.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.502.748.700,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		2.938.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.502.748.700,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		2.938.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	15.002.700,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.467.746.000,00						-	2.900.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.467.746.000,00							2.900.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	29 Orang/bulan	5.467.746.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	2.900.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.002.700,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	15.002.700,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	16.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	17 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		16.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	8.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	8.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.756.000,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		40.500.000,00	
		-						36.756.000,00					Seluruh ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		40.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	31.756.000,00						-	35.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						31.756.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	35 Orang	31.756.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						159.666.675,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		177.000.000,00	
		-						159.666.675,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		177.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	7.620.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	35.500.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.550.500,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	22.705.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.997.175,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	28.794.000,00						-	30.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.997.175,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.997.175,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						28.794.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	28.794.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.550.500,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.550.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.705.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.705.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.620.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	7.620.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	8.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	4.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	35.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	40.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		0,00	
		-						0,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						638.335.725,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		653.000.000,00	
		-						638.335.725,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		653.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	105.099.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.158.400,00						-	465.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.940.000,00						-	43.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	31.138.325,00						-	35.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						31.138.325,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	31.138.325,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.099.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	105.099.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	110.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.940.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	39.940.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	43.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						462.158.400,00							465.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	462.158.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	465.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.000.000,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		138.500.000,00	
		-						128.000.000,00					ASN Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang		138.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	99 Unit	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	80.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	3.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	55.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						22.530.800,00							24.950.000,00	
			-	-		-	-	22.530.800,00						-	24.950.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						22.530.800,00					-		24.950.000,00	
		-						22.530.800,00					-		24.950.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.084.000,00						-	2.300.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.190.000,00						-	1.300.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.548.500,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	1.400.000,00						-	1.550.000,00	
			Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	-	1.003.300,00						-	1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	160.000,00						-	300.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	-	14.145.000,00						-	16.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						2.084.000,00							2.300.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Keluarga	2.084.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	2.300.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						1.190.000,00							1.300.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	1.190.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	1.300.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						160.000,00							300.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	160.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	300.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota						1.003.300,00							1.100.000,00	
		Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	10 Lembaga	1.003.300,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	1.100.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						2.548.500,00							2.400.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	10 Orang	2.548.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangan an kemiskinan		-	2.400.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						1.400.000,00							1.550.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	5 Orang	1.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangan an kemiskinan		-	1.550.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						14.145.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	3 orang	14.145.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangan an kemiskinan		-	16.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						0,00							0,00	
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						0,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
		-						0,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						0,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						353.500.300,00							405.000.000,00	
			Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	-		-	69 %	353.500.300,00						-	395.100.000,00	
			Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						353.500.300,00					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		405.000.000,00	
		-						353.500.300,00					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		405.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	53.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.100.000,00						-	2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	6.000.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	6.400.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	625.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	27.375.300,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	187.500.000,00						-	203.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						7.000.000,00							18.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	18.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						1.500.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	2.400.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						2.100.000,00							2.400.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	21 Orang	2.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	2.400.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						6.400.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	6.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	7.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						27.375.300,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	140 Orang	27.375.300,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	32.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						187.500.000,00							203.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	375 Orang	187.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	203.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						6.000.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	6.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	7.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						25.000.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	25.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	28.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						50.000.000,00							53.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	53.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						625.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	625.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	1.200.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						0,00					PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	
		-						0,00					PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-		-	0 Aduan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						201.490.100,00							190.500.000,00	
			Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-		-	100 %	45.910.000,00						-	7.500.000,00	
			Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	-		-	100 %	154.980.100,00						-	173.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						45.910.000,00					Anak-Anak Terlantar		7.500.000,00	
		-						45.910.000,00					Anak-Anak Terlantar		7.500.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.250.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	40.520.000,00						-	0,00	
			Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-		-	-	2.140.000,00						-	2.500.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	2.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar						2.250.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Orang	2.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	3.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						40.520.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	150 Orang	40.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi						2.140.000,00							2.500.000,00	
		Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-		-	3 Orang	2.140.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	2.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						155.580.100,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		183.000.000,00	
		-						155.580.100,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		183.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	-		-	-	700.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	600.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		0,00						-	0,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		600.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	-	-		3.680.100,00						-	5.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	-	8700 Orang		150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	165.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						600.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 Orang		600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						600.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 Orang		600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						3.680.100,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	-	8700 Usulan		3.680.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2800 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganana kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota						700.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	-		-	5 Orang	700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penanganana kemiskinan		-	3.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						230.000.000,00							304.000.000,00	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-		-	100 %	161.506.000,00						-	181.200.000,00	
			Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	-		-	100 %	68.494.000,00						-	80.800.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						161.506.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		181.200.000,00	
		-						161.506.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		181.200.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	14.250.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	4.256.000,00						-	5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	140.000.000,00						-	156.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						140.000.000,00							156.000.000,00	
		Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1000 Orang	140.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	156.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						14.250.000,00							15.000.000,00	
		Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	14.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						4.256.000,00							5.200.000,00	
		Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	4.256.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.200.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						68.494.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		122.800.000,00	
		-						68.494.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		122.800.000,00	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	39.000.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	-		-	-	13.790.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	10.080.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	-	3.624.000,00						-	5.800.000,00	
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						0,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Kampung	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	42.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						39.000.000,00							42.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	35 Orang	39.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	42.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda						10.080.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	70 Orang	10.080.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam						0,00							0,00	
		Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-		-	10 Desa/Kelurahan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						3.624.000,00							5.800.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	6 Orang	3.624.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	5.800.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-		-	0 Keluarga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	-		-	0 Daerah	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana						13.790.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	-		-	70 Orang	13.790.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	17.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						14.379.100,00							17.800.000,00	
			Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	-		-	100 %	14.379.100,00						-	17.800.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						14.379.100,00					Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		17.800.000,00	
		-						14.379.100,00					Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		17.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	6.012.500,00						-	7.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	600,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.526.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	840.000,00						-	1.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						6.012.500,00							7.300.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	6.012.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	7.300.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						7.526.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	1 Makam	7.526.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	8.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						600,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	1.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						840.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Orang	840.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P7. Penguatan penanganan kemiskinan		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.253.632.000,00							1.544.913.500,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						672.997.000,00							899.810.000,00	
8.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						55.000.000,00							64.950.000,00	
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-		-	4,50 %	32.500.000,00						-	59.950.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		9.000.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-		1 Orang	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0017	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	-	-		1 Kebijakan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0018	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		18.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						15.000.000,00					Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		18.200.000,00	
			Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	0,00						-	2.700.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0010	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat kab/kota	Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-		-	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	P.8 Peningk- atan pembe- rdayaan perempuan dan perli- ndungan anak		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-		1 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							2.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	2.700.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						35.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		37.750.000,00	
		-						35.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		37.750.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	15.000.000,00						-	15.500.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						15.000.000,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	1 Lembaga	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	5.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							5.750.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-		1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	5.750.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						235.456.000,00							250.700.000,00	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-		100 %	235.456.000,00						-	248.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-		-	0,02 %	235.456.000,00						-	248.200.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						142.911.000,00					Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		148.000.000,00	
		-						142.911.000,00					Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		148.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	701.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-		-	-	72.850.000,00						-	73.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	69.360.000,00						-	70.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						701.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	-		1 Kegiatan	701.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0010	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Kebijakan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						72.850.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-	-		1 Dokumen	72.850.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	73.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						69.360.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Orang	69.360.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	70.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						92.545.000,00					Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100.600.000,00	
		-						92.545.000,00					Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100.600.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-	-		-	3.565.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-	-		-	2.500.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-	-		-	4.200.000,00						-	600.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		-	30.490.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	-	-		28.500.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-	-		20.590.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	-	-		2.700.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						30.490.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	30 Orang		30.490.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.500.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-	-		5 Orang	2.500.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						28.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	-		19 Orang	28.500.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						3.565.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-	-		1 Orang	3.565.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	4.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						20.590.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-		30 Orang	20.590.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	22.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						4.200.000,00							600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-	-		12 Orang	4.200.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	600.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.700.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	-		2 Orang	2.700.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	5.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.100.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	0,00						-	100.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-		1 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-		1 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	100.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						75.000.000,00							210.000.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	-	-		45 %	75.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Keluarga		60.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Keluarga		60.000.000,00	
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-		-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	-	-		0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-		100 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	300 Kebijakan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	200 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	-		35 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-	-	-		0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	-	-		0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-	-		45 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		100 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	60.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	100 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	40 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Keluarga		50.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Keluarga		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	-	-		25 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	-	-		25 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						15.000.000,00							55.000.000,00	
			% OPD yang memiliki data gender	-		-	95,77 %	15.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	-	5.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	30 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						5.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	35 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						5.000.000,00							10.160.000,00	
			Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	-		-	51,12 %	5.000.000,00						-	7.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		7.560.000,00	
		-						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		7.560.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	560.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	5.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-	-	-	1 Kebijakan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-		1 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						0,00							560.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	560.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2.600.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	100.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.02.0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	100.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	1 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	-	1 Lembaga	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	P.8 Peningk atan pembe rdayaan perempuan dan perli ndungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						287.541.000,00							309.000.000,00	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	-	100 %	287.541.000,00						-	306.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						29.150.000,00					Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		32.000.000,00	
		-						29.150.000,00					Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		32.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	-	-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	29.150.000,00						-	29.500.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	0,00						-	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						29.150.000,00							29.500.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	29.150.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	29.500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0013	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	1 Kegiatan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	500.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						143.391.000,00					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		158.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						143.391.000,00					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		158.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	8.400.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	14.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	19.372.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	34.215.000,00						-	36.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3.404.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	22.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	37.500.000,00						-	40.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						19.372.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-		50 Orang	19.372.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	22.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						34.215.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-		50 Orang	34.215.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	36.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-		8 Orang	4.000.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						14.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-		40 Orang	14.000.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						8.400.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	2 Orang	8.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						37.500.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	25 Orang	37.500.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	40.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3.404.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	2 Orang	3.404.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	4.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						22.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	22.500.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		119.000.000,00	
		-						115.000.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		119.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	100.000.000,00						-	101.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	15.000.000,00						-	16.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						100.000.000,00							101.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	101.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						15.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-		1 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	16.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-		1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						13.580.635.000,00							645.103.500,00	
14.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						350.700.000,00							0,00	
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-		-	16,10 %	350.700.000,00						-	0,00	
			Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	-		-	100 %	350.700.000,00						-	0,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						350.700.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
		-						350.700.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-		-	-	350.700.000,00						-	0,00	
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						350.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-		-	1 Dokumen	350.700.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						5.338.635.000,00							645.103.500,00	
			Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	-		-	70,95 %	5.338.635.000,00						-	645.103.500,00	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-		-	9,48 %	5.338.635.000,00						-	645.103.500,00	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						5.338.635.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		645.103.500,00	
		-						5.338.635.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		645.103.500,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	5.215.035.000,00						-	521.503.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah pemantauan dan evaluasi program pembinaan keluarga dan kesehatan reproduksi	-		-	-	93.600.000,00						-	93.600.000,00	
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						5.215.035.000,00							521.503.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	10 Layanan	5.215.035.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	521.503.500,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0030	Pemantauan dan Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						93.600.000,00							93.600.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program pembinaan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah pemantauan dan evaluasi program pembinaan keluarga dan kesehatan reproduksi	-		-	5 Laporan / Dokumen	93.600.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	93.600.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						7.891.300.000,00							0,00	
			Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	-		-	100 %	7.891.300.000,00						-	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						246.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
		-						246.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-		-	-	166.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						166.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	-		-	222 Orang	166.500.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						7.644.800.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
		-						7.644.800.000,00					Masyarakat Kabupaten Pemalang		0,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	7.484.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	160.400.000,00						-	0,00	
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						160.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	160.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						7.484.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	1 Keluarga	7.484.400.000,00	Kab. Pemalang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	J U M L A H							21.641.039.400,00							6.545.163.500,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						7.565.173.400,00							7.729.077.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.565.173.400,00							7.729.077.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.565.173.400,00							7.729.077.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.244.173.400,00							6.313.077.000,00	
			-	-		-	-	6.239.965.400,00						-	6.305.077.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.556.000,00					-		7.200.000,00	
		-						4.556.000,00					-		7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	800.000,00						-	1.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	800.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	800.000,00						-	1.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	452.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	452.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	452.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	800.000,00						-	1.250.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						800.000,00							1.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						452.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	452.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						452.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	452.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						800.000,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						800.000,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						452.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	452.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						800.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.928.183.000,00					-		4.958.779.000,00	
		-						4.928.183.000,00					-		4.958.779.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	452.000,00						-	750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-		452.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-		4.927.279.000,00						-	4.957.279.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.927.279.000,00							4.957.279.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	35/14 Orang/bulan	4.927.279.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.957.279.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						452.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	452.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						452.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	3 Laporan	452.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.326.000,00					-		10.000.000,00	
		-						7.326.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-		7.326.000,00						-	10.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						7.326.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	15 Orang	7.326.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.144.000,00					-		125.500.000,00	
		-						117.144.000,00					-		125.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-		1.680.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.817.500,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.942.500,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.024.000,00						-	1.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	680.000,00						-	1.250.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.024.000,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.024.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintaha n		-	1.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						680.000,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	3 Paket	680.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintaha n		-	1.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.817.500,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	49.817.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintaha n		-	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.942.500,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	6 Paket	2.942.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintaha n		-	3.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.680.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintaha n		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	14 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.330.000,00					-		27.500.000,00	
		-						16.330.000,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	3.330.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	13.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.330.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	3.330.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.070.894.400,00					-		1.084.598.000,00	
		-						1.070.894.400,00					-		1.084.598.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	289.848.000,00						-	295.848.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	779.046.400,00						-	786.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.750.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						289.848.000,00							295.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	48 Laporan	289.848.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	295.848.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						779.046.400,00							786.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	779.046.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	786.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.740.000,00					-		99.500.000,00	
		-						99.740.000,00					-		99.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.620.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	70.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	16.120.000,00						-	12.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	33 Unit	70.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.120.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	16.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.620.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	13.620.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						954.000.000,00							987.000.000,00	
			-	-		-	-	950.000.000,00						-	981.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						927.500.000,00					-		941.000.000,00	
		-						927.500.000,00					-		941.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	919.500.000,00						-	930.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	75000 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						919.500.000,00							930.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	12 Laporan	919.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	930.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	14400 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						1.500.000,00					-		6.000.000,00	
		-						1.500.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	-	1.500.000,00						-	6.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						1.500.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-		25.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	2000 Dokumen		25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						19.500.000,00							30.000.000,00	
			-	-	-	-		19.500.000,00						-	30.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						19.500.000,00					-		30.000.000,00	
		-						19.500.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-		6.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	-	-		13.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						6.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	32000 Dokumen		6.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						13.000.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	-	4 Layanan		13.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						341.900.000,00							391.000.000,00	
			-	-	-	-		337.400.000,00						-	381.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						11.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						11.000.000,00					-		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	6.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						328.900.000,00					-		366.000.000,00	
		-						328.900.000,00					-		366.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	-	4.500.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	292.100.000,00						-	312.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	4.500.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	27.800.000,00						-	40.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						4.500.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	6 Laporan	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						292.100.000,00							312.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	12 Laporan	292.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	312.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						27.800.000,00							40.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	4 Laporan	27.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						4.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						5.600.000,00							8.000.000,00	
			-	-		-	-	5.600.000,00						-	4.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						5.600.000,00					-		8.000.000,00	
		-						5.600.000,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.200.000,00						-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	2.400.000,00						-	4.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						3.200.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						2.400.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	J U M L A H							7.565.173.400,00							7.729.077.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						14.598.440.600,00							15.532.510.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.573.438.085,00							15.482.510.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						14.573.438.085,00							15.482.510.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.611.573.085,00							10.382.510.000,00	
			-	-		-	-	9.587.573.085,00						-	10.187.510.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.750.000,00					-		28.000.000,00	
		-						15.750.000,00					-		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.750.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.750.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.750.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.750.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.750.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	19 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	9 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.592.510.000,00					-		5.200.510.000,00	
		-						4.592.510.000,00					-		5.200.510.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.582.510.000,00						-	5.182.510.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.582.510.000,00							5.182.510.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35/14 Orang/bulan	4.582.510.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.182.510.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	4.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						156.683.785,00					-		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						156.683.785,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	25.001.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.785,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.683.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.999.000,00						-	4.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.999.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	1.999.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.683.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	39.683.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.785,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	75.000.785,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						25.001.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	12 Dokumen	25.001.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.529.750.000,00					-		4.560.000.000,00	
		-						4.529.750.000,00					-		4.560.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000.000,00						-	4.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	29.750.000,00						-	60.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.500.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	15 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.750.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	29.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.602.800,00					-		240.000.000,00	
		-						210.602.800,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	127.800.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.856.800,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.946.000,00						-	10.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						127.800.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	127.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.946.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	4.946.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						77.856.800,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	77.856.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105.276.500,00					-		100.000.000,00	
		-						105.276.500,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	96.779.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.497.500,00						-	10.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						96.779.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	26 Unit	96.779.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.497.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	8.497.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						391.850.000,00							15.000.000,00	
			-	-		-	-	391.850.000,00						-	15.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						391.850.000,00					-		15.000.000,00	
		-						391.850.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	-	11.300.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-		-	-	380.550.000,00						-	0,00	
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						11.300.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	1 Desa	11.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						380.550.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-		-	300 Unit	380.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						92.150.000,00							130.000.000,00	
			-	-		-	-	92.150.000,00						-	115.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						92.150.000,00					-		130.000.000,00	
		-						92.150.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	68.250.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	-	18.750.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-		-	-	5.150.000,00						-	15.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						18.750.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	14 Dokumen	18.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						5.150.000,00							15.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	5.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan						68.250.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	1 Dokumen	68.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						3.272.865.000,00							3.865.000.000,00	
			-	-		-	-	3.227.865.000,00						-	3.425.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.272.865.000,00					-		3.865.000.000,00	
		-						3.272.865.000,00					-		3.865.000.000,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	45.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	100.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	80.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	-	2.822.865.000,00						-	3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	25.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2.822.865.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	12 Dokumen	2.822.865.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						45.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	14 Orang	45.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	1 Desa	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.205.000.000,00							1.090.000.000,00	
			-	-		-	-	1.205.000.000,00						-	990.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.205.000.000,00					-		1.090.000.000,00	
		-						1.205.000.000,00					-		1.090.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	-	136.250.000,00						-	190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	5.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	33.750.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	290.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						140.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	4 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						290.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	4 Lembaga	290.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						136.250.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	1 Dokumen	136.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	190.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						33.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	1 Laporan	33.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						5.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	28 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	X							25.002.515,00							50.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						25.002.515,00							50.000.000,00	
6.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						25.002.515,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	25.002.515,00						-	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.002.515,00					-		50.000.000,00	
		-						25.002.515,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.002.515,00						-	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.002.515,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	25.002.515,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	J U M L A H							14.598.440.600,00							15.532.510.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						5.312.808.400,00							5.245.308.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.312.808.400,00							5.245.308.400,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.312.808.400,00							5.245.308.400,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.996.198.400,00							4.928.698.400,00	
			-	-		-	-	4.996.198.400,00						-	4.878.698.400,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.466.750,00					-		58.466.750,00	
		-						58.466.750,00					-		58.466.750,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.379.000,00						-	2.379.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.347.500,00						-	2.347.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	4.456.500,00						-	4.456.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.687.250,00						-	3.687.250,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.616.500,00						-	2.616.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.136.000,00						-	3.136.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	39.844.000,00						-	39.844.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.347.500,00							2.347.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.347.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.347.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.616.500,00							2.616.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	2.616.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.616.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.687.250,00							3.687.250,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	2 Dokumen	3.687.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	3.687.250,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.379.000,00							2.379.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	2.379.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.379.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.456.500,00							4.456.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	2 Dokumen	4.456.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	4.456.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.136.000,00							3.136.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	3.136.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	3.136.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.844.000,00							39.844.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4 Laporan	39.844.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	39.844.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.112.869.750,00					-		4.112.869.750,00	
		-						4.112.869.750,00					-		4.112.869.750,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	1.449.750,00						-	1.449.750,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1.496.000,00						-	1.496.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	4.109.924.000,00						-	4.109.924.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.109.924.000,00							4.109.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	31 Orang/bulan	4.109.924.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	4.109.924.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.496.000,00							1.496.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.496.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	1.496.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.449.750,00							1.449.750,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.449.750,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	1.449.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						195.226.636,00					-		86.726.636,00	
		-						195.226.636,00					-		86.726.636,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.804.000,00						-	3.804.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.015.000,00						-	1.015.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	116.000.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	56.368.496,00						-	56.368.496,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.991.690,00						-	12.991.690,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.047.450,00						-	5.047.450,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.047.450,00							5.047.450,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.047.450,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	5.047.450,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.368.496,00							56.368.496,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	56.368.496,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	56.368.496,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.991.690,00							12.991.690,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	12.991.690,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	12.991.690,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.804.000,00							3.804.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	634 Dokumen	3.804.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	3.804.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.015.000,00							1.015.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.015.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	1.015.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						116.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	116.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	7.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						9.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	9.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						515.635.264,00					-		515.635.264,00	
		-						515.635.264,00					-		515.635.264,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	364.635.264,00						-	364.635.264,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	1.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						364.635.264,00							364.635.264,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	364.635.264,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	364.635.264,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105.000.000,00					-		105.000.000,00	
		-						105.000.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	45.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	29 Unit	45.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	45.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	31 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						4.890.000,00							4.860.000,00	
			-	-		-	-	2.445.000,00						-	2.430.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.445.000,00					-		2.430.000,00	
		-						2.445.000,00					-		2.430.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	-	2.445.000,00						-	2.430.000,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						2.445.000,00							2.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	1 Dokumen	2.445.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.430.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						2.445.000,00					-		2.430.000,00	
		-						2.445.000,00					-		2.430.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.445.000,00						-	2.430.000,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						2.445.000,00							2.430.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	2.445.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.430.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						130.510.000,00							175.000.000,00	
			-	-		-	-	130.510.000,00						-	175.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						130.510.000,00					-		175.000.000,00	
		-						130.510.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	-	106.740.600,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	-	23.769.400,00						-	75.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						106.740.600,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	106.740.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						23.769.400,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	2 Dokumen	23.769.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						75.000.000,00							75.000.000,00	
			-	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	55.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	4000 Pelaku Usaha	55.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	5.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	30 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						81.210.000,00							36.750.000,00	
			-	-		-	-	81.210.000,00						-	36.750.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						81.210.000,00					-		36.750.000,00	
		-						81.210.000,00					-		36.750.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	45.660.000,00						-	4.650.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	5.550.000,00						-	2.100.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						45.660.000,00							4.650.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	10 Pelaku Usaha	45.660.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	4.650.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	60 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						5.550.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	1 Kegiatan Usaha	5.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	2.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						25.000.000,00							25.000.000,00	
			-	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P4. Peningkatan investasi		-	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	J U M L A H							5.312.808.400,00							5.245.308.400,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan						25.866.394.000,00							780.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.976.394.000,00							780.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						23.976.394.000,00							780.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.441.394.000,00							0,00	
			-	-		-	-	22.441.394.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.326.940,00					-		0,00	
		-						52.326.940,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	6.875.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.520.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.580.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	8.121.340,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	16.468.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	6.361.800,00						-	0,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.520.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	9.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8.121.340,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	8.121.340,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.580.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	2.580.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.875.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	6.875.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.468.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	0 Laporan	16.468.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.361.800,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	0 Laporan	6.361.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.630.271.400,00					-		0,00	
		-						18.630.271.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	2.049.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	9.042.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	18.619.179.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.619.179.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	18.619.179.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						9.042.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	0 Laporan	9.042.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.049.600,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	2.049.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.535.000,00					-		0,00	
		-						15.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	15.535.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.535.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	0 Laporan	15.535.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						512.927.246,00					-		0,00	
		-						512.927.246,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	153.720.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.237.700,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	286.543.361,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.505.025,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.921.160,00						-	0,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.505.025,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	16.505.025,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.921.160,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	25.921.160,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.237.700,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	30.237.700,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						286.543.361,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	286.543.361,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						153.720.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	153.720.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						383.969.950,00					-		0,00	
		-						383.969.950,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	33.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	350.969.950,00						-	0,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						33.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	33.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						350.969.950,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	350.969.950,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.522.390.400,00					-		0,00	
		-						2.522.390.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	524.880.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.991.690.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.820.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						524.880.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	524.880.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.820.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	5.820.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.991.690.400,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	1.991.690.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.133.064,00					-		0,00	
		-						239.133.064,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	149.233.064,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	17.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	72.900.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						149.233.064,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	0 Unit	149.233.064,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						17.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	0 Unit	17.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	0 Unit	72.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi						84.840.000,00					-		0,00	
		-						84.840.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	84.840.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						84.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	0 Dokumen	84.840.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						80.000.000,00							100.000.000,00	
			-	-	-	-	-	80.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						80.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						80.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	-	80.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	140 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						20.000.000,00							30.000.000,00	
			-	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-		-	40 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						345.000.000,00							350.000.000,00	
			-	-		-	-	345.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						345.000.000,00					-		350.000.000,00	
		-						345.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	345.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						345.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	300 Orang	345.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						643.700.000,00							100.000.000,00	
			-	-		-	-	643.700.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						643.700.000,00					-		100.000.000,00	
		-						643.700.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	44.700.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	499.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						44.700.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	30 Lembaga	44.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						499.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	70 Orang	499.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	1 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						446.300.000,00							200.000.000,00	
			-	-		-	-	446.300.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						446.300.000,00					-		200.000.000,00	
		-						446.300.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	179.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	167.300.000,00						-	0,00	
	2.17.08.2.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						167.300.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitas	-		-	40 Orang	167.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	2 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitas Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						179.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	10 Produk	179.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.890.000.000,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.890.000.000,00							0,00	
7.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						10.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000,00					-		0,00	
		-						10.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						951.115.000,00							0,00	
			-	-		-	-	951.115.000,00						-	0,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						749.619.000,00					-		0,00	
		-						749.619.000,00					-		0,00	
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	58.309.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	691.310.000,00						-	0,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						691.310.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	1 Unit	691.310.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						58.309.000,00							0,00	
		Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	10 Unit	58.309.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						201.496.000,00					-		0,00	
		-						201.496.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	201.496.000,00						-	0,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						201.496.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	17 Dokumen	201.496.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
9.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						568.439.400,00							0,00	
			-	-		-	-	568.439.400,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						18.373.400,00					-		0,00	
		-						18.373.400,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-		18.373.400,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						18.373.400,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	12 Laporan		18.373.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						545.066.000,00					-		0,00	
		-						545.066.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-		462.855.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-		82.211.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						82.211.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	96 Laporan		82.211.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						462.855.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	2 Laporan		462.855.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					-		0,00	
		-						5.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	-	-		5.000.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	-	12 Laporan		5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
10.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						35.000.000,00							0,00	
			-	-	-	-		35.000.000,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00					-		0,00	
		-						35.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	-	-		35.000.000,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor						35.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	-	12 Produk		35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
11.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						45.000.000,00							0,00	
			-	-	-	-		45.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						45.000.000,00					-		0,00	
		-						45.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	-	-		40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	-	-		5.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						40.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	-	1000 Unit		40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						5.000.000,00							0,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	36 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
12.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						280.445.600,00							0,00	
			-	-		-	-	280.445.600,00						-	0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						280.445.600,00					-		0,00	
		-						280.445.600,00					-		0,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-		-	-	280.445.600,00						-	0,00	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						280.445.600,00							0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-		-	3 UMKM	280.445.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P3. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	J U M L A H							25.866.394.000,00							780.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi						7.267.613.000,00							9.647.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.979.313.000,00							8.962.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.979.313.000,00							8.962.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.484.232.150,00							5.725.000.000,00	
			-	-		-	-	5.413.232.150,00						-	5.457.500.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.132.100,00					-		100.000.000,00	
		-						53.132.100,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.879.800,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	29.909.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	3.193.500,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.807.500,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.754.250,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.636.200,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	6.951.850,00						-	10.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.909.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	29.909.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.754.250,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.754.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.807.500,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.807.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.879.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.879.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.193.500,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	3.193.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.636.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	4.636.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.951.850,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	6.951.850,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.637.259.250,00					-		4.517.500.000,00	
		-						4.637.259.250,00					-		4.517.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.286.250,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.629.973.000,00						-	4.500.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.629.973.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	45 Orang/bulan	4.629.973.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	4.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.286.250,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.286.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.500.000,00					-		40.000.000,00	
		-						1.500.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.500.000,00						-	40.000.000,00	
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178.000.000,00					-		327.500.000,00	
		-						178.000.000,00					-		327.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	7.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	90.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	10 Paket	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	10 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					-		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						35.000.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						376.340.800,00					-		400.000.000,00	
		-						376.340.800,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	160.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	216.340.800,00						-	225.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	175.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						216.340.800,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	216.340.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						203.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	113.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						113.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	39 Unit	113.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						10.000.000,00							12.500.000,00	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	12.500.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						10.000.000,00					-		12.500.000,00	
		-						10.000.000,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	-	5.000.000,00						-	7.500.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						480.000.000,00							1.215.000.000,00	
			-	-		-	-	450.000.000,00						-	1.215.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						425.000.000,00					-		1.100.000.000,00	
		-						425.000.000,00					-		1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	-	25.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	400.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						400.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	160 Orang	400.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	20 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						5.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-		-	15 Perizinan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						5.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-		-	3 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		35.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						755.080.850,00							1.590.000.000,00	
			-	-		-	-	720.080.850,00						-	1.390.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						605.080.850,00					-		1.290.000.000,00	
		-						605.080.850,00					-		1.290.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	-	465.080.850,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	-	70.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						70.000.000,00							200.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	12000 Orang	70.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	350 Orang	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						35.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-		-	16 Orang	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						465.080.850,00							1.000.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	200 Orang	465.080.850,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	1500 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						250.000.000,00							420.000.000,00	
			-	-		-	-	250.000.000,00						-	370.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						35.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						35.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	20 Perusahaan	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						215.000.000,00					-		380.000.000,00	
		-						215.000.000,00					-		380.000.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	15 Perkara	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	3 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	60 Orang	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						288.300.000,00							685.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						258.300.000,00							625.000.000,00	
6.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						197.300.000,00							525.000.000,00	
			-	-		-	-	197.300.000,00						-	525.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						197.300.000,00					-		525.000.000,00	
		-						197.300.000,00					-		525.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	-	25.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	19.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	123.300.000,00						-	400.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						19.000.000,00							35.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	5 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						123.300.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	5 Dokumen	123.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
7.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						18.500.000,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	18.500.000,00						-	25.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						18.500.000,00					-		50.000.000,00	
		-						18.500.000,00					-		50.000.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	12.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	6.500.000,00						-	25.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						12.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	-		1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	-		1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
8.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						42.500.000,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	42.500.000,00						-	50.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						42.500.000,00					-		50.000.000,00	
		-						42.500.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-		-	42.500.000,00						-	50.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						42.500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	3 Dokumen	42.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						30.000.000,00							60.000.000,00	
9.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						30.000.000,00							60.000.000,00	
			-	-		-	-	30.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					-		60.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	-	20.000.000,00						-	35.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	1 Kepala Keluarga	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P1. Penge mbangan p embanguna n pariwisata		-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	J U M L A H							7.267.613.000,00							9.647.500.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Komunikasi dan Informatika						13.248.889.400,00							4.261.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.248.889.400,00							4.261.100.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12.752.589.400,00							3.690.100.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.302.989.400,00							39.500.000,00	
			-	-		-	-	7.277.989.400,00						-	14.500.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						172.022.000,00					-		24.500.000,00	
		-						172.022.000,00					-		24.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	129.462.000,00						-	9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	32.560.000,00						-	5.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						129.462.000,00							9.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	129.462.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.560.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	32.560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.575.491.000,00					-		15.000.000,00	
		-						5.575.491.000,00					-		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.560.491.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.560.491.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	5.560.491.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.918.000,00					-		0,00	
		-						18.918.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	13.918.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						13.918.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	13.918.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						264.813.000,00					-		0,00	
		-						264.813.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	177.153.550,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	24.980.250,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.041.200,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	18.138.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.138.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	10 Paket	18.138.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	30 Paket	29.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.041.200,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	15.041.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						24.980.250,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	7 Paket	24.980.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						177.153.550,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	15 Laporan	177.153.550,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.000.000,00					-		0,00	
		-						90.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.001.645.400,00					-		0,00	
		-						1.001.645.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	338.640.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	649.758.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.697.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.550.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						338.640.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	338.640.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.697.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	10.697.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						649.758.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	649.758.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.100.000,00					-		0,00	
		-						180.100.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	135.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	45.100.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						135.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	23 Unit	135.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	35 Unit	45.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.775.000.000,00							40.000.000,00	
			-	-		-	-	1.745.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.775.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						1.775.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	400.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	885.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						400.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	15 Laporan	400.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	0 %	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						885.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	0 Orang	885.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0028	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	0 %	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						110.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	2 Rekomendasi	110.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	0 Orang	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						80.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	0 Komunitas	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	1800 Konten	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						3.674.600.000,00							3.610.600.000,00	
			-	-		-	-	3.674.600.000,00						-	3.610.600.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.674.600.000,00					-		3.610.600.000,00	
		-						3.674.600.000,00					-		3.610.600.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	472.235.000,00						-	60.785.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	173.952.000,00						-	173.952.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	92.782.400,00						-	87.965.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	443.126.000,00						-	479.126.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	16.540.000,00						-	54.100.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.204.811.600,00						-	2.511.957.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	271.153.000,00						-	242.715.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						92.782.400,00							87.965.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	92.782.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	87.965.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						443.126.000,00							479.126.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	443.126.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	479.126.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						2.204.811.600,00							2.511.957.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	38 Titik	2.204.811.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.511.957.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						173.952.000,00							173.952.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	173.952.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	173.952.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						16.540.000,00							54.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	-		1 Layanan	16.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	54.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						271.153.000,00							242.715.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-		38 Titik	271.153.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	242.715.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						472.235.000,00							60.785.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-	-		1 Aplikasi	472.235.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.785.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						135.000.000,00							148.000.000,00	
4.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						135.000.000,00							148.000.000,00	
			-	-		-	-	135.000.000,00						-	148.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					-		148.000.000,00	
		-						135.000.000,00					-		148.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	-		-	55.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	-		-	80.000.000,00						-	83.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						80.000.000,00							83.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	-		100 %	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	83.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						55.000.000,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	-		400 Orang	55.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	65.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						361.300.000,00							423.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						361.300.000,00							423.000.000,00	
			-	-		-	-	361.300.000,00						-	423.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						361.300.000,00					-		423.000.000,00	
		-						361.300.000,00					-		423.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	291.300.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	70.000.000,00						-	73.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						70.000.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	5 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						291.300.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	5 Laporan	291.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	J U M L A H							13.248.889.400,00							4.261.100.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						68.024.594.400,00							255.754.609.929,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						68.024.594.400,00							255.754.609.929,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						68.024.594.400,00							255.754.609.929,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.373.180.850,00							20.712.826.400,00	
			-	-		-	-	19.339.180.850,00						-	20.712.826.400,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						138.000.000,00					-		31.900.000,00	
		-						138.000.000,00					-		31.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	138.000.000,00						-	31.900.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						138.000.000,00							31.900.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	138.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	31.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.772.340.000,00					-		16.647.040.000,00	
		-						16.772.340.000,00					-		16.647.040.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	16.772.340.000,00						-	16.647.040.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.772.340.000,00							16.647.040.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	151 Orang/bulan	16.772.340.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	16.647.040.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00					-		275.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	75.000.000,00						-	275.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						75.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	480 Orang	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.170.000,00					-		421.666.800,00	
		-						136.170.000,00					-		421.666.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.000.000,00						-	5.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	62.500.000,00						-	125.550.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.500.000,00						-	59.416.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.000.000,00						-	125.234.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.170.000,00						-	6.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	20.126.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	80.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.170.000,00							6.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.170.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	6.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							20.126.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	9 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	20.126.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.500.000,00							59.416.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	59.416.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.000.000,00							125.234.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	7 Paket	14.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	125.234.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.000.000,00							5.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	5.040.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						62.500.000,00							125.550.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	150 Laporan	62.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	125.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.584.000,00					-		410.732.000,00	
		-						60.584.000,00					-		410.732.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	4.370.000,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	39.514.000,00						-	310.732.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	16.700.000,00						-	71.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.514.000,00							310.732.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	39.514.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	310.732.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.370.000,00							29.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	55 Unit	4.370.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	29.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.700.000,00							71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	16.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	71.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.799.755.250,00					-		1.897.172.200,00	
		-						1.799.755.250,00					-		1.897.172.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	350.000.850,00						-	350.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.439.754.400,00						-	1.496.542.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	50.530.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.850,00							350.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	350.000.850,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	350.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							50.530.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	24 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	50.530.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.439.754.400,00							1.496.542.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.439.754.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.496.542.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.331.600,00					-		1.029.315.400,00	
		-						391.331.600,00					-		1.029.315.400,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.780.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.791.600,00						-	630.250.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	267.540.000,00						-	248.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	50.050.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						267.540.000,00							248.235.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	164 Unit	267.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	248.235.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						100.000.000,00							100.780.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	23 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	100.780.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							50.050.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	60 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	50.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.791.600,00							630.250.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	13.791.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	630.250.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						996.520.000,00							8.510.886.650,00	
			-	-		-	-	936.520.000,00						-	8.510.886.650,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						966.520.000,00					-		3.283.267.000,00	
		-						966.520.000,00					-		3.283.267.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	-	10.000.000,00						-	169.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	-		-	-	10.000.000,00						-	1.434.607.000,00	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	-	420.000.000,00						-	1.269.722.000,00	
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	500.220.000,00						-	409.538.000,00	
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota						5.300.000,00							0,00	
		Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai						500.220.000,00							409.538.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0,5 KM	500.220.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	409.538.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						1.000.000,00							0,00	
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	1 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						420.000.000,00							1.269.722.000,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	0,5 KM	420.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.269.722.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						10.000.000,00							1.434.607.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	-		-	0,3 KM	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.434.607.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	-		-	0,34 KM	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						10.000.000,00							169.400.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	169.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						10.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					-		5.227.619.650,00	
		-						30.000.000,00					-		5.227.619.650,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	45.191.850,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	5.182.427.800,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						10.000.000,00							5.182.427.800,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	1 KM	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	5.182.427.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						10.000.000,00							45.191.850,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0,5 KM	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	45.191.850,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						415.000.000,00							3.155.000.000,00	
			-	-		-	-	415.000.000,00						-	3.155.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						415.000.000,00					-		3.155.000.000,00	
		-						415.000.000,00					-		3.155.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-		-	-	415.000.000,00						-	3.155.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						415.000.000,00							3.155.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-		-	25 Liter/Detik	415.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	3.155.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						10.000.000,00							1.759.875.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	1.759.875.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		1.759.875.000,00	
		-						10.000.000,00					-		1.759.875.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	-	10.000.000,00						-	1.759.875.000,00	
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						10.000.000,00							1.759.875.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	233,08 Ton/hari	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.759.875.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						10.000.000,00							2.100.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	10.000.000,00						-	2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						10.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	1080 M³/Hari	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						20.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		0,00	
		-						20.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-		-	0 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	0 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						20.000.000,00							3.925.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	3.925.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						20.000.000,00					-		3.925.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		3.925.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	3.548.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	-		10.000.000,00						-	376.500.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						10.000.000,00							376.500.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	150 Dokumen		10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	376.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							3.548.500.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	3 Bangunan Gedung		10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	3.548.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						10.000.000,00							500.000.000,00	
			-	-	-	-	-	10.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-	-	-	-	10.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	1 Kawasan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						47.109.893.550,00							214.471.726.879,00	
			-	-		-	-	46.109.893.550,00						-	214.471.726.879,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						47.109.893.550,00					-		214.471.726.879,00	
		-						47.109.893.550,00					-		214.471.726.879,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	1.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	1.050.000.000,00						-	1.003.258.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	-	1.000.000.000,00						-	760.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-		-	-	5.000.171.000,00						-	1.523.127.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	5.020.000.000,00						-	4.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	15.060.000.000,00						-	16.607.984.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	17.974.722.550,00						-	188.175.357.879,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	1.005.000.000,00						-	402.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	10 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						1.000.000.000,00							760.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	765,72 KM	1.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	760.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						15.060.000.000,00							16.607.984.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	3,95 KM	15.060.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	16.607.984.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						5.020.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	1 KM	5.020.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						17.974.722.550,00							188.175.357.879,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	47,735 KM	17.974.722.550,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	188.175.357.879,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.050.000.000,00							1.003.258.000,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	4 Jembatan	1.050.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.003.258.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						5.000.171.000,00							1.523.127.000,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-		-	1,3 KM	5.000.171.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	1.523.127.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						1.005.000.000,00							402.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	1 Meter	1.005.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	402.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						20.000.000,00							120.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	120.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						10.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						10.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						40.000.000,00							499.295.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	499.295.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		24.980.000,00	
		-						10.000.000,00					-		24.980.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	24.980.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						10.000.000,00							24.980.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	24.980.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		429.365.000,00	
		-						20.000.000,00					-		429.365.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	392.095.500,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	37.269.500,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						10.000.000,00							37.269.500,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	37.269.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						10.000.000,00							392.095.500,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	392.095.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		44.950.000,00	
		-						10.000.000,00					-		44.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	-	10.000.000,00						-	44.950.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						10.000.000,00							44.950.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	44.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	J U M L A H							68.024.594.400,00							255.754.609.929,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman						67.530.953.800,00							24.656.357.060,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.300.830.000,00							21.367.935.349,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						31.300.830.000,00							21.367.935.349,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.234.630.000,00							20.575.935.349,00	
			-	-		-	-	17.234.630.000,00						-	20.343.935.349,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.070.300,00					-		218.049.849,00	
		-						28.070.300,00					-		218.049.849,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.525.200,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.060.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.524.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.979.500,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.570.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	7.911.600,00						-	86.049.849,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.524.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	3.524.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.060.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.060.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.979.500,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.979.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.570.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	3.570.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.911.600,00							86.049.849,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	7.911.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	86.049.849,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.525.200,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Berita Acara	6.525.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.592.363.500,00					-		15.722.181.000,00	
		-						13.592.363.500,00					-		15.722.181.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.719.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.621.500,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	13.586.023.000,00						-	15.710.181.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.586.023.000,00							15.710.181.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	128/14 Orang/bulan	13.586.023.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.710.181.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.719.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.719.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.621.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	2.621.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						200.789.850,00					-		540.000.000,00	
		-						200.789.850,00					-		540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.014.000,00						-	260.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	48.502.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	65.707.500,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.031.600,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.149.750,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.385.000,00						-	20.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.031.600,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.031.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.149.750,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	6.149.750,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.385.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	3 Paket	3.385.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						48.502.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	48.502.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.707.500,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	65.707.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.014.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	105 Laporan	75.014.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	260.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		60.000.000,00	
		-						0,00					-		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.236.806.350,00					-		3.766.464.500,00	
		-						3.236.806.350,00					-		3.766.464.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	352.200.000,00						-	412.509.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.883.008.800,00						-	3.338.955.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.597.550,00						-	15.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						352.200.000,00							412.509.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	352.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	412.509.500,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.597.550,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.597.550,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.883.008.800,00							3.338.955.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.883.008.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.338.955.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.600.000,00					-		269.240.000,00	
		-						176.600.000,00					-		269.240.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	167.260.000,00						-	224.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.340.000,00						-	15.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						167.260.000,00							224.240.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	70 Unit	167.260.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	224.240.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.340.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	9.340.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.030.000.000,00							517.000.000,00	
			-	-		-	-	1.030.000.000,00						-	517.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		42.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-		-	-	50.000.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.04.02.2.02.0011	Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersosialisasinya Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						310.500.000,00					-		300.000.000,00	
		-						310.500.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	-	310.500.000,00						-	300.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						310.500.000,00							300.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	20 Unit Rumah	310.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						29.500.000,00					-		15.000.000,00	
		-						29.500.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	29.500.000,00						-	15.000.000,00	
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						29.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	29.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						600.000.000,00					-		120.000.000,00	
		-						600.000.000,00					-		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	-	130.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-		-	-	470.000.000,00						-	70.000.000,00	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						470.000.000,00							70.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-		-	100 Laporan	470.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						130.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	100 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						5.100.000,00							15.000.000,00	
			-	-		-	-	5.100.000,00						-	15.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						5.100.000,00					-		15.000.000,00	
		-						5.100.000,00					-		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	-	-	-	5.100.000,00						-	15.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						5.100.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	-	-	0 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						1.220.000.000,00							50.000.000,00	
			-	-	-	-	-	1.220.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.220.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						1.220.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	-	-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	-	-	-	1.220.000.000,00						-	0,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.220.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	-	-	50 Unit Rumah	1.220.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	-	-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	-	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						11.809.250.000,00							160.000.000,00	
			-	-	-	-	-	11.734.250.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						11.809.250.000,00					-		160.000.000,00	
		-						11.809.250.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	-	37.500.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-		-	-	28.550.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	-	37.500.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	11.668.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	37.500.000,00						-	50.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						37.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	1 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						28.550.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-		-	1 Laporan	28.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						37.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	1 Laporan	37.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						37.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	1 Lokasi	37.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						11.668.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	3 Lokasi	11.668.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.850.000,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	1.850.000,00						-	50.000.000,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						1.850.000,00					-		50.000.000,00	
		-						1.850.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-		-	-	1.850.000,00						-	50.000.000,00	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						1.850.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-		-	0 Laporan	1.850.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.230.123.800,00							3.288.421.711,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						100.000.000,00							0,00	
7.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						50.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		0,00	
		-						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						50.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		0,00	
		-						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						36.130.123.800,00							3.288.421.711,00	
9.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						36.130.123.800,00							3.288.421.711,00	
			-	-		-	-	36.127.623.800,00						-	3.068.421.711,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						35.813.517.000,00					-		1.955.085.897,00	
		-						35.813.517.000,00					-		1.955.085.897,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	35.696.517.000,00						-	1.246.954.484,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	65.000.000,00						-	181.391.475,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	2.000.000,00						-	244.670.295,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	282.069.643,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.000.000,00							244.670.295,00	
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	244.670.295,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						35.696.517.000,00							1.246.954.484,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	12 Unit	35.696.517.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.246.954.484,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						50.000.000,00							282.069.643,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	282.069.643,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						65.000.000,00							181.391.475,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	16 Unit	65.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	181.391.475,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						20.000.000,00					-		205.720.000,00	
		-						20.000.000,00					-		205.720.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	205.720.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						20.000.000,00							205.720.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	205.720.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						15.000.000,00					-		73.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		73.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	73.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						85.000.000,00					-		330.472.490,00	
		-						85.000.000,00					-		330.472.490,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	7.500.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	1.000.000,00						-	23.292.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	72.500.000,00						-	190.757.650,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	-	4.000.000,00						-	41.422.840,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						4.000.000,00							41.422.840,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	41.422.840,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						7.500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	1000 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1.000.000,00							23.292.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	0 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.292.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						72.500.000,00							190.757.650,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	3 Unit	72.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	190.757.650,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						75.106.800,00					-		346.643.324,00	
		-						75.106.800,00					-		346.643.324,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	9.336.965,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	-	70.106.800,00						-	337.306.359,00	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							9.336.965,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.336.965,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						70.106.800,00							337.306.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	2 Laporan	70.106.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	337.306.359,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						1.500.000,00					-		110.000.000,00	
		-						1.500.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	1.500.000,00						-	110.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						1.500.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	0 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						2.000.000,00					-		33.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		33.000.000,00	
			Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-		-	-	2.000.000,00						-	33.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C						2.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						17.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						17.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	17.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						17.000.000,00							110.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.500.000,00					-		117.500.000,00	
		-						100.500.000,00					-		117.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	500.000,00						-	7.500.000,00	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						500.000,00							7.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	3 Unit	500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						500.000,00					-		7.000.000,00	
		-						500.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000,00						-	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	J U M L A H							67.530.953.800,00							24.656.357.060,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Lingkungan Hidup						33.224.886.600,00							35.378.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.224.886.600,00							35.378.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						33.224.886.600,00							35.378.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.680.898.600,00							19.331.000.000,00	
			-	-		-	-	18.521.698.600,00						-	18.910.000.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.959.000,00					-		34.000.000,00	
		-						28.959.000,00					-		34.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.200.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.809.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.450.000,00						-	3.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.809.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	12.809.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.450.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	2.450.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.200.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		1 Berita Acara	9.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.555.059.000,00					-		15.009.000.000,00	
		-						14.555.059.000,00					-		15.009.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		-	6.160.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-		-	14.547.399.000,00						-	15.000.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.547.399.000,00							15.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-		155 Orang/bulan	14.547.399.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.160.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	6.160.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.200.000,00					-		10.000.000,00	
		-						9.200.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	9.200.000,00						-	10.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						9.200.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	70 Orang	9.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						410.660.000,00					-		446.000.000,00	
		-						410.660.000,00					-		446.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	22.380.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.005.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.275.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.005.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.005.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.275.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.275.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						22.380.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	22.380.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	23.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						313.800.000,00					-		315.000.000,00	
		-						313.800.000,00					-		315.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	94.000.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	219.800.000,00						-	220.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						94.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	94.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	95.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						219.800.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	219.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.878.220.600,00					-		2.966.000.000,00	
		-						2.878.220.600,00					-		2.966.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	251.519.000,00						-	260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.621.253.600,00						-	2.700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.448.000,00						-	6.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.448.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	5.448.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						251.519.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	251.519.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	260.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.621.253.600,00							2.700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.621.253.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						485.000.000,00					-		551.000.000,00	
		-						485.000.000,00					-		551.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	28 Unit	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						370.000.000,00							390.000.000,00	
			-	-		-	-	370.000.000,00						-	390.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						250.000.000,00					-		260.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	-	250.000.000,00						-	260.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						250.000.000,00							260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	260.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						120.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						120.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	120.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						120.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	130.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						725.000.000,00							780.000.000,00	
			-	-		-	-	425.000.000,00						-	460.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						725.000.000,00					-		780.000.000,00	
		-						725.000.000,00					-		780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	300.000.000,00						-	320.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-		-	-	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	300.000.000,00						-	320.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						300.000.000,00							320.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	320.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						300.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	250 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	320.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						450.000.000,00							520.000.000,00	
			-	-		-	-	450.000.000,00						-	520.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						450.000.000,00					-		520.000.000,00	
		-						450.000.000,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	400.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						400.000.000,00							450.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	48,058 Ha	400.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	450.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						10.000.000,00							12.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						10.000.000,00					-		12.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	-		-	17 Usaha	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						50.000.000,00							70.000.000,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	25 Usaha/Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						228.188.000,00							250.000.000,00	
			-	-		-	-	228.188.000,00						-	250.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						228.188.000,00					-		250.000.000,00	
		-						228.188.000,00					-		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	-		103.188.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	-		50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-		75.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	10 Dokumen		75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	150 Orang		50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						103.188.000,00							110.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	10 Lembaga		103.188.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						10.000.000,00							15.000.000,00	
			-	-	-	-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-	-	-		10.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	12 Pengaduan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						12.700.800.000,00							14.010.000.000,00	
			-	-		-	-	12.700.800.000,00						-	14.010.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						12.700.800.000,00					-		14.010.000.000,00	
		-						12.700.800.000,00					-		14.010.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	-	500.800.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	3.500.000.000,00						-	4.000.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	5.500.000.000,00						-	6.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						500.800.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	11 Kelompok	500.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00							3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	-		2 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	3.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	210.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						5.500.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-		55000 Ton	5.500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	6.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						3.500.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	-		2900 Ton	3.500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P.5 Penguatan infrastruktur berkelanjutan		-	4.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	JUMLAH							33.224.886.600,00							35.378.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan						35.001.113.055,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						798.000.000,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						798.000.000,00							0,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						50.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		0,00	
		-						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	0 unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						638.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	638.000.000,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						48.000.000,00					-		0,00	
		-						48.000.000,00					-		0,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Informasi Stok Pangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	-	38.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						10.000.000,00							0,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						38.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	4 Laporan	38.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						440.000.000,00					-		0,00	
		-						440.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	440.000.000,00						-	0,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						440.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	20 Ton	440.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						150.000.000,00					-		0,00	
		-						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-		-	-	115.000.000,00						-	0,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						115.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-		-	5 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						55.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	55.000.000,00						-	0,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						5.000.000,00					-		0,00	
		-						5.000.000,00					-		0,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						5.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		0,00	
		-						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						55.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	55.000.000,00						-	0,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		0,00	
		-						55.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						15.000.000,00							0,00	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						12.864.490.460,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.828.570.000,00							0,00	
5.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.629.025.000,00							0,00	
			-	-		-	-	1.629.025.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						1.059.990.000,00					-		0,00	
		-						1.059.990.000,00					-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	41.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	-	724.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	-	294.990.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						41.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	0 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						724.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	0 Unit	724.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						294.990.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	0 Unit	294.990.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						275.000.000,00					-		0,00	
		-						275.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	-	45.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	230.000.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						230.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Orang	230.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						45.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	0 Kelompok	45.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						234.035.000,00					-		0,00	
		-						234.035.000,00					-		0,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	-	220.573.000,00						-	0,00	
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	-	13.462.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						13.462.000,00							0,00	
		Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	0 Dokumen	13.462.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						220.573.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	0 Layanan	220.573.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					-		0,00	
		-						60.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						60.000.000,00							0,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	-		-	0 Rekomendasi	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
6.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						794.545.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	734.545.000,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						335.000.000,00					-		0,00	
		-						335.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	-	135.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	130.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						135.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	0 Kelompok	135.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-		-	0 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-		-	0 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						130.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Kelompok	130.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						459.545.000,00					-		0,00	
		-						459.545.000,00					-		0,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	224.545.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	175.000.000,00						-	0,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						224.545.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Unit	224.545.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-	-		0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		1 Unit	175.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-	-		0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						191.220.000,00							0,00	
			-	-		-	-	171.220.000,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						191.220.000,00					-		0,00	
		-						191.220.000,00					-		0,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-		-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-		-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-		-	151.220.000,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	0 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						20.000.000,00							0,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	0 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						151.220.000,00							0,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	0 Pelaku Usaha	151.220.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
8.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						213.780.000,00							0,00	
			-	-		-	-	213.780.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						20.000.000,00					-		0,00	
		-						20.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						70.000.000,00					-		0,00	
		-						70.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	0 Unit Usaha	70.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						123.780.000,00					-		0,00	
		-						123.780.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	63.780.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						63.780.000,00							0,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Ton	63.780.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-		-	0 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10.035.920.460,00							0,00	
9.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						476.220.000,00							0,00	
			-	-		-	-	476.220.000,00						-	0,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120.000.000,00					-		0,00	
		-						120.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.427.900,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	65.724.500,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	7.175.500,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	6.167.250,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.007.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	12.268.350,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	20.229.000,00						-	0,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.724.500,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	65.724.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.007.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.007.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6.167.250,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	6.167.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.427.900,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.427.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.175.500,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	7.175.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.268.350,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	12.268.350,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.229.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	20.229.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							0,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-		-	0 Subtansi	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						77.000.000,00					-		0,00	
		-						77.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	33.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	38.700.000,00						-	0,00	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						38.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	38.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.220.000,00					-		0,00	
		-						29.220.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	29.220.000,00						-	0,00	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						29.220.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	20 Orang	29.220.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		0,00	
		-						250.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
10.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						3.712.420.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Populasi ternak	-		-	3.938.245 Ekor	1.298.370.400,00						-	0,00	
			Produksi Komoditas Perkebunan	-		-	1156 Ton	1.298.370.400,00						-	0,00	
			Produksi Tanaman Hortikultura	-		-	303426 Ton	1.298.370.400,00						-	0,00	
			Produksi Tanaman Pangan	-		-	605784 Ton	1.298.370.400,00						-	0,00	
			-	-		-	-	2.414.050.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.298.370.400,00					Kelompok tani, Kelompok ternak		0,00	
		-						1.298.370.400,00					Kelompok tani, Kelompok ternak		0,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	-	99.870.000,00						-	0,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	-	99.675.000,00						-	0,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	170.288.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	573.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	260.537.400,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-		-	-	45.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						260.537.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	4 Laporan	260.537.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						573.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	2 Laporan	573.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						170.288.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	2,8 Ton	170.288.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						0,00							0,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						45.000.000,00							0,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-		-	2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						99.675.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	4500 Batang	99.675.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						99.870.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	1690 Batang	99.870.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan						50.000.000,00							0,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura						0,00							0,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						261.525.000,00					-		0,00	
		-						261.525.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	261.525.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						261.525.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	3 Dokumen	261.525.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						0,00							0,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						767.525.000,00					-		0,00	
		-						767.525.000,00					-		0,00	
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	-		-	-	767.525.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak						767.525.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	-		-	1 Dokumen	767.525.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						1.385.000.000,00					-		0,00	
		-						1.385.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	1.385.000.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						1.385.000.000,00							0,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	0 Ekor	1.385.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
11.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						5.056.877.000,00							0,00	
			-	-		-	-	5.056.877.000,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						1.408.350.000,00					-		0,00	
		-						1.408.350.000,00					-		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	-	1.408.350.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						1.408.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	12 Laporan	1.408.350.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						3.648.527.000,00					-		0,00	
		-						3.648.527.000,00					-		0,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	3.266.732.000,00						-	0,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	-	374.350.000,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	7.445.000,00						-	0,00	
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						0,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						3.266.732.000,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	11 Unit	3.266.732.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						0,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						7.445.000,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	0 Unit	7.445.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						374.350.000,00							0,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	10 Unit	374.350.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak						0,00							0,00	
		Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas						0,00							0,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						0,00							0,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
12.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						456.550.460,00							0,00	
			-	-		-	-	456.550.460,00						-	0,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						104.200.000,00					-		0,00	
		-						104.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	-	104.200.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						104.200.000,00							0,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	12 Laporan	104.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						36.928.460,00					-		0,00	
		-						36.928.460,00					-		0,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	-	36.928.460,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						36.928.460,00							0,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	12 laporan	36.928.460,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						227.197.000,00					-		0,00	
		-						227.197.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	-	227.197.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						227.197.000,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	12 Laporan	227.197.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						44.675.000,00					-		0,00	
		-						44.675.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	-	34.675.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						10.000.000,00							0,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						34.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	3 Unit Usaha	34.675.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						43.550.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						43.550.000,00					-		0,00	
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	-		-	-	43.550.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha						43.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	-		-	2500 Unit	43.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
13.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						309.502.600,00							0,00	
			-	-		-	-	309.502.600,00						-	0,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						309.502.600,00					-		0,00	
		-						309.502.600,00					-		0,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	109.502.600,00						-	0,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						109.502.600,00							0,00	
		Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	0 Ha	109.502.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						200.000.000,00							0,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	0 Ha	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
14.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						24.350.000,00							0,00	
			-	-		-	-	24.350.000,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						24.350.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						24.350.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	24.350.000,00						-	0,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						24.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	1 Unit	24.350.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0011	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas Penyuluh pertanian swadaya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya	Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0012	Koordinasi pengawalan penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kab/kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						0,00							0,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X							21.338.622.595,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						21.338.622.595,00							0,00	
15.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.338.622.595,00							0,00	
			-	-		-	-	21.338.622.595,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.626.274.000,00					-		0,00	
		-						19.626.274.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	19.626.274.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.626.274.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	87 Orang/bulan	19.626.274.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.000.000,00					-		0,00	
		-						7.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						354.827.736,00					-		0,00	
		-						354.827.736,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	7.560.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	140.461.196,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	37.807.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	47.520.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	121.479.540,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						47.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	47.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						121.479.540,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	121.479.540,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						140.461.196,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	140.461.196,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.807.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	37.807.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.560.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	105 Dokumen	7.560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.001.892.808,00					-		0,00	
		-						1.001.892.808,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	377.829.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	595.072.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.991.808,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						377.829.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	377.829.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.991.808,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.991.808,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						595.072.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	595.072.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						348.628.051,00					-		0,00	
		-						348.628.051,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	178.600.055,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	150.293.996,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	19.734.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	-	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.293.996,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	176 Unit	150.293.996,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						178.600.055,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	178.600.055,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.734.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	30 Unit	19.734.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	J U M L A H							35.001.113.055,00							0,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						5.246.201.300,00							6.916.200.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.246.201.300,00							6.916.200.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.122.201.300,00							6.748.700.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.293.201.300,00							4.738.700.000,00	
			-	-		-	-	4.208.501.300,00						-	4.428.100.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.000.000,00					-		41.200.000,00	
		-						29.000.000,00					-		41.200.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.600.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	4.200.000,00						-	5.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	4.200.000,00						-	5.600.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.600.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.200.000,00							5.600.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.600.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.200.000,00							5.600.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.600.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		1 Berita Acara	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.594.998.000,00					-		3.708.500.000,00	
		-						3.594.998.000,00					-		3.708.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		-	3.000.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.588.998.000,00						-	3.700.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.588.998.000,00							3.700.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	24/14 Orang/bulan	3.588.998.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	3.700.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	4.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						102.500.000,00					-		186.000.000,00	
		-						102.500.000,00					-		186.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	6.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	12.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	9.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.500.000,00					-		25.000.000,00	
		-						10.500.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.500.000,00						-	25.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	10.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						477.203.300,00					-		553.000.000,00	
		-						477.203.300,00					-		553.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	220.047.700,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	255.155.600,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						220.047.700,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	220.047.700,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						255.155.600,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	255.155.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						79.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	3.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	6 Unit	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						783.894.200,00							1.880.000.000,00	
			-	-		-	-	783.894.200,00						-	1.420.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						333.315.000,00					-		970.000.000,00	
		-						333.315.000,00					-		970.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	60.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	-	43.250.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	-	1.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	-		-	-	75.100.000,00						-	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	2.100.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	1.750.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	25.570.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	124.545.000,00						-	170.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						2.100.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	6 Perpustakaan	2.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.570.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	6 Perpustakaan	25.570.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						75.100.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	-		-	5 Layanan	75.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	330.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						1.750.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	-		5 Perpustakaan	1.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						124.545.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		150 Orang	124.545.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	170.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						43.250.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-	-		4 Dokumen	43.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						60.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	-		150 Eksemplar	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						1.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	-		1 Perpustakaan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						450.579.200,00					-		910.000.000,00	
		-						450.579.200,00					-		910.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	-		-	4.760.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-	-		-	61.525.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	205.959.200,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	-	171.835.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	6.500.000,00						-	150.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.760.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-		-	1 Orang	4.760.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						61.525.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	1 Perpustakaan	61.525.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Perpustakaan	6.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						171.835.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	170 Orang	171.835.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						205.959.200,00							330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-	-	-	1 Lokus	205.959.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	330.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						45.105.800,00							130.000.000,00	
			-	-	-	-	-	45.105.800,00						-	130.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						45.105.800,00					-		130.000.000,00	
		-						45.105.800,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	-	-	-	1.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-	-	-	-	44.105.800,00						-	80.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	-	-	1 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						44.105.800,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-	-	-	2 Eksemplar	44.105.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						124.000.000,00							167.500.000,00	
4.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						115.312.095,00							155.000.000,00	
			-	-	-	-	-	115.312.095,00						-	130.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						74.266.095,00					-		100.000.000,00	
		-						74.266.095,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	-	22.007.345,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-		-	-	19.557.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	-	32.701.750,00						-	40.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						22.007.345,00							35.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	5000 Berkas	22.007.345,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						32.701.750,00							40.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	37 Lembaga	32.701.750,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota						19.557.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-		-	24 Instansi	19.557.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						41.046.000,00					-		55.000.000,00	
		-						41.046.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	16.570.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	24.476.000,00						-	30.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						24.476.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	20 Pengguna	24.476.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						16.570.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	16.570.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						8.687.905,00							12.500.000,00	
			-	-		-	-	8.687.905,00						-	12.500.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						3.567.905,00					-		5.500.000,00	
		-						3.567.905,00					-		5.500.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	-	3.567.905,00						-	5.500.000,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						3.567.905,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	700 Arsip	3.567.905,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						5.120.000,00					-		7.000.000,00	
		-						5.120.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	-	5.120.000,00						-	7.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana						5.120.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	250 Arsip	5.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	J U M L A H							5.246.201.300,00							6.916.200.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						17.292.092.400,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.292.092.400,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.292.092.400,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.609.267.800,00							0,00	
			-	-		-	-	15.592.327.800,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.000.000,00					-		0,00	
		-						14.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.940.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.080.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.910.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.930.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.940.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.080.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.080.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.910.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.910.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.940.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.940.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.930.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	2.930.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.940.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.940.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.161.576.000,00					-		0,00	
		-						10.161.576.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	650.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	-	-	-	1.040.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	10.158.386.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.158.386.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	99 Orang/bulan	10.158.386.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.040.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	-	-	10 Laporan	1.040.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						650.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 Dokumen	650.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.000.000,00					-		0,00	
		-						33.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	33.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						33.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	33.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						221.119.127,00					-		0,00	
		-						221.119.127,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	103.906.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.347.127,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.866.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.866.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	6.866.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.347.127,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	80.347.127,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						103.906.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	80 Laporan	103.906.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.058.569.193,00					-		0,00	
		-						2.058.569.193,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	1.958.496.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.073.193,00						-	0,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.958.496.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.958.496.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.073.193,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	100.073.193,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.735.306.400,00					-		0,00	
		-						2.735.306.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	180.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.528.706.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.100.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	6.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						180.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	45 Laporan	20.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.528.706.400,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.528.706.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						385.697.080,00					-		0,00	
		-						385.697.080,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	224.089.580,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.857.500,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.750.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	43 Unit	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.857.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	5.857.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						224.089.580,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	224.089.580,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	50 Unit	5.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						559.399.600,00							0,00	
			-	-		-	-	484.399.600,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						359.399.600,00					-		0,00	
		-						359.399.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	-	875.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	-	-		24.999.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	-	-	-		131.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	-		2.125.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	6 Dokumen		25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	4 Dokumen		75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	-	4 Dokumen		100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						875.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	-	1 Dokumen		875.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						131.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	92 laporan		131.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						24.999.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	-	10 Laporan		24.999.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						2.125.000,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	5 Laporan		2.125.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						185.000.000,00					-		0,00	
		-						185.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-		80.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-		75.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						80.000.000,00							0,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	50 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		0,00	
		-						15.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.123.425.000,00							0,00	
			-	-		-	-	1.123.425.000,00						-	0,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						814.151.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						814.151.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	-	16.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	221.601.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	216.550.000,00						-	0,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						221.601.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	221.601.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						250.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	10 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						16.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	1 Orang	16.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						216.550.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	18 Unit	216.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	3 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						309.274.000,00					-		0,00	
		-						309.274.000,00					-		0,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	-	187.249.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	-	11.025.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	111.000.000,00						-	0,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						111.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	200 Orang	111.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						187.249.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	4 Desa/Kelurahan	187.249.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana						11.025.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	1 Unit	11.025.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	J U M L A H							17.292.092.400,00							0,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						7.691.632.400,00							7.735.250.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.691.632.400,00							7.735.250.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.551.632.400,00							7.595.250.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.046.358.000,00							7.036.750.000,00	
			-	-		-	-	7.046.358.000,00						-	7.014.650.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.057.100,00					-		3.800.000,00	
		-						4.057.100,00					-		3.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.844.000,00						-	1.600.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.492.600,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	720.500,00						-	800.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.844.000,00							1.600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	7 Dokumen	1.844.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.492.600,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	9 Laporan	1.492.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						720.500,00							800.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	720.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.767.286.500,00					-		5.803.250.000,00	
		-						5.767.286.500,00					-		5.803.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	670.000,00						-	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.070.000,00						-	900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.537.500,00						-	1.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	1.473.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.762.536.000,00						-	5.800.000.000,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.762.536.000,00							5.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	41 Orang/bulan	5.762.536.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	5.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.070.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	1.070.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.537.500,00							1.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.537.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.473.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	1.473.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						670.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	670.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						800.000,00					-		400.000,00	
		-						800.000,00					-		400.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	320.000,00						-	200.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	480.000,00						-	200.000,00	
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						480.000,00							200.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	480.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						320.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	320.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.000.000,00					-		21.000.000,00	
		-						21.000.000,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	21.000.000,00						-	21.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						21.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	21.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	21.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						375.083.000,00					-		297.900.000,00	
		-						375.083.000,00					-		297.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	980.000,00						-	900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	30.100.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	94.080.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	158.250.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	17.414.340,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.100.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.850.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	14.308.660,00						-	12.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.100.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	14.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	9.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.850.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	33.850.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.308.660,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	6 Paket	14.308.660,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						158.250.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	158.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	140.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.414.340,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	6 Paket	17.414.340,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	9.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.100.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	30.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94.080.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	94.080.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						980.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						658.046.400,00					-		650.400.000,00	
		-						658.046.400,00					-		650.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	254.180.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	403.266.400,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	600.000,00						-	400.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00							400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						254.180.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	254.180.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						403.266.400,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	403.266.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.085.000,00					-		260.000.000,00	
		-						220.085.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	4.498.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	188.880.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	26.707.000,00						-	35.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						188.880.000,00							195.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	40 Unit	188.880.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	195.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.707.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	40 Unit	26.707.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.498.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	4.498.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						150.000.000,00							150.000.000,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	25.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						118.050.000,00					-		75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						118.050.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	-	11.800.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	-		-	-	56.250.000,00						-	25.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						11.800.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	2 Berita Acara	11.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	2 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						56.250.000,00							25.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	-		-	2 Dokumen	56.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						14.950.000,00					-		50.000.000,00	
		-						14.950.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	-	5.150.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	-	9.800.000,00						-	25.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						9.800.000,00							25.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	1 Dokumen	9.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						5.150.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	1 Buku	5.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						17.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						17.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	17.000.000,00						-	25.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						17.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	4 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						355.274.400,00							408.500.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat; Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-		-	100 %; 100 %	90.000.000,00						-	35.000.000,00	
			-	-		-	-	265.274.400,00						-	263.500.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						118.500.000,00					-		118.500.000,00	
		-						118.500.000,00					-		118.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	53.500.000,00						-	53.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	40 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	26 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						53.500.000,00							53.500.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	5 Laporan	53.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	53.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						90.000.000,00					Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi & SDA (Sumber Daya Alam)		105.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi & SDA (Sumber Daya Alam)		105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	-	20.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	40.000.000,00						-	35.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						30.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-		2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-		12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						40.000.000,00							35.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						146.774.400,00					-		185.000.000,00	
		-						146.774.400,00					-		185.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-		-	25.193.600,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	-	19.193.600,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	-	33.193.600,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	69.193.600,00						-	80.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						19.193.600,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	10 Laporan	19.193.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						69.193.600,00							80.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	3 Laporan	69.193.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						25.193.600,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	2 Dokumen	25.193.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						33.193.600,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	14 Laporan	33.193.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						140.000.000,00							140.000.000,00	
4.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						140.000.000,00							140.000.000,00	
			-	-		-	-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						140.000.000,00					-		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						140.000.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	-		-	-	55.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	-		-	-	55.000.000,00						-	55.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah						55.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	-		-	11 Kegiatan	55.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	-		-	20 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	-		-	2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	J U M L A H							7.691.632.400,00							7.735.250.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						457.864.630.444,00							488.172.924.252,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						457.864.630.444,00							488.172.924.252,00	
	5.02	KEUANGAN						457.864.630.444,00							488.172.924.252,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.542.833.144,00							24.852.203.752,00	
			-	-		-	-	19.481.833.144,00						-	24.768.203.752,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.354.400,00					-		21.000.000,00	
		-						16.354.400,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.200.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.454.400,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.100.000,00						-	2.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	57 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.454.400,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	100 Dokumen	3.454.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.200.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	57 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.100.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	100 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.100.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.837.762.744,00					-		22.223.203.752,00	
		-						17.837.762.744,00					-		22.223.203.752,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	17.500.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	17.818.012.744,00						-	22.185.203.752,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.818.012.744,00							22.185.203.752,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	74 Orang/bulan	17.818.012.744,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	22.185.203.752,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						17.500.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	10 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	35.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.250.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.536.000,00					-		850.500.000,00	
		-						444.536.000,00					-		850.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	11.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	288.536.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	215.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	37.500.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	10.500.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.500.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							215.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	215.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.500.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	37.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	55.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						288.536.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	288.536.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	550.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.280.000,00					-		100.000.000,00	
		-						99.280.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	99.280.000,00						-	100.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						99.280.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	99.280.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						794.900.000,00					-		807.500.000,00	
		-						794.900.000,00					-		807.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	571.400.000,00						-	575.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	210.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	11.000.000,00						-	20.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						571.400.000,00							575.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	571.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	575.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						210.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	210.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350.000.000,00					-		850.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	250.000.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	50 Unit	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	270.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	55.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	525.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						435.961.077.300,00							459.398.220.500,00	
			-	-		-	-	435.651.077.300,00						-	459.398.220.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						745.000.000,00					-		1.065.000.000,00	
		-						745.000.000,00					-		1.065.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	160.000.000,00						-	230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	160.000.000,00						-	155.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	200.000.000,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	225.000.000,00						-	350.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						160.000.000,00							230.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	230.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						160.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	155.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						200.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	330.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						225.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	5 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						315.000.000,00					-		430.000.000,00	
		-						315.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-		50.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-		75.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-		40.000.000,00						-	50.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-		24 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						285.000.000,00					-		331.000.000,00	
		-						285.000.000,00					-		331.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	100.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	180.000.000,00						-	200.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	125.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						180.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						434.466.077.300,00					-		457.482.220.500,00	
		-						434.466.077.300,00					-		457.482.220.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	-	8.578.139.000,00						-	5.135.880.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	388.354.805.000,00						-	420.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	30.033.133.300,00						-	26.846.340.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	7.500.000.000,00						-	5.500.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						8.578.139.000,00							5.135.880.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	8.578.139.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.135.880.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						388.354.805.000,00							420.000.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	12 Laporan	388.354.805.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	420.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						7.500.000.000,00							5.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	12 Laporan	7.500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						30.033.133.300,00							26.846.340.500,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	30.033.133.300,00	Kab. Pemalang	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	26.846.340.500,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						150.000.000,00					-		90.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	35.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	55.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	35.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						460.000.000,00							712.500.000,00	
			-	-		-	-	310.000.000,00						-	712.500.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						460.000.000,00					-		712.500.000,00	
		-						460.000.000,00					-		712.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00						-	210.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						100.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	210.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						10.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						150.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	270.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	165.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1.900.720.000,00							3.210.000.000,00	
			-	-		-	-	1.350.720.000,00						-	3.210.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.900.720.000,00					-		3.210.000.000,00	
		-						1.900.720.000,00					-		3.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	245.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	250.000.000,00						-	345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	425.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	300.000.000,00						-	680.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	300.720.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	450.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						300.000.000,00							680.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	680.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						150.000.000,00							425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	425.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	110.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						100.000.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-		700000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	320.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						200.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-		12 Layanan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						200.000.000,00							245.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-		12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	245.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-		12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	120.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						250.000.000,00							345.000.000,00	
		Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-		12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	345.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						200.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	105.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						300.720.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	300.720.000,00	Kab. Pemalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	J U M L A H							457.864.630.444,00							488.172.924.252,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						19.656.466.600,00							22.947.316.526,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.656.466.600,00							22.947.316.526,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						19.318.776.230,00							22.347.316.526,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.982.711.281,00							21.208.194.174,00	
			-	-		-	-	17.982.711.281,00						-	21.196.194.174,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.899.900,00					-		43.249.699,00	
		-						27.899.900,00					-		43.249.699,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.524.900,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	4.720.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.120.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.790.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.245.000,00						-	11.749.699,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.120.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.720.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	4.720.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.790.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	19 Laporan	4.790.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	9.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.245.000,00							11.749.699,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	14 Laporan	3.245.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.749.699,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.524.900,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	6.524.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.915.283.000,00					-		7.377.534.000,00	
		-						6.915.283.000,00					-		7.377.534.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.810.000,00						-	2.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.913.473.000,00						-	7.374.784.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.913.473.000,00							7.374.784.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	6.913.473.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.374.784.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.810.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	1.810.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						97.540.000,00					-		123.425.000,00	
		-						97.540.000,00					-		123.425.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	97.540.000,00						-	123.425.000,00	
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						97.540.000,00							123.425.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	350 Orang	97.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	123.425.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						204.210.387,00					-		255.262.983,00	
		-						204.210.387,00					-		255.262.983,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	10.620.000,00						-	13.275.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	2.240.000,00						-	2.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.600.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	6.790.000,00						-	8.487.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	93.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	73.932.187,00						-	92.415.233,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.665.000,00						-	10.831.250,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.528.200,00						-	8.160.250,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.835.000,00						-	23.543.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.528.200,00							8.160.250,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	6.528.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.160.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.835.000,00							23.543.750,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	18.835.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	23.543.750,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						73.932.187,00							92.415.233,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	73.932.187,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	92.415.233,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.665.000,00							10.831.250,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.665.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.831.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.620.000,00							13.275.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	10.620.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	13.275.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.790.000,00							8.487.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	6.790.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.487.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							93.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	93.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.600.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	4 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.240.000,00							2.800.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	12 Dokumen	2.240.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.800.000,00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						215.667.314,00					-		269.584.142,00	
		-						215.667.314,00					-		269.584.142,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	72.120.000,00						-	90.150.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	143.547.314,00						-	179.434.142,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						72.120.000,00							90.150.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 set Unit	72.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	90.150.000,00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						143.547.314,00							179.434.142,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	13 Unit	143.547.314,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	179.434.142,00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.880.643.600,00					-		12.337.804.500,00	
		-						9.880.643.600,00					-		12.337.804.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.677.993.600,00						-	12.084.492.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.650.000,00						-	3.312.500,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.650.000,00							3.312.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.650.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.312.500,00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.677.993.600,00							12.084.492.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	9.677.993.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.084.492.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						641.467.080,00					-		801.333.850,00	
		-						641.467.080,00					-		801.333.850,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	465.467.080,00						-	581.333.850,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	140.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	36.000.000,00						-	45.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						140.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	32 Unit	140.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	175.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	69 Unit	36.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						465.467.080,00							581.333.850,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	465.467.080,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	581.333.850,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.336.064.949,00							1.139.122.352,00	
			Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	-		-	21,18 Nilai	306.068.501,00						-	385.126.876,00	
			Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	-		-	94,87 Persen	306.068.501,00						-	385.126.876,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	-		-	20,69 Persen	306.068.501,00						-	385.126.876,00	
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	-		-	90,65 Persen	306.068.501,00						-	385.126.876,00	
			Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	-		-	99,58 Persen	306.068.501,00						-	385.126.876,00	
			Persentase terpenuhinya ASN	-		-	77,39 Persen	306.068.501,00						-	385.126.876,00	
			-	-		-	-	909.996.448,00						-	690.995.476,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						328.936.316,00					-		0,00	
		-						328.936.316,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	55.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	91.936.316,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	97.000.000,00						-	0,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						97.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	3 Dokumen	97.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						91.936.316,00							0,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	91.936.316,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						55.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						449.635.869,00					-		490.000.000,00	
		-						449.635.869,00					-		490.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	304.635.869,00						-	325.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	85.000.000,00						-	95.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	100 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						85.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	1000 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	95.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						304.635.869,00							325.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	60 Dokumen	304.635.869,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						306.068.501,00					ASN Kabupaten Pemalang		385.126.876,00	
		-						306.068.501,00					ASN Kabupaten Pemalang		385.126.876,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-		-	-	47.810.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-		-	-	58.800.000,00						-	78.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	83.357.000,00						-	102.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	-	116.101.501,00						-	145.126.876,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						116.101.501,00							145.126.876,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	95 Dokumen	116.101.501,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	145.126.876,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						83.357.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	100 Orang	83.357.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	102.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						47.810.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-		-	80 Orang	47.810.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						58.800.000,00							78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-		-	20 Orang	58.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	78.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						251.424.263,00					-		263.995.476,00	
		-						251.424.263,00					-		263.995.476,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	-	90.000.000,00						-	94.500.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	-	8.000.000,00						-	8.400.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	60.000.000,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	60.000.000,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	-	8.424.263,00						-	8.845.476,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	-	25.000.000,00						-	26.250.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						60.000.000,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	4 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	63.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						90.000.000,00							94.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	3 Orang	90.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	94.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	10 Orang	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.400.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						60.000.000,00							63.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	120 Orang	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	63.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						25.000.000,00							26.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	26.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						8.424.263,00							8.845.476,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	23 Dokumen	8.424.263,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.845.476,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						337.690.370,00							600.000.000,00	
3.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						337.690.370,00							600.000.000,00	
			Nilai IP ASN dimensi kompetensi	-		-	27,8 Nilai	337.690.370,00						-	360.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						131.822.770,00					ASN Kabupaten Pemalang		288.000.000,00	
		-						131.822.770,00					ASN Kabupaten Pemalang		288.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	-	93.165.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-		-	-	38.657.770,00						-	48.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						38.657.770,00							48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-		-	1 Dokumen	38.657.770,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	48.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						93.165.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	257 Orang	93.165.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	240.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						205.867.600,00					ASN Kabupaten Pemalang		312.000.000,00	
		-						205.867.600,00					ASN Kabupaten Pemalang		312.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-		-	-	6.560.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-		-	-	32.980.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	166.327.600,00						-	240.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga						32.980.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-		-	2 Dokumen	32.980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						166.327.600,00							240.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	88 Laporan	166.327.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	240.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						6.560.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-		-	1 Dokumen	6.560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	12.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	J U M L A H							19.656.466.600,00							22.947.316.526,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						6.600.039.600,00							5.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.600.039.600,00							5.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.600.039.600,00							5.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.255.039.000,00							5.000.000,00	
			-	-		-	-	5.255.039.000,00						-	5.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.648.500,00					-		5.000.000,00	
		-						36.648.500,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	33.929.150,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.719.350,00						-	5.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.929.150,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	33.929.150,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.719.350,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	0 Laporan	2.719.350,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.332.197.500,00					-		0,00	
		-						4.332.197.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	19.699.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1.223.750,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	-	-	-	1.428.250,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.309.846.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.309.846.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	4.309.846.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						19.699.500,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	19.699.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.223.750,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	1.223.750,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.428.250,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	0 Laporan	1.428.250,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						359.265.000,00					-		0,00	
		-						359.265.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	10.100.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	142.989.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	109.470.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	16.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	55.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	5.706.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	0 Paket	16.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	0 Paket	55.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.706.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	0 Paket	5.706.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						109.470.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	109.470.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	10.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						142.989.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	142.989.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						214.297.000,00					-		0,00	
		-						214.297.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	103.193.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.104.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.104.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	1.104.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						103.193.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	103.193.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						312.631.000,00					-		0,00	
		-						312.631.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	132.923.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	152.708.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	27.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						152.708.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	152.708.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	27.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						132.923.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	0 Unit	132.923.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.345.000.600,00							0,00	
			-	-	-	-	-	1.345.000.600,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						142.009.000,00					-		0,00	
		-						142.009.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	72.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	-	-	-	70.009.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						70.009.000,00							0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	-	-	100 Orang	70.009.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						72.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	1 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						332.011.600,00					-		0,00	
		-						332.011.600,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	-	-		97.011.600,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	-		200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	-	-		35.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						97.011.600,00							0,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	-	1 Unit		97.011.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						35.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	-	300 Orang		35.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	300 Orang		200.000.000,00	Kab. Pemalang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						370.980.000,00					-		0,00	
		-						370.980.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-	-	-	-	83.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	213.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	-	74.980.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						74.980.000,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	0 Orang	74.980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						83.000.000,00							0,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-	-	-	0 Orang	83.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						213.000.000,00							0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	0 Orang	213.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-	-	-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	-	-	-	450.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						450.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	0 Kegiatan	450.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	J U M L A H							6.600.039.600,00							5.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						9.957.053.800,00							10.297.053.800,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						9.957.053.800,00							10.297.053.800,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.957.053.800,00							10.297.053.800,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.079.537.800,00							4.129.537.800,00	
			-	-		-	-	3.964.537.800,00						-	4.004.537.800,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						390.000.000,00					-		160.000.000,00	
		-						390.000.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	300.000.000,00						-	15.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.932.235.000,00					-		2.932.235.000,00	
		-						2.932.235.000,00					-		2.932.235.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.922.235.000,00						-	2.922.235.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.922.235.000,00							2.922.235.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	156 Orang/bulan	2.922.235.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.922.235.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	14 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		210.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	30 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	500 Orang	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						120.930.000,00					-		135.000.000,00	
		-						120.930.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	60.930.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.930.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	60.930.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.300.000,00					-		20.000.000,00	
		-						15.300.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.800.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.800.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	6 Unit	10.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.072.800,00					-		491.072.800,00	
		-						486.072.800,00					-		491.072.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	65.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	421.072.800,00						-	421.072.800,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						421.072.800,00							421.072.800,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	421.072.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	421.072.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.000.000,00					-		176.230.000,00	
		-						120.000.000,00					-		176.230.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	100.000.000,00						-	141.230.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							141.230.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	15 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	141.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.570.000.000,00							2.100.000.000,00	
			-	-		-	-	1.070.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.570.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		-						1.570.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-		-	-	500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	240.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	330.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-	-	-	-	500.000.000,00						-	250.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	-	1 Dokumen		500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						330.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	100 Orang		330.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						240.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	100 Orang		240.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-	-	75 Orang		500.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						2.897.516.000,00							3.172.516.000,00	
			-	-	-	-	-	2.897.516.000,00						-	3.172.516.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						2.897.516.000,00					-		3.172.516.000,00	
		-						2.897.516.000,00					-		3.172.516.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	25.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	2.822.516.000,00						-	2.822.516.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-		5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.822.516.000,00							2.822.516.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-		7 Dokumen	2.822.516.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	2.822.516.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-		500 Orang	50.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						595.000.000,00							405.000.000,00	
			-	-		-	-	595.000.000,00						-	390.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						595.000.000,00					-		405.000.000,00	
		-						595.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	470.000.000,00						-	75.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						0,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	5 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						470.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	100 Orang	470.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						100.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						380.000.000,00							250.000.000,00	
			-	-		-	-	380.000.000,00						-	150.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						380.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						380.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	250.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	70.000.000,00						-	100.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						70.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						250.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	100 Orang	250.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						435.000.000,00							240.000.000,00	
			-	-		-	-	435.000.000,00						-	220.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						435.000.000,00					-		240.000.000,00	
		-						435.000.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	160.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	175.000.000,00						-	20.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						175.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	100 Orang	175.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						100.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							9.957.053.800,00							10.297.053.800,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PEMALANG KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Pemalang						13.509.842.400,00							13.725.482.900,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.509.842.400,00							13.725.482.900,00	
	7.01	KECAMATAN						13.509.842.400,00							13.725.482.900,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	12.251.346.000,00						-	12.262.531.020,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	191.093.450,00						-	332.422.546,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	951.012.850,00						-	951.530.850,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.453.000,00					Kecamatan Pemalang		23.472.020,00	
		-						17.453.000,00					Kecamatan Pemalang		23.472.020,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.150.000,00						-	6.160.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.073.000,00						-	1.709.070,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.401.000,00						-	3.088.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.073.000,00						-	1.603.470,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.073.000,00						-	1.847.670,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.073.000,00						-	1.506.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	3.060.000,00						-	3.154.800,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.550.000,00						-	4.401.760,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.401.000,00							3.088.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	2.401.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.088.800,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.073.000,00							1.506.450,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.073.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.506.450,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.073.000,00							1.847.670,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.073.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.847.670,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.073.000,00							1.709.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.073.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.709.070,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.073.000,00							1.603.470,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.073.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.603.470,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.060.000,00							3.154.800,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	18 Laporan	3.060.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.154.800,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00							4.401.760,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.550.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.401.760,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.150.000,00							6.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1 Berita Acara	5.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.160.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.238.185.000,00					Kecamatan Pemalang		12.239.059.000,00	
		-						12.238.185.000,00					Kecamatan Pemalang		12.239.059.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	100.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1.073.000,00						-	1.947.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	12.237.012.000,00						-	12.237.012.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.237.012.000,00							12.237.012.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	112 Orang/bulan	12.237.012.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	12.237.012.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	0 Dokumen	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.073.000,00							1.947.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.073.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.947.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000,00					Kecamatan Pemalang		200.000,00	
		-						200.000,00					Kecamatan Pemalang		200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kecamatan Pemalang		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kecamatan Pemalang		11.200.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.481.000,00							9.900.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	37 Orang	11.481.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	9.900.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kecamatan Pemalang		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kecamatan Pemalang		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.224.000,00							4.679.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.224.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.679.400,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.722.450,00							31.414.416,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	28.722.450,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	31.414.416,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.180.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.180.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						63.913.000,00							69.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	63.913.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	69.850.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.210.000,00							8.056.730,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.210.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.056.730,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.422.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.422.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						52.263.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	52.263.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	44.000.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						100.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	0 Dokumen	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kecamatan Pemalang		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kecamatan Pemalang		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	100.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	12.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kecamatan Pemalang		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kecamatan Pemalang		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.360.000,00							2.598.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.360.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.598.200,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.680.000,00							41.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	37.680.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	41.448.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						838.800.704,00							835.150.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	838.800.704,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	835.150.400,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kecamatan Pemalang		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kecamatan Pemalang		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.137.500,00							25.451.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	13 Unit	23.137.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	25.451.250,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.500.000,00							4.950.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	17 Unit	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.950.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.030.000,00							14.333.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	19 Unit	13.030.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	14.333.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						31.404.646,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	31.404.646,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	27.500.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	12.910.000,00						-	12.931.380,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kecamatan Pemalang		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kecamatan Pemalang		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.600.000,00							2.249.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	4 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.249.500,00	Kecamatan Pemalang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kecamatan Pemalang		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kecamatan Pemalang		30.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	3.210.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.640.000,00						-	1.287.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						3.210.000,00							1.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	3.210.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.640.000,00							1.287.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.640.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.287.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.800.000,00							1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						660.000,00					Kecamatan Pemalang		9.394.880,00	
		-						660.000,00					Kecamatan Pemalang		9.394.880,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	560.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	100.000,00						-	8.294.880,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						100.000,00							8.294.880,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.294.880,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						560.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kecamatan Pemalang
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	57.567.100,00						-	69.148.364,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	57.567.100,00						-	69.148.364,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						57.467.100,00					Kecamatan Pemalang		69.048.364,00	
		-						57.467.100,00					Kecamatan Pemalang		69.048.364,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	33.792.000,00						-	39.292.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	22.655.100,00						-	27.556.364,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.020.000,00						-	2.200.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.020.000,00							2.200.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						33.792.000,00							39.292.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	2 Dokumen	33.792.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	39.292.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						22.655.100,00							27.556.364,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	22.655.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	27.556.364,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kecamatan Pemalang		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kecamatan Pemalang		2.612.983.735,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						100.000,00					Kecamatan Pemalang		100.000,00	
		-						100.000,00					Kecamatan Pemalang		100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						100.000,00							100.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	4.065.000,00						-	1.893.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kecamatan Pemalang		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kecamatan Pemalang		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.965.000,00							1.793.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.965.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.793.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100.000,00					Kecamatan Pemalang		100.000,00	
		-						100.000,00					Kecamatan Pemalang		100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	pg. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	21.614.000,00						-	25.860.240,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kecamatan Pemalang		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kecamatan Pemalang		63.145.900,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	6.300.000,00						-	8.090.500,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						14.654.000,00							17.669.740,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	304 Orang	14.654.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	17.669.740,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	0 Orang	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						560.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	1 Laporan	560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6.300.000,00							8.090.500,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	2 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.090.500,00	Kecamatan Pemalang
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						15.042.000,00							26.265.500,00	
			Jumlah desa yang naik statusnya	-		-	0 Desa	11.182.000,00						-	26.065.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.042.000,00					Kecamatan Pemalang		26.265.500,00	
		-						15.042.000,00					Kecamatan Pemalang		26.265.500,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	100.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	560.000,00						-	100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	1.200.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	2.040.000,00						-	2.211.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	3.316.000,00						-	7.067.500,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	560.000,00						-	1.732.500,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	2.366.000,00						-	4.411.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.600.000,00						-	1.743.500,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.600.000,00						-	3.690.500,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	1.600.000,00						-	4.009.500,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.600.000,00							4.009.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	39 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.009.500,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.600.000,00							1.743.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	13 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.743.500,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.600.000,00							3.690.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	39 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.690.500,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						560.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	0 Dokumen	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						560.000,00							1.732.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	5 Dokumen	560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.732.500,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						2.366.000,00							4.411.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	3 Dokumen	2.366.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.411.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.200.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						2.040.000,00							2.211.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	2 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.211.000,00	Kecamatan Pemalang
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						3.316.000,00							7.067.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	3.316.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.067.500,00	Kecamatan Pemalang
		Kelurahan Kebondalem						393.660.000,00							492.706.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						393.660.000,00							492.706.000,00	
	7.01	KECAMATAN						393.660.000,00							492.706.000,00	
7.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	29.479.500,00						-	102.010.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	46.150.500,00						-	40.096.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Kebondalem		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Kebondalem		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Kebondalem		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Kebondalem		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.568.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.568.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.650.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.642.500,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	7.642.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.763.000,00							24.332.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	13.763.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	24.332.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.750.000,00							1.980.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.676.000,00							2.948.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	2.676.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.948.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.080.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	25 Laporan	2.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Kebondalem		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Kebondalem		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Kebondalem		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Kebondalem		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.660.500,00							20.526.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	18.660.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.526.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.400.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.640.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Kebondalem		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Kebondalem		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.370.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	6.370.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	4.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.400.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.660.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	14.660.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
8.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	5.004.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Kebondalem		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Kebondalem		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Kebondalem		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Kebondalem		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.004.000,00							5.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	5.004.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Kebondalem
9.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	308.001.000,00						-	338.800.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	308.001.000,00						-	338.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Kebondalem		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Kebondalem		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8.001.000,00							8.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.001.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						80.000.000,00							81.305.400,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	81.305.400,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						220.000.000,00							248.694.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	220.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	248.694.600,00	Kelurahan Kebondalem
10.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	0,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Kebondalem		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kelurahan Kebondalem		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
11.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	5.025.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Kebondalem		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Kebondalem		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						5.025.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	50 Orang	5.025.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.500.000,00	Kelurahan Kebondalem
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Kebondalem 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	100.000,00	Kelurahan Kebondalem
		Kelurahan Pelutan						387.880.000,00							580.948.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						387.880.000,00							580.948.000,00	
	7.01	KECAMATAN						387.880.000,00							580.948.000,00	
12.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	47.314.000,00						-	102.010.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	21.226.000,00						-	33.738.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Pelutan		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Pelutan		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Pelutan		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Pelutan		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.650.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						585.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	585.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.389.000,00							24.332.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	22.389.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	24.332.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.600.000,00							1.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	3.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00							2.948.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	2 Dokumen	2.640.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.948.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.100.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	25 Laporan	18.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Pelutan		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Pelutan		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Pelutan		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Pelutan		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.948.000,00							14.168.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	12.948.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	14.168.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.640.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Pelutan		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Pelutan		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						450.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.150.000,00							4.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	17 Unit	5.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.400.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.678.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.678.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
13.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	0,00						-	5.600.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Pelutan		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Pelutan		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Pelutan		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Pelutan		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							5.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Pelutan
14.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	305.100.000,00						-	433.400.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	305.100.000,00						-	433.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Pelutan		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Pelutan		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.100.000,00							8.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						113.022.000,00							257.217.400,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	113.022.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	257.217.400,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						186.978.000,00							167.382.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	186.978.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	167.382.600,00	Kelurahan Pelutan
15.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	2.000.000,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Pelutan		3.093.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						13.365.000,00					Kelurahan Pelutan		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	5 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
16.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	12.240.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Pelutan		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Pelutan		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12.240.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	240 Orang		12.240.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Pelutan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Pelutan
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0 Laporan		0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Pelutan
		Kelurahan Paduraksa						390.180.000,00							503.018.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						390.180.000,00							503.018.000,00	
	7.01	KECAMATAN						390.180.000,00							503.018.000,00	
17.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	40.295.000,00						-	102.670.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	21.185.000,00						-	35.608.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Paduraksa		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Paduraksa		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Paduraksa		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Paduraksa		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.650.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.976.800,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.976.800,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.272.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.272.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.856.000,00							24.992.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	20.856.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	24.992.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.790.200,00							1.980.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.790.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.948.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.948.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.400.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	5 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Paduraksa		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Paduraksa		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Paduraksa		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Paduraksa		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							330.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.515.000,00							16.698.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-		12 Laporan	17.515.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	16.698.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							1.980.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Paduraksa		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Paduraksa		219.165.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						450.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.420.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.400.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	11.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
18.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	14.240.000,00						-	19.740.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Paduraksa		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Paduraksa		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.240.000,00							14.240.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	2 Dokumen	14.240.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	14.240.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Paduraksa		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Paduraksa		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							5.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.500.000,00	Kelurahan Paduraksa
19.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	305.560.000,00						-	338.800.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	305.560.000,00						-	338.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Paduraksa		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Paduraksa		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.560.000,00							8.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.560.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						157.000.000,00							160.963.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	157.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	160.963.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						143.000.000,00							169.037.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	7 Pokmas / Ormas	143.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	169.037.000,00	Kelurahan Paduraksa
20.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	-	100 %	7.300.000,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Paduraksa		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kelurahan Paduraksa		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	100.000,00						-	700.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.300.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	12 Laporan	7.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
21.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	1.600.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Paduraksa		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Paduraksa		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						1.600.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	1.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Paduraksa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Paduraksa 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Paduraksa
		Kelurahan Sugihwaras						389.400.000,00							439.940.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						389.400.000,00							439.940.000,00	
	7.01	KECAMATAN						389.400.000,00							439.940.000,00	
22.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	17.561.282,00						-	19.417.410,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	46.037.468,00						-	61.741.215,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Sugihwaras		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Sugihwaras		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						600,00							660,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	660,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Sugihwaras		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Sugihwaras		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.566.800,00							1.723.480,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	1.566.800,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.723.480,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.345.000,00							2.579.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	2.345.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.579.500,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						600,00							660,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	0 Paket	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	660,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.668.882,00							9.535.770,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	8.668.882,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	9.535.770,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.700.000,00							1.870.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	1.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.870.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.680.000,00							1.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.848.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.600.000,00							1.760.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	1.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.760.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Sugihwaras		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Sugihwaras		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						600,00							660,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	660,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600,00							660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	660,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Sugihwaras		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Sugihwaras		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						300.000,00							330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.400.000,00							15.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	14.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.840.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.400.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.640.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Sugihwaras		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Sugihwaras		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.720.000,00							6.292.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	5.720.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.292.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.090.000,00							6.699.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	6.090.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.699.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.127.468,00							18.840.215,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	17.127.468,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	18.840.215,00	Kelurahan Sugihwaras
23.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	10.100.000,00						-	11.110.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Sugihwaras		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Sugihwaras		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.100.000,00							11.110.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	2 Dokumen	10.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.110.000,00	Kelurahan Sugihwaras

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Sugihwaras		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Sugihwaras		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kelurahan Sugihwaras
24.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	312.348.850,00						-	343.583.735,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	312.348.850,00						-	343.583.735,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Sugihwaras		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Sugihwaras		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.348.850,00							13.583.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.348.850,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	13.583.735,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						99.989.200,00							109.988.120,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	99.989.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	109.988.120,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						200.010.800,00							220.011.880,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	200.010.800,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	220.011.880,00	Kelurahan Sugihwaras
25.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	0,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Sugihwaras		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kelurahan Sugihwaras		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Sugihwaras
26.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	3.350.600,00						-	3.685.660,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Sugihwaras		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Sugihwaras		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						3.350.000,00							3.685.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	30 Orang	3.350.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.685.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						600,00							660,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Sugihwaras 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	660,00	Kelurahan Sugihwaras
		Kelurahan Mulyoharjo						405.554.000,00							578.411.400,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						405.554.000,00							578.411.400,00	
	7.01	KECAMATAN						405.554.000,00							578.411.400,00	
27.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	44.349.460,00						-	38.402.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	45.543.540,00						-	53.509.400,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Mulyoharjo		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Mulyoharjo		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						600,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Mulyoharjo		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Mulyoharjo		448.039.956,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.917.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.917.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.650.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.043.860,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		12 Paket	10.043.860,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.935.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-		12 Paket	1.935.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.028.000,00							23.672.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-		12 Paket	17.028.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	23.672.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.200.000,00							1.980.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		12 Paket	7.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.225.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	5.225.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Mulyoharjo		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Mulyoharjo		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						600,00							100.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600,00							100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Mulyoharjo		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Mulyoharjo		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.900.000,00							33.609.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	33.609.400,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Mulyoharjo		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Mulyoharjo		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.277.940,00							1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	6 Unit	1.277.940,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						600,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.365.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	20 Unit	6.365.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.400.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						600,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
28.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	310.399.200,00						-	480.700.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	310.399.200,00						-	480.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Mulyoharjo		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Mulyoharjo		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.380.000,00							8.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.380.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						58.000.000,00							216.865.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	58.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	216.865.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						242.019.200,00							255.035.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	242.019.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	255.035.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
29.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	5.260.000,00						-	5.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Mulyoharjo		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Mulyoharjo		63.145.900,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						5.260.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	60 Orang	5.260.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Mulyoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
		Kelurahan Bojongbata						402.750.000,00							502.705.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						402.750.000,00							502.705.000,00	
	7.01	KECAMATAN						402.750.000,00							502.705.000,00	
30.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	46.020.800,00						-	102.010.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	23.948.000,00						-	50.095.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Bojongbata		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Bojongbata		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Bojongbata		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Bojongbata		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.497.400,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.497.400,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.650.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.623.400,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.623.400,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						703.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	703.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.200.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.995.000,00							24.332.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.995.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	24.332.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.818.000,00							1.980.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.818.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.980.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.320.000,00							2.948.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.948.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.064.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	5.064.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Bojongbata		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Bojongbata		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	40.000.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Bojongbata		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Bojongbata		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.900.000,00							30.525.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	17.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.525.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.400.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.640.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Bojongbata		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Bojongbata		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.648.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	3.648.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.400.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
31.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	0,00						-	5.600.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Bojongbata		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Bojongbata		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Bojongbata		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Bojongbata		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							5.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Bojongbata
32.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	327.783.200,00						-	338.800.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	327.783.200,00						-	338.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Bojongbata		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Bojongbata		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8.000.000,00							8.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						122.836.500,00							152.819.700,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	122.836.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	152.819.700,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						196.946.700,00							177.180.300,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	196.946.700,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	177.180.300,00	Kelurahan Bojongbata
33.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	0,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Bojongbata		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kelurahan Bojongbata		3.093.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
34.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	4.998.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Bojongbata		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Bojongbata		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						4.998.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	98 Orang	4.998.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.500.000,00	Kelurahan Bojongbata
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	100.000,00	Kelurahan Bojongbata
		Kelurahan Widuri						388.200.000,00							472.968.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						388.200.000,00							472.968.000,00	
	7.01	KECAMATAN						388.200.000,00							472.968.000,00	
35.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.907.217.850,00							14.453.061.421,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	51.773.000,00						-	79.698.000,00	
			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	27.884.600,00						-	42.570.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.582.200,00					Kelurahan Widuri		11.200.660,00	
		-						11.582.200,00					Kelurahan Widuri		11.200.660,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	11.481.600,00						-	10.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	100.600,00						-	600.660,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.404.292,00					Kelurahan Widuri		448.039.956,00	
		-						444.404.292,00					Kelurahan Widuri		448.039.956,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	14.220.000,00						-	21.010.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	97.332.000,00						-	78.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	208.532.882,00						-	232.045.770,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.938.100,00						-	22.826.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.709.200,00						-	16.302.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.587.510,00						-	63.793.916,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.984.600,00						-	13.200.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						936.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	936.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	1.650.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.648.500,00							13.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.648.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	13.300.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						894.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	894.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	2.200.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.920.000,00							31.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.920.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	31.000.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.869.900,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.869.900,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.904.000,00							2.948.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	2.904.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.948.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.600.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	1.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.303.600,00					Kelurahan Widuri		460.301.320,00	
		-						12.303.600,00					Kelurahan Widuri		460.301.320,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	101.800,00						-	120.100.660,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	12.001.800,00						-	200.200.660,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						600,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600,00							100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.017.588.204,00					Kelurahan Widuri		1.051.623.000,00	
		-						1.017.588.204,00					Kelurahan Widuri		1.051.623.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	162.027.500,00						-	192.814.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	852.600.704,00						-	853.630.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.960.000,00						-	4.578.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						300.000,00							330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	330.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.024.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	18.024.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.640.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.501.554,00					Kelurahan Widuri		219.165.465,00	
		-						165.501.554,00					Kelurahan Widuri		219.165.465,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	58.743.246,00						-	104.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.505.440,00						-	38.343.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.000.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.501.200,00						-	5.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.523.000,00						-	50.432.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.128.668,00						-	19.440.215,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						600,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.760.000,00							7.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	6.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.400.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						600,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
36.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.254.600,00							68.381.380,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	76,67 %	600,00						-	5.600.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.940.600,00					Kelurahan Widuri		27.999.500,00	
		-						25.940.600,00					Kelurahan Widuri		27.999.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.940.600,00						-	27.999.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						600,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0 Dokumen	600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.654.000,00					Kelurahan Widuri		30.987.000,00	
		-						15.654.000,00					Kelurahan Widuri		30.987.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.804.000,00						-	28.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							5.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.500.000,00	Kelurahan Widuri
37.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.230.419.350,00							2.682.132.099,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	303.560.000,00						-	338.800.000,00	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	-		-	67,25 %	303.560.000,00						-	338.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.172.852.250,00					Kelurahan Widuri		2.612.983.735,00	
		-						2.172.852.250,00					Kelurahan Widuri		2.612.983.735,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	52.949.850,00						-	66.383.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.405.954.700,00						-	1.478.241.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	713.847.700,00						-	1.068.258.620,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.560.000,00							8.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.560.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.800.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						83.000.000,00							89.100.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	83.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	89.100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						217.000.000,00							240.900.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	217.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	240.900.000,00	Kelurahan Widuri
38.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.465.000,00							3.193.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	0,00						-	100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.365.000,00					Kelurahan Widuri		3.093.000,00	
		-						13.365.000,00					Kelurahan Widuri		3.093.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	13.265.000,00						-	2.393.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	100.000,00						-	700.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
39.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.067.600,00							63.145.900,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	4.980.000,00						-	5.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.067.600,00					Kelurahan Widuri		63.145.900,00	
		-						59.067.600,00					Kelurahan Widuri		63.145.900,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	560.600,00						-	600.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	52.107.000,00						-	54.354.740,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						4.980.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	80 Orang	4.980.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Widuri
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Pemalang Kelurahan Widuri 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000,00	Kelurahan Widuri
	J U M L A H							16.267.466.400,00							17.296.179.300,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TAMAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Taman						5.415.740.800,00							5.846.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.354.900.800,00							5.776.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						5.354.900.800,00							5.776.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.415.084.600,00							5.806.430.000,00	
			-	-		-	-	5.245.575.600,00						-	5.546.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.351.500,00					-		36.000.000,00	
		-						30.351.500,00					-		36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	4.401.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	4.120.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	4.328.500,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.002.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.328.500,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.328.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.120.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.401.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.401.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.002.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	5.002.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.710.598.200,00					-		5.011.000.000,00	
		-						4.710.598.200,00					-		5.011.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.510.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.200,00						-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.701.088.000,00						-	5.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.701.088.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	4.701.088.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.000.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.510.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.510.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.200,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	5.000.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	30 Orang	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
		-						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	6.830.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.800.000,00						-	22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	146.432.900,00						-	139.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	36.200.600,00						-	48.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.571.400,00						-	19.150.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.850.400,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	13.850.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						86.031.050,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	86.031.050,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	90.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.600.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	6 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.426.650,00					-		56.300.000,00	
		-						30.426.650,00					-		56.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	22.096.650,00						-	49.800.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.656.650,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	17.656.650,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
		-						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	276.872.800,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	9.385.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.385.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	9.385.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						276.872.800,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	276.872.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	300.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
		-						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	44.620.000,00						-	64.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.810.550,00						-	22.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	17.620.000,00						-	24.550.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						11.540.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	11.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Taman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.620.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	14 Unit	14.620.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.070.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.070.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Kecamatan Taman
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.460.000,00							19.000.000,00	
			-	-		-	-	11.960.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					-		7.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.960.000,00					-		8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						6.960.000,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.460.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.460.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	3.460.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.500.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						809.194.000,00							767.600.000,00	
			-	-		-	-	28.010.000,00						-	39.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.010.000,00					-		39.000.000,00	
		-						28.010.000,00					-		39.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	25.010.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	19 Lembaga Kemasyarakan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						25.010.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	25.010.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Kecamatan Taman
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.000.000,00							16.500.000,00	
			-	-		-	-	6.400.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.750.000,00					-		12.500.000,00	
		-						6.750.000,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	6.750.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.150.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	3.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						3.250.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.250.000,00					-		4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	3.250.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						3.250.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	4 Laporan	3.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						49.800.200,00							57.100.000,00	
			-	-		-	-	36.200.200,00						-	42.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
		-						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	6.200.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	43.600.200,00						-	50.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						30.000.200,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	30.000.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	35.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6.200.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	7.000.000,00	Kecamatan Taman
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						20.255.000,00							27.000.000,00	
			-	-		-	-	14.255.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.255.000,00					-		27.000.000,00	
		-						20.255.000,00					-		27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	2.750.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.502.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	3.001.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.002.000,00						-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	19 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.002.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	19 Dokumen	3.002.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						2.750.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	19 Dokumen	2.750.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	19 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.502.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	4 Dokumen	2.502.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						3.001.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	4 Dokumen	3.001.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	19 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	4.000.000,00	Kecamatan Taman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X							60.840.000,00							70.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						60.840.000,00							70.000.000,00	
7.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						60.840.000,00							70.000.000,00	
			-	-		-	-	60.840.000,00						-	70.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.840.000,00					-		70.000.000,00	
		-						60.840.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	60.840.000,00						-	70.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.840.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	60.840.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	70.000.000,00	Kecamatan Taman
		Kelurahan Wanarejan Selatan						569.073.000,00							513.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						569.073.000,00							513.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						569.073.000,00							513.500.000,00	
8.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.415.084.600,00							5.806.430.000,00	
			-	-		-	-	73.487.000,00						-	72.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
		-						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	6.830.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.800.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	146.432.900,00						-	139.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	36.200.600,00						-	48.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.571.400,00						-	19.150.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.106.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.106.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.500.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.815.450,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	28.815.450,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	23.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.800.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	7.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.320.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.500.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	7.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
		-						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	37.395.000,00						-	38.900.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.575.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	16.575.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	18.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
		-						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	44.620.000,00						-	64.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.810.550,00						-	22.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	17.620.000,00						-	24.550.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.270.550,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	8.270.550,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	9.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.750.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	1.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	8.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.850.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	4.850.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
9.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						809.194.000,00							767.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	484.586.000,00						-	418.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						770.186.000,00					-		708.100.000,00	
		-						770.186.000,00					-		708.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.600.000,00						-	14.100.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	382.112.000,00						-	374.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	375.474.000,00						-	320.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	10 Lembaga Kemasyaraktan	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						235.474.000,00							180.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	235.474.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	180.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						242.112.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	242.112.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	230.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
10.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.000.000,00							16.500.000,00	
			-	-		-	-	3.600.000,00						-	8.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.750.000,00					-		12.500.000,00	
		-						6.750.000,00					-		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	6.750.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.600.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.500.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
11.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						49.800.200,00							57.100.000,00	
			-	-		-	-	7.400.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
		-						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	43.600.200,00						-	50.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						7.400.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	50 Orang	7.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Wanarejan Selatan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	8.000.000,00	Kelurahan Wanarejan Selatan
		Kelurahan Beji						395.820.000,00							404.130.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						395.820.000,00							404.130.000,00	
	7.01	KECAMATAN						395.820.000,00							404.130.000,00	
12.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.415.084.600,00							5.806.430.000,00	
			-	-		-	-	93.022.000,00						-	85.330.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
		-						234.004.900,00					-		238.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	6.830.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.800.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	146.432.900,00						-	139.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	36.200.600,00						-	48.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.571.400,00						-	19.150.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.615.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.615.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.650.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.586.400,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	31.586.400,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	26.000.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.400.600,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.400.600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.680.000,00							1.330.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.330.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.200.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.500.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.426.650,00					-		56.300.000,00	
		-						30.426.650,00					-		56.300.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	8.330.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	22.096.650,00						-	49.800.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						8.330.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	8.330.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.500.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.440.000,00							9.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	4.440.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	9.800.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
		-						323.652.800,00					-		349.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	37.395.000,00						-	38.900.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.820.000,00							20.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	20.820.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.900.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
		-						83.050.550,00					-		110.650.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	44.620.000,00						-	64.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.810.550,00						-	22.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	17.620.000,00						-	24.550.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.100.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.250.000,00							1.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.550.000,00	Kelurahan Beji

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.700.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kelurahan Beji
13.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						809.194.000,00							767.600.000,00	
			-	-		-	-	156.598.000,00						-	310.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						770.186.000,00					-		708.100.000,00	
		-						770.186.000,00					-		708.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.600.000,00						-	14.100.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	382.112.000,00						-	374.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	375.474.000,00						-	320.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.600.000,00							6.100.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga K emasyarakat an	5.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.100.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						140.000.000,00							140.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	140.000.000,00	Kelurahan Beji
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						140.000.000,00							144.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	144.000.000,00	Kelurahan Beji

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						10.998.000,00					-		20.500.000,00	
		-						10.998.000,00					-		20.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	10.998.000,00						-	20.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.998.000,00							20.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga K emasyarakatat an	10.998.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	20.500.000,00	Kelurahan Beji
14.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						49.800.200,00							57.100.000,00	
			-	-		-	-	6.200.000,00						-	7.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
		-						49.800.200,00					-		57.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	43.600.200,00						-	50.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						6.200.000,00							7.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	30 Orang	6.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Taman Kelurahan Beji 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.100.000,00	Kelurahan Beji
	J U M L A H							6.380.633.800,00							6.763.630.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PETARUKAN KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Petarukan						4.239.878.000,00							4.285.278.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.239.878.000,00							4.285.278.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.239.878.000,00							4.285.278.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.212.244.880,00							4.065.685.000,00	
			-	-		-	-	4.016.748.000,00						-	4.039.835.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.500.000,00					-		25.850.000,00	
		-						23.500.000,00					-		25.850.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	3.850.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.400.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.400.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							3.850.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.850.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.431.810.000,00					-		3.432.460.000,00	
		-						3.431.810.000,00					-		3.432.460.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	3.850.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.425.310.000,00						-	3.425.310.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.425.310.000,00							3.425.310.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	23 Orang/bulan	3.425.310.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.425.310.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.500.000,00							3.850.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.850.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.164.380,00					-		126.671.600,00	
		-						217.164.380,00					-		126.671.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.748.000,00						-	4.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	23.000.000,00						-	25.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	102.283.500,00						-	62.257.250,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	16.607.400,00						-	12.994.300,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.536.000,00						-	21.720.050,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.745.500,00							21.720.050,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	19.745.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	21.720.050,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.597.500,00							62.257.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	56.597.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	62.257.250,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.813.000,00							12.994.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.813.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.994.300,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.400.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.000.000,00							25.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						474.456.500,00					-		431.467.400,00	
		-						474.456.500,00					-		431.467.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	62.250.000,00						-	59.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	394.474.500,00						-	360.568.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	17.732.000,00						-	11.499.400,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.454.000,00							11.499.400,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	10.454.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.499.400,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.000.000,00							59.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	54.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	59.400.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						360.568.000,00							360.568.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	360.568.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	360.568.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.314.000,00					-		49.236.000,00	
		-						65.314.000,00					-		49.236.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.800.000,00						-	11.880.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	21.720.000,00						-	20.856.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.800.000,00							11.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	13 Unit	10.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.880.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.960.000,00							20.856.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	18.960.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.856.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	16.500.000,00	Kecamatan Petarukan
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						18.180.000,00							19.998.000,00	
			-	-		-	-	15.180.000,00						-	16.698.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.500.000,00					-		9.350.000,00	
		-						8.500.000,00					-		9.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	8.500.000,00						-	9.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.500.000,00							9.350.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	9.350.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.680.000,00					-		7.348.000,00	
		-						6.680.000,00					-		7.348.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.680.000,00						-	4.048.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.680.000,00							4.048.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.680.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.048.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.300.000,00	Kecamatan Petarukan
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						419.490.620,00							55.000.000,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	44.000.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	11.000.000,00	Kecamatan Petarukan
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.550.000,00							11.275.000,00	
			-	-		-	-	10.250.000,00						-	11.275.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.550.000,00					-		11.275.000,00	
		-						12.550.000,00					-		11.275.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	12.550.000,00						-	11.275.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.250.000,00							11.275.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	10.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	11.275.000,00	Kecamatan Petarukan
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						90.300.000,00							92.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	83.900.000,00						-	92.290.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						90.300.000,00					-		92.290.000,00	
		-						90.300.000,00					-		92.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	38.900.000,00						-	42.790.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	51.400.000,00						-	49.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						45.000.000,00							49.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	200 Orang	45.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	49.500.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						38.900.000,00							42.790.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	6 Dokumen	38.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	42.790.000,00	Kecamatan Petarukan
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						37.300.000,00							41.030.000,00	
			-	-		-	-	27.300.000,00						-	30.030.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						37.300.000,00					-		41.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						37.300.000,00					-		41.030.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	7.000.000,00						-	7.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.300.000,00						-	8.030.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	8.000.000,00						-	8.800.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						8.000.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	19 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.800.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.300.000,00							8.030.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	19 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.030.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	14 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.500.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.500.000,00	Kecamatan Petarukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						7.000.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.700.000,00	Kecamatan Petarukan
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.500.000,00	Kecamatan Petarukan
		Kelurahan Petarukan						550.187.500,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						550.187.500,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						550.187.500,00							0,00	
7.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.212.244.880,00							4.065.685.000,00	
			-	-		-	-	171.996.880,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.164.380,00					-		126.671.600,00	
		-						217.164.380,00					-		126.671.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.748.000,00						-	4.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	102.283.500,00						-	62.257.250,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	16.607.400,00						-	12.994.300,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.536.000,00						-	21.720.050,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.989.480,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.790.500,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.790.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.989.480,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	45.989.480,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.686.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	45.686.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.794.400,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.794.400,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.748.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	2.748.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						474.456.500,00					-		431.467.400,00	
		-						474.456.500,00					-		431.467.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	62.250.000,00						-	59.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	394.474.500,00						-	360.568.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	17.732.000,00						-	11.499.400,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.278.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	10 Laporan	7.278.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.250.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	8.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						33.906.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	33.906.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.314.000,00					-		49.236.000,00	
		-						65.314.000,00					-		49.236.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.870.000,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.499.500,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	21.720.000,00						-	20.856.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.424.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	5.870.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.499.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	1.499.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan industriasi bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.760.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	2.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.424.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	10.424.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
8.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						419.490.620,00							55.000.000,00	
			-	-		-	-	369.490.620,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						369.490.620,00					-		0,00	
		-						369.490.620,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.673.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	256.817.620,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.673.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga K emasyarakatat an	12.673.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						256.817.620,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-		1 Pokmas / Ormas	256.817.620,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
9.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.550.000,00							11.275.000,00	
			-	-		-	-	2.300.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.550.000,00					-		11.275.000,00	
		-						12.550.000,00					-		11.275.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	12.550.000,00						-	11.275.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
10.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						90.300.000,00							92.290.000,00	
			-	-		-	-	6.400.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						90.300.000,00					-		92.290.000,00	
		-						90.300.000,00					-		92.290.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	51.400.000,00						-	49.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						6.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	6.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Petarukan Kelurahan Petarukan 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P2. Penguatan i ndustrialisa si bidang pertanian dan perikanan		-	0,00	Kelurahan Petarukan
	J U M L A H							4.790.065.500,00							4.285.278.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN COMAL KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Comal						4.318.203.000,00							4.318.203.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.318.203.000,00							4.318.203.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.318.203.000,00							4.318.203.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.010.467.940,00							4.010.468.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuairegulasi	-		-	100 %	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	111.035.940,00						-	96.036.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan,Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	102.765.000,00						-	102.765.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	3.715.667.000,00						-	3.692.667.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.729.000,00					Kecamatan Comal		14.729.000,00	
		-						14.729.000,00					Kecamatan Comal		14.729.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.729.000,00						-	2.729.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.729.000,00							2.729.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.729.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.729.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.649.167.000,00					Kecamatan Comal		3.649.167.000,00	
		-						3.649.167.000,00					Kecamatan Comal		3.649.167.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.645.167.000,00						-	3.645.167.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.645.167.000,00							3.645.167.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	37 Orang/bulan	3.645.167.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.645.167.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.000.000,00					Kecamatan Comal		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Kecamatan Comal		4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.075.940,00					Kecamatan Comal		111.986.000,00	
		-						112.075.940,00					Kecamatan Comal		111.986.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	26.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.575.940,00						-	70.486.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54.625.940,00							54.536.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	54.625.940,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	54.536.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-		1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.910.000,00					Kecamatan Comal		30.000.000,00	
		-						29.910.000,00					Kecamatan Comal		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	14.910.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.910.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	30 Unit	14.910.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		5 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.486.000,00					Kecamatan Comal		115.486.000,00	
		-						115.486.000,00					Kecamatan Comal		115.486.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-		-	37.944.000,00						-	37.944.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		-	75.092.000,00						-	75.092.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		-	2.450.000,00						-	2.450.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.944.000,00							22.944.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	22.944.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	22.944.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.092.000,00							75.092.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	75.092.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	75.092.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.100.000,00					Kecamatan Comal		85.100.000,00	
		-						85.100.000,00					Kecamatan Comal		85.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	23.000.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.320.000,00						-	18.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	22.980.000,00						-	23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	23.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	23.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	2 Unit	500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	500.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.020.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	23 Unit	15.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		1 Unit	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.980.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		2 Unit	22.980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	23.000.000,00	Kecamatan Comal
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12.000.060,00							12.000.000,00	
			Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	100 %	4.000.060,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.000.060,00					Kecamatan Comal		6.000.000,00	
		-						6.000.060,00					Kecamatan Comal		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	2.000.060,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.000.060,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	2 Dokumen	2.000.060,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.000.000,00					Kecamatan Comal		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Kecamatan Comal		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						459.500.000,00							459.500.000,00	
			Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang aktif	-		-	100 %	247.500.000,00						-	247.500.000,00	
			Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik (Jalan dan Drainase Lingkungan)	-		-	69,40 %	247.500.000,00						-	247.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						71.500.000,00					Kecamatan Comal		71.500.000,00	
		-						71.500.000,00					Kecamatan Comal		71.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	34.000.000,00						-	34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	30.500.000,00						-	30.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						34.000.000,00							34.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	34.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						30.500.000,00							30.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	30.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.500.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						312.000.000,00					Kecamatan Comal		312.000.000,00	
		-						312.000.000,00					Kecamatan Comal		312.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					Kecamatan Comal		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					Kecamatan Comal		1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						75.000.000,00					Kecamatan Comal		75.000.000,00	
		-						75.000.000,00					Kecamatan Comal		75.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	1720 Keluarga	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	75.000.000,00	Kecamatan Comal
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.000.000,00							4.000.000,00	
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	-		-	undefined undefined	2.000.000,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	-		-	100 %	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Kecamatan Comal		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						89.000.000,00							89.000.000,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	86.000.000,00						-	86.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.000.000,00					Kecamatan Comal		89.000.000,00	
		-						89.000.000,00					Kecamatan Comal		89.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	64.000.000,00						-	64.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						61.000.000,00							61.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	700 Orang	61.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	61.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	24.000.000,00	Kecamatan Comal
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18.235.000,00							18.235.000,00	
			Jumlah Desa yang naik statusnya	-		-	3 Desa	4.235.000,00						-	4.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18.235.000,00					Kecamatan Comal		18.235.000,00	
		-						18.235.000,00					Kecamatan Comal		18.235.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	800.000,00						-	800.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	1.435.000,00						-	1.435.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						800.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	800.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1.435.000,00							1.435.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	2 Dokumen	1.435.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.435.000,00	Kecamatan Comal
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Comal
		Kelurahan Purwoharjo						275.000.000,00							275.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						275.000.000,00							275.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						275.000.000,00							275.000.000,00	
7.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.010.467.940,00							4.010.468.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	23.950.000,00						-	23.950.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan,Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	15.450.000,00						-	15.450.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	13.300.000,00						-	13.300.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.075.940,00					Kecamatan Comal		111.986.000,00	
		-						112.075.940,00					Kecamatan Comal		111.986.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	26.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.575.940,00						-	70.486.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.950.000,00							15.950.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	15.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.950.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.486.000,00					Kecamatan Comal		115.486.000,00	
		-						115.486.000,00					Kecamatan Comal		115.486.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	37.944.000,00						-	37.944.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.450.000,00						-	2.450.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						450.000,00							450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	450.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.100.000,00					Kecamatan Comal		85.100.000,00	
		-						85.100.000,00					Kecamatan Comal		85.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	17.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	3.300.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.320.000,00						-	18.300.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.300.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	3.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.300.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	3.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
8.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						459.500.000,00							459.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang aktif	-		-	100 %	212.000.000,00						-	212.000.000,00	
			Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik (Jalan dan Drainase Lingkungan)	-		-	69,40 %	212.000.000,00						-	212.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						312.000.000,00					Kecamatan Comal		312.000.000,00	
		-						312.000.000,00					Kecamatan Comal		312.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga K emasyarakatat an	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	12.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	200.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						89.000.000,00							89.000.000,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.000.000,00					Kecamatan Comal		89.000.000,00	
		-						89.000.000,00					Kecamatan Comal		89.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	64.000.000,00						-	64.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	384 Orang	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Comal Kelurahan Purwoharjo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kelurahan Purwoharjo
	J U M L A H							4.593.203.000,00							4.593.203.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN AMPELGADING KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Ampelgading						2.565.509.600,00							2.885.293.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.565.509.600,00							2.885.293.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.565.509.600,00							2.885.293.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.433.489.600,00							2.639.293.000,00	
			-	-		-	-	2.426.489.600,00						-	2.565.293.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.272.800,00					-		13.125.000,00	
		-						11.272.800,00					-		13.125.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.295.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.125.000,00						-	1.125.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.712.800,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.255.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.885.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.125.000,00							1.125.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.125.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.885.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.885.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.255.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.255.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.295.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.712.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.712.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.121.048.000,00					-		2.122.548.000,00	
		-						2.121.048.000,00					-		2.122.548.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.118.548.000,00						-	2.118.548.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.118.548.000,00							2.118.548.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	14 Orang/bulan	2.118.548.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.118.548.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.345.200,00					-		173.000.000,00	
		-						106.345.200,00					-		173.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	34.100.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.556.200,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.689.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.689.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	9 Paket	5.689.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	15.000.000,00	Kecamatan Ampelgading

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	27.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.556.200,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	14.556.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	40.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						34.100.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	250 Laporan	34.100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	50.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Ampelgading

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104.445.600,00					-		125.000.000,00	
		-						104.445.600,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.168.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	74.057.600,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.220.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.220.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	7.220.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.168.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	23.168.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	30.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						74.057.600,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	74.057.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	75.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.378.000,00					-		195.620.000,00	
		-						87.378.000,00					-		195.620.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	24.250.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	51.000.000,00						-	106.040.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.528.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.600.000,00						-	29.580.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.000.000,00							106.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	14 Unit	51.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	106.040.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.528.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	4 Unit	1.528.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.600.000,00							29.580.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	18 Unit	10.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	29.580.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.250.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	24.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	55.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						9.800.000,00							16.000.000,00	
			-	-	-	-	-	9.800.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.750.000,00					-		7.000.000,00	
		-						3.750.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.250.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.250.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	1.250.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.050.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.050.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	1.400.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	1.650.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.400.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	4 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.650.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	1 Laporan	1.650.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						40.700.000,00							55.000.000,00	
			-	-		-	-	40.700.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						40.700.000,00					-		55.000.000,00	
		-						40.700.000,00					-		55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-		27.700.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-		10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-		3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	8 Lembaga Kemasyarakatan		3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						27.700.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	1 Dokumen		27.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	16 Laporan		10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.000.000,00							20.000.000,00	
			-	-	-	-		3.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-		3.000.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	20.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						57.520.000,00							120.000.000,00	
			-	-		-	-	57.520.000,00						-	120.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						57.520.000,00					-		120.000.000,00	
		-						57.520.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	47.520.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						47.520.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	150 Orang	47.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	100.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						21.000.000,00							35.000.000,00	
			-	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						21.000.000,00					-		35.000.000,00	
		-						21.000.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ampelgading
	J U M L A H							2.565.509.600,00							2.885.293.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BODEH KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Bodeh						3.337.334.600,00							3.459.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.337.334.600,00							3.459.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.337.334.600,00							3.459.400.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.249.354.600,00							3.347.900.000,00	
			-	-		-	-	3.247.643.600,00						-	3.276.900.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.361.000,00					-		10.500.000,00	
		-						12.361.000,00					-		10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.711.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.951.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.711.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.807.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.974.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.207.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.807.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.807.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.711.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.711.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.711.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.711.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.951.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.951.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.974.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.974.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.207.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	2.207.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.819.705.000,00					-		2.905.000.000,00	
		-						2.819.705.000,00					-		2.905.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.817.705.000,00						-	2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.817.705.000,00							2.900.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	23/14 Orang/bulan	2.817.705.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.900.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.500.000,00					-		1.500.000,00	
		-						2.500.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000,00					-		200.000,00	
		-						100.000,00					-		200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	100.000,00						-	200.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	84 Orang	100.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	200.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						184.629.000,00					-		176.200.000,00	
		-						184.629.000,00					-		176.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	119.540.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.573.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	18.500.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.496.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.520.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.496.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.496.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.520.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	33.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	32.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.573.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	8.573.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.500.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	18.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Bodeh

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.200.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						119.540.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	119.540.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	110.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		24.000.000,00	
		-						0,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.229.600,00					-		150.500.000,00	
		-						148.229.600,00					-		150.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	66.636.000,00						-	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.993.600,00						-	79.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.600.000,00						-	3.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.600.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						66.636.000,00							68.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	66.636.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	68.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						77.993.600,00							79.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	77.993.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	79.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.830.000,00					-		80.000.000,00	
		-						81.830.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	42.220.000,00						-	36.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	19.610.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.220.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	42.220.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	36.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.610.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	148 Unit	19.610.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	22.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	22.000.000,00	Kecamatan Bodeh

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.000.000,00							6.000.000,00	
			-	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Bodeh
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						27.700.000,00							38.000.000,00	
			-	-		-	-	27.700.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27.700.000,00					-		38.000.000,00	
		-						27.700.000,00					-		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	22.900.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	4.800.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4.800.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga K emasyarakat an	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						22.900.000,00							32.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	22.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	32.000.000,00	Kecamatan Bodeh
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00							6.000.000,00	
			-	-		-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.500.000,00					-		4.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.500.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bodeh
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						42.480.000,00							54.000.000,00	
			-	-	-	-	-	42.480.000,00						-	54.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						42.480.000,00					-		54.000.000,00	
		-						42.480.000,00					-		54.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	39.980.000,00						-	52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						39.980.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	150 Orang	39.980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	52.000.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bodeh
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						7.800.000,00							7.500.000,00	
			-	-		-	-	2.600.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.800.000,00					-		7.500.000,00	
		-						7.800.000,00					-		7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.600.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.600.000,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	2.600.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.600.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.600.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.600.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h		-	1.500.000,00	Kecamatan Bodeh
	J U M L A H							3.337.334.600,00							3.459.400.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Ulujami						2.623.321.200,00							2.848.070.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.620.134.500,00							2.840.070.200,00	
	7.01	KECAMATAN						2.620.134.500,00							2.840.070.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.430.978.500,00							2.609.321.200,00	
			-	-		-	-	2.417.978.500,00						-	2.575.821.200,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.864.000,00					-		18.364.000,00	
		-						15.864.000,00					-		18.364.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.343.000,00						-	4.343.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.021.000,00						-	3.021.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.343.000,00							4.343.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	4.343.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.343.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.021.000,00							3.021.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.021.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.021.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.101.069.000,00					-		2.104.069.000,00	
		-						2.101.069.000,00					-		2.104.069.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.097.069.000,00						-	2.097.069.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.097.069.000,00							2.097.069.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17/14 Orang/bulan	2.097.069.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.097.069.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	20 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	20 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.169.300,00					-		128.122.000,00	
		-						63.169.300,00					-		128.122.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	41.325.000,00						-	101.227.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.844.300,00						-	4.895.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.325.000,00							101.227.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	41.325.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	101.227.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.844.300,00							4.895.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.844.300,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.895.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.514.000,00					-		34.650.000,00	
		-						39.514.000,00					-		34.650.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	39.514.000,00						-	34.650.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.514.000,00							34.650.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	39.514.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	34.650.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.962.200,00					-		114.962.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						108.962.200,00					-		114.962.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	49.757.000,00						-	49.757.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	51.495.200,00						-	51.495.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.710.000,00						-	13.710.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.710.000,00							13.710.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	7.710.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	13.710.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						49.757.000,00							49.757.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	49.757.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	49.757.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						51.495.200,00							51.495.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	14 Laporan	51.495.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	51.495.200,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.400.000,00					-		202.154.000,00	
		-						99.400.000,00					-		202.154.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	33.754.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	99.400.000,00						-	99.400.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	54.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						99.400.000,00							99.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	99.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	99.400.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	15.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							33.754.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	33.754.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	54.000.000,00	Kecamatan Ulujami
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13.000.000,00							24.993.000,00	
			-	-		-	-	3.500.000,00						-	13.993.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.000.000,00					-		11.993.000,00	
		-						6.000.000,00					-		11.993.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.993.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							5.993.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.993.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.000.000,00					-		12.000.000,00	
		-						6.000.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						32.498.000,00							35.998.000,00	
			-	-		-	-	32.498.000,00						-	35.998.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						32.498.000,00					-		35.998.000,00	
		-						32.498.000,00					-		35.998.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	28.998.000,00						-	28.998.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						28.998.000,00							28.998.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	28.998.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	28.998.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Ulujami
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.500.000,00							6.000.000,00	
			-	-		-	-	3.500.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.500.000,00					-		5.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						56.658.000,00							62.758.000,00	
			-	-		-	-	55.658.000,00						-	61.758.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						56.658.000,00					-		62.758.000,00	
		-						56.658.000,00					-		62.758.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	7.500.000,00						-	13.600.000,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	47.158.000,00						-	47.158.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						47.158.000,00							47.158.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	350 Orang	47.158.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	47.158.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	18 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.500.000,00							13.600.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	13.600.000,00	Kecamatan Ulujami
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						83.500.000,00							101.000.000,00	
			-	-		-	-	77.500.000,00						-	84.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						83.500.000,00					-		101.000.000,00	
		-						83.500.000,00					-		101.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	18 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	18 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	18 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	18 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	3.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	75.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	X							3.186.700,00							8.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.186.700,00							8.000.000,00	
7.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.186.700,00							8.000.000,00	
			-	-		-	-	3.186.700,00						-	8.000.000,00	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	1.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.186.700,00					-		7.000.000,00	
		-						2.186.700,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.186.700,00						-	7.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.186.700,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	2.186.700,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	7.000.000,00	Kecamatan Ulujami
	J U M L A H							2.623.321.200,00							2.848.070.200,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BANTARBOLANG KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Bantarbolang						2.809.714.400,00							22.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.809.714.400,00							22.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.809.714.400,00							22.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.650.651.400,00							22.000.000,00	
			-	-		-	-	2.629.651.400,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.250.000,00					-		14.000.000,00	
		-						7.250.000,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.250.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.250.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.295.224.000,00					-		4.000.000,00	
		-						2.295.224.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.292.224.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.292.224.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	60 Orang/bulan	2.292.224.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	11 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.780.000,00					-		0,00	
		-						10.780.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	10.780.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.780.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	10.780.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.175.000,00					-		0,00	
		-						52.175.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	24.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.175.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.175.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.175.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.134.800,00					-		0,00	
		-						60.134.800,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	4.565.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	55.569.800,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.565.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	71 Unit	4.565.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.569.800,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	16 Unit	55.569.800,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.490.400,00					-		0,00	
		-						144.490.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	25.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	116.990.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	25.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.990.400,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	116.990.400,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.597.200,00					-		0,00	
		-						78.597.200,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	28.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	39.772.200,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	4.825.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	3.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.772.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	20 Unit	39.772.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	36 Unit	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.825.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	26 Unit	4.825.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						28.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	28.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.500.000,00					-		0,00	
		-						4.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.500.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.500.000,00					-		0,00	
		-						9.500.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						3.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					-		0,00	
		-						1.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	17 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						30.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.000.000,00					-		0,00	
		-						28.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					-		0,00	
		-						2.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga K emasyarakat an	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11.200.000,00							0,00	
			-	-		-	-	11.200.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.000.000,00					-		0,00	
		-						7.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						4.200.000,00					-		0,00	
		-						4.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	4.200.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						4.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						69.113.000,00							0,00	
			-	-		-	-	69.113.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						69.113.000,00					-		0,00	
		-						69.113.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	6.523.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	3.490.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	56.600.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						56.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	120 Orang	56.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	50 Orang	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						3.490.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	3.490.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6.523.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	3 Dokumen	6.523.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						33.750.000,00							0,00	
			-	-		-	-	33.750.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						33.750.000,00					-		0,00	
		-						33.750.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	3.450.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	3.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	17 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	17 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	17 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						3.450.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	17 Dokumen	3.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	10 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						12.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	17 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	10 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	17 Dokumen	1.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	17 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang Kecamatan Bantarbolang Desa Bantarbolang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Bantarbolang
	J U M L A H							2.809.714.400,00							22.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Randudongkal						3.025.333.000,00							3.071.795.400,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.025.333.000,00							3.071.795.400,00	
	7.01	KECAMATAN						3.025.333.000,00							3.071.795.400,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.741.770.600,00							2.762.733.000,00	
			-	-		-	-	2.723.970.600,00						-	2.676.733.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.841.500,00					-		24.000.000,00	
		-						20.841.500,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.558.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.255.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.438.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.875.500,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.800.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.915.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.875.500,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.875.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.438.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.438.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.558.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.558.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.255.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.255.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.800.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.915.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.915.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.377.091.000,00					-		2.380.641.000,00	
		-						2.377.091.000,00					-		2.380.641.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.300.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-		3.150.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-		2.370.141.000,00						-	2.371.141.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.370.141.000,00							2.371.141.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	18/14 Orang/bulan	2.370.141.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.371.141.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.300.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	2.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.150.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	12 Laporan	3.150.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.000.000,00					-		9.000.000,00	
		-						7.000.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-		3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-		4.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					-		600.000,00	
		-						500.000,00					-		600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	500.000,00						-	600.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						500.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	25 Orang	500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	600.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.443.530,00					-		67.000.000,00	
		-						62.443.530,00					-		67.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.800.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.500.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.053.530,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.970.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.120.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.120.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.120.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.053.530,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	13.053.530,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	14.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.970.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	8.970.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	9.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.391.650,00					-		49.000.000,00	
		-						47.391.650,00					-		49.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	26.385.000,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	21.006.650,00						-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						26.385.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	30 Unit	26.385.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	27.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.006.650,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	21.006.650,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	22.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.117.920,00					-		150.492.000,00	
		-						148.117.920,00					-		150.492.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	45.300.000,00						-	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	97.817.920,00						-	98.492.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.300.000,00							46.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	45.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	46.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.817.920,00							98.492.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	97.817.920,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	98.492.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.385.000,00					-		82.000.000,00	
		-						78.385.000,00					-		82.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	13.000.000,00						-	14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.090.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.995.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	54.300.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						13.000.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	13.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	14.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.090.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	4 Unit	1.090.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.995.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	9.995.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						54.300.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	54.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	55.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						39.000.000,00							46.000.000,00	
			-	-		-	-	18.000.000,00						-	21.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.000.000,00					-		18.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.000.000,00					-		22.000.000,00	
		-						19.000.000,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	6.000.000,00						-	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	6.000.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	7.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	7.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						104.062.400,00							106.562.400,00	
			-	-		-	-	104.062.400,00						-	106.562.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						104.062.400,00					-		106.562.400,00	
		-						104.062.400,00					-		106.562.400,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	30.562.400,00						-	31.562.400,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	73.500.000,00						-	75.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						30.562.400,00							31.562.400,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	30.562.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	31.562.400,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						73.500.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	73.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	75.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20.000.000,00							22.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.500.000,00							63.500.000,00	
			-	-		-	-	49.500.000,00						-	52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.500.000,00					-		63.500.000,00	
		-						59.500.000,00					-		63.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	32.500.000,00						-	33.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						32.500.000,00							33.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	32.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	33.500.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	11.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						61.000.000,00							71.000.000,00	
			-	-		-	-	20.000.000,00						-	23.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.000.000,00					-		71.000.000,00	
		-						61.000.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	8.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	18 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	18 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	18 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	9.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	18 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	18 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.000.000,00	Kecamatan Randudongkal
	J U M L A H							3.025.333.000,00							3.071.795.400,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WARUNGPRING KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Warungpring						2.873.368.200,00							3.143.229.650,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.873.368.200,00							3.143.229.650,00	
	7.01	KECAMATAN						2.873.368.200,00							3.143.229.650,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.744.250.682,00							2.952.482.150,00	
			Nilai SAKIP	-		-	65 Nilai	2.485.237.200,00						-	2.598.577.500,00	
			Prosentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	-		-	100 %	258.013.482,00						-	342.904.650,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.154.300,00					-		29.463.600,00	
		-						17.154.300,00					-		29.463.600,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.417.200,00						-	3.427.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.482.600,00						-	5.482.600,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.702.100,00						-	3.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.407.000,00						-	3.674.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.637.300,00						-	3.637.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.460.000,00						-	5.464.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.048.100,00						-	4.061.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.482.600,00							5.482.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	2.482.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.482.600,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.637.300,00							3.637.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.637.300,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.637.500,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.407.000,00							3.674.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.407.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.674.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.417.200,00							3.427.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.417.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.427.500,00	Kecamatan Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.702.100,00							3.717.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.702.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.717.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.460.000,00							5.464.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	2.460.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.464.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.048.100,00							4.061.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.048.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.061.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.468.082.900,00					-		2.569.113.900,00	
		-						2.468.082.900,00					-		2.569.113.900,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.100.900,00						-	2.131.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.466.982.000,00						-	2.566.982.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.466.982.000,00							2.566.982.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	2.466.982.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.566.982.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.100.900,00							2.131.900,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.100.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.131.900,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		3.393.850,00	
		-						1.000.000,00					-		3.393.850,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	3.393.850,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.000.000,00							3.393.850,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.393.850,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.610.400,00					-		2.524.600,00	
		-						1.610.400,00					-		2.524.600,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.610.400,00						-	2.524.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.610.400,00							2.524.600,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	18 Orang	1.610.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.524.600,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						120.873.080,00					-		165.600.000,00	
		-						120.873.080,00					-		165.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.534.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	31.640.000,00						-	36.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	73.941.200,00						-	93.941.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.499.400,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.097.480,00						-	8.520.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	8.695.000,00						-	16.005.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.499.400,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	1.499.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.097.480,00							8.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	1.097.480,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.520.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.695.000,00							16.005.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	8.695.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	16.005.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						73.941.200,00							93.941.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	73.941.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	93.941.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						31.640.000,00							36.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	31.640.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	36.600.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							2.534.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.534.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					-		17.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		17.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	17.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	17.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.994.752,00					-		124.886.200,00	
		-						99.994.752,00					-		124.886.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.840.000,00						-	32.891.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.690.752,00						-	68.495.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.964.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	8.500.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	12.500.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.840.000,00							32.891.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	27.840.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	32.891.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.964.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Laporan	4.964.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						58.690.752,00							68.495.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	14 Laporan	58.690.752,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	68.495.200,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.535.250,00					-		40.500.000,00	
		-						20.535.250,00					-		40.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.024.250,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	13.020.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	991.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.500.000,00						-	8.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						13.020.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	13 Unit	13.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	16.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						991.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	5 Unit	991.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.500.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.024.250,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.024.250,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Warungpring
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						9.457.500,00							32.095.000,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	23,33 %	9.457.500,00						-	32.095.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.870.100,00					-		4.870.000,00	
		-						1.870.100,00					-		4.870.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	1.870.100,00						-	4.870.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.870.100,00							4.870.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	12 Dokumen	1.870.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.870.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4.730.300,00					-		15.410.000,00	
		-						4.730.300,00					-		15.410.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	1.535.000,00						-	5.735.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.500.800,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.694.500,00						-	5.675.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.535.000,00							5.735.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	1.535.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.735.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.500.800,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.500.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.694.500,00							5.675.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.694.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.675.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.857.100,00					-		11.815.000,00	
		-						2.857.100,00					-		11.815.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	1.805.100,00						-	5.805.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	1.052.000,00						-	6.010.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.805.100,00							5.805.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	1.805.100,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.805.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.052.000,00							6.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	1.052.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.010.000,00	Kecamatan Warungpring
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						53.990.400,00							64.252.500,00	
			Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	-		-	100 %	53.990.400,00						-	64.252.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						53.990.400,00					-		64.252.500,00	
		-						53.990.400,00					-		64.252.500,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	25.452.500,00						-	29.252.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	25.537.900,00						-	31.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	24 Lembaga Kemasyaraktan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						25.452.500,00							29.252.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	25.452.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	29.252.500,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.537.900,00							31.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	25.537.900,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	31.000.000,00	Kecamatan Warungpring
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.000.000,00							13.000.000,00	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		-	100 %	6.000.000,00						-	13.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4.000.000,00					-		7.000.000,00	
		-						4.000.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	4.000.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		6 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-		-	2.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-		4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Warungpring
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						46.969.618,00							58.000.000,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	46.969.618,00						-	58.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						46.969.618,00					-		58.000.000,00	
		-						46.969.618,00					-		58.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	15.966.650,00						-	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.002.968,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	30.000.000,00						-	32.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						30.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	700 Orang	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	32.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1.002.968,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Laporan	1.002.968,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						15.966.650,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-		6 Dokumen	15.966.650,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	21.000.000,00	Kecamatan Warungpring
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12.700.000,00							23.400.000,00	
			Jumlah desa yang naik statusnya	-	-		6 Desa	8.700.000,00						-	17.400.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.700.000,00					-		23.400.000,00	
		-						12.700.000,00					-		23.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-		-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-		-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-		-	1.200.000,00						-	3.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-		-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-		-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-		-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-		-	1.500.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-		-	1.000.000,00						-	200.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.000.000,00							200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	200.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.500.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1.200.000,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	6 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.200.000,00	Kecamatan Warungpring

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Warungpring
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						1.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Warungpring
	J U M L A H							2.873.368.200,00							3.143.229.650,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MOGA KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Moga						2.396.024.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.396.024.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.396.024.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.184.524.000,00							0,00	
			-	-		-	-	2.159.024.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.500.000,00					-		0,00	
		-						10.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.941.432.000,00					-		0,00	
		-						1.941.432.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.938.432.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.938.432.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 Orang/bulan	1.938.432.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	17 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						73.948.500,00					-		0,00	
		-						73.948.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.977.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.471.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.977.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.977.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.471.500,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	6 Paket	2.471.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	24.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	55 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.592.000,00					-		0,00	
		-						109.592.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	25.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	82.092.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	25.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						82.092.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	82.092.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.051.500,00					-		0,00	
		-						49.051.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	8.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	33.051.500,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.051.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	33.051.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Pemalang	-	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.500.000,00							0,00	
			-	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					-		0,00	
		-						2.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.500.000,00					-		0,00	
		-						6.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00					-		0,00	
		-						2.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						60.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						60.000.000,00					-		0,00	
		-						60.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						40.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	10 Lembaga Kemasyaraka tan	40.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.000.000,00					-		0,00	
		-						5.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-		1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang	-	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	0,00	Kecamatan Moga
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						94.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	94.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						94.000.000,00					-		0,00	
		-						94.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	450 Orang	75.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	20 Orang	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						12.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	0,00	Kecamatan Moga
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						42.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	35.500.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42.000.000,00					-		0,00	
		-						42.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	7.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	0,00	Kecamatan Moga
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P7. Penguatan penangana n kemiskinan		-	0,00	Kecamatan Moga
	J U M L A H							2.396.024.000,00							0,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PULOSARI KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Pulosari						2.560.177.400,00							2.999.135.900,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.560.177.400,00							2.999.135.900,00	
	7.01	KECAMATAN						2.560.177.400,00							2.999.135.900,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.279.043.600,00							2.466.512.900,00	
			Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	-		-	100 %	24.112.800,00						-	32.000.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	-		-	100 %	2.251.280.800,00						-	2.362.512.900,00	
			-	-		-	-	3.650.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.112.800,00					Laporan/Dokume n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi		35.000.000,00	
		-						24.112.800,00					Laporan/Dokume n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi		35.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.299.800,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.250.400,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	999.800,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-		1.270.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-		1.880.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-		4.719.800,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		3.193.000,00						-	3.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.250.400,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen		7.250.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	11.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.880.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen		1.880.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.270.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.270.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.299.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.299.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						999.800,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	999.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.719.800,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	17 Laporan	4.719.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.193.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.193.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.500.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	3.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.980.600.000,00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi			
		-						1.980.600.000,00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	700.200,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.199.800,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	3.913.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.973.787.000,00						-	1.973.787.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.973.787.000,00							1.973.787.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	18 Orang/bulan	1.973.787.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.973.787.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.199.800,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	2.199.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.913.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	12 Laporan	3.913.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						700.200,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 Dokumen	700.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.650.000,00					-		35.000.000,00	
		-						3.650.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	3.650.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3.650.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	25 Orang	3.650.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						59.812.460,00					Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi		138.235.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						59.812.460,00					Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi		138.235.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.680.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	20.140.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.447.260,00						-	89.235.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.715.400,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.829.800,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.829.800,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.829.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.447.260,00							89.235.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.447.260,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	89.235.500,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.715.400,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	8 Paket	4.715.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	17.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.680.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.140.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	70 Laporan	20.140.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.500.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.000.000,00	
		-						5.500.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.790.400,00					Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		144.990.400,00	
		-						139.790.400,00					Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		144.990.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.400.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	109.990.400,00						-	109.990.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.400.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.400.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	35 Laporan	3.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.400.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	26.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	30.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						109.990.400,00							109.990.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	109.990.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	109.990.400,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.577.940,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		114.000.000,00	
		-						65.577.940,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		114.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.318.875,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	54.720.215,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.280.350,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.258.500,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						54.720.215,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	54.720.215,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	80.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.280.350,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	3 Unit	1.280.350,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.258.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	4.258.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.318.875,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	5.318.875,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Pulosari
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						21.135.800,00							46.500.000,00	
			Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	100 %	21.135.800,00						-	43.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.874.600,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						4.874.600,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	3.649.600,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.225.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.225.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	1.225.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.649.600,00							8.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	4 Dokumen	3.649.600,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	8.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						14.199.400,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		25.500.000,00	
		-						14.199.400,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		25.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-		1.300.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-		12.899.400,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.300.000,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	1 Dokumen		1.300.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.500.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12.899.400,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	4 Laporan		12.899.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.061.800,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		6.000.000,00	
		-						2.061.800,00					Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	1.032.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	1.029.800,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.029.800,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	4 Laporan	1.029.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.032.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	4 Laporan	1.032.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						90.392.800,00							116.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif	-		-	95,39 %	88.592.800,00						-	86.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.725.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		40.000.000,00	
		-						25.725.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	23.325.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.400.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						23.325.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	23.325.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	35.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.400.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						18.457.000,00					Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Desa		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						18.457.000,00					Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Desa		30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	13.457.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						13.457.000,00							15.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.457.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						46.210.800,00					Keluarga Pra sejahtera, Keluarga dengan balita, remaja, dan lansia, Perempuan kepala keluarga, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, Kader Posyandu, Kader kesehatan masyarakatDesa		46.500.000,00	
		-						46.210.800,00					Keluarga Pra sejahtera, Keluarga dengan balita, remaja, dan lansia, Perempuan kepala keluarga, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, Kader Posyandu, Kader kesehatan masyarakatDesa		46.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-		-	18.610.800,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-		-	24.000.000,00						-	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	1.800.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	1.800.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						1.800.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	20 Keluarga	1.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						24.000.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-		20 Keluarga	24.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.500.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						1.800.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-		20 Keluarga	1.800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						18.610.800,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-		60 Keluarga	18.610.800,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P.8 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	25.000.000,00	Kecamatan Pulosari
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.000.000,00							20.000.000,00	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pemerintah Desa, Satlinmas, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Usaha		20.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pemerintah Desa, Satlinmas, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Usaha		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-		5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-		5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-		4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Pulosari
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						89.908.000,00							233.623.000,00	
			Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani	-		-	100 %	89.908.000,00						-	233.623.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.908.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pemerintah Desa, Satlinmas, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Usaha		233.623.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						89.908.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pemerintah Desa, Satlinmas, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Usaha		233.623.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	29.248.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	60.660.000,00						-	203.623.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						60.660.000,00							203.623.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	150 Orang	60.660.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9, Penguatan tata kelola pemerintahan		-	203.623.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						29.248.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	29.248.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.000.000,00	Kecamatan Pulosari
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						69.697.200,00							116.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Naik Statusnya (Desa)	-		-	4 Desa	65.697.200,00						-	64.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						69.697.200,00					Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa		116.000.000,00	
		-						69.697.200,00					Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa		116.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	-	2.400.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	7.980.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-		-	-	800.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	9.600.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	2.600.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	4.200.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	800.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	7.950.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	3.607.200,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	10.860.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	6.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	9.700.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	2.400.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	800.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						9.700.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	12 Dokumen	9.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						10.860.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Dokumen	10.860.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						6.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						9.600.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	12 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						7.980.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	6 Dokumen	7.980.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	15.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						7.950.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	2 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						3.607.200,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	12 Dokumen	3.607.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	0,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						800.000,00							5.000.000,00	
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						800.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-		-	2 Dokumen	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						2.600.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	12 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						2.400.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						4.200.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						800.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	12 Laporan	800.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.000.000,00	Kecamatan Pulosari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						2.400.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.000.000,00	Kecamatan Pulosari
	J U M L A H							2.560.177.400,00							2.999.135.900,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BELIK KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Belik						2.709.051.000,00							3.085.385.447,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.709.051.000,00							3.085.385.447,00	
	7.01	KECAMATAN						2.709.051.000,00							3.085.385.447,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.609.040.500,00							2.978.053.297,00	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	191.407.200,00						-	244.253.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	7.832.000,00						-	13.050.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan,Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai regulasi	-		-	100 %	8.156.000,00						-	20.201.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	-		-	100 %	2.400.630.300,00						-	2.697.549.297,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.171.000,00					Kecamatan Belik		23.201.000,00	
		-						9.171.000,00					Kecamatan Belik		23.201.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.012.000,00						-	3.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.090.000,00						-	4.361.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.015.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.015.000,00						-	3.250.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.025.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.010.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.004.000,00						-	3.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.090.000,00							4.361.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.090.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.361.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.025.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.025.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.015.000,00							3.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.015.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.250.000,00	Kecamatan Belik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.012.000,00							3.590.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.012.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.590.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.015.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.015.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.010.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	1.010.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.004.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.004.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.227.832.000,00					Kecamatan Belik		2.396.592.297,00	
		-						2.227.832.000,00					Kecamatan Belik		2.396.592.297,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.015.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	3.013.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.004.000,00						-	4.150.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.001.000,00						-	9.048.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.215.799.000,00						-	2.377.394.297,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.215.799.000,00							2.377.394.297,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	2.215.799.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.377.394.297,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.013.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	3.013.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.004.000,00							4.150.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.004.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.150.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.001.000,00							9.048.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	5.001.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	9.048.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.015.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.015.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.823.000,00					Kecamatan Belik		10.050.000,00	
		-						4.823.000,00					Kecamatan Belik		10.050.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.514.000,00						-	3.950.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.507.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.802.000,00						-	2.800.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.802.000,00							2.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	1.802.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.800.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.507.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	1.507.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.300.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.514.000,00							3.950.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.514.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.950.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.009.000,00					Kecamatan Belik		3.000.000,00	
		-						3.009.000,00					Kecamatan Belik		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	3.009.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						3.009.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	27 Orang	3.009.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pg. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						191.407.200,00					Kecamatan Belik		244.253.000,00	
		-						191.407.200,00					Kecamatan Belik		244.253.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	70.700.000,00						-	80.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	99.376.200,00						-	146.355.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.492.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.986.000,00						-	5.998.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.853.000,00						-	3.700.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.986.000,00							5.998.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.986.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.998.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.853.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.853.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.700.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						99.376.200,00							146.355.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	99.376.200,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	146.355.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.492.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		2 Paket	13.492.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.700.000,00							80.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-		200 Laporan	70.700.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	80.700.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.252.000,00					Kecamatan Belik		161.334.000,00	
		-						123.252.000,00					Kecamatan Belik		161.334.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-		-	20.760.000,00						-	2.076.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		-	97.492.000,00						-	141.858.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		-	5.000.000,00						-	17.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							17.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	50 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	17.400.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.760.000,00							2.076.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	20.760.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.076.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.492.000,00							141.858.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	97.492.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	141.858.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.546.300,00					Kecamatan Belik		139.623.000,00	
		-						49.546.300,00					Kecamatan Belik		139.623.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	19.819.500,00						-	100.333.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	19.784.300,00						-	22.760.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.947.500,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.995.000,00						-	10.030.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						19.784.300,00							22.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	16 Unit	19.784.300,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	22.760.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.947.500,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	4.947.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.995.000,00							10.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-		12 Unit	4.995.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	10.030.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.819.500,00							100.333.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		3 Unit	19.819.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	100.333.000,00	Kecamatan Belik
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.150.000,00							13.562.000,00	
			Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-	-		100 %	5.060.000,00						-	12.562.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.040.000,00					Kecamatan Belik		7.842.000,00	
		-						4.040.000,00					Kecamatan Belik		7.842.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	2.030.000,00						-	5.800.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-		-	2.010.000,00						-	2.042.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.010.000,00							2.042.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	2.010.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.042.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.030.000,00							5.800.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	12 Dokumen	2.030.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.800.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.060.000,00					Kecamatan Belik		2.822.000,00	
		-						3.060.000,00					Kecamatan Belik		2.822.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	1.020.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.020.000,00						-	822.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.020.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.020.000,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.020.000,00							822.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	822.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.020.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	8 Laporan	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.050.000,00					Kecamatan Belik		2.898.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						3.050.000,00					Kecamatan Belik		2.898.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	1.020.000,00						-	898.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	2.030.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.030.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	12 Laporan	2.030.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pg. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.020.000,00							898.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	4 Laporan	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pg. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	898.000,00	Kecamatan Belik
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						29.086.500,00							29.593.000,00	
			Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang aktif	-		-	100 %	29.086.500,00						-	29.593.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.066.500,00					Kecamatan Belik		28.593.000,00	
		-						28.066.500,00					Kecamatan Belik		28.593.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-		21.070.500,00						-	20.593.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-		4.976.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-		2.020.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.020.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	6 Lembaga Kemasyarakatan		2.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						21.070.500,00							20.593.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	1 Dokumen		21.070.500,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	20.593.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.976.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	1 Laporan	4.976.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1.020.000,00					Kecamatan Belik		1.000.000,00	
		-						1.020.000,00					Kecamatan Belik		1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	1.020.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.020.000,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.000.000,00	Kecamatan Belik
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.075.000,00							2.990.000,00	
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	-		-	100 %	2.075.000,00						-	2.990.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.075.000,00					Kecamatan Belik		2.990.000,00	
		-						2.075.000,00					Kecamatan Belik		2.990.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.075.000,00						-	2.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.075.000,00							2.990.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.075.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	pg. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.990.000,00	Kecamatan Belik
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						37.225.000,00							38.100.000,00	
			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	-		-	100 %	37.225.000,00						-	38.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						37.225.000,00					Kecamatan Belik		38.100.000,00	
		-						37.225.000,00					Kecamatan Belik		38.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	7.200.000,00						-	7.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	30.025.000,00						-	30.900.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						30.025.000,00							30.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-		300 Orang	30.025.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	30.900.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.200.000,00							7.200.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-		4 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	7.200.000,00	Kecamatan Belik
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						21.474.000,00							23.087.150,00	
			Jumlah Desa yang naik statusnya	-		-	2 desa	19.954.000,00						-	23.087.150,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						21.474.000,00					Kecamatan Belik		23.087.150,00	
		-						21.474.000,00					Kecamatan Belik		23.087.150,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	1.065.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	1.575.000,00						-	1.522.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	1.520.000,00						-	1.253.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	1.520.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	2.530.000,00						-	2.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	4.189.000,00						-	4.200.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.027.000,00						-	3.532.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.014.000,00						-	3.428.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	2.014.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	2.020.000,00						-	1.971.400,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.014.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	13 Dokumen	2.014.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.027.000,00							3.532.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	13 Dokumen	2.027.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.532.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.014.000,00							3.428.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	13 Dokumen	3.014.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	3.428.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan						2.020.000,00							1.971.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Laporan	2.020.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.971.400,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1.575.000,00							1.522.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	2 Dokumen	1.575.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.522.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.065.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	1.065.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.200.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						4.189.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	4.189.000,00	Kab. Pemalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	4.200.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.520.000,00							1.253.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	13 Dokumen	1.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.253.750,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1.520.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	13 Dokumen	1.520.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.500.000,00	Kecamatan Belik
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						2.530.000,00							2.480.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	13 Dokumen	2.530.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.480.000,00	Kecamatan Belik
	J U M L A H							2.709.051.000,00							3.085.385.447,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WATUKUMPUL KAB. PEMALANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Watukumpul						2.531.415.400,00							2.948.373.400,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.531.415.400,00							2.948.373.400,00	
	7.01	KECAMATAN						2.531.415.400,00							2.948.373.400,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.352.462.400,00							2.744.599.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	-		-	100 %	2.031.720.000,00						-	2.259.505.000,00	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	-		-	100 %	319.742.400,00						-	418.194.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.125.000,00					Kecamatan Watukumpul		11.400.000,00	
		-						10.125.000,00					Kecamatan Watukumpul		11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.335.000,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.670.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.280.000,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.635.000,00						-	1.700.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.770.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.435.000,00						-	1.700.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.670.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.670.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.800.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.635.000,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.635.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.700.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.280.000,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.280.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.400.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.335.000,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.335.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.400.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.400.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.770.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.770.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.435.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.435.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	1.700.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.021.595.000,00					Kecamatan Watukumpul		2.254.005.000,00	
		-						2.021.595.000,00					Kecamatan Watukumpul		2.254.005.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.870.000,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.019.725.000,00						-	2.252.605.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.019.725.000,00							2.252.605.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20/14 Orang/bulan	2.019.725.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.252.605.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.870.000,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.870.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.400.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.240.000,00					Kecamatan Watukumpul		2.000.000,00	
		-						1.240.000,00					Kecamatan Watukumpul		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.240.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.240.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	1.240.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	2.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.624.000,00					Kecamatan Watukumpul		130.032.000,00	
		-						76.624.000,00					Kecamatan Watukumpul		130.032.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	46.631.000,00						-	50.310.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.900.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	9.222.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.053.000,00						-	9.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.040.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.053.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.053.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	9.500.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.040.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	9 Paket	9.040.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	6.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	9 Paket	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	15.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.900.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	9.900.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	35.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							9.222.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	6 Paket	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	9.222.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						46.631.000,00							50.310.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	46.631.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	50.310.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	5.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34.410.000,00					Kecamatan Watukumpul		25.000.000,00	
		-						34.410.000,00					Kecamatan Watukumpul		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	34.410.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.410.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	34.410.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.690.400,00					Kecamatan Watukumpul		204.382.000,00	
		-						138.690.400,00					Kecamatan Watukumpul		204.382.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	114.190.400,00						-	173.382.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	36 Laporan	22.500.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	25.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						114.190.400,00							173.382.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	14 Laporan	114.190.400,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	173.382.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.778.000,00					Kecamatan Watukumpul		117.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						69.778.000,00					Kecamatan Watukumpul		117.780.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	14.938.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	48.280.000,00						-	47.780.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.560.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.280.000,00							47.780.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	48.280.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	47.780.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	15.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.560.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	5.560.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	15.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.938.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	14.938.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	40.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						18.000.000,00							21.237.200,00	
			Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	-		-	70,00 %	12.000.000,00						-	21.237.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.561.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						10.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.561.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	5.561.400,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00							5.561.400,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.561.400,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		10.675.800,00	
		-						6.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		10.675.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.270.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.275.800,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	3.130.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.000.000,00							2.270.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	2.270.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							5.275.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	5.275.800,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							3.130.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta n		-	3.130.000,00	Kecamatan Watukumpul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						57.783.000,00							51.768.500,00	
			Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif	-		-	100 %	57.783.000,00						-	51.768.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						57.783.000,00					Kecamatan Watukumpul		51.768.500,00	
		-						57.783.000,00					Kecamatan Watukumpul		51.768.500,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	27.783.000,00						-	27.700.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	25.000.000,00						-	19.918.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	4.150.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5.000.000,00							4.150.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	15 Lembaga Kemasyaraka tan	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.150.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						27.783.000,00							27.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-		1 Dokumen	27.783.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	27.700.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000,00							19.918.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-		4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	19.918.500,00	Kecamatan Watukumpul
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11.000.000,00							17.715.000,00	
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	-		100 %	11.000.000,00						-	17.715.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		12.525.000,00	
		-						8.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		12.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		-	8.000.000,00						-	12.525.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.000.000,00							12.525.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerinta h n		-	12.525.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						3.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.190.000,00	
		-						3.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		5.190.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-		-	3.000.000,00						-	5.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						3.000.000,00							5.190.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	5.190.000,00	Kecamatan Watukumpul
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						65.170.000,00							36.266.400,00	
			Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani	-		-	100 %	65.170.000,00						-	36.266.400,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						65.170.000,00					Kecamatan Watukumpul		36.266.400,00	
		-						65.170.000,00					Kecamatan Watukumpul		36.266.400,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	4.000.000,00						-	1.785.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	51.170.000,00						-	28.481.400,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						51.170.000,00							28.481.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	200 Orang	51.170.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	28.481.400,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						4.000.000,00							1.785.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	30 Orang	4.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	1.785.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola pemerintahan		-	6.000.000,00	Kecamatan Watukumpul
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						27.000.000,00							76.787.300,00	
			Jumlah Desa yang Naik Statusnya	-		-	2 Desa	7.000.000,00						-	76.787.300,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		76.787.300,00	
		-						27.000.000,00					Kecamatan Watukumpul		76.787.300,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	6.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	2.000.000,00						-	7.095.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	8.115.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	-	2.000.000,00						-	8.410.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	5.000.000,00						-	10.415.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	2.000.000,00						-	10.011.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	5.000.000,00						-	14.632.800,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	2.000.000,00						-	6.983.500,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.000.000,00							6.983.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	6.983.500,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.000.000,00							10.011.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	10.011.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							14.632.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	14.632.800,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						2.000.000,00							6.625.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	6.625.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintaha n		-	4.500.000,00	Kecamatan Watukumpul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							8.410.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.410.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5.000.000,00							10.415.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	10.415.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						2.000.000,00							7.095.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	7.095.000,00	Kecamatan Watukumpul
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						5.000.000,00							8.115.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P9. Penguatan tata kelola p emerintahan		-	8.115.000,00	Kecamatan Watukumpul
	J U M L A H							2.531.415.400,00							2.948.373.400,00	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2027 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Selain IKU dan IKK, perlu ditetapkan juga panduan dalam pencapaian pemenuhan SPM tahunan.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Tahun 2025, IKU Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah untuk Tahun 2027 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah
Beserta Target Tahun 2027

No	IKU Pemerintah Kabupaten	Satuan	Target RPJMD Tahun 2027	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2027
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,87	76,87
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,00	84,00
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,82	3,82
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,60-6,99	5,90-7,75*
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,10	71,10
6	Tingkat Kemiskinan	%	13,63-13,54	12,20 - 11,82*
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05 – 5,75	6,05 - 5,75

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
* Hasil Rakortekbang tahun 2026

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2027, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, IKU perangkat daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang Beserta Target Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,81	81,49	81,30	
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	6,31	8,95	5,80	*
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	23,95	28,51	35,51	*
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	66,81	76,78	76,87	*
5.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	54,13	55,77	58,57	*
6.	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,38	29,8	35,82	*
7.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	16.513	209.123,35	1.715.435,101	
8.	Indeks Resiko Bencana	angka	105,46	105,46	98,83-96,78	*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
9.	Tingkat Kemiskinan	%	14,92	14,31 - 13,64	12,20 - 11,82	*
10.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	22,63	22,55-22,70	32,55 - 42,02	*
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,63	6,19-5,89	6,05-5,75	*
12.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,93	20,66-20,86	20,96-21,16	
13.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,5	75,00	*
14.	Prevalensi Stunting	%	10,33	10,2	18,50	*
15.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	10	10	10	*
16.	Angka Kematian Balita	Kasus	123	118	116	
17.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	76,50	90,00	91,00	*
18.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,77	90	94,00	*
19.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,56	7,9	8,12	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,8	13,10	
21.	Angka Literasi/Numerasi					
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	62,24	64,74	69,74	*
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	70,83	71,93	74,13	*
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	55,89	58,79	64,59	*
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	62,31	63,81	66,81	*
22.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	84,53	87,5	93,01	
23.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	Na	5,72	6,19	
24.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	2,5	2,6	3,16	
25.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota	%	64,58	65,82	68,39	*
26.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,8	98,9	99,1	*
27.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	
28.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	17,59	21,76	23,98	
29.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	38	41	47	
30.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	85.762	85.812	85.912	
31.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,38	0,400-0,390	0,344-0,338	*
32.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	angka	62,77	63,6-64,81	65,05-65,1	*
33.	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,56	0,59	0,65	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
34.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,09	58,19	61,07	*
35.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,00	2,22	2,26	
36.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	75,01	77,46	82,71	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
37.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	5,78	5,78	6,20	*
38.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	22,51	23,28	23,78	*
39.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	19	13	22	*
40.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,41	7,47	3,33	*
41.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,56	4,19	1,89	*
42.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	10,69	11,55	11,80	*
43.	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	17,50	11,55	17,83	*
44.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,83	1,19	2,48	*
45.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	14,11	13,63	14,25	*
46.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	75,05	77,29	80,29	
47.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	66,34	66,64	67,12	
48.	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	51,77	54	56,26	
49.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	32,13	69,48	72,64	*
50.	Persentase Desa Mandiri	%	24,53	24,76	25,94	*
51.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,35	0,71	0,70	*
52.	Disparitas Harga	%	0,05	± 10	± 10	
53.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,76	4,80	4,28	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
54.	Indeks Reformasi Hukum	%	96,72	96,75	96,83	*
55.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,04	3	3,15	
56.	Indeks Pelayanan Publik	%	4,54	4,55	4,66	*
57.	Indeks Integritas Nasional		69,09	69,97	72,00	*
58.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,33	77,33	84,00	
59.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
URUSAN PENDIDIKAN						
60.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	71,45	87,5	93,01	
61.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,32	99,18	99,45	
62.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	82,37	90,44	93,63	
63.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%			28,81	
URUSAN KESEHATAN						
64.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,73	0,73	0,74	
65.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	
66.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	99,9	100	100	
67.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96,2	100	100	
68.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	
69.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	
70.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
71.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,2	100	100	
72.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,8	100	100	
73.	Persentase penderita hipertensi yang	%	98,3	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
74.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
75.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	
76.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	94,6	100	100	
77.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,6	100	100	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
78.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	14,93	15	16,00	
79.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,45	0,5	0,70	
80.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	70,84	71	72,00	
81.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	88,48	88,8	89,85	
82.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,27	97,5	98,50	
83.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	71,43	74,29	82,86	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
84.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	75,05	77,29	80,29	
85.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	1,32	16	21,00	
86.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	70	80	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
87.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
88.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	
89.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	31,2	31,4	31,72	
90.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	67,87	30,52	27,36	
91.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	27,52	34,86	44,04	
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
92.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
93.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
94.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	
95.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	
96.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	
97.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	75	79,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
98.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	
URUSAN SOSIAL						
99.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
100.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	
URUSAN TENAGA KERJA						
101.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	
102.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,49	1,18	2,78	
103.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp (juta)/oran g	27,13	27,39	27,92	
104.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,26	100	100	
105.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,74	72,43	73,83	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK						
106.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,4	5,6	5,6	
107.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	
108.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 pddk perempuan	0,02	0,2	0,02	
PANGAN						
109.	Persentase Cadangan Pangan	%	11,91	7,58	7,58	
URUSAN PERTANAHAN						
110.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai	%	78,5	80	81	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
	dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
111.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	
112.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%			50	Bukan kewenangan
113.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%			75	Bukan kewenangan
114.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%			100	5 tahun kedepan tidak dilaksanakan
115.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	78,5	80	81	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
116.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	66,81	76,78	76,87	
117.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	85,97	86,47	87,47	
118.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	29	65	65	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
119.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,95	99,91	99,93	
120.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,88	60	64,00	
121.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,09	99,2	99,40	
122.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	71,79	73	80,00	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
123.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
124.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	47,17	50,66	57,89	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
125.	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,18	2,12	2,10	
126.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,75	70,75	70,95	
127.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,78	9,68	9,48	
URUSAN PERHUBUNGAN						
128.	Rasio konektivitas	indeks	71,42	71,72	72,32	
129.	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	rasio	0,38	0,38	0,36	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
130.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100%	100	
131.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	83	37	51	
132.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	30	34	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
133.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	228,29	0,84	0,88	
134.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	22,39	32,22	33,22	
URUSAN PENANAMAN MODAL						
135.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	11,67	12	12,50	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
136.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,03	0,035	0,045	
137.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	52,61	38,66	38,72	
138.	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	52	60	62	
URUSAN STATISTIK						
139.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data	%	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
140.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	
URUSAN PERSANDIAN						
141.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34	34	36	
URUSAN KEBUDAYAAN						
142.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0,3	0,3	0,3	
URUSAN PERPUSTAKAAN						
143.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	65,25	65,4	67,90	
144.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	9,49 (45,12)	53	57,80	
URUSAN KEARSIPAN						
145.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	67,82	70,44	75,68	
146.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	33,34	16,67	36,70	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
147.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	36.950	37.690	39.213	
URUSAN PARIWISATA						
148.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	90	10	20	
149.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	0,78	0,86	1,02	
150.	Tingkat hunian akomodasi	%	34,69	35	36,00	
151.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,78	5,8	6,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
152.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,39	1,45	1,49	
URUSAN PERTANIAN						
153.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
	padi	kw/ha	62,09	62,15	62,28	
	kopi	ton/hektar	1,331	1,5	1,9	
154.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	15	6	6	
URUSAN PERDAGANGAN						
155.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	
156.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	
157.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	7,87	7,87	8,43	
URUSAN PERINDUSTRIAN						
158.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	6,43	6,48	6,60	
159.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	46,7	46,8	47,0	
160.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	10	10	
161.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	
162.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%	NA	NA	NA	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
163.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	125	125	125	
URUSAN KEUANGAN						
164.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	24,94	24,5	24,00	
165.	Rasio PAD	%	14,166	18,909	20	
166.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	71,44	71,25	70,75	
167.	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	
168.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,86	-6	-5,00	
169.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-7,84	5	2	
170.	Assets Management	%	100	100	100	
171.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	11	10,5	9,5	
172.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	86,47	86,5	87,50	
173.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	
URUSAN KEPEGAWAIAN;						
174.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	44,89	45,29	46,09	
175.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,67	14,17	15,17	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja RKPD Tahun 2027	Ket.
			2024 (R)	2025 (T)		
176.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,94	23,44	24,44	
INSPEKTORAT						
177.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	2,94	3,05	2,965	
178.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3	3	3	
SEKRETARIAT DAERAH						
179.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	
180.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,96	52	56	
181.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	55,5	58	66	
182.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	69,8	70	74	

*) Indikator Utama Pembangunan (IUP)

6.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang Tengah tahun 2027. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Beserta Target Tahun 2027

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Pendidikan			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS PAUD	%	93,01
	APS SD	%	99,45
	APS SMP	%	93,63
	APS Kesetaraan (7-18 tahun)	%	28,81

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru (Redistribusi guru)	%	94
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	85
Kesehatan			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	50
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	98
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	74,5
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	%	94
	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100
	Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV)	%	75
	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	61
	Indeks SPM Kesehatan Keluarga	Indeks	99,5
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	%	75
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Kesehatan sesuai Standar	%	89
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Per 100,000 Penduduk	258
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100
	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan	%	71
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	80,29
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik	%	29,57
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	16
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	07

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	56,24
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	89,55
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,51
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,5
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	58,57
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	76,76
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	80
	Rasio Kepatuhan PBG	%	82,86
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	70
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar	%	36,21
Perumahan Rakyat Dan Permukiman			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	31,72
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani	%	71,64
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	44,04
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kasus kebakaran	%	38
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi	%	100
	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi	%	100
Sosial			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina	%	100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	%	69
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100
	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	%	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
	setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Tenaga Kerja			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,78
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	73,83
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,5
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,02
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	45
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	OPD yang memiliki data gender	%	95,77
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	51,12
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100
Pangan			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	%	7,58
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/kapita/hari	2100
	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/kapita/hari	57
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,07

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	94
Pertanahan			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	81
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah Fasilitas Pengadaan Tanah dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kab/Kota	%	100
Lingkungan Hidup			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen perencanaan LH yang disusun	%	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	58,33
	Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	54,17
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	43,101
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	%	30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	unit	55
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	35,82
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	%	99,92
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	99,54
	Kepemilikan identitas kependudukan digital	%	20
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,3
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	80
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data profil kependudukan yang disusun	%	100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks infrastruktur desa	Indeks	5,81
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerja sama	%	18,39
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Tata Kelola desa	%	9,3
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang aktif (PKK, LPMK/LPMD, RT/RW, Posyandu, Karang Taruna).	%	6,89
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	16,1
	Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%	100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,95
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,48
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	100
Perhubungan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	67,12
	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,82
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	68
	Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR	%	79
Komunikasi dan Informatika			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	34
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	51
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Verifikasi syarat usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	39,7
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	35,2
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	21,34
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0,88
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	%	2,22
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	170,5
Penanaman Modal			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	%	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	%	100
Kepemudaan dan Olahraga			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	54,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	60,53
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	100
Statistik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
Persandian			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	36
Kebudayaan			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	31,34

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dibina	%	10,53
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	orang	85.912
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	0,76
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	0,08
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum	orang	4
Perpustakaan			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terstandarisasi	%	15
	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	67,9
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan	naskah	1
Kearsipan			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,68
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Kelautan dan Perikanan			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi produksi perikanan tangkap	Ton/Tahun	18.069
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton/Tahun	20.529
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi	%	2,79
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton/Tahun	12.739
Pariwisata			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	1.192.242
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pengunjung media promosi online dan offline	Orang	24.356
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan mendaftarkan HAKI	%	50
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan	%	31

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
Pertanian			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan	Ton	605.785
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	303.426
	Produksi Komoditas Perkebunan (bidang Perkebunan)	Ton	1.156
	Populasi ternak	Ekor	3.938.245
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT)	%	23,73
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	11,24
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman pangan	%	50
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani utama	%	0,27
Perdagangan			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	%	6,25
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100
	Disparitas Harga	%	<10
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	48,15
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	8,72
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	52
Perindustrian			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri terbina	%	15
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	125
Transmigrasi			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	14,3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
UNSUR PENDUKUNG			
Sekretariat Daerah			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	82,5
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	97,5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja Bidang Administrasi Umum	Nilai	56,95
Sekretariat DPRD			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	%	100
	Persentase dokumen daerah yang dibahas	%	100
	Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	100
UNSUR PENUNJANG			
Perencanaan			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi	%	100
	Persentase Dokumen Evaluasi yang Sesuai Regulasi	%	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
Keuangan			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100
	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100
	Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemanfaatan barang milik daerah	%	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)	%	20
	Persentase Piutang yang terbayarkan	%	10
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100
Kepegawaian			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya ASN	%	77,39
	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	99,58
	Nilai IP ASN dimensi kualifikasi	%	21,72
	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	%	21,59
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai "Baik"	%	94,99
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Menggunakan Sistem Informasi	%	92
Pendidikan dan Pelatihan			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	%	37,8
Penelitian dan Pengembangan			
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	%	100
UNSUR PENGAWAS			
Inspektorat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		95
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	100
	Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	100
UNSUR KEWILAYAHAN			
Kecamatan Comal			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Taman			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Moga			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Ampelgading			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	90,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	98,1
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	90,98
Kecamatan Bodeh			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Belik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Ulujami			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	87
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	83
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	83,33
Kecamatan Pulosari			
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	95,39
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	41,67
Kecamatan Watukumpul			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Pemalang			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%	67,25
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Randudongkal			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	99

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	98
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	97
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
Kecamatan Warungpring			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	%	100
Kecamatan Bantarbolang			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	92,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	95,12
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	96,12
Kecamatan Petarukan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100
	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Target 2027
1	2	3	4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang naik statusnya	%	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Kesatuan Bangsa dan Politik			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara	%	88,7
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	angka	77,5
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	angka	72,5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	angka	76
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks kewaspadaan nasional	angka	7,5

6.4. Indikator SPM

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemenuhan SPM merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM terdiri dari lima bidang, meliputi:

- 1. SPM bidang Pendidikan
- 2. SPM bidang Kesehatan
- 3. SPM bidang Pekerjaan Umum
- 4. SPM bidang Permukiman Rakyat
- 5. SPM bidang Sosial

Tabel 6.3.
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2027 (%)
BIDANG PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	65,05
		Skor Kemampuan Literasi SMP	71,13
		Skor Kemampuan Numerasi SD	59,18
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	64,63
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP)	98,80
		Iklim Inklusivitas SD	63,90
		Iklim Inklusivitas SMP	62,06
		Iklim Keamanan SD	76,72
		Iklim Keamanan SMP	72,70
		Iklim Kebhinekaan SD	73,55
2	Pendidikan Kesetaraan	Iklim Kebhinekaan SMP	72,31
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Kesetaraan)	29,59
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	-
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (PAUD)	63,38
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	73,14
BIDANG KESEHATAN			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
BIDANG PEKERJAAN UMUM			
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100
2	Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan layanan air limbah domestik	100
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2027 (%)
	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
BIDANG TRANTIBUMLINMAS			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kab/Kota	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
BIDANG SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100

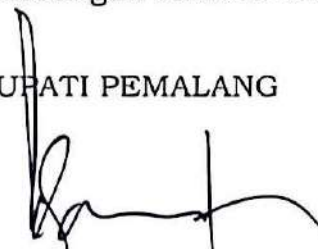
BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target Tahun 2027. RKPD tahun 2027 ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 periode I. Oleh karena itu, pelaksanaan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta dapat memperbaiki capaian kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai di periode RPJMD sebelumnya dan menjadi landasan yang kuat untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dilakukan secara simultan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dalam rangka penyamaan tahun perencanaan secara serentak. Untuk itu, daerah diharapkan mampu melaksanakan sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten. Mendasari hal tersebut maka tema yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yaitu **“Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”**.

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pemalang Tahun 2027, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, serta menjadi dasar bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Selain itu, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 juga akan menjadi acuan bagi seluruh *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Pemalang guna bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan publik yang semakin baik untuk mewujudkan visi **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”** sebagaimana yang dicita-citakan dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

BUPATI PEMALANG



ANOM WIDIYANTORO